PEMERINTAH
KOTA SAWAHLUNTO

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG :

RPJMD

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Kota Sawahlunto

TAHUN 2025 – 2029

Visi Pemerintah Kota :

SAWAHLUNTO

KOTA WISATA YANG ESTETIK,
FUTURISTIK, HIDUP
DAN MENGHIDUPI

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA SAWAHLUNTO
TAHUN 2025

SALINAN

WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);

5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 220);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 113);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
dan
WALI KOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 – 2029.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Sawahlunto.
4. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sawahlunto.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Sawahlunto.
6. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto.

7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 yang selanjutnya disebut RPJPD Tahun 2025-2045 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra-PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
12. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.

Pasal 2

RPJMD Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan Daerah yang memberikan arah sekaligus acuan bagi seluruh komponen pelaku pembangunan Daerah dalam melaksanakan program pembangunan untuk mewujudkan tujuan pembangunan yang ditetapkan.

Pasal 3

Pengaturan RPJMD Tahun 2025-2029 bertujuan untuk :

a. menetapkan strategi dan kebijakan hukum pembangunan Daerah serta merumuskan program pembangunan terpadu sinkron dan bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah;
b. menjabarkan visi misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2025-2029 dengan memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan Daerah serta indikasi kerangka pendanaan;
c. memberikan pedoman guna mewujudkan keseimbangan lingkungan sosial dan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan; dan
d. menetapkan pedoman untuk penyusunan RKPD, Renstra PD, dan rencana kerja perangkat daerah.

Pasal 4

(1) Ruang lingkup RPJMD Tahun 2025-2029 meliputi penjabaran visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan serta prioritas dan program strategis Bupati dan Wakil Bupati disertai dengan rencana kerja dalam kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
(2) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai tolok ukur dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan dan kinerja lima tahunan Pemerintah Daerah.
(3) RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
    a. bab I memuat pendahuluan;
    b. bab II memuat gambaran umum Daerah;
    c. bab III memuat visi, misi, dan program prioritas pembangunan Daerah;
    d. bab IV memuat program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
    e. bab V memuat penutup.
(4) Dokumen RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

(1) Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan pembangunan Daerah.
(2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
    a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Daerah;
    b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan Daerah; dan;
    c. evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan Daerah.
(3) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan Daerah.
(4) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah dapat melakukan perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
(2) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
    a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;

b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
c. terjadi perubahan yang mendasar.

(3) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJMD Tahun 2025-2029 kurang dari 3 (tiga) tahun.

(4) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, meliputi terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 19 Agustus 2025

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

19 AUG 2025
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 19 Agustus 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO PROVINSI SUMATERA BARAT: (1 / 45 /2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 – 2029

I. UMUM

Sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai penjabaran visi, misi dan program Kepala Daerah.

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dimaksudkan untuk dapat memayungi dan sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, rencana strategis perangkat daerah, dan rencana kerja perangkat daerah, serta penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, agar kegiatan pembangunan daerah Tahun 2025-2029 dapat bersinergi dengan pembangunan nasional dan pembangunan Provinsi Sumatera Barat serta menampung kondisi dan karakteristik Daerah.

Adapun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 berisi arah kebijakan umum, program prioritas pembangunan daerah yang disertai kerangka kebutuhan pendanaan dan penetapan indikator daerah yang merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dalam merumuskan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang terpadu yang akan dituangkan di dalam dokumen perencanaan pembangunan periode 5 tahun dan perencanaan tahunan daerah bagi seluruh pelaksana pembangunan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR 114

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN
JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL iii

DAFTAR GRAFIK x

DAFTAR GAMBAR xi

BAB I PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG ..... I- 1
1.2. DASAR HUKUM ..... I- 3
1.3. HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA ..... I- 6
1.3.1. HUBUNGAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJPD TAHUN 2025-2045 ..... I- 6
1.3.2. HUBUNGAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJMN TAHUN 2025-2029 ..... I- 6
1.3.3. HUBUNGAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029 ..... I- 6
1.3.4 HUBUNGAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2012-2032 ..... I- 7
1.3.5 HUBUNGAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) KOTA SAWAHLUNTO ..... I- 7
1.3.6 HUBUNGAN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN RKPD DAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029 ..... I- 8
1.4. MAKSUD DAN TUJUAN ..... I- 8
1.4.1. MAKSUD ..... I- 8
1.4.2. TUJUAN ..... I- 8
1.5. SISTEMATIKA PENULISAN ..... I- 9

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ..... II- 1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI ..... II- 1
2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT ..... II- 32
2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH ..... II- 77
2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM II-111
2.1.5 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPD TAHUN 2024 ..... II-153
2.1.6 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020-2024 ..... II-145
2.1.7 CAPAIAN SDGs TAHUN 2021 – 2024 ..... II-161
2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH II-170
2.2.1 KINERJA KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2019-2024 ..... II-172
2.2.2 PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2025-2029 ..... II-197
2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS II-219
2.3.1 PERMASALAHAN PEMBANGUNAN II-219
2.3.2 ISU STRATEGIS II-239

BAB III VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
3.1 PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA SAWAHLUNTO 2025-2045 ..... III- 1
3.1.1 VISI DAN SASARAN VISI RPJPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2045 ..... III- 1
3.1.2 MISI RPJPD KOTA SAWAHLUNTO ..... III- 2
3.1.3 ARAH DAN SASARAN PEMBANGUNAN RPJPD KOTA SAWAHLUNTO ..... III- 3
3.2 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2025-2029 ..... III- 5
3.2.1 VISI RPJMN TAHUN 2025-2029 ..... III- 5
3.2.2 MISI RPJMN TAHUN 2025-2029 ..... III- 5

3.2.3 SASARAN PEMBANGUNAN RPJMN TAHUN 2025-2029 ..... III- 6
3.3 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029 ..... III- 7
3.3.1 VISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029 ..... III- 7
3.3.2 MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029 ..... III- 8
3.3.3 SASARAN PEMBANGUNAN PROVINSI SUMATERA BARAT ..... III- 9
3.4 VISI DAN MISI RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 ..... III- 9
3.4.1 VISI RPJMD TAHUN 2025-2029 ..... III- 9
3.4.2 MISI RPJMD TAHUN 2025-2029 ..... III- 11
3.4.3 TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2024-2030 ..... III- 12
3.4.4 KETERKAITAN ANTARA VISI MISI RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN RPJPD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2045 ..... III- 17
3.4.5 KETERKAITAN ANTARA VISI MISI RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 DENGAN VISI MISI RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT DAN VISI MISI RPJMN ..... III- 19
3.5 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH ..... III- 23
3.5.1 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN MENURUT TUJUAN DAN SASARAN ..... III- 23
3.5.2 PROGRAM PRIORITAS TAHUN 2025-2029 ..... III- 52
3.5.3 ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH TERHADAP FOKUS PRIORITAS RPJMN TAHUN 2025-2029 ..... III-71
3.5.4 ARAH PEMBANGUNAN WILAYAH PROVINSI SUMATERA BARAT RPJMN TAHUN 2025-2029 ..... III-113
3.5.5 STRATEGIS PEMBANGUNAN KOTA SAWAHLUNTO RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2030 ..... III-118
3.5.6 ARAH PEMBANGUNAN PENATAAN RUANG KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029 ..... III-121
3.5.7 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGELOLAAN WARISAN TAMBANG BATUBARA OMBILIN SAWAHLUNTO III-125
3.5.8 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PENGEMBANGAN GEOSITE POTENSIAL GEOPARK SAWAHLUNTO 2025–2029 ..... III-126
3.6 TEMA DAN FOKUS PEMBANGUNAN TAHUNAN 2026-2030 ..... III-130
3.7 PEMBANGUNAN RENDAH KARBON III-132

BAB IV PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH ..... IV- 1
4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH ..... IV- 39
4.2.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO IV-39
4.2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA IV-39
4.2.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH IV-43

BAB V PENUTUP
5.1 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD ..... V- 1
5.1.1 PEDOMAN TRANSISI ..... V- 1
5.1.2 KAIDAH PELAKSANAAN ..... V- 1
5.2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD ..... V- 2
5.2.1 PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPJMD ..... V- 2
5.2.2 EVALUASI AKHIR RPJMD TAHUN 2025-2029 ..... V- 3
5.3 MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... V- 3
5.4 TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO ..... V- 5
5.4.1 MEMPERKUAT TATA KELOLA PEMBANGUNAN DAN MENDORONG TRANSFORMASI DIGITAL DAERAH ..... V- 5
5.4.2 PORTAL SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO ..... V- 6
5.4.3 PORTAL SATU DATA INDONESIA KOTA SAWAHLUNTO MENDORONG REFORMASI BIROKRASI DAN TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK BERBASIS KEBUTUHAN MASYARAKAT ..... V- 6
5.5 KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ..... V- 6

LAMPIRAN
LAMPIRAN I. METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH
LAMPIRAN II. MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
LAMPIRAN III. CASCADING

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Luas Administratif Per-Kecamatan Kota Sawahlunto ..... II- 2
Tabel 2.2 Jumlah RT, RW, Dan Dusun Per Kecamatan Kota Sawahlunto ..... II- 2
Tabel 2.3 Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto ..... II- 3
Tabel 2.4 Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto ..... II- 4
Tabel 2.5 Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaan per Kecamatan Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II- 8
Tabel 2.6 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sawahlunto Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025 ..... II- 10
Tabel 2.7 Status DDDTLH Jasa Penyediaan Pangan ..... II- 11
Tabel 2.8 Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II- 12
Tabel 2.9 Prevalansi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II- 12
Tabel 2.10 Skor Pola Pangan Harapan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-13
Tabel 2.11 Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh/Kapita) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-15
Tabel 2.12 Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Tahun 2020 - 2024 ..... II-15
Tabel 2.13 Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota Tahun 2024 ..... II-16
Tabel 2.14 Capaian Air Baku Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-16
Tabel 2.15 Data Sanitasi Aman Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023-2024 ..... II-18
Tabel 2.16 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat (Persen) Tahun 2020 – 2024 ..... II-19
Tabel 2.17 Komponen Akses Sanitasi Layak Dan Akses Sanitasi Aman II-19
Tabel 2.18 Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-20
Tabel 2.19 Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-21
Tabel 2.20 Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024 ..... II-22
Tabel 2.21 Indeks Tutupan Lahan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-23
Tabel 2.22 Nilai Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-24
Tabel 2.23 Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-25
Tabel 2.24 Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-26
Tabel 2.25 Komposisi Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin II-28
Tabel 2.26 Komposisi Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2024 Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin II-29
Tabel 2.27 Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-29
Tabel 2.28 Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto (Jiwa/Km2) Tahun 2020 – 2024 ..... II-30
Tabel 2.29 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030 ..... II-30
Tabel 2.30 Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030 ..... II-31
Tabel 2.31 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur II-32
Tabel 2.32 Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha (Supply Side) Dan Jenis Pengeluaran (Demand Side) Tahun 2020 – 2024 ..... II-34
Tabel 2.33 Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-36
Tabel 2.34 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-37
Tabel 2.35 Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota Dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-37
Tabel 2.36 Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (juta rupiah/jiwa) II-40
Tabel 2.37 PDRB ADHK Per Kapita Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 (juta rupiah/jiwa) II-41

Tabel 2.38 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-43
Tabel 2.39 Tingkat Pengangguran Terbuka Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-44
Tabel 2.40 Gini Ratio Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 .. II-46
Tabel 2.41 Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-49
Tabel 2.42 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah
(RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024 ..... II-49
Tabel 2.43 Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Ribu Rupiah) Kabupaten/
Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024 ..... II-50
Tabel 2.44 Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024 ..... II-52
Tabel 2.45 Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-52
Tabel 2.46 Prevalensi Stunting Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024 ..... II-51
Tabel 2.47 Jumlah Kematian Ibu Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-53
Tabel 2.48 Angka Kematian Ibu Di Kota Sawahlunto (per 100.000 kelahiran hidup)
Tahun 2020-2024 ..... II-54
Tabel 2.49 Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
(Treatment Covarage) (%) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-55
Tabel 2.50 Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (Treatment Success Rate)
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-56
Tabel 2.51 Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kota Sawahlunto
2020-2024 ..... II-56
Tabel 2.52 Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2022-2024 ..... II-58
Tabel 2.53 Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024 ..... II-59
Tabel 2.54 Angka Literasi/Numerasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-60
Tabel 2.55 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024 ..... II-61
Tabel 2.56 Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum
Pada Asesmen Tingkat Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-62
Tabel 2.57 Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualitas Pendidikan
Tinggi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-62
Tabel 2.58 Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja
Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-63
Tabel 2.59 Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024 ..... II-64
Tabel 2.60 Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal Kota Sawahlunto Tahun
2020-2024 ..... II-65
Tabel 2.61 Kampung Moderasi Beragama Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-66
Tabel 2.62 Persentase Pelestarian Cagar Budaya Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-67
Tabel 2.63 Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (Tangible) Dan Jumlah Warisan
Budaya Tak Benda (Intangible) Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-68
Tabel 2.64 Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-69
Tabel 2.65 Capaian Indeks Penyusun IPA Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat,
Nasional Tahun 2021-2023 ..... II-70
Tabel 2.66 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat
dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-71
Tabel 2.67 IKG Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-73
Tabel 2.68 IPG Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional Tahun 2020–2024 .. II-74
Tabel 2.69 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto Tahun 2020–2024 ..... II-74
Tabel 2.70 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020-2024 ..... II-75
Tabel 2.71 Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-76
Tabel 2.72 Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) Kabupaten/Kota Se-Provinsi
Sumatera Barat Tahun 2021 – 2023 ..... II-76
Tabel 2.73 Angka Ketergantungan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-77

Tabel 2.74 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2020–2024 ..... II-79
Tabel 2.75 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024 ..... II-80
Tabel 2.76 Rasio PDRB Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-81
Tabel 2.77 Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Sawahlunto Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi Tahun 2020-2024 ..... II-82
Tabel 2.78 Rasio Kewirausahaan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-80
Tabel 2.79 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-83
Tabel 2.80 Tingkat Pertisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024 ..... II-84
Tabel 2.81 TPAK Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2020-2024 ..... II-85
Tabel 2.82 Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2.83 Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang) Tahun 2020-2024 ..... II-86
Tabel 2.84 Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-87
Tabel 2.85 Proporsi Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-88
Tabel 2.86 Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kota Sawahlunto (%) Tahun 2020-2024 ..... II-89
Tabel 2.87 Return On Asset (ROA) dari BUMD Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-90
Tabel 2.88 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-90
Tabel 2.89 Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Daerah Tempat Tinggal Tahun 2021-2024 ..... II-91
Tabel 2.90 Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Dan Informal Berdasarkan Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 ..... II-91
Tabel 2.91 Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-92
Tabel 2.92 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-93
Tabel 2.93 Indeks Masyakat Digital Indonesia Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-94
Tabel 2.94 Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-95
Tabel 2.95 Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-96
Tabel 2.96 Persentase Stabilitas Harga Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-97
Tabel 2.97 Indeks Kinerja Infrastruktur Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-97
Tabel 2.98 Indeks Layanan Infastruktur Dasar Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2.99 Indeks Konektivitas Darat Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-98
Tabel 2.100 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak Dan Terjangkau Kota Sawahlunto Tahun 2020- 2024 ..... II-98
Tabel 2.101 Empat Kriteria Pengukuran Indikator II-99
Tabel 2.102 Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-100
Tabel 2.103 Persentase Desa Mandiri Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-100
Tabel 2.104 Indeks Desa Membangun Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-101
Tabel 2.105 Status Desa di Kota Sawahlunto Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) Tahun 2020-2024 ..... II-102
Tabel 2.106 Skor Dan Status Indeks Desa Membangun Kecamatan Dan Desa di Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-103
Tabel 2.107 Perkembangan Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024 ..... II-104
Tabel 2.108 Laju Inflasi Kota Sawahlunto Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran Tahun 2020 – 2024 ..... II-107
Tabel 2.109 Total Dana Pihak Ketiga di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-108
Tabel 2.110 Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-109
Tabel 2.111 Total Kredit Dan PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-110

Tabel 2.112 Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.113 Indeks Reformasi Hukum Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-111
Tabel 2.114 Perkembangan Indeks SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024 ..... II-112
Tabel 2.115 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024 ..... II-113
Tabel 2.116 Perkembangan Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024 ..... II-114
Tabel 2.117 Perkembangan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-115
Tabel 2.118 Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2020 – 2024 ..... II-115
Tabel 2.119 Persentase Penegakan Perda Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-116
Tabel 2.120 Penilaian Capaian Aksi HAM Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-117
Tabel 2.121 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024 ..... II-117
Tabel 2.122 Angka Kriminalitas Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-118
Tabel 2.123 Penanganan Pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-119
Tabel 2.124 Perkembangan Persentase Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-119
Tabel 2.125 Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan
Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ..... II-120
Tabel 2.126 Angka Literasi/Numerasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-121
Tabel 2.127 Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-121
Tabel 2.128 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-122
Tabel 2.129 Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-122
Tabel 2.130 Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-123
Tabel 2.131 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024 ..... II-123
Tabel 2.132 Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap
Hunian Layak Dan Terjangkau Kota Sawahlunto Tahun 2020- 2024 ..... II-123
Tabel 2.133 Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024 ..... II-124
Tabel 2.134 Indeks Kesejahteraan Sosial Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ..... II-124
Tabel 2.135 Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS) Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2025 ..... II-125
Tabel 2.136 Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto Tahun 2020–2024 ..... II-126
Tabel 2.137 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto Tahun 2020–2024 ..... II-126
Tabel 2.138 Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Sawahlunto Tahun 2020–2024 ..... II-127
Tabel 2.139 Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-127
Tabel 2.140 Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-128
Tabel 2.141 Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 II-128
Tabel 2.142 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024 ..... II-129
Tabel 2.143 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi
Kependudukan Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-129
Tabel 2.144 Indeks Desa Membangun Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-130
Tabel 2.145 Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-130
Tabel 2.146 Rasio Konektivitas Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-130
Tabel 2.147 Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024 ..... II-131
Tabel 2.148 Kontribusi UMKM Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-131
Tabel 2.149 Persentase Peningkatan Investasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-132
Tabel 2.150 Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-132
Tabel 2.151 Indeks Partisipasi Olahraga Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-133
Tabel 2.152 Indeks Pembangunan Statistik Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-133
Tabel 2.153 Perkembangan Indeks SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024 ..... II-134

Tabel 2.154 Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-134
Tabel 2.155 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-135
Tabel 2.156 Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-135
Tabel 2.157 Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan Tahun 2020-2024 ..... II-136
Tabel 2.158 Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-136
Tabel 2.159 Nilai Tukar Petani Tahun 2020-2024 ..... II-137
Tabel 2.160 Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-137
Tabel 2.161 Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-137
Tabel 2.162 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-138
Tabel 2.163 Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-138
Tabel 2.164 Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-139
Tabel 2.165 Opini BPK Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-139
Tabel 2.166 Indeks Profesionalitas ASN Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-140
Tabel 2.167 Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-140
Tabel 2.168 Persentase Kebijakan Berbasis Bukti Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 II-141
Tabel 2.169 Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-141
Tabel 2.170 Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-142
Tabel 2.171 Indeks Harmoni Indonesia Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024 ..... II-142
Tabel 2.172 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-143
Tabel 2.173 Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Sawahlunto Tahun 2024 ..... II-146
Tabel 2.174 Capaian SPM Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ..... II-154
Tabel 2.175 Capaian SDGs Tahun 2021 – 2024 ..... II-161
Tabel 2.176 Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024 ..... II-173
Tabel 2.177 Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2020-2024 ..... II-174
Tabel 2.178 Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024 ..... II-176
Tabel 2.179 Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019 – 2024 ..... II-177
Tabel 2.180 Perkembangan Realisasi PAD, Tingkat Capaian, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Tahun 2019-2024 ..... II-178
Tabel 2.181 Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) II-179
Tabel 2.182 Perkembangan Capaian Realisasi Pendapatan Transfer Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024 ..... II-179
Tabel 2.183 Perkembangan Capaian Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024 ..... II-180
Tabel 2.184 Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024 ..... II-180
Tabel 2.185 Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024 ..... II-181
Tabel 2.186 Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi Tahun 2019-2024 ..... II-181
Tabel 2.187 Lain – lain Pendapatan yang Sah Tahun 2019-2024 ..... II-182
Tabel 2.188 Perkembangan Capaian Realisasi, Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024 ..... II-183
Tabel 2.189 Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024 ..... II-183

Tabel 2.190 Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024 ..... II-185
Tabel 2.191 Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024 ..... II-186
Tabel 2.192 Perkembangan Rasio Keuangan Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024 (%) II-187
Tabel 2.193 Perkembangan Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024 ..... II-193
Tabel 2.194 Perkembangan Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2023 ..... II-194
Tabel 2.195 Perkembangan dan Rata-rata Pertumbuhan Defisit Riil Anggaran Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024 ..... II-195
Tabel 2.196 SILPA Kota Sawahlunto TA 2019-2024 ..... II-195
Tabel 2.197 Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030 ..... II-202
Tabel 2.198 Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030 ..... II-207
Tabel 2.199 Belanja Pegawai Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030 ..... II-208
Tabel 2.200 Proyeksi Pemenuhan Belanja Infrastruktur 2026-2030 ..... II-208
Tabel 2.201 Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030 ..... II-210
Tabel 2.202 Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025- 2030 ..... II-210
Tabel 2.203 Proyeksi dan Arah Belanja Wajib dan Mengikat Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030 ..... II-211
Tabel 2.204 Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030 ..... II-212
Tabel 3.1 Sasaran Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 ..... III- 2
Tabel 3.2 Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2025-2029 Tahap I Pelaksanaan RPJPD Kota Sawahlunto ..... III- 4
Tabel 3.3 Sasaran Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ..... III- 10
Tabel 3.4 Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ..... III- 11
Tabel 3.5 Penjabaran Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ..... III- 13
Tabel 3.6 Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 dengan Sasaran Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ..... III- 18
Tabel 3.7 Penyelarasan Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 ..... III- 19
Tabel 3.8 Penyelarasan Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ..... III- 20
Tabel 3.9 Penyelarasan Sasaran Visi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ..... III- 20
Tabel 3.10 Penyelarasan Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ..... III- 21
Tabel 3.11 Penyelarasan Misi RPJMD Kota Sawahlunto dengan , RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN ..... III- 22
Tabel 3.12 Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 VISI: SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI ..... III- 23
Tabel 3.13 Arah kebijakan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ..... III- 26
Tabel 3.14 Program Prioritas Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 III- 53
Tabel 3.15 Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Penurunan Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ..... III- 72
Tabel 3.16 Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030 ..... III- 85
Tabel 3.17 Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030 ..... III- 93

Tabel 3.18 Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Penanggulangan Stunting Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030 ..... III-103
Tabel 3.19 Lokasi Prioritas dan Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029 ..... III-113
Tabel 3.20 Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang Kota Sawahlunto 2025-2045 ..... III-122
Tabel 3.21 Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Rencana Pola Ruang Kota Sawahlunto 2025-2045 ..... III-123
Tabel 3.22 Tema dan Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2026 - 2030 ..... III-131
Tabel 4.1 Program Perangkat Daerah ..... IV- 2
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Makro ..... IV- 39
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama ..... IV- 40
Tabel 4.4 Indikator Kinerja Daerah ..... IV- 44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2.1 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota SawahluntoTahun 2025 ... II-10
Grafik 2.2 Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sawahlunto Berdasarkan Kecamatan Tahun 2025 ... II-10
Grafik 2.3 Status DDDTLH Jasa Penyediaan Pangan ... II-11
Grafik 2.4 Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2024 ... II-14
Grafik 2.5 Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ... II-17
Grafik 2.6 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ... II-26
Grafik 2.7 Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ... II-33
Grafik 2.8 Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2024 (Dalam persen) ... II-33
Grafik 2.9 Kontribusi Dan Pertumbuhan Jenis Pengeluaran Kota Sawahlunto Tahun 2024 (Dalam persen) ... II-34
Grafik 2.10 Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto (Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2020–2024 ... II-35
Grafik 2.11 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ... II-36
Grafik 2.12 Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ... II-38
Grafik 2.13 Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024 ... II-40
Grafik 2.14 Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024 ... II-41
Grafik 2.15 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ... II-45
Grafik 2.16 Perkembangan Gini Ratio Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ... II-47
Grafik 2.17 IPM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia Tahun 2020 – 2024 ... II-48
Grafik 2.18 Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024 (Satuan Dalam Tahun) ... II-51
Grafik 2.19 Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ... II-57
Grafik 2.20 Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020 – 2024 ... II-59
Grafik 2.21 Indeks Ketimpangan Gender Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ... II-72
Grafik 2.22 Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 (Dalam Rp) ... II-78
Grafik 2.23 Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan Kelompok Makanan dan Non Makanan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ... II-78
Grafik 2.24 Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 ... II-81
Grafik 2.25 Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ... II-91
Grafik 2.26 Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ... II-105
Grafik 2.27 Laju Inflasi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ... II-105
Grafik 2.28 Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang Dan Kota Bukittinggi Tahun 2020-2024 ... II-106
Grafik 2.29 Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024 ... II-106
Grafik 2.30 Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ... II-108
Grafik 2.31 Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota, Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ... II-109
Grafik 2.32 Total Kredit/Dan PDRB ADHB Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 ... II-110

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Peta Administrasi Kota Sawahlunto	II- 1
Gambar 2.2	Peta Kemiringan Lereng Kota Sawahlunto	II- 4
Gambar 2.3	Peta Geologi Kota Sawahlunto	II- 5
Gambar 2.4	Peta Curah Hujan Kota Sawahlunto	II- 6
Gambar 2.5	Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029	II-198
Gambar 2.6	Analisis Proyeksi Belanja Daerah tahun 2025-2029	II-206
Gambar 3.1	Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029	III-113
Gambar 3.2	Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Sawahlunto	III-120
Gambar 3.3	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Sawahlunto 2025-2045	III-121
Gambar 3.4	Peta Rencana Pola Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045	III-123
Gambar 3.5	Konsep Lokasi Pusat Pengembangan Informasi Geopark	III-126
Gambar 3.6	Peta Sebaran Geopark Kota Sawahlunto	III-127

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Daerah sesuai kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam peraturan tersebut mengamanatkan, bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah merupakan Perencanaan Pembangunan daerah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan yang merupakan penjabaran visi misi dan program- program kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan dan keuangan daerah. Dokumen ini ditetapkan enam bulan setelah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilantik.

Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dilaksanakan setelah pelantikan Riyanda Putra, S.IP sebagai Wali Kota Sawahlunto dan H. Jeffry Hibatullah sebagai Wakil Wali Kota Sawahlunto berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2024 dan telah dilantik pada tanggal 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia, dengan dasar inilah disusun dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.

Penyusunan Dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 merupakan tahapan pembangunan jangka menengah pertama pada periode RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045. Untuk menjaga keselarasan dengan arah dan tujuan pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Barat, maka dalam penyusunan dokumen RPJMD

Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 juga mengacu kepada RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2045.

Berdasarkan evaluasi dan kondisi daerah saat ini, masih tingginya tingkat pengangguran dan ketimpangan antarwilayah, belum optimalnya kualitas layanan dasar bidang pendidikan dan kesehatan, belum optimalnya pengelolaan pariwisata dengan keterbatasan sumber daya manusianya dan akses transportasi sehingga masih melambatnya pertumbuhan ekonomi. Keadaan lingkungan dan risiko bencana menjadi perhatian dalam merencanakan pembangunan kedepannya. Keunggulan yang dimiliki Kota Sawahlunto dengan status *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) dan *Geopark* Nasional Sawahlunto diharapkan dapat meningkatkan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha dan daya saing daerah yang merupakan tujuan Pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 juga harus memperhatikan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai amanah Permendagri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. KLHS berfungsi untuk penjaminan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam perumusan kebijakan dan skenario pembangunan daerah guna menjaga keberlangsungan sumber daya dan menjamin keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, mutu hidup generasi masa depan. Skenario pembangunan merupakan alternatif pelaksanaan pembangunan beserta gambaran potensi dampak yang ditimbulkan. Sehingga RPJMD ini akan menjadi dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah melalui indikator tujuan dan sasaran yang terukur, berkontribusi dalam percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) serta menjadi panduan yang mengarahkan pengelolaan keuangan daerah melalui kebijakan *money follows program priorities*, yang memfokuskan belanja daerah pada program strategis dan berdampak langsung bagi masyarakat.

Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dilakukan secara transparan, responsif, efisiensi, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029, adalah : Pendekatan Teknokratis, Pendekatan Partisipatif, Pendekatan Politis, Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, Pendekatan Holistik-tematik, Pendekatan Integratif dan Pendekatan Spasial.

Proses penyusunan dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025–2029 dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

a. Persiapan Penyusunan mencakup **:** Pembentukan Tim Penyusunan dan Orientasi mengenai RPJMD, Penyusunan agenda kerja tim penyusun, Analisa data evaluasi hasil pembangunan sebelumnya, Inventaris data dan informasi perencanaan pembangunan daerah lainnya.

b. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik

c. Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal)

d. Pelaksanaan Forum Konsultasi Rancangan Awal

e. Pengajuan Rancangan awal kepada DPRD

f. Pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJMD

g. Konsultasi Rancangan Awal RPJMD

h. Musrenbang

i. Perumusan Rancangan Akhir

j. Review Aparat Pengawasan Intern Pemerintah terhadap rancangan akhir

k. Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah RPJMD ke DPRD

l. Evaluasi Ranperda RPJMD

m. Penetapan Ranperda RPJMD

Dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 sebagai pedoman utama dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Renstra perangkat daerah wajib mengacu pada arah kebijakan, tujuan dan sasaran yang termuat dalam RPJMD agar terdapat keselarasan sehingga pelaksanaan program kegiatan dapat mencapai tujuan pembangunan yang telah direncanakan.

Dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah, DPRD, masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya diharapkan dapat menjadi fondasi yang kokoh untuk mewujudkan visi Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029.

1.2 DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045, didasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 57 Tahun 2024 tentang Kota Sawahlunto di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6978);
7. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan KLHS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 9);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor tentang 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodeikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 mengatur pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk periode 2025-2029;
21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2024 Nomor 4);
22. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 08 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 113).

1.3 HUBUNGAN ANTARA DOKUMEN RPJMD KOTA SAWAHLUNTO DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN PEMBANGUNAN LAINNYA

1.3.1 Hubungan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Sawahlunto 2025-2045

RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto pada setiap lima tahun sesuai dengan tahapan RPJPD. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 menjadi tahapan pertama RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045. RPJMD harus memperhatikan isu strategis, sasaran pokok, dan arah kebijakan pembangunan yang ada di dalam RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045. Dalam menyusun visi misi kepala daerah terpilih mengacu pada RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 begitu juga dalam menyusun dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 sehingga adanya konsistensi dan kesinambungan pembangunan dari jangka menengah menuju jangka Panjang.

1.3.2 Hubungan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025-2029

RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang wajib mempedomani dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Keselarasan dalam dokumen tersebut meliputi keselarasan dalam visi, misi, tujuan sasaran, arah kebijakan, strategi dan program prioritas nasional. Dengan menjamin konsistensi kebijakan pembangunan nasional dan daerah sehingga meningkatkan peluang alokasi pendanaan nasional ke daerah seperti Dana Alokasi Khusus (DAK), dana insentif daerah dan sebagainya. Untuk itu perlu memastikan bahwa pembangunan daerah memberikan kontribusi nyata terhadap tujuan nasional serta memperkuat daya saing daerah dalam rangka pembangunan Nasional dan Global Sinkronisasi antara keduanya menjadi syarat untuk menjamin keberhasilan pembangunan nasional yang merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.3.3 Hubungan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-202**9** memperhatikan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029. Adapun yang harus diperhatikan meliputi visi, misi, tujuan, sasaran dan program prioritas Provinsi. Pencapaian target kinerja pembangunan Kota Sawahlunto secara langsung maupun tidak langsung berpengaruh terhadap pencapaian target pembangunan Provinsi Sumatera Barat, untuk itu prioritas pembangunan Kota Sawahlunto diarahkan pada upaya untuk mendukung target pencapaian Provinsi Sumatera Barat.

1.3.4 Hubungan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032

Penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto memperhatikan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Sawahlunto Tahun 2012-2032, untuk melihat struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang. Kondisi saat ini Kota Sawahlunto proses pengusulan Rancangan Peraturan Daerah untuk Perubahan RTRW Kota Sawahlunto, sedangkan untuk materi teknis sudah diakomodir dalam dokumen RPJMD terkait arah kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah, serta struktur dan pola ruang wilayah sebagai dasar pengendalian pemanfaatan ruang dan pembangunan.

1.3.5 Hubungan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Sawahlunto

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur di seluruh Indonesia nomor 600.11.2/8754/Bangda karena KLHS menjadi instrumen penting dalam proses perencanaan pembangunan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan berkelanjutan dan tidak merugikan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan berpedoman kepada KLHS maka dokumen RPJMD Kota Sawahlunto dapat menjamin pembangunan di Kota Sawahlunto berlangsung secara adil dan berkelanjutan, meminimalkan risiko dan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Hubungan substantif antara RPJMD dan KLHS adalah sebagai berikut:

1. KLHS berfungsi sebagai dasar ilmiah dan pertimbangan strategis dalam menyusun tujuan, sasaran, dan arah kebijakan RPJMD.
2. KLHS menyajikan analisis daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta identifikasi isu strategis lingkungan hidup dan keberlanjutan sosial ekonomi;
3. Hasil dan rekomendasi KLHS wajib diintegrasikan ke dalam RPJMD, baik pada tingkat perumusan visi dan misi, maupun dalam penentuan prioritas program, lokasi kegiatan, dan indikator kinerja.

Sehubungan hal tersebut, dengan berpedoman kepada KLHS maka bertujuan agar RPJMD dapat menjamin bahwa pembangunan di Sawahlunto berlangsung secara adil dan berkelanjutan, meminimalkan risiko dan dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan hidup dan masyarakat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dalam pembangunan daerah serta mendukung pencapaian

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), hal ini agar arah kebijakan pembangunan di RPJMD dapat berkualitas, inklusif, dan tangguh terhadap perubahan iklim, bencana, serta ketimpangan sosial.

1.3.6 Hubungan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah disusun sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah bersifat indikatif. RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun. Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program dalam Renstra Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD. Dokumen RPJMD yang disusun akan menjadi pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah, dan dijabarkan tiap tahun dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

I.4 MAKSUD DAN TUJUAN

I.4.1 Maksud

Maksud penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 adalah menjabarkan visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan bagi seluruh pihak baik pemerintah, masyarakat, dunia usaha dan pihak-pihak terkait lainnya untuk mewujudkan visi pembangunan Kota Sawahlunto.

I.4.2 Tujuan

Tujuan dari penyusunan dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 adalah :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah
   Menerjemahkan visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto terpilih ke dalam arah kebijakan pembangunan, strategi, tujuan, sasaran dan program prioritas yang terukur dan realistis dalam periode lima tahun pemerintahan.
2. Menyelaraskan dengan dokumen Perencanaan Jangka Panjang dan Nasional
   Memastikan keterpaduan dan konsistensi antara perencanaan jangka menengah daerah dengan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045, RPJMN Tahun 2025-2029, serta dokumen rencana sectoral dan rencana tata ruang wilayah (RTRW).
3. Pedoman Pembangunan Daerah
   RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 menjadi acuan utama bagi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Sawahlunto dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), serta dalam penyusunan

Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) setiap tahun.

4. Mewujudkan Tata Kelola Pembangunan yang Akuntabel dan Partisipatif
   Mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat berbasis data dan informasi serta melibatkan seluruh pemangku kepentingan secara aktif.
5. Menjamin Efektifitas dan Efisiensi Pembangunan
   RPJMD dirancang untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya daerah secara efisien dan berkeadilan, sehingga program dan kegiatan yang dilaksanakan benar-benar berdampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dokumen RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Peraturan Perundang-undangan, yang terdiri dari :

BAB I **PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan RPJMD.

BAB II **GAMBARAN UMUM DAERAH**

Bab ini berisi gambaran umum kondisi Kota Sawahlunto meliputi gambaran dari aspek geografi, demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing sebagai dasar perumusan permasalahan dan isu strategis daerah, serta menjadi pijakan perumusan target pembangunan dalam lima tahun kedepan. Bab ini juga menguraikan gambaran pengelolaan keuangan daerah tahun sebelumnya dan kerangka pendanaan untuk pembangunan lima tahun kedepan serta permasalahan pembangunan daerah terkait dengan permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, serta isu strategis daerah yang prioritas untuk diselesaikan selama lima tahun kedepan, berdasarkan analisa data.

BAB III **VISI, MISI DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

Bab ini menjelaskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan serta strategi, arah kebijakan dan program prioritas pembangunan kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan sebagai penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah terpilih dengan mempedomani RPJPD Tahun 2025-2045 serta RPJMN dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

BAB IV **PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH**

Bab ini menjelaskan program Perangkat Daerah yang dirumuskan dalam Renstra beserta target indikator kinerja program dan pagu indikatif menurut urusan pemerintahan daerah dalam upaya pencapaian visi dan misi RPJMD. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 melalui indikator makro, indikator kinerja sasaran visi RPJMD, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD).

BAB V **PENUTUP**

Bab ini berisikan pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan, Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Manajemen Resiko Perencanaan Pembangunan Daerah, Tata kelola Satu Data Indonesia Tingkat Provinsi, serta Kolaborasi Multipihak dalam Perencanaan Pembangunan Kota Sawahlunto sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan.

LAMPIRAN I **METADATA INDIKATOR PEMBANGUNAN DAERAH**

Lampiran ini Metadata Indikator Pembangunan Daerah memuat informasi terstruktur yang menjelaskan secara rinci mengenai setiap indikator yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Tahun 2025-2029 Indikator Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program.

LAMPIRAN II **MANAJEMEN RESIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Lampiran ini Manajemen Risiko Perencanaan Pembangunan Daerah yang memuat substansi sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029.

BAB II
GAMBARAN UMUM DAERAH

2.1 GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

A. Posisi dan Peran Strategis Daerah

1. Kondisi Geografi dan Administrasi

Secara geografis Kota Sawahlunto berada pada gugusan perbukitan Bukit Barisan dengan posisi koordinat antara 100˚41”00’ - 100˚49’60” Bujur Timur dan 00˚33”40’-00˚48”33’ Lintang Selatan. Batas wilayah Kota Sawahlunto meliputi :

- Sebelah Utara : Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung
- Sebelah Selatan : Kabupaten Solok
- Sebelah Barat : Kabupaten Solok
- Sebelah Timur : Kabupaten Sijunjung

Gambar 2.1
Peta Administrasi Kota Sawahlunto

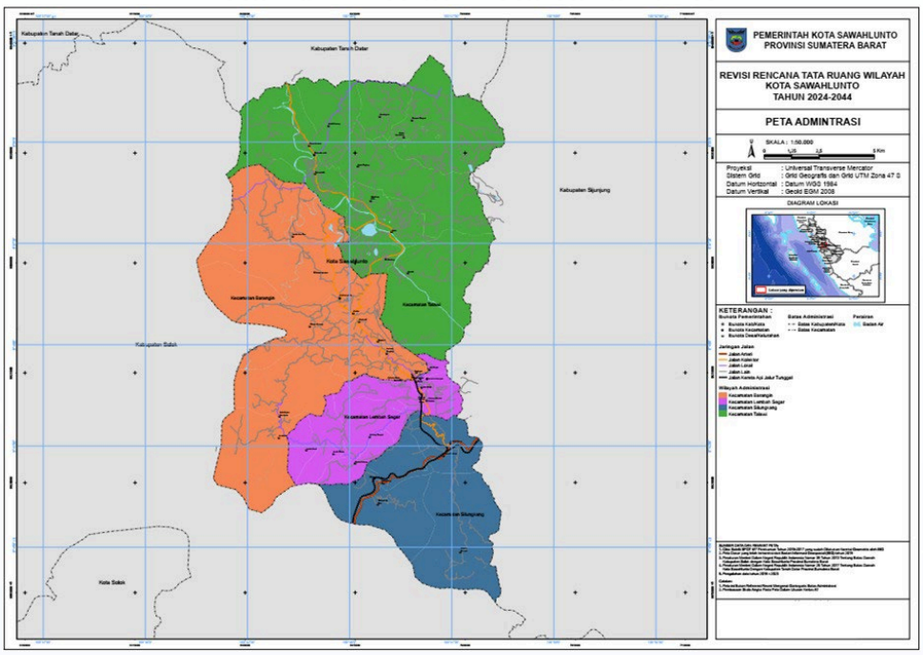

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Kota Sawahlunto memiliki luas wilayah 231,94 km^2 atau 23.194,55 ha yang sebelumnya seluas 273,45 km2. Perubahan luas wilayah ini berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau, sesuai dengan Surat Kapus PPBW BIG No. B-3.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tanggal 03 Oktober 2022.

Secara administratif Kota Sawahlunto terdiri dari 4 (empat) kecamatan. Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Lembah Segar dengan luas sebesar 10,37 % dari luas Kota Sawahlunto sedangkan kecamatan terluas adalah Kecamatan Talawi dengan luas sebesar 39,09 % dari luas Kota Sawahlunto.

Berikut rincian kecamatan yang ada di Kota Sawahlunto beserta luas wilayah masing-masing.

Tabel 2.1
Luas Administratif Per Kecamatan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luas	
	(Ha)	(%)
Barangin	7.849,19	33,84
Lembah Segar	2.404,83	10,37
Silungkang	3.873,91	16,70
Talawi	9.066,62	39,09
Total	**23.194,55**	**100,00**

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Di samping kecamatan, Kota Sawahlunto juga terdiri dari 27 Desa dan 10 Kelurahan. Berikut Desa dan Kelurahan beserta jumlah RT, RW, dan Dusun per-Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto :

Tabel 2.2
Jumlah RT, RW Dan Dusun Per Kecamatan Kota Sawahlunto

No	Kecamatan Desa/Kelurahan	RT	RW	Dusun
(1) Kecamatan Barangin		**32**	**13**	**25**
01	Desa Lumindai	-	-	5
02	Desa Balai Batu Sandaran	-	-	3
03	Kel. Saringan	11	5	-
04	Kel. Lubang Panjang	7	2	-
05	Kel. Durian I	6	2	-
06	Kel. Durian II	8	4	-
07	Desa Talago Gunung	-	-	4
08	Desa Santur	-	-	5
09	Desa Kolok Mudiak	-	-	3
10	Desa Kolok Nan Tuo	-	-	5
(2) Kecamatan Lembah Segar		**32**	**14**	**22**
01	Desa Lunto Barat	-	-	4
02	Desa Lunto Timur	-	-	4
03	Desa Pasar Kubang	-	-	3
04	Desa Kubang Tangah	-	-	5
05	Desa Kubang Utara Sikabu	-	-	6
06	Kel. Pasar	6	3	-
07	Kel. Kubang Sirakuk Utara	8	2	-
08	Kel. Kubang Sirakuk Selatan	4	2	-
09	Kel. Aur Mulyo	6	3	-
10	Kel. Tanah Lapang	4	2	-
11	Kel. Air Dingin	4	2	-
(3) Kecamatan Silungkang		**-**	**-**	**21**
01	Desa Silungkang Oso	-	-	4
02	Desa Taratak Bancah	-	-	3
03	Desa Muaro Kalaban	-	-	6
04	Desa Silungkang Tigo	-	-	5
05	Desa Silungkang Duo	-	-	3
(4) Kecamatan Talawi			**-**	**39**
01	Desa Sikalang	-	-	4
02	Desa Rantih	-	-	2
03	Desa Salak	-	-	3
04	Desa Sijantang Koto	-	-	3
05	Desa Talawi Hilir	-	-	4
06	Desa Talawi Mudik	-	-	4
07	Desa Bukik Gadang	-	-	3
08	Desa Batu Tanjung	-	-	4
09	Desa Kumbayau	-	-	4
10	Desa Data Mansiang	-	-	2
11	Desa Tumpuak Tangah	-	-	6
	Jumlah	**64**	**27**	**107**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Dari tabel di atas, diketahui bahwa Kota Sawahlunto mempunyai keunikan sebagai sebuah kota, yang mana Kota Sawahlunto didominasi oleh desa yang merupakan karakter kabupaten. Kondisi tersebut mengakibatkan Kota Sawahlunto juga memperoleh dana pembangunan untuk pemerintah terendah yaitu Dana Desa. Hal ini menjadi sebuah kekuatan bagi Sawahlunto untuk dapat membangun daerahnya, dengan anggaran dana desa yang mendekatkan pelaku pembangunan dan objek pembangunan itu sendiri.

2. Topografi

Kondisi topografi Kota Sawahlunto didominasi daerah perbukitan. Kota Sawahlunto memiliki kemiringan lereng dan morfologi yang begitu beragam, mulai dari dataran sampai dengan perbukitan terjal, dengan rentang lereng 0-8% sampai dengan lebih dari 40%. Namun sebagian besar berada pada kelerengan 25-40 % dengan area seluas 6.768,08 Ha, terletak di bagian selatan Kota Sawahlunto, meliputi Kecamatan Lembah Segar dan Kecamatan Silungkang.

Tabel 2.3
Ketinggian Wilayah Kota Sawahlunto

Kecamatan	Tinggi Kecamatan (mdpl)	Ibu Kota Kecamatan
Talawi	650	Talawi Mudik
Barangin	650	Santur
Lembah Segar	785	Aur Mulyo
Silungkang	548	Muaro Kalaban

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Ketinggian wilayah Kota Sawahlunto cukup bervariatif mulai dari 175 mdpl sampai dengan > 975 mdpl. Mayoritas terletak pada ketinggian 175–375 mdpl dengan luas sebesar 10.392,39 ha yang terletak di Kecamatan Barangin dan Kecamatan Talawi. Sedangkan untuk ketinggian lebih dari 975 meter di atas permukaan laut terletak di Kecamatan Barangin. Ketinggian pusat daerah kecamatan di Kota Sawahlunto lebih jelas terlihat pada tabel di atas.

Gambar 2.2
Peta Kemiringan Lereng Kota Sawahlunto

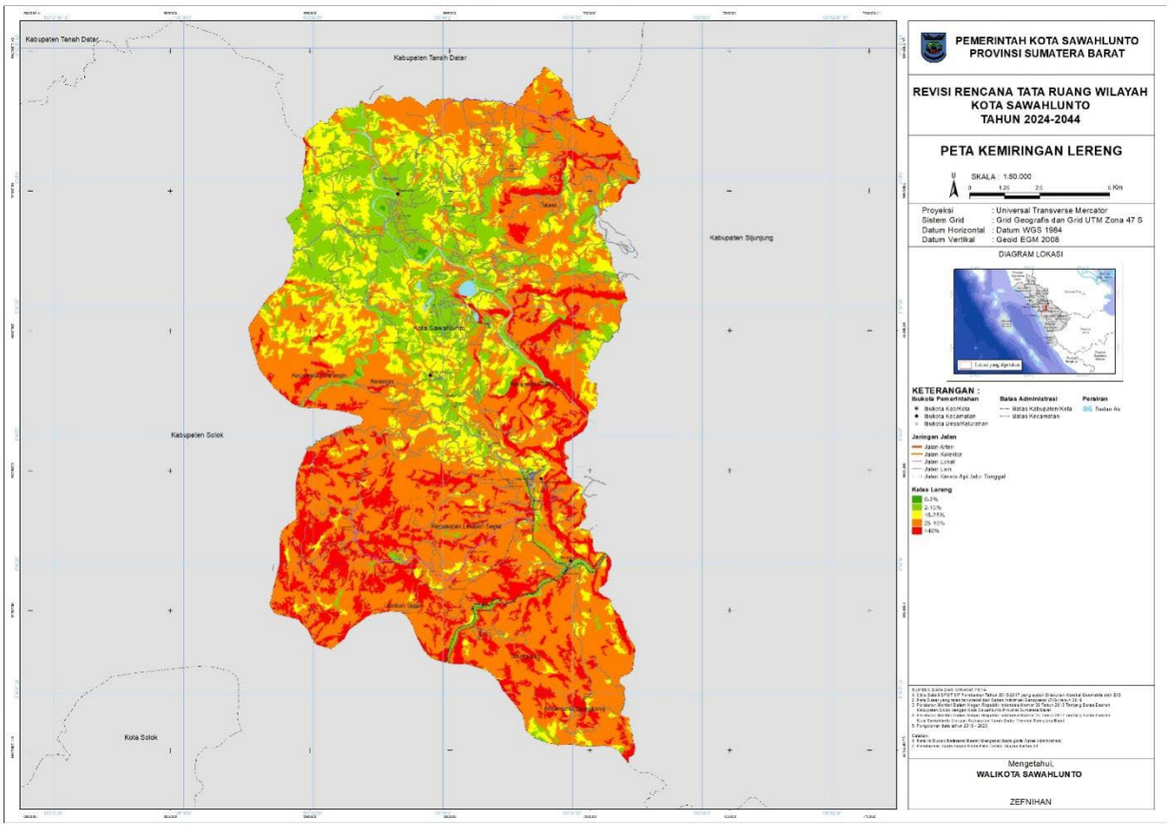

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Berdasarkan Peta Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto di atas terlihat bahwa kelas kemiringan lahan kategori datar (0 – 2 %) berada di Kecamatan Silungkang seluas 29 Ha dan di Kecamatan Talawi Seluas 991 Ha. Sementara kelas kemiringan lahan kategori Curam (> 40 %) berada di Kecamatan Silungkang. Kemiringan Lahan berdasarkan kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.4
Kemiringan Lahan Kota Sawahlunto

Kecamatan	Luas Lahan Dengan Kelerengan (Ha)				
	0 – 2%	2 – 15%	15 – 5%	25 –40%	> 40%
Talawi	991	1.420	2.680	3.195	1.653
Barangin	343	1.514	1.432	3.450	2.136
Lembah Segar	240	358	694	1.836	2.110
Silungkang	29	288	735	340	1.901

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Pada tabel di atas terlihat kemiringan lahan di Kota Sawahlunto memiliki kemiringan yang beragam, dari mulai dataran sampai dengan perbukitan terjal. Bentang alam yang landai terletak hampir di tengah Kota Sawahlunto, tetapi umumnya merupakan jalur-jalur sempit sehingga sulit untuk dikembangkan menjadi permukiman perkotaan. Posisinya memanjang sepanjang Sesar Sawahlunto, memisahkan perbukitan terjal yang terletak di kedua sisinya. Dataran yang relatif landai sehingga dimungkinkan untuk pengembangan permukiman perkotaan hanya dijumpai di Kecamatan Talawi, Pusat Kota Lama dan sebagian wilayah di Kecamatan Barangin yang wilayahnya relatif datar sebesar 18 % dari luas wilayah.

3. Kondisi Geologi

Kota Sawahlunto terletak pada cekungan pra-tersier Ombilin yang terbentuk belah ketupat panjang dengan ujung bulat, selebar 22,50 km dan panjang 47,00 km. Formasi ombilin merupakan lapisan paling muda menurut kategori zaman tersier atau berumur sekitar 2 juta tahun. Kota Sawahlunto terletak di atas Formasi Sawahlunto, batuan yang terbentuk pada zaman Kala *Eocen* sekitar 40 - 60 juta tahun yang lalu. Berikut merupakan Peta Geologi Kota Sawahlunto :

Gambar 2.3
Peta Geologi Kota Sawahlunto

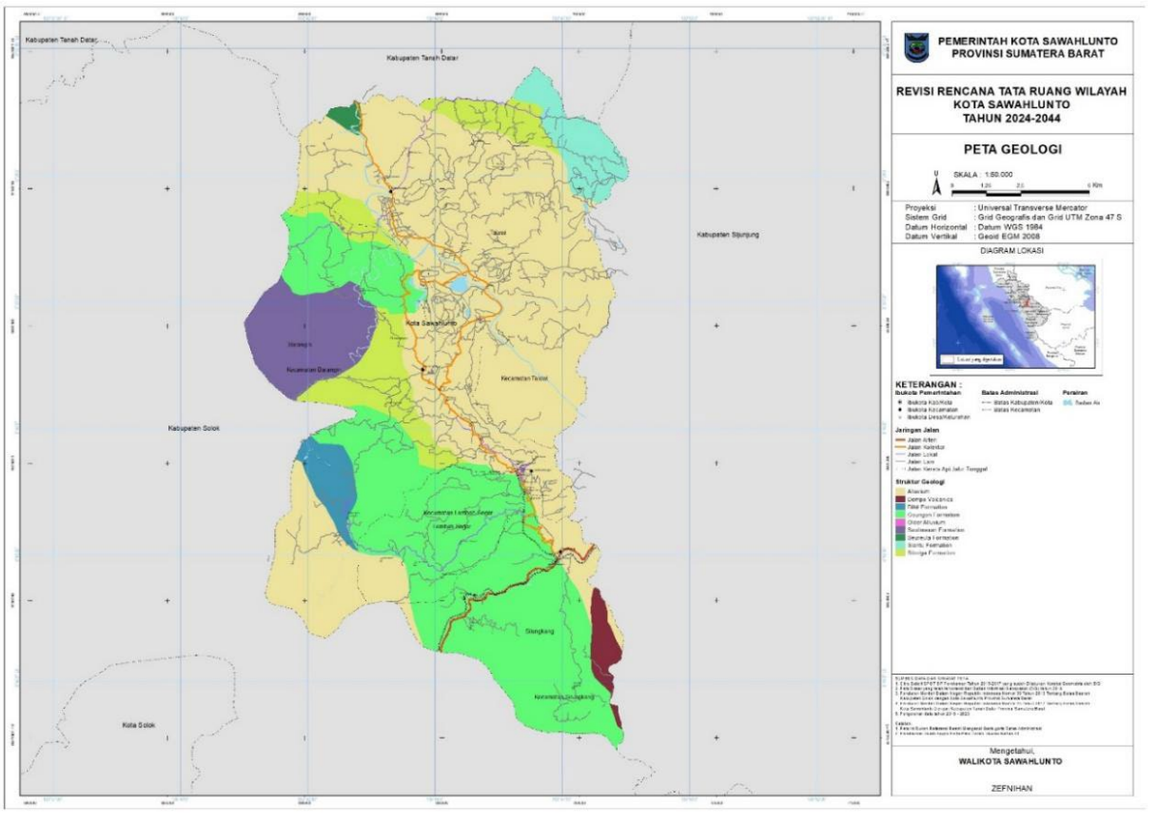

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Kota Sawahlunto memiliki dua buah sesar geser yaitu sesar geser Sawahlunto dan sesar geser Batu Tajam berarah Barat Laut sampai dengan Tenggara, mengikuti arah sesar besar Sumatera. Jalur kedua sesar tersebut berada di daerah perbukitan sebelah Barat Daya jalan raya Sawahlunto sampai dengan Santur. Secara regional, struktur geologi yang berkembang di cekungan ombilin berarah ke Barat Laut sampai dengan Tenggara dan Timur Laut sampai dengan Barat Daya, baik itu berupa sesar/patahan maupun lipatan. Cekungan Ombilin ini terbagi menjadi 2 (dua) bagian oleh sesar normal Tanjung Ampalu/sesar Pamuatan yaitu bagian timur merupakan blok yang turun (mengarah kebawah) sedangkan bagian Barat yaitu daerah Sawahlunto dan sekitarnya merupakan blok yang relatif naik.

4. Kondisi Klimatologi

Kota Sawahlunto memiliki suhu rata-rata 22 ^{0}C sampai dengan 28 ^{0}C, perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5 ^{0}C sampai dengan 7 ^{0}C. Curah hujan di Kota Sawahlunto berkisar antara 2.200 mm/tahun sampai dengan 2.400 mm/tahun mayoritas terletak di Kecamatan Barangin dan Lembah Segar. Berikut merupakan pemetaan kondisi curah hujan Kota Sawahlunto :

Gambar 2.4
Peta Curah Hujan Kota Sawahlunto

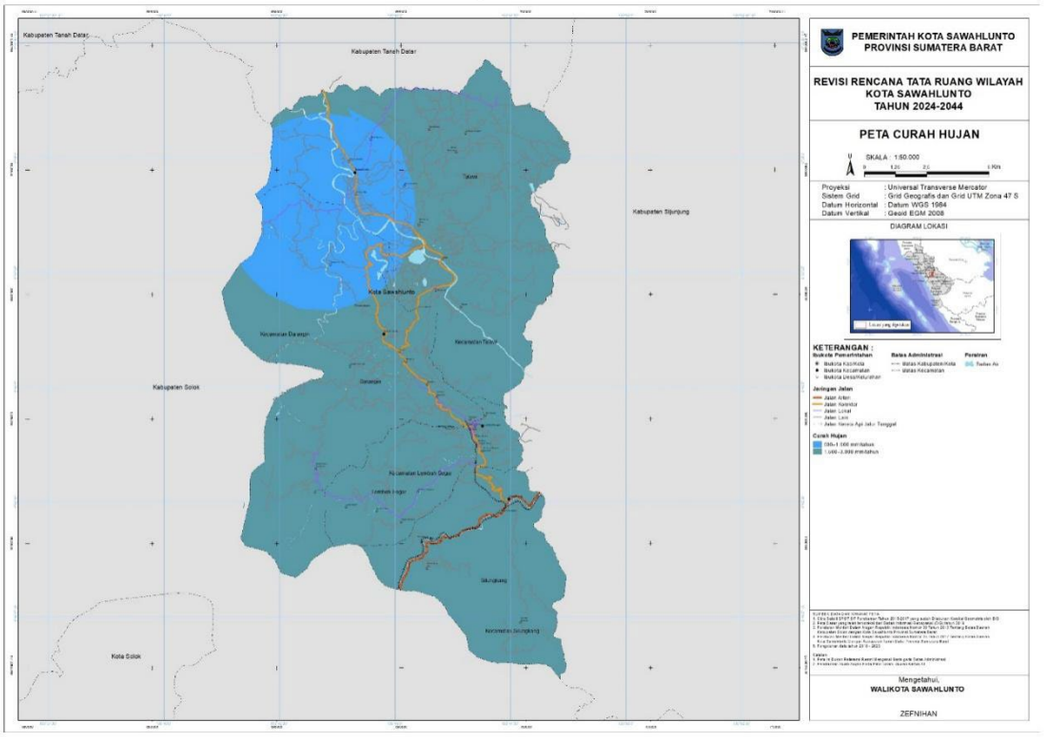

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Tingkat curah hujan di Kota Sawahlunto terbagi dalam 2 (dua) kategori yaitu curah hujan kategori rendah dengan besaran 0-1000 mm/tahun dan curah hujan kategori sedang dengan besaran 1000-3000 mm/tahun dengan suhu rata – rata 22 ^{0}C sampai dengan 28 ^{0}C, perbedaan antara temperatur siang dan malam antara 5 ^{0}C sampai dengan 7 ^{0}C. Daerah dengan curah hujan rendah ada di sebagian kecil Kecamatan Barangin dan Talawi.

5. Peran Strategis Daerah

Kota Sawahlunto merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang dijuluki sebagai Kota Arang. Julukan tersebut tak lepas dari tambang batubara yang aktif semenjak zaman kolonial Belanda, tetapi telah berhenti beroperasi dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini Kota Sawahlunto berkembang menjadi Kota Wisata tua yang multietnik dan menjadi salah satu Kota Tua terbaik di Indonesia. Di kota yang didirikan pada tahun 1888 ini, banyak berdiri bangunan-bangunan tua peninggalan Belanda. Sebagian telah ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kota Sawahlunto. Pada tahun 2001 seluruh pemangku kebijakan di lingkungan pemerintah Kota Sawahlunto bersepakat untuk merubah arah dan haluan pembangunan daerah dari Kota Tambang menjadi Kota Wisata. Kesepakatan ini dituangkan ke dalam visi

Kota Sawahlunto melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 tentang Visi dan Misi Kota yaitu "Sawahlunto Tahun 2020 Menjadi Kota Wisata Tambang Yang Berbudaya". Sejak saat itulah seluruh arah pembangunan ditujukan terhadap pembangunan wisata di Kota Sawahlunto.

Kerja keras pemerintah Kota Sawahlunto perlahan menuai hasil. Pada tanggal 6 Juli 2019 *Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto* (OCMHS) atau yang disebut dengan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) telah ditetapkan sebagai Warisan Dunia UNESCO dengan keputusan Komite Warisan Dunia. Ini merupakan langkah besar pemerintah Kota Sawahlunto dalam mewujudkan mimpi menjadi Kota Wisata. Kawasan WTBOS yang ditetapkan meliputi 7 (tujuh) kabupaten/kota, yaitu : Kota Sawahlunto, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Solok, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Padang Pariaman.

Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahlunto (OCMHS) merupakan warisan budaya dunia ke-5 setelah Candi Borobudur, Candi Prambanan, Situs Purba Sangiran, dan *Cultural Landscape* Subak Bali. Cikal bakal pengajuan ini dimulai sejak tahun 2009, penggarapan secara intens untuk proses nominasi, evaluasi, hingga penetapan berlangsung cukup cepat, dimana hanya membutuhkan waktu 4 (empat) tahun sejak masuk dalam daftar sementara (*tentative list*) pada 30 Januari 2015. OCMHS ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO pada tanggal 6 Juli 2019 pukul 12.15 waktu Baku, Azerbaijan (https://whc.unesco.org/en/list/1610) yang dihadiri oleh 22 (dua puluh dua) orang delegasi Republik Indonesia dengan Ketua Delegasi Prof. Rosa Surya Putra selaku Duta Besar/Wakil Delegasi Tetap RI untuk UNESCO, dihadiri juga oleh Gubernur Sumatera Barat Prof. Dr. Irwan Prayitno, S.Psi, M.Sc dan Deri Asta, SH selaku Walikota Sawahlunto.

Selain wisata sejarah, Kota Sawahlunto juga fokus pada pengembangan wisata alam. Kota Sawahlunto telah mendapatkan status *Geopark* Nasional untuk kawasan wisata Batu Runcing di Desa Silungkang Oso Kecamatan Silungkang. Pada tahun 2021, tengah menuju status UNESCO *Global Geopark*. *Geopark* atau Taman Bumi sendiri menjadi salah satu upaya Kota Sawahlunto untuk menuju pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Selain itu, Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk menjadi salah satu kota di Indonesia yang mendapatkan dukungan peningkatan kapasitas dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta energi melalui *Global Covenant of Mayors for Climate & Energy (GCoM) Asia*.

B. Potensi Sumber Daya Alam

Kota Sawahlunto dilalui oleh Daerah Aliran Sungai (DAS) Indragiri yang terdiri dari 5 (lima) buah sungai atau batang utama yaitu :

- **Batang Ombilin**

  Sungai Ombilin merupakan sungai terbesar yang mengalir dari utara ke selatan, dari Desa Talawi ke Desa Rantih Kecamatan Talawi. Sungai ini berhulu dari danau Singkarak dan bermuara di Batang Kuantan Riau, dengan debit sungai di daerah Sikalang-Rantih lebih dari 10 m^3/s.

- **Batang Malakutan**

  Sungai ini mengalir dari Barat yang berhulu di Desa Siberambang, Kecamatan X Koto, Kabupaten Solok ke Timur melewati Desa Kolok Mudiak dan Desa Kolok Nan Tuo di Kecamatan Barangin yang akhirnya bertemu dengan Batang Ombilin.

- **Batang Lunto**

  Sungai ini berhulu di Desa Lumindai, Kecamatan Barangin dan mengalir dari arah Barat menuju Timur dan membelah kota dan bermuara di Batang Ombilin.

- **Batang Sumpahan**

  Sungai ini berhulu di Kubang Utara Sikabu di Kecamatan Lembah Segar kemudian bertemu dengan Batang Lunto di Kelurahan Pasar dan akhirnya bermuara di Batang Ombilin.

- **Batang Lasi**

  Sungai ini berhulu di Kecamatan IX Koto Sungai Lasi, Kabupaten Solok yang mengalir menyusuri jalan Nasional Solok ke Sijunjung di Kecamatan Silungkang dan keluar di perbatasan Kota Sawahlunto sampai dengan Sijunjung. Sungai ini kemudian bertemu juga dengan Batang Ombilin di Sungai Kuantan atau Indragiri.

Sumber daya air yang ada 2 (dua), yaitu:

- **Air Tanah**

  Keberadaan air tanah terbatas pada kedalaman di bawah 400 meter sementara celahan batuan batupasir penyusun formasi Sawah Tambang dan formasi Sawahlunto kurang mengindikasikan adanya lapisan pembawa air sehingga potensi air tanah sangat kecil. Kecilnya potensi ini menyebabkan air tanah tidak dapat diandalkan sebagai salah satu sumber air baku di Kota Sawahlunto.

- **Mata Air**

  Mata air muncul pada lereng bukit, dimana debit kurang dari 2 liter/s yang terdapat di Sikalang, mengalir sepanjang tahun, sumber mata air ini umumnya jernih dan digunakan sebagai salah satu sumber air bersih penduduk setempat dan PDAM. Mata air lain dijumpai ke arah Tenggara Sawahlunto di Bukit Sibantar Desa Sikalang, sementara itu sumber mata air dengan debit cukup besar yaitu lebih dari 5 liter/s, mengalir sepanjang musim, terdapat di Desa Balai Batu Sandaran. Mata air tersebut muncul pada kontak antara batu gamping dan lapisan tufa yang ditampung pada kolam permanen dan dialirkan melalui pipa besi sebagai salah satu sumber air bersih di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.5
Persentase Luas Lahan Menurut Penggunaan Per Kecamatan
Kota Sawahlunto Tahun 2024

Penggunaan Lahan	Kecamatan			
	Silungkang	Lembah Segar	Barangin	Talawi
Tanah Tidak ada Bangunan	95,01	94,14	94,53	87,89
Tanah Permukiman	3,69	5,34	4,41	4,04
Perairan	0,44	-	0,39	1,39
Tanah Perkantoran dan Perdagangan	0,65	0,28	0,27	0,12
Tanah Industri dan Pergudangan	-	-	0,08	0,34

Penggunaan Lahan	Kecamatan			
	Silungkang	Lembah Segar	Barangin	Talawi
Tanah Jasa	0,03	0,14	0,09	0,18
Taman	-	-	0,03	0,00
Penggunaan Tanah lainnya	0,17	0,10	0,21	6,03
Total	**100,00**	**100,00**	**100,00**	**100,00**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2024

Pada tahun 2024, penggunaan lahan terbesar adalah tegalan seluas 6.492,73 ha atau 26,67% dari total luas Kota Sawahlunto. Sedangkan kawasan permukiman seluas 959,02 yaitu 3,94% dari total luas Kota Sawahlunto.

Berdasarkan Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025–2045 kawasan strategis yang dijadikan prioritas dalam penataan ruang dan mempunyai pengaruh yang penting untuk pengembangan kota adalah bidang ekonomi dan sosial budaya.

- **Kawasan Strategis Ekonomi**
  - Desa Kolok Mudiak, Desa Kolok Nan Tuo, Desa Santur di Kecamatan Barangin.
  - Desa Rantih, Desa Salak, Desa Sikalang, Desa Talawi Hilir di Kecamatan Talawi.
  - Desa Muaro Kalaban di Kecamatan Silungkang.
- **Kawasan Strategis Sosial dan Budaya**
  - Kelurahan Air Dingin, Kelurahan Aur Mulyo, Kelurahan Kubang Sirakuk Utara, Kelurahan Kubang Utara Sikabu, Kelurahan Pasar Kelurahan Tanah Lapang di Kecamatan Lembah Segar;
  - Kelurahan Saringan di Kecamatan Barangin.

C. Daya Dukung Dan Daya Tampung Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Pengendalian Lingkungan Hidup, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung kehidupan manusia, makhluk hidup lain, dan keseimbangan antar keduanya. Sementara itu, daya tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/ atau komponen lain yang masuk atau dimasukkan kedalamnya.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada forum koordinasi Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion (PPPE) seluruh Indonesia menyepakati penggunaan konsep jasa ekosistem (*ecosystem services*) sebagai metode dalam mengukur daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Metode ini dinilai lebih mudah penyusunannya dan dapat digunakan dalam banyak keperluan penyusunan perencanaan Pembangunan pada setiap tingkatan wilayah.

a. Daya Dukung Air

Air mempunyai fungsi yang sangat vital bagi lingkungan terutama bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Kekurangan air akan mengganggu pertumbuhan dan produktivitas tanaman serta akan berpengaruh pada kemampuan dalam menyediakan jasa lingkungan hidup salah satunya sebagai penyedia pangan.

Status daya dukung air Kota Sawahlunto berdasarkan Surat Keputusan Menteri LH dan Kehutanan Nomor 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 tentang Penetapan Daya Dukung dan Daya Tampung Air Nasional diketahui sudah terlampaui seluas 170 hektar (0,7%) yang terdapat di Kecamatan Talawi. Jika dilihat dari status air Kota Sawahlunto, secara keseluruhan status air Kota Sawahlunto belum terlampaui.

Berikut status daya dukung air di Kota Sawahlunto berdasarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 146/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023 :

Grafik 2.1
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sawahlunto
Tahun 2025

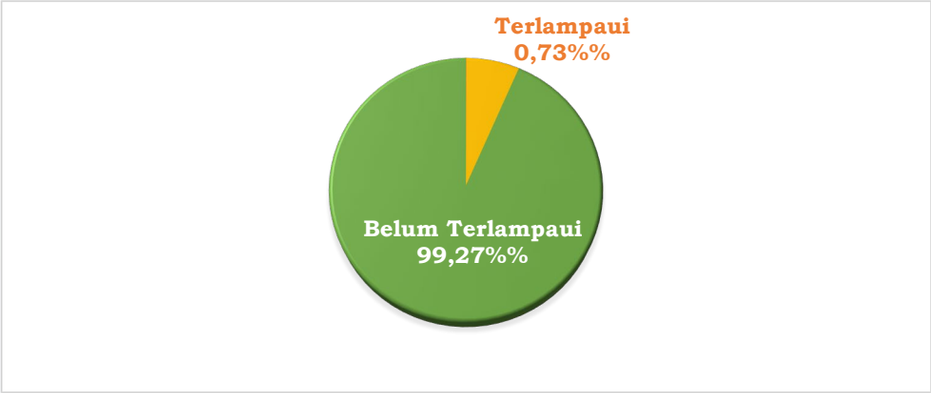

Sumber Data : KLHS RPJMD Kota Sawahlunto 2025-2029

Berikut status daya dukung air di Kota Sawahlunto menurut kecamatan yang ada:

Grafik 2.2
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sawahlunto
Berdasarkan Kecamatan
Tahun 2025

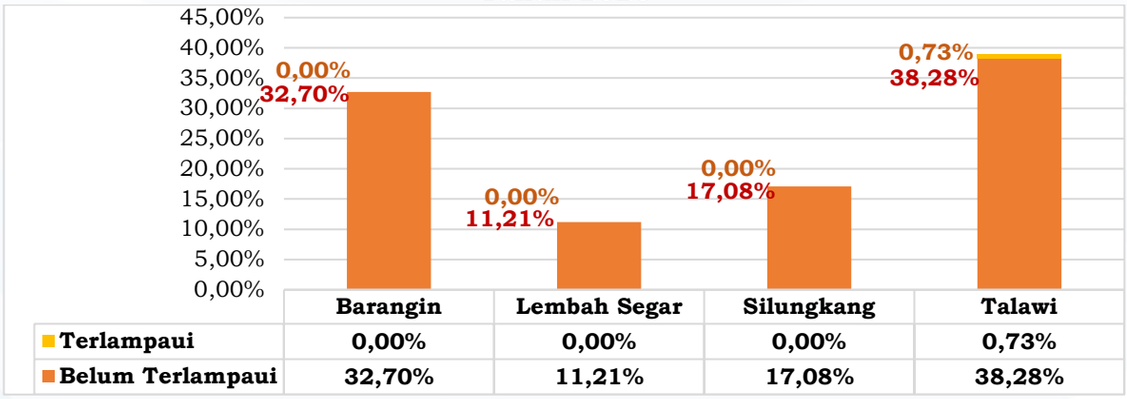

Sumber Data : KLHS RPJMD Kota Sawahlunto 2025-2029

Tabel 2.6
Status Daya Dukung dan Daya Tampung Air Kota Sawahlunto
Tahun 2025

Kecamatan	Belum Terlampaui (Ha)	Terlampaui (Ha)	Total
Barangin	7.584	0	7.584
Lembah Segar	2.600	0	2.600
Silungkang	3.962	0	3.962
Talawi	8.878	170	9.048
Total	**23.024**	**170**	**23.194**

Sumber Data : KLHS RPJMD Kota Sawahlunto 2025-2029

b. Daya Dukung Pangan

Daya dukung pangan merupakan kemampuan suatu wilayah guna menyediakan kebutuhan pangan. Kota Sawahlunto sendiri memang bukan dikenal sebagai daerah penghasil tanaman pangan yang dikarenakan beberapa faktor. Untuk lebih jelasnya daya dukung pangan Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.7
Status DDDTLH Jasa Penyediaan Pangan

Kecamatan	Sangat Tinggi	Tinggi	Sedang	Rendah	Sangat Rendah	Total
Barangin		364,6223	985,7445	973,0769	5292,245	7615,689
Lembah Segar		69,16372	719,8244	447,5916	1369,991	2606,571
Silungkang		62,68983	1473,147	494,7709	1856,231	3886,838
Talawi		765,3268	841,6642	1698,7	5779,756	9085,447
Total		**1.261,803**	**4.020,38**	**3.614,14**	**14.298,22**	**23.194,54**

Sumber Data : KLHS RPJMD Kota Sawahlunto 2025-2029

Grafik 2.3
Status DDDTLH Jasa Penyediaan Pangan

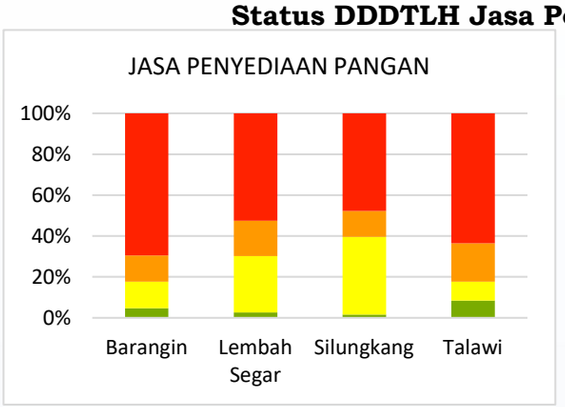

Dari data Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Jasa Penyediaan Pangan, dapat dilihat bahwa secara umum Daya dukung jasa penyediaan pangan Kota sawahlunto sangat rendah, yaitu sekitar 61,64 persen dari wilayah Sawahlunto.

D. Bertahanan Energi, Air dan Kemandirian Pangan

1. Indeks Ketahanan Pangan

Ketahanan Pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Pembangunan ketahanan pangan dan gizi dilakukan secara sistemik dengan melibatkan lintas sektor. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan ketersediaan pangan yang memadai melalui produksi pangan domestik dan perdagangan; tercapainya stabilitas ketersediaan dan akses pangan secara makro-meso dan mikro; tercukupinya kualitas (keragaman dan keamanan pangan) dan kuantitas konsumsi pangan yang didukung oleh perbaikan infrastruktur. Untuk mewujudkan kondisi tersebut, diperlukan

dukungan kebijakan ekonomi makro yang mampu mewujudkan stabilitas ekonomi menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan.

Tabel 2.8
Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	67,36	69,82	73,85	84,38	83,45

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto tahun 2020-2021 tergolong tinggi dengan kriteria "tahan" yang menunjukkan kondisi ketahanan pangan yang baik. Dan mulai tahun 2022 hingga tahun 2024 Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto sudah tergolong sangat tinggi dengan kriteria "sangat tahan" yang bermakna Kota Sawahlunto dalam kondisi ketahanan pangan yang sangat baik.

2. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (%)

Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment/PoU*) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase atau probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya.

Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.

Tabel 2.9
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	7,08	8,36	11,19	10,62	9,31
Kab. Pesisir Selatan	5,2	6,23	6,49	8,65	8,82
Kab. Solok	6,71	6,5	7,07	6,83	8,94
Kab. Sijunjung	5,68	6,01	6,69	5,88	8,67
Kab. Tanah Datar	7,02	6,8	7,38	9,54	9,1
Kab. Padang Pariaman	5,55	5,61	6,95	7,41	8,68
Kab. Agam	6,5	6,77	9,05	9,86	9,24
Kab. Lima Puluh Kota	6,12	6,36	7,24	6,85	8,83
Kab. Pasaman	8,04	7,11	8,86	8,67	8,74
Kab. Solok Selatan	6,3	5,17	8,04	8,01	10,95
Kab. Dharmasraya	5,67	6,03	6,65	6,25	7,51
Kab. Pasaman Barat	5,9	6,13	6,47	7,21	8,55
Kota Padang	4,64	5	6,81	6,52	8,57
Kota Solok	5,02	5,84	5,7	6,71	7,89
Kota Sawahlunto	***6,41***	***6,15***	***9,22***	***8,76***	***8,19***
Kota Padang Panjang	6,05	6,4	7,13	6,81	5,33
Kota Bukittinggi	4,27	3,86	8,1	6,21	7,35
Kota Payakumbuh	5,37	5,09	6,7	6,51	8,17
Kota Pariaman	3,75	5,29	7,55	8,38	7,3
Provinsi Sumatera Barat	**5,86**	**6,02**	**7,31**	**7,63**	**8,88**

Sumber Data : sumbar.bps.go.id

PoU Kota Sawahlunto tahun 2024 berada di posisi kedua tertinggi dari 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang. *PoU* Kota Sawahlunto sebesar 8,19 bermakna 8,19 % penduduk Kota Sawahlunto mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif.

Tingginya Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan Kota Sawahlunto bukan disebabkan ketidakmampuan ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto, tetapi lebih pada pola konsumsi pangan yang belum sesuai dengan standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Hal ini mengacu pada pendapatan masyarakat (PDRB Per Kapita) Kota Sawahlunto yang berada pada posisi ke-4 tertinggi di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang. Di samping itu tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto juga masuk dalam 10 kabupaten/kota dengan tingkat kemiskinan terendah di Indonesia selama lima tahun terakhir.

Pola konsumsi pangan masyarakat Kota Sawahlunto yang belum sesuai dengan standar kecukupan energi sebagaimana terlihat pada skor pola pangan harapan (PPH) Kota Sawahlunto. Sasaran Skor PPH ideal yaitu 100% sesuai dengan bobotnya masing-masing sebagaimana yang tercantum pada Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pola Pangan Harapan yang menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam memotret kualitas konsumsi pangan masyarakat melalui penilaian jumlah dan komposisi pangan berdasarkan PPH.

Tabel 2.10
Skor Pola Pangan Harapan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Kelompok Pangan	Survei Analisis Konsumsi Pangan Tahun				
		Skor PPH				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Padi-padian	20,4	22,5	23,7	25,0	25,0
2.	Umbi-umbian	0,9	0,8	1,5	1,0	1,1
3.	Pangan hewani	22,7	22,5	23,6	24,0	24,0
4.	Minyak dan Lemak	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	1,0	0,9	0,8	1,0	0,9
6.	Kacang-kacangan	6,1	6,8	5,1	5,6	6,4
7.	Gula	0,8	0,5	0,6	1,3	1,5
8.	Sayur dan Buah	26,7	25,4	24,9	25,2	27,1
9.	Lain-lain	0	0	0,0	0,0	0,0
	Total	**83,7**	**84,5**	**85,1**	**88,2**	**91,1**

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2025

Berikut skor pola pangan harapan (PPH) Kota Sawahlunto disandingkan dengan skor PPH ideal sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.4
Perbandingan Konsumsi dan Keragaman Pangan Pola Harapan Ideal Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2024

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan, 2024

Pada grafik di atas terlihat konsumsi pangan masyarakat Kota Sawahlunto berada di bawah kondisi ideal, hal ini tergambar dari komposisi dan jumlah pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat Kota Sawahlunto yang rata-rata berada di bawah skor PPH ideal, kecuali pada kelompok padi padian, pangan hewani, minyak/lemak yang mempunyai skor sama dengan idealnya. Untuk itu ke depan perlu dilakukan sosialisasi kepada masyarakat Kota Sawahlunto bagaimana pola makan yang sehat dan sesuai dengan kebutuhan energi tubuh untuk beraktivitas, serta diversifikasi makanan dengan pola "kenyang tak mesti dengan makan nasi".

Kondisi di atas menunjukkan bahwa daerah yang *PoU*nya tinggi tidak selalu disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat daerah tersebut untuk membeli makanan yang bergizi dan sesuai dengan kebutuhan energinya, namun ada yang disebabkan rendahnya pengetahuan dan wawasan masyarakat daerah tersebut tentang pola makan yang bergizi, seimbang dan aman.

3. Konsumsi Listrik Per Kapita

Konsumsi listrik per kapita adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kwh (*kilo watt hours*) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi oleh seluruh penduduk suatu wilayah.

Konsumsi listrik per kapita juga dapat digunakan sebagai indikator taraf hidup masyarakat. Semakin tinggi taraf hidup masyarakat, semakin tinggi pula kecenderungan penggunaan peralatan listrik oleh masyarakat yang berdampak pada semakin tingginya pemakaian (konsumsi)

Tabel 2.11
Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh/Kapita)
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Konsumsi Listrik (MWh) yang tercatat di PT PLN Ranting Silungkang {(KWh)/kapita}	1.254.712	1.203,602	1.237,862	1.245,528	1.270,532
2	Jumlah Konsumsi Listrik (MWh)yang tercatat di PT PLN ULP Kota Sawahlunto {(KWh)/kapita}	1.339,263	1.351,463	1.355,532	1.394,636	1.416,714

Sumber Data : Sawahlunto Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas terlihat perkembangan konsumsi listrik per kapita di Kota Sawahlunto berfluktuasi selama lima tahun terakhir (tahun 2020-2024) dengan kisaran 1.203,602 kwh/kapita hingga 1.416,714 kwh/kapita. Peningkatan konsumsi listrik per kapita di Kota Sawahlunto seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk Kota Sawahlunto.

4. Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum. SPAM meliputi jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan. SPAM Jaringan Perpipaan adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum yang disalurkan kepada pelanggan (Rumah Tangga) melalui sistem perpipaan. SPAM bukan jaringan perpipaan terdiri atas : sumur dangkal, sumur pompa, bak penampungan air hujan, terminal air, bangunan penangkap mata air.

Berikut persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir:

Tabel 2.12
Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap
Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan
Tahun 2020- 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	50,90	51,55	55,05	49,67	52,81

Sumber Data : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Sawahlunto, 2025

Persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan Kota Sawahlunto selama periode tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Penurunan tahun 2023 disebabkan adanya kerusakan jaringan perpipaan yang disebabkan oleh bencana alam dan umur konstruksi.

Tabel 2.13
Persentase Akses Rumah Tangga Terhadap
Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan Kabupaten/Kota
Tahun 2024

No	Kabupaten/Kota	Persentase (%)
1	Kab. Kepulauan Mentawai	6,61
2	Kab. Pesisir Selatan	17,66
3	Kab. Solok	21,80
4	Kab. Sijunjung	34,59
5	Kab. Tanah Datar	21,78
6	Kab. Padang Pariaman	17,88
7	Kab. Agam	16,73
8	Kab. Lima Puluh Kota	11,99
9	Kab. Pasaman	28,72
10	Kab. Solok Selatan	27,56
11	Kab. Dharmasraya	0,46
12	Kab. Pasaman Barat	14,65
13	Kota Padang	47,79
14	Kota Solok	87,72
15	***Kota Sawahlunto***	49,67
16	Kota Padang Panjang	63,71
17	Kota Bukittinggi	35,92
18	Kota Payakumbuh	84,06
19	Kota Pariaman	17,98
	Provinsi Sumatera Barat	**26,94**

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan di kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat bervariasi. Pada tahun 2024 kabupaten/kota dengan Persentase akses rumah tangga terhadap sumber air minum jaringan perpipaan tertinggi adalah Kota Solok dan yang terendah adalah Kabupaten Dharmasraya, sedangkan Kota Sawahlunto berada pada posisi ke-4 tertinggi setelah Kota Solok, Kota Payakumbuh dan Kota Padang Panjang.

5. Kapasitas Air Baku (m3/detik)

Kapasitas air baku (m^3/detik) adalah debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.

Air baku merupakan kebutuhan pokok, karena sampai saat ini air adalah salah satu jenis sumber daya berbasis air yang bermutu baik dan dapat dimanfaatkan manusia untuk konsumsi atau melakukan aktivitas mereka sehari-hari. Perkembangan kapasitas air baku Kota Sawahlunto tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.14
Capaian Air Baku Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kapasitas Air Baku M3/detik	0,101	0,104	0,142	0,144	0,110

Sumber Data : Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota sawahlunto, 2024

Kapasitas air baku di Kota Sawahlunto secara umum mengalami peningkatan. Namun pada tahun 2024 terjadi penurunan kapasitas air baku sebesar 0,034 M3/detik. Penurunan ini disebabkan terjadinya bencana alam pada IPA Lunto dan rusaknya pompa utama Rantih. Langkah -langkah yang harus dilakukan untuk meningkatkan sumber air baku adalah memperbaiki sarana dan prasaran serta mencari alternatif sumber air baku sebaik mungkin dengan sistem grafitisasi agar lebih efisien.

E. Lingkungan Hidup Berkualitas

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO2 dan NO2; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan. dan dinamika vegetasi.

Grafik 2.5
Perbandingan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

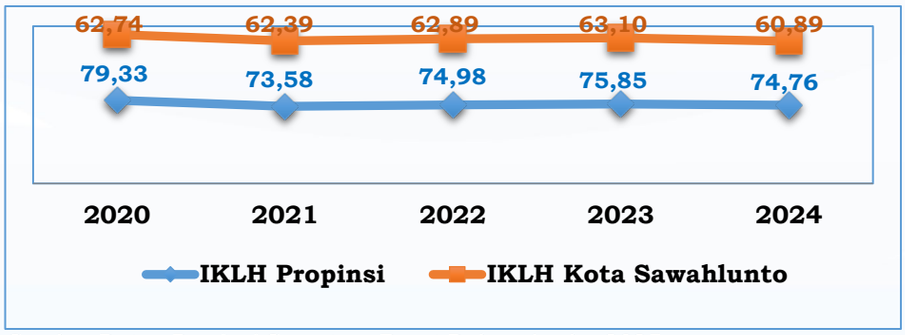

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Berdasarkan data Provinsi Sumatera Barat, capaian IKLH Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berkisar antara 60 hingga 63,10 yang berada pada kategori “sedang” (50 ≤ x < 70). Pada tahun 2024 terjadi penurunan IKLH Kota Sawahlunto, hal ini disebabkan penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) sebagai akibat badan air sungai tercemar. Kondisi ini diketahui berdasarkan pemantauan kualitas air pada tahun 2024 yang menunjukkan bahwa dari 14 titik pemantauan air, hanya 1 titik yang memenuhi baku mutu air, 4 titik pencemaran sedang dan 9 titik pencemaran ringan. Hal ini mencerminkan limbah rumah tangga yang belum terkelola dengan baik.

2. Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman

Akses sanitasi aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T).

Akses sanitasi aman sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virus yang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Oleh sebab itu perlu menciptakan kondisi lingkungan yang mendukung kualitas air baku, menyediakan layanan air minum dan sanitasi yang aman dengan melibatkan masyarakat secara menyeluruh (inklusif).

Berikut rumah tangga dengan akses sanitasi aman di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023-2024 :

Tabel 2.15
Data Sanitasi Aman Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2023-2024

No	Kabupaten/Kota	Sanitasi Aman (%)	
		2023	2024
1	Kab. Kepulauan Mentawai	5,49	2,64
2	Kab. Pesisir Selatan	4,59	6,70
3	Kab. Solok	4,79	4,90
4	Kab. Sijunjung	3,63	2,48
5	Kab. Tanah Datar	4,42	4,89
6	Kab. Padang Pariaman	4,83	6,34
7	Kab. Agam	14,48	12,70
8	Kab. Lima Puluh Kota	7,95	5,60
9	Kab. Pasaman	0,57	0,96
10	Kab. Solok Selatan	7,86	5,44
11	Kab. Dharmasraya	4,09	5,62
12	Kab. Pasaman Barat	1,26	2,74
13	Kota Padang	19,40	18,56
14	Kota Solok	13,00	16,25
15	***Kota Sawahlunto***	***8,00***	***8,19***
16	Kota Padang Panjang	9,87	8,42
17	Kota Bukittinggi	7,71	6,38
18	Kota Payakumbuh	16,35	19,48
19	Kota Pariaman	16,84	16,92
	Provinsi Sumatera Barat	**8,57**	**8,65**

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat

Rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi aman di Provinsi Sumatera Barat masih sangat rendah, yakni di bawah 20 %. Pada tahun 2024 kabupaten/kota yang telah melaksanakan sanitasi aman tertinggi adalah Kota Payakumbuh dan yang terendah adalah Kabupaten Pasaman, sedangkan Kota Sawahlunto berada pada posisi ke-5 tertinggi setelah Kota Payakumbuh, Kota Padang, Kota Pariaman dan Kota Solok.

Data Akses sanitasi aman mulai tersedia tahun 2023, sebelumnya indikator kinerja yang dipantau dan dievaluasi adalah Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak. Berikut rumah tangga dengan akses sanitasi layak di Provinsi Sumatera Barat tahun 2020-2024 :

Tabel 2.16
Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat (Persen)
Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi Layak Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	61.73	71.05	69.09	72.28	75.64
Kab. Pesisir Selatan	71.51	71.40	73.68	76.82	78.93
Kab. Solok	50.36	47.63	57.28	59.75	62.56
Kab. Sijunjung	64.95	72.63	74.14	72.18	74.53
Kab. Tanah Datar	62.86	53.73	57.49	62.99	65.02
Kab. Padang Pariaman	59.72	55.86	59.76	61.77	63.73
Kab. Agam	71.58	77.25	74.84	77.04	77.00
Kab. Lima Puluh Kota	53.86	55.69	64.19	60.64	64.31
Kab. Pasaman	40.90	45.26	42.81	46.74	49.35
Kab. Solok Selatan	59.17	58.57	55.33	54.69	56,71
Kab. Dharmasraya	84.16	82.71	81.09	81.57	85.99
Kab. Pasaman Barat	63.65	70.28	68.98	71.64	73.49
Kota Padang	82.50	80.13	76.10	78.56	78.22
Kota Solok	89.19	91.40	92.47	94.35	92.19
Kota Sawahlunto	***80.77***	***86.45***	***86.86***	***90.18***	***91.24***
Kota Padang Panjang	72.15	73.04	77.42	76.31	79.57
Kota Bukittinggi	90.25	89.93	85.09	89.32	89.07
Kota Payakumbuh	87.75	89.49	87.10	87.75	87.93
Kota Pariaman	81.81	79.56	82.91	84.18	85.99
Provinsi Sumatera Barat	**68.11**	**68.68**	**69.27**	**70.97**	**72.82**

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak di Kota Sawahlunto cenderung meningkat dan merupakan kabupaten/kota dengan Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi layak tertinggi kedua setelah Kota Solok.

Perbedaan akses sanitasi aman dengan akses sanitasi layak dapat dilihat dari tabel berikut :

Tabel 2.17
Komponen Akses Sanitasi Layak Dan Akses Sanitasi Aman

Komponen	Akses Layak	Akses Aman
Bangunan Atas	Kloset leher angsa	Kloset leher angsa
Bangunan Bawah	Tangki septik dan lubang tanah (khusus perdesaan)	Tangki Septik atau Sistem Pengolahan Air Limbah (SPAL)
Pengguna	Bangunan atas digunakan oleh rumah tangga sendiri atau bersama dengan rumah tangga lain tertentu.	Bangunan atas digunakan oleh satu rumah tangga
Frekuensi Penyedotan	(tidak dinilai)	Minimal sekali dalam jangka waktu 5 tahun terakhir

Sumber Data : Meta Data Target Indikator Sanitasi (Bappenas, PPAS, Usaid Iuwash Plus)

3. Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)

Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.

Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah mempertimbangkan karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan ;

a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti *biokonversi maggot* BSF, vermi *composting*, *biodigester*, dsb.
b. Daur ulang materi (*material recovery*) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir.

Tabel 2.18
Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Timbulan Sampah Tahunan (Ton/Tahun)	6,852.82	6,843.52	6,882.56	6,925.99	6,988.44
2	Pengurangan Sampah Tahunan (Sampah Terolah) (Ton/Tahun)	1,472.73	1,407.80	1,701.03	1,743.90	1,829.74
3	Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (% Pengurangan Sampah)	21.49	20.57	24.72	25.18	26.18

Sumber Data : SIPSN DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah Kota Sawahlunto semakin meningkat, walaupun peningkatannya belum begitu siginfikan. Hal ini disebabkan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bahaya sampah dan lingkungan hidup sehat serta terbatasnya sarana dan prasarana pengolahan sampah. Cakupan pelayanan sampah di Kota Sawahlunto meliputi : Sudah dilayani (90% atau 34 desa/kelurahan) dan Belum terlayani (10% atau 3 desa/kelurahan).

4. Proporsi RT dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)

Proporsi rumah tangga (RT) dengan layanan penuh pengumpulan sampah diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

Rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah adalah rumah tangga yang :

- Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap dan rutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah misal : fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau
- Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200 m, dilayani dengan frekuensi tetap dan rutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu.

Tabel 2.19
Proporsi Rumah Tangga Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

No	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Rumah Tangga	14.257	14.314	14.371	14.630	14.847
2	Rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah	2.457	3093	3215	3097	2470
3	**Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kota Sawahlunto**	**17,23**	**21,61**	**22,37**	**21,17**	**16,64**

Sumber Data : DPKP2LH 2024

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, hal ini disebabkan adanya perilaku sebagian masyarakat yang tidak taat terhadap kewajiban untuk membayar retribusi sampah, sehingga layanan sampah tidak beroperasi di beberapa lokasi.

5. Indek Kinerja Pengelolaan Sampah

Indeks Pengelolaan Persampahan (IKPS) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja pengelolaan sampah. Indeks ini mencakup berbagai aspek seperti pengurangan sampah, penanganan sampah, dan tingkat partisipasi masyarakat.

Pengelolaan persampahan adalah proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan sampah untuk mengurangi dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan. Sistim pengolahan sampah yang digunakan di kota sawahlunto berupa sistim Sanitary landfill yaitu sistem pengelolaan sampah dimana sampah dibuang dan ditumpuk di lokasi yang cekung, kemudian dipadatkan dan ditimbun di dalam tanah.

Tabel 2.20
Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	SATUAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Jumlah sampah yang masuk ke TPA	Ton/Tahun	5,146.50	5,108.17	5,069.85	5,088.10	5,102.70
2	Jumlah timbulan sampah	Ton/Tahun	6,852.82	6,843.52	6,882.56	6,925.99	6,988.44
3	Indeks Pengelolaan Persampahan		-	64,99	62,00	59,89	64,40

Sumber Data SIPSN DPKP2LH Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Berdasarkan data tabel, nilai IKPS kota sawahlunto bervariasi, tahun 2024 nilai IKPS naik dari tahun sebelumnya menjadi 64,40, hal ini dikarenakan adanya Pendampingan dan pembinaan tata kelola sampah, Penguatan fasilitas pengelolaan sampah (TPS 3R dan bank sampah), Komitmen pemerintahan kota terhadap kebersihan dan lingkungan, disamping itu Sawahlunto konsisten mengikuti penilaian program lingkungan seperti *Adipura* tiap tahun, yang mencakup aspek pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir (pengumpulan, pengangkutan, pengolahan di TPA, dan daur ulang). Komitmen ini memperbaiki kinerja operasional dan pengelolaan sampah secara menyeluruh.

6. Indeks Tutupan Lahan

Indeks Tutupan Lahan (*Land Cover Index*) adalah metrik yang menggambarkan distribusi dan karakteristik tutupan lahan di suatu wilayah. Ini biasanya digunakan dalam analisis spasial dan pemantauan lingkungan untuk memahami perubahan penggunaan lahan dan dampaknya terhadap ekosistem.

Indeks tutupan lahan memberikan informasi yang penting dalam pemetaan, perencanaan lingkungan, pemantauan perubahan iklim, dan analisis ekologi. Dengan memantau perubahan dalam distribusi tutupan lahan dari waktu ke waktu, maka dapat dipahami dampak aktivitas manusia dan alam terhadap lingkungan, serta perlunya merencanakan pengelolaan lahan yang berkelanjutan. Metode pemantauan indeks tutupan lahan meliputi penginderaan jauh, survei lapangan, dan analisis data spasial menggunakan teknologi GIS (Sistem Informasi Geografis). Luas Tutupan Lahan (LTL) dihitung dari penjumlahan luas sebagai berikut :

a. Hutan lahan kering primer, hutan rawa primer, hutan mangrove primer, hutan lahan kering sekunder, hutan rawa sekunder, hutan mangrove sekunder dan hutan tanaman;
b. Semak/belukar dan semak/belukar rawa yang berada di kawasan hutan, sempadan sungai, sekitar danau/ waduk, sempadan pantai dan lahan kemiringan lereng > 25% (lebih besar dari dua puluh lima persen) dikalikan 0,6 (nol koma enam);

c. Ruang terbuka hijau seperti hutan kota, kebun raya, taman keanekaragaman hayati dikalikan 0,6 (nol koma enam);
d. Rehabilitasi hutan dan lahan, dikalikan 0,0 – 0,6 (nol koma nol sampai nol koma enam).

Tabel 2.21
Indeks Tutupan Lahan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Tutupan Lahan Kota Sawahlunto (%)	38,76	36,95	37,01	38,12	39,73

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto 2024

Pada tabel di atas terlihat Indeks Tutupan Lahan Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berkisar antara 36,95 hingga 39,73 dan berada pada kategori "kurang" (Kategori Indeks Kualitas Tutupan Lahan : Sangat Baik (90 – 100), Baik (70 – 89), Sedang (50 – 69), Kurang (25 – 49), Sangat Kurang (0 – 24).

F. Reliensi Terhadap Bencana Dan Perubahan Iklim

Bencana yang terjadi di Kota Sawahlunto pada umumnya dipengaruhi oleh faktor-faktor geologi, litologi, struktur geologi (patahan) kemiringan lereng, geomorfologi, air tanah dan daya dukung tanah. Berdasarkan data yang diperoleh, bencana yang sering terjadi berupa tanah longsor dan aktivitas sesar (patahan).

a. Gempa Bumi

Kota Sawahlunto memiliki potensi kebencanaan yang kemungkinan akan terjadi gempa bumi, sedangkan longsoran dan struktur patahan akan cenderung mejadi kendala dalam pembangunan wilayah. Berdasarkan data spasial kerawanan gempa bumi di Kota Sawahlunto dari mulai rendah, sedang dan tinggi, mayoritas kerawanan gempa bumi Kota Sawahlunto berada pada rawan gempa bumi tinggi, dipengaruhi oleh struktur geologi, lereng dan morfologi serta vegetasi yang ada.

b. Gerakan Tanah Atau Rawan Longsor

Kerawanan bencana gerakan tanah atau longsoran di Kota Sawahlunto cukup bervariatif dari mulai kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Kerawanan bencana longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas manusia, keberadaan vegetasi, jenis tanah dan kelerengan. Mayoritas kerawanan bencana longsor di Kota Sawahlunto berstatus "sedang" dengan luas 15.003,77 ha.

1. Indeks Resiko Bencana

Indeks Risiko Bencana (IRBI) dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk melihat potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu

wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.

Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRBI), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan menunjukkan bahwa tingkat kapasitas suatu wilayah semakin baik (meningkat), dengan asumsi nilai bahaya dan kerentanan dianggap konstan. Klasifikasi tingkat Indeks Risiko Bencana (IRBI adalah sebagai berikut : Rendah (lndeks <13), Sedang (lndeks 13 – 144), Tinggi (lndeks >144).

Kota Sawahlunto merupakan kota yang relatif rawan bencana karena kondisi topografi Kota Sawahlunto yang didominasi daerah perbukitan dengan kemiringan lereng dan morfologi yang begitu beragam, mulai dari dataran sampai dengan perbukitan terjal, dengan rentang lereng 0-8% sampai dengan lebih dari 40%, sebagian besar berada pada kelerengan 25-40 %. Disamping topografi Kota Sawahlunto yang rawan bencana longsor, perubahan iklim juga menjadi pemicu bencana kekeringan, banjir dan angin puting beliung. Sehingga beberapa kawasan di Kota Sawahlunto menjadi daerah rawan bencana. Tercatat dalam kurun lima tahun terakhir bencana longsor dan angin puting beliung adalah kejadian yang paling sering terjadi di Kota Sawahlunto.

Potensi kerawanan bencana gerakan tanah atau longsor di Kota Sawahlunto cukup bervariatif dari mulai kerawanan rendah, sedang dan tinggi. Kerawan bencana longsor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti aktivitas manusia, keberadaan vegetasi, jenis tanah dan kelerengan. Mayoritas kerawanan bencana longsor di Kota Sawahlunto berstatus “sedang” dengan luas 15.003,77 ha. Berdasarkan hal tersebut, Kota Sawahlunto mempunyai risiko bencana seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.22
Nilai Indeks Risiko Bencana (IRBI) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	113,20	113,20	109,56	108,94	114,22

Sumber Data : BPBD Kota Sawahlunto, 2025

Pada tabel di atas terlihat nilai Indeks Risiko Bencana Kota Sawahlunto berfluktuatif pada tahun 2020 - 2024 yang berada pada kelas kategori risiko sedang. Penilaian IRBI ini dikeluarkan oleh BNPB dengan dasar nilai IKD Kabupaten/Kota. Penilaian IRBI didasarkan pada ancaman, kerentanan dan ketahanan terhadap bencana. Dalam pengkajian risiko bencana ini perlu dipertimbangkan analisa data dan rekaman kejadian yang terjadi, analisa para ahli dan masyarakat lokal terhadap kemungkinan ancaman, analisa kerugian jiwa, harta benda dan lingkungan yang terdampak. Sehingga hasil kajian risiko tersebut dapat digunakan sebagai kebijakan pemerintah untuk pengurangan risiko bencana.

Pemerintah Kota Sawahlunto telah mempunyai dokumen Kajian Risiko Bencana 2022-2027 dan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana. Dokumen ini dapat dijadikan sebagai dasar penghitungan pengurangan risiko bencana dan proyeksi risiko bencana di Kota Sawahlunto untuk masa akan datang.

2. Indeks Ketahanan Daerah

Indeks Ketahanan Daerah (IKD) digunakan sebagai upaya mengurangi indeks risiko bencana yang diharapkan mampu dilaksanakan di daerah dengan implementasi fase perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring serta evaluasinya. IKD disusun untuk semua jenis bencana berdasarkan parameter kapasitas regulasi, kelembagaan, sistem peringatan dini, pendidikan, pelatihan, keterampilan, mitigasi, dan sistem kesiapsiagaan. Semakin besar nilai IKD semakin baik karena semakin besar nilai IKD menunjukkan atau menggambarkan kesiapan kapasitas pemerintah daerah dalam penanganan bencana semakin baik. Nilai indeks ketahanan daerah berada pada rentang nilai 0 - 1, dengan klasifikasi : Rendah (Indeks ≤ 0,4), Sedang (Indeks 0,4 - 0,8), Tinggi (Indeks 0,8 – 1).

Berikut perkembangan Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.23
Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	0,44	0,56	0,50	0,46	0,43

Sumber Data : BPBD Kota Sawahlunto, 2025

Nilai Indeks Ketahanan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berada dalam kategori sedang. Indeks Ketahanan Daerah berbanding terbalik dengan Indeks Risiko Bencana, semakin tinggi nilai ketahanan daerah maka akan semakin kecil nilai risiko bencana daerah tersebut.

Penanggulangan bencana merupakan indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh setiap daerah. Karena menyangkut keselamatan dan kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Kota Sawahlunto menyiapkan rangkaian kegiatan sosialisasi pencegahan bencana kepada masyarakat, menyampaikan informasi rawan bencana dan pembentukan desa tangguh bencana sebagai bentuk inovasi Kota Sawahlunto menghadapi bencana. Selain itu pemerintah Kota Sawahlunto juga menyiapkan sarana prasarana darurat kebencanaan. Selain itu untuk penanganan fasilitas umum yang terdampak bencana Pemerintah Kota Sawahlunto juga bisa mengajukan proposal ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat ke daerah membantu daerah dalam segi pembiayaan.

Pengukuran IKD Kota Sawahlunto dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Sawahlunto yang meliputi tujuh pengukuran, yaitu : 1) Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2) Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3) Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4) Penangangan tematik kawasan rawan bencana; 5) Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6) Perkuatan kesiapsiagaan; dan 7) Penanganan darurat bencana.

G. Demografi

Data demografi memberikan informasi tentang komposisi populasi seperti usia, jenis kelamin, status perkawinan, serta tingkat pendidikan. Data-data ini sangat penting untuk perencanaan pembangunan, dengan kata lain data demografi membantu dalam memahami bagaimana struktur populasi dapat berpengaruh pada berbagai aspek kehidupan masyarakat.

1. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Perkembangan populasi penduduk Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.24
Jumlah Dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk (Jiwa)	65.138	65.687	66.413	67.760	68.730
Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	4,18	0,84	1,11	2,03	1,43

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021-2025

Secara administratif jumlah penduduk Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun 1,92 %. Peningkatan jumlah penduduk tertinggi terjadi pada tahun 2020.

Laju pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu setiap tahunnya yang disebabkan adanya kelahiran, kematian dan perpindahan penduduk.

Grafik 2.6
Laju Pertumbuhan Penduduk
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

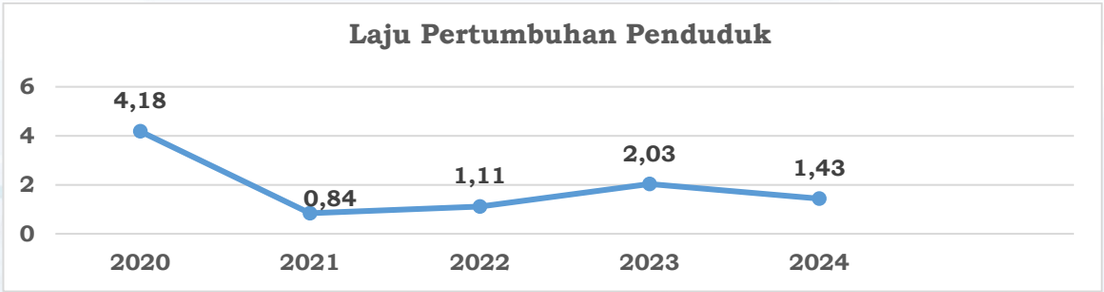

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021-2025, Data Diolah Tahun 2025

Dari grafik di atas terlihat laju pertumbuhan penduduk Kota Sawahlunto periode tahun 2020-2024 berfluktuatif. Penurunan laju pertumbuhan penduduk terjadi pada tahun 2021 dan tahun 2024, sedangkan tahun 2022-2023 cenderung

meningkat. Meningkatnya jumlah penduduk tentunya akan memicu munculnya permasalahan kependudukan. Semakin banyak jumlah penduduk, semakin besar kebutuhan akan ketersediaan pangan, sarana dan prasarana atau fasilitas umum, fasilitas kesehatan, pendidikan dan lainnya. Oleh sebab itu data laju pertumbuhan penduduk sangat dibutuhkan untuk memprediksi jumlah penduduk suatu wilayah di masa yang akan datang dan memprediksi kebutuhan sarana dan prasarana umum yang dibutuhkan

2. Komposisi Penduduk

Komposisi penduduk menurut kelompok umur menggambarkan banyak hal, diantaranya kebutuhan pelayanan, tingkat produktivitas serta konsumsi. Kelompok umur 0 - 14 tahun membutuhkan pelayanan sosial dan fasilitas umum yang lebih besar, seperti pelayanan kesehatan serta pendidikan, sehingga secara umum tingkat konsumsi akan lebih tinggi dibandingkan dengan produksi yang mampu dihasilkan. Hal yang sama juga terjadi pada kelompok umur di atas 65 tahun, dimana produktivitas secara umum mulai menurun, di sisi lain mereka membutuhkan pelayanan kesehatan yang lebih besar dibandingkan kelompok umur lainnya. Kelompok umur 0 - 14 tahun dan kelompok umur di atas 65 tahun disebut juga penduduk usia non produktif. Sedangkan kelompok usia 15 - 64 tahun atau disebut juga penduduk usia produktif, produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya, sehingga semakin besar jumlah penduduk pada kelompok umur ini semakin besar peluang untuk meningkatkan produktivitas suatu wilayah.

Komposisi penduduk ini juga akan berpengaruh pada Rasio ketergantungan. Rasio ketergantungan merupakan perbandingan jumlah penduduk usia non produktif terhadap jumlah penduduk usia. Semakin tinggi rasio ketergantungan, semakin besar beban yang harus ditanggung penduduk produktif, sebaliknya semakin kecil rasio ketergantungan, semakin kecil beban kelompok umur produktif untuk menanggung penduduk usia tidak produktif.

Berikut komposisi penduduk Kota Sawahlunto berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin tahun 2020-2024 :

Tabel 2.25
Komposisi Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024
Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin

Kelompok Umur	Jenis Kelamin 2020		Jml	Jenis Kelamin 2021		Jml	Jenis Kelamin 2022		Jml	Jenis Kelamin 2023		Jml	Jenis Kelamin 2024		Jml
	L	P		L	P		L	P		L	P		L	P	
0 – 4	3.011	2.809	5.820	3011	2810	5821	3019	2818	5837	3120	2950	6060	3.090	2.940	6.030
5 – 9	2.624	2.545	5.169	2598	2528	5126	2592	2526	5118	2750	2640	5400	2.870	2.720	5.590
10 – 14	2.837	2.608	5.445	2797	2581	5378	2751	2556	5307	2660	2590	5250	2.630	2.600	5.220
15 – 19	2.867	2.622	5.489	2860	2617	5477	2863	2621	5484	2840	2640	5480	2.810	2.640	5.450
20 – 24	2.721	2.597	5.318	2708	2582	5290	2701	2573	5274	2820	2590	5400	2.840	2.590	5.430
25 – 29	2.620	2.546	5.166	2640	2547	5187	2660	2553	5213	2710	2630	5340	2.740	2.640	5.370
30 – 34	2.422	2.337	4.759	2447	2361	4808	2479	2390	4869	2600	2530	5130	2.670	2.600	5.270
35 – 39	2.396	2.310	4.706	2430	2333	4763	2469	2364	4833	2420	2330	4750	2.450	2.340	4.790
40 – 44	2.260	2.217	4.477	2289	2242	4531	2323	2270	4593	2360	2270	4630	2.390	2.290	4.670
45 – 49	2.138	2.125	4.263	2179	2154	4333	2225	2194	4419	2190	2160	4360	2.210	2.180	4.390
50 – 54	1.907	1.950	3.857	1943	1982	3925	1984	2017	4001	2020	2030	4050	2.070	2.060	4.120
55 – 59	1.753	1.761	3.514	1800	1795	3595	1852	1836	3688	1820	1850	3670	1.830	1.870	3.710
60 – 64	1.246	1.367	2.613	1280	1403	2683	1319	1438	2757	1530	1580	3110	1.620	1.650	3.270
65 – 69	942	1.092	2.034	986	1140	2126	1030	1186	2216	1040	1200	2240	1.080	1.240	2.320
70 – 74	506	638	1.370	545	679	1224	588	726	1314	670	830	1500	730	900	1.630
75 +	517	847	1.138	542	878	1420	575	915	1490	540	860	1400	570	890	1.460
Jumlah	32.767	32.371	65.138	33.055	32.632	65.687	33.430	32.983	66.413	34.090	33.670	67.760	34.570	34.150	68.730

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Komposisi penduduk Kota Sawahlunto menunjukkan bahwa kelompok umur 0-4 adalah yang paling dominan. Dan dari komposisi penduduk juga dapat dihitung Rasio Ketergantungan Kota Sawahlunto dengan capaian di bawah 50, yang berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1-2 orang penduduk produktif. Pada tahun 2024, Rasio ketergantungan Kota Sawahlunto sebesar 47,88 yang berarti setiap 100 orang penduduk produktif di Kota Sawahlunto menanggung 48 orang penduduk yang tidak produktif yang terdiri dari anak-anak dan lansia.

Tabel 2.26
Komposisi Penduduk Kota Sawahlunto Tahun 2024
Berdasarkan Pendidikan Dan Jenis Kelamin

No	Tingkat Pendidikan	Jenis Kelamin		Jumlah (%)
		Laki-laki (%)	Perempuan (%)	
1	Tidak/Belum Sekolah	12,65	11,83	24,48
2	Belum Tamat SD/Sederajat	5,74	5,18	10,92
3	Tamat SD/Sederajat	8,02	6,81	14,83
4	SLTP/ Sederajat	6,94	6,53	13,47
5	SLTA/ Sederajat	12,84	11,98	24,81
6	Diploma I/II	0,27	0,50	0,77
7	Akademi/Diploma III/ Sarjana Muda	0,88	1,55	2,44
8	Diploma IV/Strata-I	2,74	5,02	7,76
9	Strata-II	0,24	0,28	0,52
10	Strata-III	0,00	0,00	0,01
	SAWAHLUNTO	**50,32**	**49,68**	**100,00**

Sumber Data : Disduk dan Capil Kota Sawahlunto, 2024

Komposisi penduduk Kota Sawahlunto berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa pendidikan penduduk Kota Sawahlunto yang dominan adalah SLTA sederajat dengan komposisi laki-laki lebih banyak dari perempuan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah yang menerapkan wajib belajar 13 tahun dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045.

3. Rasio Penduduk

Penduduk Kota Sawahlunto didominasi oleh penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin penduduk terlihat pada tabel berikut :

Tabel 2.27
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Lembah Segar	99,88	100,27	100,62	100,82	101,15
Barangin	99,92	99,94	99,97	99,80	99,79
Silungkang	102,47	102,50	102,52	102,35	102,28
Talawi	102,75	102,69	102,62	102,35	102,20
Total	101,22	101,30	101,36	101,25	101,23

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021-2025

Berdasarkan tabel di atas, Rasio jenis kelamin penduduk Kota Sawahlunto di atas 100 yang berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan, dengan kata lain pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat

penduduk laki-laki lebih dari 100 orang. Pada tahun 2024, Rasio jenis kelamin penduduk Kota Sawahlunto sebesar 101,23 yang berarti pada setiap 100 orang penduduk perempuan terdapat penduduk laki-laki sebanyak 102 orang.

4. Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk yang tinggi pada suatu wilayah dapat memudahkan dalam pelayanan sosial, namun jika telah melebihi kapasitas dapat menyebabkan degradasi lingkungan. Kepadatan penduduk yang tinggi juga dapat meningkatkan kerawanan sosial jika tidak didukung oleh pertumbuhan ekonomi wilayah yang tinggi pula. Secara umum, tingkat kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.28
Kepadatan Penduduk Kota Sawahlunto (Jiwa/Km²)
Tahun 2020 – 2024

Kecamatan	Kepadatan Penduduk				
	2020	2021	2022	2023	2024
Silungkang	346,46	348,80	352,08	358,61	363,10
Lembah Segar	253,94	255,04	256,83	260,97	263,62
Barangin	229,07	232,03	235,61	241,43	245,95
Talawi	202,16	203,69	205,78	209,76	212,58
Kota Sawahlunto	238,21	240,22	242,87	247,79	251,33

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021-2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa kepadatan penduduk di Kota Sawahlunto belum merata. Beberapa kecamatan dengan wilayah yang lebih luas, jumlah penduduknya lebih sedikit, seperti Kecamatan Talawi dan Kecamatan Barangin. Sebaliknya Kecamatan Silungkang dan Kecamatan Lembah Segar dengan wilayah yang lebih sempit, jumlah penduduknya lebih banyak. Hal ini disebabkan Kecamatan Silungkang berada pada jalur lintas Sumatera dan Kecamatan Lembah Segar merupakan ibukota Sawahlunto dan merupakan pusat pemukiman dan perekonomian.

5. Analisa Proyeksi Kependudukan

Berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Kota Sawahlunto tahun 2025 - 2030 yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Sawahlunto, maka diperoleh data proyeksi jumlah penduduk sebagai berikut :

Tabel 2.29
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto
Berdasarkan Kelompok Umur Dan Jenis Kelamin
Tahun 2025-2030

Kelompok Umur	Jenis Kelamin 2025		Jumlah	Jenis Kelamin 2030		Jumlah
	L	P		L	P	
0 – 4	3.000	2.876	5.876	3.021	2.896	5.917
5 – 9	3.044	2.862	5.906	3.048	2.946	5.994
10 – 14	2.615	2.616	5.231	3.048	2.955	6.003
15 – 19	2.768	2.644	5.412	2.559	2.662	5.221
20 – 24	2.849	2.599	5.448	2.766	2.630	5.396
25 – 29	2.768	2.633	5.401	2.909	2.644	5.553

Kelompok Umur	Jenis Kelamin 2025		Jumlah	Jenis Kelamin 2030		Jumlah
	L	P		L	P	
30 – 34	2.719	2.669	5.388	2.880	2.768	5.648
35 – 39	2.490	2.382	4.872	2.803	2.734	5.537
40 – 44	2.406	2.299	4.705	2.512	2.383	4.895
45 – 49	2.242	2.190	4.432	2.395	2.284	4.679
50 – 54	2.097	2.081	4.178	2.213	2.157	4.370
55 – 59	1.854	1.898	3.752	2.047	2.040	4.087
60 – 64	1.684	1.710	3.394	1.789	1.855	3.644
65 – 69	1137	1289	2.426	1.543	1627	3.170
70 – 74	773	961	1.734	949	1146	2.095
75 +	605	935	1.540	878	1314	2.192
Jumlah	35.051	34.644	69.695	37.360	37.041	74.401

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

Tabel di atas memperlihatkan perkiraan jumlah penduduk Kota Sawahlunto mengalami peningkatan sebanyak 6,75 % selama 5 tahun ke depan. Dari tabel proyeksi di atas juga terlihat bahwa jumlah penduduk yang berusia produktif (kelompok umur 15-64 tahun) cukup besar. Hal ini merupakan bonus demografi bagi pembangunan daerah sebagai tenaga produktif dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Di samping dampak positif, meningkatnya jumlah penduduk Kota Sawahlunto juga mempunyai dampak negatif, seperti muncul permasalahan kependudukan. Oleh sebab itu Pemerintah Sawahlunto perlu mempersiapkan berbagai kebijakan untuk mengatasi dampak negatif tersebut, seperti kesiapan penyediaan pangan (termasuk kawasan pertanian), penyediaan berbagai sarana prasarana fasilitas umum, seperti kesehatan, pendidikan dan lainnya agar kesejahteraan penduduk terjamin. Disamping itu juga harus memperhatikan keseimbangan alam, ketersediaan lapangan kerja dan keamanan lingkungan.

Jumlah penduduk Kota Sawahlunto 5 tahun ke depan berdasar jenis kelamin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.30
Proyeksi Jumlah Penduduk Kota Sawahlunto
Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2025-2030

Jenis Kelamin	Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
		2025	2030
Laki-Laki	34.570	35.051	37.360
Perempuan	34.150	34.644	37.041
Rasio Jenis Kelamin	101,23	101,17	100,86

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

Dari tabel di atas diketahui bahwa rasio atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dan perempuan untuk 5 tahun ke depan dapat dikatakan seimbang. Hal ini merupakan informasi yang penting dalam rangka menyusun perencanaan pembangunan ke depan yang berwawasan gender, terutama yang berkaitan dengan perimbangan pembangunan laki-laki dan perempuan agar dilaksanakan secara adil.

Adapun proyeksi rasio ketergantungan Kota Sawahlunto selama 5 tahun ke depan diperkirakan sebagai berikut :

Tabel 2.31
Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk Tahun 2024 (Jiwa)	Proyeksi Penduduk (Jiwa)	
		2025	2030
0-14 Tahun	16.840	17.013	17.914
15-64 Tahun	46.470	46.982	49.030
> 65 Tahun	5.410	5.700	7.457
Angka Ketergantungan	47,88	48,34	51,74

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kota Sawahlunto

Memperhatikan tabel di atas, diperkirakan rasio ketergantungan di Kota Sawahlunto akan semakin meningkat untuk 5 tahun ke depan, hal ini mengandung arti semakin tinggi pula beban yang harus ditanggung penduduk produktif (usia 15-64 tahun) untuk membiayai hidup penduduk non produktif. Oleh sebab itu perlu upaya maksimal Pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja usia produktif dengan meningkatkan kualitas SDM, mendukung program antinatalitas dan memperluas lapangan pekerjaan.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Kesejahteraan Ekonomi

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator kesejahteraan masyarakat yang dapat memberikan gambaran atas dampak kebijakan pembangunan yang dilaksanakan, khususnya dalam bidang ekonomi. PDRB digunakan untuk mengetahui kondisi pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK). PDRB juga digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian; untuk mengetahui besarnya PDRB perkapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran atau kesejahteraan, untuk mengetahui tingkat inflasi atau deflasi, berdasarkan perubahan harga produsen.

Pada tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Sawahlunto sebesar 4,02%, angka ini menurun sebesar 9,87% dari tahun 2023 yang mencapai 4,46%. Berikut perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2020-2024) disandingkan dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Pertumbuhan Ekonomi Nasional.

Grafik 2.7
Pertumbuhan Ekonomi
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

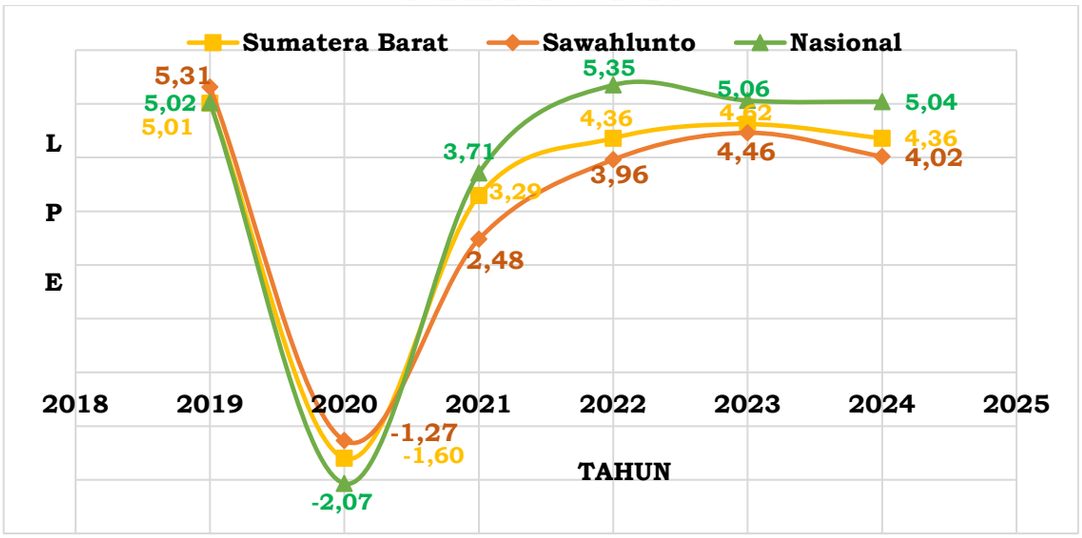

Sumber Data : BPS, 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sebelum pandemi covid-19 (tahun 2019) berada di angka 5,31 persen dan angka ini berada di atas pertumbuhan ekonomi nasional dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Sedangkan saat pandemi covid-19 melanda pada awal Maret 2020, ekonomi Kota Sawahlunto mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,27 persen, angka ini juga lebih baik dari angka pertumbuhan ekonomi Nasional dan Provinsi Sumatera Barat yang mengalami kontraksi sebesar 2,07 persen dan 1,62 persen. Namun saat perekonomian mulai menggeliat pada tahun 2021 sampai tahun 2024, pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto jauh lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto didorong oleh pertumbuhan positif di sebagian besar lapangan usaha (*Supply Side*) dan sebagian jenis pengeluaran (*Demand Side*), terutama lapangan usaha atau jenis pengeluaran yang memberikan kontribusi yang cukup besar (dominan) pada struktur perekonomian Kota Sawahlunto.

Berikut 5 lapangan usaha dominan Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada grafik di bawah ini.

Grafik 2.8
Kontribusi Lima Lapangan Usaha Dominan Kota Sawahlunto
Berdasarkan PDRB ADHB Tahun 2024 (Dalam persen)

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Berikut 4 jenis pengeluaran dominan Kota Sawahlunto sebagaimana terlihat pada grafik berikut :

Grafik 2.9
Kontribusi Jenis Pengeluaran
Kota Sawahlunto Tahun 2024 (Dalam persen)

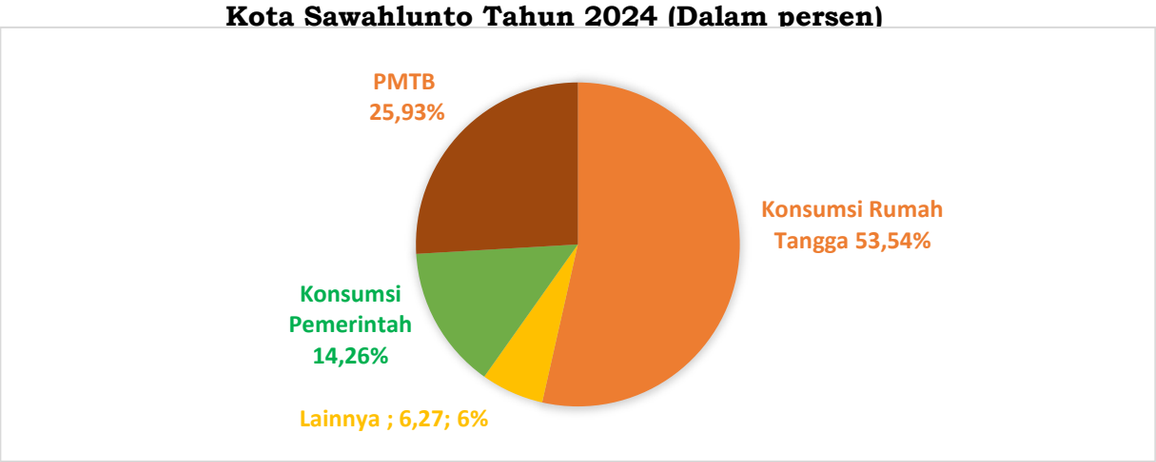

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Semakin tinggi pertumbuhan lapangan usaha (*supply side*) dominan dan jenis pengeluaran (*demand side*) dominan, semakin besar pula dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2024, beberapa lapangan usaha (s*upply side)* dominan dan jenis pengeluaran (*demand side*) dominan mengalami perlambatan pertumbuhan dari tahun sebelumnya yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto juga melambat, seperti: *Lapangan usaha Industri Pengolahan, pertumbuhannya turun dari 5,07% menjadi 3,13%; *Lapangan usaha Konstruksi, pertumbuhannya turun dari 5,83% menjadi 3,59%; *Lapangan usaha Informasi dan Komunikasi, pertumbuhannya turun dari 7,69% menjadi 4,63%; Jenis Pengeluaran PMTB, pertumbuhannya turun dari 7,22% menjadi 2,87%, disamping itu terdapat satu lapangan usaha yang terkontraksi sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 2.32
Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto
Menurut Lapangan Usaha (*Supply Side*)
Dan Jenis Pengeluaran (*Demand Side*)
Tahun 2020 – 2024

No	Lapangan Usaha (*Supply Side*)	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,71	7,07	4,93	2,47	1,53
2	Pertambangan dan Penggalian	8,89	-28,23	-3,04	-0,87	-6,13
3	Industri Pengolahan	-2,98	4,91	2,56	5,07	3,13
4	Pengadaan Listrik dan Gas	-6,17	5,11	1,98	3,93	4,18
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-0,31	5,35	-0,70	3,61	2,14
6	Konstruksi	-5,21	3,18	3,19	5,83	3,59
7	Perdagangan Besar & Eceran, Reparasi Mobil & Sepeda Motor	-0,69	4,17	5,08	4,86	5,07
8	Transportasi dan Pergudangan	-10,96	4,35	3,53	5,60	5,37
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-10,10	9,38	11,63	5,92	6,44
10	Informasi dan Komunikasi	8,19	7,08	5,77	7,69	4,63
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,91	9,49	5,55	3,63	4,58
12	Real Estat	0,13	4,94	5,94	6,27	4,95
13	Jasa Perusahaan	-3,16	3,43	5,14	5,10	5,11

No	Lapangan Usaha (*Supply Side*)	2020	2021	2022	2023	2024
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	-0,62	2,09	2,05	1,01	5,54
15	Jasa Pendidikan	4,41	4,85	4,00	1,94	2,94
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,26	7,35	4,48	7,15	5,03
17	Jasa Lainnya	-9,28	6,83	9,32	7,48	8,80
No	**Jenis Pengeluaran (*Demand Side*)**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Konsumsi Rumah Tangga	-2,61	2,2	3,56	2,81	3,65
2	Konsumsi LNPRT	-4,25	2,12	-0,27	5,19	4,29
3	Konsumsi Pemerintah	-9,41	2,60	-3,07	0,01	1,86
4	PMTB	-3,59	2,11	4,40	7,22	2,87
PDRB ADHK Kota Sawahlunto		**-1,27**	**2,48**	**3,96**	**4,46**	**4,02**

Sumber Data : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas terlihat selama empat tahun terakhir lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mengalami kontraksi (minus), lapangan usaha ini pada tahun 2024 memberikan kontribusi sebesar 3,65% terhadap PDRB ADHB Kota Sawahlunto (posisi ke 9), hal ini menjadi penyebab utama rendahnya pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto tahun 2024.

2. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan atau istilah lainnya Persentase penduduk miskin adalah banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.

Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).

Berikut perkembangan garis kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.10
Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto
(Rupiah/Kapita/Bulan) Tahun 2020–2024

Sumber Data : BPS, 2025

Pada grafik di atas terlihat Garis Kemiskinan Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 7%. Meningkatnya Garis Kemiskinan di suatu wilayah kadang kala juga akan meningkatkan

jumlah orang miskin di wilayah tersebut jika rata-rata pengeluaran per kapita per bulan masyarakatnya ada yang tidak meningkat atau bahkan menurun. Dengan tidak meningkatnya rata-rata pengeluaran per kapita per bulan sebagian masyarakat, dianggap sebagian masyarakat tersebut tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan.

Berikut perkembangan kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.33
Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Garis Kemiskinan (Rupiah/Kapita/Bulan)	399.688	412.757	443.301	487.610	524.196
Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	1360	1520	1470	1470	1520
Tingkat Kemiskinan (%)	2,16	2,38	2,28	2,27	2,33
Penduduk Miskin Ekstrem (%)	0,00	0,39	0,82	0,00	0,63

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2021-2025
Surat Kemenko PMK Nomor : B-464/13/D-I/KPS.01.00/02/2024

Pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto meningkat sebesar 0,06 poin atau 2,64% dari tahun sebelumnya. Berikut perkembangan Angka Kemiskinan Kota Sawahlunto disandingkan dengan Angka Kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.11
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

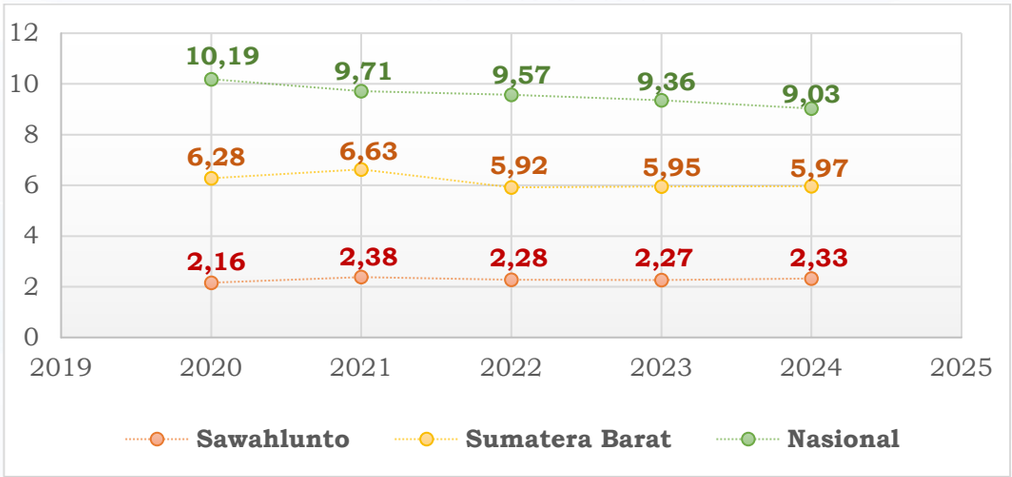

Sumber Data : BPS, 2025

Pada grafik di atas terlihat tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto jauh di bawah tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Berikut tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto disandingkan dengan tinggi kemiskinan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana tertera pada tabel berikut :

Tabel 2.34
Perkembangan Tingkat Kemiskinan
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	14,35	14,84	13,97	13,72	13,89
Pesisir Selatan	7,61	7,92	7,11	7,34	7,49
Solok	7,81	8,01	7,12	7,13	7,31
Sijunjung	6,78	6,80	6,00	5,88	5,78
Tanah Datar	4,40	4,54	4,26	4,16	4,28
Padang Pariaman	6,95	7,22	6,25	6,34	6,27
Agam	6,75	6,85	6,22	6,60	6,83
Lima Puluh Kota	6,86	7,29	6,59	6,80	6,92
Pasaman	7,16	7,48	6,85	6,80	6,74
Solok Selatan	7,15	7,52	6,51	6,45	6,56
Dharmasraya	6,23	6,67	5,56	5,56	5,32
Pasaman Barat	7,04	7,51	6,93	6,92	7,00
Kota					
Padang	4,40	4,94	4,26	4,17	4,06
Solok	2,77	3,12	3,02	3,05	3,07
Sawahlunto	***2,16***	***2,38***	***2,28***	***2,27***	***2,33***
Padang Panjang	5,24	5,92	5,14	5,24	5,31
Bukittinggi	4,54	5,14	4,46	4,11	4,08
Payakumbuh	5,65	6,16	5,66	5,44	5,19
Pariaman	4,10	4,38	4,13	4,20	4,26
Sumatera Barat	**6,28**	**6,63**	**5,92**	**5,95**	**5.97**

Sumber Data : BPS, 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa tingkat kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir (2020-2024). Bahkan Kota Sawahlunto merupakan salah satu dari 10 kabupaten/kota dengan persentase penduduk miskin terendah level nasional, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.35
Posisi Kota Sawahlunto Dalam 10 Kabupaten/Kota
Dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional
Tahun 2020-2024

Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1. Kabupaten Badung	1. **Kota Sawahlunto 2,38**	**1. Kota Sawahlunto 2,28**	1. **Kota Sawahlunto 2,27**	1. Kota Balikpapan 2,23
2. Kota Denpasar	2. Kota Tangerang Selatan 2,57	2. Kota Balikpapan 2,45	2. Kota Balikpapan 2,31	2. Kabupaten Badung 2,23
3. Kota Sawahlunto	3. Kota Depok 2,58	3. Kabupaten Bangka Barat 2,46	3. Kota Depok 2,38	**3. Kota Sawahlunto 2,33**
4. Kota Tangerang Selatan	4. Kabupaten Badung 2,62	4. Kota Tangerang Selatan 2,50	4. Kota Tangerang Selatan 2,57	4. Kota Depok 2,34
5. Kota Depok	5. Kabupaten Bangka Barat 2,75	5. Kota Depok 2,53	5. Kota Denpasar 2,68	5. Kota Tangerang Selatan 2,36
6. Kabupaten Banjar	6. Kota Pekanbaru 2,83	6. Kabupaten Badung 2,53	6. Kota Sungai Penuh 3,00	6. Kota Denpasar 2,59
7. Kota Balikpapan	7. Kota Balikpapan 2,89	7. Kabupaten Banjar 2,79	7. Kota Solok 3,05	7. Kabupaten Bangka Barat 2,59
8. Kota Pekanbaru	8. Kota Denpasar 2,96	8. Kota Denpasar 2,97	8. Kota Jakarta Selatan 3,10	8. Kota Sungai Penuh 2,92
9. Kabupaten Bangka Barat	9. Kabupaten Banjar 3,04	9. Kota Sungai Penuh 2,97	9. Kota Pekanbaru 3,16	9. Kota Jakarta Selatan 3,03
10. Kota Kota Solok	10. Kota Solok 3,12	**10.** Kota Solok 3,02	10. Kota Dumai 3,21	**10.** Kota Batu 3,06

Sumber Data : BPS, Berita Resmi Statistik, 2024

Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 masuk dalam 10 kabupaten/kota dengan Persentase Penduduk Miskin Terendah Level Nasional. Bahkan selama tiga tahun (tahun 2021-2023), angka kemiskinan Kota Sawahlunto adalah yang terendah di Indonesia. Namun pada tahun 2024, Kota Sawahlunto berada pada posisi 3.

Selain Persentase penduduk miskin, kondisi kemiskinan suatu daerah juga dapat dilihat dari Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2). Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin (BPS, https://www.bps.go.id).

Berikut perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir (2020 – 2024) :

Grafik 2.12
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Dan
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

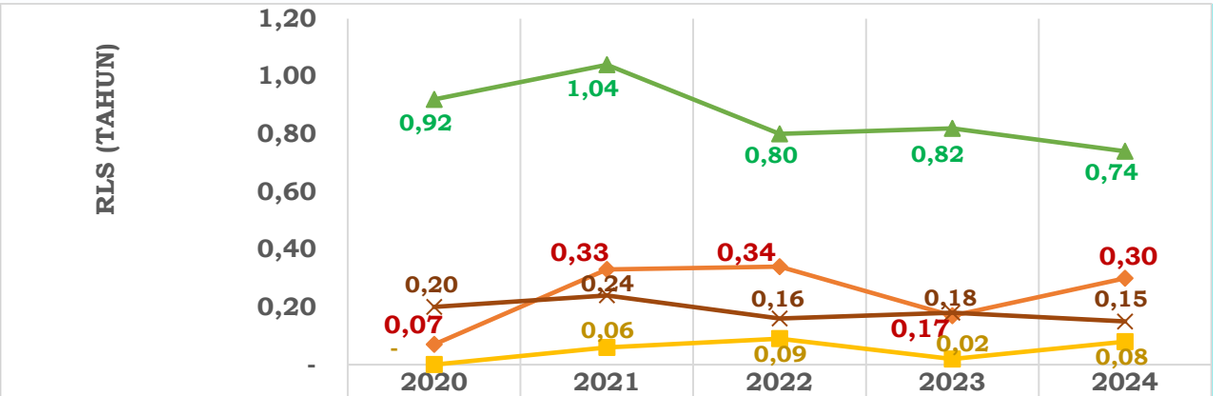

	2020	2021	2022	2023	2024
P1 Sawahlunto	0,07	0,33	0,34	0,17	0,30
P2 Sawahlunto	-	0,06	0,09	0,02	0,08
P1 Sumatera Barat	0,92	1,04	0,80	0,82	0,74
P2 Sumatera Barat	0,20	0,24	0,16	0,18	0,15

Sumber Data : BPS 2025

Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berkisar antara 0,07-0,34 dan tergolong rendah, hal ini mengandung makna rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Sawahlunto berada dekat dengan garis kemiskinan atau berada di sekitar garis kemiskinan. Jika dibandingkan dengan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Provinsi Sumatera Barat yang berada jauh di atas Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Sawahlunto, mengandung makna bahwa rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Kota Sawahlunto lebih tinggi (lebih baik) dibandingkan dengan rata-rata pengeluaran masing-masing penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan perkembangan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2020-2024 berada pada kisaran 0,00 – 0,09 dan tergolong rendah. Jika dibandingkan dengan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

Provinsi Sumatera Barat yang berada jauh di atas Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kota Sawahlunto, mengandung makna penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan dengan penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin Provinsi Sumatera Barat.

Meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) di Kota Sawahlunto tahun 2024 sejalan dengan meningkatnya tingkat kemiskinan. Meningkatnya Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) menunjukkan rata-rata pengeluaran penduduk miskin Kota Sawahlunto menjauh dari garis kemiskinan. Meningkatnya Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menunjukkan meningkatnya ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin di Kota Sawahlunto. Kondisi sebaliknya terjadi pada Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Provinsi Sumatera Barat yang mengalami penurunan meskipun tingkat kemiskinan Provinsi Sumatera Barat meningkat.

3. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita merupakan gambaran rata-rata pendapatan yang diterima oleh setiap penduduk atau per jiwa atau satu orang penduduk selama satu tahun di suatu wilayah/daerah. PDRB Per Kapita diperoleh dari hasil bagi antara PDRB ADHB dan PDRB ADHK suatu daerah dengan jumlah penduduk pertengahan tahun daerah bersangkutan. Oleh karena itu, meningkat atau menurunnya PDRB Per Kapita ditentukan oleh meningkat atau menurunnya PDRB dan bertambah atau berkurangnya jumlah penduduk. PDRB Per Kapita biasanya dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB), namun juga dapat dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan (ADHK). Peningkatan PDRB Per Kapita biasanya dianggap sebagai tanda ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, PDRB Per Kapita tidak dapat mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.

Pada tahun 2024, PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto mencapai 73,597 juta/jiwa/tahun. Realisasi PDRB ADHB per kapita tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp 2,38 juta/jiwa/tahun atau 3,35% dari tahun sebelumnya yang mencapai Rp 71,21 juta/jiwa/tahun. Peningkatan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto tahun 2024 lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 8,32%.

Berikut disajikan perkembangan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto pada periode tahun 2020-2024 disandingkan dengan PDRB ADHB per kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB ADHB per kapita Nasional :

Grafik 2.13
Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

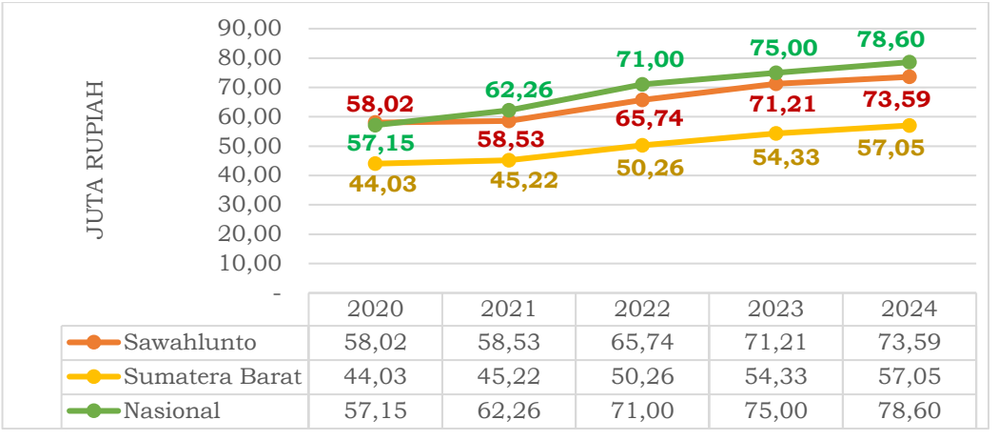

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	58,02	58,53	65,74	71,21	73,59
Sumatera Barat	44,03	45,22	50,26	54,33	57,05
Nasional	57,15	62,26	71,00	75,00	78,60

Sumber Data : BPS 2025

Pada periode tahun 2020-2024 PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan PDRB ADHB per kapita Provinsi Sumatera Barat, namun lebih rendah dibandingkan PDB ADHB per kapita Nasional kecuali tahun 2020. Peningkatan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2020–2024 sejalan dengan peningkatan PDRB ADHB per kapita Provinsi Sumatera Barat dan PDB ADHB per kapita Nasional.

Berikut perkembangan PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto tahun 2020-2024, disandingkan dengan PDRB ADHB per kapita kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.36
Perkembangan PDRB ADHB Per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024 (juta rupiah/jiwa)

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	49,46	54,60	60,45	64,69	67,34
Pesisir Selatan	29,96	29,27	32,08	34,31	35,99
Solok	35,96	35,88	39,42	42,72	44,81
Sijunjung	37,87	40,29	44,34	47,91	50,61
Tanah Datar	37,34	36,29	39,72	42,89	45,07
Padang Pariaman	42,94	42,31	50,02	55,54	58,39
Agam	41,19	39,91	43,94	47,41	50,02
Lima Puluh Kota	40,24	41,81	45,69	49,45	51,98
Pasaman	31,32	31,09	33,70	36,27	38,25
Solok Selatan	31,81	31,31	34,19	36,78	38,91
Dharmasraya	40,41	46,45	51,88	55,63	58,71
Pasaman Barat	33,75	36,47	40,31	43,43	46,26
Kota					
Padang	64,67	70,88 (1)	78,36	84,53	88,23
Solok	56,05	57,01	62,88	67,59	69,99
Sawahlunto	***58,02***	***58,53***	***65,74***	***71,21***	***73,59***
Padang Panjang	63,82	64,12	70,73	76,31	80,01
Bukittinggi	65,00	74,00	82,85	89,74	93,97
Payakumbuh	49,63	51,81	57,73	62,02	64,21
Pariaman	55,86	55,41	61,23	66,20	69,17
Sumatera Barat	**44,03**	**45,22**	**50,26**	**54,33**	**57,05**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

PDRB ADHB per kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berada di posisi keempat tertinggi dibandingkan 19 kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

Sebagai perbandingan, berikut disajikan perkembangan PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto pada periode tahun 2020-2024 disandingkan dengan PDRB ADHK per kapita Provinsi Sumatera Barat.

Grafik 2.14
Perkembangan PDRB ADHK Per Kapita
Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

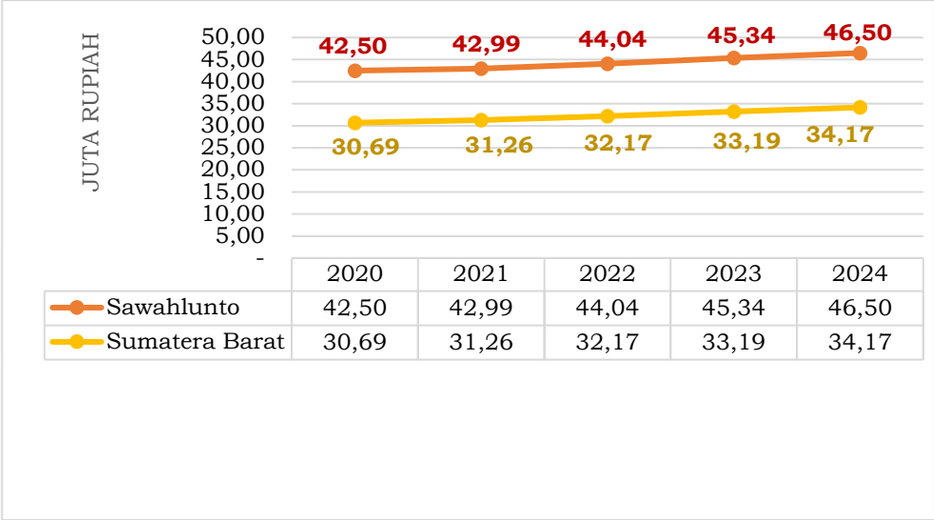

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	42,50	42,99	44,04	45,34	46,50
Sumatera Barat	30,69	31,26	32,17	33,19	34,17

Sumber Data : BPS 2025

Pada grafik di atas terlihat bahwa PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir lebih tinggi dari PDRB ADHK per kapita Provinsi Sumatera Barat.

Berikut disandingkan PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto dengan PDRB ADHK per kapita kabupaten/kota pada periode tahun 2020-2024:

Tabel 2.37
PDRB ADHK Per Kapita
Menurut Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024 (juta rupiah/jiwa)

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	33,83	34,28	35,42	36,31	37,21
Pesisir Selatan	18,84	19,19	19,67	20,19	20,67
Solok	25,07	25,59	26,35	27,16	27,87
Sijunjung	28,52	29,03	29,77	30,65	31,44
Tanah Datar	25,81	26,40	27,17	28,04	28,78
Padang Pariaman	27,77	27,96	29,36	30,44	31,29
Agam	27,32	27,82	28,59	29,49	30,29
Lima Puluh Kota	28,89	29,53	30,35	31,36	32,24
Pasaman	20,49	20,86	21,36	21,95	22,47
Solok Selatan	21,69	21,99	22,45	23,05	23,56
Dharmasraya	32,74	33,28	34,09	34,96	35,69
Pasaman Barat	26,17	26,73	27,41	28,18	28,92
Kota					
Padang	48,07	49,18 (1)	50,65	52,30	54,09
Solok	38,79	39,37	40,29	41,35	42,36

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	***42,50***	***42,99***	***44,04***	***45,34***	***46,50***
Padang Panjang	45,34	46,21	47,54	49,12	50,63
Bukittinggi	50,02	51,34	53,28	55,38	57,43
Payakumbuh	31,75	32,44	33,44	34,54	35,64
Pariaman	37,76	38,66	39,92	41,34	42,71
Sumatera Barat	**30,69**	**31,26**	**32,17**	**33,19**	**34,17**

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

PDRB ADHK per kapita Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berada di posisi keempat tertinggi dibandingkan kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat, setelah Kota Bukittinggi, Kota Padang dan Kota Padang Panjang.

4. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran adalah orang yang termasuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) namun belum/tidak bekerja. Pengangguran disebabkan oleh jumlah pencari kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Oleh karena itu, keberadaan pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang ada. Adapun tingkat pengangguran terbuka Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.38
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

No	Indikator	2020			2021			2022			2023			2024		
		L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml	L	P	Jml
1	Jumlah Pengangguran Terbuka (Jiwa)	1.538	1.171	2.709	1.362	695	2.057	1.073	625	1.698	1.146	636	1.782	1.394	728	2.122
2	Jumlah Penduduk Angkatan Kerja (Jiwa)	18.948	14.071	33.019	18.951	13.292	32.243	19.353	14.620	33.973	20.626	15.174	35.800	21.807	16.449	38.256
3	**Tingkat Pengangguran Terbuka (%)**	**8,12**	**8,32**	**8,20**	**7,19**	**5,23**	**6,38**	**5,54**	**4,27**	**5,00**	**5,56**	**4,19**	**4,98**	**6,39**	**4,43**	**5,55**

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data diolah

Pada tabel di atas terlihat bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir berfluktuatif dengan TPT Laki-laki lebih tinggi dibandingkan TPT Perempuan.

Pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Sawahlunto meningkat dari tahun 2023. Peningkatan ini salah satunya disebabkan tidak diselenggarakan kegiatan *Job Fair* tahun 2024 di Kota Sawahlunto dan berkurangnya kegiatan pelatihan tenaga kerja pada BLK Kota Sawahlunto, dimana pada tahun 2024 kegiatan yang terlaksana hanya sebanyak 6 paket pelatihan yang dibiayai dari dana APBN. Sementara pada tahun 2023 terlaksana sebanyak 13 paket pelatihan, 6 paket pelatihan dibiayai oleh dana APBN dan 7 paket pelatihan dibiayai oleh dana APBD Kota Sawahlunto.

Berikut perkembangan TPT kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.39
Tingkat Pengangguran Terbuka
Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	3,98	2,79	1,39	1,33	1,44
Pesisir Selatan	7,00	5,97	4,61	4,75	5,06
Solok	4,65	4,67	5,89	4,99	4,91
Sijunjung	5,30	3,57	4,87	4,71	4,73
Tanah Datar	4,79	4,63	5,91	5,35	5,30
Padang Pariaman	8,13	8,41	6,60	6,69	6,59
Agam	4,61	5,06	4,93	4,96	4,73
Lima Puluh Kota	3,03	2,25	3,72	3,95	3,68
Pasaman	5,04	4,92	5,38	5,09	5,25
Solok Selatan	5,62	4,84	3,71	2,57	2,30
Dharmasraya	5,31	5,00	6,23	6,22	6,02
Pasaman Barat	4,69	5,02	6,33	6,01	6,34
Kota					
Padang	13,64	13,37	11,69	10,86	9,88
Solok	8,35	5,15	3,90	3,72	3,62
Sawahlunto	***8,20***	***6,38***	***5,00***	***4,98***	***5,55***
Padang Panjang	7,22	4,90	4,84	5,49	4,94
Bukittinggi	7,51	6,09	4,90	4,99	4,72
Payakumbuh	6,68	6,47	5,16	4,84	4,87
Pariaman	5,73	6,09	5,19	5,68	5,32
Sumatera Barat	**6,88**	**6,52**	**6,28**	**5,94**	**5,75**

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No.66/11/13/Th. XXVII, 05 November 2024

Pada tabel di atas terlihat, TPT Kota Sawahlunto berfluktuasi selama lima tahun terakhir. TPT Kota Sawahlunto adalah yang tertinggi kedua pada tahun 2024, diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang, Sedangkan untuk level kabupaten/kota berada pada posisi kelima tertinggi setelah Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Pasaman Barat, dan Kabupaten Dharmasraya.

Berikut perkembangan TPT Kota Sawahlunto disandingkan dengan TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama tahun 2020-2024 :

Grafik 2.15
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

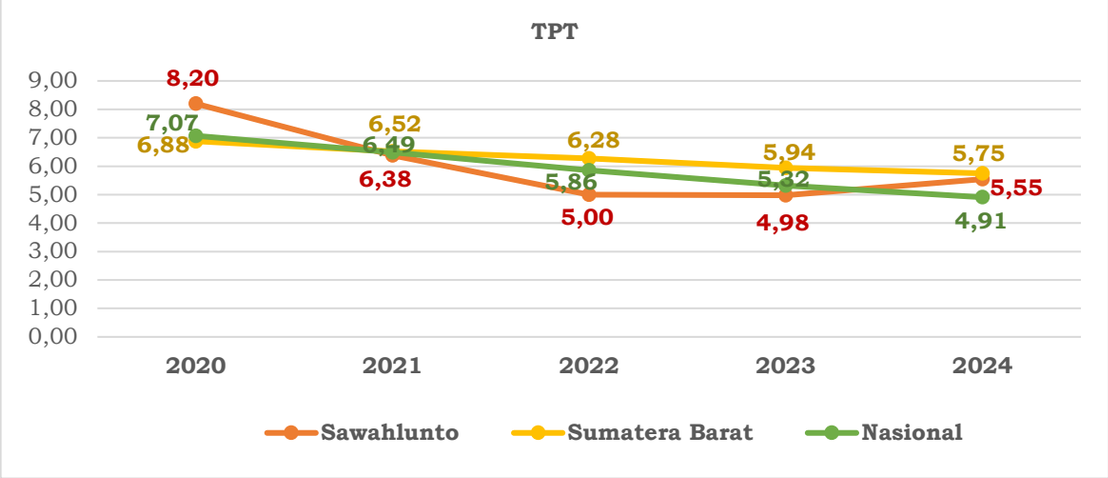

Sumber Data : BPS, 2025

Pada grafik di atas terlihat bahwa TPT Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. TPT tertinggi Kota Sawahlunto terjadi pada tahun 2020 saat Covid 19 melanda, dan angka tersebut lebih tinggi dari TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pada tahun 2021-2023, seiring dengan usainya Covid 19 dan pulihnya perekonomian, TPT Kota Sawahlunto menurun, bahkan TPT Kota Sawahlunto lebih rendah dari TPT Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun pada tahun 2024 TPT Kota Sawahlunto kembali meningkat dan lebih tinggi dari TPT Nasional, namun lebih rendah dari TPT Provinsi Sumatera Barat.

5. Indeks Gini

Indeks Gini (Gini Ratio) merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pengeluaran/pendapatan secara menyeluruh. Gini Ratio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi, Gini Ratio yang semakin mendekati 0 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin rendah. Gini Ratio yang bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pengeluaran/pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pengeluaran/pendapatan yang sama. Sedangkan, Gini Ratio yang bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, Gini Ratio diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pengeluaran/pendapatan antar penduduk (bps.go.id).

Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2024 berhasil turun sebesar 0,009 poin atau 2,92% dibandingkan tahun 2023. Realisasi Gini Ratio turun dari 0,308 pada tahun 2023 menjadi 0,299 pada tahun 2024. Jika dibandingkan dengan target Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 0,289 pada RPD Kota Sawahlunto 2024-2026, maka capaian tahun 2024 ini hampir mendekati target dengan capaian sebesar 96,54%

dengan prediket capaian "sangat tinggi". Penurunan Gini Ratio tahun 2024 ini disebabkan oleh semakin membaiknya kondisi perekonomian dan sosial masyarakat Kota Sawahlunto yang ditandai dengan meningkatnya PDRB Per Kapita Kota Sawahlunto, meningkatnya IPM Kota Sawahlunto beserta semua komponen pembentuknya serta rendahnya laju inflasi. Hal ini juga tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah kota khususnya terkait pelayanan dasar, pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, bantuan sosial dan subsidi yang diterapkan di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.40
Gini Ratio Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020 – 2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	0,273	0,321	0,233	0,259	0,267
Pesisir Selatan	0,264	0,253	0,246	0,259	0,224
Solok	0,277	0,246	0,243	0,235	0,241
Sijunjung	0,269	0,270	0,243	0,263	0,239
Tanah Datar	0,273	0,250	0,251	0,260	0,258
Padang Pariaman	0,257	0,269	0,245	0,257	0,253
Agam	0,278	0,272	0,298	0,255	0,249
Lima Puluh Kota	0,222	0,244	0,208	0,194	0,220
Pasaman	0,310	0,248	0,230	0,243	0,217
Solok Selatan	0,307	0,277	0,253	0,271	0,313
Dharmasraya	0,280	0,268	0,287	0,291	0,233
Pasaman Barat	0,258	0,261	0,277	0,238	0,240
Kota					
Padang	0,312	0,343	0,354	0,312	0,324
Solok	0,286	0,277	0,288	0,256	0,251
Sawahlunto	***0,300***	***0,295***	***0,314***	***0,308***	***0,299***
Padang Panjang	0,394	0,306	0,296	0,273	0,266
Bukittinggi	0,265	0,286	0,317	0,255	0,272
Payakumbuh	0,325	0,316	0,311	0,316	0,313
Pariaman	0,310	0,301	0,272	0,289	0,281
Sumatera Barat	**0,305**	**0,306**	**0,300**	**0,280**	**0,283**

Sumber Data : BPS Provinsi Sumatera Barat 2025

Meskipun capaian Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2024 mengalami penurunan, namun secara regional Provinsi Sumatera Barat, capaian Gini Ratio Kota Sawahlunto termasuk 4 (empat) tertinggi dari 19 kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat, di bawah Kota Padang, Kota Payakumbuh dan Kabupaten Solok Selatan. Dan Gini Ratio Kota Sawahlunto juga lebih tinggi jika dibandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat.

Berikut perkembangan Gini Ratio Kota Sawahlunto tahun 2020-2024, disandingkan dengan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional :

Grafik 2.16
Perkembangan Gini Ratio
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

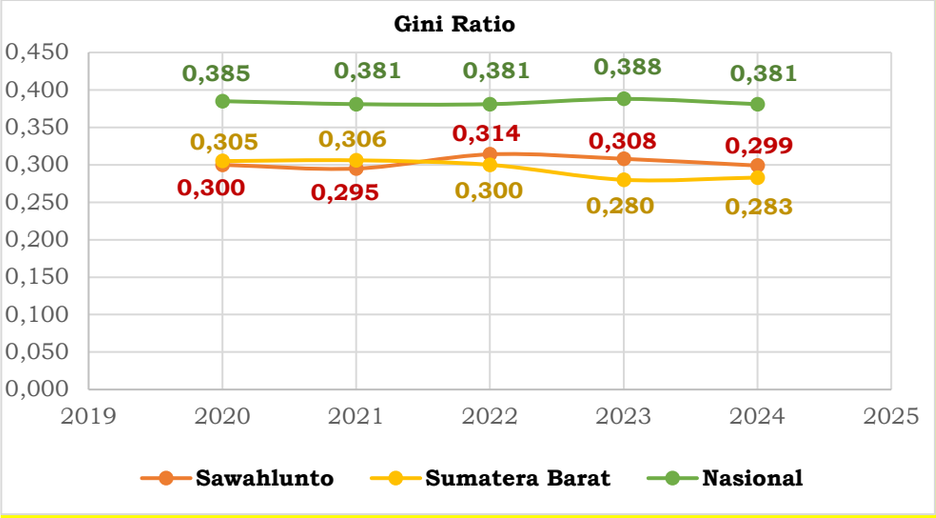

Sumber Data : BPS, 2025

Pada grafik di atas terlihat bahwa Gini Ratio Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2021 lebih rendah dari Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, yang bermakna perbedaan pengeluaran/pendapatan antar penduduk di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan perbedaan pengeluaran/pendapatan antar penduduk Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Pada tahun 2022-2024, Gini Ratio Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan Gini Ratio Provinsi Sumatera Barat, namun masih lebih rendah dibandingkan Gini Ratio Nasional.

6. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan salah satu indikator makro pembangunan daerah untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk suatu daerah dapat mengakses hasil pembangunan dalam bidang kesehatan, pendidikan dan pendapatan.

Semakin tinggi nilai IPM menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik yang berkorelasi dengan kebijakan ekonomi terhadap pembangunan manusia.

IPM adalah indikator makro yang perhitungannya menjadi tanggungjawab Badan Pusat Statistik (BPS), dimana IPM memiliki tiga dimensi yang digunakan sebagai dasar perhitungannya, yaitu :

a. Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*);

   Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi.

b. Pengetahuan (*knowledge*);

Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). RLS adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. HLS didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.

c. Standard hidup layak (*decent standard of living*). Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*).

Berikut perkembangan IPM Kota Sawahlunto disandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Barat dan IPM Nasional selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.17
IPM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Indonesia
Tahun 2020 – 2024

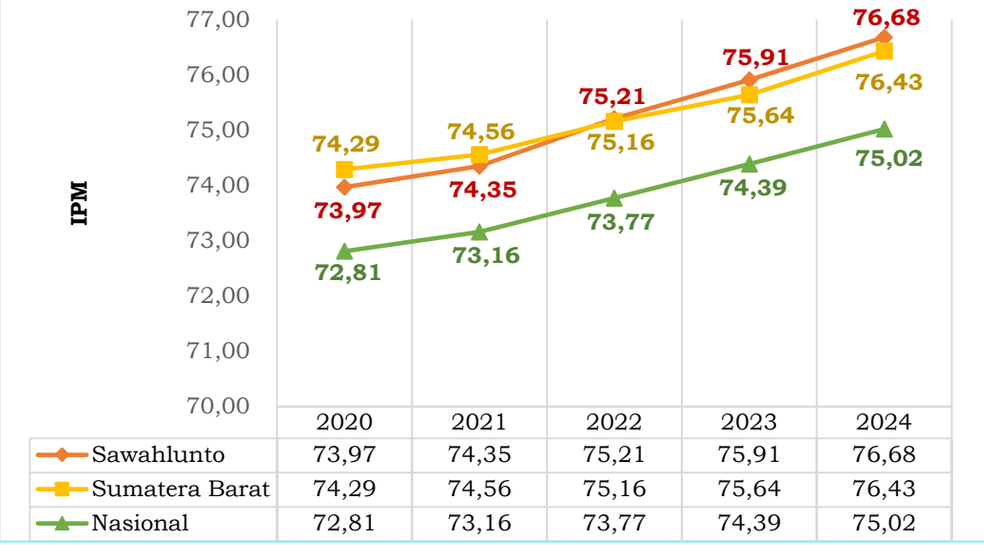

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	73,97	74,35	75,21	75,91	76,68
Sumatera Barat	74,29	74,56	75,16	75,64	76,43
Nasional	72,81	73,16	73,77	74,39	75,02

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

IPM Kota Sawahlunto pada tahun 2024 sebesar 76,68, angka ini mengalami peningkatan sebesar 0,77 poin atau 1,01 % dibandingkan tahun 2023. Peningkatan IPM Kota Sawahlunto tahun 2024 ini lebih tinggi dibandingkan peningkatan IPM tahun 2023 yang meningkat sebesar 0,70 poin atau 0,93 %. Status pencapaian IPM Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir tergolong “Tinggi”. Dan capaian IPM Kota Sawahlunto tahun 2022-2024 lebih tinggi dibandingkan IPM Provinsi Sumatera Barat dan IPM Nasional.

Berikut perkembangan IPM Kota Sawahlunto disandingkan dengan IPM kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.41
Indeks Pembangunan Manusia Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	63,71	63,98	64,83	65,79	66,67
Pesisir Selatan	70,87	71,01	71,72	72,24	72,87
Solok	70,44	70,60	71,39	71,92	72,29
Sijunjung	70,36	70,48	71,32	72,30	72,88
Tanah Datar	74,01	74,14	74,87	75,57	76,49
Padang Pariaman	72,80	72,92	73,67	74,54	74,90
Agam	73,11	73,20	73,84	74,44	75,08
Lima Puluh Kota	70,82	71,03	71,64	72,05	72,51
Pasaman	68,35	68,48	69,12	69,85	70,61
Solok Selatan	70,69	70,88	71,36	72,24	73,17
Dharmasraya	72,30	72,65	73,19	73,87	74,82
Pasaman Barat	70,30	70,57	71,39	72,03	72,78
Kota					
Padang	83,22	83,30	83,69	83,98	84,38
Solok	78,41	78,53	79,35	79,66	80,06
Sawahlunto	***73,97***	***74,35***	***75,21***	***75,91***	***76,68***
Padang Panjang	78,43	78,52	79,28	79,76	80,60
Bukit Tinggi	80,68	80,79	81,52	81,88	82,61
Payakumbuh	79,06	79,24	79,70	80,14	80,76
Pariaman	78,55	78,72	79,31	79,76	80,49
Sumatera Barat	**74,29**	**74,56**	**75,16**	**75,64**	**76,43**

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa IPM Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun, namun IPM Kota Sawahlunto ini merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Peningkatan IPM Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 didukung oleh peningkatan semua komponen pembentuk IPM yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), Harapan Lama Sekolah (HLS), Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (PPP).

Tabel 2.42
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Kabupaten						
Kepulauan Mentawai	12,89	12,90	12,91	7,48	7,76	8,03
Pesisir Selatan	13,35	13,36	13,37	8,43	8,58	8,81
Solok	13,30	13,55	13,56	7,89	7,90	7,91
Sijunjung	12,64	12,72	12,76	8,30	8,57	8,62
Tanah Datar	14,59	14,78	15,05	8,90	9,02	9,29
Padang Pariaman	13,93	14,19	14,20	8,16	8,41	8,42
Agam	13,88	13,89	14,16	8,98	9,22	9,23
Lima Puluh Kota	13,40	13,41	13,42	8,08	8,12	8,13
Pasaman	13,05	13,25	13,52	8,12	8,13	8,14
Solok Selatan	12,73	12,80	13,07	8,41	8,69	8,85
Dharmasraya	12,51	12,68	12,89	8,56	8,71	8,98

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)			Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Pasaman Barat	13,69	13,70	13,72	8,55	8,81	8,99
Kota						
Padang	16,54	16,56	16,57	11,60	11,62	11,63
Solok	14,34	14,36	14,37	11,35	11,36	11,37
Sawahlunto	***13,42***	***13,69***	***13,86***	***10,43***	***10,44***	***10,53***
Padang Panjang	15,07	15,29	15,47	11,92	11,94	12,00
Bukit Tinggi	14,99	15,01	15,28	11,63	11,64	11,65
Payakumbuh	14,29	14,30	14,57	10,82	10,88	10,89
Pariaman	14,61	14,79	14,80	10,78	10,79	11,06
Sumatera Barat	**14,10**	**14,11**	**14,30**	**9,18**	**9,28**	**9,44**

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Pada tabel di atas, Angka HLS dan RLS Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaiannya merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Angka HLS Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 13,86, yang berarti lamanya waktu sekolah bagi anak usia sekolah di Kota Sawahlunto diharapkan mencapai 13,86 tahun atau dapat menyelesaikan D1. Sedangkan nilai RLS Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 10,53, bermakna rata-rata masa sekolah yang dialami penduduk Kota Sawahlunto usia 25 tahun ke atas adalah selama 10,53 tahun atau menyelesaikan SLTA kelas 1 (kelas X). Pertumbuhan yang positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia Kota Sawahlunto yang lebih baik.

Pembentuk IPM terakhir adalah Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity*-PPP). Berikut Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan Kota Sawahlunto disandingkan dengan Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama tiga tahun terakhir.

Tabel 2.43
Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (Ribu Rupiah)
Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2022-2024

Kabupaten / Kota	2022	2023	2024
Kabupaten			
Kepulauan Mentawai	6.567	6.891	7.192
Pesisir Selatan	9.686	9.953	10.211
Solok	10.539	10.717	10.988
Sijunjung	10.582	11.018	11.395
Tanah Datar	10.695	10.905	11.223
Padang Pariaman	11.159	11.432	11.756
Agam	10.171	10.402	10.686
Lima Puluh Kota	10.035	10.285	10.648
Pasaman	8.619	8.908	9.194
Solok Selatan	10.560	10.884	11.240
Dharmasraya	11.650	11.901	12.254
Pasaman Barat	9.381	9.538	9.888
Kota			
Padang	14.889	15.089	15.458
Solok	12.515	12.709	12.995

Kabupaten / Kota	2022	2023	2024
Sawahlunto	***10.537***	***10.829***	***11.187***
Padang Panjang	11.153	11.310	11.840
Bukit Tinggi	13.633	13.859	14.297
Payakumbuh	13.687	13.978	14.260
Pariaman	13.150	13.355	13.784
Sumatera Barat	**11.130**	**11.380**	**11.718**

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Pengeluaran per Kapita yang disesuaikan (*Purchasing Power Parity*-PPP) Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaiannya merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Meskipun demikian, hal ini menunjukkan adanya peningkatan kondisi perekonomian masyarakat yang didorong oleh meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat Kota Sawahlunto

B. Kesehatan Untuk Semua

1. Usia Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. UHH merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. UHH menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat.

Semakin tinggi Usia Harapan Hidup menunjukkan semakin baik tingkat kesehatan masyarakat, sehingga kesempatan untuk hidup cenderung semakin panjang. Sebaliknya semakin rendah Usia Harapan Hidup menunjukkan semakin buruk tingkat kesehatan yang cenderung memperpendek usia harapan hidup.

Grafik 2.18
Perbandingan Usia Harapan Hidup (UHH)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024 (Satuan Dalam Tahun)

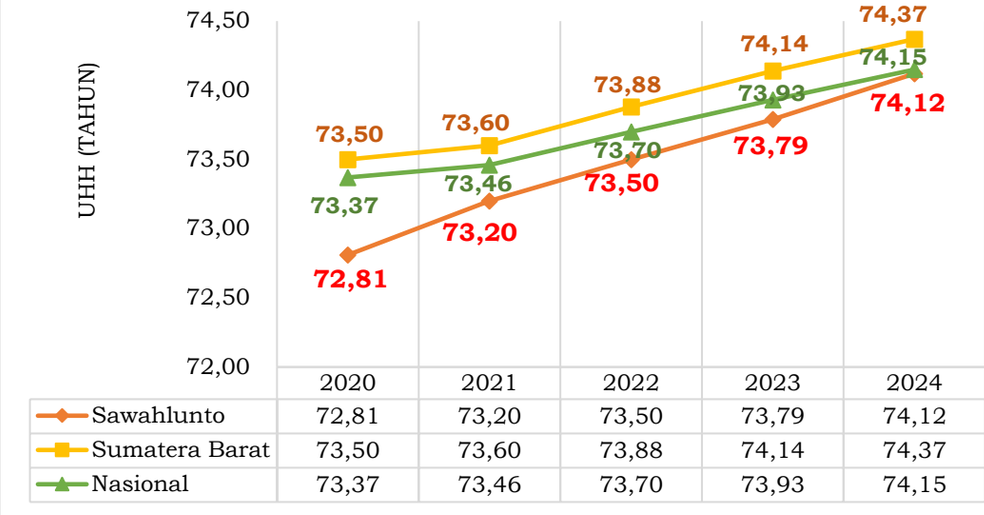

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	72,81	73,20	73,50	73,79	74,12
Sumatera Barat	73,50	73,60	73,88	74,14	74,37
Nasional	73,37	73,46	73,70	73,93	74,15

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2024

Usia harapan hidup saat lahir Kota Sawahlunto menunjukkan peningkatan selama periode tahun 2020-2024, yaitu dari 72,81 tahun pada tahun 2020 meningkat menjadi 74,12 tahun pada tahun 2024. Artinya, rata-rata bayi yang lahir di Kota Kota Sawahlunto pada tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga usia 74,12 tahun.

Berikut perkembangan Usia harapan hidup (UHH) Kota Sawahlunto disandingkan dengan Usia harapan hidup (UHH) kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat selama tiga tahun terakhir.

Tabel 2.44
Usia Harapan Hidup (UHH) Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020-2024

Kabupaten / Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	70,33	70,33	70,91	71,06	71,21
Pesisir Selatan	73,02	73,12	73,20	73,27	73,44
Solok	71,51	71,72	72,12	72,31	72,52
Sijunjung	71,78	71,93	72,27	72,59	72,89
Tanah Datar	73,50	73,69	73,84	74,19	74,26
Padang Pariaman	73,48	73,58	73,67	73,77	73,88
Agam	73,79	73,91	74,07	74,22	74,39
Lima Puluh Kota	72,74	72,79	73,03	73,25	73,42
Pasaman	71,15	71,34	71,71	72,04	72,36
Solok Selatan	71,32	71,52	71,89	72,72	72,50
Dharmasraya	73,04	73,47	73,84	74,04	74,25
Pasaman Barat	71,71	71,83	72,14	72,44	72,75
Kota					
Padang	74,43	74,47	74,71	74,94	75,20
Solok	73,86	73,98	74,31	74,56	74,85
Sawahlunto	***72,81***	***73,20***	***73,50***	***73,79***	***74,12***
Padang Panjang	73,83	73,93	74,03	74,24	74,48
Bukit Tinggi	74,58	74,70	75,02	75,33	75,62
Payakumbuh	74,08	74,18	74,48	74,77	75,08
Pariaman	73,59	73,69	73,98	74,20	74,37
Sumatera Barat	**73,50**	**73,60**	**73,88**	**74,14**	**74,37**

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Pada tabel di atas terlihat Usia harapan hidup (UHH) Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

2. Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang digunakan untuk mengetahui status kesehatan keluarga. IKS merupakan bagian dari Program Indonesia Sehat yang dicanangkan oleh Kementerian Kesehatan (Kemenkes). IKS mengukur kesehatan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan.

Tabel 2.45
Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Urian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto	0,24	0,29	0,29	0,34	0,45

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2025

Pada tabel di atas terlihat Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih berada pada kategori “Keluarga Tidak Sehat”. Oleh karena itu perlu upaya Pemerintah Kota Sawahlunto untuk meningkatkan Keluarga Sehat di Kota Sawahlunto.

3. Prevalensi Stunting

Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dibandingkan dengan menggunakan standar WHO tahun 2005.

Tabel 2.46
Prevalensi Stunting
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

No	*Prevalensi Stunting*	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Sawahlunto	na	21,1	13,7	19,5	20
2	Provinsi Sumatera Barat	na	23,3	25,2	23,6	24,9
3	Indonesia	na	24,4	21,6	21,5	19,8

Sumber Data : SSGI,2021-2022 dan SKI 2023, SSGI 2024

Prevalensi balita stunting Kota Sawahlunto berdasarkan data survei status gizi Indonesia (SSGI) dan survei kesehatan Indonesia (SKI) berfluktuasi dengan kisaran antara 13,7% hingga 21,1%. Tahun 2020 data tidak tersedia karena kendala covid 19, sedangkan pada tahun 2024, Angka prevalensi stunting Kota Sawahlunto berada di bawah Provinsi Sumatera Barat dan di atas angka prevalensi stunting nasional.

4. Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran Hidup)

Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.

Angka Kematian Ibu digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka ini menjadi sangat penting karena memberikan gambaran tentang kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak di suatu wilayah.

Tabel 2.47
Jumlah Kematian Ibu Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Puskesmas	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Talawi	0	1	1	0	2
2.	Kolok	1	0	0	0	0
3.	Sungai Durian	0	0	1	0	0
4	Lunto	0	0	0	0	0
5	Kap Teleng	0	0	0	0	0
6	Silungkang	1	0	0	0	0
	Jumlah Kematian Ibu	**2**	**1**	**2**	**0**	**2**

Sumber Data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Dan KB Kota Sawahlunto, 2024

Pada tabel di atas terlihat jumlah kematian ibu di Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir berfluktuasi dengan jumlah kematian ibu tertinggi per tahun sebanyak 2 orang. Berikut perkembangan Angka kematian Ibu di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.48
Angka Kematian Ibu Di Kota Sawahlunto
(per 100.000 kelahiran hidup)
Tahun 2020-2024

No	Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kematian Ibu	2	1	2	0	2
2	Jumlah Kelahiran Hidup	973	970	894	861	1145
3.	Angka Kematian Ibu	205,55	103,09	233,71	0	174,67

Sumber Data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2024

Jumlah kelahiran hidup di Kota Sawahlunto sampai tahun 2024 tidak pernah mencapai 100.000 karena jumlah penduduk Kota Sawahlunto kurang dari 100.000 orang. Oleh karena itu AKI di Kota Sawahlunto pada tahun 2024 mencapai 174,67 per 100.000 angka kelahiran hidup. Semakin rendah nilai AKI menunjukkan semakin tinggi peranan pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pasca persalinan, serta meningkatkan akses pelayanan kesehatan dalam artian fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. Disamping itu tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan telah meningkat.

5. Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus TBC (%)

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis (*treatment coverage*) adalah Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu. Indikator ini sangat diperlukan dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan.

Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis mencakup dua aspek penting : 1). penemuan kasus, yang merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis; 2). pengobatan kasus yang merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.

Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkolosis ini dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkolosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus yang ada dalam suatu wilayah pada periode tertentu. Adapun perkembangan dari cakupan penemuan dan pengobatan TBC adalah sebagai berikut :

Tabel 2.49
Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis
(*Treatment Covarage*) (%)
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Cakupan Penemuan Dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis *(Treatment Covarage)* (%)	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	na	8,00	32	48	35
Pesisir Selatan	na	55,10	68	69	56
Solok	na	12,40	26	30	36
Sijunjung	na	20,00	26	32	40
Tanah Datar	na	24,60	51	43	38
Padang Pariaman	na	51,40	51	92	84
Agam	na	22,50	31	37	35
Lima Puluh Kota	na	25,30	31	31	32
Pasaman	na	37,70	48	69	57
Solok Selatan	na	30,50	57	57	56
Dharmasraya	na	14,00	30	41	56
Pasaman Barat	na	49,00	64	66	74
Kota					
Padang	na	48,00	60	67	89
Solok	na	29,00	43	102	100
Sawahlunto	***na***	***12,00***	***19***	***38***	***30***
Padang Panjang	na	31,00	40	90	85
Bukittinggi	na	29,00	61	11	143
Payakumbuh	na	14,00	34	69	67
Pariaman	na	37,00	56	109	72

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Data Cakupan penemuan dan pengobatan tuberkolosis pada tahun 2020 tidak tersedia karena tidak dilakukan perhitungan sebagai dampak dari wabah Covid 19. Sedangkan pada tahun 2021-2024 cakupan penemuan dan pengobatan TBC ini angkanya masih rendah karena masih banyak masyarakat yang enggan memeriksakan penyakit TBCnya..

6. Angka Keberhasilan Pengobatan TBC (%)

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate*) adalah persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap. Angka keberhasilan pengobatan tuberculosis diperlukan dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap yang dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.

Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis diperoleh dari membandingkan jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan. Perkembangan keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2.50
Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis
(*Treatmenth Success Rate*)
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatmenth Success Rate*)	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	na	50,00	91	60	71
Pesisir Selatan	na	91,00	93	90	91
Solok	na	31,00	93	92	9
Sijunjung	na	95,50	90	96	4
Tanah Datar	na	87,50	88	88	2
Padang Pariaman	na	85,00	85	84	7
Agam	na	60,40	85	86	10
Lima Puluh Kota	na	90,20	89	83	5
Pasaman	na	63,00	91	79	10
Solok Selatan	na	56,40	97	94	3
Dharmasraya	na	13,20	92	88	5
Pasaman Barat	na	66,10	85	82	13
Kota					
Padang	na	90,10	89	90	5
Solok	na	90,00	87	69	9
Sawahlunto	***88,9***	***88,89***	***96,5***	***94,05***	***94***
Padang Panjang	na	94,00	87	75	12
Bukittinggi	na	89,10	94	92	8
Payakumbuh	na	90,00	91	91	5
Pariaman	na	90,10	89	90	12

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025, DinkesdaldukKB 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis di Kota Sawahlunto mengalami peningkatan berfluktuasi dengan kisaran 88% hingga 96,5 %.

7. Cakupan kepesertaan JKN (%)

Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPS Kesehatan dimana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan pemerintah.

Perkembangan kepesertaan jaminan kesehatan di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir terlihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.51
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional
Kota Sawahlunto 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (%)	95,99	97,64	99,73	100,72	99,66
Pertumbuhan (%)	0,94	1,72	2,14	0,99	0,30

Sumber Data : Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2024

Dari data di atas dapat kita lihat bahwa JKN di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan. Peningkatan ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dan kesadaran masyarakat dalam kepesertaan JKN. Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di Kota Sawahlunto ini mencerminkan beberapa hal penting, yaitu : 1). sebagian besar penduduk Kota Sawahlunto sudah memiliki akses ke pelayanan kesehatan; 2). tingkat kesadaran masyarakat Kota Sawahlunto tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan

kesehatan yang berkualitas sudah tinggi; 3). komitmen pemerintah daerah yang tinggi untuk mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional; 4). banyaknya masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan yang dibutuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.

C. Pendidikan Berkualitas yang Merata

1. Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Semakin tingginya angka RLS, semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan (diselesaikan) oleh masyarakat suatu daerah. Adapun perkembangan RLS Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik 2.19
Perbandingan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

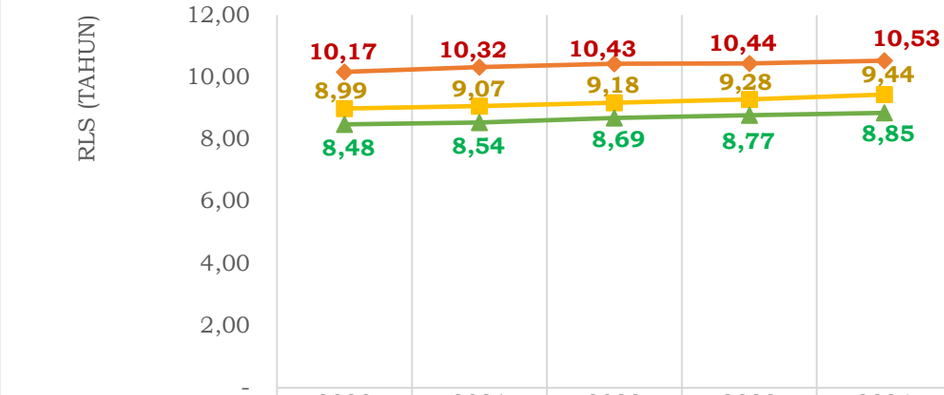

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	10,17	10,32	10,43	10,44	10,53
Sumatera Barat	8,99	9,07	9,18	9,28	9,44
Nasional	8,48	8,54	8,69	8,77	8,85

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2024

Angka capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sawahlunto terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun hingga tahun 2024 dengan pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,87% dan berada di atas RLS Provinsi dan Nasional. Angka RLS Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 10,53, bermakna rata-rata masa sekolah yang dialami penduduk Kota Sawahlunto usia 25 tahun ke atas selama 10,53 tahun atau telah menyelesaikan SLTA kelas 1 (kelas X) dan telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun.

Berikut perbandingan RLS Kota Sawahlunto dengan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat :

Tabel 2.52
Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten/Kota
Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024

Kabupaten / Kota	Angka Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	7,09	7,20	7,48	7,76	8,03
Pesisir Selatan	8,26	8,27	8,43	8,58	8,81
Solok	7,86	7,87	7,89	7,90	7,91
Sijunjung	8,11	8,12	8,30	8,57	8,62
Tanah Datar	8,61	8,62	8,90	9,02	9,29
Padang Pariaman	7,87	7,88	8,16	8,41	8,42
Agam	8,96	8,97	8,98	9,22	9,23
Lima Puluh Kota	7,99	8,07	8,08	8,12	8,13
Pasaman	8,09	8,10	8,11	8,13	8,14
Solok Selatan	8,28	8,32	8,41	8,69	8,85
Dharmasraya	8,47	8,55	8,56	8,71	8,98
Pasaman Barat	8,19	8,27	8,55	8,81	8,99
Kota					
Padang	11,58	11,59	11,60	11,62	11,63
Solok	11,03	11,04	11,35	11,36	11,37
Sawahlunto	***10,17***	***10,32***	***10,43***	***10,44***	***10,53***
Padang Panjang	11,62	11,63	11,92	11,94	12,00
Bukit Tinggi	11,33	11,34	11,63	11,64	11,65
Payakumbuh	10,73	10,81	10,82	10,88	10,89
Pariaman	10,59	10,67	10,78	10,79	11,06
Sumatera Barat	**8,99**	**9,07**	**9,18**	**9,28**	**9,44**

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa RLS Kota Sawahlunto merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

2. Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas. Adapun perkembangan HLS Kota Sawahlunto pada lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik 2.20
Perbandingan Harapan Lama Sekolah (HLS)
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020 – 2024

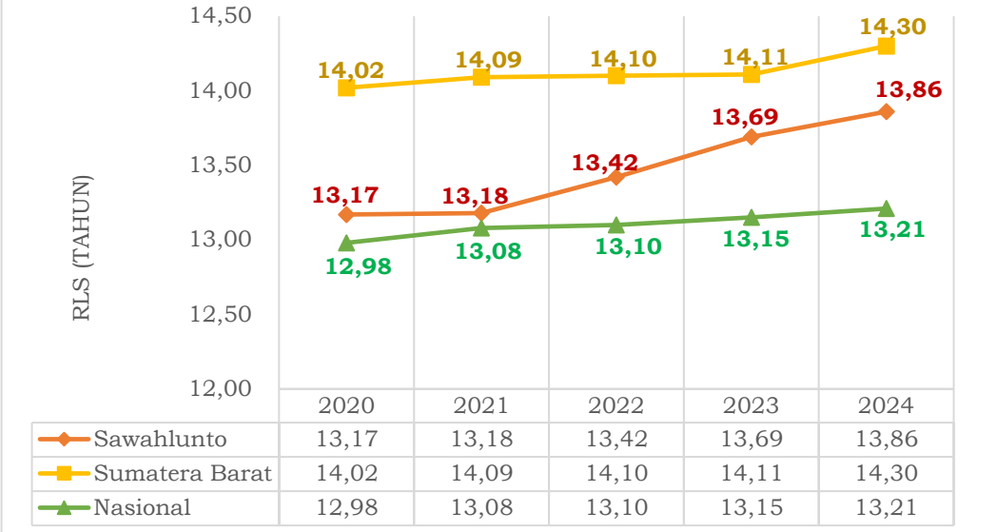

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	13,17	13,18	13,42	13,69	13,86
Sumatera Barat	14,02	14,09	14,10	14,11	14,30
Nasional	12,98	13,08	13,10	13,15	13,21

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2024

Pada grafik di atas, Angka HLS Kota Sawahlunto mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun, namun Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Sawahlunto masih jauh di bawah Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.53
Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten/Kota
Di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2024

Kabupaten / Kota	Angka Harapan Lama Sekolah (Tahun)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	12,82	12,89	12,89	12,90	12,91
Pesisir Selatan	13,32	13,33	13,35	13,36	13,37
Solok	13,04	13,05	13,30	13,55	13,56
Sijunjung	12,37	12,38	12,64	12,72	12,76
Tanah Datar	14,33	14,34	14,59	14,78	15,05
Padang Pariaman	13,67	13,68	13,93	14,19	14,20
Agam	13,87	13,88	13,88	13,89	14,16
Lima Puluh Kota	13,29	13,30	13,40	13,41	13,42
Pasaman	12,80	12,81	13,05	13,25	13,52
Solok Selatan	12,71	12,72	12,73	12,80	13,07
Dharmasraya	12,43	12,44	12,51	12,68	12,89
Pasaman Barat	13,61	13,68	13,69	13,70	13,72
Kota					
Padang	16,52	16,53	16,54	16,56	16,57
Solok	14,32	14,33	14,34	14,36	14,37
Sawahlunto	***13,17***	***13,18***	***13,42***	***13,69***	***13,86***
Padang Panjang	15,06	15,07	15,07	15,29	15,47
Bukit Tinggi	14,97	14,98	14,99	15,01	15,28
Payakumbuh	14,26	14,27	14,29	14,30	14,57
Pariaman	14,54	14,55	14,61	14,79	14,80
Sumatera Barat	**14,02**	**14,09**	**14,10**	**14,11**	**14,30**

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Angka HLS Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 13,86, yang berarti lamanya waktu sekolah bagi anak usia sekolah di Kota Sawahlunto diharapkan mencapai 13,86 tahun atau dapat menyelesaikan D1. Dan angka HLS Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

3. Angka Literasi/Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka.

Komponen literasi numerasi meliputi : 1). pemahaman angka dan operasi matematika dasar (penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian); 2). pemahaman konsep matematika kompleks (pecahan, persentase, rasio, proporsi, geometri, statistik, dan probabilitas); 3). kemampuan memecahkan masalah matematika; 4). pemahaman statistik dan probabilitas; 5). kemampuan berpikir kritis terhadap informasi numerik; 6). pemahaman dalam konteks kehidupan sehari-hari.

Adapun perkembangan angka literasi numerasi di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 2.54
Angka Literasi/Numerasi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-Rata Nilai UN SD	7,42	-	-	-	-
2	Rata-Rata Nilai UN SMP	5,55	-	-	-	-
3	Persentase siswa dengan nilai *assessment* kompetensi (numerasi minimum) SD	-	39,43	45,33	68,80	75,29
4	Persentase siswa dengan nilai *assessment* kompetensi (numerasi minimum) SMP	-	69,67	70,07	57,52	77,01
5	Persentase siswa dengan nilai *assessment* kompetensi (Literasi minimum) SD	-	60,90	62,38	83,87	87,26
6	Persentase siswa dengan nilai *assessment* kompetensi (Literasi minimum) SMP	-	69,67	70,07	80,10	83,51

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2025

Mulai tahun 2021 ujian nasional pada tingkat SD dan SMP tidak dilaksanakan lagi, sebagai gantinya digunakan angka literasi/numerasi dengan rentang nilai 1- 100. Selama rentang waktu tahun 2021-2023, capaian angka literasi/numerasi dan SD dan SMP bervariasi. Untuk angka numerasi SD berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, sedangkan angka numerasi SMP berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Selanjutnya untuk angka literasi SD memiliki kecenderungan meningkat, sementara angka literasi SMP berfluktuasi dengan kcenderungan menurun. Dalam upaya meningkatkan nilai literasi dilakukan peningkatan pembelajaran berbasis a*ssesmen*t kompetensi minimum (AKM) melalui peningkatan kompetensi tenaga pendidik dalam menyusun dan mengolah soal AKM.

4. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi (membaca, menulis, dan memahami teks) tertulis masyarakat.

IPLM merupakan indikator kinerja kunci (IKK) urusan pemerintahan bidang perpustakaan pada Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020. Terdapat 7 unsur pembangunan literasi masyarakat, yaitu : 1).pemerataan layanan perpustakaan; 2).ketercukupan koleksi; 3).ketercukupan tenaga perpustakaan; 4).tingkat kunjungan masyarakat per hari; 5).jumlah perpustakaan ber-SNP; 6).keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi/promosi; 7).anggota perpustakaan.

Tabel 2.55
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto	72,13	72,43	74,14	88,33	94,81

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024-2025,
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Kota Sawahlunto, 2024

IPLM Kota Sawahlunto meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 terdapat 6 unsur dari 7 unsur pembangunan literasi masyarakat yang sudah mendapat nilai sempurna (1). Satu unsur pembangunan literasi masyarakat yang belum mendapatkan nilai sempurna adalah unsur pemerataan layanan perpustakaan dengan capaian sebesar 0,6369.

5. Indeks Literasi Digital

Literasi digital merupakan minat baca secara digital, yang mana masyarakat mencari bahan bacaan atau informasi yang bermanfaat melalui teknologi komputer dan internet seperti ponsel atau laptop. Indeks literasi digital dihitung hanya sampai level provinsi, sedangkan untuk level kabupaten dan kota belum ada..

6. Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional adalah jumlah satuan pendidikan di suatu wilayah yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di wilayah tersebut.

Asesmen nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Asesmen nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di bawah Kementerian Pendidikan,

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Kementerian Agama, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, asesmen nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil capaian asesmen nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu : 1). Perlu intervensi khusus; 2). Dasar; 3). Cakap; 4). Mahir. Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada kabupaten/kota tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".

Adapun perkembangan persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca dan numerasi di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.56
Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai
Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional					
Literasi (%)	na	na	79,09	81,99	85,49
Numerasi (%)	na	na	47,01	63,16	76,16

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto, 2025

Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada assesmen tingkat nasional untuk literasi membaca untuk numerasi mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.

7. Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas Yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi digunakan untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup, Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan dan S3. Tingginya proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi pendidikan semakin baik.

Berikut proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 :

Tabel 2.57
Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun Ke Atas
Yang Berkualitas Pendidikan Tinggi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah lulusan S1	4.358	4.692	4.873	5.071	5.319
2	Jumlah lulusan S2	270	289	315	331	355
3	Jumlah lulusan S3	2	3	3	5	6
4	Jumlah lulusan D1 & 2	577	575	565	549	528
5	Jumlah lulusan Akademi/Diploma/ Sarjana Muda (D3)	1.545	1.606	1.630	1.659	1.671

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
6	Jumlah lulusan S1/S2/S3/D1 & D2/Akademi/Diploma/ Sarjana Muda	6.752	7.165	7.386	7.615	7.879
7	Jumlah Penduduk berusia 15 Tahun ke atas	48.704	49.362	50.151	51.060	51.880
8	**Proporsi Penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi Kota Sawahlunto**	**13,86**	**14,52**	**14,73**	**14,91**	**15,19**
	Proporsi Penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi Pendidikan tinggi Provinsi Sumatera Barat	12,6	11,22	11,6	11,48	11,16

Sumber Data : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Sawahlunto, 2025

Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan angka ini lebih tinggi dari proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi Provinsi Sumatera Barat.

8. Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi bekerja di bidang keahlian menengah tinggi adalah pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan tinggi mencakup Diploma I-IV, S1, S2, S2 Terapan dan S3, sedangkan pendidikan menengah adalah SMA/MA/SMLB/Paket C, SMK dan MAK.

Bidang keahlian menengah (*semi-skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. Bidang keahlian tinggi (*skilled*) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.

Perkembangan persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.58
Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja Di Bidang Keahlian Menengah Tinggi Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja pada keahlian menengah atau tinggi (orang)	na	na	13.457	15.090	na
Jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi dan sedang bekerja (orang)	na	na	19.192	20.595	na

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (%)	na	na	70,12	73,27	*na*

Sumber Data : BPS, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka

Pada tabel di atas terlihat bahwa persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi di Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2020-2024 menunjukkan peningkatan (data 2020-2021 dan 2024 tidak tersedia). Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.

D. Perlindungan Sosial yang Adaptif

1. Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial ketenagakerjaan

Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Indonesia. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah jumlah pekerja yang memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja. Semakin tinggi cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap resiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.

Adapun perkembangan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.59
Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan (Orang)	13.604	19.379	24.687	27.416	21.155
2	Jumlah Semesta Penduduk Bekerja (Orang)	30.310	30.186	32.275	34.018	36.134
3	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)**	**44,88**	**64,20**	**76,49**	**80,59**	**58,55**

Sumber Data : BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sumatera Barat

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi. Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan tertinggi terjadi pada tahun 2023 sebesar 80,59% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 44,88%. Terjadi penurunan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto yang menunjukkan bahwa tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan di Kota Sawahlunto semakin rendah.

2. Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal

Persentase disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan *jobs security*, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.

Perkembangan persentase disabilitas bekerja di sektor formal selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.60
Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal (Orang)	na	na	0	122	na
2	Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas (Orang)	na	na	34	221	na
3	*Persentase Disabiltas Bekerja di Sektor Formal (%)*	na	na	0,00	55,20	na

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024

Data Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal tahun 2020-2021 dan 2024 tidak tersedia. Namun terjadi peningkatan yang sangat signifikan pada disabilitas yang bekerja di sektor formal di Kota Sawahlunto pada tahun 2023. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah Kota Sawahlunto terus berupaya untuk selalu memberi penghargaan, serta terus memenuhi hak bagi para penyandang disabilitas, terutama memberikan hak dan kesempatan yang sama dalam mengakses fasilitas umum di bidang kesehatan, pendidikan, lapangan kerja, dan layanan sosial.

E. Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju

1. Indeks Kerukunan Umat Beragama (Kampung Moderasi Beragama)

Kampung Moderasi Beragama merupakan program dari Kementerian Agama Republik mulai tahun 2023 dan digunakan sebagai proxy dari Indeks kerukunan umat beragama (IKUB) karena data capaian IKUB di Kota Sawahlunto sampai tahun 2024 belum tersedia. Indeks kerukunan umat beragama menggambarkan sejauh mana tingkat kerukunan umat beragama. IKUB diukur melalui tiga indikator kerukunan umat beragama, yakni toleransi, kesetaraan, dan kerja sama.

Moderasi beragama merupakan cara pandang kita dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, radikalisme, ujaran kebencian, hingga retaknya hubungan antar umat beragama yang menjadi problem yang dihadapi bangsa saat ini. Moderasi beragama dapat diukur dari 4 indikator, yakni : Komitmen kebangsaan, Tolerasi, Anti kekerasan, Adaptif budaya lokal.

Dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Sawahlunto telah disosialisasikan kampung moderasi beragama. Program kampung moderasi beragama merupakan program dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membentuk

sebuah kampung, desa atau kelurahan dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat, yang bertujuan untuk memperkuat kehidupan bermasyarakat.

Tabel 2.61
Kampung Moderasi Beragama Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Desa/Kelurahan sebagai Kampung Moderasi Beragama	na	na	na	2	2

Sumber Data : Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto Tahun 2024

Dalam mewujudkan moderasi beragama di Kota Sawahlunto, telah disosialisasikan kampung moderasi beragama. Program kampung moderasi beragama merupakan program dari Kementerian Agama Republik Indonesia untuk membentuk sebuah kampung, desa atau kelurahan dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat, yang bertujuan untuk memperkuat kehidupan bermasyarakat. Kota Sawahlunto sudah memiliki 2 (dua) desa/kelurahan yakni Desa Sikalang dan Kelurahan Tanah Lapang sebagai kampung moderasi beragama. Target akhir seluruh desa/kelurahan di Kota Sawahlunto akan menjadi Kampung Moderasi Beragama.

2. Indeks Pembangunan Kebudayaan (Persentase Pelestarian Cagar Budaya)

Pelestarian Cagar Budaya yang merupakan indikator proxy dari Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK). Indeks Pembangunan Kebudayaan hanya tersedia sampai tingkat provinsi.

Pelestarian cagar budaya sangat penting untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai historis, budaya, dan artistik yang ada di dalamnya. Pelestarian cagar budaya tidak hanya memberikan manfaat budaya tetapi juga dapat berdampak positif pada ekonomi lokal melalui pariwisata. Situs bersejarah yang terawat dengan baik dapat menarik pengunjung dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi komunitas setempat. Cagar budaya merupakan warisan sejarah yang tidak hanya mencerminkan identitas suatu bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara generasi.

Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto (OCMHS) adalah salah satu cagar budaya Kota Sawahlunto. OCMHS merupakan kawasan kota tua bekas peninggalan penjajahan Belanda yang terletak di tengah-tengah Kota Sawahlunto. OCMHS merupakan warisan dunia yang telah diakui oleh UNESCO pada sidang sesi ke–43 pertemuan Komite Warisan Dunia di Kota Baku Azerbaijan pada tanggal 6 Juli 2019.

Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto (OCMHS) melewati 7 kabupaten/kota dengan tiga zona :

1. Zona A : Situs dan Kota Tambang Sawahlunto, meliputi Kota Sawahlunto dengan tambang terbuka dan jaringan tambang yang disokong dengan fasilitas pengolahan batu bara dan berbagai fasilitas kota tambang yang lengkap;

2. Zona B : Jaringan infrastruktur perkeretaapian, meliputi Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, Kabupaten Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Kabupaten Padang Pariaman, dan Kota Padang dengan jaringan kereta api teknik tingkat tinggi terdiri dari rel gigi, jembatan dan terowongan yang menghubungkan lokasi tambang hingga pelabuhan Emmahaven (Teluk Bayur) sepanjang 155 kilometer di medan pegunungan yang sulit;
3. Zona C : Fasilitas gudang batu bara di pelabuhan Teluk Bayur atau Emmahaven (*Coal Storage Facilities at Emmahaven Port*) di Kota Padang di pantai samudera hindia sebagai tempat memuat batu bara yang akan dikapalkan ke seluruh wilayah Belanda dan wilayah eropa lainya.

OCMHS merupakan bukti sejarah Kota Sawahlunto yang berawal dengan penemuan deposit batu bara serta dampak revolusi barat di Hindia Belanda. Lebih satu abad hasil batu bara Sawahlunto berkontribusi bagi penggerak pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah Indonesia dan Sumatera Barat khususnya. Meskipun aktivitas tambang sudah tidak beroperasi lagi namun dampak pembangunan berupa tinggalan bersejarah dan pengalaman (wujud budaya) yang diperoleh masih dapat dirasakan masyarakat hingga saat ini. Sehingga besarnya nilai sejarah pencapaian di bidang industri tambang berskala global yang dimiliki Warisan Budaya Tambang Batu Bara Ombilin Sawahlunto (WBTBOS)/*Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto* (OCMHS) menjadikan penting untuk dilindungi, dilestarikan dan dipromosikan bagi generasi masa kini dan masa depan sebagai bagian dari Warisan Dunia umat manusia.

Berikut perkembangan pelestarian cagar budaya Kota Sawahlunto selama kurun waktu tahun 2020-2024 :

Tabel 2.62
Persentase Pelestarian Cagar Budaya Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (*tangible*) yang di lestarikan (objek)	83	85	88	92	94
2.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible*) yang dilestarikan (objek)	13	35	43	45	49
3.	**Jumlah Cagar Budaya (*tangible dan Intangible*) yang dilestarikan (objek)**	**96**	**120**	**131**	**137**	**143**
4.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (*tangible*) Daerah (objek)	144	153	164	163	163
5.	Jumlah Total Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible*) Daerah (objek)	225	215	215	215	215
6.	**Jumlah Total Cagar Budaya (*tangible dan Intangible*) Daerah (objek)**	**369**	**368**	**379**	**378**	**378**
7.	**Persentase Pelestarian Cagar Budaya**	**26,02**	**32,61**	**34,56**	**36,24**	**37,8**

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto, 2023

Pada tabel di atas terlihat bahwa pemerintah Kota Sawahlunto konsisten dari tahun ke tahun melakukan pelestarian terhadap cagar budaya yang ada, baik yang berupa benda, situs dan kawasan cagar budaya (*tangible*) maupun yang berupa warisan budaya tak benda (*intangible*) yang dilestarikan (objek). Jumlah cagar budaya (*tangible dan intangible*) yang dilestarikan sampai tahun 2024 sudah berjumlah 143 objek atau 37,8 %.

Tabel 2.63
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (*Tangible*) Dan Jumlah Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible*) Di Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya (*tangible*)						
1.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang di lestarikan (unit)	83	85	88	92	94
2.	Jumlah Total Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya Daerah (unit)	144	153	164	163	163
3.	Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dikelola (unit)	21	94	102	137	143
Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible*)						
1.	Manuskrip	5	5	5	5	5
2.	Tradisi Lisan	46	43	43	43	43
3.	Adat Istiadat	40	40	40	40	40
4.	Ritus	12	13	13	13	13
5.	Pengetahuan Tradisional	18	18	18	18	18
6.	Teknologi Tradisional	27	19	19	19	19
7.	Seni	38	38	38	38	38
8.	Bahasa	2	2	2	2	2
9.	Permainan Rakyat	35	35	35	35	35
10.	Olahraga Tradisional	2	2	2	2	2
11.	Jumlah Total Warisan Budaya Tak Benda (*Intangible*)	225	215	215	215	215
12.	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang dilestarikan	13	35	43	45	49

Sumber Data : Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto

Dua warisan budaya tak benda (*intangible*) yang sudah masuk ke dalam Warisan Budaya Tak Benda Indonesia (WBTBI) adalah Songket Silungkang (masuk kedalam Pengetahuan Tradisional) dan Bahasa Tangsi (masuk kedalam Bahasa).

F. Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif

1. Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian perlindungan anak di Indonesia. IPA digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan khusus.

IPA disusun oleh Kemen PPPA bersama BPS yang menyajikan potret perlindungan anak melalui presentasi 5 klaster. Penyajian lima Klaster ini mengacu pada Konvensi Hak Anak dengan mengaplikasikan 4 Klaster pembentuk Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) dan 1 Klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA). Klaster pembentuk Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) terdiri dari Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan; Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif; Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan; Klaster IV Pendidikan dan Pemanfaatan Waktu Luang. Sedangkan Klaster pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) adalah Klaster V Perlindungan Khusus.

Adapun capaian klaster pembentuk IPA Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.64
Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPA Sawahlunto	na	65,70	67,61	65,47	na
IPA Provinsi Sumatera Barat	67,21	61,98	63,65	62,38	na
IPA Nasional	66,89	61,38	63,30	63,83	na

Sumber Data : SIGA KemenPPPA

IPA Kota Sawahlunto tahuntahun 2020 dan tahun 2024 tidak tersedia, sedangkan IPA tahun 2021-2023 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Meskipun demikian, IPA Kota Sawahlunto selalu berada di atas IPA Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel 2.65
Capaian Indeks Penyusun IPA Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional
Tahun 2021-2023

Wilayah	Klaster I Hak Sipil dan Kebebasan			Klaster II Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif			Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan			Klaster IV Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya			Klaster V Perlindungan Khusus		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Sawahlunto	48,2	51,96	47,82	84,65	84,72	88,03	79,89	85,5	80,97	36,05	29,95	29,79	75,34	80,92	75,46
Sumatera Bara t	47,72	51,44	50,28	85,02	84,78	84,78	73,17	72,66	73,41	28,67	32,79	29,23	70,01	71,5	69,08
Indonesia	46,74	49,04	47,68	76,68	78,64	80,32	76,47	77,15	77,9	30,99	33,96	34,56	71,89	73,61	74,45

Sumber Data : SIGA KemenPPPA

Pada tabel di atas terlihat bahwa klaster Perlindungan Khusus pembentuk Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA) dan tiga dari empat klaster pembentuk Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA) Kota Sawahlunto, yaitu : Klaster I Hak SIpil dan Kebebasan, Klaster III Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Klaster IV Pendidikan Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya mengalami penurunan pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan bahwa perlindungan anak di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 belum optimalnya.

Belum optimalnya perlindungan anak di Kota Sawahlunto didukung oleh data lain yang menunjukkan masih adanya keluarga miskin sebanyak 1621 keluarga yang tentunya terdapat anak usia 0-17 tahun yang beresiko hidup dalam kemiskinan, adanya anak terlantar sebanyak 34 orang dan rasio angka partisipasi sekolah (APS) Kota Sawahlunto di bawah 100 yang bermakna adanya anak usia 7-17 tahun yang putus sekolah, masih terdapat 136 dari 19,009 (0, 72%) anak usia 0-18 tahun yang belum memiliki akta kelahiran, masih terdapatnya perempuan yang melahirkan diluar faskes, masih terdapatnya balita stunting (prevalensi stunting) sebesar 13,7% berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia.

2. Indeks Pembangunan Keluarga

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) meliputi tiga dimensi yaitu ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan. Indeks ini berkolaborasi positif dengan Indeks Pembangunan Manusia. Indeks Pembangunan Keluarga merupakan instrumen untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas keluarga. Indeks Pembangunan Keluarga digunakan untuk mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga tangguh, berkembang dan rentan.

Kriteria iBangga adalah sebagai berikut : Nilai iBangga < 40 (kurang baik /rentan), Nilai iBangga 40 – 70 (cukup baik/berkembang), Nilai iBangga > 70 (baik /tangguh).

Tabel 2.66
Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Keterangan	2020	2021	2022	2023	2024
iBangga Kota Sawahlunto	na	54,05	57,77	64,28	63,88
iBangga Provinsi Sumatera Barat	51,74	53,54	56,12	60,99	61,20
iBangga Nasional	53,57	54,01	56,07	61,43	62,40

Sumber Data : BKKBN 2025

Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto selama periode 2020-2024 berada pada kriteria cukup baik (berkembang). Hal ini menandakan kualitas Keluarga di Kota Sawahlunto sudah semakin baik walaupun masih berada pada posisi berkembang. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto lebih tinggi dibandingkan dari Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang juga berada pada kriteria cukup baik (berkembang).

3. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Kesetaraan gender menjadi target pembangunan di banyak negara terutama yang mengalami disparitas pembangunan yang tinggi. Ketimpangan pembangunan menurut gender mengakibatkan pembangunan tidak dapat mencapai potensinya secara optimal. Kondisi yang ideal dalam pembangunan manusia yang diharapkan adalah kelompok penduduk laki-laki dan perempuan memiliki akses yang sama untuk berperan dalam pembangunan, memegang kendali atas sumber daya pembangunan yang ada, serta menerima manfaat dari pembangunan yang setara dan adil. Kesetaraan gender sendiri dapat dimaknai sebagai kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai manusia dalam berperan dan berpartisipasi dalam segala bidang.

Menyadari bahwa kesetaraan gender memainkan peran yang penting dalam pembangunan, maka pengukuran ketimpangan gender telah menjadi suatu kebutuhan. Dengan melakukan pengukuran ketimpangan gender, maka akan diperoleh data-data yang diperlukan untuk memahami, mengatasi, dan mengentaskan ketimpangan yang ada. Data tersebut juga bermanfaat sebagai dasar untuk membuat kebijakan publik yang akuntabel dan berkontribusi terhadap kesetaraan gender dan kehidupan yang lebih adil bagi setiap orang, oleh sebab itu dibutuhkan kajian perihal Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

Nilai Indeks Ketimpangan Gender berada pada rentang ambang nilai 0 sampai 1. Semakin rendah nilai Indeks Ketimpangan Gender suatu wilayah, semakin merata pembangunan gender di wilayah tersebut dan sebaliknya, semakin tinggi nilai Indeks Ketimpangan Gender suatu wilayah menunjukkan semakin timpang pembangunan gender di wilayah tersebut.

Adapun perkembangan Indeks Ketimpangan Gender Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

Grafik 2.21
Indeks Ketimpangan Gender Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

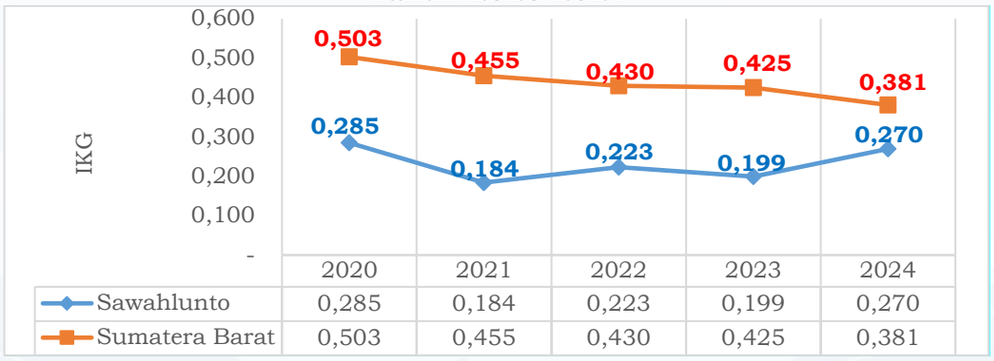

	2020	2021	2022	2023	2024
Sawahlunto	0,285	0,184	0,223	0,199	0,270
Sumatera Barat	0,503	0,455	0,430	0,425	0,381

Sumber Data : Berita Resmi BPS 25 April 2025

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama lima tahun terakhir. Meskipun demikian, IKG Kota Sawahlunto lebih rendah dibandingkan IKG Provinsi Sumatera Barat. hal ini menunjukkan bahwa pembangunan gender di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan Provinsi Sumatera Barat.

Berikut disandingkan IKG Kota Sawahlunto dengan IKG kabupaten/kota lainnya Se-Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.67
IKG Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	0,855	0,851	0,85	0,851	0,849
Kab. Pesisir Selatan	0,492	0,505	0,517	0,482	0,468
Kab. Solok	0,449	0,48	0,403	0,423	0,377
Kab. Sijunjung	0,516	0,527	0,501	0,465	0,491
Kab. Tanah Datar	0,387	0,312	0,305	0,336	0,344
Kab. Padang Pariaman	0,778	0,75	0,763	0,751	0,722
Kab. Agam	0,384	0,359	0,239	0,162	0,355
Kab. Lima Puluh Kota	0,441	0,549	0,496	0,492	0,453
Kab. Pasaman	0,525	0,535	0,522	0,527	0,464
Kab. Solok Selatan	0,824	0,804	0,787	0,811	0,805
Kab. Dharmasraya	0,566	0,553	0,528	0,539	0,457
Kab. Pasaman Barat	0,554	0,532	0,519	0,494	0,419
Kota Padang	0,200	0,32	0,171	0,198	0,172
Kota Solok	0,270	0,19	0,18	0,182	0,147
Kota Sawahlunto	***0,285***	***0,184***	***0,223***	***0,199***	***0,270***
Kota Padang Panjang	0,153	0,192	0,153	0,135	0,081
Kota Bukittinggi	0,273	0,236	0,156	0,159	0,080
Kota Payakumbuh	0,279	0,325	0,295	0,153	0,175
Kota Pariaman	0,377	0,331	0,286	0,374	0,120
Provinsi Sumatera Barat	**0,503**	**0,455**	**0,43**	**0,425**	**0,381**

Sumber Data : Berita Resmi BPS 25 April 2025

Pada tahun 2024, IKG Kota Sawahlunto merupakan yang tertinggi pada level kota di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya IKG menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Sawahlunto belum optimal atau ada kesenjangan yang besar antara pencapaian laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi. Sedangkan pada level kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Barat, IKG terendah adalah Kota Bukittinggi dan IKG tertinggi adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Hal ini mengandung arti bahwa pembangunan gender di Kota Bukittinggi adalah yang paling merata di Provinsi Sumatera Barat dan yang paling tidak merata (timpang) adalah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

4. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kesetaraan gender dalam pembangunan manusia, dengan membandingkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar : kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Nilai IPG berkisar antara 0-100 persen. Semakin mendekati 100 nilai IPG, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender dan jika IPG 100 bermakna tidak ada lagi kesenjangan pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan atau pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan sudah sama (setara).

Adapun capaian IPG Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.68
IPG Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat, Nasional
Tahun 2020–2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPG Kota Sawahlunto	95,48	95,73	95,17	95,36	95,73
IPG Sumatera Barat	94,17	94,34	94,72	94,93	95,25
IPG Nasional	91,06	91,27	91,63	91,85	91,85

Sumber Data : BPS

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama lima tahun terakhir. IPG Kota Sawahlunto lebih tinggi dari IPG Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang bermakna pembangunan manusia antara laki-laki dan perempuan di Kota Sawahlunto lebih merata dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel 2.69
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	[UHH SP 2010] Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	89,59	89,81	89,91	89,57	90,13
Kab. Pesisir Selatan	95,12	95,41	95,75	95,57	95,83
Kab. Solok	96,18	96,19	96,29	96,17	96,22
Kab. Sijunjung	93,03	93,40	94,16	94,28	94,39
Kab. Tanah Datar	97,57	97,58	97,62	97,73	97,48
Kab. Padang Pariaman	92,69	92,78	93,08	93,32	93,92
Kab. Agam	97,01	96,95	97,00	97,19	97,09
Kab. Lima Puluh Kota	95,03	94,91	94,85	94,77	94,86
Kab. Pasaman	92,45	92,47	92,51	92,7	92,91
Kab. Solok Selatan	95,08	95,14	95,20	95,27	95,53
Kab. Dharmasraya	88,31	88,32	88,56	89,11	89,71
Kab. Pasaman Barat	90,26	90,14	90,17	90,05	90,32
Kota Padang	93,64	93,81	93,85	93,94	94,04
Kota Solok	97,05	97,05	96,67	96,64	96,90
Kota Sawahlunto	***95,48***	***95,73***	***95,17***	***95,36***	***95,73***
Kota Padang Panjang	97,70	97,78	98,24	98,19	98,23
Kota Bukittinggi	98,89	98,99	99,36	99,17	98,66
Kota Payakumbuh	98,46	98,6	98,61	98,58	98,93
Kota Pariaman	98,49	98,62	98,64	98,07	98,11
Provinsi Sumatera Barat	**94,17**	**94,34**	**94,72**	**94,93**	**95,25**

Sumber Data : Berita Resmi BPS 8 April 2025

Meskipun IPG Kota Sawahlunto lebih tinggi dari IPG Provinsi Sumatera Barat dan Nasional, namun merupakan nilai yang terendah kedua setelah Kota Padang diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat yang bermakna kesetaraan gender dalam pembangunan manusia di Kota Sawahlunto masih lebih rendah dibandingkan kota-kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

5. Indeks Pembangunan Pemuda (Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan Dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan)

Indeks Pembangunan Pemuda Kota Sawahlunto sampai tahun 2024 belum dihitung. Oleh sebab itu untuk memberikan informasi capaian kinerja pembangunan pemuda, ditampilkan gambaran tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan.

Kepemudaan dan olahraga merupakan bagian dari urusan pembangunan yang mengedepankan kreativitas generasi penerus bangsa. Perkembangan organisasi pemuda ini perlu ditingkatkan lagi sebagai salah satu antisipasi dalam mengurangi tingkat kriminalitas dan perilaku menyimpang pemuda di Kota Sawahlunto sehingga masalah sosial ini dapat dituntaskan. Perkembangan kepemudaan dan Olahraga yang ada di Kota Sawahlunto terlihat dari realisasi kinerja daerah setiap tahunnya, sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 2.70
Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2020-2024

NO	INDIKATOR	TAHUN				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan (%)	15	16	4,13	5,3	5,25
2	Peningkatan prestasi olahraga (medali)	82	162	177	382	385
3	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri (%)	1	1	0,008	2,77	3

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa prestasi olahraga Kota Sawahlunto dari tahun 2020 hingga tahun 2024 meningkat yang ditunjukkan oleh peningkatan perolehan mendali seiring dengan banyaknya event atau lomba yang diikuti. Pemerintah Kota Sawahlunto sangat memperhatikan dan mendukung aktivitas organisasi kepemudaan dan olahraga yang ada di Kota Sawahlunto. Namun persentase tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.

6. Indeks Perlindungan Khusus Anak

Indeks perlindungan khusus anak (IPKA) adalah indikator yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus, seperti anak penyandang disabilitas, pekerja anak, dan anak terlantar baik secara nasional maupun di tingkat provinsi.

Adapun capaian IPKA Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 2.71
Perkembangan Indeks Perlindungan Khusus Anak Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPKA Sawahlunto	na	79.71	82.73	78.66	)*
IPKA Provinsi Sumatera Barat	72.62	72.86	74.42	72.87	)*
IPKA Nasional	73.11	73.59	75.21	75.72	)*

Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
*) Data belum *Launching*

Pada tabel di atas terlihat bahwa IPKA Kota Sawahlunto lebih tinggi (baik) dari IPKA Provinsi Sumatera Barat dan IPKA Nasional, namun capaiannya berfluktuasi.

Perlindungan khusus anak hingga saat ini masih menjadi salah satu isu penting karena memiliki beragam tantangan. Perlindungan khusus anak diantaranya adalah perlindungan akan resiko kemiskinan, fenomena pekerja anak, kekerasan, maupun perlindungan terhadap anak dengan disabilitas.

Berikut disandingkan capaian IPKA Kota Sawahlunto dan IPKA kabupate/kota se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2023:

Tabel 2.72
Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)
Kabupaten/Kota Se-Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2021 - 2023

Kabupaten/Kota	Tahun					
	2021	Peringkat	2022	Peringkat	2023	Peringkat
Kota Padang Panjang	82,05	4	82,36	3	85,74	1
Kota Payakumbuh	83,71	2	81,51	5	85,47	2
Kab. Dharmasraya	79,58	8	76,41	9	85,3	3
Kota Solok	84,71	1	81,27	6	83,81	4
Kab.Lima Puluh Kota	79,65	7	80,39	7	82,94	5
Kota Padang	82,24	3	82,22	4	82,02	6
Kota Bukittinggi	76,68	11	82,69	2	79,97	7
Kab.Sijunjung	71,35	15	77,51	8	79,27	8
Kota Sawah Lunto	***79,71***	***6***	***82,73***	***1***	***78,66***	***9***
Kab.Pasaman	66,17	18	59,9	18	77,79	10
Kab.Pasaman Barat	72,91	14	72,62	14	77,2	11
Kab.Solok	74,96	13	68,49	15	72,54	12
Kab.Padang Pariaman	68,39	16	65,95	17	72,46	13
Kab.Pesisir Selatan	67,27	17	67,59	16	71,61	14
Kab.Solok Selatan	75,3	12	75,62	10	70,94	15
Kab.Tanah Datar	79,92	5	75,04	11	70,61	16
Kota Pariaman	79,07	9	74,32	12	69,75	17
Kab.Agam	78,67	10	72,69	13	66,25	18
Kab.Kepulauan Mentawai	52,3	19	56,09	19	62,15	19

Sumber Data : Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pada tabel di atas terlihat IPKA Kota Sawahlunto pernah menjadi yang tertinggi dibandingkan 18 kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 IPKA Kota Sawahlunto mengalami penurunan yang disebabkan masih adanya anak yang beresiko hidup dalam kemiskinan karena terdapat keluarga miskin sebanyak 1621 keluarga, fenomena pekerja anak, kekerasan terhadap anak, maupun perlindungan terhadap anak penyandang disabilitas.

2.1.3 ASPEK DAYA SAING DAERAH

A. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (*dependency ratio*) adalah perbandingan antara jumlah penduduk usia non produktif (penduduk usia 0-14 tahun dan penduduk usia 65 tahun ke atas) dengan jumlah penduduk usia produktif (penduduk usia 15-64 tahun). Semakin tinggi angka ketergantungan menunjukkan semakin tinggi beban yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai hidup penduduk non produktif, demikian pula sebaliknya.

Tabel 2.73
Angka Ketergantungan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah penduduk usia < 15 tahun	16.434	16.325	16.262	16.710	16.840
2	Jumlah penduduk usia > 64 tahun	4.542	4.770	5.020	5.140	5.410
3	Jumlah penduduk usia non produktif (1) & (2)	20.976	21.095	21.282	21.850	22.250
4	Jumlah penduduk usia 15-64 tahun	44.162	44.592	45.131	45.920	46.470
5	Angka ketergantungan (3)/(4)	47,50	47,31	47,16	47,58	47,88

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2021-2025, Data Diolah 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa angka ketergantungan Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat, pada kisaran angka 47,16 hingga 47,88. Angka ketergantungan di bawah 50 berarti bahwa satu orang penduduk tidak produktif ditanggung oleh 1 - 2 orang penduduk produktif. Pada tahun 2024, angka ketergantungan Kota Sawahlunto sebesar 47,88 yang berarti tiap 100 orang penduduk yang berusia produktif (15-64) mempunyai tanggungan sebanyak 48 orang penduduk non produktif.

2. Rata–rata Pengeluaran Per Kapita Sebulan

Rata–rata pengeluaran per kapita merupakan rata–rata konsumsi makanan dan non makanan per individu dalam satu tahun. Pengeluaran seseorang dipengaruhi oleh pendapatan. Perubahan pendapatan seseorang akan berpengaruh terhadap pergeseran pola pengeluaran. “Semakin tinggi pendapatan seseorang, semakin tinggi pengeluaran non makanan”**.** Atau dengan kata lain, pola pengeluaran dapat dipakai sebagai salah satu alat untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk, “semakin rendah persentase pengeluaran konsumsi untuk makanan terhadap total pengeluaran, semakin baik tingkat kesejahteraan”

Pengeluaran konsumsi untuk makanan digunakan untuk membeli padi-padian, umbi-umbian, ikan/udang/cumi/kerang, daging, telor dan susu, sayur-sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan kelapa, bahan minuman, bumbu-bumbuan, konsumsi lainnya, makanan dan minuman jadi, dan rokok. Sedangkan “pengeluaran konsumsi untuk non makanan” digunakan untuk membiayai perumahan dan fasilitas rumah tangga; aneka komoditas dan jasa; pakaian, alas kaki,

dan tutup kepala; komoditas tahan lama; pajak, pungutan, dan asuransi; keperluan pesta dan upacara/kenduri.

Grafik 2.22
Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan
Kelompok Makanan dan Non Makanan
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024 (Dalam Rp)

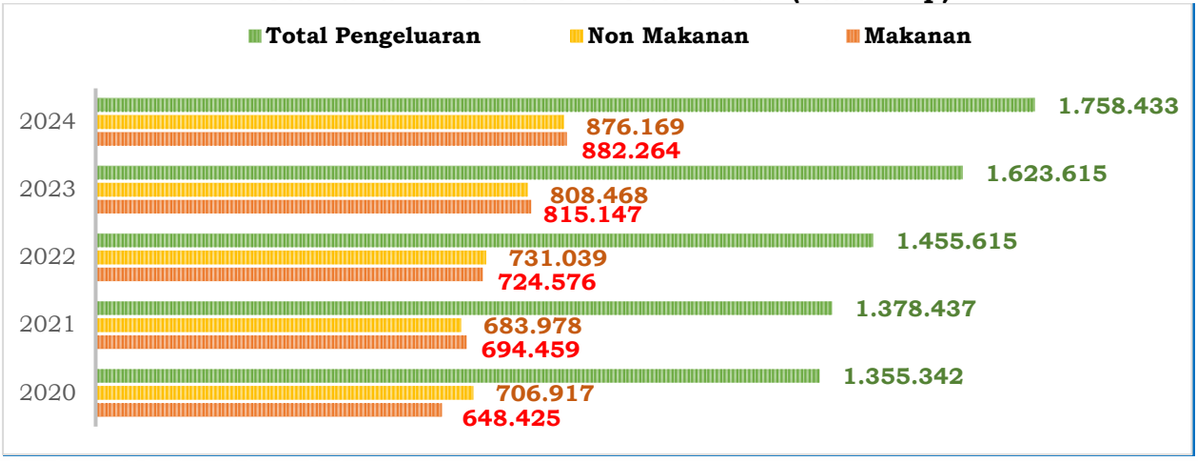

Sumber : BPS, Sawahlunto Dalam Angka 2025

Selama kurun waktu 2020-2024, pengeluaran konsumsi makanan mendominasi pengeluaran konsumsi rumah tangga di Kota Sawahlunto, kecuali tahun 2020 dan 2022, dimana kondisi pada kedua tahun ini pengeluaran konsumsi kelompok non makanan lebih tinggi dari pengeluaran konsumsi kelompok makanan.

Berikut persentase pengeluaran konsumsi per kapita sebulan kelompok makanan dan non makanan :

Grafik 2.23
Persentase Pengeluaran Konsumsi Per Kapita Sebulan
Kelompok Makanan dan Non Makanan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

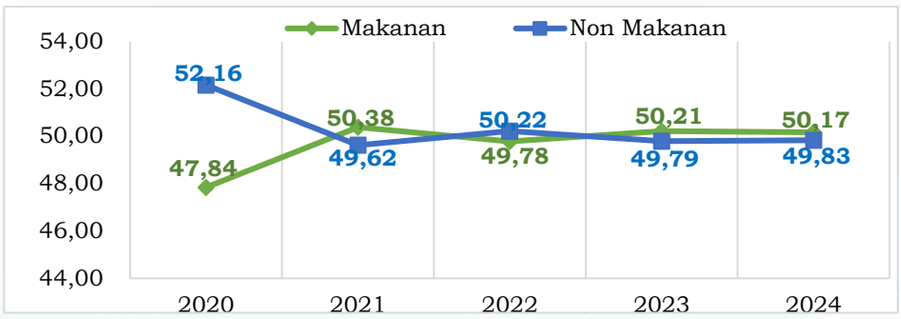

Sumber : BPS, Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Selama kurun waktu 2020-2024, persentase pengeluaran konsumsi per kapita sebulan kelompok makanan di Kota Sawahlunto di atas 50%, kecuali tahun 2020 dan 2022. Hal ini menunjukkan, kondisi ekonomi masyarakat Kota Sawahlunto tahun 2020 dan tahun 2022 lebih baik atau lebih sejahtera berdasarkan Teori ekonomi modern (*Walt Whitman Rostow*) yang mengatakan salah satu ciri perekonomian yang modern adalah jika tujuan utama konsumsi masyarakatnya adalah untuk meningkatkan arti hidup, sehingga masyarakat lebih cenderung untuk memenuhi kebutuhan tersier dibanding kebutuhan primer dan sekunder. Atau dengan kata lain, "semakin tinggi perekonomian suatu masyarakat, konsumsi untuk kebutuhan non makanan semakin tinggi".

Pada tahun 2020 dan tahun 2022 proporsi pengeluaran konsumsi non makanan di Kota Sawahlunto lebih besar dari pengeluaran konsumsi untuk makanan. Hal ini didukung oleh rendahnya laju inflasi kelompok makanan akibat pandemi covid-19 pada tahun 2020 yang menyebabkan pasar sepi sehingga harga-harga menjadi turun. Disamping itu, penyelenggaraan sekolah dan aktivitas lainnya dilakukan secara daring sehingga memerlukan tambahan biaya untuk kuota internet (pengeluaran kelompok non makanan). Sedangkan pada "tahun 2022, inflasi pada kelompok non makanan lebih tinggi" dari pada kelompok makanan yang dipicu oleh naiknya harga pertalite, pertamax dan solar bersubsidi pada bulan September 2022. Disamping kenaikan harga bahan bakar minyak, juga terjadi kenaikan tarif air dan listrik, harga bahan bakar rumah tangga (gas elpiji), harga barang perlengkapan/peralatan pemeliharaan rutin rumah tangga, harga alat kesehatan, dan biaya transportasi.

3. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas adalah perbandingan antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut (Husein Umar, dkk). Berdasarkan definisi tersebut maka dianalogikan output daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) suatu daerah dan input adalah jumlah tenaga kerja yang ada pada daerah tersebut.

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tahun 2020–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.74
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK (Rp. Miliar)	2760,92	2829,35	2941,27	3072,35	3195,86
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	-1,27	2,48	3,96	4,46	4,02
Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	30310	30186	32275	34018	36134
Pertumbuhan Tenaga Kerja %)	4,10	-0,41	6,92	5,40	6,22
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Juta/Jiwa)	**91,09**	**93,73**	**91,13**	**90,32**	**88,44**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tiga tahun terakhir terus menerus mengalami penurunan, hal ini disebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja (input) lebih besar dari peningkatan produksi (output), dimana jumlah tenaga kerja meningkat pada kisaran 4,10% - 6,92%, sementara produksi meningkat pada kisaran 2,48% - 4,46%.

Untuk melihat pada lapangan usaha mana tenaga kerjanya paling produktif, maka Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja dirinci berdasarkan lapangan usaha yang ada. Output diwakili oleh PDRB ADHK menurut lapangan usaha dan input diwakili oleh jumlah penduduk yang bekerja pada lapangan usaha.

Lapangan usaha terdiri dari tiga kategori, yakni pertanian, manufaktur dan jasa. Lapangan usaha manufaktur terdiri dari pertambangan dan penggalian; industri pengolahan; pengadaan listrik dan gas; pengadaan air, pengelolaan sampah, dan daur ulang; serta konstruksi. Sedangkan lapangan usaha Jasa terdiri dari perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor; transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum; pergudangan dan transportasi; informasi dan komunikasi; jasa keuangan dan asuransi; *real estate*; serta jasa-jasa lainnya.

Tabel 2.75
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2020 – 2024

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) (Miliar Rupiah)					
Lapangan Usaha	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pertanian	219,53	235,05	246,63	252,71	256,56
Manufaktur	872,14	829,59	843,74	879,54	895,97
Jasa	1.706,40	1.764,73	1.850,90	1.940,10	2.043,32
Penduduk Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha (Jiwa)					
Lapangan Usaha	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pertanian	5.646	5.547	4.646	5.300	4.920
Manufaktur	7.361	7.350	8.766	8.126	9.105
Jasa	17.303	17.289	18.863	20.592	22.109
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah/Jiwa)					
Lapangan Usaha	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Pertanian	38,88	42,37	53,08	47,68	52,15
Manufaktur	118,48	112,87	96,25	108,24	98,40
Jasa	98,62	102,07	98,12	94,22	92,42

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa lapangan usaha yang paling produktif adalah manufaktur, kecuali pada tahun 2022 lapangan usaha Jasa lebih produktif. Sedangkan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja adalah Jasa.

Tantangan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto adalah rendahnya kualitas SDM karena 39,46% angkatan kerja Kota Sawahlunto masih didominasi oleh lulusan SMP ke bawah, ketidaksesuaian keahlian (*mismatch*) antara lulusan pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja, informasi pasar kerja belum mampu menjadi intelijen pasar kerja yang baik, dan pasar kerja Kota Sawahlunto belum mampu merespons perubahan cepat dari jenis lapangan kerja, kebutuhan keahlian, struktur penduduk, serta pola budaya kerja.

B. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Rasio PDRB Industri Pengolahan mencerminkan rasio hasil nilai tambah lapangan usaha Industri Pengolahan terhadap total nilai PDRB. Industri pengolahan meliputi : industri makanan dan minuman, industri pengolahan tembakau, industri tekstil, industri pakan ternak, industri kulit, barang dari kulit dan alas kaki.

Berikut rasio PDRB Industri Pengolahan terhadap nilai total PDRB Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.24
Rasio PDRB Sektor Industri Pengolahan Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

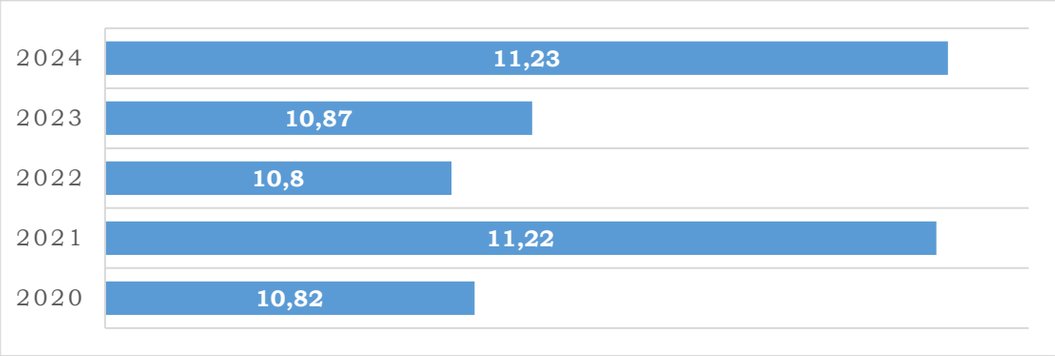

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2025

Pada grafik di atas terlihat bahwa rasio PDRB sektor industri pengolahan Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berada dalam rentang 10,80 % hingga 11,23 %. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2024 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2022. Industri pengolahan adalah lapangan usaha dominan ketiga dalam struktur perekonomian Kota Sawahlunto setelah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor (15,47 %) dan lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib (12,07). Semakin besar rasio yang diberikan oleh suatu lapangan usaha terhadap PDRB suatu daerah, semakin besar pula peranannya dalam meningkatkan atau menurunkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

2. Rasio PDRB Akomodasi, Makan Dan Minum

Rasio PDRB akomodasi makan minum adalah persentase PDRB suatu wilayah yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait akomodasi dan makan minum. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas akomodasi dan makan minum pada suatu wilayah, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB wilayah tersebut, ceteris paribus.

Tabel 2.76
Rasio PDRB Akomodasi Dan Makan Minum Terhadap PDRB
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (miliar rupiah)	75,26	84,02	97,53	107,22	116,28
Total PDRB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Rasio (%)	2,06	2,18	2,22	2,22	2,30

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2025

Pada tabel di atas, rasio PDRB akomodasi makan minum Kota Sawahlunto sangat rendah dan berfluktuasi selama kurun waktu tahun 2020-2024 dalam rentang nilai 2,06 % hingga 2,30 %. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2024 dan terendah pada tahun 2020.

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)

PDRB ekonomi kreatif adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi yang terkait dengan aktivitas ekonomi kreatif pada suatu wilayah. PDRB ekonomi kreatif pada struktur perekonomian Kota Sawahlunto berada pada lapangan usaha Jasa Lainnya.

Proporsi PDRB ekonomi kreatif terhadap PDRB ekonomi kreatif provinsi adalah bagian PDRB ekonomi kreatif suatu wilayah yang dikontribusikan terhadap PDRB ekonomi kreatif provinsi. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB provinsi, cateris paribus.

Berikut perkembangan proporsi PDRB ekonomi kreatif Kota Sawahlunto terhadap PDRB ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir:

Tabel 2.77
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Sawahlunto
Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tambah PDRB ADHB Lapangan Usaha Jasa Lainnya Kota Sawahlunto (miliar rupiah)	207,45	225,47	261,89	295,84	329,51
Nilai Tambah PDRB ADHB Lapangan Usaha Jasa Lainnya Provinsi Sumatera Barat (miliar rupiah)	4.548,12	4.939,66	5.849,83	6.593,88	7.184,02
Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Kota Sawahlunto Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	**4,56**	**4,56**	**4,48**	**4,49**	**4,59**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas, proporsi PDRB ekonomi kreatif Kota Sawahlunto terhadap PDRB ekonomi kreatif Provinsi Sumatera Barat selama kurun waktu tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dalam rentang nilai 4,48 % hingga 4,59 %. Proporsi tertinggi terjadi pada tahun 2024.

Pada tahun 2024 terdapat 145 pelaku ekonomi kreatif di Kota Sawahlunto, 71 pelaku diantaranya merupakan pelaku ekonomi kreatif professional dan 22 orang diantaranya sudah memiliki Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pelaku ekonomi kreatif Kota Sawahlunto bergerak di sub sektor Seni Pertunjukan, Musik, Kuliner, Kriya, Fashion, Desain Komunikasi Visual, Desain Interior, Photography, Desain Produk, Film, Animasi dan Video, Periklanan dan Seni Rupa.

4. Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar

adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar.

Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.

Rasio kewirausahaan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel dibawah ini

Tabel 2.78
Rasio Kewirausahaan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Berusaha Dibantu Buruh Tetap (Orang)	558	893	868	1148	1589
Total Angkatan Kerja (Orang)	33.019	32.243	33.973	35.800	36.134
Rasio Kewirausahaan	1,69	2,77	2,55	3,21	4,40

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data diolah

Pada tabel di atas, rasio kewirausahaan Kota sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada kisaran 1,69 % hingga 4,40 %. Meningkatnya rasio kewirausahaan pada tahun 2024 dipengaruhi oleh bertambahnya jumlah UMKM di Kota Sawahlunto dan kebijakan Dana Bergulir dengan Bunga Rendah.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk perempuan usia kerja yang aktif secara ekonomi. Rasio TPAK perempuan dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk perempuan angkatan kerja dengan jumlah penduduk perempuan usia kerja (15-64 tahun).

Berikut disajikan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.79
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Perempuan Angkatan Kerja (Jiwa)	14.071	13.292	14.620	15.174	16.449
Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja (Jiwa)	23.648	23.930	24.205	25.572	25.967
TPAK Perempuan (%)	**59,50**	**55,55**	**60,40**	**59,34**	**63,35**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Dari tabel di atas terlihat bahwa dari tahun 2020-2024, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan Kota Sawahlunto mengalami kenaikan sebesar 3,85%. Dengan meningkatnya tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan tersebut menunjukkan bahwa semakin bertambah proporsi penduduk perempuan usia kerja

yang sedang bekerja. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perempuan lulusan SMK dan Perguruan Tinggi yang masuk dunia kerja.

Berikut disajikan TPAK Perempuan Kota Sawahlunto berdasarkan kelompok umur selama lima tahun terakhir pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.80
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Perempuan Angkatan Kerja Menurut Kelompok Umur (Jiwa)					
15-19	537	283	-[1]	466	646
20-24	989	908	1.285	1.696	1.879
25-29	1.843	1.649	1.818	1.589	1.697
30-34	1.634	1.650	1.710	1.699	1.778
35-39	1.827	1.778	1.854	1.952	1.641
40-44	1.610	1.681	2.033	1.704	2.033
45-49	1.767	1.580	1.877	1.665	1.737
50-54	1.321	1.308	1.243	1.528	1.626
55-59	1.083	1.066	1.145	1.224	1.416
60-64	612	596	680	774	838[1]
65+	848	793	783	877	1.158
Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja Menurut Kelompok Umur (Jiwa)					
15-19	2.356	2.355	2.361	2.643	2.645
20-24	2.004	2.006	1.998	2.583	2.586
25-29	2.549	2.529	2.512	2.627	2.637
30-34	2.589	2.585	2.579	2.533	2.606
35-39	2.606	2.621	2.625	2.337	2.344
40-44	2.418	2.472	2.507	2.276	2.292
45-49	2.208	2.249	2.294	2.167	2.182
50-54	1.793	1.841	1.885	2.036	2.064
55-59	1.534	1.573	1.620	1.860	1.883
60-64	1.152	1.185	1.232	1.590	1.663
65+	2.439	2.513	2.592	2.920	3.065
TPAK Perempuan Menurut Kelompok Umur (%)					
15-19	22,79	12,02	0	17,63	24,42
20-24	49,35	45,26	64,31	65,66	72,66
25-29	72,30	65,20	72,37	60,49	64,35
30-34	63,11	63,83	66,30	67,07	68,23
35-39	70,11	67,84	70,63	83,53	70,01
40-44	66,58	68,00	81,09	74,87	88,70
45-49	80,03	70,25	81,82	76,83	79,61
50-54	73,68	71,05	65,94	75,05	78,78
55-59	70,60	67,77	70,68	65,81	75,20
60-64	53,13	50,30	55,19	48,68	42,22
65+	34,77	31,56	30,21	30,03	37,78

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TPAK Perempuan Kota Sawahlunto berdasarkan kelompok umur selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi. TPAK Perempuan yang paling tinggi tahun 2024 ada pada kelompok umur 40-44 tahun, disusul oleh kelompok umur 45-49 tahun, dan umur 50-54 tahun. TPAK Perempuan yang paling rendah ada pada kelompok umur 15-19 tahun, dan umur 65 tahun ke atas. Ini menunjukkan bahwa pada usia ini (15-19 tahun) mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja (sekolah). Begitu juga pada kelompok umur tua (diatas 65 tahun), TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti (pensiun).

Berikut disajikan TPAK Perempuan Kota Sawahlunto berdasarkan pendidikan selama lima tahun terakhir pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.81
TPAK Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Penduduk Perempuan Angkatan Kerja Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa)					
SD ke bawah	3.344	3.079	3.376	2.966	3.246
SLTP/Sederajat	1.994	1.967	2.061	1.949	2.049
SLTA/Sederajat	4.632	4.089	4.624	5.322	6.382
Perguruan Tinggi	4.101	4.157	4.559	4.937	4.772
Jumlah Penduduk Perempuan Usia Kerja Menurut Tingkat Pendidikan (Jiwa)					
SD ke bawah	6.245	6.225	6.022	5.729	6.278
SLTP/Sederajat	4.591	4.991	4.946	4.966	4.437
SLTA/Sederajat	7.853	7.982	7.717	8.518	9.412
Perguruan Tinggi	4.959	4.731	5.520	6.359	5.840
TPAK Perempuan Menurut Tingkat Pendidikan (%)					
SD ke bawah	53,55	49,46	56,06	51,77	51,70
SLTP/Sederajat	43,43	39,41	41,67	39,25	46,18
SLTA/Sederajat	58,98	51,23	59,92	62,48	67,81
Perguruan Tinggi	82,70	87,87	82,59	77,64	81,71

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa TPAK Perempuan Kota Sawahlunto berdasarkan tingkat pendidikan selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi. Pada tahun 2024, TPAK Perempuan yang paling tinggi merupakan tamatan perguruan tinggi dan SLTA/Sederajat. Sedangkan TPAK Perempuan paling rendah merupakan pendidikan SLTP/Sederajat dan SD ke bawah.

Semakin tinggi pendidikan terakhir yang ditamatkan penduduk perempuan itu maka semakin besar peluang perempuan tersebut untuk bekerja dibanding perempuan yang memiliki pendidikan lebih rendah.

6. Indeks Inovasi Daerah

Indeks Inovasi Daerah adalah pengukuran dari himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 388 ayat (9) dan ayat (11) menyatakan bahwa “pemerintah pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah” dan “pemerintah pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada pemerintah daerah yang berhasil melaksanakan inovasi”. Sebagai bentuk penjabaran dari perundangan tersebut maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan sasaran mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah.

Inovasi Daerah harus memenuhi beberapa kriteria yang meliputi : 1). mengandung pembaharuan seluruh atau sebagian unsur dari inovasi; 2). memberi manfaat bagi daerah dan/atau masyarakat; 3). tidak mengakibatkan pembebanan dan/atau pembatasan pada masyarakat yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan; 4). merupakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah; dan 5). dapat direplikasi.

Pelaksanaan inovasi daerah tentunya perlu diperkuat dengan upaya dan langkah-langkah strategis agar inovasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah menjadi masif untuk dapat diterapkan secara berkelanjutan. Disamping itu perlu menjadikan inovasi sebagai salah satu budaya dalam pemecahan masalah dalam pelaksanaan pemerintahan yang selaras dengan kebijakan daerah. Saat ini pelayanan kepada masyarakat dituntut untuk lebih cepat (*faster*), lebih mudah (*easier*), lebih murah (*cheaper*), lebih pintar (*smarter*) dan lebih baik (*better*). Adapun capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.82
Capaian Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Skor Indeks Inovasi Daerah	1264	44,64	58,98	70,39	72,87
Predikat	Sangat Inovatif	Inovatif	Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Pada tabel di atas terlihat bahwa capaian skor Indeks Inovasi Daerah Kota Sawahlunto tahun 2020 berbeda jauh dengan capaian tahun 2021-2024, yang disebabkan perbedaan metode penilaian. Pada periode tahun 2021-2024 Skor Indeks Inovasi Daerah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2023 dimana Kota Sawahlunto berhasil meningkatkan predikat menjadi kota sangat inovatif, dan berlanjut sampai tahun 2024.

7. Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)

Jumlah tamu wisatawan mancanegara adalah jumlah tamu asing (wisatawan mancanegara) yang menginap di hotel berbintang dan non berbintang di daerah tertentu. Semakin tinggi jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang dan non berbintang di daerah tersebut maka akan meningkatkan devisa dari sektor pariwisata secara nasional. Apalagi Kota Sawahlunto telah ditetapkan sebagai kota warisan dunia dengan warisan tambang batu bara Ombilin (WTBOS), hal ini diharapkan akan memberi dampak yang positif bagi peningkatan tamu wisatawan mancanegara di Kota Sawahlunto.

Tabel 2.83
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu Orang)
Tahun 2020-2024

Pengunjung	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara	0,007	0,007	0,076	0,0501	0,199

Sumber Data : Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, 2025

Pada tabel di atas, jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang yang ada di Kota Sawahlunto selama kurun waktu lima tahun terakhir cenderung meningkat. Peningkatan jumlah tamu wisatawan mancanegara ke Kota

Sawahlunto terus diupayakan dengan meningkatkan aksesibilitas dan infrastruktur destinasi wisata, promosi budaya, pengembangan objek wisata, peningkatan kapasitas sumber daya manusia kepariwisataan. Salah satunya rencana konkritnya adalah penyelenggaraan symposium internasional yang akan diselenggarakan di Kota Sawahlunto tahun 2025 dengan menghadirkan tamu dari berbagai negara. Hal ini menjadi peluang besar bagi Kota Sawahlunto dalam mempromosikan berbagai seni kebudayaan dan destinasi pariwisata yang sudah tercatat menjadi OCMHS dan Geopark Nasional Sawahlunto dengan mengajak tamu untuk berkunjung dan melaksanakan kegiatan pada lokasi tersebut.

8. Proporsi Jumlah Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)

Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.

Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. UKM adalah ragam usaha yang dilakukan dengan skala kecil sampai dengan menengah. Undang-undang No. 20 Tahun 2008 menjelaskan tentang usaha kecil, mikro, serta menengah sebagai berikut :

- Usaha kecil merupakan bisnis yang memiliki pendapatan dari 300 juta hingga 2,5 miliar setiap tahunnya.
- Usaha menengah merupakan usaha yang memiliki pendapatan 2,5 miliar hingga dengan 50 miliar setiap tahunnya, karyawan yang dimiliki oleh usaha menengah harus sekitar 30 hingga 100 pekerja.
- Usaha mikro merupakan bisnis yang mempunyai pendapatan 300 juta setiap tahunnya serta memiliki karyawan sekitar kurang dari 20 orang.

Berikut perkembangan proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.84
Proporsi Jumlah UKM Non Pertanian Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah UKM Non Pertanian	563	6	30	28	29
2	Jumlah Unit Usaha	3.565	3.973	4.003	4.352	4.730
3	Proporsi (%)	15,79	0,15	0,75	0,64	0,61

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan, 2024

Pada tabel di atas terlihat jumlah UKM non pertanian selama kurun waktu tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun, terutama tahun 2021 dimana terjadi penurunan yang sangat signifikan, hal ini disebabkan dampak dari wabah Covid 19. Namun mulai tahun 2024 jumlah UKM non pertanian meningkat kembali.

9. Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) Pada Level Kabupaten/Kota

Proporsi jumlah industri kecil dan menengah (IKM) merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.

IKM adalah sebuah perusahaan yang menghasilkan produk berupa kebutuhan yang diperlukan oleh makhluk hidup seperti manusia, hewan, dan tumbuhan. IKM memproduksi barang-barang yang dijual oleh UKM (Usaha Kecil Menengah). Oleh karena itu, IKM sangat berkaitan dengan UKM dan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, karena setiap produk yang dihasilkan oleh IKM akan dijual kembali kepada masyarakat oleh UKM. Jadi UKM juga bertugas untuk memasarkan produk yang dihasilkan oleh IKM, dan tidak menutup kemungkinan bahwa pelaku IKM juga melakukan aktivitas UKM sekaligus. Setiap pelaku IKM juga bisa langsung memasarkan produknya sendiri dengan bantuan UKM atau tanpa bantuan UKM lainnya.

Adapun perkembangan proporsi jumlah industri kecil dan menengah di Kota Sawahlunto adalah sebagai berikut :

Tabel 2.85
Proporsi Jumlah Industri Kecil Dan Menengah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Unit Industri Kecil Menengah	1.584	1.703	1.779	1.755	1.842
2	Jumlah Unit Industri	1.584	1.703	1.779	1.755	1.842
3	Proporsi	100	100	100	100	100

Sumber Data : Dinas Koperasi UKM Perindustrian Dan Perdagangan, 2024

Berdasarkan tabel di atas, jumlah industri kecil dan menengah Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Semua IKM yang ada di Kota Sawahlunto termasuk dalam kategori industri kecil dan menengah, belum ada industri dengan kategori besar. Dengan demikian jumlah industri kecil dan menengah Kota Sawahlunto sama dengan jumlah total industri Kota Sawahlunto, sehingga proporsi jumlah industri kecil dan menengah Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir adalah sebesar 100 %.

10. Rasio Volume Koperasi Terhadap PDRB

Rasio volume koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB suatu wilayah. Semakin besar rasio volume koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.

Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. Koperasi adalah badan hukum yang berdasarkan atas asas kekeluargaan yang anggotanya terdiri dari orang perorangan atau badan hukum dengan tujuan untuk mensejahterakan anggotanya. Umumnya koperasi dikendalikan secara bersama oleh seluruh anggotanya, dimana setiap anggota memiliki hak suara

yang sama dalam setiap keputusan yang diambil koperasi. Pembagian keuntungan koperasi biasa disebut sisa hasil usaha atau SHU, biasanya dihitung berdasarkan andil.

PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

Berikut perkembangan rasio voume usaha koperasi terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.86
Rasio Volume Usaha Koperasi Terhadap PDRB Kota Sawahlunto (%)
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Volume Usaha Koperasi (Rp)	57.792.083	38.657.300	32.069.047	41.426.853	34.943.237
Total PDRB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Rasio (%)	**0,0016**	**0,0010**	**0,0007**	**0,0009**	**0,0007**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Rasio volume koperasi terhadap PDRB Kota Sawahlunto sangat kecil sekali yang berkisar antara 0,0007 % hingga 0,0016 % dan mengalami pergerakan yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun. Penurunan rasio volume koperasi terhadap PDRB disebabkan semakin berkurangnya jumlah koperasi di Kota Sawahlunto yang berakibat menurunnya volume usaha koperasi di Kota Sawahlunto.

11. ROA BUMD

Return On Asset (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. ROA dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan. ROA memberikan gambaran tentang seberapa efisien perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset yang dimilikinya. Semakin tinggi ROA, semakin efisien perusahaan dalam mengelola asetnya. Namun, perlu dicatat bahwa ROA yang tinggi tidak selalu berarti sukses, karena ada faktor lain seperti tingkat utang dan risiko yang juga harus dipertimbangkan.

Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki 4 (empat) BUMD, yaitu : PT Lembu Betina Subur (LBS), PT. Wahana Wisata Sawahlunto (WWS), PT. Bumi Sejahtera Mandiri (BSM) dan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM).

Tabel 2.87
Return On Asset (ROA) dari BUMD Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	BUMD	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	PT Lembu Betina Subur (LBS)	na	na	na	na	na
2	PT. Wahana Wisata Sawahlunto (WWS)	na	na	na	na	na
3	PT. Bumi Sejahtera Mandiri (BSM)	na	na	na	na	na
4	Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)	1,09	(6,83)	(4,92)	(4,33)	(3,80)

Sumber Data : Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto

Dari empat BUMD yang ada di Kota Sawahlunto, hanya Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dapat dihitung *Return On Asset* (ROA)nya. PT Lembu Betina Subur (LBS) berdasarkan laporan keuangannya disarankan untuk dilikuidasi. PT. Wahana Wisata Sawahlunto (WWS) tidak bisa dihitung ROAnya karena laporan keuangannya tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. PT. Bumi Sejahtera Mandiri (BSM) belum bisa dihitung ROAnya karena belum beroperasi dan dana penyertaan modal dari Pemda Kota Sawahlunto hanya cukup untuk pengurusan izin tambang dan *feasibility study*(FS)nya saja. Negatifnya nilai ROA Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bermakna perusahaan mengalami kerugian dan tidak mampu menghasilkan laba dari asset yang dimiliki, namun perusahaan ini harus tetap beroperasi karena PDAM memiliki fungsi sosial dan pelayanan publik sehingga Pemerintah Daerah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi untuk menutupi kerugian operasional dan memastikan ketersediaan air bersih bagi masyarakat.

12. Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)

Tenaga kerja formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai.

Proporsi penciptaan lapangan kerja formal (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai proporsi penciptaan lapangan kerja formal, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.

Berikut disajikan tabel dan grafik proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.88
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Berusaha sendiri	7.842	8.385	8.408	9.109	9.367
2	Berusaha dibantu buruh tidak tetap	3.659	2.699	2.974	3.025	3.268
3	Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	558	893	868	1.148	1.589
4	Buruh/karyawan/pegawai	12.806	14.017	16.021	16.051	17.291
5	Pekerja bebas di pertanian	663	319	152	1.396	546
6	Pekerja bebas di non pertanian	1.810	1.532	1.130		862
7	Pekerja keluarga/tak dibayar	2.972	2.341	2.722	3.289	3211
8	**Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) = (3+4)/(1 s.d 7)**	**44,09**	**49,39**	**52,33**	**50,56**	**52,25**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Tahun 2025, Data Diolah

Grafik 2.25
Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

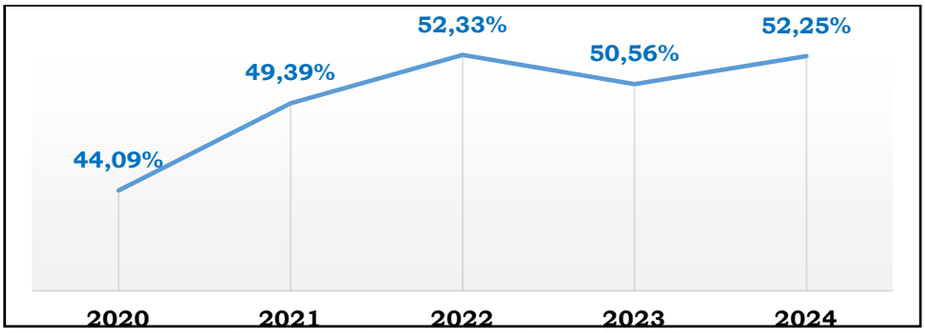

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka Tahun 2025, Data diolah

Dari tabel dan grafik di atas terlihat bahwa proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi dan cenderung meningkat dalam kisaran 44 % hingga 52,33 %. Capaian proporsi penciptaan lapangan kerja formal Kota Sawahlunto pada tahun 2024 sudah berada di atas rata-rata persentase tenaga kerja formal perkotaan sebagaimana hasil sakernas.

Tabel 2.89
Persentase Tenaga Kerja Formal Menurut Daerah Tempat Tinggal
Tahun 2021-2024

No	Daerah Tempat Tinggal	2021	2022	2023	2024
1	Perkotaan	51,12	52,38	51,34	51,76
2	Perdesaan	27,59	26,21	27,37	28,72
3	Perkotaan + Perdesaan	40,55	40,69	40,89	42,05

Sumber Data : BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)

Pada tabel di atas terlihat bahwa proporsi penciptaan lapangan kerja formal di perkotaan lebih besar dari pada di perdesaan. Karena penduduk usia kerja di perkotaan biasanya tingkat pendidikannya lebih tinggi dan lebih menyukai bekerja di lapangan kerja formal karena sektor formal melindungi hak-hak pekerja dan memastikan gaji yang adil, menyediakan lebih banyak peluang untuk kemajuan karier dan pengembangan professional, disertai dengan manfaat seperti asuransi kesehatan, rencana pensiun, dan waktu liburan berbayar. Di samping itu rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal lebih tinggi dari pekerja informal.

Berikut perbandingan rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal dan informal berdasarkan kabupaten/kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.90
Rata-Rata Upah/Gaji Bersih Sebulan Pekerja Formal Dan Informal
Berdasarkan Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2024

Kabupaten / Kota	Pekerja Formal	Pekerja Informal
Kabupaten		
Kepulauan Mentawai	2.429.633	1.003.415
Pesisir Selatan	2.381.367	1.682.574
Solok	2.314.010	1.514.266
Sijunjung	2.558.029	1.693.227
Tanah Datar	2.539.714	1.501.423
Padang Pariaman	2.411.883	1.587.876
Agam	2.627.037	1.737.969
Lima Puluh Kota	2.343.721	1.673.446

Kabupaten / Kota	Pekerja Formal	Pekerja Informal
Pasaman	2.430.026	1.434.525
Solok Selatan	3.052.717	1.478.229
Dharmasraya	2.651.515	1.984.367
Pasaman Barat	2.609.232	1.943.819
Kota		
Padang	3.226.305	2.356.319
Solok	3.314.700	2.208.694
Sawahlunto	***2.741.492***	***1.394.212***
Padang Panjang	3.334.028	3.052.374
Bukittinggi	3.260.014	2.364.287
Payakumbuh	2.934.764	2.083.604
Pariaman	3.087.313	1.863.960
Sumatera Barat	**2.772.393**	**1.771.990**

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja formal jauh lebih tinggi dari pekerja informal. Hal ini terjadi di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat.

Upah/gaji bersih sebulan pekerja formal di Kota Sawahlunto pada tahun 2024 jauh di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sumatera Barat sebagaimana yang ditetapkan pada Keputusan Gubernur Sumbar Nomor : 562-768-2023 Tanggal 20 November 2023 sebesar Rp. 2.811.449,27. dan berada pada posisi ke-8 dari 19 kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat.

Sementara itu rata-rata upah/gaji bersih sebulan pekerja informal Kota Sawahlunto berada pada posisi terendah ke-2 di tingkat kabupaten/kota se-Provinsi Sumatera Barat setelah Kabupaten Kepulauan Mentawai.

C. Penerapan Ekonomi Hijau

1. Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan adalah proporsi nilai tambah PDRB yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap total nilai PDRB. Semakin besar nilai tambah PDRB yang dihasilkan oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan suatu wilayah, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB wilayah tersebut, ceteris paribus.

Perkembangan Rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.91
Rasio Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Terhadap PDRB
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (miliar rupiah)	326,25	345,21	383,10	410,68	442,91
Total PDRB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Rasio (%)	**8,92**	**8,96**	**8,73**	**8,51**	**8,76**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka, 2025

Pada tabel di atas terlihat rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap PDRB selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Menurunnya rasio PDRB sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, mengindikasikan semakin menurun kinerja dan produktivitas sektor pertanian kehutanan dan perikanan di Kota Sawahlunto. Hal ini tidak menjadi permasalahan bagi Kota Sawahlunto karena sektor yang dominan dalam kegiatan perkotaan adalah sektor tersier atau sektor jasa yang mencakup berbagai kegiatan seperti perdagangan, keuangan, transportasi, pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Sektor pertanian bagi perkotaan berfungsi sebagai penyedia pangan, bahan baku industri, dan lapangan kerja. Selain itu, pertanian juga berkontribusi pada ketahanan pangan dan stabilitas harga.

2. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan

Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan kontribusi tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan terhadap penciptaan nilai tambah melalui proses produksi barang dan/jasa, menggambarkan *output* yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja pada tahun tertentu. Semakin tinggi nilai kontribusi tenaga kerja yang dihasilkan, menunjukkan semakin produktif tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan.

Lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan merupakan salah satu sektor yang strategis untuk meningkatkan perekonomian daerah, karena lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dapat menyerap tenaga kerja yang cukup besar.

Berikut disajikan produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.92
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2022	2024
1	PDRB ADHK Pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (miliar rupiah)	219,53	235,05	246,63	252,71	256,56
2	Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Pertanian (orang)	5.646	5.547	4.646	5.300	4.920
3	**Produktivitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (miliar rupiah per tenaga kerja/tahun)**	**38,88**	**42,37**	**53,08**	**47,68**	**52,15**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Tingkat produktivitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat pada kisaran 38,88 juta rupiah per tenaga kerja per tahun hingga 53,08 juta rupiah per tenaga kerja per tahun. Produktivitas tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan terendah terjadi tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa tenaga kerja Kota Sawahlunto yang bekerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan semakin kurang produktif. Rendahnya produktivitas di lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dibandingkan lapangan usaha lainnya disebabkan faktor pendidikan tenaga kerja dan tingginya jumlah tenaga kerja di sektor tersebut.

D. Transformasi Digital

Indeks Masyarakat Digital Indonesia

Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI) merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya. Survei IMDI di Kota Ssawahlunto mulai dilaksanakan sejak tahun 2022.

Tabel 2.93
Indeks Masyakat Digital Indonesia Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Pilar	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Infrastruktur dan Ekosistem	na	na	42	61,51	58,74
2	Keterampilan Digital	na	na	50,24	63,50	58,55
3	Pemberdayaan	na	na	26,13	26,50	20,80
4	Pekerjaan	na	na	38,44	38,18	35,98
	IMDI Kota Sawahlunto	**na**	**na**	**38,99**	**47,25**	**43,04**
	IMDI Provinsi Sumatera Barat	na	na	42,26	46,06	44,13
	IMDI Nasional	na	na	37,80	43,18	43,34

Sumber Data : Puslitbang Aptika IKP - BPSDM Kominfo, 2024

Hasil survei tahun 2024 menyatakan bahwa IMDI Kota Sawahlunto lebih rendah dari IMDI Provinsi Sumatera Barat dan IMDI Nasional. Pilar pemberdayaan merupakan pilar dengan nilai terendah, hal ini disebabkan karena masih banyak masyarakat yang belum terbiasa menggunakan teknologi digital untuk aktivitas keuangan, dimana hanya sebanyak 40% masyarakat yang pernah bertransaksi menggunakan internet/mobile banking, diikuti oleh sekitar 38% masyarakat yang pernah bertransaksi melalui *e-wallet*.

E. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)

Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) menunjukkan seberapa besar peranan atau kontribusi komponen PMTB terhadap PDRB Kota Sawahlunto. Pembentukan Modal Tetap Bruto merupakan komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut jenis pengeluaran bersama-sama dengan komponen

pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, Ekspor barang dan jasa dan pengeluaran perubahan inventori

Pembentukan modal tetap bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak termasuk dalam PMTB, tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah.

Capaian proporsi Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.94
Perkembangan Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PMTB ADHK (Miliar Rupiah)	652,49	666,26	695,56	745,75	767,19
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	2.760,92	2.829,35	2.941,27	3.072,35	3.195,86
Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	**23,63%**	**23,55%**	**23,65%**	**24,27%**	**24,01%**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Besaran PMTB (% PDRB) di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat dan merupakan kontributor kedua terbesar terhadap PDRB Kota Sawahlunto setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga dari sisi pengeluaran (*demand side*). Semakin tinggi kontribusi Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB), semakin besar peranan atau kontribusi komponen PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.

2. Ekspor Barang Dan Jasa (% PDRB)

Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share/kontribusi Ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kota Sawahlunto.

Ekspor barang dan jasa merupakan komponen pembentuk Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut jenis pengeluaran bersama-sama dengan komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) dan pengeluaran perubahan inventori.

Ekspor barang dan jasa merupakan transaksi alih kepemilikan (ekonomi) atas barang dan jasa antara residen (penduduk) suatu perekonomian dengan non residen. Suatu unit institusi didefinisikan sebagai residen dari wilayah ekonomi sebuah negara, jika unit institusi tersebut memiliki pusat kepentingan ekonomi yang utama di dalam wilayah ekonomi dan unit institusi ini terlibat dalam aktivitas atau transaksi ekonomi untuk periode waktu yang lama, umumnya ditetapkan minimal satu tahun.

Berikut capaian proporsi ekspor barang dan jasa (% PDRB) Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.95
Perkembangan Ekspor Barang dan Jasa Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Ekspor Barang dan Jasa (Miliar Rupiah)	315,78	332,62	375,76	413,23	456,88
PDRB ADHK (Miliar Rupiah)	2.760,92	2.829,35	2.941,27	3.072,35	3.195,86
Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	**11,44**	**11,76**	**12,78**	**13,45**	**14,30**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Besaran Ekspor barang dan jasa (% PDRB) selama lima tahun terakhir cenderung meningkat dan merupakan kontributor keempat terhadap PDRB Kota Sawahlunto dari sisi pengeluaran (*demand side*) setelah pengeluaran konsumsi rumah tangga, PMTB dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah.

3. Persentase Stabilitas Harga Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok

Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) adalah perbandingan standar deviasi harga rata-rata selama bulan Januari sampai Desember dengan rata-rata harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari sampai Desember yang dinyatakan dalam persentase (Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020).

Perhitungan persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok bertujuan untuk melihat kestabilan harga barang kebutuhan pokok. Semakin kecil persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) menunjukkan bahwa harga barang kebutuhan pokok selama satu tahun tersebut berada dalam keadaan stabil. Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020, target persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) tahun 2020-2024 berada pada kisaran 5,9 % – 6 %.

Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat (Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021). Sedangkan jenis barang kebutuhan pokok ditetapkan oleh pemerintah pusat sebagaimana tercantum pada Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 sebagai berikut : 1). Barang kebutuhan pokok hasil pertanian, yang terdiri dari : beras, kedele (bahan baku tahu dan tempe), cabe, bawang merah; 2). Barang kebutuhan pokok hasil industri, yang terdiri dari : gula, minyak goreng, tepung terigu; 3). Barang kebutuhan pokok hasil peternakan dan perikanan, yang terdiri dari : daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang).

Berikut perkembangan persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.96
Persentase Stabilitas Harga Dan Jumlah Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu)(%)	9,09	8,05	7,79	10,42	7,13

Sumber Data : Diskoperindag 2024

Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) di Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 berada dalam kondisi tidak stabil karena berada di atas target yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sebesar ≤ 6% sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2020.

Barang kebutuhan pokok di Kota Sawahlunto pada tahun 2024 yang memiliki ketidakstabilitas harga adalah beras, cabe merah, cabe rawit, bawang merah, daging ayam ras (broiler), telur ayam ras, tepung terigu dan gula pasir.

F. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

1. Indeks Kinerja Infrastruktur

Indeks Kinerja Infrastruktur adalah suatu ukuran atau indikator yang digunakan untuk menilai kondisi dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu. Indeks ini biasanya mengukur berbagai aspek infrastruktur, seperti akses ke fasilitas dasar (air bersih, sanitasi, listrik), kualitas jalan dan jembatan, ketersediaan layanan publik, dan lain-lain.

Tabel 2.97
Indeks Kinerja Infrastruktur Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator	TAHUN				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kinerja Infrastruktur Kota Sawahlunto	NA	NA	NA	NA	69,18

Sumber Data : Dinas PUPR, Dinas PKP2LH, 2025

Indeks Kinerja Infrastruktur Kota Sawahlunto mulai dihitung pada tahun 2024 dengan capaian tergolong “Cukup”.

2. Indeks Layanan Infastruktur Dasar

Kualitas layanan infrastruktur dasar mempunyai peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif. Sehingga diperlukan indikator kinerja untuk mengetahui seberapa jauh tingkat layanan infrastruktur dasar di Kota Sawahlunto melalui metode perhitungan yaitu; Indeks Layanan Infrastruktur Dasar yang komponennya terdiri dari; 1) Persentase Akses Rumah Tangga terhadap air minum Perpipaan, 2) Persentase Rumah Tangga dengan

akses Sanitasi Aman dan 3) persentase Rumah Tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau.

Tabel 2.98
Indeks Layanan Infastruktur Dasar Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Layanan Infastruktur Dasar Kota Sawahlunto	NA	NA	NA	NA	50,20

Indeks Layanan Infastruktur Dasar Kota Sawahlunto mulai dihitung pada tahun 2024 dengan capaian tergolong "Cukup".

3. Indeks Konektivitas Darat

Indeks Konektivitas Darat adalah indikator yang digunakan untuk mengukur kekuatan interaksi antar wilayah (antar kota, antar pusat kegiatan lokal, atau antar desa) melalui jaringan jalan yang tersedia. Indeks ini merefleksikan sejauh mana prasarana dan sarana transportasi darat di daerah tersebut mampu mendukung kelancaran pergerakan orang dan barang, serta mempercepat aksesibilitas antar pusat pertumbuhan ekonomi dan pelayanan publik.

Tabel 2.99
Indeks Konektivitas Darat Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

INDIKATOR	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Konektivitas Darat Kota Sawahlunto	NA	NA	NA	NA	51,91

Indeks Konektivitas Darat Kota Sawahlunto mulai dihitung pada tahun 2024 dengan capaian tergolong "Cukup".

4. Persentase Rumah Tangga (RT) Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)

Persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan diperlukan untuk mengukur kesejahteraan masyarakat di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan.

Berikut perkembangan rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2024 :

Tabel 2.100
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan di Kota Sawahlunto
Tahun 2020- 2024

NO	URAIAN	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah yang layak huni dan terjangkau (unit)	13.884	12.793	12,742	13.322	13.569
2	Jumlah rumah (unit)	14.257	14.314	14.371	14.630	14.847
3	Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (Rasio Rumah Layak Huni)	97,38	89,37	88,66	91,06	91,39

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Namun pada tahun 2024, jumlah rumah layak huni dan terjangkau bertambah sebanyak 247 unit karena adanya upaya dari Pemerintah Kota Sawahlunto berupa kegiatan RTLH sebanyak 30 unit dan pembangunan unit rumah baru oleh masyarakat sebanyak 217 unit.

Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah yang memenuhi syarat : a). Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; dan b). Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (persetujuan bangunan gedung) dan SLF (sertifikat laik fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut :

Tabel 2.101
Empat Kriteria Pengukuran Indikator

NO	Kriteria
1.	Ketahanan bangunan (*durable housing*) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat
2.	Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m^2
3.	Memiliki akses air minum layak
4.	Memiliki akses sanitasi layak

Sumber Data : Data Baseline Kotaku 2020

5. Persentase Desa Mandiri (%)

Desa Mandiri (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan (Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Indeks Desa Membangun).

Status kemajuan dan kemandirian Desa ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:

- Desa Mandiri (Desa Sembada) adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan;
- Desa Maju (Desa Pra Sembada) adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan;

- Desa Berkembang (Desa Madya) adalah desa potensial menjadi desa maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan;
- Desa Tertinggal (Desa Pra-Madya) adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya;
- Desa Sangat Tertinggal (Desa Pratama) adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

Berikut status kemajuan dan kemandirian desa di Kota Sawahlunto berdasarkan Indeks desa membangun (IDM) selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.102
Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Status Kemajuan Dan Kemandirian Desa	Jumlah Desa				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0
2	Tertinggal	0	0	0	0	0
3	Berkembang	17	14	10	6	1
4	Maju	9	12	14	17	19
5	Mandiri	1	1	3	4	7

Sumber Data : Dinas Sosial, PMDPPA Kota Sawahlunto, 2024

Desa Mandiri pertama di Kota Sawahlunto adalah Desa Talawi Mudik pada tahun 2019, diikuti oleh Desa Muaro Kalaban dan Desa Santua pada tahun 2022, selanjutnya Desa Silungkang Tigo pada tahun 2023. Dan pada tahun 2024 bertambah lagi 3 desa mandiri, yaitu Desa Kolok Nan Tuo, Desa Talawi Hilie, dan Desa Sikalang.

Adapun persentase Desa mandiri di Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.103
Persentase Desa Mandiri Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2023
Jumlah Desa Mandiri	1	1	3	4	7
Jumlah Total Desa	27	27	27	27	27
Persentase Desa Mandiri Kota Sawahlunto (%)	3,70	3,70	11,11	14,81	25,92

Sumber : Dinas Sosial, PMDPPA Kota Sawahlunto, 2024

Pada tabel di atas terlihat persentase desa mandiri di Kota Sawahlunto masih sangat sedikit, walaupun mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.

6. Indeks Desa Membangun (IDM)

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan alat ukur untuk menilai status kemajuan desa berdasarkan tiga dimensi utama : sosial, ekonomi, dan ekologi. Dimensi ini diterjemahkan dalam indikator yang mencakup akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keberlanjutan lingkungan.

Pengukuran pembangunan desa di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari Indeks Desa Membangun (IDM) menjadi Indeks Desa (ID) mulai tahun 2025 berdasarkan Permendesa PDT Nomor 9 Tahun 2024.

Berikut Capaian rata-rata IDM Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.104
Indeks Desa Membangun
Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat dan Nasional
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata IDM Kota Sawahlunto	0,7004	0,7157	0,7433	0,7542	0,7876
Rata-rata IDM Sumatera Barat	0,6996	0,718	0,7402	0,7514	0,7733
Rata-rata IDM Nasional	0,621	0,672	0,6724	0,6935	0,7034

Sumber Data : Kemendesa PDTT

Dari tabel di atas, terlihat rata-rata capaian IDM di Kota Sawahlunto dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, dan mulai tahun 2021 Indeks Desa Membangun Kota Sawahlunto sudah tergolong klasifikasi “Desa Maju”. Hal ini mengindikasi bahwa Kota Sawahlunto semakin berbenah dalam pembangunan segala aspek sehingga menyokong pemenuhan nilai dari masing-masing indikator penyusun IDM.

Berikut Status Desa di Kota Sawahlunto berdasar Indeks Desa Membangun (IDM) selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.105
Status Desa di Kota Sawahlunto Berdasar Indeks Desa Membangun (IDM)
Tahun 2020-2024

No	Klasifikasi Status Desa	2020		2021		2022		2023		2024	
		Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%	Jumlah Desa	%
1	Sangat Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
2	Tertinggal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
3	Berkembang	17	62,96	14	51,85	10	37,03	6	22.22	1	3,7
4	Maju	9	33,33	12	44,44	14	51,85	17	62.96	19	70,3
5	Mandiri	1	3,7	1	3,7	3	11,11	4	14.81	7	25,92

Sumber Data : Dinsos PMDPPA Kota Sawahlunto

Tabel 2.106
Skor Dan Status Indeks Desa Membangun
Kecamatan Dan Desa di Kota Sawahlunto
Tahun 2024

Kecamatan/Desa	IDM	Status
Kecamatan Silungkang	***0,7996***	***Maju***
Desa Silungkang Duo	0,7463	Maju
Desa Silungkang Oso	0,7446	Maju
Desa Siungakang Tigo	0,9562	Mandiri
Desa Muaro Kalaban	0,8433	Mandiri
Desa Taratak Boncah	0,7076	Maju
Kecamatan Barangin	***0,7961***	***Maju***
Desa Santur	0,8437	Mandiri
Desa Kolok Mudiak	0,756	Maju
Desa Kolok Nan Tuo	0,8352	Mandiri
Desa Talago Gunung	0,769	Maju
Desa Lumindai	0,7759	Maju
Desa Balai Batu Sandaran	0,7967	Maju
Kecamatan Talawi	***0,7851***	***Maju***
Desa Talawi Hilie	0,9013	Mandiri
Desa Talawi Mudiak	0,8708	Mandiri
Desa Bukit Gadang	0,763	Maju
Desa Batu Tanjung	0,7132	Maju
Desa Kumbayau	0,7889	Maju
Desa Tumpuk Tangah	0,7316	Maju
Desa Datar Mansiang	0,7087	Maju
Desa Sijantang Koto	0,8025	Maju
Desa Salak	0,8138	Maju
Desa Sikalang	0,8744	Mandiri
Desa Rantih	0,6683	Berkembang
Kecamatan Lembah Segar	***0,7706***	***Maju***
Desa Lunto Timur	0,7949	Maju
Desa Lunto Barat	0,8029	Maju
Desa Kubang Tangah	0,7189	Maju
Desa Kubang Utara Sikabu	0,809	Maju
Desa Pasa Kubang	0,7273	Maju

Sumber Data : DinsosPMDPPA Kota Sawahlunto, 2024

Pada tabel di atas terlihat bahwa semua kecamatan di Kota Sawahlunto sudah berstatus maju pada tahun 2024 berdasarkan Skor Indeks Desa Membangun. Dan dari 27 desa yang ada di Kota Sawahlunto, masih terdapat 1 desa yang berada pada status berkembang, sedangkan desa dengan status maju 19 dan desa dengan status mandiri ada 7 desa.

7. Proporsi Kontribusi PDRB Kota

Proporsi kontribusi PDRB kota merupakan rasio Produk domestik regional bruto atas dasar harga berlaku (PDRB ADHB) Kota Sawahlunto terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 2.107
Perkembangan Proporsi Kontribusi PDRB Kabupaten Dan Kota Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 – 2024

Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten					
Kepulauan Mentawai	1,92	1,91	1,91	1,89	1,88
Pesisir Selatan	5,82	5,90	5,82	5,76	5,77
Solok	5,59	5,60	5,53	5,54	5,54
Sijunjung	3,78	3,78	3,74	3,73	3,76
Tanah Datar	5,38	5,37	5,28	5,26	5,27
Padang Pariaman	7,41	7,29	7,78	8,02	8,07
Agam	8,42	8,47	8,38	8,36	8,42
Lima Puluh Kota	6,42	6,39	6,27	6,27	6,28
Pasaman	3,71	3,73	3,64	3,63	3,66
Solok Selatan	2,29	2,28	2,25	2,25	2,28
Dharmasraya	4,23	4,25	4,29	4,27	4,31
Pasaman Barat	6,30	6,30	6,26	6,25	6,36
Kota					
Padang	25,70	25,75	25,57	25,48	25,34
Solok	1,67	1,68	1,68	1,68	1,67
Sawahlunto	***1,51***	***1,52***	***1,54***	***1,54***	***1,52***
Padang Panjang	1,44	1,44	1,43	1,43	1,43
Bukittinggi	3,57	3,57	3,57	3,56	3,54
Payakumbuh	2,82	2,89	2,89	2,87	2,84
Pariaman	2,06	2,08	2,06	2,06	2,05
Provinsi Sumatera Barat	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Pada tabel di atas terlihat Proporsi Kontribusi PDRB Kota Sawahlunto terhadap Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun terakhir berkisar antara 1,51%-1,54% dan merupakan kabupaten/kota yang memiliki proporsi kontribusi PDRB kota terendah kedua. Sedangkan kabupaten/kota yang memberikan proporsi kontribusi PDRB terhadap Provinsi Sumatera Barat terbesar adalah Kota Padang dengan kisaran 25,34%- 25,75% dan yang terendah adalah Kota Padang Panjang dengan kisaran 1,43%-1,44%. Semakin tinggi proporsi kontribusi PDRB Kota, semakin besar peranan atau kontribusi Kota Sawahlunto terhadap ekonomi Provinsi Sumatera Barat.

G. Stabilitas Ekonomi Makro

1. Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah dan semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.

Grafik 2.26
Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

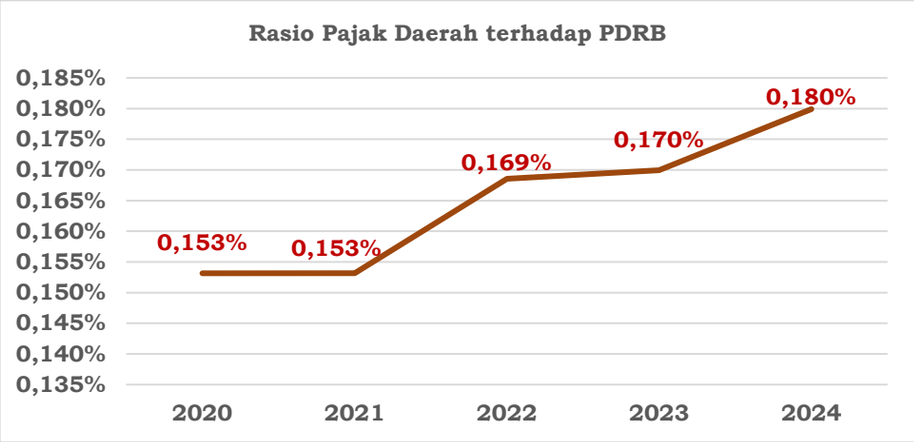

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2024
Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Berdasarkan grafik di atas, rasio pajak daerah terhadap PDRB Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Meskipun meningkat, Pajak daerah Kota Sawahlunto hanya mampu berkontribusi kurang dari 1% untuk membiayai pembangunan Kota Sawahlunto.

2. Tingkat Inflasi

Laju inflasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.

Grafik 2.27
Laju Inflasi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

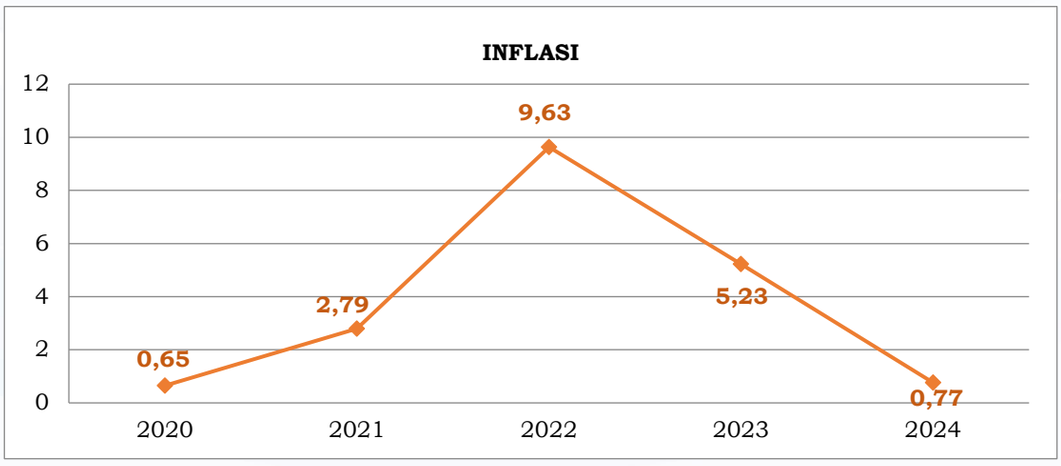

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Pada grafik di atas terlihat laju inflasi Kota Sawahlunto tahun 2022 dan 2023 melampaui target laju inflasi yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 4 % melalui PMK No.101/PMK.010/2021 tanggal 28 Juli 2021. Namun pada tahun 2024, angka inflasi Kota Sawahlunto sudah berhasil berada di bawah target Nasional yang ditetapkan sebesar 3,5%.

Tingginya laju inflasi di Kota Sawahlunto tentu saja berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto, terutama masyarakat yang berpenghasilan tetap. Tingginya inflasi atau naiknya harga-harga barang secara umum akan menyebabkan turunnya daya beli masyarakat, sehingga jumlah barang yang

dapat dibeli oleh masyarakat menjadi lebih sedikit karena pendapatan mereka tidak naik. Akibatnya kesejahteraan masyarakat menurun. Dampak selanjutnya, masyarakat akan menurunkan minat menabungnya. Dengan turunnya tingkat tabungan masyarakat pada bank, tentunya berdampak pada berkurang jumlah uang yang dapat dipinjamkan oleh bank kepada investor. Akibatnya investasi akan berkurang dan berdampak pada berkurangnya jumlah produksi yang pada akhirnya akan menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Grafik 2.28
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Kota Padang Dan Kota Bukittinggi
Tahun 2020-2024

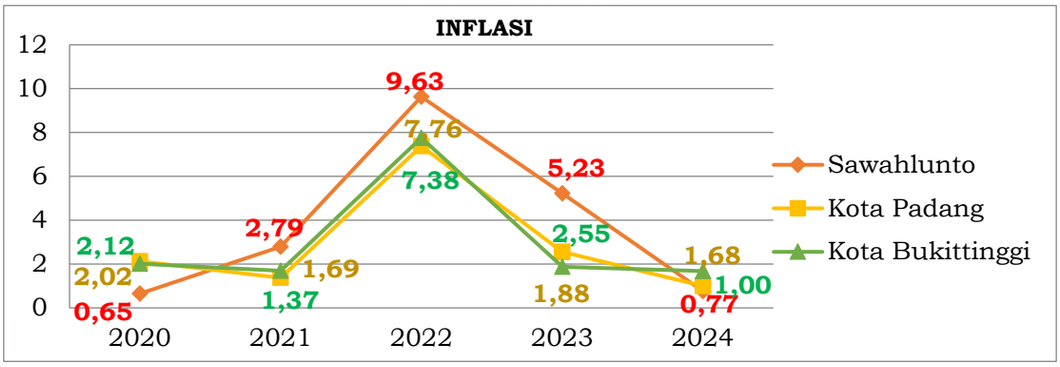

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2025, Data Diolah 2025

Berdasarkan grafik di atas terlihat pada saat terjadi deflasi, laju inflasi Kota Sawahlunto lebih rendah dari Kota Padang dan Kota Bukittinggi. Namun jika terjadi inflasi, laju inflasi Kota Sawahlunto lebih tinggi dari Kota Padang dan Kota Bukittinggi.

Grafik 2.29
Laju Inflasi Kota Sawahlunto, Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional
Tahun 2020-2024

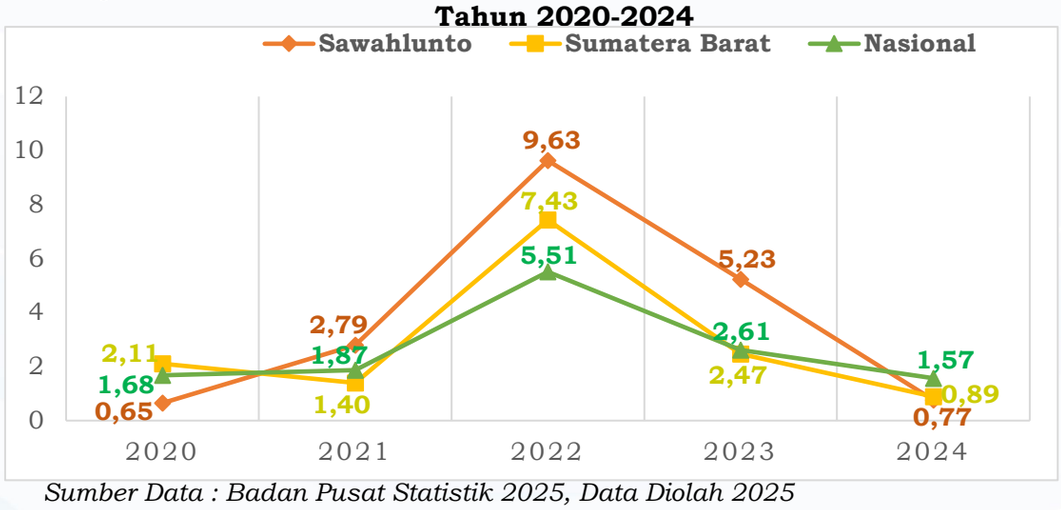

Sumber Data : Badan Pusat Statistik 2025, Data Diolah 2025

Pada grafik di atas terlihat bahwa pada saat terjadi deflasi, laju inflasi Kota Sawahlunto lebih rendah dari Provinsi Sumatera Barat dan Nasional. Namun jika terjadi inflasi, laju inflasi Kota Sawahlunto lebih tinggi dari Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Tabel di bawah ini memperlihatkan lapangan usaha dan jenis pengeluaran yang berkontribusi besar terhadap laju inflasi Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir:

Tabel 2.108
Laju Inflasi Kota Sawahlunto
Menurut Lapangan Usaha dan Pengeluaran
Tahun 2020 – 2024

Lapangan Usaha						
No	**Lapangan Usaha**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	-0,44	-1,17	5,76	4,62	6,23
2	Pertambangan dan Penggalian	-18,65	15,52	64,07	10,85	-22,93
3	Industri Pengolahan	3,91	4,16	6,99	5,27	5,01
4	Pengadaan Listrik dan Gas	1,12	0,63	1,49	1,83	0,03
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,20	1,12	5,59	3,41	3,99
6	Konstruksi	2,42	1,66	9,60	4,65	0,98
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	-0,35	-0,99	10,38	5,65	2,56
8	Transportasi dan Pergudangan	3,28	1,83	8,57	4,43	-1,43
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,59	2,07	3,99	3,80	1,88
10	Informasi dan Komunikasi	-0,63	1,91	6,38	8,15	2,07
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1,59	2,52	5,33	2,05	0,49
12	Real Estat	0,81	0,75	4,32	5,67	2,33
13	Jasa Perusahaan	0,84	0,98	2,86	5,42	0,64
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	8,12	3,07	7,61	4,59	-0,70
15	Jasa Pendidikan	0,52	0,16	7,23	4,40	1,77
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,42	2,60	4,95	4,96	2,73
17	Jasa Lainnya	2,06	1,74	6,25	5,10	2,37
Jenis Pengeluaran						
No	**Jenis Pengeluaran**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	1,34	2,20	7,06	4,25	2,20
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,08	1,69	5,67	5,14	2,18
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2,45	2,25	2,02	0,28	3,78
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	1,98	4,06	5,09	3,42	2,48
Laju Inflasi Kota Sawahlunto		**0,65**	**2,79**	**9,63**	**5,23**	**0,77**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Pada tabel di atas, lapangan usaha dan jenis pengeluaran yang realisasinya melebihi target inflasi nasional adalah yang berwarna (merah muda, coklat dan kuning), dan mempunyai andil yang besar terhadap laju inflasi di Kota Sawahlunto.

Pada tahun 2024, terdapat 3 lapangan usaha dan 1 jenis pengeluaran yang melampaui target inflasi maksimal yang telah ditetapkan Pemerintah sebesar 3,5%, yaitu : lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan laju inflasi sebesar 6,23%; lapangan usaha Industri Pengolahan dengan laju inflasi sebesar 5,01%; lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang dengan laju inflasi sebesar 3,99 %; dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah dengan laju inflasi sebesar 3,78%.

3. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB

Total dana pihak ketiga/PDRB (%) adalah rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu wilayah terhadap PDRB wilayah tersebut pada suatu waktu tertentu yang menggambarkan tingkat besaran perbandingan dana pihak ketiga perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya.

Peningkatan Total dana pihak ketiga/PDRB menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin kuatnya sektor keuangan di suatu daerah. Di bawah ini disajikan tabel total dana pihak ketiga di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir.

Tabel 2.109
Total Dana Pihak Ketiga di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Total Dana Pihak Ketiga (miliar rupiah)	246,61	335,97	391,86	379,31	378,48
PDRB ADHB (miliar rupiah)	3.656,60	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%)	6,74%	8,72%	8,93%	7,86%	7,48%

Sumber Data : Bank Indonesia Tahun 2025, BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025

Di bawah ini disajikan grafik total dana pihak ketiga di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Grafik 2.30
Total Dana Pihak Ketiga/PDRB di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

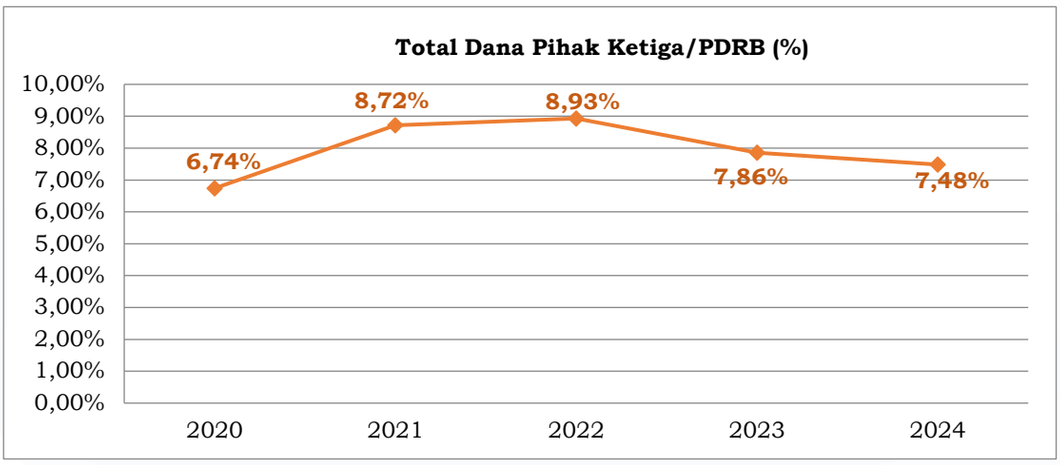

Sumber Data : Bank Indonesia Tahun 2025, BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025

Pada tabel dan grafik di atas terlihat bahwa rasio Total Dana Pihak Ketiga terhadap PDRB dalam lima tahun terakhir di Kota Sawahlunto menunjukkan pertumbuhan yang fluktuatif pada kisaran 6,74 % hingga 8,93 %. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2022 dan rasio terendah terjadi pada tahun 2020. Penurunan rasio total dana pihak ketiga terhadap PDRB menunjukkan menurunnya tingkat simpanan masyarakat di Kota Sawahlunto, tabungan merupakan produk simpanan yang mendongkrak kenaikan dana pihak ketiga, sementara Giro dan Deposito mengalami kenaikan yang lambat dan cenderung masih fluktuatif.

4. Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)

Nilai transaksi saham per kapita per kabupaten/kota adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (Provinsi/Kabupaten/Kota) selama setahun dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut (Provinsi/Kabupaten/Kota). Total nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham. Semakin

tinggi nilai transaksi saham menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat.

Berikut disajikan nilai transaksi saham per kapita di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.110
Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Transaksi Saham (Miliar Rupiah)	47,34	62,28	33,83	28,87	83,17
Jumlah Penduduk (Jiwa)	65.138	65.807	66.778	67.760	68.730
Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	726.764,71	946.403,88	506.603,97	426.062,57	1.210.097,48

Sumber Data : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024, BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa nilai transaksi saham Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Penurunan nilai transaksi saham terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023 disebabkan lesunya ekonomi, serta kehati-hatian investor dalam melakukan transaksi. Meskipun terjadi peningkatan investor perorangan (SID) pada tahun tersebut, namun peningkatannya tidak berbanding lurus dengan peningkatan nilai transaksi saham karena kebanyakan investor perorangan yang masuk pasar modal merupakan anak-anak muda yang masih duduk di bangku kuliah yang baru mencoba menjadi investor dengan modal Rp. 100 ribu

Berikut disajikan perkembangan turun naiknya nilai transaksi saham per kapita di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir :

Grafik 2.31
Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

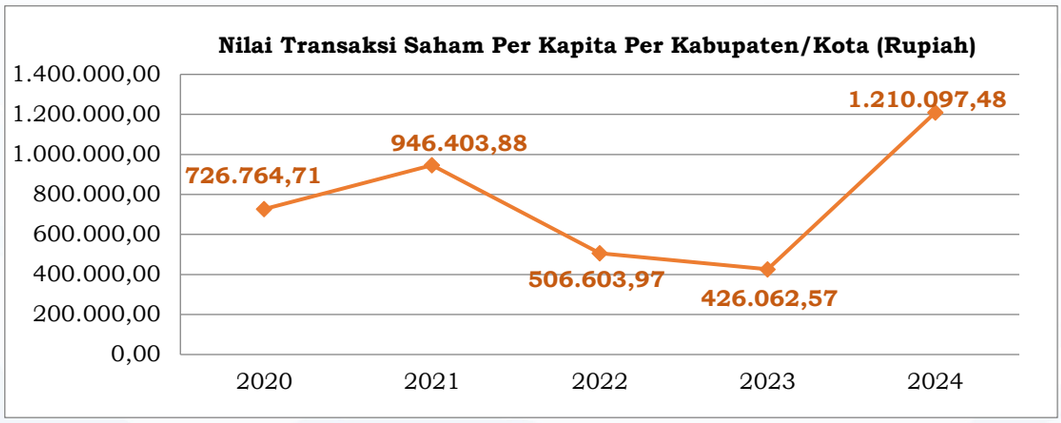

Sumber Data : Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2024, BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025

Meskipun Nilai transaksi saham Kota Sawahlunto pada tahun 2024 meningkat sangat signifikan, namun angka ini merupakan yang terendah kedua dari 6 kota lain yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten/kota dengan nilai transaksi saham tertinggi adalah Kota Padang dengan nilai transaksi sebesar Rp. 7.448,96 Miliar dan yang terendah adalah Kota Pariaman dengan nilai transaksi sebesar Rp. 65,48 Miliar.

5. Total Kredit/PDRB

Total Kredit/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di lingkup daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah.

Semakin tinggi nilai Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian lingkup daerah tersebut. Berikut disajikan Total Kredit dan PDRB ADHB Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir :

Tabel 2.111
Total Kredit Dan PDRB ADHB Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Total Kredit (miliar rupiah)	451,10	488,08	515,46	549,44	590,15
Pertumbuhan Total Kredit	-	8,20%	5,61%	6,59%	7,41%
PDRB ADHB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
Pertumbuhan PDRB ADHB	-	5,34%	13,97%	9,92%	4,82%
Total Kredit/PDRB ADHB (%)	**12,34%**	**12,67%**	**11,74%**	**11,39%**	**11,67%**

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025

Berikut disajikan perkembangan turun naiknya rasio Total Kredit/ PDRB ADHB di Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir :

Grafik 2.32
Rasio Total Kredit/ PDRB ADHB Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

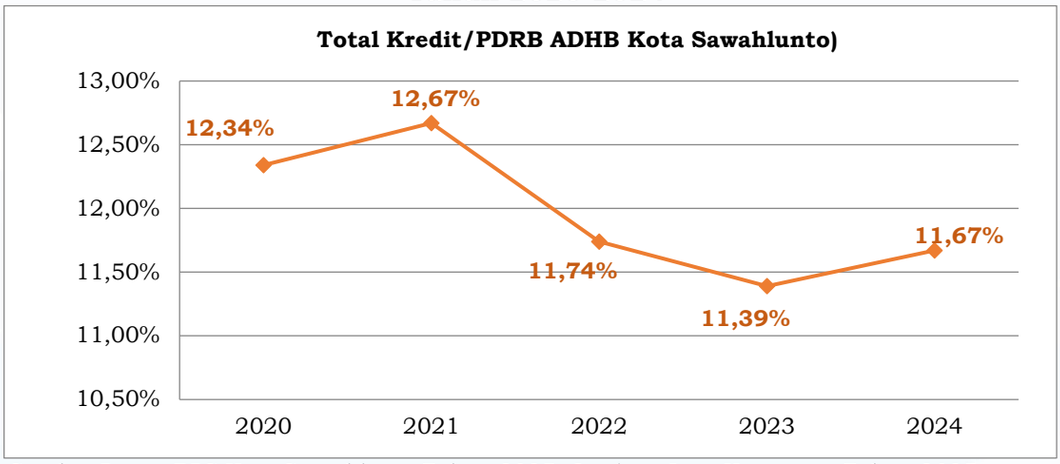

Sumber Data : BPS Kota Sawahlunto Tahun 2025, Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2025

Pada tabel dan grafik di atas terlihat Rasio Total Kredit terhadap PDRB Kota Sawahlunto berfluktuasi selama periode tahun 2020-2024 dengan kecenderungan menurun. Penurunan Rasio Total Kredit terhadap PDRB Kota Sawahlunto terjadi pada tahun 2022 dan tahun 2023. Hal ini disebabkan pertumbuhan Total Kredit lebih rendah dari Pertumbuhan PDRB ADHB. Penurunan Rasio Total Kredit terhadap PDRB Kota Sawahlunto tersebut menunjukkan bahwa fungsi perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan berkurang dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian Kota Sawahlunto pada tahun tersebut.

6. Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)

Rasio PDRB sektor jasa keuangan (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi lapangan usaha jasa keuangan terhadap PDRB suatu daerah dan sejauh mana sektor jasa keuangan mampu menjalankan fungsinya, baik sebagai motor penggerak maupun penopang pertumbuhan ekonomi bagi suatu daerah.

Berikut disajikan perkembangan rasio PDRB sektor jasa keuangan selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.112
Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jasa Keuangan (miliar rupiah)	124,28	139,51	155,10	164,02	172,38
2	PDRB ADHB (miliar rupiah)	3.656,59	3.851,69	4.389,76	4.825,30	5.058,00
3	**Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)**	***3,40***	***3,62***	***3,53***	***3,40***	***3,41***

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data diolah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa rasio PDRB sektor jasa keuangan Kota Sawahlunto selama rentang tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Di samping itu kontribusi sektor jasa keuangan sangat rendah terhadap perekonomian Kota Sawahlunto dengan kisaran 3,40 % hingga 3,62 % sehingga belum mampu menjadi motor penggerak maupun penopang pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.

2.1.4 ASPEK PELAYANAN UMUM

A. Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif

1. Indeks Reformasi Hukum

Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional.

Semakin tinggi nilai Indeks Reformasi Hukum, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.

Tabel 2.113
Indeks Reformasi Hukum Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Hukum	na	na	na	55,38	97,5

Sumber Data : Portal RB Tahun 2024-2025

Penilaian Indeks Reformasi Hukum Kota Sawahlunto mulai dilaksanakan pada tahun 2023. Indeks Reformasi Hukum tahun 2024 meningkat sangat drastis dengan Kategori AA (Istimewa). Rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk pemerintah daerah Kota Sawahlunto agar pelaksanaan reformasi hukum dipertahankan dan ditingkatkan.

2. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE. Untuk memastikan pelaksanaan SPBE di instansi pusat dan pemerintah daerah selaras dengan prinsip terintegrasi dan terpadu, maka instansi pusat dan pemerintah daerah diharapkan menerapkan unsur-unsur SPBE sesuai dengan kerangka kerja tata kelola dan manajemen SPBE agar penerapan SPBE dapat berjalan efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta dapat menghasilkan layanan SPBE yang berkualitas dan optimal. Untuk mengukur perkembangan penerapan SPBE di Indonesia, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bersama Tim Koordinasi SPBE Nasional melaksanakan pemantauan dan evaluasi SPBE.

Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.

Adapun capaian Indeks SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kurun waktu 2020-2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.114
Perkembangan Indeks SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,88	2,07	2,84	3,09	3,41
Prediket	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber Data : Laporan Hasil Pemantauan SPBE

Capaian SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2020–2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Penurunan Indeks SPBE tahun 2021 disebabkan adanya perubahan metode penilaian.

Meskipun capaian SPBE Kota Sawahlunto cenderung meningkat, namun terdapat beberapa kelemahan, seperti: a). konsep kebijakan internal Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kota Sawahlunto belum tersedia atau masih dalam bentuk draft (terdapat SOP yang menggunakan SDLC dalam bentuk file excel); b). Pemerintah Kota Sawahlunto belum menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan, program kegiatan yang terarah dan terencana; dan c). Pemerintah Kota Sawahlunto belum melaksanakan Audit Keamanan.

Dengan demikian perlu dilakukan perbaikan sebagai berikut : 1). Melengkapi Kebijakan pengembangan aplikasi dengan siklus dan proses pengelolaan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE secara menyeluruh di IPPD. Kebijakan juga mengatur pengendalian dan keterpaduan pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE pada semua unit kerja/perangkat daerah IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh; 2). Melakukan penerapan Manajemen Pengetahuan yang tertuang di dalam Peta Rencana SPBE. Pelaksanaan Manajemen Pengetahuan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.

Optimalisasi Penerapan Manajemen Pengetahuan dengan menggunakan Sistem Aplikasi Manajemen Pengetahuan; 3). Melakukan audit keamanan untuk keamanan infrastruktur dan keamanan aplikasi. Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional (dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun oleh BSSN). Audit Keamanan Infrastruktur SPBE IPPD (dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun oleh IPPD, berkoordinasi dengan Kemenkominfo). Audit Keamanan Aplikasi umum (dilaksanakan 1 kali dalam 1 tahun oleh BSSN). Audit Keamanan Aplikasi khusus (dilaksanakan 1 kali dalam 2 tahun oleh IPPD, berkoordinasi dengan Kemenkominfo).

3. Indeks Pelayanan Publik

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan aspek kebijakan pelayanan, aspek profesionalisme SDM, aspek sarana prasarana, aspek sistem informasi pelayanan publik, aspek konsultasi dan pengaduan serta aspek inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.

Berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB, berikut capaian Indeks Pelayanan Publik Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 :

Tabel 2.115
Perkembangan Indeks Pelayanan Publik Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pelayanan Publik	na	3.15 (B-)	4.21 (A-)	3,56 (B)	3,18 (B-)

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2025

Hasil evaluasi tahun 2024, terjadi penurunan Indeks Pelayanan Publik Kota Sawahlunto yang disebabkan menurunnya Indeks Pelayanan Publik beberapa perangkat daerah Kota Sawahlunto, seperti: IPP Dinas Sosial Kota Sawahlunto dengan capaian 2,67 (tergolong kategori cukup) dan IPP RSUD Kota Sawahlunto dengan capaian 3,09 (tergolong kategori baik dengan catatan).

4. Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)

Survey Penilaian Integritas (SPI) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD).

Kriteria nilai survei penilaian integritas (SPI) menggunakan skala 0-100, dimana semakin tinggi nilai menunjukkan semakin baik tingkat integritas instansi. Indeks SPI diklasifikasikan menjadi tiga kategori : nilai 0 – 72.9 (rentan); nilai 73 - 77.9 (waspada); nilai 78 – 100 (terjaga).

Tabel 2.116
Perkembangan Survei Penilaian Integritas (SPI) Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
SPI KPK (Nilai) Kota Sawahlunto	NA	73,37	70,71	75,38	76,95
SPI KPK (Nilai) Provinsi Sumatera Barat	NA	75,44	70,57	71,41	67,20
SPI KPK (Nilai) Nasional	NA	72,43	71,94	70,97	71,53

Sumber Data : Jaga.id

Hasil SPI Tahun 2024 menempatkan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam kategori waspada yang berarti praktik korupsi masih terjadi di Kota Sawahlunto berdasarkan penilaian dari responden internal, eksternal maupun eksper. Hal ini terjadi akibat dari sistem pencegahan antikorupsi yang ada saat ini belum berjalan optimal dan/atau meningkatnya kemunculan oknum pejabat/pegawai yang kurang berintegritas pada unit kerja/layanan lembaga yang mengindikasikan bahwa Kota Sawahlunto perlu meningkatkan upaya pencegahan korupsi untuk menghindari potensi risiko yang ada. Sementara Provinsi Sumatera Barat dan Nasional berada dalam kategori rentan yang menunjukkan bahwa Provinsi Sumatera Barat dan Nasional memiliki risiko korupsi yang tinggi dan perlu perbaikan signifikan dalam sistem integritas dan pencegahan korupsi. Dengan demikian Pemerintah Kota Sawahlunto lebih baik tingkat integritas instansinya dibandingkan Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

Berdasarkan rekomendasi dari KPK, Pemerintah Kota Sawahlunto perlu memperkuat upaya perbaikan yang berfokus pada penguatan level integritas di kalangan pejabat/pegawai disertai dengan penyempurnaan sistem pencegahan anti korupsi yang sudah ada dan berjalan, agar menjadi lebih efektif. Untuk menjamin akurasi dan ketepatan program dalam menjawab risiko korupsi lembaga yang bersifat kontekstual serta strategi, mitigasi dapat disusun dan diimplementasikan secara efektif.

5. Indeks Persepsi Anti Korupsi

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) adalah sebuah indeks yang mengukur persepsi masyarakat terhadap perilaku korupsi (SPI Komponen Eksternal). IPAK memberikan gambaran tentang bagaimana masyarakat memandang perilaku korupsi dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam pelayanan publik, birokrasi, dan interaksi sosial.

Evaluasi terhadap Indeks Persepsi Anti Korupsi bertujuan untuk memahami sejauh mana masyarakat menganggap perilaku korupsi dapat diterima atau ditoleransi, serta menilai kepuasan masyarakat terhadap upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Semakin tinggi nilai IPAK menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin antikorupsi, sebaliknya nilai indeks yang semakin rendah menunjukkan bahwa masyarakat berperilaku semakin permisif terhadap korupsi.

Tabel 2.117
Perkembangan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
IPAK Kota Sawahlunto	NA	91,11	83,96	88,04	87,67
IPAK Provinsi Sumatera Barat	NA	82,97	80,69	84,47	89,35
IPAK Nasional	NA	80,17	82,79	84,97	86,44

Sumber Data : Jaga.id

Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) Kota Sawahlunto tahun 2024 menunjukkan bahwa masyarakat Kota Sawahlunto berperilaku lebih permisif terhadap korupsi dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini berbeda dengan masyarakat pada level Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang menunjukkan bahwa pada tahun 2024 masyarakat Provinsi Sumatera Barat dan Nasional berperilaku lebih anti korupsi dibandingkan tahun sebelumnya.

6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja.

Tabel 2.118
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	na	2,32 (Rendah)	2,9510 (Sedang)	3,0444 (Sedang)	na

Sumber Data : 1. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7.6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2023 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) provinsi dan kabupaten/kota pada tahun 2022
2. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Secara Nasional Tahun 2024 berdasarkan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2023.

Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto dan Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Barat tahun 2024 dengan pelaksanaan penilaian tahun 2025 belum tersedia atau belum dirilis. Namun Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2022 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, hal ini terlihat dari perubahan status “rendah” ke status “sedang”.

B. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh dan Demokrasi Substansial

1. Persentase Penegakan Perda

Persentase Penegakan Peraturan Daerah (Perda) mengacu pada ukuran keberhasilan pelaksanaan dan penerapan Perda yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. Indikator ini mengukur seberapa efektif Perda tersebut dijalankan dalam praktik, apakah sesuai dengan standar prosedur yang berlaku, dan apakah tujuannya tercapai.

Persentase Penegakan Perda dapat diartikan sebagai : 1). Tingkat Kepatuhan (Seberapa banyak warga masyarakat, pelaku usaha, atau pihak-pihak terkait yang mematuhi isi dan ketentuan Perda); 2). Efektivitas Penindakan (Seberapa efektif tindakan penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan aparat terkait dalam mengatasi pelanggaran Perda); 3). Pencapaian Tujuan Perda (Seberapa jauh Perda yang bersangkutan berhasil mencapai tujuan yang ingin dicapai, seperti menjaga ketertiban umum, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, atau melindungi lingkungan).

Tabel 2.119
Persentase Penegakan Perda Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Penegakan Perda	100	100	100	100	100

Sumber Data : Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Petugas Satpol PP Kota Sawahlunto sudah menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman dalam masyarakat dengan baik selama tahun 2020-2024. Hal ini terlihat dari penegakan Perda yang sudah terlaksana 100%, meskipun Pelanggaran Perda dari tahun ke tahun berfluktuasi dengan kecenderungan menurun.

2. Persentase Capaian Aksi HAM

Aksi HAM (Hak Asasi Manusia) merupakan upaya komprehensif untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di Indonesia. Aksi ini melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, pemerintah daerah, kementerian, lembaga, dan masyarakat. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib menyampaikan laporan capaian pelaksanaan aksi HAM secara berkala. Pencapaian aksi HAM menjadi salah satu indikator dalam penilaian Kabupaten/Kota Peduli HAM.

Kabupaten/Kota Peduli HAM adalah program pemerintah untuk mendorong pemerintah daerah (kabupaten/kota) agar lebih memperhatikan dan mengimplementasikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan Hak Asasi Manusia (HAM). Program ini juga bertujuan untuk meningkatkan sinergi antara berbagai satuan kerja perangkat daerah dan instansi vertikal dalam upaya pemenuhan HAM.

Kriteria Peduli HAM untuk daerah kabupaten/kota bertujuan : a). mendorong pemerintah daerah kabupaten/kota agar lebih bertanggung jawab dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; b). memperkuat sinergi antara organisasi perangkat daerah, instansi vertikal, dan instansi terkait di daerah, guna mendukung upaya penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia; dan c). memberikan penilaian terhadap struktur, proses, dan hasil capaian kinerja pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan penghormatan, pelindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia.

Berikut penilaian capaian Aksi Hak Asasi Manusia (HAM) Kota Sawahlunto pada tahun 2020-2024:

Tabel 2.120
Penilaian Capaian Aksi HAM Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

Indikator	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Penilaian Capaian Aksi HAM	Kota Peduli HAM"	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM

Sumber Data : Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025

Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 sudah memperoleh penilaian Kota Peduli HAM. Perolehan gemilang ini sudah dicapai Kota Sawahlunto sejak tahun 2017 atas penilaian Aksi HAM di Kota Sawahlunto tahun 2016, dan penilaian Kota Peduli HAM pada tahun 2024 diperoleh atas penilaian Aksi HAM di Kota Sawahlunto tahun 2023. Sedangkan penilaian terhadap Aksi HAM tahun 2024 tidak dilaksanakan pada tahun 2025 karena terdapat tantangan yang kompleks dalam pelaksanaannya. Dibutuhkan upaya yang berkelanjutan untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut agar HAM dapat benar-benar ditegakkan dan dilindungi.

3. Indeks Demokrasi Indonesia (Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu)

Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini hanya diukur sampai level Provinsi, sedangkan

Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu merupakan indikator proxy dari Indeks Demokrasi Indonesia Kota Sawahlunto karena Indeks Demokrasi Indonesia hanya diukur sampai level Provinsi. Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu merupakan bagian dari penilaian perkembangan demokrasi di Indonesia. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilu menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.

Berikut capaian Tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 :

Tabel 2.121
Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Di Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

No	Indikator	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)	78,91	-	-	-	83,50
2	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah	78,62	-	-	-	78,93
3	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	54,27	-	-	-	79,90

Sumber Data : Badan Kesbangpol 2025

Pada tanggal 14 Februari 2024 dilaksanakan Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Dan pada tanggal 27 November 2024 dilaksanakan pemilihan kepala

daerah secara serentak, baik tingkat Provinsi (Gubernur dan Wakil Gubernur) maupun kabupaten/kota (Wali Kota/Bupati dan Wakil Wali Kota/Wakil Bupati). Tingkat Partisipasi Pemilih di Kota Sawahlunto tahun 2024 lebih baik dari tahun 2020.

4. Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (Angka Kriminalitas)

Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%) adalah seberapa banyak penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. Semakin tinggi persentase yang dihasilkan dari perhitungan yang ada akan menunjukkan semakin besar jumlah penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya, begitu pun sebaliknya.

Angka Kriminalitas merupakan penyesuaian dengan karakteristik kabupaten/kota terhadap indikator kinerja Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya (%).

Tindak kriminalitas merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Tindak kriminalitas ini dapat merugikan dan mengancam keselamatan serta jiwa seseorang.

Tabel 2.122
Angka Kriminalitas Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Jenis Kriminalitas	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Curat (pencurian dan pemberatan)	19	9	6	11	5
Penggelapan	3	1	3	11	8
KDRT	4	-	1	2	1
Penipuan	3	2	4	3	6
Pengerusakan	2	1	3	1	-
Pencurian Kendaraan Bermotor	8	5	4	3	3
Pembakaran	-	-	-	-	1
Anirat/Penganiayaan Pemberatan	1	1	1	1	-
Perkosaan	-	-	-	-	-
Pembunuhan	-	-	-	-	2
Jumlah kriminal	40	19	22	32	26
Jumlah penduduk	65.138	65.687	66.413	67.760	68.730
Angka kriminalitas	**6,14**	**2,89**	**3,31**	**4,72**	**3,78**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah kriminalitas di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Untuk mengatasi permasalahan tindak kriminalitas di Kota Sawahlunto dan dalam upaya pembinaan kepada masyarakat, Pemerintah Kota Sawahlunto bekerjasama dengan Kepolisian Resor Sawahlunto. Hal ini adalah sebagai salah satu bentuk pencegahan guna memberantas tindak kriminalitas dalam upaya menciptakan Kota Sawahlunto yang aman dan jauh dari kejahatan kriminalitas.

5. Indeks Pembangunan Hukum (Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah)

Indeks Pembangunan Hukum adalah indeks yang mengukur capaian kinerja pembangunan hukum melalui pilar yang merupakan komponen dalam pembangunan hukum Indonesia. Terdapat lima pilar dalam Indeks Pembangunan Hukum, yaitu budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum serta informasi dan komunikasi hukum. Indeks Pembangunan Hukum belum dihitung di Kota Sawahlunto, untuk itu indikator proxy yang digunakan adalah Persentase Penanganan Pelanggaran Peraturan Daerah (Perda).

Tabel 2.123
Penanganan Pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Pelanggaran Perda	210	7767	228	134	155
2	Jumlah Penanganan Pelanggaran Perda	210	7767	228	134	155
3	Persentase penanganan pelanggaran Perda (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Satpol PP dan Damkar Kota Sawahlunto Tahun 2025

Dari tabel di atas terlihat bahwa Persentase penanganan pelanggaran Perda di Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 sudah mencapai 100%. Angka ini menunjukkan semua pelanggaran Peraturan Daerah (Perda) di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir dapat diselesaikan dan ditangani, meskipun ada lonjakan pelanggaran Perda yang signifikan pada tahun 2021 pada saat covid 19 melanda.

C. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Persentase Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan

Kerjasama wajib daerah dengan daerah lain merupakan kerjasama antar daerah yang berbatasan untuk urusan Pemerintah yang memiliki eksternalitas lintas daerah, dan penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama, sedangkan kerjasama daerah dengan pihak ketiga adalah merupakan sebuah usaha bersama antara daerah dengan pihak ketiga yang terdiri dari perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum dan organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Tata cara kerjasama ini diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020.

Pemerintah Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 telah merencanakan dan melaksanakan berbagai kerjasama antara pemerintah Kota Sawahlunto dengan pemerintah daerah lain serta dengan pihak ketiga. Berikut capaian Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan selama lima tahun terakhir

Tabel 2.124
Perkembangan Persentase Kerjasama Wajib Yang Dilaksanakan
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase kerjasama wajib yang dilaksanakan (%)	100	100	100	100	100

Sumber Data : Bagian Tata Pemerintahan Setdako Kota Sawahlunto 2025

Pada tabel di atas terlihat bahwa kerjasama wajib yang ditargetkan oleh pemerintah Kota Sawahlunto telah terlaksana dengan baik serta mempunyai dampak yang positif bagi pemerintah Kota Sawahlunto dan pihak ketiga serta masyarakat. Kerjasama yang dilaksanakan terkait dengan bidang pendidikan, pariwisata, kesehatan, ekonomi dan layanan publik lainnya.

Pihak dan lembaga yang telah bekerja sama dengan pemerintah Kota Sawahlunto adalah pemerintah Provinsi Sumatera Barat, pemerintah kabupaten/kota Se-Sumatera Barat, pemerintah Kabupaten Blora, Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Barat, Institut Pertanian Bogor (IPB), Universitas Padjajaran (UNPAD), Universitas Islam Riau (UIR), Universitas Negeri Padang (UNP), Teknik Pekeretaapian Wilayah Sumbar (PT. KAI), Bank Negara Indonesia (BNI), Miko Kamal dan Assciates, Universitas Seni Indonesia Padang Panjang, UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Universitas PGRI Sumatera Barat, PT. Semen Padang, PT. Bukit Asam, Sumber Randai (SR) Production.

2. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan

Ketahanan Nasional merupakan kondisi dinamis suatu bangsa yang meliputi ketangguhan dan kemampuan untuk mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala macam bentuk ancaman yang membahayakan integritas, identitas serta perjuangan mewujudkan tujuan perjuangan nasional.

Indeks Ketahanan Nasional terdiri dari 8 gatra, salah satunya adalah gatra Pertahanan Dan Keamanan. Gatra ini merupakan salah satu aspek penting dalam Indeks Ketahanan Nasional (IKN) yang mencakup kemampuan negara dalam menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keamanan warganya.

Berikut capaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir :

Tabel 2.125
Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan
Kota Sawahlunto Dan Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2020-2024

No	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Kota Sawahlunto	NA	NA	3,04	3,04	2,97
2	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Provinsi Sumatera Barat	3,08	2,05	3,08	3,08	2,87
3	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Indonesia	3,08	NA	3,02	2,89	3,02

Sumber Data : Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)

Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Kota Sawahlunto mulai dihitung pada tahun 2022, sehingga data tahun 2020-2021 tidak tersedia. Sedangkan capaian Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan Dan Keamanan Kota Sawahlunto pada tahun 2024 mengalami penurunan, meskipun demikian angka ini berada pada kriteria “cukup tangguh”

D. Kinerja Setiap Urusan Pemerintahan Daerah (IKK)

I. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Urusan Wajib Pendidikan

- Skor Literasi/Numerasi

Literasi dan numerasi adalah kemampuan dasar yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Literasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk membaca, menulis, dan memahami teks tertulis, sementara numerasi merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan, dan memanipulasi angka.

Tabel 2.126
Angka Literasi/Numerasi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

NO	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
1	Rata-Rata Nilai UN SD	7,42	-	-	-	-
2	Rata-Rata Nilai UN SMP	5,55	-	-	-	-
3	Persentase siswa dengan nilai *assessment* kompetensi (numerasi minimum) SD	-	39,43	45,33	68,80	75,29
4	Persentase siswa dengan nilai *assessment* kompetensi (numerasi minimum) SMP	-	69,67	70,07	57,52	77,01
5	Persentase siswa dengan nilai *assessment* kompetensi (Literasi minimum) SD	-	60,90	62,38	83,87	87,26
6	Persentase siswa dengan nilai *assessment* kompetensi (Literasi minimum) SMP	-	69,67	70,07	80,10	83,51

Sumber Data : Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto

Mulai tahun 2021 ujian nasional pada tingkat SD dan SMP tidak dilaksanakan lagi, sebagai gantinya digunakan angka literasi/numerasi dengan rentang nilai 1- 100. Selama rentang waktu tahun 2021-2024, capaian angka literasi/numerasi dan SD dan SMP bervariasi. Untuk angka numerasi SD meningkat, sedangkan angka numerasi SMP berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Selanjutnya untuk angka literasi SD dan SMP meningkat.

- Harapan Lama Sekolah

Harapan Lama Sekolah (HLS) merupakan lamanya waktu sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu dimasa mendatang. Diasumsikan bahwa peluang anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur berikutnya sama dengan peluang penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang dan dihitung pada usia 7 tahun ke atas.

Tabel 2.127
Harapan Lama Sekolah (HLS) Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Harapan Lama Sekolah (HLS)	13,17	13,18	13,42	13,69	13,86

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Angka HLS Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaiannya merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Pada Tahun 2024, Angka HLS Kota Sawahlunto sebesar 13,86, yang

berarti lamanya waktu sekolah bagi anak usia sekolah di Kota Sawahlunto diharapkan mencapai 13,86 tahun atau dapat menyelesaikan D1.

- Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Semakin tingginya angka RLS, semakin lama/tinggi jenjang pendidikan yang ditamatkan (diselesaikan) oleh masyarakat suatu daerah.

Tabel 2.128
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	10,17	10,32	10,43	10,44	10,53

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Angka RLS Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun capaiannya merupakan yang terendah diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Angka RLS Kota Sawahlunto tahun 2024 sebesar 10,53, bermakna rata-rata masa sekolah yang dialami penduduk Kota Sawahlunto usia 25 tahun ke atas selama 10,53 tahun atau telah menyelesaikan SLTA kelas 1 (kelas X) dan telah menyelesaikan wajib belajar 9 tahun.

2. Urusan Wajib Kesehatan

- Umur Harapan Hidup

Usia Harapan Hidup (UHH) adalah rata rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu. UHH merupakan salah satu komponen pembentuk IPM. UHH menggambarkan tingkat kesehatan masyarakat. Semakin baik tingkat kesehatan masyarakat maka kesempatan untuk hidupnya cenderung semakin panjang. Sebaliknya tingkat kesehatan yang buruk akan cenderung memperpendek usia hidup.

Tabel 2.129
Usia Harapan Hidup (UHH) Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Usia Harapan Hidup (UHH)	72,81	73,20	73,50	73,79	74,12

Sumber Data : Berita Resmi Statistik, No. 72/12/13/Th.XXVII, 2 Desember 2024

Usia harapan hidup Kota Sawahlunto pada tahun 2024 sebesar 74,12 tahun. Artinya, rata-rata bayi yang lahir di Kota Kota Sawahlunto pada tahun 2024 memiliki harapan hidup hingga usia 74,12 tahun.

- Indeks Keluarga Sehat

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah perhitungan yang digunakan untuk mengetahui status kesehatan keluarga. IKS mengukur kesehatan masyarakat secara menyeluruh, mencakup aspek kesehatan fisik, mental, sosial, dan lingkungan.

Tabel 2.130
Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto	0,24	0,29	0,29	0,34	0,45

Sumber Data : Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto, 2025

Indeks Keluarga Sehat Kota Sawahlunto mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, namun masih berada pada kategori "Keluarga Tidak Sehat".

3. Urusan Wajib Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang

- Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur oleh pemerintah.

Tabel 2.131
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2025

Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) Kota Sawahlunto belum dihitung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia.

4. Urusan Wajib Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- Persentase RT dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan

Persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau diperlukan untuk mengukur kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan. Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga dari sektor perumahan.

Tabel 2.132
Persentase Rumah Tangga Yang Memiliki Akses Terhadap
Hunian Layak Dan Terjangkau Kota Sawahlunto
Tahun 2020- 2024

NO	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah rumah yang layak huni dan terjangkau (unit)	13.884	12.793	12,742	13.322	13.569
2	Jumlah rumah (unit)	14.257	14.314	14.371	14.630	14.847
3	Persentase Rumah Tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau (Rasio Rumah Layak Huni)	97,38	89,37	88,66	91,06	91,39

Sumber Data : DPKP2LH Kota Sawahlunto, 2024

Persentase rumah tangga (RT) yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau di Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi. Jumlah rumah layak huni dan terjangkau di tahun 2024 bertambah 247 unit ini disebabkan adanya

intervensi dari pemerintah Kota Sawahlunto berupa kegiatan RTLH sebanyak 30 unit dan pembangunan unit rumah baru oleh masyarakat sebanyak 217 unit.

5. Urusan Wajib Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

- Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Trantibumlinmas) merupakan alat pengukuran capaian penyelenggaraan urusan bidang ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai urusan wajib pelayanan dasar yang terdiri atas sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum, sub urusan kebakaran, dan sub urusan bencana.

Tabel 2.133
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Kementerian Dalam Negeri 2025

Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas dihitung oleh Kementerian Dalam Negeri setelah daerah mengupload masing-masing unsur komposit Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas pada link yang tersedia. Sampai tahun 2024 data belum tersedia.

6. Urusan Wajib Sosial

- Indeks Kesejahteraan Sosial

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) atau IKESOS adalah ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan sosial masyarakat suatu wilayah atau negara.

Indeks Kesejahteraan Sosial mencakup tiga dimensi, yaitu : 1). kebutuhan dasar (dengan tujuh variable, yaitu : pangan, tempat tinggal, kesehatan, pendidikan, jaminan sosial, *physical mobility* serta rasa aman); 2). peranan sosial (dengan tiga variabel, yaitu : partisipasi, kohesi sosial dan kelembagaan inklusif); 3). keberdayaan ekonomi (dengan tiga variabel, yaitu : partisipai ekonomi, utilitas/daya guna serta ketahanan ekonomi).

Sasaran cakupan dan batasan sasaran kelompok dalam IKESOS meliputi lansia (individu yang berusia 65+), disabilitas (penyandang disabilitas yang memenuhi kriteria kecacatan, ketunaan sosial, penyimpangan perilaku, dan korban diskriminasi), serta penduduk (seluruh lapisan masyarakat).

Tabel 2.134
Indeks Kesejahteraan Sosial
Kota Sawahlunto Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kesejahteraan Sosial	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Dinsos, PMD PPA 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial (IKS) Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 belum dihitung oleh Kementerian Sosial sehingga data belum tersedia. Adapun capaian IKESOS Kota Sawahlunto dan Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Sumatera Barat tahun 2025 yang disimulasikan oleh Kementerian Sosial sebagai berikut :

Tabel 2.135
Capaian Indeks Kesejahteraan Sosial (IKESOS)
Se-Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025

Kabupaten/Kota	IKESOS Konversi	Peringkat
Kota Padang	58,886	1
Kota Bukittinggi	58,486	2
Kota Payakumbuh	58,342	3
Kota Pariaman	58,131	4
Kota Solok	58,091	5
Kabupaten Dharmasraya	57,692	6
Kabupaten Padang Pariaman	57,170	7
Kota Padang Panjang	57,168	8
Kabupaten Sijunjung	57,121	9
Kabupaten Tanah Datar	56,959	10
Kabupaten Lima Puluh Kota	56,760	11
Kabupaten Solok	56,760	12
Kota Sawahlunto	***56,701***	***13***
Kabupaten Agam	56,546	14
Kabupaten Pesisir Selatan	56,420	15
Kabupaten Solok Selatan	56,319	16
Kabupaten Pasaman Barat	56,119	17
Kabupaten Pasaman	55,870	18
Kabupaten Kepulauan Mentawai	55,080	19
Provinsi Sumatera Barat	**57,085**	

Sumber Data : Kementerian Sosial, 2025

Indeks Kesejahteraan Sosial merupakan indikator baru, yang penghitungannya baru disimulasikan dan disosialisasikan pada tahun 2025 oleh Kementerian Sosial. Dari hasil simulasi, Kota Sawahlunto berada pada posisi ke 13 se-Kota/Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat dengan perolehan angka 56,701 dengan kategori “Maju”, Perolehan capaian ini, mengindikasikan bahwa Kota Sawahlunto perlu berbenah dan memaksimalkan upaya dalam memajukan kesejahteraan sosial masyarakat baik itu dalam dimensi kebutuhan dasar, peranan sosial serta keberdayaan ekonomi.

II. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

7. Urusan Wajib Tenaga Kerja

- Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

Produktivitas adalah perbandingan antara jumlah output yang dihasilkan dengan jumlah input yang dibutuhkan untuk menghasilkan output tersebut (Husein Umar, dkk). Berdasarkan definisi tersebut maka dianalogikan output daerah adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB ADHK) suatu daerah dan input adalah jumlah tenaga kerja yang ada pada daerah tersebut :

Tabel 2.136
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHK (Rp. Miliar)	2760, 92	2829, 35	2941, 27	3072, 35	3195, 86
Pertumbuhan PDRB ADHK (%)	-1,27	2,48	3,96	4,46	4,02
Jumlah Tenaga Kerja (Jiwa)	30310	30186	32275	34018	36134
Pertumbuhan Tenaga Kerja %)	4,10	-0,41	6,92	5,40	6,22
Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto (Juta/Jiwa)	**91,09**	**93,73**	**91,13**	**90,32**	**88,44**

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025, Data Diolah 2025

Produktivitas Tenaga Kerja Kota Sawahlunto tiga tahun terakhir terus menerus mengalami penurunan, hal ini disebabkan peningkatan jumlah tenaga kerja (input) lebih besar dari peningkatan produksi (output), dimana jumlah tenaga kerja meningkat pada kisaran 4,10% - 6,92%, sementara produksi meningkat pada kisaran 2,48% - 4,46%.

8. Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kesetaraan gender dalam pembangunan manusia, dengan membandingkan pencapaian laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar : kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.

Tabel 2.137
Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	[UHH SP 2010] Indeks Pembangunan Gender (IPG) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	89,59	89,81	89,91	89,57	90,13
Kab. Pesisir Selatan	95,12	95,41	95,75	95,57	95,83
Kab. Solok	96,18	96,19	96,29	96,17	96,22
Kab. Sijunjung	93,03	93,40	94,16	94,28	94,39
Kab. Tanah Datar	97,57	97,58	97,62	97,73	97,48
Kab. Padang Pariaman	92,69	92,78	93,08	93,32	93,92
Kab. Agam	97,01	96,95	97,00	97,19	97,09
Kab. Lima Puluh Kota	95,03	94,91	94,85	94,77	94,86
Kab. Pasaman	92,45	92,47	92,51	92,7	92,91
Kab. Solok Selatan	95,08	95,14	95,20	95,27	95,53
Kab. Dharmasraya	88,31	88,32	88,56	89,11	89,71
Kab. Pasaman Barat	90,26	90,14	90,17	90,05	90,32
Kota Padang	93,64	93,81	93,85	93,94	94,04
Kota Solok	97,05	97,05	96,67	96,64	96,9
Kota Sawahlunto	***95,48***	***95,73***	***95,17***	***95,36***	***95,73***
Kota Padang Panjang	97,70	97,78	98,24	98,19	98,23
Kota Bukittinggi	98,89	98,99	99,36	99,17	98,66
Kota Payakumbuh	98,46	98,6	98,61	98,58	98,93
Kota Pariaman	98,49	98,62	98,64	98,07	98,11
Provinsi Sumatera Barat	**94,17**	**94,34**	**94,72**	**94,93**	**95,25**

Sumber Data : Berita Resmi BPS 8 April 2025

Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Sawahlunto berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat selama lima tahun terakhir dan lebih tinggi dari IPG Provinsi Sumatera Barat, namun merupakan yang terendah kedua setelah Kota Padang diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

- Indeks Ketimpangan Gender (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender (IKG) adalah ukuran yang mengukur tingkat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi, yaitu kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar tenaga kerja. Semakin besar nilai IKG, semakin besar pula ketimpangan gender di suatu wilayah.

Tabel 2.138
Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Kota Sawahlunto
Tahun 2020–2024

Kabupaten/Kota	Indeks Ketimpangan Gender Menurut Kabupaten/Kota				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Kepulauan Mentawai	0,855	0,851	0,85	0,851	0,849
Kab. Pesisir Selatan	0,492	0,505	0,517	0,482	0,468
Kab. Solok	0,449	0,48	0,403	0,423	0,377
Kab. Sijunjung	0,516	0,527	0,501	0,465	0,491
Kab. Tanah Datar	0,387	0,312	0,305	0,336	0,344
Kab. Padang Pariaman	0,778	0,75	0,763	0,751	0,722
Kab. Agam	0,384	0,359	0,239	0,162	0,355
Kab. Lima Puluh Kota	0,441	0,549	0,496	0,492	0,453
Kab. Pasaman	0,525	0,535	0,522	0,527	0,464
Kab. Solok Selatan	0,824	0,804	0,787	0,811	0,805
Kab. Dharmasraya	0,566	0,553	0,528	0,539	0,457
Kab. Pasaman Barat	0,554	0,532	0,519	0,494	0,419
Kota Padang	0,200	0,32	0,171	0,198	0,172
Kota Solok	0,270	0,19	0,18	0,182	0,147
Kota Sawahlunto	***0,285***	***0,184***	***0,223***	***0,199***	***0,270***
Kota Padang Panjang	0,153	0,192	0,153	0,135	0,081
Kota Bukittinggi	0,273	0,236	0,156	0,159	0,080
Kota Payakumbuh	0,279	0,325	0,295	0,153	0,175
Kota Pariaman	0,377	0,331	0,286	0,374	0,120
Provinsi Sumatera Barat	**0,503**	**0,455**	**0,43**	**0,425**	**0,381**

Sumber Data : Berita Resmi BPS 25 April 2025

Meskipun IKG Kota Sawahlunto lebih rendah dari IKG Provinsi Sumatera Barat, namun merupakan yang tertinggi diantara 7 kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Tingginya IKG menunjukkan bahwa kesetaraan gender di Kota Sawahlunto belum optimal atau ada kesenjangan yang besar antara pencapaian laki-laki dan perempuan, khususnya dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi.

- Indeks Perlindungan Anak (IPA)

Indeks Perlindungan Anak (IPA) adalah ukuran yang digunakan untuk menggambarkan pencapaian pembangunan perlindungan anak di Indonesia. IPA digunakan untuk menilai sejauh mana hak-hak anak terpenuhi dan sejauh mana anak-anak mendapatkan perlindungan khusus.

Tabel 2.139
Perkembangan Indeks Perlindungan Anak Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat Dan Nasional Tahun 2020-2024

Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
IPA Sawahlunto	na	65,70	67,61	65,47	na
IPA Provinsi Sumatera Barat	67,21	61,98	63,65	62,38	na
IPA Nasional	66,89	61,38	63,30	63,83	na

Sumber Data : SIGA KemenPPPA

IPA Kota Sawahlunto tahun 2021-2023 berfluktuasi dengan kecenderungan menurun. Meskipun demikian, IPA Kota Sawahlunto selalu berada di atas IPA Provinsi Sumatera Barat dan Nasional.

9. Urusan Wajib Pangan

- Indeks Ketahanan Pangan (IKP)

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Tabel 2.140
Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Ketahanan Pangan	67,36	69,82	73,85	84,38	83,45

Sumber Data : Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Tahun 2025

Perkembangan Indeks Ketahanan Pangan Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat yang mengindikasikan ketersediaan pangan yang cukup, baik dari segi jumlah maupun kualitas.

10. Urusan Wajib Pertanahan

- Indeks Tertib Administrasi Pertanahan

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (TAP) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan dan efektivitas administrasi pertanahan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ini melibatkan berbagai aspek seperti pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, dan penanganan hak adat, dengan tujuan menciptakan kepastian hukum dan keteraturan dalam pengelolaan tanah.

Tabel 2.141
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup (DKP2LH) Tahun 2025

Indeks Tertib Administrasi Pertanahan Kota Sawahlunto belum dihitung oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia.

11. Urusan Wajib Lingkungan Hidup

- Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu.

Tabel 2.142
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	62,74	62,39	62,89	63,10	60,89

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

IKLH Kota Sawahlunto berkisar antara 60 hingga 63,10 yang berada pada kategori "sedang". Penurunan IKLH Kota Sawahlunto ini disumbangkan oleh penurunan Indeks Kualitas Air (IKA) yang disebabkan badan air sungai tercemar. Hal ini berdasarkan pemantauan kualitas air tahun 2024 yang menunjukkan bahwa dari 14 titik pemantauan air, hanya 1 titik yang memenuhi baku mutu air, 4 titik pencemaran sedang dan 9 titik pencemaran ringan. Hal ini mencerminkan limbah rumah tangga yang belum terkelola dengan baik.

12. Urusan Wajib Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

- Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Administrasi Kependudukan adalah pengukuran tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Pelayanan ini mencakup pencatatan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan penerbitan dokumen kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, dan akta kelahiran.

Tabel 2.143
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan	80	85,41	85,88	88,39	91,06
Mutu	B	B	B	A	A

Sumber Data : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto 2025

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan Administrasi Kependudukan Kota Sawahlunto berkisar antara 80 hingga 91,06 yang sudah berada pada kategori "A".

13. Urusan Wajib Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) adalah alat bantu yang digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian dan perkembangan suatu desa melalui analisis dan nilai komposit dari berbagai indikator pembangunan. IDM mencakup aspek ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan lingkungan/ekologi.

IDM digunakan untuk mengklasifikasikan desa ke dalam lima status, yaitu desa sangat tertinggal, desa tertinggal, desa berkembang, desa maju, dan desa mandiri.

Tabel 2.144
Indeks Desa Membangun Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Desa Membangun	0,7004	0,7157	0,7433	0,7542	0,7876
Status	Berkembang	Maju	Maju	Maju	Maju

Sumber Data : Dirjen Pembangunan Desa Dan Perdesaan, Kemendes Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 2021- 2025

Kota Sawahlunto sudah berstatus maju sejak tahun 2021, dan menunggu satu langkah lagi untuk menuju status mandiri.

14. Urusan Wajib Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah alat ukur untuk menilai kualitas keluarga, dengan fokus pada ketentraman, kemandirian, dan kebahagiaan keluarga.

Tabel 2.145
Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto,
Provinsi Sumatera Barat dan Nasional Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
iBangga Kota Sawahlunto	na	54,05	57,77	64,28	63,88
iBangga Provinsi Sumatera Barat	51,74	53,54	56,12	60,99	61,20
iBangga Nasional	53,57	54,01	56,07	61,43	62,40

Sumber Data : BKKBN 2025

Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto selama periode 2020-2024 berada pada kriteria cukup baik (berkembang). Hal ini menandakan Indeks Pembangunan Keluarga di Kota Sawahlunto sudah semakin baik walaupun masih berada pada posisi berkembang. Indeks Pembangunan Keluarga Kota Sawahlunto ini berada di atas Indeks Pembangunan Keluarga Provinsi Sumatera Barat dan Nasional yang juga berada pada kriteria cukup baik (berkembang).

15. Urusan Wajib Perhubungan

- Rasio Konektivitas

Rasio konektivitas adalah ukuran yang menunjukkan tingkat konektivitas, sering digunakan dalam konteks transportasi atau jaringan. Ini bisa berupa rasio antara jumlah trayek yang melayani suatu wilayah dengan jumlah trayek yang dibutuhkan. Semakin tinggi rasio konektivitas, menunjukkan adanya peningkatan aksesibilitas, kemudahan mobilitas, dan kemungkinan untuk terhubung dengan lebih banyak orang atau wilayah.

Tabel 2.146
Rasio Konektivitas Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Konektivitas	0,44	0,56	0,58	0,25	0,23

Sumber Data : Dinas Perhubungan 2025

Indikator Rasio Konektivitas Kota Sawahlunto tahun 2023 dan tahun 2024 mengalami penurunan, hal ini disebabkan karena tidak ada lagi angkutan penumpang kota (angkot) di Kota Sawahlunto.

16. Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

- Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah

Nilai Indeks Transformasi Digital Nasional (TDN) untuk pilar pemerintah adalah bagian penting dalam mengukur kemajuan transformasi digital di Indonesia. Nilai ini menunjukkan tingkat kesiapan dan pelaksanaan tata kelola transformasi digital di pemerintah daerah, membantu pemerintah dalam menyusun perencanaan dan mengidentifikasi area prioritas, dan memberikan rekomendasi untuk mempercepat transformasi digital.

Tabel 2.147
Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Dinas Komunikasi Dan informatika Kota Sawahlunto 2025

Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah Kota Sawahlunto belum dihitung oleh Dinas Komunikasi dan informatika Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia dan rencananya akan mulai dihitung pada tahun 2026.

17. Urusan Wajib Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

- Kontribusi UMKM terhadap PDRB

Kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) adalah persentase Kontribusi UMKM terhadap PDRB (PDRB yang dihasilkan UMKM : PDRB Total) x 100%.

Tabel 2.148
Kontribusi UMKM Terhadap PDRB Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi UMKM Terhadap PDRB	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Sawahlunto 2025

Nilai PDRB yang dihasilkan UMKM belum dapat dihitung, perlu disepakati dengan Badan Pusat Statistik lapangan usaha yang mana saja yang tergolong PDRB UMKM, agar tidak duplikasi dengan indikator lainnya.

18. Urusan Wajib Penanaman Modal

- Persentase Peningkatan Investasi

Persentase peningkatan investasi adalah ukuran perubahan nilai realisasi investasi dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan periode sebelumnya, hal ini penting untuk mengukur pertumbuhan ekonomi, karena investasi yang meningkat

biasanya mengarah pada peningkatan produksi, penyerapan tenaga kerja, dan pertumbuhan pendapatan.

Tabel 2.149
Persentase Peningkatan Investasi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Total Investasi PMDN (Rp. Miliar)	200	28,28	45,83	112,59	212,79	252,65
Persentase Peningkatan Investasi	-	-85,86%	62,06%	145,67%	89,00%	18,73%

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Persentase peningkatan investasi di Kota Sawahlunto berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun.

19. Urusan Wajib Kepemudaan dan Olahraga

- Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur dan memantau kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. IPP memberikan gambaran tentang kondisi pembangunan pemuda secara komprehensif, mencakup aspek pembangunan individu, pembangunan penghidupan dan kesejahteraan, serta partisipasi dalam berbagai bidang kehidupan.

Tabel 2.150
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), 2025

Indeks Pembangunan Pemuda sampai saat ini belum dihitung di Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia.

- Indeks Partisipasi Olahraga

Indeks Partisipasi Olahraga merupakan salah satu indikator dalam *Sport Development Index* (SDI), yang mencerminkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan olahraga. Indeks ini dihitung berdasarkan persentase atau proporsi jumlah individu yang berpartisipasi dalam aktivitas olahraga atau aktivitas fisik secara teratur, seperti setidaknya tiga kali seminggu.

SDI adalah indeks gabungan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan keolahragaan di suatu wilayah atau negara. Selain partisipasi, SDI juga mempertimbangkan faktor-faktor lain seperti sumber daya manusia, ruang terbuka, literasi fisik, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa.

Tabel 2.151
Indeks Partisipasi Olahraga Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Partisipasi Olahraga	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), 2025

Indeks Partisipasi Olahraga sampai saat ini belum dihitung di Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia.

20. Urusan Wajib Statistik

- Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di tingkat pemerintah pusat dan daerah. IPS mengukur capaian dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia (SDI) dan data statistik sektoral. Nilai IPS mencerminkan bagaimana suatu wilayah atau lembaga menjalankan statistik sektoral, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan.

Tabel 2.152
Indeks Pembangunan Statistik
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	NA	NA	1,39	1,62	2,26
Prediket	-	-	Kurang	Kurang	Cukup

Sumber Data : Badan Pusat Statistik, Portal RB

Indeks Pembangunan Statistik Kota Sawahlunto masih rendah. Hal ini disebabkan beberapa hal, yaitu : 1).Penerapan interoperabilitas data belum dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto; 2). Data yang dihasilkan oleh produsen data belum dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi seperti ketersedian web service/API/sistem lainnya; 3).Penerapan Indikator Pemantauan Ketepatan Waktu Diseminasi, Penyediaan Format Data, dan Konsistensi Statistik belum dilakukan oleh seluruh produsen data di Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto; 4). Belum ada bukti dukung yang memperlihatkan ketepatan waktu diseminasi data sesuai dengan jadwal yang dijanjikan; 5). Bentuk/format data yang didiseminasikan belum memberikan kemudahan kepada pengguna dalam mengakses dan memanfaatkan data statistic; 6). Data yang dihasilkan belum mampu untuk dapat konsisten jika diperbandingkan dengan berbagai sumber data; 7).Penerapan Aspek SDM yang Memadai dan Kapabel Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto masih bernilai kurang; 8).Pada Indikator Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Statistik dan Tingkat Kematangan Penerapan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Manajemen Data belum dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Sawahlunto.; 9). Belum adanya analisis jabatan, analisis beban kerja, SDM yang tersertifikasi kompetensi bidang statistic; 10).belum adanya dokumen kebijakan yang mengatur aspek ini; 11). Pemerintah Daerah Kota

Sawahlunto belum menerapkan Pemanfaatan Big Data yang menghasilkan data statistic sebagai data pendukung.

21. Urusan Wajib Persandian

- Indeks SPBE

Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan. Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain.

Tabel 2.153
Perkembangan Indeks SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto
Tahun 2020 – 2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	2,88	2,07	2,84	3,09	3,41
Prediket	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik

Sumber Data : Laporan Hasil Pemantauan SPBE

Berdasarkan tabel di atas, capaian SPBE Pemerintah Kota Sawahlunto tahun 2020-2024 terus meningkat, namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu : a). konsep kebijakan internal Siklus Pembangunan Aplikasi SPBE di Pemerintah Kota Sawahlunto belum tersedia atau masih dalam bentuk draft (terdapat SOP yang menggunakan SDLC dalam bentuk file excel); b). Pemerintah Kota Sawahlunto menerapkan kegiatan Manajemen Pengetahuan tanpa program kegiatan yang terarah dan terencana; c). Pemerintah Kota Sawahlunto belum melaksanakan Audit Keamanan;

22. Urusan Wajib Kebudayaan

- Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)

Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja pembangunan kebudayaan di tingkat nasional dan daerah. IPK tidak mengukur nilai budaya suatu daerah, melainkan mengukur kemajuan pembangunan kebudayaan itu sendiri. IPK disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), Bappenas, dan BPS.

Tabel 2.154
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Kemendikbudristek 2025

Indeks Pembangunan Kebudayaan sampai saat ini belum dihitung di Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia.

23. Urusan Wajib Perpustakaan

- Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi (membaca, menulis, dan memahami teks) tertulis masyarakat.

Tabel 2.155
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kota Sawahlunto	72,13	72,43	74,14	88,33	94,81

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2024-2025,

IPLM Kota Sawahlunto meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2024 terdapat 6 unsur dari 7 unsur pembangunan literasi masyarakat yang sudah mendapat nilai sempurna (1). Satu unsur pembangunan literasi masyarakat yang belum mendapatkan nilai sempurna adalah unsur pemerataan layanan perpustakaan dengan capaian sebesar 0,6369.

24. Urusan Wajib Kearsipan

- Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah

Pengawasan kearsipan dilaksanakan untuk menilai kinerja penyelenggaraan kearsipan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan mengukur kualitas pengelolaan arsip elektronik dalam kerangka SPBE melalui Evaluasi Reformasi Birokrasi. Pengawasan kearsipan juga mengukur tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan kearsipan, sehingga ANRI juga melakukan identifikasi permasalahan kinerja yang berpotensi pengenaan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Tabel 2.156
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan
Pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan Pada Lingkup Pemerintahan Daerah	61,29	NA	35,05	48,05	43,18

Sumber Data : Arsip Nasional Republik Indonesia dalam Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025

Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah Kota Sawahlunto meningkat setiap tahunnya, namun masih tergolong rendah.

III. Urusan Pilihan

25. Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan

- Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)

Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kemampuan tukar hasil budidaya perikanan (seperti ikan) terhadap barang/jasa yang dibutuhkan oleh pembudidaya, baik untuk produksi maupun konsumsi rumah tangga. Secara sederhana, NTPi mengukur seberapa banyak barang/jasa yang bisa dibeli pembudidaya dengan hasil budidayanya.

NTPi dihitung dengan membandingkan indeks harga yang diterima (IT) dengan indeks harga yang dibayar (IB) dan dikalikan 100% dengan rumus :
NTPi = (IT : IB) x 100%.

Tabel 2.157
Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi) sampai saat ini belum dihitung di Kota Sawahlunto sehingga data belum tersedia.

26. Urusan Pilihan Pariwisata

- Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum mencerminkan rasio nilai tambah lapangan usaha Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum terhadap total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum suatu daerah, semakin tinggi rasionya terhadap PDRB daerah tersebut, ceteris paribus.

Tabel 2.158
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Terhadap PDRB
Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum Terhadap PDRB Kota Sawahlunto	2,06	2,18	2,22	2,22	2,30

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum terhadap PDRB Kota Sawahlunto meningkat setiap tahunnya, namun perannya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto sangat rendah. Hal ini tercermin dari kontribusi lapangan usaha Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum terhadap nilai total PDRB yang berada pada posisi ke-12 pada struktur perekonomian Kota Sawahlunto.

27. Urusan Pilihan Pertanian

- Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai tukar petani merupakan salah satu indikator dalam menentukan tingkat kesejahteraan petani. Nilai Tukar Petani merupakan rasio Indeks harga yang diterima petani (IT) terhadap Indeks harga yang dibayar petani (IB).

Tabel 2.159
Nilai Tukar Petani
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Nilai Tukar Petani	106,55	116,57	125,43	130,36	151,51

Sumber Data : Provinsi Sumatera Barat Dalam Angka 2025

Nilai tukar petani sudah lebih dari 100 yang berarti petani mengalami *surplus*, karena nilai jual hasil pertanian yang diproduksi petani *lebih besar* dari nilai yang harus dibayarkan oleh petani atau dengan kata lain petani sudah terpenuhi kebutuhan konsumsi rumah tangganya maupun kebutuhan untuk proses produksi pertaniannya.

28. Urusan Pilihan Perdagangan

- Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB mencerminkan rasio nilai tambah sektor Perdagangan terhadap total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Perdagangan suatu daerah, semakin tinggi rasionya terhadap PDRB daerah tersebut, ceteris paribus.

Tabel 2.160
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB Kota Sawahlunto	14,98	14,67	14,93	15,05	15,47

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Sektor Perdagangan merupakan lapangan usaha yang paling dominan dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Hal ini tercermin dari kontribusi lapangan usaha Perdagangan terhadap nilai total PDRB yang berada pada posisi pertama pada struktur perekonomian Kota Sawahlunto.

Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB pada Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat.

29. Urusan Pilihan Perindustrian

- Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB

Kontribusi sektor Industri Pengolahan terhadap PDRB mencerminkan rasio nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan suatu daerah, semakin tinggi rasionya terhadap PDRB daerah tersebut, ceteris paribus.

Tabel 2.161
Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB Kota Sawahlunto	10,82	11,22	10,80	10,87	11,23

Sumber Data : Kota Sawahlunto Dalam Angka 2025

Industri pengolahan merupakan salah satu lapangan usaha yang dominan dalam perekonomian Kota Sawahlunto. Hal ini tercermin dari kontribusi lapangan

usaha industri pengolahan terhadap nilai total PDRB yang berada pada posisi ketiga terbesar pada struktur perekonomian Kota Sawahlunto.

Kontribusi lapangan usaha Industri pengolahan terhadap PDRB pada Kota Sawahlunto selama tahun 2020-2024 berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat.

IV. Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan

30. Sekretariat Daerah

- Indeks Reformasi Birokrasi

Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah alat ukur yang digunakan pemerintah untuk menilai dan memantau kemajuan serta kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi di berbagai instansi pemerintah. IRB menggambarkan sejauh mana perbaikan tata kelola pemerintahan telah dilakukan, dengan tujuan mencapai pemerintahan yang efektif, efisien, bersih dari KKN, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Indeks RB dikategorikan berdasarkan nilai yang diperoleh, dengan predikat seperti Istimewa, Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Cukup, Buruk, dan Sangat Buruk.

Tabel 2.162
Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

No	Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Reformasi Birokrasi	52,77	53,21	55,68	64,35	75,04
2	Prediket	CC	CC	CC	B	BB

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Sawahlunto sudah baik, namun masih perlu perbaikan, diantaranya mempromosikan kanal aduan, menyelesaikan aduan, mempercepat tindak lanjut.

31. Sekretariat DPRD

- Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD

Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD merupakan indikator penting untuk mengukur efektivitas dan kualitas pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD. Pelayanan yang baik dari Sekretariat DPRD dapat mendukung kinerja DPRD dalam menjalankan tugasnya, seperti legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Tabel 2.163
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan
Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Sekretariat DPRD

Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD Kota Sawahlunto belum dihitung sampai tahun 2024 sehingga datanya belum tersedia.

V. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

32. Perencanaan

- Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah (IPPD) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kualitas perencanaan pembangunan di tingkat daerah. IPPD mengukur sejauh mana perencanaan pembangunan disusun, diintegrasikan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional. Indeks ini membantu pemerintah daerah mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas perencanaan pembangunan lokal.

IPPD mengukur berbagai aspek perencanaan, seperti proses penyusunan rencana, keterlibatan stakeholder, keterpaduan rencana dengan rencana pembangunan nasional, dan evaluasi pelaksanaan rencana.

Tabel 2.164
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Barenlitbangda Kota Sawahlunto Tahun 2025

Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto belum dihitung sampai tahun 2024 sehingga datanya belum tersedia.

33. Keuangan

- Opini BPK Atas Laporan Keuangan

Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan penilaian profesional BPK mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan suatu institusi yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Opini BPK menggambarkan tingkat kedisiplinan keuangan suatu instansi berdasarkan empat kriteria tersebut.

Tabel 2.165
Opini BPK Kota Sawahlunto
Tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Kunci	2020	2021	2022	2023	2024
Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Sumber Data : BPKAD Kota Sawahlunto Tahun 2024

Pemerintah Kota Sawahlunto sudah memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian terhadap Laporan Keuangan selama 9 tahun. Hal ini menyatakan bahwa laporan keuangan Kota Sawahlunto telah menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAP/SPKN). Atas prestasi tersebut Pemerintah Kota Sawahlunto memperoleh reward dari pemerintah pusat berupa penambahan anggaran.

34. Kepegawaian

- Indeks Profesionalitas ASN

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya.

Tabel 2.166
Indeks Profesionalitas ASN Kota Sawahlunto
Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN	63,00	51,97	62,40	77,52	77,47

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara Kanreg XII Tahun 2022-2025
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2021

Indeks Profesionalitas ASN Kota Sawahlunto meningkat dari tahun ke tahun, namun masih tergolong kategori "sedang", namun lebih rendah dari Indeks Profesionalitas ASN Provinsi Sumatera Barat yang sudah berada pada kategori tinggi (82,57).

35. Pendidikan dan Pelatihan

- Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi

Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) memiliki empat dimensi, salah satunya adalah Dimensi Kompetensi. Dimensi Kompetensi ini memiliki bobot 40% dalam pengukuran IP ASN. Kompetensi ASN menggambarkan kemampuan individu yang terdiri dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan sikap (attitude) yang relevan dengan tugas jabatan.

Tabel 2.167
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi
Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi	NA	NA	10,31	26,24	25,90

Sumber Data : Badan Kepegawaian Negara Kanreg XII Tahun 2021-2025

Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi Kota Sawahlunto masih tergolong rendah yang disebabkan sangat sedikitnya kegiatan pengembangan kompetensi bagi ASN.

36. Penelitian dan Pengembangan

- Persentase Kebijakan Berbasis Bukti

Persentase kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*) sulit ditentukan secara pasti karena tidak ada data yang terpusat dan terukur tentang jumlah kebijakan yang benar-benar didasarkan pada bukti. Namun, secara umum, pendekatan ini semakin populer dan digunakan dalam pembuatan kebijakan di berbagai bidang, termasuk kesehatan, pendidikan, dan sosial.

Kebijakan berbasis bukti sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat efektif, efisien, dan didasarkan pada data yang kuat. Pendekatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan mendorong pembangunan yang berkelanjutan.

Tabel 2.168
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti
Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2025

Persentase kebijakan berbasis bukti Kota Sawahlunto belum dihitung sampai tahun 2024 sehingga datanya belum tersedia.

37. Pengawasan

- Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Penilaian atas Maturitas Penyelenggaraan SPIP adalah penilaian atas tingkat kematangan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian yang meliputi efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penilaian maturitas SPIP menggunakan kerangka yang terdiri dari enam level, yang menggambarkan tingkat kematangan SPIP dalam berbagai aspek.

- Level 0 (belum) ada : Maksudnya SPIP belum diterapkan atau belum ada dalam organisasi.
- Level 1 (Rintisan : SPIP mulai diimplementasikan, namun masih dalam tahap awal dan belum terstruktur
- Level 2 (Berkembang) : SPIP mulai terstruktur dan diterapkan, namun masih memerlukan pemantauan dan perbaikan
- Level 3 (Terdefinisi): : SPIP telah terdefinisi dengan baik dan terdokumentasi, serta diterapkan secara konsisten
- Level 4 (Terkelola dan Terukur) : SPIP telah terkelola dan terukur, serta menunjukkan kinerja yang efektif
- Level 5 (Optimum) : SPIP telah mencapai tingkat optimal dan merupakan model bagi instansi lain

Tabel 2.169
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3,00 Terdefinisi)	3,00 (Terdefinisi)	2,00 (Berkembang)	2,98 (Berkembang)	3,02 (Terdefinisi)

Sumber Data : Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021-2025

Tingkat kematangan SPIP sudah terdefinisi dengan baik, namun penetapan tujuan Pemerintah Kota Sawahlunto belum sepenuhnya optimal karena masih terdapat sasaran strategis yang belum berorientasi hasil, indikator tidak relevan dan target kinerja yang tidak tepat. Di samping itu sasaran program belum tepat, belum selaras dengan sasaran diatasnya dan tidak tepat, indikator kinerja program, kegiatan, sub kegiatan tidak cukup, tidak spesifik dan relevan, serta target kinerja program, kegiatan,

sub kegiatan yang tidak SMART, tidak proyektif dan tidak memperhatikan capaian tahun sebelumnya.

38. Pemerintahan Umum

- Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia adalah indikator komposit yang menunjukkan perkembangan demokrasi di Indonesia. Indikator ini hanya diukur sampai level Provinsi, sedangkan untuk Kota Sawahlunto indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan demokrasi adalah Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu.

Tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu merupakan bagian dari penilaian perkembangan demokrasi di Indonesia. Meningkatnya keterlibatan masyarakat dalam Pemilu menunjukkan semakin kuatnya tatanan demokrasi dalam sebuah negara.

Tabel 2.170
Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu Di Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

No	Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilu (Memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota)	78,91	-	-	-	83,50
2	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah	78,62	-	-	-	78,93
3	Tingkat Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur	54,27	-	-	-	79,90

Sumber Data : Badan Kesbangpol 2025

Pada tahun 2024 dilaksanakan Pemilu pada tanggal 14 Februari 2024 dan Pilkada pada tanggal 27 November 2024. Tingkat Partisipasi Pemilih di Kota Sawahlunto tahun 2024 lebih baik dari tahun 2020.

- Indeks Harmoni Indonesia

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) adalah instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni dan kerukunan di berbagai wilayah Indonesia, khususnya pada tingkat kabupaten/kota. IHaI memiliki empat dimensi utama: harmoni ekonomi, harmoni sosial, harmoni budaya/kultural, dan harmoni religius.

Tabel 2.171
Indeks Harmoni Indonesia Kota Sawahlunto Tahun 2020 - 2024

Indikator Kinerja Kunci	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Harmoni Indonesia	NA	NA	NA	NA	NA

Sumber Data : Badan Kesbangpol 2025

Indeks Harmoni Indonesia (IHaI) tahun 2024 untuk Kota Sawahlunto belum tersedia secara resmi. Data IHaI biasanya dirilis setelah proses pengukuran dan analisis selesai, yang biasanya memakan waktu beberapa bulan setelah tahun berjalan. Sosialisasi Pengukuran Indeks Harmoni Indonesia (IHAI) Tahun 2025 diselenggarakan oleh Humas Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bertempat di Aula Rumah Dinas Walikota Bukittinggi, Jumat, 24 Januari 2025.

2.1.5 EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RPD TAHUN 2024

Evaluasi terhadap realisasi kinerja tersebut bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang ditetapkan menjadi Indikator kinerja Makro, Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). Indicator Kinerja makro merupakan alat ukur untuk mengetahui perkembangan Dari indicator kinerja yang berlaku secara nasional. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Sedangkan Indikator Kinerja Daerah (IKD) merupakan indikator kinerja yang mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM), indikator kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan provinsi, nasional serta Rencana Strategis Kementerian/Lembaga terkait.

A. Perkembangan Capaian Indikator Makro Pembangunan

Untuk mengukur tujuan pembangunan Kota Sawahlunto secara makro, baik itu dari pendapatan masyarakat, kemampuan ekonomi, kemiskinan, pembangunan manusia, pemerataan pendapatan dan pengangguran dapat dari pencapaian Indicator Kinerja Makro. Berikut capaian Indicator Kinerja Makro hingga tahun 2024 dengan tetap memperhatikan arahan dari Provinsi Sumatera Barat

Tabel 2.172
CAPAIAN INDIKATOR KINERJA MAKRO PEMBANGUNAN
KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2024

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2024) (%)
				2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	8	11=8	12= 8/5x100	13=11/4x100
1	Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)	((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%	4,98	4,48	4,02	4,02	89,73	80,72
2	PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)	77,11	71,6	73,59	73,59	102,78	95,44
3	Gini Ratio	Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS	0,28	0,289	0,299	0,299	96,54	106,79
4	Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%	2,17	2,19	2,33	2,33	92,63	92,63
5	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,75	4,92	5,55	5,55	83,16	83,16
6	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Pengukuran indeks pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia	75,74	74,74	76,68	76,68	102,60	101,24
7	Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,89	70,69	74,12	74,12	104,85	104,56

No	Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun)	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Tingkat Capaian Kinerja RPD sampai tahun n (2024) (%)
				2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	8	11=8	12= 8/5x100	13=11/4x100
8	Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	14,01	13,55	13,86	13,86	102,29	98,93
9	Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	10,72	10,57	10,53	10,53	99,62	98,23
10	Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)	11,47	11,15	11,187	11,187	100,33	97,53

Sumber Data : Olahan Barenlitbangda tahun 2025

Berdasarkan tabel diatas, secara keseluruhan capaian indicator makro Kota sawahlunto sangat baik, terlihat 8 dari 10 indikator yang capaiannya di atas 90% kecuali laju pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran terbuka. Tidak tercapainya tartget pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan efek ketidakpastian ekonomi global yang terjadi secara umum, menurunnya konsumsi rumah tangga hingga faktor lainnya serti inflasi. Sementara untuk tingkat pengangguran terjadi akibat tidak sebandingnya jumlah lapangan pekerjaan yang tersedia dengan jumlah pencari kerja, selain itu belum relevannya keterampilan yang dimiliki pencari kerja dengan kebutuhaan di tempat kerja juga menjadi salah satu factor meningkatnya pengangguran di Kota Sawahlunto.

B. Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama.

Dengan merumuskan indikator kinerja utama, instansi pemerintah bisa mengetahui kinerja mereka selama ini. Selain itu, indikator kinerja utama juga dapat meningkatkan kinerja mereka untuk ke depannya. Sehingga mereka pun bisa meraih tujuan, sasaran, dan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Kriteria penyusunan IKU:

1. **Spesifik:** indikator kinerja utama harus dibuat sespesifik mungkin dan juga harus mengacu pada hal yang akan diukur oleh indikator tersebut (dalam hal ini kinerja karyawan dan instansi terkait). Hal tersebut dilakukan agar orang-orang yang hendak menyusun IKU mempunyai persepsi yang sama terkait IKU yang mereka buat.
2. ***Measurable*:** IKU harus dapat diukur secara objektif, entah itu dengan pendekatan kuantitatif maupun kualitatif.

3. ***Achievable*:** data yang dipakai dalam IKU haruslah dapat dikumpulkan oleh pihak instansi terkait.
4. ***Relevant*:** IKU yang dibuat harus bisa menggambarkan kinerja sebuah instansi secara akurat dan relevan dengan kondisi riil instansi tersebut.
5. ***Timelines*:** IKU yang telah disusun harus bisa menggambarkan data berupa perkembangan kinerja suatu instansi dalam kurun waktu tertentu. Selain itu, sedapat mungkin IKU bisa lebih fleksibel kalau nanti ada sejumlah perubahan di dalamnya.

Pada tahun 2024 rata-rata capaian IKU Kota Sawahlunto adalah 87,69% dengan predikat 'tinggi'. Capaian ini sudah cukup bagus mengingat ini adalah evaluasi tahun pertama dari Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kota sawahlunto Tahun 2024-2026. Beberapa indikator IKU belum ada realisasi karena data menunggu perilisan dari BPS. Rincian capaian IKU Kota Sawahlunto secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah :

Tabel 2.173
Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Sawahlunto Tahun 2024

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Keterangan
					2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	6	9	12= 9	13=9/6x100	15
1	**Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya**	**Indeks Pembangunan Manusia (IPM)**	**Pengukuran indeks pembangunan dari harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah, dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia**	**78,29**	**76,01**	76,68	76,68	100,88	
		Angka Usia Harapan Hidup (AHH) (Tahun)	Angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	70,6	70,4	74,78	74,78	106,22	
		Prevalensi Stunting	(Jumlah anak balita sangat pendek (stunting) pada waktu tertentu/jumlah anak balita pada waktu yang sama) x 100 %	10,6	14	20	20	57,14	
		Angka Harapan Lama Sekolah (AHLS)	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.	14,75	13,75	13,86	13,86	100,80	
		Angka Rata-rata Lama Sekolah (ARRLS)	Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun ke atas yang telah diselesaikan dalam pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang)	11,65	11,15	10,53	10,53	94,44	
		Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender	95,79	95,77	95,73	95,73	99,96	
		Penghargaan kota layak anak (kategori)	Penghargaan KLA diberikan kepada daerah yang mempunyai komitmen tinggi untuk mendukung pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, melalui proses evaluasi yang dilakukan oleh tim dari Kemen PPPA, tim dari Kementerian/Lembaga dan tim independen	KLA	utama	utama	utama	100,00	

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Keterangan
					2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	6	9	12= 9	13=9/6x100	15
		Indeks Pembangunan Literasi masyarakat	Pengukuran terhadap usaha yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah (tingkat provinsi dan kabupaten/kota) dalam membina dan mengembangkan perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat untuk mencapai budaya literasi masyarakat	74,7	74,5	94,81	94,81	127,26	
		Persentase Pelestarian warisan Budaya (%)	(Jumlah warisan budaya yang dilestarikan/Jumlah warisan budaya) x 100%	78	69	68	68	98,55	
2	**Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**	**Indeks Pembangunan Infrastruktur Wilayah**	**jumlah persentase infrastruktur dasar (jalan, air minum, sanitasi) dalam kondisi baik/tiga**	**86**	**85**	72,13	72,13	84,86	
		Persentase infrastruktur dasar dalam kondisi baik	(Jumlah Persentase kondisi jalan, jembatan, irigasi, gedung pemerintahan dan drainase dalam kondisi baik) / 5	72	70,35	73,07	73,07	103,87	
		Persentase RT yang memiliki air akses terhadap layanan sumber air minum layak (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100 %	98,35	97,1	96,21	96,21	99,08	
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak (%) (SDGs)	(Jumlah RT yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi yang layak/ total jumlah rumah tangga) x 100 %	88,7	86,5	83,05	83,05	96,01	
		Rasio luas daerah irigasi yang dilayani jaringan irigasi	(luas daerah yang dilayani jaringan irigasi/total luas daerah) x 100%	0,71	0,52	0,59	0,59	113,46	
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKL)	Gambaran indikasi lingkungan hidup dari indeks pencemaran air, pencemaran udara dan tutupan lahan dengan proporsi 30 % IKA, 30 % IKU, 40 % IKTL)	67,87	65,15	60,89	60,89	93,46	

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Keterangan
					2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	6	9	12= 9	13=9/6x100	15
		Persentase Kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang	perbandingan antara realisasi RTRW dengan rencana peruntukan Ruang	88,32	86,23	50	50	57,98	
		Persentase RTLH (%)	(Jumlah RTLH/Jumlah Rumah) x 100 %	7	7,16	7,16	7,16	100,00	
		Persentase perumahan yang sudah dilengkapi PSU (prasarana, sarana dan utilitas umum)	Jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU / jumlah unit rumah x 100 %	87	84	84	84	100,00	
		Persentase tanah pemerintah yang tertib administrasi	Jumlah bidang tanah pemerintah yang bersertifikat/jumlah tanah pemerintah x 100 %	30,6	23,31	5,82	5,82	24,96	
		Indeks Ketahanan daerah	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana daerah	0,57	0,55	0,43	0,43	78,18	
		Rasio Konektivitas kota	(IK1 x bobot angkutan jalan) + IK2 x bobot angkutan sungai, danau dan penyeberangan)	0,64	0,6	0,23	0,23	38,33	
		Kinerja lalu lintas	(Volume lalu lintas/kapasitas jalan) x 100 %	68	66	66	66	100,00	
3	**Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dan produk lokal**	**Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (SDGs)**	**((Nilai PDRB ADHK Tahun n dikurangi Nilai PDRB ADHK tahun n-1)/ Nilai PDRB ADHK tahun n-1) x 100%**	**5,12**	**4,72**	4,02	4,02	85,17	
		Gini Ratio	**Indeks yang di gunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh yang di keluarkan BPS**	**0,280**	**0,289**	0,299	0,299	96,54	
		PDRB Perkapita (Juta Rupiah) (SDGs)	**PDRB ADHB/(Penduduk Pertengahan tahun)**	**71,12**	**66,12**	73,59	73,59	111,30	

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Keterangan
					2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	6	9	12= 9	13=9/6x100	15
		Tingkat Kemiskinan (%)(SDGs)	**(Jumlah Penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan / jumlah penduduk) x 100%**	**2,12**	**2,14**	2,33	2,33	91,12	
		Pengeluaran perkapita (Daya beli masyarakat) (Ribu Rupiah)	**Biaya yang dikeluarkan untuk konsumsi semua anggota rumah sebulan dibagi dengan banyaknya anggota rumah tangga (dijadikan pertahun)**	**12,62**	**11,78**	11,187	11,187	94,97	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)(SDGs)	Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja/Jumlah penduduk angkatan kerja x 100%	4,75	4,92	5,55	5,55	87,20	
		Persentase Kontribusi sektor Pariwisata pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor Penyediaan akomodasi dan restoran	2,34	2,26	2,26	2,26	100,00	
		Persentase Kontribusi sektor Industri Pengolahan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor industri	12,06	11,5	11,5	11,5	100,00	
		Persentase Kontribusi sektor Perdagangan pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB dari sektor Perdagangan	14,73	14,69	14,94	14,94	101,70	
		Indeks Ketahanan Pangan	Indeks yang digunakan untuk mengetahui ketahanan pangan suatu daerah. Indeks ini terdiri dari 3 dimensi yaitu dimensi ketersediaan pangan, keterjangkauan/akses pangan dan pemanfaatan pangan.	70,56	70,16	83,45	83,45	105,26	
		Persentase Kontribusi sektor Pertanian pada PDRB (%)	Kontribusi PDRB ADHB sektor pertanian dan perikanan	9,08	9	9	9	100,00	
		Persentase peningkatan nilai investasi (%)	(jumlah investasi tahun n dikurangi jumlah investasi tahun n-1) / jumlah investasi tahun n-1 x 100%	27,07	26,98	18,73	18,73	69,42	

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Keterangan
					2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	6	9	12= 9	13=9/6x100	15
		Persentase masyarakat yang mendapatkan perlindungan sosial	Jumlah lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial yang terfasilitasi / Jumlah total lansia, penyandang disabilitas, gangguan jiwa & penyandang masalah kesejahteraan sosial x 100%	100	97	100	100	103,09	
		Persentase partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri	(Jumlah pemuda yang berwirausaha/jumlah pemuda) x 100%	16,2	12,2	2,53	2,53	20,74	
4	**Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif**	**Indeks Reformasi Birokrasi**	**Penilaian keberhasilan pencapaian reformasi birokrasi di suatu Pemerintah Daerah oleh Kemenpan RB**	**54,2**	**53,54**	74,78	74,78	139,67	
		Indeks Inovasi Daerah	**Standar Penilaian Kemendagri atas Inovasi Daerah (Innovation Government Award)**	**66,01**	**60,01**	72,87	72,87	121,43	
		Indeks kepuasan Masyarakat	**Data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggaraan pelayanan publik**	**84,84**	**82,42**	84,61	84,61	102,66	
		Nilai SAKIP	Penilaian Kemenpan RB terhadap laporan kinerja pemerintah daerah	63,35	62,19	64	64	102,91	
		IPKD (Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah)	penilaian terhadap Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	78	76	70,785	70,785	93,14	
		Persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah %)	(Nilai PAD dibagi dengan total pendapatan)x 100%	12,43	11,74	10,21	10,21	86,97	
		Indeks Ketahanan Nasional	kondisi dinamis bangsa indonesia yang berisi keuletan dan ketangguhan dalam menghadapi dan mengatasi segala	2,91	2,89	2,87	2,87	99,31	

Tujuan		Indikator Kinerja	Definisi Operasional/Perhitungan	Target Akhir Periode RPD (2026)	Target (Tahun)	Realisasi (Tahun	Realisasi Capaian Kinerja hingga Tahun n (2024)	Tingkat Capaian (Tahun) (%)	Keterangan
					2024	2024		2024	
1	2	3	4	5	6	9	12= 9	13=9/6x100	15
			ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik yang datang dari luar maupun dari dalam negeri langsung atau tidak langsung						
		Persentase Penurunan kasus pelanggaran perda (%)	(jumlah kasus Pelanggaran perda tahun (n-1) -jumlah kasus pelanggaran perda tahun n)/ jumlah kasus pelanggaran perda tahun (n) x 100%	0,02	0,11	3,2	3,2	2909,09	
		Indeks Pembangunan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Penilaian dari Kemenpan RB terhadap penggunaan sistem informasi teknologi oleh Pemerintah daerah	2,93	2,35	3,41	3,41	145,11	
		Indeks Profesionalitas ASN	Ukuran kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya	82	78	78	78	100,00	

1. **Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya**

   Pada tujuan Terwujudnya SDM yang berkualitas dan berkarakter yang dilandasi agama dan budaya terdapat 9 indikator kinerja dimana 8 indikator diantaranya mencapai target yang telah ditetapkan, 1 indikator yaitu prevalensi stunting tercapai 57,14% dengan predikat rendah. Perlu diperhatikan bahwa penanganan stunting merupakan pekerjaan kolaborasi yang melibatkan beberapa OPD sekaligus sehingga dapat diperoleh hasil yang baik, kedepannya diharapkan komunikasi dan koordinasi semakin bagus sehingga dapat mengintervensi kegiatan dalam rangka penurunan angka stunting.

2. **Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan**

   Pada tujuan Terciptanya infrastruktur yang berkualitas dan berwawasan lingkungan terdapat 13 indikator kinerja yang ditetapkan. Dari 13 indikator tersebut, 9 indikator tercapai dan 4 indikator tidak tercapai. Indikator yang tidak tercapai tersebut diantaranya adalah persentase kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang, persentas tanah pemerintah yang tertib administrasi, indeks ketahanan daerah dan rasio konektivitas kota. Beberapa factor penyebab diantaranya adalah keterbatasan kondisi APBD dan penurunan jumlah transfer dana dari pemerintah pusat dan provinsi, perlu diketahui bahwa Kota Sawahlunto masih sangat bergantung terhadap alokasi dana dari pemerintah pusat hingga saat ini.

3. **Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dan produk lokal**

   Pada tujuan Terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan potensi pariwisata dan produk lokal terdapat 15 indikator yang ditetapkan, dimana 13 diantaranya tercapai, dan 2 indikator tidak tercapai yaitu persentase peningkatan investasi dan persentase partisipasi pemuda dalam ekonomi mandiri. Salah satu penyebab kecilnya angka investasi di Kota Sawahlunto adalah karena Kota Sawahlunto bukan merupakan kota industri selain itu kondisi lahan yang sebagian masih dimiliki oleh PTBA dan banyaknya tanah ulayat masyarakat turut menghambat peningkatan investasi di Kota Sawahlunto. Sementara untuk rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan perekonomian di Kota Sawahlunto secara umum disebabkan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung seperti pelatihan-pelatihan untuk peningkatan keterampilan dan ketersediaan jalur pemasaran dan pasar (pembeli, pengguna), selain itu kondisi ekonomi yang kurang stabil juga menjadi salah satu faktor dalam rendahnya partisipasi pemuda ini.

4. **Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif**

Pada tujuan Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang melayani dan inovatif terdapat 10 indikator yang telah ditetapkan, dan hampir seluruhnya tercapai. Untuk indikator persentase penurunan kasus pelanggaran perda bahkan tercapai sangat tinggi, dari 0,11 % target yang ditetapkan tercapai 3,2% penurunan kasus sepanjang tahun 2024, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kota Sawahlunto secara umum sudah mengarah menuju masyarakat yang tertib dan menjaga trantibum. Kemudian untuk persentase kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah juga tercapai 86,97%, kedepannya diharapkan capaian PAD dapat lebih baik lagi sehingga dapat digunakan dalam kegiatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan indikator kinerja tersebut juga dapat dilihat bahwa tatakelola pemerintahan di Kota sawahlunto secara umum sudah cukup baik di tahun 2024.

2.1.6 CAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KEWENANGAN KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020-2024

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah maka Standar Pelayanan Minimal (SPM) tidak lagi dimaknai dalam kontekstual sebagai norma, standar, prosedur dan kriteria. SPM merupakan ketentuan mengenai jenis-jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal yang dikemudian dinyatakan dicabut dan diganti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, pemerintah telah menetapkan SPM urusan pemerintahan wajib yang berkaitan Pelayanan Dasar yang terdiri dari Bidang :

a. Pendidikan
b. Kesehatan
c. Pekerjaan Umum
d. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
f. Sosial

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Pemerintah Kota Sawahlunto menyusun target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dan sekaligus merumuskan program dan kegiatan dalam rangka pencapaiannya sesuai dengan kondisi keuangan daerah. Untuk pencapaian target program dan kegiatan SPM dari tahun 2020 sampai tahun 2024 dapat dilihat ada tabel dibawah ini :

Tabel 2.174
CAPAIAN SPM KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020-2024

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	**PENDIDIKAN**											**97,65**
	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 15 Tahun yang berpartisipas di dalam Pendidikan Dasar (SD/MI, SMP/MT (%)	100	100	100	100	100	92,09	100	80	100	97,56
	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7 - 18 Tahun yang belum menyelesaika n pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan Kesetaraan (%)	100	100	100	100	100	56,7	50,3	80	100	98,23
	Pendidika n Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi Jumlah Warga Negara Usia 5 - 6 Tahun yang berpartisipasi (%)	100	100	100	100	100	93,27	100	80	100	97,15
2	**KESEHATAN**											**87,46**
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	56,7	71,7	80	69,03	69,92
	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapat pelayanan persalinan (%)	100	100	100	100	100	76,78	79,9	80	77,23	69,72
	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	79,68	83,6	80	80,18	74,45
	Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapat pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	38	74,6	80	88,73	91,82
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak pada usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	100	68,36	80	94,24	100
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif	Jumlah warga negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan Kesehatan (%)	100	100	100	100	100	76,05	49,83	80	78,65	88,1
	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Jumlah pengunjung yang berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan (%)	100	100	100	100	100	46,66	44,64	80	100	99,34
	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan (%)	100	100	100	100	100	16,72	7,95	80	45,52	57,53
	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM)	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar (%)	100	100	100	100	100	88,06	50,59	80	100	100
	Pelayanan Kesehatan Orang	Jumlah ODGJ berat (psikotik) yang	100	100	100	100	100	150	100	80	100	100

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
	dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat	mendapatkan pelayanan kesehatan (%)										
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Tuberkulosis (TB)	Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB (%)	100	100	100	100	100	13,1	26,03	80	81,14	100
	Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi HIV	Jumlah orang yang beresiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	98,59
3	**PEKERJAAN UMUM**											**100**
	Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat	Jumlah warga negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minumsehari-hari (SPM) (SDGs) (%)	100	100	100	100	100	85,26	86	80	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (SPM) (%)	100	100	100	100	100	99,86	90	80	100	100
	Penyediaan Jalan Untuk Melayani Kebutuhan Masyarakat	Panjang jembatan dalam kondisi mantap (%) (SPM)	100	100	100	100	100	92,5	92,23	94	100	100
4	**PERUMAHAN RAKYAT**											**100**
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100
		Jumlah warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kab/ kota yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah layak huni (SPM) (%)	100	100	100	100	100	-	100	80	100	100
5	**KEAMANAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**											**100**
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada kab/ kota (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

No	Bidang/ Jenis Pelayanan	Indikator Pelayanan	Target					Realisasi				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
6	**SOSIAL**											**99,67**
		Jumlah warga negara penyandang disabilitas terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100
		Jumlah anak terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	98,33
		Jumlah warga negara lanjut usia terlantar yang memperoleh rehabilitasi sosial di luar panti (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100
		Jumlah warga negara gelandangan dan pengemis yang memperoleh rehabilitasi sosial dasar tuna sosial di luar panti (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100
		Jumlah warga negara korban bencana yang memperoleh perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kab/ kota (SPM) (%)	100	100	100	100	100	100	100	80	100	100

Berdasarkan tabel di atas dapat di lihat masih ada beberapa indikator SPM yang belum tercapai, adapun permasalahan yang menyebabkan target belum tercapai diantaranya:

Bidang Urusan Pendidikan

Permasalahan

1. Masih adanya kecendrungan sebagian masyarakat dalam memberikan data yang tidak sesuai dengan kriteria pemenuhan SPM.
2. Belum Optimalnya Sebaran Pendidik dan Tenaga Kependidikan
3. Masih terbatasnya anggaran daerah untuk pemenuhan SPM Pendidikan.
4. Masih Kurang optimalnya pelaksanaan pemenuhan layanan SPM.

Solusi

1. Melakukan gerakan jemput bola sehingga semua penerima layanan bisa terlayani serta Satu Sumber Data Dalam Pemenuhan Kebutuhan Dasar
2. Pemerataan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
3. Penyusun skala prioritas dalam Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan mengevaluasi Rencana Kegiatan Sekolah.
4. Perlunya pembuatan inovasi untuk pencapaian SPM Bidang pendidikan dan Koordinasi Lintas Sektor dengan pemangku kepentingan.

Bidang Urusan Kesehatan

Permasalahan

1. Masih ada ibu hamil yg tidak memeriksakan kehamilannya mulai usia kehamilan < 12 minggu karena ketidak tauan ibu akan kehamilannya.
2. Masih banyak bayi dan balita yang belum mendapatkan Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan Imunisasi Baduta Lengkap (IBL) serta capaian imunisasi disekolah yang masih dibawah 90%.
3. Masih belum semua balita dilakukan pemantauan perkembangan (SDIDTK) lengkap sesuai usianya dan belum semua balita sakit diperiksa dengan manajemen balita sakit (MTBS)
4. Target pelayanan kesehatan pada usia kesehatan dasar tidak bisa tercapai 100%, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya karena adanya jumlah sekolah yang melebihi kapasitas petugas sehingga tidak semua sekolah bisa dilakukan skrining, serta belum optimalnya tim UKS di puskesmas dalam pelaksanaan kegiatan penjaringan di sekolah
5. Masih terbatasnya sarana – prasarana untuk mendukung pemeriksaan skrening usia produktif, terutama pada pemeriksaan glukosa darah
6. Belum semua instansi/ lembaga/ organisasi/ perkumpulan/ komunitas dan lain-lain melakukan screening/ deteksi dini PTM.
7. Kurangnya pencarian aktif oleh pustu dan poskesdes ke masyarakat
8. Keluarga pasien TB tidak mau minum obat terapi pencegahan tuberkulosis, masih adanya stigma masyarakat dengan penyakit TBC sehingga pasien malu dan mangkir selama minum obat.
9. Belum terpenuhinya sarpras elektronik terkait SIHA seperti laptop.
10. Masih kurangnya kesadaran masyarakat yang berfaktor resiko tertular HIV untuk melakukan testing sukarela HIV.

Solusi

1. Melaksanakan kegiatan kelas prakonsepsi agar pemahaman akan kehamilan benar dan mempersiapkan kehamilan yang sehat. Kerjasama Disdalduk KB PP dan kemenag dalam memaksimalkan kegiatan Suscatin dan Binwin. Agar pasangan pengantin tahu bagaimana mempersiapkan kehamilan yg sehat termasuk didalamnya periksa kehamilan ke tenaga kesehatan sedini mungkin serta dengan memaksimalkan kelas ibu hamil.
2. Memaksimalkan dukungan lintas sektor tokoh masyarakat, tokoh agama, PKK, Komunitas, dll, dalam peningkatan cakupan IDL, IBL, dan Imunisasi Anak Sekolah.
3. Memaksimalkan pemeriksaan MTBS pada semua balita sakit yang datang ke faskes serta meningkatkan skil bidan, perawat dan dokter puskesmas dalam melakukan pemeriksaan MTB

4. Perencanaan kegiatan penjaringan secara cermat dan Melibatkan lintas program dalam pelaksanaan kegiatan penjaringan di sekolah.
5. Peningkatan kapasitas SDM dan unit pelayanan.
6. Dibutuhkan keterlibatan lintas sektor untuk memberikan dukungan sesuai kearifan lokal wilayah terkait minum obat TB dan penemuan kasus baru.
7. Menyediakan sarpras elektronik terkait SIHA.

Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Permasalahan Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, masih ada permasalahan baik internal maupun eksternal yang perlu diatasi. Berdasarkan pengamatan maka ditentukan isu-isu strategis sebagai berikut:

Internal :

1. Sumber daya aparatur bidang teknis yang masih kurang dan perlu ditingkatkan keahliannya;
2. Belum lengkapnya data base pada masing-masing bidang;
3. Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi yang akurat;
4. Masih kurangnya sarana untuk pengujian kualitas hasil pelaksanaan kegiatan;
5. Keterbatasan sumber dana;
6. Perbaikan dan peningkatan penyelengaraan infrastruktur mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Eksternal:

1. Mempertahankan ketersediaan air baku dampak berkurangnya area terbuka hijau;
2. Ketidaktertarikan sebagian warga untuk mendapat bantuan sarana prasarana pengolahan air limbah domestik.

Solusi Untuk mengatasi permasalahan internal, ada beberapa solusi yang dapat dilaksanakan, antara lain:

1. Peningkatan sumber daya aparatur, baik dari segi kuantitas maupun kualitas;
2. Pembuatan basis data yang terintegrasi dari masing- masing bidang;
3. Penyusunan master plan dan kebijakan umum pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dari semua aspek dan bidang.

Sedangkan untuk mengatasi permasalahan- permasalahan eksternal, solusi yang dapat dilaksanakan antara lain:

1. Peningkatan pengelolaan SPAM dan Sanitasi masyarakat;
2. Bekerja sama dengan dinas terkait mengenai sosialisasi pentingnya pengolahan air limbah domestic.

Bidang Urusan Perumahan Rakyat

Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM urusan Perumahan rakyat dan Permukiman di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan, dan Lingkungan Hidup Kota Sawahlunto yaitu:

1. Dengan kondisi alam Sawahlunto berbukit, dan tingkat bencana tinggi.
2. Rumah terdampak bencana berada diluar SK kawasan bencana.
3. Belum tersedia lahan relokasi program pemerintah, karena kondisi geografis Sawahlunto yang berada pada daerah berkontur.

Adapun solusi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bidang perumahan, dan Kawasan Permukiman terlibat aktif dalam tanggap bencana.
2. Perlu petimbangan RTLH bencana diluar SK Kawasan bencana sehingga dapat diakomodir dalam SPM.
3. Perlu adanya kebijakan untuk penentuan lahan pemerintah untuk relokasi.

Bidang Urusan Trantibum

Permasalahan

1. Sulitnya meminta by name by addres pada saat pelaksanaan Penegakan Perda dan Perkada pada radius 0-50 M di lokasi Penegakan Perda dan Perkada.
2. Terbatasnya anggaran untuk mencapai target program kegiatan dan memenuhi sarana-prasarana dalam rangka penerapan percepatan SPM.
3. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap peraturan yang telah dibuat oleh Pemerintah sehingga dengan mudah mereka melanggarnya.
4. Lemahnya fungsi koordinasi dan sinergi antara dinas/instansi terkait.
5. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana.
6. Belum memadainya kinerja aparat dan kelembagaan penanggulangan bencana, dikarenakan masih terbatasnya kuantitas dan kualitas sumberdaya aparatur serta sarana prasarana penanggulangan bencana termasuk di dalamnya anggaran, karena dalam PB anggaran termasuk faktor yang sangat penting.
7. Masih rendahnya kesadaran terhadap risiko bencana dan masih rendahnya pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana.
8. Jauhnya jarak tempuh daerah rawan bencana dari posko komando bencana.

9. Terbatasnya sarana prasarana penyelamatan korban bencana.
10. Kurangnya Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK) di Kota Sawahlunto sehingga menyulitkan pengendalian kebakaran di lokasi di luar WMK.

Solusi

1. Berkoordinasi dengan OPD Disdukcapil untuk meminta data masyarakat yang terkena dampak akibat penegakan perda dan perkada di lokasi penegakan perda dan perkada yang berada pada radius 0 - 50 M
2. Mencoba mengajukan tambahan anggaran dari APBD untuk operasional dan melengkapi sarana prasarana.
3. Memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat yang melanggar Perda, Peraturan Walikota dan Produk Hukum Lainnya agar mereka mematuhi setiap aturan yang ada dan memberikan sanksi kepada pelanggar Perda.
4. Meningkatkan kerjasama yang intensif dengan berbagai pihak guna mengoptimalkan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
5. Melakukan penguatan kelembagaan BPBD secara internal melalui koordinasi ke Propinsi maupun pusat, mengikuti pelatihan 111istema PB. Meningkatkan upaya pemenuhan pengadaan sarana prasarana dan dukungan anggaran.
6. Melakukan peningkatan kapasitas Pusdalops PB dan Satgas TRC serta pembentukan fórum pengurangan risiko bencana di desa.
7. Meningkatkan fungsi dan peran serta masyarakat dalam menanggulangi bencana sebelum petugas gabungan hadir dilokasi kejadian.
8. Memberikan pemahaman kepada masyarakat di luar WMK untuk mengenal potensi kebakaran dan memberikan pengetahuan tentang tata cara pengendalian dini musibah kebakaran.

Bidang Urusan Sosial

Permasalahan

1. Belum maksimalnya jumlah bantuan yang diberikan kepada pemerlu pelayanan sosial.
2. Masih adanya Penyandang Disabilitas yang belum tersentuh bantuan, hal ini dikarenakan tidak memiliki identitas kependudukan, belum melakukan sidik jari sehingga memakai identitas yang lama dengan NIK yang belum padan dengan DUKCAPIL.
3. Masih adanya lansia yang belum tersentuh oleh bantuan, hal ini di karenakan tidak memiliki indentitas kependudukan,

4. Belum melakukan sidik jari sehingga memakai identitas yang lama dengan NIK yang belum padan dengan DUKCAPIL.

Solusi

1. Sudah di sampaikan ke Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan tentang belum adanya identitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.
2. Walaupun masih adanya keterbatasan Anggaran bukan menjadikan kita tidak melaksanakan kegiatan / melakukan pelayanan Reahabilitasi Sosial yang di syaratkan oleh SPM tetapi kita harus mampu mencarikan solusi yang terbaik terhadap kendala-kendala terutama masalah anggaran, yakni melalui proposal, pengajuan CSR Perusahaan maupun koordinasi dengan UPTD-UPTD yang ada di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat maupun Kemensos RI.

2.1.7 CAPAIAN SDGs TAHUN 2021 – 2024

Tabel 2.175
CAPAIAN SDGs TAHUN 2021 – 2024

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
1	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	2,28	2,27	SS
2	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	Meningkat menjadi 95%	NA	NA	NA
3	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi 62,4 juta pekerja formal; 3,5 juta pekerja informal	2,125	27416	SB
4	1.3.1.(c)	Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas.	Meningkat menjadi 17,12%	24	100	SS
5	1.3.1.(d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/Program Keluarga Harapan.	Menurun menjadi 2,8 juta	1,655	1669	SS
6	1.4.1.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 70%	100	100	SS
7	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	Meningkat menjadi 63%.	62	92	SB
8	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	Meningkat menjadi 65%	72,3	70,5	SS
9	1.4.1.(d)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	100%	98,34	SS
10	1.4.1.(e)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	85%	92,28	SS
11	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	Meningkat menjadi 18,6 juta	41.40%		SS
12	1.4.1.(g)	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 94,78%	99,03	97,10	SS
13	1.4.1.(h)	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 82,2%	82,94	80,29	SS

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
14	1.4.1.(j)	Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran.	Meningkat menjadi 77,4%.	Na	62	NA
15	1.4.1.(k)	Persentase rumah tangga miskin dan rentan yang sumber penerangan utamanya listrik baik dari PLN dan bukan PLN.	Meningkat menjadi 100%	NA	NA	NA
16	1.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0,00011		SB
17	1.5.1.(a)	Jumlah lokasi penguatan pengurangan risiko bencana daerah.	Meningkat menjadi 39 daerah	4		SB
18	1.5.1.(b)	Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 151 ribu	150		SS
19	1.5.1.(c)	Pendampingan psikososial korban bencana sosial.	Meningkat menjadi 81,5 ribu	NA	NA	NA
20	1.5.1.(d)	Jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus. (SMAB=Sekolah/ Madrasah Aman Bencana)	Meningkat menjadi 450	2		SB
21	1.5.1.(e)	Indeks risiko bencana pada pusat-pusat pertumbuhan yang berisiko tinggi.	Menurun menjadi 118,6	53		SS
22	1.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	298 juta		SB
23	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	2		SS
24	1.a.1*	Proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan.	Meningkat	0,01598		SS
25	1.a.2*	Pengeluaran untuk layanan pokok (pendidikan, kesehatan dan perlindungan sosial) sebagai persentase dari total belanja pemerintah.	Meningkat	52,3		SS
26	2.1.1*	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment).	Menurun	NA	NA	NA
27	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	Menurun menjadi 17%	1		
28	2.1.2*	Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan.	Menurun	NA		NA
29	2.1.2.(a)	Proporsi penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari.	Menurun menjadi 8,5 %	NA		NA
30	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	Menurun	5,6	4,6	SS
31	2.2.1.(a)	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah dua tahun/baduta.	Menurun menjadi 28%	3,2		SS
32	2.2.2*	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun, berdasarkan tipe.	Menurun	1,57		SS
33	2.2.2.(a)	Prevalensi anemia pada ibu hamil.	Menurun menjadi 28%	8,2	2,0	SS
34	2.2.2.(b)	Persentase bayi usia kurang dari 6 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif.	Meningkat menjadi 50%	91,1		SS
35	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	Meningkat menjadi: skor PPH 92,5; tingkat konsumsi ikan 54,5 kg/kapita/tahun	NA	88,2	NA

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
36	2.3.1*	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).	Meningkat	NA	NA	NA
37	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).	Menurun menjadi 306	12.788	2	SS
38	3.1.2*	Proporsi perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih.	Meningkat menjadi 95%	74	77,23	SB
39	3.1.2.(a)	Persentase perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan.	Meningkat menjadi 85 %	73,9	77,23	SB
40	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	18		SS
41	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun	11		SS
42	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	Menurun menjadi 24	18		SS
43	3.2.2.(b)	Persentase kabupaten/kota yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.	Meningkat menjadi 95%	61,7		SS
44	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	Menurun menjadi <0,5%	2		SS
45	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	Menurun menjadi 245	48		SS
46	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1000 orang.	Menurun	1		SS
47	3.3.3.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang mencapai eliminasi malaria.	Meningkat menjadi 300	NA		NA
48	3.3.4.(a)	Persentase kabupaten/kota yang melakukan deteksi dini untuk infeksi Hepatitis B.	Meningkat	48		SS
49	3.3.5*	Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta).	Menurun	NA		NA
50	3.3.5.(a)	Jumlah provinsi (kecamatan/kelurahan/desa) dengan eliminasi Kusta.	Meningkat menjadi 34 provinsi	NA		NA
51	3.3.5.(b)	Jumlah kabupaten/kota (kecamatan/kelurahan/desa) dengan eliminasi filariasis (berhasil lolos dalam survei penilaian transmisi tahap I).	Meningkat menjadi 35.	4		SS
52	3.4.1.(a)	Persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun.	Menurun menjadi 5,4%	NA	NA	NA
53	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	Menurun menjadi 24,3%	NA	NA	NA
54	3.4.1.(c)	Prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun.	Menurun	9250,67		SB
55	3.4.2*	Angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri.	Menurun	0		SS
56	3.4.2.(a)	Jumlah kabupaten/kota yang memiliki	Meningkat menjadi 280	37		SS
		puskesmas yang menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa.				
57	3.5.1.(e)	Prevalensi penyalahgunaan narkoba.	Menurun menjadi angka 0,02%	0,04		SS
58	3.5.2*	Konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir.	Menurun	NA		NA
59	3.7.1*	Proporsi perempuan usia reproduksi (15-49 tahun) atau pasangannya yang memiliki kebutuhan keluarga berencana dan menggunakan alat kontrasepsi metode modern.	Meningkat menjadi 66%	NA		NA
60	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia	Meningkat menjadi 65%	70,46	70,50	SS

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
		Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.				
61	3.7.1.(b)	Angka penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP) cara modern.	Meningkat menjadi 23,5%	NA		NA
62	3.7.2*	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38	NA		NA
63	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	Menurun menjadi 2,28	202	2	SS
64	3.8.1.(a)	Unmet need pelayanan kesehatan.	Menurun menjadi 9,91%	12	12	SB
65	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	Meningkat	97,61	98,00	SS
66	3.8.2.(a)	Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).	Meningkat menjadi minimal 95%	8.483		SS
67	3.9.3.(a)	Proporsi kematian akibat keracunan.	Menurun	NA		NA
68	3.a.1*	Persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun.	Menurun	5,34		SS
69	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	Meningkat	100		SS
70	3.c.1*	Kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan.	Meningkat	NA		NA
71	4.1.1*	Proporsi anak-anak dan remaja: (a) pada kelas 4, (b) tingkat akhir SD/kelas 6, (c) tingkat akhir SMP/kelas 9 yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika.	Meningkat	72,22		SS
72	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 84,2%	59,701		SB
73	4.1.1.(b)	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	Meningkat menjadi 81%	86,667		SS
74	4.1.1.(d)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/sederajat.	Meningkat menjadi 114,09%	110,24	106,90	SB
75	4.1.1.(e)	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/sederajat.	Meningkat menjadi 106,94%	105,42	103,70	SB
76	4.1.1.(g)	Rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 8,8 tahun	-		SS
77	4.2.2.(a)	Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).	Meningkat menjadi 77,2%	NA	94,2	NA
78	4.4.1*	Proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).	Meningkat	NA		NA
79	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) perempuan/laki-laki di (1) SD/MI/sederajat; (2) SMP/MTs/sederajat; (3) SMA/SMK/MA/sederajat; dan Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) perempuan/laki-laki di (4) Perguruan Tinggi.	Meningkat	397,63		NA
80	4.6.1.(a)	Persentase angka melek aksara penduduk umur ≥15 tahun.	Meningkat menjadi 96,1%	99,72		SS
81	4.6.1.(b)	Persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun.	Meningkat	99,72		SS
82	4.a.1*	Proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas,	Meningkat	300		SB

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
		(e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi				
		dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan (terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH).				
83	4.c.1*	Persentase guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang bersertifikat pendidik.	Meningkat	64,37		SB
84	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	bertambah sebanyak 16	4		SB
85	5.2.1*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	0.01%		S2
86	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	Menurun menjadi kurang dari 20,48%	NA		NA
87	5.2.2*	Proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan seksual oleh orang lain selain pasangan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	50,4536		SS
88	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	Meningkat menjadi 70%	50,4536		SB
89	5.3.1*	Proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun.	Menurun	NA		NA
90	5.3.1.(a)	Median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun.	Meningkat menjadi 21 tahun	NA		NA
91	5.3.1.(b)	Angka kelahiran pada perempuan umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR).	Menurun menjadi 38 tahun	NA		NA
92	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah.	Meningkat	20	3	SB
93	5.5.2*	Proporsi perempuan yang berada di posisi managerial.	Meningkat	NA	NA	NA
94	5.6.1*	Proporsi perempuan umur 15-49 tahun yang membuat keputusan sendiri terkait hubungan seksual, penggunaan kontrasepsi, dan layanan kesehatan reproduksi.	Meningkat	NA		NA
95	5.6.1.(a)	Unmet need KB (Kebutuhan Keluarga Berencana/KB yang tidak terpenuhi).	Menurun menjadi 9,9%	10,03	12,20	SS
96	5.6.1.(b)	Pengetahuan dan pemahaman Pasangan Usia Subur (PUS) tentang metode kontrasepsi modern.	Meningkat menjadi 85%	100	71	SS
97	5.b.1*	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam.	Meningkat	NA	NA	NA
98	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	Meningkat menjadi 100%	88,66	9,34	SS
99	6.1.1.(b)	Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau.	Meningkat menjadi 118,6 m3/detik	175		SS
100	6.1.1.(c)	Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan.	Meningkat menjadi 100%	47,086		SB

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
101	6.2.1.(a)	Proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air.	Meningkat	NA		NA
102	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	Meningkat menjadi 100%	85,1		NA
103	6.2.1.(c)	Jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).	Meningkat menjadi 45.000 (skala nasional)	25		SS
104	6.2.1.(d)	Jumlah desa/kelurahan yang Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS).	Meningkat	25		SS
105	6.2.1.(e)	Jumlah kabupaten/kota yang terbangun infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal.	Meningkat menjadi 438 kabupaten/kota.	NA		NA
106	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	Meningkat	0		SB
107	6.3.1.(a)	Jumlah kabupaten/kota (Kecamatan/kelurahan) yang ditingkatkan kualitas pengelolaan lumpur tinja perkotaan dan dilakukan pembangunan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).	Meningkat menjadi 409 kabupaten/kota	1		SS
108	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	Meningkat	0,701 %		SS
109	6.3.2.(b)	Kualitas air sungai sebagai sumber air baku.	Meningkat	52		SS
110	6.4.1.(b)	Insentif penghematan air pertanian/perkebunan dan industri.	ada	0		BB
111	6.5.1.(a)	Jumlah Rencana Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Terpadu (RPDAST) yang diinternalisasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).	ada	0		SB
112	6.5.1.(c)	Jumlah jaringan informasi sumber daya air yang dibentuk.	8 WS	8		SS
113	6.5.1.(f)	Jumlah wilayah sungai yang memiliki partisipasi masyarakat dalam pengelolaan daerah tangkapan sungai dan danau.	10 WS (skala nasional)	10		SS
114	6.5.1.(g)	Kegiatan penataan kelembagaan sumber daya air.	ada	0		BB
115	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita.	Meningkat	396		SS
116	8.1.1.(a)	PDRB per kapita.	Meningkat menjadi lebih dari Rp 50 juta	65,73		SS
117	8.2.1*	Laju pertumbuhan PDRB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun.	Meningkat	NA		NA
118	8.3.1*	Proporsi lapangan kerja informal sektor non-pertanian, berdasarkan jenis kelamin.	Meningkat	NA		NA
119	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	0,51	50%		
120	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	Meningkat	NA		NA
121	8.3.1.(c)	Persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan.	0,25	NA		NA
122	8.5.1*	Upah rata-rata per jam pekerja.	Meningkat	NA		NA
123	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun	4,99809		SS

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
124	8.5.2.(a)	Tingkat setengah penganggguran.	Menurun	8.43%		SS
125	8.6.1*	Persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET).	Meningkat	-		SS
126	8.9.1*	Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB.	Meningkat menjadi 8%	NA	2,33	NA
127	8.9.1.(a)	Jumlah wisatawan mancanegara.	Meningkat menjadi 20 juta (skala nasional)	34		SS
128	8.9.1.(b)	Jumlah kunjungan wisatawan nusantara.	Meningkat	123848		SS
129	8.9.1.(c)	Jumlah devisa sektor pariwisata.	Meningkat	NA	NA	SS
130	8.9.2*	Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja.	Meningkat	NA	NA	NA
131	8.10.1*	Jumlah kantor bank dan ATM per 100.000 penduduk dewasa	Meningkat	32,37		
132	8.10.1.(a)	Rata-rata jarak lembaga keuangan (Bank Umum).	Menurun (mendekat)	NA		NA
133	8.10.1.(b)	Proporsi kredit UMKM terhadap total kredit.	Meningkat	NA		NA
134	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan per kapita.	Meningkat	NA		NA
135	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	Lebih tinggi dari pertumbuhan PDB	-		SS
136	9.2.2*	Proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur.	Meningkat	27,16		SS
137	9.3.1*	Proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri.	Meningkat	NA		NA
138	9.3.2*	Proporsi industri kecil dengan pinjaman	Meningkat	NA		NA
		atau kredit.				
139	9.5.1*	Proporsi anggaran riset pemerintah terhadap PDRB.	Meningkat	NA		NA
140	9.c.1*	Proporsi penduduk yang terlayani mobile broadband.	Meningkat	NA		NA
141	9.c.1.(a)	Proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam	Meningkat	-		SS
142	9.c.1.(b)	Proporsi individu yang menggunakan internet	Meningkat	70,49%		SS
143	10.1.1*	Koefisien Gini.	Menurun menjadi 0,36	0,314	0,308	SS
144	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	Menurun menjadi 7-8%	228		SS
145	10.2.1*	Proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang disabilitas.	Menurun	NA		NA
146	10.3.1.(a)	Indeks Kebebasan Sipil.	Meningkat menjadi 87	NA		NA
147	10.3.1.(d)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	NA		NA
148	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	Meningkat menjadi: TK formal 62,4 juta; TK informal 3,5 juta	NA		NA
149	11.1.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.	3,7 juta rumah tangga	88.66%		SB
150	11.2.1.(a)	Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan.	Meningkat menjadi 32%	NA		NA
151	11.3.2.(a)	Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan.	Meningkat	NA		NA
152	11.3.2.(b)	Jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur.	Ada	0		SB

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
153	11.4.1.(a)	Jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil.	ada	1		SS
154	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0		SS
155	11.5.1.(a)	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI).	Menurun menjadi 30%	101,02		SS
156	11.5.1.(b)	Jumlah kota tangguh bencana yang terbentuk.	Meningkat	NA		NA
157	11.5.1.(c)	Jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan.	ada	2		SS
158	11.5.2.(a)	Jumlah kerugian ekonomi langsung akibat bencana.	Menurun	426 juta		SB
159	11.6.1.(a)	Persentase sampah perkotaan yang tertangani.	Meningkat menjadi 80%	77		SB
160	11.b.1*	Proporsi pemerintah kota yang memiliki dokumen strategi pengurangan risiko bencana.	Meningkat/ada	1		SS
161	11.b.2*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat daerah.	ada	1		SS
162	12.4.2.(a)	Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri).	Meningkat menjadi 150 juta ton (skala nasional)	NA		NA
163	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	20 ton per hari (skala nasional)	1392,58		SS
164	12.6.1.(a)	Jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001.	Meningkat	0		SB
165	12.7.1.(a)	Jumlah produk ramah lingkungan yang teregister.	Meningkat	0		BB
166	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	Meningkat	NA		NA
167	13.1.1*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	ada	1		SS
168	13.1.2*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	Menurun	0		SS
169	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	Meningkat	11,6		SS
170	15.3.1.(a)	Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan.	5,5 juta ha (skala nasional)	NA		NA
171	15.6.1*	Tersedianya kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata.	ada	NA		NA
172	15.9.1.(a)	Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.	Meningkat	NA		NA
173	16.1.1.(a)	Jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir.	Menurun	NA		NA
174	16.1.2.(a)	Kematian disebabkan konflik per 100.000 penduduk.	Menurun	NA		NA
175	16.1.3.(a)	Proporsi penduduk yang menjadi korban kejahatan kekerasan dalam 12 bulan terakhir.	Menurun	NA		NA
176	16.1.4*	Proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya.	Meningkat	NA		NA
177	16.2.1.(a)	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari	Menurun	NA		NA

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
		pengasuh dalam setahun terakhir.				
178	16.2.1.(b)	Prevalensi kekerasan terhadap anak laki-laki dan anak perempuan.	Menurun	NA		NA
179	16.2.3.(a)	Proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun.	Menurun	NA		NA
180	16.5.1.(a)	Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK).	Meningkat menjadi 4,0	3,92		SB
181	16.6.1*	Proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui.	Meningkat	NA		
182	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 95%, Provinsi: 85%, Kabupaten:60%, Kota: 65%	WTP	WTP	SS
183	16.6.1.(b)	Persentase peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian/Lembaga: 85%, Provinsi: 75%, Kabupaten/Kota: 50%	CC		SS
184	16.6.1.(c)	Persentase penggunaan E-procurement terhadap belanja pengadaan.	Menjadi menjadi 80%	NA	NA	NA
185	16.6.1.(d)	Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkatkan menjadi: Kementerian/Lembaga 75%, Provinsi: 60%, Kabupaten/Kota: 45%	NA		NA
186	16.6.2.(a)	Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).	Meningkat menjadi: Kementerian: 100%, Lembaga: 100%, Provinsi: 100%, Kabupaten/Kota: 80%	NA		NA
187	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Meningkat	20		SB
188	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	Meningkat	4	3	SS
189	16.9.1*	Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur.	Meningkat MENJADI 85 %	8.509		SS
190	16.9.1.(a)	Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah.	Meningkat menjadi 77,4%	NA	100	NA
191	16.9.1.(b)	Persentase anak yang memiliki akta kelahiran.	Meningkat menjadi 85%	98.65%	99,23	SS
192	16.10.2.(c)	Jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi	Meningkat	NA	NA	NA
		sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.				
193	16.b.1.(a)	Jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM Internasional.	ada	NA	NA	NA
194	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	Meningkat	-	-	SS

No	Indikator TPB		Target Nasional	Capaian		Kondisi Capaian
				2022	2023	
195	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Di atas 12%	NA	NA	NA
196	17.1.2*	Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik.	Meningkat	NA	NA	NA
197	17.6.2.(b)	Tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (fixed broadband) di Perkotaan dan di Perdesaan.	Meningkat menjadi: Perkotaan (20 Mbps) 71% rumah tangga dan 30% populasi; Perdesaan (10 Mbps) 49% rumah tangga dan 6% populasi	NA	NA	NA
198	17.6.2.(c)	Proporsi penduduk terlayani mobile broadband	Meningkat menjadi: Perkotaan 100% populasi; Perdesaan 52% populasi.	NA	NA	NA
199	17.8.1*	Proporsi individu yang menggunakan internet.	Meningkat	79.7%		
200	17.17.1.(a)	Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	NA	NA	NA
201	17.17.1.(b)	Jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).	ada	25	NA	SS
202	17.18.1.(a)	Persentase konsumen Badan Pusat Statistik (BPS) yang merasa puas dengan kualitas data statistik.	Meningkat	-	NA	SS
203	17.18.1.(b)	Persentase konsumen yang menjadikan data dan informasi statistik BPS sebagai rujukan utama.	Meningkat	-	NA	SS
204	17.18.1.(c)	Jumlah metadata kegiatan statistik dasar, sektoral, dan khusus yang terdapat dalam Sistem Informasi Rujukan Statistik (SIRuSa).	Meningkat	-	NA	SS
205	17.18.1.(d)	Persentase indikator SDGs terpilah yang relevan dengan target.	Meningkat	NA	NA	NA
206	17.19.2.(b)	Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistics Register)	ada	ada	ada	SS
207	17.19.2.(c)	Jumlah pengunjung eksternal yang mengakses data dan informasi statistik melalui website.	Meningkat	-	ada	SS
208	17.19.2.(d)	Persentase konsumen yang puas terhadap akses data Badan Pusat Statistik (BPS).	Meningkat	-	NA	SS

2.2 GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah adalah kemampuan pemerintah daerah untuk mengawasi daerah untuk mengelola mulai dari merencanakan, melaksanakan, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi berbagai sumber keuangan sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan di daerah yang diwujudkan dalam bentuk anggaran pendapatan dan belanja daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Dari uraian di atas dapat dipetik kata kunci dari keuangan daerah adalah hak dan kewajiban. Hak merupakan hak daerah untuk mencari sumber pendapatan daerah berupa memungut pajak daerah, retribusi daerah atau sumber-sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban adalah kewajiban daerah untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan semua urusan pemerintahan di daerah. Reformasi keuangan daerah dapat dikatakan merupakan peluang terbesar sekaligus tantangan yang diperoleh pemerintah daerah dan DPRD, untuk menunjukkan kemampuan menggali dan mengelola anggaran daerah tanpa terlalu banyak campur tangan dari pemerintah pusat.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan :

- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah
- Fungsi APBD antara lain yakni otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- Prinsip-prinsip penganggaran diantaranya terkait dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Dalam penyusunan APBD didasarkan prinsip sebagai berikut :

- Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
- Tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- Berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;
- Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- Dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.

Dalam konteks penyusunan rancangan teknokratik RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 walaupun terjadi perubahan signifikan terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, namun masih berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Daerah. Sehingga analisis kinerja keuangan daerah akan disajikan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 serta Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam bab ini disajikan gambaran kinerja dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu dalam lima tahun terakhir dan kerangka pendanaan proyeksi APBD beserta kebijakan pengelolaan keuangan daerah lima tahun mendatang. Analisis kinerja keuangan masa lalu dilakukan terhadap penerimaan daerah dan pengeluaran daerah, penerimaan daerah yaitu pendapatan dari penerimaan pendapatan dan pembiayaan daerah serta pengeluaran daerah yaitu belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan. Kapasitas keuangan daerah pada dasar nya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini.

Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang guna penghitungan kerangka pendanaan pembangunan daerah. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program–program pemerintah daerah. Oleh sebab itu Kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehinga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun-tahun mendatang kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk pemenuhan kebijakan belanja wajib, mengikat dan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu difokuskan juga pada belanja yang memfokuskan kepada prioritas pembangunan daerah, isu-isu strategis terkait peningkatan ekonomi.

Selanjutnya pembiayaan pembangunan daerah yang terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk tetap menjaga stabilitas fiskal daerah sehingga pembangunan daerah dapat berjalan berkesinambungan dan tetap. Selain itu pembiayaan pembangunan mengedapankan prinsip akuntabilitas.

2.2.1 Kinerja Keuangan Tahun Anggaran 2019-2024

Analisis terhadap kinerja keuangan tahun anggaran 2019-2024 merupakan acuan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam memproyeksikan perencanaan pembangunan daerah di masa mendatang khususnya dalam memproyeksikan keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan tahun sebelumnya dapat diketahui rata-rata pertumbuhan dan kontribusi komponen

pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pengukuran kemampuan keuangan daerah dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai indikator.

Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD) merupakan indikator menganalisis kemampuan keuangan daerah yang diukur melalui kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah. Hal ini juga terkait dengan kemandirian keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto dalam membiayai pembangunan daerah. Perkembangan DOFD Kota Sawahlunto periode tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.176
Perkembangan Derajat Otonomi Fiskal Daerah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2019-2024

Tahun	Pendapatan Daerah	PAD	DOFD (%)	Pertumbuhan DOFD (%)
2019	638.026.463.488,09	57.170.993.865,09	8,96	
2020	576.857.864.031,56	59.537.385.897,66	10,32	1,36
2021	598.040.864.187,45	51.475.336.271,45	8,61	-1,71
2022	620.647.226.213,62	66.920.994.265,62	10,78	2,18
2023	632.806.852.185,64	59.943.839.179,64	9,47	-1,31
2024	641.838.986.100,93	65.744.558.733,93	10,24	0,77
Rata-rata			**9,89**	

Sumber : LRA Audited 2019-2023 (2024 unaudited) (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa DOFD Kota Sawahlunto periode 2019-2024 rata-rata sebesar 9,89%. Secara keseluruhan DOFD Kota Sawahlunto menunjukkan DOFD yang masih sangat rendah atau sangat mengandalkan pendapatan dari penerimaan transfer baik transfer dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah lainnya.

Dari tabel diatas juga terlihat derajat desentralisasi fiskal daerah Kota Sawahlunto selama periode Tahun 2019-2024 cenderung menurun dan berfluktuasi. Derajat desentralisasi fiskal Kota Sawahlunto pada tahun 2019-2021 berada pada kategori sangat kurang, sedangkan pada tahun 2022-2024 cenderung meningkat sehingga berada pada kategori kurang. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan kemampuan Kota Sawahlunto dalam melaksanakan desentralisasi yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Kemampuan dan kemandirian pemerintah daerah dapat diukur dari pendapatan daerah. Kemampuan fiskal daerah yang baik akan mampu melaksanakan dan merealisasikan program–program pemerintah daerah. Oleh sebab itu kebijakan keuangan daerah merupakan kebijakan yang strategis dalam pembangunan daerah. Sehinga diperlukan kebijakan yang memperhatikan kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Pada tahun 2025-2029 kebijakan keuangan daerah difokuskan pada kebijakan yang memperhatikan kapasitas fiskal yang utamanya memfokuskan pada pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Oleh karena itu, perlu adanya upaya-upaya konkrit yang dapat menggali dan mendiversifikasi sumber-sumber pendapatan asli daerah, sehingga Kota Sawahlunto tidak terlalu bergantung pada pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat. Kondisi

derajat desentralisasi fiskal Kota Sawahlunto selama lima tahun terakhir menunjukkan hasil yang belum optimal. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto untuk membiayai pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan yang diharapkan.

A. Kinerja Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020-2024

Komponen APBD Pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih daerah pada periode anggaran. Sedangkan pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau setiap pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun anggaran berikutnya.

Kinerja keuangan Pemerintah Kota Sawahlunto Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 2.177
Realisasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2020-2024

Uraian	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
PENDAPATAN	**576.857.864.031,56**	**598.040.864.187,45**	**620.647.226.213,62**	**605.314.638.183,64**	**641.838.986.100,93**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**59.537.385.897,66**	**51.475.336.271,45**	**66.920.994.265,62**	**59.943.839.179,64**	**65.744.558.733,93**
Pendapatan Pajak Daerah	5.602.920.091,75	5.993.540.247,00	7.434.059.921,40	8.149.995.371,00	9.115.911.011,00
Pendapatan Retribusi Daerah	2.788.116.593,00	2.731.559.922,00	3.543.204.313,00	2.691.622.325,00	35.499.235.523,16
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.026.462.819,00	10.806.423.680,00	13.477.268.009,00	15.663.529.464,00	17.143.203.404,00
Lain-lain PAD yang Sah	39.119.886.393,91	31.943.812.422,45	42.466.462.022,22	33.438.692.019,64	3.986.208.795,77
PENDAPATAN TRANSFER	**497.369.022.340,00**	**538.147.448.116,00**	**551.073.826.548,00**	**545.370.799.004,00**	**575.974.427.367,00**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**445.561.937.322,00**	**509.421.068.591,00**	**516.814.855.288,00**	**514.078.585.002,00**	**542.408.265.790,00**
Bagi Hasil Pajak	8.109.612.714,00	28.949.393.592,00	36.873.646.167,00	34.188.263.466,00	32.709.006.000,00
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	6.705.943.539,00				
Dana Alokasi Umum	347.498.276.000,00	341.393.550.000,00	340.799.183.261,00	357.769.014.914,00	396.423.949.217,00
Dana Alokasi Khusus	83.248.105.069,00	71.679.053.089,00	113.999.178.860,00	100.781.993.622,00	77.829.612.573,00
Dana Insentif Daerah	0,00	37.290.036.000,00	5.044.116.000,00		13.892.503.000,00
Dana Desa		30.109.035.910,00	20.098.731.000,00	21.339.313.000,00	21.553.195.000,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	**28.631.236.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Dana Penyesuaian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Desa	28.631.236.000,00				
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**23.175.849.018,00**	**28.726.379.525,00**	**34.258.971.260,00**	**31.292.214.002,00**	**33.566.161.577,00**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	23.175.849.018,00	28.726.379.525,00	33.658.971.260,00	27.492.214.002,00	33.566.161.577,00
Bantuan Keuangan			600.000.000,00	3.800.000.000,00	0,00

Uraian	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**19.951.455.793,90**	**8.418.079.800,00**	**2.652.405.400,00**	**0,00**	**120.000.000,00**
Pendapatan Hibah	8.148.061.693,00	-	-	-	120.000.000,00
Pendapatan Lainnya	300.147.100,90	8.418.079.800,00	2.652.405.400,00		
Bantuan Keuangan	11.503.247.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA	**476.891.824.080,79**	**599.185.054.472,27**	**643.653.414.741,00**	**607.064.912.961,00**	**623.136.378.770,99**
Belanja Operasi	**397.517.138.143,22**	**444.009.727.121,27**	**468.731.239.357,00**	**465.316.924.124,00**	**483.711.172.548,99**
Belanja Pegawai	274.835.588.932,00	240.644.834.014,00	259.237.850.902,00	246.879.933.557,00	275.738.214.701,00
Belanja Barang dan Jasa	115.269.632.648,50	186.235.989.165,00	190.660.034.017,00	189.393.433.222,00	186.955.981.790,99
Belanja Bunga	1.152.516.275,72	796.043.279,27	891.962.272,00	1.122.101.270,00	1.052.126.059,00
Belanja Hibah	3.309.250.287,00	13.936.860.663,00	14.110.242.166,00	24.475.356.075,00	17.587.499.998,00
Belanja Bantuan Sosial	2.950.150.000,00	2.396.000.000,00	3.831.150.000,00	3.446.100.000,00	2.377.350.000,00
Belanja Modal	**63.699.147.392,57**	**85.611.045.938,00**	**116.514.679.424,00**	**84.381.971.361,00**	**73.075.789.709,00**
Belanja Modal Tanah	800.006.000,00	-	-	-	-
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	29.000.506.074,70	20.880.045.268,00	17.666.803.013,00	12.084.173.858,00	35.246.025.880,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	25.216.284.417,82	14.804.687.034,00	41.516.117.751,00	35.635.719.133,00	12.043.741.217,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	8.025.081.127,05	49.683.258.936,00	57.231.799.760,00	36.392.598.160,00	24.991.542.821,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	657.269.773,00	243.054.700,00	99.958.900,00	269.480.210,00	794.479.791,00
Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00			
Belanja Modal Dana BLUD	0,00	0,00			
BeLanja Tak Terduga	**15.675.538.545,00**	**2.655.984.000,00**	**294.991.005,00**	**836.646.211,00**	**2.479.496.967,00**
BeLanja Tak Terduga	15.675.538.545,00	2.655.984.000,00	294.991.005,00	836.646.211,00	2.479.496.967,00
TRANSFER	**67.371.834.124,00**	**66.908.297.413,00**	**58.112.504.955,00**	**56.529.371.265,00**	**63.869.919.546,00**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**877.460.000,00**	**885.532.503,00**	**1.046.900.955,00**	**954.510.748,00**	**857.466.546,00**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	566.650.000,00	558.532.503,00	637.792.686,00	620.462.410,00	622.798.506,00
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	-	327.000.000,00	409.108.269,00	334.048.338,00	234.668.040,00
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya	310.810.000,00	-	-		
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**66.494.374.124,00**	**66.022.764.910,00**	**57.065.604.000,00**	**55.574.860.517,00**	**63.012.453.000,00**
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	65.909.710.000,00	66.022.764.910,00	57.065.604.000,00	55.574.860.517,00	63.012.453.000,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	584.664.124,00				
Surplus/defisit	32.594.205.826,77	-1.144.190.284,82	-23.006.188.527,38	-1.750.274.777,36	18.702.607.329,94
PEMBIAYAAN					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**13.393.565.535,47**	**44.095.564.695,58**	**38.719.707.744,76**	**12.116.356.260,00**	**8.772.197.707,02**
Penggunaan SILPA	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76	12.114.946.260,00	8.753.029.707,02
Pinjaman Dalam Negeri	-	-			
Penerimaan Kembali Piutang	24.513.000,00	26.460.000,00		1.410.000,00	19.168.000,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.918.666.666,66**	**4.231.666.666,00**	**3.636.666.668,00**	**1.369.666.668,00**	**1.166.666.666,00**
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	752.000.000,00	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00		
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	1.166.666.666,66	1.166.666.666,00	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00

Uraian	Realisasi Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Pemberian Pinjaman Daerah		65.000.000,00	470.000.000,00	203.000.000,00	0,00
Pembiayaan Netto	**11.474.898.868,81**	**39.863.898.029,58**	**35.083.041.076,76**	**10.746.689.592,00**	**7.605.531.041,02**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**44.069.104.695,58**	**38.719.707.744,76**	**12.076.852.549,38**	**8.996.414.814,64**	**26.308.138.370,96**

Sumber : LRA Kota Sawahlunto Tahun 2024-2024

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pendapatan dan belanja selama 5 tahun terakhir umumnya mengalami peningkatan. Hal yang berbeda terjadi pada tahun anggaran 2023 dimana baik pendapatan maupun belanja mengalami penurunan yang cukup signifikan. Namun pada tahun 2024, jumlah pendapatan dan belanja kembali mengalami kenaikan dikarenakan adanya pelaksanaan pesta demokrasi yakni pemilihan Kepala Daerah dan legislatif . Fluktuasi pendapatan dan belanja ini tentunya berdampak pada besaran surplus/ defisit dan SILPA.

1. Kinerja Pendapatan Daerah

Komponen pendapatan daerah Kota Sawahlunto terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pertumbuhan pendapatan daerah Kota Sawahlunto selama Tahun 2019-2024 dengan rata-rata pertumbuhan realisasi pertahun hanya 0,01%. Hal ini tentunya bukanlah angka yang menggembirakan. Realisasi capaian pendapatan daerah dan tingkat pertumbuhan dan anggaran selama periode Tahun 2019-2024 dapat dilihat pada berikut ini.

Tabel 2.178
Pertumbuhan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	671.749.080.316,00	638.026.463.488,09	94,98		
2020	587.598.325.124,00	576.857.864.031,56	98,17	-12,53	-0,10
2021	598.439.921.262,00	598.040.864.187,45	99,93	1,85	0,04
2022	626.757.178.292,00	620.647.226.213,62	99,03	4,73	0,04
2023	625.185.465.083,00	605.314.638.183,64	96,82	-0,25	-0,02
2024	642.895.237.441,36	641.838.986.100,93	99,84	2,83	0,06

Sumber : LRA audited Kota Sawahlunto (data diolah)

Berdasarkan di atas realisasi pencapaian atas pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2021 yakni sebesar 99,93%, sedangkan yang terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 94,98%. Pada tahun anggaran 2024 realisasi mencapai 99,84% dan terdapat pertumbuhan pendapatan sebesar 2,83%. Dari sisi pertumbuhan anggaran atas pendapatan daerah berfluktuasi setiap tahunnya dan cenderung mengalami penurunan namun pada tahun 2024 telah menunjukkan tingkat pertumbuhan yang positif. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pengelolaan keuangan atas pendapatan belum terlalu efektif, sehingga dibutuhkan intensifikasi dan ekstensifikasi atas pendapatan.

Perkembangan realisasi dan pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto tahun 2019 – 2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.179
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019 – 2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	%
PENDAPATAN	**638.026.463.488,09**	**576.857.864.031,56**	**598.040.864.187,45**	**620.647.226.213,62**	**605.314.638.183,64**	**641.838.986.100,93**	**0,00**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**57.170.993.865,09**	**59.537.385.897,66**	**51.475.336.271,45**	**66.920.994.265,62**	**59.943.839.179,64**	**65.744.558.733,93**	**0,05**
Pendapatan Pajak Daerah	5.502.589.718,00	5.602.920.091,75	5.993.540.247,00	7.434.059.921,40	8.149.995.371,00	9.115.911.011,00	0,14
Pendapatan Retribusi Daerah	3.625.062.865,00	2.788.116.593,00	2.731.559.922,00	3.543.204.313,00	2.691.622.325,00	35.499.235.523,16	3,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.832.616.199,00	12.026.462.819,00	10.806.423.680,00	13.477.268.009,00	15.663.529.464,00	17.143.203.404,00	0,13
Lain-lain PAD yang Sah	37.210.725.083,09	39.119.886.393,91	31.943.812.422,45	42.466.462.022,22	33.438.692.019,64	3.986.208.795,77	-0,22
PENDAPATAN TRANSFER	**571.997.269.623,00**	**497.369.022.340,00**	**538.147.448.116,00**	**551.073.826.548,00**	**545.370.799.004,00**	**575.974.427.367,00**	0,01
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**495.141.841.033,00**	**445.561.937.322,00**	**509.421.068.591,00**	**516.814.855.288,00**	**514.078.585.002,00**	**542.408.265.790,00**	0,03
Bagi Hasil Pajak	7.929.496.961,00	8.109.612.714,00	28.949.393.592,00	36.873.646.167,00	34.188.263.466,00	32.709.006.000,00	0,68
Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam	17.783.593.665,00	6.705.943.539,00					
Dana Alokasi Umum	390.050.861.000,00	347.498.276.000,00	341.393.550.000,00	340.799.183.261,00	357.769.014.914,00	396.423.949.217,00	0,01
Dana Alokasi Khusus	76.333.533.741,00	83.248.105.069,00	71.679.053.089,00	113.999.178.860,00	100.781.993.622,00	77.829.612.573,00	0,05
Dana Insentif Daerah	3.044.355.666,00	0,00	37.290.036.000,00	5.044.116.000,00		13.892.503.000,00	
Dana Desa			30.109.035.910,00	20.098.731.000,00	21.339.313.000,00	21.553.195.000,00	
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	**50.404.370.000,00**	**28.631.236.000,00**	**-**	**-**	**-**		
Dana Penyesuaian	22.193.148.000,00	-	-	-	-		
Dana Alokasi Desa	28.211.222.000,00	28.631.236.000,00					
Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	**26.451.058.590,00**	**23.175.849.018,00**	**28.726.379.525,00**	**34.258.971.260,00**	**31.292.214.002,00**	**33.566.161.577,00**	
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	26.451.058.590,00	23.175.849.018,00	28.726.379.525,00	33.658.971.260,00	27.492.214.002,00	33.566.161.577,00	0,03
Bantuan Keuangan				600.000.000,00	3.800.000.000,00		
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**8.858.200.000,00**	**19.951.455.793,90**	**8.418.079.800,00**	**2.652.405.400,00**	**-**	**120.000.000,00**	
Pendapatan Hibah	8.858.200.000,00	8.148.061.693,00	-	-	-	120.000.000,00	
Pendapatan Lainnya	-	300.147.100,90	8.418.079.800,00	2.652.405.400,00			
Bantuan Keuangan		11.503.247.000,00	-	-	-		

Sumber : LRA audited Kota Sawahlunto (data diolah)

Perkembangan realisasi pendapatan daerah untuk masing-masing komponen dijelaskan sebagai berikut :

➢ Pendapatan Asli Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sumber pendapatan daerah harus seimbang dengan urusan pemerintah daerah, dengan mengoptimalkan potensi potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami pertumbuhan rata-rata selama Tahun 2019-2024 sebesar 0,02% dan tingkat realisasi PAD terhadap target yang ditetapkan dalam APBD selama lima tahun terakhir secara rata-rata mencapai 97,37%. Kondisi ini menunjukkan pertumbuhan PAD belum mencapai angka yang maksimal, walaupun secara realisasi menunjukkan perkembangan capaian yang optimal. Sehingga kapasitas fiskal pembangunan masih tinggi ketergantungannya terhadap pemerintah pusat dan provinsi dalam membiayai pembangunan daerah. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dituntut agar dapat meningkatkan PAD melalui penggalian potensi sumber-sumber potensi PAD secara efektif dan transformatif.

Perkembangan realisasi PAD, tingkat capaian, tingkat pertumbuhan anggaran dan tingkat pertumbuhan realisasi Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.180
Perkembangan Realisasi PAD, Tingkat Capaian, Tingkat Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran	Realisasi	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Anggaran (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	59.758.667.807,00	57.170.993.865,09	95,67		
2020	57.525.368.782,00	59.537.385.897,66	103,50	-0,04	0,04
2021	50.495.594.425,00	51.475.336.271,45	101,94	-0,12	-0,14
2022	69.315.857.768,00	66.920.994.265,62	96,54	0,37	0,30
2023	66.783.021.097,00	59.943.839.179,64	89,76	-0,04	-0,10
2024	67.929.260.956,36	65.744.558.733,93	96,78	0,02	0,10
Rata-rata				**0,03**	**0,02**

Sumber : LRA Audited 2019-2024 (data diolah)

Ditinjau dari sisi kontribusi komponen PAD terhadap PAD dalam rentang waktu 2019-2024 masih didominasi komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah dengan rata-rata sebesar 55,78% disusul penerimaan pajak daerah sebesar 13,60%, retribusi daerah sebesar 4,49%. Sedangkan yang memberikan kontribusi paling kecil adalah pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar 2,59%. Namun pada tahun 2024, retribusi daerah menjadi penyumbang terbesar dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah, hal ini dikarenakan adanya penyesuaian kode rekening pendapatan BLUD RSUD dari lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi retribusi daerah pada retribusi pelayanan kesehatan. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan diperoleh dari deviden Bank Nagari dan BPR.

➢ Pendapatan Transfer

Untuk pendapatan transfer, pada penerimaan Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan karena adanya kenaikan gaji PNS di tahun 2024 dan adanya penambahan alokasi DAU yang ditentukan peruntukannya. Untuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik rata-rata terjadi penurunan. Berikut tabel perbandingan pendapatan transfer pusat ke daerah tahun 2022 – 2024 :

Tabel 2.181
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Uraian	2022	2023	2024
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**525.076.266.264,00**	**511.145.788.000,00**	**535.700.109.000,00**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	**28.544.050.903,00**	**27.204.767.000,00**	**32.636.905.000,00**
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	**341.124.424.361,00**	**356.278.450.000,00**	**381.865.492.000,00**
DAU Yang Tidak Ditentukan Penggunaannya		276.937.890.000,00	321.981.891.000,00
DAU Penggajian P3K		20.519.466.000,00	17.354.466.000,00
DAU Pendanaan Kelurahan		2.000.000.000,00	2.000.000.000,00
DAU Bidang Pendidikan		11.539.812.000,00	10.068.172.000,00
DAU Bidang Kesehatan		21.707.230.000,00	11.517.148.000,00
DAU Bidang Pekerjaan Umum		23.574.052.000,00	18.943.815.000,00
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	**81.827.919.000,00**	**54.035.717.000,00**	**35.173.088.000,00**
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	**48.437.025.000,00**	**53.125.393.000,00**	**51.481.022.000,00**
Dana Insentif Daerah (DID)	**5.044.116.000,00**	**-**	**13.892.503.000,00**
Dana Desa	**20.098.731.000,00**	**20.501.461.000,00**	**20.651.099.000,00**

Sumber : APBD 2022-2024

Perkembangan pendapatan transfer Tahun 2019-2024 cenderung stagnan, hal ini ditandai belum optimalnya tingkat capaian realisasi berada dibawah 100%. Hal ini disebabkan karena terjadinya perubahan kebijakan pemerintah, terutama terkait dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Perkembangan capaian realisasi pendapatan transfer Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.182
Perkembangan Capaian Realisasi Pendapatan Transfer Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)
2019	601.357.412.509,00	571.997.269.623,00	95,12
2020	511.288.709.342,00	497.369.022.340,00	97,28
2021	539.205.869.867,00	538.147.448.116,00	99,80
2022	554.692.189.893,00	551.073.826.548,00	99,35
2023	558.402.443.986,00	545.370.799.004,00	97,67
2024	574.845.976.485,00	575.974.427.367,00	100,20
Rata-rata			98,23

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024(data diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa baik dari segi anggaran maupun realisasi pendapatan transfer mengalami fluktuasi dan cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Kondisi ini berimplikasi terhadap kapasitas riil keuangan daerah dalam membiayai belanja pembangunan daerah. Pada tahun anggaran 2024, realisasi pendapatan transfer mencapai 100,20% dan hal ini dikarenakan adanya penerimaan transfer TDF dari pemerintah pusat sebesar Rp15M.

- Dana Bagi Hasil

Perkembangan realisasi target dana bagi hasil Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024 cenderung berfluktuatif. Pada tahun 2020 mengalami capaian realisasi yang cukup rendah yakni pada kisaran 62,81% namun mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada tahun-tahun setelahnya. Perkembangan capaian realisasi dana bagi hasil pajak/bukan pajak Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.183
Perkembangan Capaian Realisasi Dana Bagi Hasil Kota Sawahlunto
Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)
2019	29.142.131.173,00	25.713.090.626,00	88,23
2020	23.587.308.425,00	14.815.556.253,00	62,81
2021	17.743.485.795,00	28.949.393.592,00	163,16
2022	28.544.050.903,00	36.873.646.167,00	129,18
2023	32.682.958.000,00	34.188.263.466,00	104,61
2024	32.726.936.635,00	32.709.006.000,00	99,95
Rata-rata			91,33

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

Rata-rata realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil selama 5 (lima) tahun terakhir adalah 91,33%.

- Dana Alokasi Umum

Perkembangan realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024 pada umumnya sesuai dengan target. Disisi lain, pertumbuhan cenderung fluktuatif dan pada tahun 2020 bertumbuh minus sebesar 0,11%. Kecendrungan minusnya pertumbuhan DAU ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah dan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Pada tahun anggaran 2024, terdapat penerimaan DAU untuk PPPK yang tidak terealiasasi 100%, namun secara keseluruhan realisasi mencapai 103,81% dikarenakan adanya penerimaan dana TDF sebesar Rp15M. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan DAU Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.184
Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Umum Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	390.050.861.000,00	390.050.861.000,00	100,00	
2020	349.197.280.000,00	347.498.276.000,00	99,51	-0,11
2021	341.393.550.000,00	341.393.550.000,00	100,00	-0,02
2022	341.124.424.361,00	340.799.183.261,00	99,90	0,00
2023	356.278.450.000,00	357.769.014.914,00	100,42	0,05
2024	381.865.492.000,00	396.423.949.217,00	103,81	0,11
Rata-rata				-0,01

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

- Dana Alokasi Khusus

Perkembangan realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024 cenderung stagnan. Kondisi ini mencerminkan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang bersumber dari DAK tidak sesuai dengan diharapkan untuk mendukung prioritas pembangunan nasional. Hal ini disebabkan, pada umumnya keterlambatan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan dari Kementerian/Lembaga terkait dan terjadinya perubahan kebijakan tahun anggaran berjalan. Disisi lain, pertumbuhan cenderung fluktuatif dan pada tahun 2021 dan 2023 bertambah minus sebesar 0,14% dan 0,12%. Dan pada tahun 2024 mengalami penurunan yang signifikan yakni 0,23%. Kecenderungan minusnya pertumbuhan DAK ini sangat dipengaruhi adanya kebijakan Pemerintah dan bukan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota. Perkembangan capaian realisasi dan pertumbuhan DAK Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.185
Perkembangan Capaian Realisasi dan Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	91.145.220.000,00	76.333.533.741,00	83,75	
2020	87.652.909.750,00	83.248.105.069,00	94,97	0,09
2021	81.487.267.000,00	71.679.053.089,00	87,96	-0,14
2022	130.264.944.000,00	113.999.178.860,00	87,51	0,59
2023	107.161.110.000,00	100.781.993.622,00	94,05	-0,12
2024	86.654.110.000,00	77.829.612.573,00	89,82	-0,23
Rata-rata				0,04

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024(data diolah)

- Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi

Tabel 2.186
Pendapatan Transfer Pemerintah Propinsi Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	25.165.008.336,00	26.451.058.590,00	105,11	
2020	22.219.975.167,00	23.175.849.018,00	104,30	-0,12
2021	31.181.768.072,00	28.726.379.525,00	92,13	0,24
2022	29.615.923.629,00	34.258.971.260,00	115,68	0,19
2023	40.940.612.986,00	31.292.214.002,00	76,43	-0,09
2024	38.153.739.850,00	33.566.161.577,00	87,98	0,07
Rata-rata				0,05

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024(data diolah)

Untuk pendapatan transfer dari Pemerintah Propinsi, maka dapat dilihat mengalami fluktuasi dan selama 2 tahun terakhir mengalami penurunan.

➢ Lain-lain pendapatan yang sah

Tabel 2.187
Lain – lain Pendapatan yang Sah
Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	10.633.000.000,00	8.858.200.000,00	83,31	
2020	18.784.247.000,00	19.951.455.793,90	106,21	1,25
2021	8.738.456.970,00	8.418.079.800,00	96,33	-0,58
2022	2.749.130.631,00	2.652.405.400,00	96,48	-0,68
2023	0,00	0,00	0,00	-1,00
2024	120.000.000,00	120.000.000,00	100,00	
Rata-rata				-0,17

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

Untuk lain-lain pendapatan yang sah, mengalami penurunan setiap tahunnya. Untuk tahun anggara 2023, Kota Sawahlunto tidak ada anggaran dan realisasi untuk pendapatan lain-lain. Pada tahun anggaran 2024, terdapat anggaran dan realisasi hibah dalam bentuk Corporate Social Responbility (CSR) dari Bank Nagari yang diperuntukkan untuk pengadaan sarana dan prasarana sekolah pada Dinas Pendidikan.

2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Maka evaluasi realisasi belanja daerah sangat penting dalam melihat perkembangan kinerja pembangunan sesuai dengan perencanaan dan kebijakan daerah Kota Sawahlunto selama periode 2019-2024.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Perkembangan kinerja realisasi belanja daerah Tahun 2019-2024 cenderung cukup optimal karena capaiannya rata-rata sebesar 91,25% dan diikuti rata-rata pertumbuhan realisasi sebesar 0,03%. Perkembangan capaian realisasi dan

pertumbuhan serta realisasi belanja daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.188
Perkembangan Capaian Realisasi, Pertumbuhan Anggaran dan Tingkat Pertumbuhan Realisasi Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2019-2024

Tahun	Anggaran (Rp Juta)	Realisasi (Rp Juta)	Tingkat Capaian (%)	Pertumbuhan Realisasi (%)
2019	627.701.487.157,00	551.743.879.687,01	87,90	
2020	540.228.136.333,65	476.891.824.080,79	88,28	-0,14
2021	650.538.248.327,00	599.185.054.472,27	92,11	0,26
2022	682.809.902.738,00	643.653.414.741,00	94,27	0,07
2023	669.237.924.585,00	607.064.912.961,00	90,71	-0,06
2024	661.367.728.186,00	623.136.378.770,99	94,22	0,03
Rata-rata			91,25	0,03

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

Sedangkan pertumbuhan komponen belanja daerah Kota Sawahlunto periode 2019-2024 untuk pelayanan dasar belum menunjukkan peningkatan yang signifikan karena belanja modal bertumbuh secara rata-rata sebesar 0,11%. Sementara itu, pertumbuhan belanja operasi yang paling tinggi terdapat pada komponen belanja hibah yakni bertumbuh sebesar 0,99% dan diikuti oleh belanja barang dan jasa sebesar 0,16%. Tingginya belanja hibah pada tahun anggaran 2023 dan 2024 dikarenakan adanya hibah ke KPU dan TNI/Polri untuk pelaksanaan Pilkada serentak.

Lebih tingginya rata-rata pertumbuhan komponen belanja hibah dan belanja barang dan jasa dibandingkan dengan komponen belanja modal mencerminkan belum proporsionalnya alokasi belanja daerah terhadap pencapaian sasaran RPJMD Tahun 2019-2024.

Tabel 2.189
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Komponen Belanja Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
BELANJA	**551.743.879.687,01**	**476.891.824.080,79**	**599.185.054.472,27**	**589.240.216.141,00**	**607.064.912.961,00**	**623.136.378.770,99**	
Belanja Operasi	**457.292.466.687,51**	**397.517.138.143,22**	**444.009.727.121,27**	**468.731.239.357,00**	**465.316.924.124,00**	**483.711.172.548,99**	**84,89**
Belanja Pegawai	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00	240.644.834.014,00	259.237.850.902,00	246.879.933.557,00	275.738.214.701,00	53,06
Belanja Barang dan Jasa	214.487.904.967,00	115.269.632.648,50	186.235.989.165,00	190.660.034.017,00	189.393.433.222,00	186.955.981.790,99	31,20
Belanja Bunga	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72	796.043.279,27	891.962.272,00	1.122.101.270,00	1.052.126.059,00	0,59
Belanja Hibah	5.185.275.249,00	3.309.250.287,00	13.936.860.663,00	14.110.242.166,00	24.475.356.075,00	17.587.499.998,00	0,04
Belanja Bantuan Sosial	3.557.137.500,00	2.950.150.000,00	2.396.000.000,00	3.831.150.000,00	3.446.100.000,00	2.377.350.000,00	0,01
Belanja Modal	**94.384.258.018,50**	**63.699.147.392,57**	**85.611.045.938,00**	**116.514.679.424,00**	**84.381.971.361,00**	**73.075.789.709,00**	13,90
Belanja Modal Tanah	577.625.000,00	800.006.000,00	-	-	-		
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.959.464.883,50	29.000.506.074,70	20.880.045.268,00	17.666.803.013,00	12.084.173.858,00	35.246.025.880,00	4,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.886.728.863,00	25.216.284.417,82	14.804.687.034,00	41.516.117.751,00	35.635.719.133,00	12.043.741.217,00	5,87
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.411.798.670,00	8.025.081.127,05	49.683.258.936,00	57.231.799.760,00	36.392.598.160,00	24.991.542.821,00	5,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	548.640.602,00	657.269.773,00	243.054.700,00	99.958.900,00	269.480.210,00	794.479.791,00	1,10
Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00	0,00				
Belanja Modal Dana BLUD	0,00	0,00	0,00				

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-rata
BeLanja Tak Terduga	**67.154.981,00**	**15.675.538.545,00**	**2.655.984.000,00**	**294.991.005,00**	**836.646.211,00**	**2.479.496.967,00**	**0,14**
BeLanja Tak Terduga	67.154.981,00	15.675.538.545,00	2.655.984.000,00	294.991.005,00	836.646.211,00	2.479.496.967,00	**0,14**
TRANSFER	**70.728.943.435,00**	**67.371.834.124,00**	**66.908.297.413,00**	**3.699.306.355,00**	**56.529.371.265,00**	**63.869.919.546,00**	**9,31**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**1.006.666.600,00**	**877.460.000,00**	**885.532.503,00**	**1.046.900.955,00**	**954.510.748,00**	**857.466.546,00**	**0,16**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	597.333.800,00	566.650.000,00	558.532.503,00	637.792.686,00	620.462.410,00	622.798.506,00	
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	409.332.800,00	-	327.000.000,00	409.108.269,00	334.048.338,00	234.668.040,00	
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya		310.810.000,00	-	-			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**69.722.276.835,00**	**66.494.374.124,00**	**66.022.764.910,00**	**2.652.405.400,00**	**55.574.860.517,00**	**63.012.453.000,00**	**9,15**
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	69.171.227.892,00	65.909.710.000,00	66.022.764.910,00	2.652.405.400,00	55.574.860.517,00	63.012.453.000,00	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	551.048.943,00	584.664.124,00					
Surplus/defisit	**15.553.640.366,08**	**32.594.205.826,77**	**-1.144.190.284,82**	**-23.006.188.527,38**	**-1.750.274.777,36**	**18.702.607.329,94**	

Sumber : LRA Audited 2019-2024 (data diolah)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa belanja pegawai merupakan belanja terbesar, hal ini dikarenakan kenaikan gaji dan tunjangan ASN serta penambahan jumlah Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) sebanyak 396 orang pada tahun 2024 dan 411 orang pada tahun 2023. Sedangkan untuk belanja barang dan jasa mengalami penurunan dikarenakan adanya kebijakan efisiensi anggaran.

3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari :

1) Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
2) Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang;dan
3) Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

Memanfaatkan pembiayaan daerah secara signifikan merupakan fokus kebijakan dalam proses pembangunan daerah, kecuali pemanfaatan SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) tahun sebelumnya yang di gunakan untuk proses pembiayaan anggaran tahun anggaran selanjutnya. Rata-rata pertumbuhan SilPA Tahun 2019-2024 tercapai 0,27%, sehingga berimplikasi terhadap pencapaian sasaran

pembangunan. Cukup tingginya SilPA tahun 2019–2023, hal ini disebabkan karena disamping adanya kebijakan penggunaan anggaran yang lebih efektif dan efisien, juga terjadinya pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Hal ini menjadi salah satu hambatan bagi SKPD dalam melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Sedangkan rata-rata pertumbuhan sisa lebih pembiayaan anggaran berkorelasi dengan rata-rata pertumbuhan SiLPA. Perkembangan realisasi dan pertumbuhan pembiayaan daerah tahun 2019-2024, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.190
Perkembangan Realisasi dan Rata-rata Pertumbuhan Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
PEMBIAYAAN							
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**12.937.426.797,11**	**13.393.565.535,47**	**44.095.564.695,58**	**38.719.707.744,76**	**12.116.356.260,00**	**8.772.197.707,02**	
Penggunaan SILPA	4.848.420.336,05	13.369.052.535,47	44.069.104.695,58	38.719.707.744,76	12.114.946.260,00	8.753.029.707,02	0,37
Pinjaman Dalam Negeri	8.008.445.961,06	-	-				
Penerimaan Kembali Piutang	80.560.500,00	24.513.000,00	26.460.000,00	-	1.410.000,00	19.168.000,00	-0,23
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**15.122.014.627,72**	**1.918.666.666,66**	**4.231.666.666,00**	**3.636.666.668,00**	**1.369.666.668,00**	**1.166.666.666,00**	**0,11**
Penyertaan Modal / Investasi Pemerintah Daerah	5.946.902.000,00	752.000.000,00	3.000.000.000,00	2.000.000.000,00			0,41
Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri	9.175.112.627,72	1.166.666.666,66	1.166.666.666,00	1.166.666.668,00	1.166.666.668,00	1.166.666.666,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah			65.000.000,00	470.000.000,00	203.000.000,00		
Pembiayaan Netto	**-2.184.587.830,61**	**11.474.898.868,81**	**39.863.898.029,58**	**35.083.041.076,76**	**10.746.689.592,00**	**7.605.531.041,02**	**0,42**
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	**13.369.052.535,47**	**44.069.104.695,58**	**38.719.707.744,76**	**12.076.852.549,38**	**8.996.414.814,64**	**7.605.531.041,02**	**-0,27**

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa dalam periode 2019-2024 Pemerintah Kota Sawahlunto mengalami defisit anggaran, namun dapat ditutupi oleh pembiayaan neto yang ada. Hal ini menunjukkan kondisi keuangan daerah selama lima tahun terakhir cenderung kurang optimal dalam memenuhi fiskal pembangunan. Sehingga berdampak terhadap pencapaian kinerja pembangunan daerah yang tidak dapat berjalan secara maksimal.

4. Neraca Daerah

Neraca Daerah mengambarkan posisi keuangan atau kekayaan daerah pada akhir periode tertentu. Neraca daerah terdiri dari gambaran aset atau kekayaan daerah, kewajiban daerah, dan ekuitas atau modal daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah pada periode tertentu.Neraca daerah memberikan informasi penting kepada semua stakeholder terutama kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif maupun para kreditur/pemberi pinjaman serta masyarakat luas lainnya tentang jumlah aset atau hak yang harus diterima, kewajiban yang harus dibayar serta ekuitas yang dimiliki Pemerintah Daerah pada tanggal tertentu.

Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas. Setiap elemen utama neraca kemudian dijabarkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Perkembangan Neraca tersebut disusun berdasarkan kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Hal ini sesuai dengan Amanah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 32, bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban APBN/APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Perkembangan Neraca Daerah Kota Sawahlunto dan rata-rata pertumbuhannya Tahun Anggaran 2019-2024 menunjukkan kondisi relatif baik. Hal ini ditandai rendahnya rata-rata pertumbuhan aset sebesar 0,07 % dan rata-rata pertumbuhan ekuitas sebesar 0,07%. Rendahnya pertumbuhan aset disebabkan karena cukup tingginya pertumbuhan penyusutan aset tetap dan penyisihan investasi dana bergulir serta selama beberapa tahun terakhir realisasi belanja modal mengalami penurunan dikarenakan kondisi keuangan daerah. Kondisi ini mencerminkan relatif banyaknya jumlah aset tetap yang tidak bernilai ekonomis, sehingga membebankan terhadap kondisi keuangan daerah.

Perkembangan dan rata-rata pertumbuhan neraca Pemerintah Kota Sawahlunto tahun anggaran 2019-2024 dan rata-rata pertumbuhannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.191
Perkembangan dan Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2019-2024

Uraian	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
ASET							
Aset Lancar	37.219.485.368,40	52.885.940.110,43	54.786.319.119,00	36.160.347.569,89	49.783.489.159,54	43.653.344.948,32	0,07
Investasi Jangka Panjang	101.115.725.996,06	102.267.209.148,56	104.963.129.655,56	104.370.563.330,81	103.892.572.695,94	103.284.082.189,94	0,004
Aset Tetap	610.763.954.775,30	802.873.919.535,35	809.890.893.290,38	825.021.532.206,20	831.245.506.526,73	864.749.808.339,58	0,08
Dana Cadangan							
Aset Lainnya	20.607.403.558,45	20.360.559.832,45	23.824.772.987,25	31.920.474.024,45	61.287.939.483,93	53.167.631.875,93	0,26
JUMLAH ASET	**769.706.569.698,21**	**978.387.628.626,79**	**993.465.115.052,19**	**997.472.917.131,35**	**1.046.209.507.866,14**	**1.064.854.867.353,77**	0,07
KEWAJIBAN DAN EKUITAS							
KEWAJIBAN							
Kewajiban Jangka Pendek	9.600.519.502,67	6.535.863.729,71	11.590.811.435,33	10.159.629.182,66	15.790.330.467,52	12.197.048.852,03	0,13
Kewajiban Jangka Panjang	19.424.375.712,52	17.105.192.770,14	9.333.333.111,03	8.166.666.441,03	6.999.999.773,00	5.833.333.109,03	-0,20
JUMLAH KEWAJIBAN	**29.024.895.215,19**	**23.641.056.499,85**	**20.924.144.546,36**	**18.326.295.623,69**	**22.790.330.240,52**	**18.030.381.961,06**	-0,08
EKUITAS							
SILPA							
Pendapatan yang ditangguhkan							

Uraian	TA 2019	TA 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	Pertumbuhan Rata-Rata (%)
Cadangan Piutang							
Cadangan Persediaan							
Dana Untuk Pembayaran Utang Jk Pendek							
EDL Bukan Silpa							
Ekuitas Dana Investasi							
JUMLAH EKUITAS	**740.681.674.483,02**	**954.746.572.126,94**	**972.540.970.505,83**	**979.146.621.507,66**	**1.023.419.177.625,62**	**1.046.824.485.392,71**	**0,07**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	**769.706.569.698,21**	**978.387.628.626,79**	**993.465.115.052,19**	**997.472.917.131,35**	**1.046.209.507.866,14**	**1.064.854.867.353,77**	**0,07**

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024(data diolah)

Berdasarkan neraca daerah di atas, maka dilakukan analisis terhadap neraca daerah untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto melalui perhitungan rasio likuiditas dan solvabilitas. Rasio likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjang. Analisis rasio likuiditas dianalisis menggunakan analisis rasio lancar dan rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara asset lancar dengan kewajiban lancar. Sedangkan rasio cepat dihitung dengan membandingkan antara aset lancar dikurangi persediaan dengan kewajiban lancar.

Hasil perhitungan menunjukan perkembangan kurang baik karena kedua rasio masih diatas 1, sedangkan analisis rasio solvabilitas yang bertujuan untuk melihat dan menganalisis kemampuan asset dalam memenuhi kewajiban entitas dimasa mendatang dan untuk melihat dan menganalisis komposisi sumber pendanaan entitas dan memenuhi kewajiban entitas dimasa yang akan datang . Hasil analisis rasio total hutang terhadap total aset dan Rasio Total hutang terhadap modal menunjukan dibawah 1 per 100, yang mengambarkan bahwa asset mampu untuk memenuhi kewajiban dimasa mendatang.

Tabel 2.192
Perkembangan Rasio Keuangan Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2019-2024 (%)

Uraian		2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Likuiditas	Rasio Lancar	3,88	8,09	4,73	3,56	3,15	3,58
	Rasio Quick	3,67	7,98	4,43	3,24	3,05	3,05
Rasio Solvabilitas	Rasio total hutang terhadap total asset	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
	Rasio Total hutang terhadap modal	0,04	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

B. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2019-2024

Dalam membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah, Pendapatan daerah dan besarannya sangat menentukan kemampuan daerah dalam melaksanakan program-program pembangunannya. Pendapatan daerah dirumuskan sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat Pendapatan daerah diupayakan selalu meningkat seiring pertumbuhan indikator kondisi perekonomian daerah dan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Peningkatan pendapatan daerah dilakukan baik dengan intensifikasi maupun ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan baik dari potensi daerah sendiri maupun dari pemerintah pusat maupun pemerintah propinsi.

Kebijakan pendapatan daerah adalah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan daerah dan retribusi daerah menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan menurut obyek pendapatan mencakup: a). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, b). Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah menurut obyek pendapatan yang terdiri dari: a). Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan, b). Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, c). Jasa Giro, d). Hasil Pengelolaan Dana Bergulir, e). Pendapatan Bunga, f). Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah, g). Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, h). Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan i). Pendapatan dari Pengembalian, j). Pendapatan BLUD, k). Pendapatan Denda atas Pelanggaran Daerah.

Permasalahan utama pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2019-2024 adalah :

1. Tingginya tingkat ketergantungan Pemerintah Kota Sawahlunto terhadap dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi. Kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah terhadap pendapatan hanya berkisar 8-11%. Pendapatan Kota Sawahlunto sangat bergantung pada penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi.

2. Kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi dan stabilitas nasional menyebabkan adanya penyesuaian dan perubahan pada postur APBN yang berdampak pada penyaluran dana transfer dan dana desa. Ditambah dengan aturan pengelolaan keuangan yang bersifat dinamis dan mengalami perubahan aturan, misalnya kebijakan restrukturisasi anggaran.

3. Hak-hak pemerintah daerah yang bersumber dari Dana Bagi Hasil belum optimal karena kurang akuratnya alokasi untuk pemerintah daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

4. Belum optimalnya pemanfaatan aset daerah sebagai salah satu sumber penerimaan PAD. Berdasarkan data laporan keuangan selama beberapa tahun terakhir ini, maka dapat dilihat bahwa kontribusi retribusi pemakaian kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sangat kecil. Perlu dilakukan kajian dan inventarisasi terhadap pengoptimalan pemanfaatan barang milik daerah demi peningkatan pendapatan. Masih banyaknya potensi pendapatan yang belum tergali serta aset barang milik daerah yang bersifat *idle* mengakibatkan kerugian bagi Kota Sawahlunto.

5. Belum optimalnya kinerja keuangan beberapa unit usaha daerah sehingga kontribusi terhadap PAD masih rendah. Pada Kota Sawahlunto, beberapa unit usaha belum memberikan kontribusi pendapatan terhadap pendapatan daerah. Penerimaaan hanya diperoleh dari Bank Nagari berupa dividen atas penyertaan modal pada bank tersebut

Dari analisa permasalahan yang ada di atas maka kebijakan pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Optimalisasi sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan dengan memaksimalkan penggunaan teknologi informasi, perbaikan administrasi perpajakan dan peningkatan kerja sama dengan *stakeholder*. Dengan adanya Undang- Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, maka Kota Sawahlunto perlu melakukan penyederhanaan sistem perpajakan dan retribusi sesuai amanat UU tersebut.
2. Peningkatan pelayanan retribusi daerah melalui pengembangan aplikasi sistem pemungutan secara elektronik dan *push android* yang menyajikan tagihan secara *real time* dan dukungan transaksi non tunai.
3. Peningkatan kualitas sumber daya manusia dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan secara tepat dan kondusif melalui pelatihan, pelayanan yang mudah dan berkualitas serta edukasi dan hubungan masyarakat yang efektif.
4. Peningkatan sarana dan prasarana yang secara langsung mendukung peningkatan pendapatan daerah.
5. Peningkatan kualitas dan intensitas koordinasi serta kerja sama dengan pemerintah pusat dan pemerintah propinsi dalam pengelolaan pendapatan daerah.
6. Penegakkan *law enforcement* berupa denda pajak bagi wajib pajak yang menunggak pembayaran pajaknya.
7. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di kawasan-kawasan tertentu secara bertahap, dengan cara menggunakan Peta Zona Nilai Tanah tahun terbaru sebagai pedoman untuk perhitungan Nilai Pasar dan Transaksi Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Dari tahun 2018 -2019 realisasi pendapatan mengalami kenaikan, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan seiring dengan terjadinya pandemi Covid-19 yang berdampak pada penurunan kegiatan ekonomi nasional dan daerah. Sehingga baik

jumlah pendapatan asli daerah maupun pendapatan transfer mengalami penurunan. Hal ini berlanjut pada tahun anggaran 2021 dimana aktivitas masyarakat dan perekonomian masih dibatasi dengan kebijakan Perlakuan Pembatasan Kegiatan Perkantoran (PPKM) akibat masih belum melandainya pandemi covid-19. Hal ini tampak nyata pada pendapatan retribusi daerah akibat lumpuhnya beberapa kegiatan perekonomian.

Sedangkan pada tahun 2022, maka tampak terjadi peningkatan realisasi pendapatan daerah seiring dengan makin membaiknya tingkat perekonomian daerah yakni menjadi Rp. 620.582.717.802,53 atau terdapat peningkatan sebesar 3,77% dibandingkan tahun 2021. Sedangkan jika dilihat dari derajat otonomi fiskal daerah, maka diketahui bahwa Kota Sawahlunto berada pada tingkat yang sangat kurang, artinya sangat mengandalkan penerimaan dana transfer dari Pemerintah Pusat dan provinsi. Sedangkan jumlah PAD yang dihasilkan sangat minim, sehingga Kota Sawahlunto dikategorikan sangat tidak mandiri dalam penyediaan anggaran.

1. Kebijakan Pengelolaan Belanja

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah.

Untuk belanja daerah dialokasikan untuk 1) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial; 2) Belanja Modal (BM) yang terdiri dari BM Tanah, BM Peralatan dan Mesin, BM Gedung dan Bangunan, BM Jalan, BM Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Aset Lainnya; 3) Belanja Tak Terduga; 4) Belanja Transfer yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Kebijakan Belanja Daerah yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Sawahlunto sebagai berikut:

1. Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.
2. Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja untuk kebutuhan perintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan

pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

3. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan dalam mendukung prioritas pembangunan daerah dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada Tahun Anggaran sebelumnya.
4. Pemenuhan *mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :
   - Alokasi anggaran pendidikan secara konisten dan berkesinambungan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah sebagaimana diamanatkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Pendidikan untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indicator SPM bidang pendidikan.
   - Alokasi anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan secara konsisten dan berkesinambungan serta memadai untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian SPM bidang kesehatan.
   - Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
5. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik, perangkat daerah menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan skala prioritas.
6. Belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan untuk meningkatkan kemampuan pendapatan daerah.
7. Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja baik dalam konteks daerah, perangkat daerah maupun program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab.
8. Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan, analisis standar belanja dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
9. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Belanja daerah yang berasal dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai kententuan peraturan perundang-undangan.

11. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal sebagaimana diatur dalam pasal 18 ayat (1)Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang menegaskan bahwa Penyelenggara Pemerintahan Daerah memprioritaskan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang kemudian diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

2. Kebijakan Pengelolaan Pembiayaan

Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Secara umum komponen pembiayaan pemerintah Kota Sawahlunto terdiri dari :

a. Penerimaan pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah.
b. Pengeluaran pembiayaan daerah yang didalamnya terdiri atas pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah dan pembayaran pokok utang;dan
c. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya sebagai sumber penerimaan pada APBD Tahun Anggaran berikutnya, didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional. SiLPA diupayakan menurun seiring dengan semakin efektifnya penggunaan Anggaran.

Sementara itu, disisi kebijakan pembiayaan daerah Tahun 2019-2024, dibagi atas dua yaitu, penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut :

Kebijakan dalam rangka penerimaan pembiayaan

- Melakukan efektivitas penggunaan dana sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya yang diprioritaskan untuk membiayai kegiatan lanjutan serta membiayai utang belanja tahun sebelumnya serta sekaligus dalam menutup defisit anggaran.
- Melakukan pencairan atas dana cadangan yang telah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto
- Melakukan pemungutan dan penagihan atas piutang daerah.

Kebijakan dalam rangka pengeluaran pembiayaan

- Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan International Bank For Recontruct &

Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.

- Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/UKM dan masyakat.

3. Proporsi Penggunaan Anggaran

Proporsi penggunaan anggaran belanja tidak langsung selama lima tahun terakhir tetap didominasi oleh komponen belanja operasi dengan rata-rata penggunaan sebesar 84,89%. Hal ini disebabkan karena adanya kebijakan pemerintah terhadap peningkatan kesejahteraan PNS dan pensiunan PNS serta adanya penerimaan CPNS dan PPPK yang mengakibatkan meningkatnya belanja pegawai. Selain itu, proporsi realisasi belanja operasi lima tahun terakhir didominasi komponen belanja barang dan jasa yang ditandai dengan rata-rata penggunaan sebesar 31,20%. Sedangkan proporsi penggunaan belanja modal cenderung stagnan dari tahun ke tahun ditandai penggunaan rata-rata sebesar 13,90% dikarenakan adanya pembatasan belanja modal karena kondisi keuangan daerah. Kondisi ini mencerminkan penggunaan anggaran belum proporsional terhadap alokasi anggaran belanja daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Perkembangan proporsi realisasi komponen belanja operasional dan belanja lainnya dari Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024, dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.193
Perkembangan Proporsi Realisasi Anggaran Belanja Kota Sawahlunto
Tahun Anggaran 2019-2024

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	rata-rata
BELANJA	**551.743.879.687,01**	**476.891.824.080,79**	**599.185.054.472,27**	**589.240.216.141,00**	**607.064.912.961,00**	**623.136.378.770,99**	
Belanja Operasi	**457.292.466.687,51**	**397.517.138.143,22**	**444.009.727.121,27**	**468.731.239.357,00**	**465.316.924.124,00**	**483.711.172.548,99**	**84,89**
Belanja Pegawai	232.810.851.029,00	274.835.588.932,00	240.644.834.014,00	259.237.850.902,00	246.879.933.557,00	275.738.214.701,00	53,06
Belanja Barang dan Jasa	214.487.904.967,00	115.269.632.648,50	186.235.989.165,00	190.660.034.017,00	189.393.433.222,00	186.955.981.790,99	31,20
Belanja Bunga	1.251.297.942,51	1.152.516.275,72	796.043.279,27	891.962.272,00	1.122.101.270,00	1.052.126.059,00	0,59
Belanja Hibah	5.185.275.249,00	3.309.250.287,00	13.936.860.663,00	14.110.242.166,00	24.475.356.075,00	17.587.499.998,00	0,04
Belanja Bantuan Sosial	3.557.137.500,00	2.950.150.000,00	2.396.000.000,00	3.831.150.000,00	3.446.100.000,00	2.377.350.000,00	0,01
Belanja Modal	**94.384.258.018,50**	**63.699.147.392,57**	**85.611.045.938,00**	**116.514.679.424,00**	**84.381.971.361,00**	**73.075.789.709,00**	13,90
Belanja Modal Tanah	577.625.000,00	800.006.000,00	-	-	-		

URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	2024	rata-rata
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	27.959.464.883,50	29.000.506.074,70	20.880.045.268,00	17.666.803.013,00	12.084.173.858,00	35.246.025.880,00	4,89
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	12.886.728.863,00	25.216.284.417,82	14.804.687.034,00	41.516.117.751,00	35.635.719.133,00	12.043.741.217,00	5,87
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	52.411.798.670,00	8.025.081.127,05	49.683.258.936,00	57.231.799.760,00	36.392.598.160,00	24.991.542.821,00	5,99
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	548.640.602,00	657.269.773,00	243.054.700,00	99.958.900,00	269.480.210,00	794.479.791,00	1,10
Belanja Modal Dana BOS	0,00	0,00	0,00				
Belanja Modal Dana BLUD	0,00	0,00	0,00				
BeLanja Tak Terduga	**67.154.981,00**	**15.675.538.545,00**	**2.655.984.000,00**	**294.991.005,00**	**836.646.211,00**	**2.479.496.967,00**	**0,14**
BeLanja Tak Terduga	67.154.981,00	15.675.538.545,00	2.655.984.000,00	294.991.005,00	836.646.211,00	2.479.496.967,00	**0,14**
TRANSFER	**70.728.943.435,00**	**67.371.834.124,00**	**66.908.297.413,00**	**3.699.306.355,00**	**56.529.371.265,00**	**63.869.919.546,00**	**9,31**
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN	**1.006.666.600,00**	**877.460.000,00**	**885.532.503,00**	**1.046.900.955,00**	**954.510.748,00**	**857.466.546,00**	**0,16**
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	597.333.800,00	566.650.000,00	558.532.503,00	637.792.686,00	620.462.410,00	622.798.506,00	
Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	409.332.800,00	-	327.000.000,00	409.108.269,00	334.048.338,00	234.668.040,00	
Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya		310.810.000,00	-	-			
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN	**69.722.276.835,00**	**66.494.374.124,00**	**66.022.764.910,00**	**2.652.405.400,00**	**55.574.860.517,00**	**63.012.453.000,00**	**9,15**
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	69.171.227.892,00	65.909.710.000,00	66.022.764.910,00	2.652.405.400,00	55.574.860.517,00	63.012.453.000,00	
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	551.048.943,00	584.664.124,00					
Surplus/defisit	**15.553.640.366,08**	**32.594.205.826,77**	**-1.144.190.284,82**	**-23.006.188.527,38**	**-1.750.274.777,36**	**18.702.607.329,94**	

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024(data diolah)

Disisi lain, penggunaan realisasi anggaran dialokasi kepada pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkembangan penggunaan realisasi anggaran tersebut, selama lima tahun terakhir mengalami fluktuasi dan cenderung menurun seiring dengan kebijakan daerah.

Tabel 2.194
Perkembangan Realisasi Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2023

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Belanja Tidak Langsung	**301.032.488.864,00**	**310.525.453.292,00**	**308.137.884.755,00**	**317.844.102.390,00**	**304.025.662.586,00**
Belanja Gaji dan Tunjangan	137.033.482.750,00	152.924.607.521,00	149.657.542.690,00	159.063.442.114,00	147.836.399.396,00
Tambahan Penghasilan PNS	87.962.530.425,00	83.675.937.049,00	82.883.452.739,00	91.358.314.594,00	89.817.988.977,00
Insentif Pemungutan Pajak Daerah	216.867.030,00	225.252.250,00	192.202.663,00	196.717.448,00	246.872.380,00
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	132.816.281,00	123.803.140,00	90.303.142,00	115.985.264,00	450.193.617,00

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
Gaji dan Tunjangan DPRD / KDH / WKDH	4.406.800.000,00	5.619.355.084,00	7.821.421.984,00	8.412.473.891,00	8.640.936.235,00
Belanja Bagi Hasil Pajak DaerahKepada Kabupaten/Kota	70.728.943.435,00	67.371.834.124,00	66.908.297.413,00	58.112.504.955,00	56.529.371.265,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	551.048.943,00	584.664.124,00	584.664.124,00	584.664.124,00	503.900.716,00
Pengeluaran Pembiayaan	**10.426.410.570,23**	**2.319.182.942,38**	**2.058.628.940,00**	**2.058.628.940,00**	**2.288.767.938,00**
Pembayaran pokok utang dan bunga	10.426.410.570,23	2.319.182.942,38	2.058.628.940,00	2.058.628.940,00	2.288.767.938,00
Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat (a+b)	**311.458.899.434,23**	**312.844.636.234,38**	**310.196.513.695,00**	**319.902.731.330,00**	**306.314.430.524,00**

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2023(data diolah)

4. Analisis Pembiayaaan

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu, penerimaan pinjaman, obligasi, transfer dari dana cadangan, maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Perkembangan dan rata-rata pertumbuhan defisit riil anggaran Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024, terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.195
Perkembangan dan Rata-rata Pertumbuhan Defisit Riil Anggaran Kota Sawahlunto Tahun Anggaran 2019-2024

Uraian	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Rata-Rata Pertum-buhan (%)
Pendapatan	638.026.463.488,09	576.857.864.031,56	598.040.864.187,45	620.647.226.213,62	605.314.638.183,64	641.838.986.100,93	-0,02
Belanja	551.743.879.687,01	476.891.824.080,79	599.185.054.472,27	589.240.216.141,00	607.064.912.961,00	623.136.378.770,99	0,03
Pengeluaran pembiayaan	15.122.014.627,72	1.918.666.666,66	4.231.666.666,00	3.636.666.668,00	1.369.666.668,00	1.166.666.666,00	-0,62
Defisit / surplus riil	**71.160.569.173,36**	**98.047.373.284,11**	**-5.375.856.950,82**	**27.770.343.404,62**	**-3.119.941.445,36**	**17.535.940.663,94**	-1,11

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024(data diolah)

Sedangkan untuk realisasi SILPA Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.196
SILPA KOTA SAWAHLUNTO TA 2019-2024

No	Uraian	SILPA
1	Tahun Anggaran 2019	13.369.052.535,47
2	Tahun Anggaran 2020	44.069.104.695,58
3	Tahun Anggaran 2021	38.719.707.744,76
4	Tahun Anggaran 2022	12.076.852.549,38
5	Tahun Anggaran 2023	8.996.414.814,64
6	Tahun Anggaran 2024	26.308.138.370,96

Sumber : LKPD Audited Kota Sawahlunto 2019-2024 (data diolah)

Silpa Kota Sawahlunto selama 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi namun menunjukkan kecenderungan menurun.

Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2030

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan program unggulan Kepala Daerah. Langkah awal yang harus dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah sebagaimana telah dihitung pada bagian di atas dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Kapasitas riil keuangan daerah merupakan total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama. Kebijakan pendanaan merupakan salah satu bagian penting dari proses perencanaan keuangan suatu daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengklasifikan Pendapatan Daerah terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah, yang terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain–lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah ;
2. Pendapatan Transfer, merupakan pendapatan yang terdiri dari transfer Pemerintah Pusat dan transfer antar-daerah. Transfer Pemerintah Pusat terdiri atas Dana Perimbangan, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Keistimewaan, dan Dana Desa. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Sumber Daya Alam (Bukan Pajak), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Pengalokasian transfer Pemerintah Pusat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Transfer Antar-Daerah terdiri atas Pendapatan Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas Hibah, Dana Darurat, dan/atau Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan struktur belanja daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 mengalami perubahan dibandingkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Struktur belanja daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 terdiri dari :

1. Belanja Operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
2. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

2.2.2 Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029

Dalam penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029 ini, kebijakan perencanaan pendapatan berbeda dari tahun sebelumnya karena dengan berlakunya ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terjadi beberapa perubahan yang cukup mendasar dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Selain mempedomani adanya perubahan ketentuan perundang-undangan dalam penyusunan kebijakan pendapatan daerah, kinerja keuangan tahun sebelumnya juga perlu menjadi perhatian. Berikut kebijakan pendapatan daerah Kota Sawahlunto untuk lima tahun mendatang adalah :

A. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Akan Diproyeksikan

Pengelolaan keuangan daerah merupakan hal yang sangat penting di dalam rangka optimalisasi pemanfaatan potensi-potensi penerimaan daerah untuk melaksanakan pembangunan daerah, sehingga dapat tercapai target-target dalam peningkatan kualitas pembangunan. Guna mengetahui pertumbuhan keuangan daerah diperlukan suatu analisis pengelolaan keuangan daerah masa lalu sebagai dasar di dalam penentuan proyeksi penerimaan keuangan daerah pada tahun-tahun mendatang.

Berbagai objek penerimaan daerah dianalisis untuk memahami perilaku atau karakteristik penerimaan selama ini. Analisis ini dilakukan untuk memperoleh gambaran kapasitas pendapatan daerah dengan proyeksi tahun-tahun mendatang,. Dengan melihat kemampuan tersebut dapat diperoleh gambaran dalam penentuan kebijakan daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah dengan pendapatan yang cukup kepada daerah dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Proyeksi pendapatan merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Sehingga proyeksi pendapatan daerah harus didapat nilai perkiraan yang terukur secara rasional yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Analisis tersebut diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan di masa yang akan datang, dengan mempertimbangkan peluang dan hambatan yang dihadapi. Dalam melakukan analisis pengelolaan keuangan daerah, terlebih dahulu dilakukan analisis mengenai pendapatan daerah yang dilakukan dengan kerangka pemikiran, sebagaimana disajikan pada gambar berikut ini.

Gambar 2.5
Analisis Proyeksi Pendapatan Daerah Tahun 2025-2029

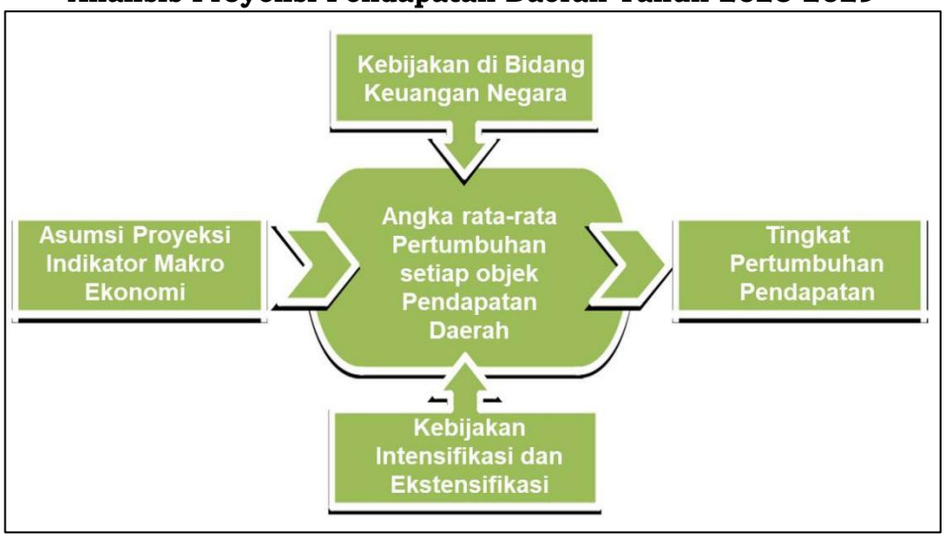

Sumber: PMDN Nomor 86 Tahun 2017

Dalam memproyeksikan pendapatan tahun 2025 digunakan format penyajian sesuai dengan PP Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan berdasarkan pada data dan mengkaitkan dengan informasi yang dapat mempengaruhi pertumbuhan pendapatan daerah, antara lain:

a) Angka rata-rata pertumbuhan pendapatan daerah masa lalu.
b) Asumsi indikator makro ekonomi (PDRB/ laju pertumbuhan ekonomi, inflasi dan lain-lain).
c) Kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah; dan
d) Kebijakan dibidang keuangan negara dan daerah.

1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyelenggaraan otonomi daerah pada prinsipnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Sumber pendapatan daerah harus seimbang dengan urusan pemerintah daerah, dengan mengoptimalkan potensi potensi pendapatan daerah. Pendapatan daerah antara lain diperoleh melalui Pajak dan Retribusi.

Sumber Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, terjadi beberapa perubahan dalam pengaturan pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian juga terdapat jenis pajak baru bagi daerah yakni opsen pajak atas Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi.

Selain ini juga terdapat restrukturisasi jenis pajak, pemberian sumber perpajakan daerah yang baru dan penyederhanaan jenis retribusi. Restrukturisasi pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis pajak yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini bertujuan antara lain untuk :

a. Untuk menyelaraskan objek pajak antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak;
b. Menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
c. Memudahkan pemantauan pemungutan pajak terintegrasi oleh pemerintah daerah; dan
d. Mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mengamanatkan penyederhanaan retribusi yang dilakukan melalui rasionalisasi jumlah retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Jumlah atas jenis objek retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan antara lain :

a. Agar retribusi yang akan dipungut pemerintah daerah dapat dipungut dengan efektif dengan biaya pemungutan yang lebih rendah.
b. Mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban pemerintah daerah.

Dari uraian di atas maka disusunlah beberapa kebijakan pendapatan daerah terkait dengan pajak daerah dan retribusi daerah :

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah
   Pemerintah Kota Sawahlunto melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalkan kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.
2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
   Menggali potensi sumber daya alam dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian, dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto yang bersumber dari retribusi.
3. Pengembangan Infrastruktur
   Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi, dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

   Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

   Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

   Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

   Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

2) Pendapatan Transfer

Untuk pendapatan transfer, pada penerimaan Dana Alokasi Umum terjadi peningkatan karena adanya kenaikan gaji PNS di tahun 2024 dan adanya penambahan alokasi DAU yang ditentukan peruntukannya. Untuk Dana Alokasi Khusus baik fisik maupun non fisik rata-rata terjadi penurunan.

Dari uraian di atas maka disusunlah beberapa kebijakan terkait dengan pendapatan transfer :

1. Mengupayakan peningkatan penerimaan yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai sumber penerimaan untuk membiayai belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti gaji pegawai dan kebutuhan lainnya dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
2. Mengupayakan peningkatan penerimaan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber penerimaan kegiatan yang bersifat khusus dalam membangun Kota Sawahlunto sesuai dengan karakteristik dan kepentingan Kota Sawahlunto dengan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
3. Mengupayakan peningkatan Dana Insentif Fiskal Daerah untuk menambah sumber pendapatan dan penerimaan daerah dengan mengupayakan pencapaian indikator kinerja yang digunakan dalam penilaian.
4. Mengupayakan peningkatan dana BOS dan dana sertifikasi bagi tenaga pendidik sebagai upaya menjamin ketersediaan sumber-sumber dana DAK Non Fisik.

5. Mengupayakan peningkatan penerimaan Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak dari pemerintah pusat dan provinsi untuk menambah ketersediaan sumber pendanaan pembangunan Kota Sawahlunto.
6. Mengupayakan bantuan keuangan dari pemerintah provinsi Sumatera Barat dan pihak ketiga lainnya.

Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) sumber yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer. Dalam proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tahun 2025-2029 ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan angka rata-rata pertumbuhan realisasi pendapatan daerah dan data keuangan APBD Tahun 2024 serta identifikasi potensi pajak dan retribusi daerah. Hal ini dilakukan agar proyeksi pendapatan daerah Kota Sawahlunto tidak terpaut jauh dengan pendanaan indikatif tahun yang terdekat.

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah Kota Sawahlunto pada tahun 2025-2029 direncanakan bersumber dari sumber-sumber sebagai berikut :

a. Pajak Daerah;
b. Retribusi Daerah;
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
d. Lain-lain PAD yang sah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer bersumber dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari dana perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Transfer Pemerintah Pusat, terdiri dari:
   A. Dana Perimbangan :
      (1) Dana Bagi Hasil (DBH)
      (2) Dana Alokasi Umum (DAU)
      (3) Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik
      (4) Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik
   B. Dana Desa (DD)

      Merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/ kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan yang menjadi kewenangan desa.
   C. Insentif Fiskal

      Insentif fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/ atau pencapaian kinerja pemerintahan

daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.

2. Transfer Antar Daerah

a. Pendapatan Bagi Hasil

Merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi yang terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), pajak air permukaan dan pajak rokok dialokasikan sesuai Peraturan Gubernur tentang Dana Bagi Hasil Pajak Propinsi .

b. Bantuan Keuangan

Pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan, baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus yang diterima dari pemerintah propinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya dianggarkan dalam APBD Pemerintah Kota Sawahlunto sepanjang sudah dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan.

Berlandaskan kebijakan pendapatan daerah tersebut, sehingga proyeksi pendapatan Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030 dengan mempertimbangkan analisis pendapatan daerah yang terukur, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.197
Proyeksi Pendapatan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2030

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
1	2	3	4	5	6	7	6
	PENDAPATAN DAERAH	**580.022.893.950,00**	**579.534.759.608,88**	**599.657.825.455,41**	**636.561.873.899,68**	**638.314.519.157,55**	**707.583.817.336,90**
4.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**75.593.282.944,00**	**77.105.148.602,88**	**99.228.214.449,41**	**137.632.262.893,68**	**140.384.908.151,55**	**209.654.206.330,90**
4.1.01	Pajak Daerah	15.576.717.548,00	15.888.251.898,96	19.860.314.873,70	26.811.425.079,50	27.347.653.581,08	35.551.949.655,41
4.1.02	Retribusi Daerah	34.992.938.253,00	35.692.797.018,06	42.831.356.421,67	57.822.331.169,26	58.978.777.792,64	85.519.227.799,33
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	17.153.003.674,00	17.496.063.747,48	24.494.489.246,47	36.741.733.869,71	37.476.568.547,10	63.710.166.530,07
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	7.870.623.469,00	8.028.035.938,38	12.042.053.907,57	16.256.772.775,22	16.581.908.230,72	24.872.862.346,09
	JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH	**75.593.282.944,00**	**77.105.148.602,88**	**99.228.214.449,41**	**137.632.262.893,68**	**140.384.908.151,55**	**209.654.206.330,90**
	PENDAPATAN TRANSFER	**504.429.611.006,00**	**502.429.611.006,00**	**500.429.611.006,00**	**498.929.611.006,00**	**497.929.611.006,00**	**497.929.611.006,00**
4.2.01.01	Dana Perimbangan	464.352.719.000,00	464.352.719.000,00	463.352.719.000,00	461.852.719.000,00	460.852.719.000,00	460.852.719.000,00
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	26.231.545.000,00	26.231.545.000,00	26.231.545.000,00	24.731.545.000,00	23.731.545.000,00	23.731.545.000,00
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00	382.035.642.000,00
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00	6.355.359.000,00
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	49.730.173.000,00	49.730.173.000,00	48.730.173.000,00	48.730.173.000,00	48.730.173.000,00	48.730.173.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	464.352.719.000,00	464.352.719.000,00	463.352.719.000,00	461.852.719.000,00	460.852.719.000,00	460.852.719.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Fiskal	8.752.114.000,00	6.752.114.000,00	5.752.114.000,00	5.752.114.000,00	5.752.114.000,00	5.752.114.000,00
4.2.01.05	Dana Desa	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00	21.612.927.000,00
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**30.365.041.000,00**	**28.365.041.000,00**	**27.365.041.000,00**	**27.365.041.000,00**	**27.365.041.000,00**	**27.365.041.000,00**
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00	9.711.851.006,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan						
	JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**9.711.851.006,00**	**9.711.851.006,00**	**9.711.851.006,00**	**9.711.851.006,00**	**9.711.851.006,00**	**9.711.851.006,00**
	TOTAL PENDAPATAN TRANSFER	**504.429.611.006,00**	**502.429.611.006,00**	**500.429.611.006,00**	**498.929.611.006,00**	**497.929.611.006,00**	**497.929.611.006,00**
	JUMLAH PENDAPATAN	**580.022.893.950,00**	**579.534.759.608,88**	**599.657.825.455,41**	**636.561.873.899,68**	**638.314.519.157,55**	**707.583.817.336,90**

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat digambarkan bahwa jumlah pendapatan transfer diproyeksikan minimal sama atau lebih rendah dari angka pendapatan setelah efisiensi anggaran. Angka ini merupakan angka yang pesimis dikarenakan adanya kebijakan presiden terkait efisiensi belanja melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 ,KMK 29 tahun 2025 tentang Perubahan Rincian TKD Tahun 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ. Hal in berdampak pada pengurangan pendapatan DAK dan DAU Pekerjaan Umum, pengurangan belanja perjalanan dinas, kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, seminar dan belanja rutin lainnya. Untuk belanja juga ditargetkan mengalami penurunan yang selaras dengan penurunan pendapatan. Namun Pendapatan Asli Daerah ditargetkan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan adanya pengurangan TKDD, maka daerah dituntut untuk berupaya meningkatkan PAD dengan melakukan berbagai terobosan.

B. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Selanjutnya, pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan, serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, efisien, efektif, akuntabel, berorientasi pada kinerja dan dapat bermanfaat banyak bagi masyarakat, serta dapat memberikan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.

Beberapa kebijakan yang telah diambil untuk penggunaan alokasi belanja yaitu sebagai berikut :

1. Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan.
2. Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran
3. Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horizontal
4. Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat

5. Prinsip pelaksanaan kegiatan menjadi money follow program
6. Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi SKPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat
7. Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam mengalokasikan anggaran
8. Penetapan tolak ukur dan target kinerja pada setiap kegiatan yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
9. Memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel dalam pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban.

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan belanja adalah :

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

   Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti infrastruktur, kesehatan, pendidikan, dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

   Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan pemerintah daerah untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

   Pemerintah Kota Sawahlunto perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

4. *E-Government* dan *E-Procurement*

   Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi, meningkatkan transparansi, dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

5. *Monitoring* dan Evaluasi Program

   Melakukan *monitoring* dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan output yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang

selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan hal tersebut, beberapa kebijakan belanja daerah Kota Sawahlunto terdiri atas :

1. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
   a. Belanja pegawai
      - Pemerintah daerah berkomitmen tetap berupaya dalam mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja.
      - Penganggaran gaji dan tunjangan memperhitungkan rencana kenaikan gaji dan tunjangan, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      - Mengalokasi penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan, jaminan kerja dan jaminan kematian.
   b. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk menganggarakan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan termasuk barang/jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan guna pencapaian RPD pada SKPD terkait.
   c. Belanja Bunga digunakan untuk pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman.
   d. Belanja Subsidi digunakan untuk subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   e. Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintah wajib dan pilihan kecuali ditentukan lain dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat. Hibah dianggarkan sebesar harga beli/ bangun ditambah seluruh belanja terkait langsung.
   f. Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang/ barang untuk yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
2. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.

3. Belanja tidak terduga (BTT) merupakan pengeluaran anggaran untuk keperluan darurat termasuk mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya.
4. Belanja transfer merupakan pengeluaran kepada daerah lainnya dan/atau dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah.
5. Hal-hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD antara sebagai berikut :
   a. Pemenuhan *Mandatory Spending*
   b. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Analisis mengenai belanja daerah, didasarkan pada kondisi perekonomian yang digambarkan melalui serangkaian asumsi indikator makro ekonomi, juga mengacu pada kebijakan pemerintah, serta mempertimbangkan kebijakan pembiayaan daerah, yang kemudian diformulasikan sehingga diperoleh angka rata-rata pertumbuhan pengeluaran wajib, dan mengikat, serta prioritas utama. Dari rata-rata tersebut, akan diperoleh tingkat pertumbuhan pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama, yang digunakan sebagai gambaran dasar untuk memperhitungkan bagian dari belanja daerah yang harus dipenuhi di masa yang akan datang, sebagaimana gambar berikut ini.

Gambar 2.6
Analisis Proyeksi Belanja Daerah tahun 2025-2029

Sumber: PMDN Nomor 86 Tahun 2017

Proyeksi belanja daerah dilakukan untuk memperoleh gambaran kebutuhan belanja operasi daerah. Dalam menentukan proyeksi belanja daerah dilakukan berdasarkan pendekatan yang berbeda untuk setiap jenis belanja.

Sedangkan kebijakan belanja daerah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan belanja wajib mengikat, belanja prioritas dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah serta belanja pendukung lainnya dengan arah kebijakan, sebagai berikut :

1. Mengupayakan atau membelanjakan sumber daya daerah yang lebih efisien, efektif, dan optimal dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Kota Sawahlunto;

2. Penganggaran belanja operasi diprioritaskan untuk menunjang pelayanan dasar masyarakat;
3. Mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia;
4. Pemanfaatan belanja daerah mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional dan daerah setiap tahunnya sesuai dengan kewenangan Pemerintah Kota Sawahlunto;

5. Mengefisienkan pengeluaran belanja yang bersifat umum dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada masing-masing Perangkat Daerah; dan
6. Melakukan analisis mengenai kesesuaian program, kegiatan dan sub kegiatan dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dengan pertimbangan manfaat yang akan didapatkan bagi masyarakat.

Proyeksi belanja Kota Sawahlunto tahun 2025-2030 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.198
Proyeksi Belanja Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2030

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
5	**BELANJA DAERAH**	**601.314.487.571,00**	**577.868.092.939,88**	**597.991.158.786,41**	**634.895.207.230,68**	**636.647.852.488,55**	**705.917.150.667,90**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**506.645.368.257,00**	**435.265.897.070,20**	**282.616.069.397,86**	**308.447.172.810,63**	**310.559.171.986,90**	**337.918.901.106,71**
5.1.01	Belanja Pegawai	309.202.775.681,00	293.659.642.878,84	184.090.284.344,47	195.421.387.757,24	196.569.629.082,98	215.188.235.713,62
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	185.097.832.618,00	137.133.122.601,36	94.875.785.053,39	95.375.785.053,39	96.839.542.903,92	119.080.665.393,09
5.1.03	Belanja Bunga	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	8.184.759.958,00	1.823.131.590,00	1.500.000.000,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	1.000.000.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	3.010.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	**506.645.368.257,00**	**435.265.897.070,20**	**282.616.069.397,86**	**308.447.172.810,63**	**310.559.171.986,90**	**337.918.901.106,71**
5.2	**BELANJA MODAL**	**25.025.329.284,00**	**75.525.835.869,68**	**248.298.729.388,56**	**259.371.674.420,05**	**260.512.320.501,65**	**301.421.889.561,19**
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.128.218.840,00	7.270.783.216,80	22.332.424.924,38	32.555.415.840,29	33.203.299.140,60	34.566.687.772,92
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	1.281.800.000,00	51.307.436.000,00	106.619.634.090,49	106.276.121.502,34	108.001.643.932,38	145.161.676.811,03
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.945.692.630,00	16.264.606.482,60	118.650.000.000,00	119.836.500.000,00	118.589.667.609,70	120.961.460.961,89
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	669.617.814,00	683.010.170,28	696.670.373,69	703.637.077,42	717.709.818,97	732.064.015,35
	JUMLAH BELANJA MODAL	**25.025.329.284,00**	**75.525.835.869,68**	**248.298.729.388,56**	**259.371.674.420,05**	**260.512.320.501,65**	**301.421.889.561,19**
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**4.067.430.030,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.067.430.030,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	1.000.000.000,00	2.000.000.000,00
	JUMLAH BELANJA TAK TERDUGA	**4.067.430.030,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**2.500.000.000,00**	**1.000.000.000,00**	**2.000.000.000,00**
5.4	**BELANJA TRANSFER**	**65.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00	1.557.720.000,00
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	346.734.000,00	346.734.000,00	346.734.000,00	346.734.000,00	346.734.000,00	346.734.000,00
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	63.671.906.000,00	62.671.906.000,00	62.671.906.000,00	62.671.906.000,00	62.671.906.000,00	62.671.906.000,00
	JUMLAH BELANJA TRANSFER	**65.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**	**64.576.360.000,00**

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
	JUMLAH BELANJA	601.314.487.571,00	577.868.092.939,88	597.991.158.786,41	634.895.207.230,68	636.647.852.488,55	705.917.150.667,90
	SURPLUS/DEFISIT	(21.291.593.621,00)	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

Proyeksi belanja daerah untuk 5 tahun kedepan dapat dilihat pada tabel diatas dimana jumlah pendapatan akan disesuaikan dengan jumlah belanja sehingga tidak terjadi defisit. Kota Sawahlunto harus berada pada posisi surplus dikarenakan adanya kewajiban Kota Sawahlunto untuk membayar hutang dan pemberian pinjaman dana bergulir. Kemudian pada tahun anggaran 2028 dan 2029 dialokasikan anggaran pelaksanaan pemilihan umum pada belanja hibah. Proyeksi belanja diatas juga untuk memenuhi kewajiban Pemerintah Daerah yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yakni:

a. Pasal 146 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja pegawai Daerah diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD pada penyusunan proyeksi keuangan daerah Tahun 2027 sampai dengan Tahun 2030.

Untuk kewajiban pemenuhan belanja pegawai untuk periode 2026-2030 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.199
Belanja Pegawai Kota Sawahlunto
Tahun 2026-2030

No	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
1	Belanja Pegawai	267.111.605.878,84	157.542.247.344,47	168.873.350.757,24	170.021.592.082,98	188.640.198.713,62
2	Belanja Tunjangan Guru	26.548.037.000,00	26.548.037.000,00	26.548.037.000,00	26.548.037.000,00	26.548.037.000,00
	Total Belanja Daerah	577.868.092.939,88	597.991.158.786,41	634.895.207.230,68	636.647.852.488,55	705.917.150.667,90
	Rasio Belanja Pegawai	50,82	30,78	30,78	30,88	30,48

Dari tabel diatas, dapat diketahui bahwa persentase belanja pegawai Kota Sawahlunto mulai tahun anggaran 2027 telah sesuai dengan ketentuan dimana batas maksimal belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling banyak adalah 30%.

b. Pasal 147 ayat (1) dan (3) bahwa Daerah wajib mengalokasikan belanja infrastruktur pelayanan publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa, yang ditempatkan pada Belanja Modal pada penyusunan proyeksi keuangan daerah Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2030.

Tabel 2.200
Proyeksi Pemenuhan Belanja Infrastruktur 2026-2030

No	Uraian	2026	2027	2028	2029	2030
1	Belanja Barang dan Jasa yang mendukung infrastruktur publik	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00	21.500.000.000,00
2	Belanja Modal	75.525.835.869,68	248.298.729.388,56	259.371.674.420,05	260.512.320.501,65	301.421.889.561,19

3	Belanja Hibah yang mendukung Infrastruktur publik					
4	Total Belanja Infrastruktur publik	97.025.835.869,68	269.798.729.388,56	280.871.674.420,05	282.012.320.501,65	322.921.889.561,19
	Total Belanja Daerah	577.868.092.939,88	597.991.158.786,41	634.895.207.230,68	636.647.852.488,55	705.917.150.667,90
	Rasio Belanja	17%	45%	44%	44%	46%

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

Kewajiban daerah dalam pemenuhan belanja infrastruktur sebesar minimal 40%, maka berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa persentase belanja infrastruktur Kota Sawahlunto telah berada diatas 40% atau telah memenuhi ketentuan peraturan. Hal ini tentunya berdampak pada alokasi belanja yang lain dan harus dilakukan penyesuaian terhadap belanja barang dan jasa, hibah, dan bantuan sosial.

C. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Pembiayaan daerah dapat dikelompokkan atas 2 komponen, yaitu: (a) Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah: dan (b) Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah.

1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan daerah yang mengakibatkan menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga daerah diberi kewajiban untuk membayar kembali. Kebijakan ini dilakukan untuk menutup defisit ataupun untuk memanfaatkan surplus anggaran.

Komponen penerimaan pembiayaan terdiri dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLpa) sebelumnya, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Pinjaman Daerah, Penerimaan Kembali Pemberian Penerimaan, Penerimaan Piutang Daerah.

2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo Pemerintah Kota Sawahlunto untuk pembangunan pasar sesuai dengan perjanjian dengan International Bank For Recontruct & Development Nomor : SLA-1240/DSMI/2011 tanggal 11 April 2011 selama 20 tahun hingga Tahun 2030.
2. Pemberian pinjaman daerah kepada masyarakat, yang pengelolaannya melalui UPTD Dana Bergulir pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan. Pemberian pinjaman kepada masyarakat ini diarahkan untuk meningkatkan dan menunjang pertumbuhan perekonomian daerah melalui fasilitasi permodalan bagi koperasi/ UKM dan masyakat.

Berdasarkan proyeksi pendapatan dan belanja daerah, maka perhitungan proyeksi pembiayaaan daerah tahun 2025-2030, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.201
Proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2030

Kode Rekening	URAIAN	APBD 2025	PROYEKSI 2026	PROYEKSI 2027	PROYEKSI 2028	PROYEKSI 2029	PROYEKSI 2030
6	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**21.291.593.621,00**	**(1.666.666.669,00)**	**(1.666.666.669,00)**	**(1.666.666.669,00)**	**(1.666.666.669,00)**	**(1.666.666.669,00)**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**	**22.958.260.290,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	22.958.260.290,00	-	-	-	-	-
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**22.958.260.290,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah						-
6.2.03.01	Pembayaran Pinjaman Daerah dari Pemerintah Pusat	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00	1.166.666.669,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**	**1.666.666.669,00**
	PEMBIAYAAN NETTO	**21.291.593.621,00**	**(1.666.666.669,00)**	**(1.666.666.669,00)**	**(1.666.666.669,00)**	**(1.666.666.669,00)**	**(1.666.666.669,00)**
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	**-**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**(0,00)**

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, dapat tergambar bahwa surplus digunakan untuk pembayaran hutang. Sisa Lebih Perhitungan Tahun Anggaran (SiLPA) merupakan komponen yang dominan mempengaruhi Pembiayaan Bersih. SiLPA timbul disebabkan beberapa faktor, diantaranya; 1) sisa dana DAK dan Hibah yang belum terserap akibat adanya perubahan kebijakan pemerintah, 2) hutang pada pihak ketiga yang belum dibayarkan pada akhir tahun anggaran dan 3) efektivitas dan efisiensi belanja pembangunan.

D. Perhitungan Kerangka Pendanaan Tahun 2025-2030

Perhitungan kerangka pendanaan ini bertujuan untuk melihat kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan rencana penggunaan. Proyeksi kapasitas riil kemampuan keuangan daerah untuk mendanai pembangunan daerah tahun 2025-2030 terlihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.202
Proyeksi Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2025- 2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
1. Pendapatan	580.022.893.950,00	579.534.759.608,88	599.657.825.455,41	636.561.873.899,68	638.314.519.157,55	707.583.817.336,90
2. Pencairan dana cadangan						
3. Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	22.958.260.290,00	-	-	-	-	-
Total Penerimaan	**602.981.154.240,00**	**579.534.759.608,88**	**599.657.825.455,41**	**636.561.873.899,68**	**638.314.519.157,55**	**707.583.817.336,90**
Dikurangi :						
4. Belanja pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama	402.821.131.634,00	437.778.505.417,52	500.982.040.402,03	523.386.088.846,29	525.674.976.253,63	585.203.151.943,81
5. Pengeluaran pembiayaan	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.669,00	1.666.666.668,00

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan daerah	**198.493.355.937,00**	**140.089.587.522,36**	**97.009.118.384,39**	**111.509.118.384,39**	**110.972.876.234,93**	**120.713.998.725,09**

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

Berdasarkan tabel diatas, tergambar bahwa kapasitas riil kemampuan keuangan daerah diproyeksikan berfluktuasi disesuaikan dengan pemenuhan visi dan misi kepala daerah. Namun mulai tahun 2027 maka pengeluaran wajib harus mengakomodir kebijakan pemenuhan belanja infrastruktur sehingga jumlah belanja wajib mengalami peningkatan. Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Sawahlunto masih sangat tergantung kepada TKDD dari Pemerintah. Sedangkan kebijakan alokasi anggaran merupakan serangkaian kebijakan yang telah ditetapkan sebagai upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan alokasi anggaran yang tersedia untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, serta dalam rangka pencapaian efektifitas program. Sedangkan proyeksi belanja wajib dan mengikat Pemerintah Kota Sawahlunto untuk lima tahun mendatang adalah :

Tabel 2.203
Proyeksi dan Arah Belanja Wajib dan Mengikat Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Belanja Tidak Langsung	400.504.464.965,00	435.461.838.748,52	498.665.373.733,03	521.069.422.177,29	523.358.309.584,63	582.886.485.274,81
Belanja Gaji dan Tunjangan	204.655.980.604,00	189.112.847.801,84	99.543.489.267,47	110.874.592.680,24	112.022.834.005,98	130.641.440.636,62
Tambahan Penghasilan PNS	96.475.727.697,00	96.475.727.697,00	76.475.727.697,00	76.475.727.697,00	76.475.727.697,00	76.475.727.697,00
Gaji dan Tunjangan DPRD / KDH / WKDH	8.071.067.380,00	8.071.067.380,00	8.071.067.380,00	8.071.067.380,00	8.071.067.380,00	8.071.067.380,00
Belanja Bagi Hasil Pajak DaerahKepada Kabupaten/Kota	65.576.360.000,00	65.576.360.000,00	65.576.360.000,00	65.576.360.000,00	65.576.360.000,00	65.576.360.000,00
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00
Belanja modal	25.025.329.284,00	75.525.835.869,68	248.298.729.388,56	259.371.674.420,05	260.512.320.501,65	301.421.889.561,19
Pengeluaran Pembiayaan	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00
Pembayaran pokok utang dan bunga	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00	2.316.666.669,00
Total belanja wajib dan pengeluaran yang wajib mengikat (a+b)	402.821.131.634,00	437.778.505.417,52	500.982.040.402,03	523.386.088.846,29	525.674.976.253,63	585.203.151.943,81

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa mulai tahun 2027, yang menjadi belanja wajib disamping pemenuhan belanja pegawai adalah peningkatan belanja infrastruktur.

Prioritas alokasi penggunaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut :

Prioritas I : dialokasikan untuk membiayai belanja wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar

Prioritas II : dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi RPJMD dengan fokus mendukung kedaulatan pangan, pengembangan pariwisata, perdagangan dan UMKM, pembangunan infrastruktur pelayanan dasar yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, perlindungan sosial dan reformasi birokrasi.

Prioritas III : dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintahan lainnya

Rencana pengunaaan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.204
Proyeksi Penggunaan Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2030

Uraian	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kapasitas riil kemampuan keuangan daerah	198.493.355.937,00	140.089.587.522,36	97.009.118.384,39	111.509.118.384,39	110.972.876.234,93	120.713.998.725,09
Penggunaan :						
Prioritas I	119.096.013.562,20	84.053.752.513,42	58.205.471.030,63	66.905.471.030,63	66.583.725.740,96	72.428.399.235,05
Prioritas II	79.397.342.374,80	56.035.835.008,94	38.803.647.353,76	44.603.647.353,76	44.389.150.493,97	48.285.599.490,04
Prioritas III						

Sumber : Data APBD Efisiensi (diolah)

E. Strategi Pencapaian Target Pendapatan

"Menjadikan Sawahlunto sebagai Kota Warisan Dunia yang Mandiri Secara Fiskal dan Tangguh secara Ekonomi"

Sawahlunto sebagai kota tambang bersejarah yang telah diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia kini tengah memasuki babak penting dalam pembangunan daerahnya. Tak hanya sebagai kota wisata berbasis sejarah dan budaya, Sawahlunto juga ditantang untuk menjadi entitas fiskal yang otonom, adaptif terhadap perubahan, dan berdaya saing di tengah gejolak global.

Selama ini, komposisi pendapatan daerah Kota Sawahlunto masih sangat bergantung pada dana transfer pusat, dengan rasio PAD yang relatif rendah terhadap total pendapatan daerah. Ketergantungan ini melemahkan kapasitas pemerintah kota dalam menyusun kebijakan pembangunan secara fleksibel dan inovatif. Maka, strategi fiskal yang disusun harus bersifat holistik, tidak hanya menaikkan angka PAD, tetapi juga membangun sistem, sumber daya, dan kemitraan yang membuat pendapatan tersebut berkelanjutan, adil, dan berdampak luas.

Tujuan Strategi

1. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara konsisten dan progresif.
2. Mengurangi ketergantungan fiskal terhadap dana transfer dari pusat.
3. Mengelola dan mengoptimalkan aset fisik dan tak berwujud milik daerah secara produktif.
4. Membangun mekanisme pembiayaan alternatif (KPBU, CSR, diaspora, dana global) untuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
5. Menjadikan pengelolaan sampah sebagai sumber nilai ekonomi melalui prinsip ekonomi sirkular.
6. Memperkuat tata kelola fiskal yang akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Strategi dalam peningkatan pendapatan Kota Sawahlunto adalah :

a. Pemerintah Daerah harus memiliki target kemandirian fiskal di atas 50 persen sebagai pijakan penting bagi keberlanjutan pembangunan daerah, maka perlu disusun secara komprehensif peta jalan kemandirian fiskal dengan fokus pada peningkatan PAD dari pajak, retribusi, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan sah.

b. Reformasi kebijakan fiskal daerah perlu dilakukan dengan memperbaiki basis data perpajakan, melakukan intensifikasi penagihan, meningkatkan transparansi pelayanan, serta mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi melalui kanalkanal digital yang terintegrasi

c. Optimalisasi sumber PAD mencakup pembaruan data potensi pajak dan retribusi, pemanfaatan teknologi dalam monitoring pendapatan, dan mendorong setiap OPD untuk menciptakan inovasi pelayanan publik berbayar yang sesuai dengan prinsip keadilan dan keterjangkauan.

d. Pemanfaatan teknologi digital untuk memperbaiki pelayanan perpajakan akan menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Selain itu, program literasi pajak untuk masyarakat dan pelaku usaha juga akan diperkuat agar kesadaran membayar pajak tumbuh secara alami tanpa tekanan administratif.

e. Membangun dan mengembangkan ekosistem pembayaran digital yang terintegrasi melalui QRIS, ewallet, dan aplikasi mobile banking. Semua jenis pajak dan retribusi harus bisa dibayarkan melalui berbagai kanal digital untuk meningkatkan kenyamanan dan partisipasi masyarakat

f. Melakukan implementasi dashboard monitoring pendapatan secara real time yang akan mempercepat deteksi terhadap potensi penyimpangan dan memudahkan pengambilan keputusan berbasis data. Transparansi ini sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah

g. Membangun analisis data besar (big data analytics) untuk mengidentifikasi potensi pajak yang belum tergali. Tax intelligence berbasis data ini akan memungkinkan Pemerintah Daerah untuk menargetkan sektor-sektor yang memiliki potensi pajak tinggi namun masih belum dimaksimalkan. Dengan menggunakan alat analisis data dan model prediksi, pengelolaan pajak daerah akan menjadi lebih tepat sasaran, efisien, dan adaptif terhadap dinamika ekonomi yang terus berubah.

h. Performance-Based Revenue Targeting per OPD yakni setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terlibat dalam pengelolaan PAD memiliki key performance indicators (KPI) berbasis target pendapatan yang jelas dan terukur. Penerapan sistem penilaian kinerja yang berbasis pada pencapaian target PAD akan memastikan setiap OPD memiliki komitmen untuk berkontribusi dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Dengan memanfaatkan teknologi

informasi, sistem ini akan memudahkan Pemerintah Daerah untuk memantau, mengevaluasi, dan melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.

i. Optimalisasi Pajak Daerah Kendaraan Bermotor, dengan:

   1. Meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor, yang saat ini hanya sekitar 50- 60%. Ini dapat dicapai dengan menggunakan sistem digital untuk mempermudah pembayaran dan pengawasan.

   2. Program edukasi kepada wajib pajak mengenai manfaat pembayaran pajak dan dampaknya terhadap pembangunan daerah.

   3. Mengintegrasikan data kendaraan dengan sistem Samsat Online untuk mempermudah identifikasi kendaraan yang belum bayar pajak, serta meningkatkan efisiensi penagihan

j. Meningkatkan sumber Pendapatan Lain, Terutama Aset, melalui memaksimalkan pengelolaan aset daerah yang belum optimal, seperti tanah dan bangunan milik daerah yang dapat disewakan atau dijadikan objek kerjasama dengan pihak ketiga

k. Melakukan audit aset secara berkala untuk mengidentifikasi potensi aset yang dapat dikelola lebih produktif dan menguntungkan.

l. Mengembangkan kerjasama dengan pihak swasta dalam bentuk public-private partnership (PPP) untuk mengelola aset daerah yang belum dimanfaatkan secara maksimal.

m. Melakukan kerjasama dengan Pihak Ketiga, melalui :

   1. Mendorong kerjasama antara pemerintah daerah dengan sektor swasta dalam pengelolaan proyek besar yang dapat menghasilkan pendapatan baru, baik dalam bentuk pembangunan bersama maupun kerjasama untuk pengelolaan layanan publik.

   2. Menjalin kemitraan dengan lembaga internasional yang memiliki keahlian dalam pembiayaan pembangunan daerah atau program keberlanjutan.

Sesuai tema RPJPN 2025-2045 yang diberikan ke Provinsi Sumatera Barat adalah pengembangan pariwisata kelas dunia, ini menjadi peluang bagi Kota Sawahlunto dalam mewujudkan visi daerah Kota Sawahlunto tahun 2025-2045 yaitu untuk menjadikan kota wisata yang berkelas dunia. Ini diharapkan kedepannya akan meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri sehingga berdampak bagi perekonomian Kota Sawahlunto dengan mendorong pengembangan ekonomi kreatif masyarakat. Untuk jangka panjang akan menjadi daya tarik bagi akademisi kelas nasional maupun internasional untuk kegiatan riset maupun edukasi.

Dalam menghadapi peluang serta tantangan pada tahun-tahun mendatang tentu membuat daerah semakin optimis untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan pemulihan ekonomi secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh komponen daerah. Pemerintah Pusat mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik sedangkan Pemerintah Provinsi dan daerah membuat kebijakan yang teknis dan aplikatif. Pelaksanaan kebijakan tersebut harus didukung oleh semua pihak yang terlibat, baik itu di pusat, provinsi dan pemerintah daerah.

Pemerintah daerah mempunyai peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi di daerah. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakatnya. Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan ekonomi di daerah. Di samping itu, masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang strategis dalam mempercepat peningkatan ekonomi. Pemerintah telah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha Kota Sawahlunto dengan menggerakkan usahanya secara baik. Berikut adalah strategi Pemulihan ekonomi Kota Sawahlunto untuk tahun 2025-2029 :

a. Peningkatan kualitas pelayanan pada sektor-sektor yang terkait langsung terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Sektor pelayanan yang akan ditingkatkan adalah Kemudahan dalam pelayanan perizinan.

   Selain peningkatan kualitas pelayanan perizinan untuk jangka panjang, Pemerintah Kota Sawahlunto juga berkomitmen untuk tetap memberikan kemudahan-kemudahan terhadap pelayanan perizinan khususnya bagi sektor UMKM dan IKM. Kemudahaan ini berupa pemangkasan birokrasi perizinan, penerbitan IMB dan lainnya. Pendirian Mall Pelayanan Publik yang sudah beroperasi serta memfasilitasi lebih dari 20 vendor pelayanan, mulai dari Pemerintah Daerah, Perbankan, Instansi Vertikal, dan pelayanan umum dapat memberikan kemudahan dan dampak positif bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

   Keberadaan mall Pelayanan publik yang telah diresmikan oleh Menteri PAN RB RI pada tahun 2022, diharapkan meningkatkan jumlah investasi di Kota sawahlunto. Kemudahan-kemudahan perizinan, ketersediaan bahan baku yang berkualitas, serta penyediaan iklim investasi yang kondusif juga diharapkan akan meningkatkan minat investor untuk berinvestasi. Hal lain yang menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi potensi dan pengelolaan pendapatan asli daerah.

b. Dukungan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat

Selain memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memperoleh izin usaha, juga diupayakan untuk mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada pada masyarakat dalam meningkatkan pendapatannya. Beberapa upaya tersebut antara lain :

1. Meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatan pelatihan dan peningkatan keterampilan masyarakat.

   Keterbatasan keterampilan masyarakat untuk berusaha merupakan salah satu permasalahan yang harus diselesaikan untuk menciptakan wirausahawan baru. Dinas PMPTSP dan Naker, Dinas Koperasi UKM Perindustrian Perdagangan dan Dinas Pariwisata Kota Sawahlunto telah berupaya secara ekstra untuk mengatasi ini. Pembekalan tenaga kerja atau pun pengangguran dengan keterampilan wirausaha yang tepat guna akan membantu mereka untuk membuka usaha sendiri. Hal ini tentunya harus direncanakan dengan baik sampai kepada tahap membuka usaha dan pemasarannya.

2. Memberikan bantuan bibit ternak dan bibit tanaman

   Sebagai sektor yang terbukti mampu bertahan ditengah pandemi Covid 19 ini, serta menjadi sektor yang masih dominan terhadap pembentukan perekonomian daerah, kebijakan-kebijakan daerah pada sektor pertanian ini tentunya akan lebih diprioritaskan. Pada tahun 2025-2030, pemberian bantuan bibit ternak dan koordinasi penyediaan bibit tanaman kepada masyarakat tetap akan dilanjutkan. Penyiapan calon penerima bantuan sampai kepada pelatihan bagi penerima bantuan tentunya harus menjadi perhatian utama, agar bantuan-bantuan disektor ini mampu menjadi solusi recovery ekonomi.

   Dengan proyeksi jumlah penduduk yang bertambah disetiap tahunnya, ini menjadi tantangan yang luar biasa dalam ketersediaan pangan di Kota Sawahlunto untuk 20 tahun yang akan datang Estimasi konsumsi beras untuk Kota Sawahlunto di tahun 2025 sudah mengalami krisis pangan(beras) dengan asumsi konsumsi beras defisit sebesar (746,48 ton). Ini sangat perlu menjadi perhatian pemerintah dalam mencapai pemerataan ekonomi. Peningkatan produksi dan perbaikan/pengawasan jalur distribusi pangan menjadi langkah dalam menyikapi krisis pangan.

3. Meningkatkan kualitas pembinaan dan pendampingan bagi masyarakat penerima bantuan.

   Permasalahan lain yang dihadapi dalam peningkatan pendapatan masyarakat adalah keberlanjutan dari usaha masyarakat yang menerima bantuan program pemerintah. Dibutuhkan suatu reformasi birokrasi terhadap sistem pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan aktivitas masyarakat yang diberikan bantuan tersebut. Masyarakat yang terbiasa dengan upaya cepat saji, tidak akan memahami keberlanjutan dari suatu usahanya dimasa yang akan datang. Disinilah peran pemerintah melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa untuk memastikannya.

c. Mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa dan APBD untuk meningkatkan pendapatan dan pemberdayaan masyarakat**.**

   Pemulihan ekonomi daerah ini harus mengoptimalkan seluruh potensi dan sumber daya yang ada. Salah satu solusi sumber daya pembiayaan yang akan dioptimalkan adalah Alokasi dana desa. APBDes ditargetkan untuk mengakalokasikan anggaran minimal 10% untuk pemberdayaan masyarakat di Desanya. Kegiatan yang disarankan terfokus pada sektor riil yang langsung berdampak pada ekonomi masyarakat, pelaksanaan kegiatan ini tidak lepas dari rencana koordinasi yang matang dengan OPD Teknis di Kota Sawahlunto. Selain itu, juga dibutuhkan kebijakan yang jelas agar pelaksanaan program dan kegiatan ini betul-betul tepat sasaran dan mampu menyelesaikan permasalahan perekonomian ditengah-tengah masyarakat.

d. Peningkatan kualitas dan pengelolaan Objek wisata

   Pembenahan dan penambahan objek wisata merupakan prioritas untuk dilaksanakan secara bertahap pada tahun 2025. Sektor wisata Kota Sawahlunto menjadi salah satu lokasi prioritas (Lokpri) Pemerintah Pusat dalam mengalokasikan anggaran ke daerah melalui Dana ALokasi Khusus (DAK) dengan tematik Penguatan Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Hal ini menjadi keuntungan yang sangat besar bagi Kota Sawahlunto untuk dapat memaksimalkan potensi tersebut dalam pembangunan Kota.

   Kawasan Kandi sebagi locus pengembangan, dapat menjadi salah satu destinasi wisata baru yang mampu meningkatkan ekonomi Kota Sawahlunto. Meningkatnya Kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto tentunya akan memberikan multiplier efek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya pelaku pariwisata. Dibutuhkan inovasi dan peningkatan kualitas pengelolaan pada objek wisata agar mampu bersaing dengan daerah lainnya. Kota Sawahlunto harus mampu

mengoptimalkan status Warisan Budaya Dunia UNESCO pada WTBOS dan status Geopark Nasional Sawahlunto dalam menarik wisatawan.

e. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan

Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Masyarakat Berbasis industri Kreatif yang Menunjang Kepariwisataan, merupakan suatu upaya Pemerintah daerah dalam memanfaatkan kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto. Hal ini juga sejalan dengan pengembangan usaha ekonomi masyakarat, karena produk yang dihasilkan adalah produk yang berpangsa pasar wisata.

Selain itu, peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan juga akan diprioritaskan. Dengan telah adanya sentra Industri Kecil Menengah (IKM), diharapkan daya saing produk-produk industri unggulan Kota Sawahlunto dapat ditingkatkan. Hal ini diharapkan juga akan mendukung pengembangan sektor pariwisata yang ada. Selain itu, peningkatan aktivitas industri ini juga harus mampu diiringi dan mendukung peningkatan nilai tambah untuk sektor pertanian dan peternakan. Sektor pertanian dan peternakan juga akan menjadi perhatian karena sektor pertanian ini merupakan sektor yang dominan mempengaruhi ekonomi masyarakat di Kota Sawahlunto.

Keberhasilan suatu pembangunan daerah tidak lepas dari kolaborasi dan partisipasi efektif dari banyak *stakeholders*. Oleh karena itu kolaborasi Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan daerah disertai partisipasi masyarakat dalam pembangunan menjadi kunci tercapainya pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Sawahlunto telah dan akan dilakukan kerjasama serta kolaborasi efektif dalam mencapai tujuan pembangunan. Salah satunya melalui pemanfaatan dan pengefektifian anggaran APBN, APBD Provinsi Sumatera Barat, APBD Kota Sawahlunto dan *Corporate Social Responsibility* (CSR) perusahaan serta sumber pendanaan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat.

2.3 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.3.1 Permasalahan Pembangunan

2.3.1.1 Melambatnya Pertumbuhan Ekonomi

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ekosistem usaha untuk UMKM, industri, dan perdagangan berkelanjutan	Belum optimalnya penataan pasar dan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan	Kurangnya sarana dan prasarana pasar
		Belum optimalnya penataan pasar
		Persaingan antara pasar modern dan pasar tradisional
		Belum optimalnya pembinaan dan pelatihan terhadap pedagang untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan
		Belum berkembangnya pasar online dan ekspor untuk produk unggulan daerah
		Belum optimalnya Penataan pedagang kaki lima dan peningkatan sarana dan prasarana pedagang kaki lima
		Kurangnya tempat pemasaran-pemasaran produk unggulan di Kawasan strategis
	Menurunnya daya saing industri	Belum optimalnya fasilitasi kepada industri kecil dan menengah
		Belum optimalnya Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		Belum berkembangnya klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
		Belum optimalnya operasional sentra-sentra IKM yang susah ada
		Belum berkembangnya klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
	Belum maksimalkan potensi koperasi	Masih rendahnya kapasitas pelaku usaha koperasi
		Masih kurangya wirausaha masyarakat melalui Koperasi
		Masih kurangnya kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi
		Belum optimalnya Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola
Masih rendahnya investasi yang mendorong pertumbuhan usaha dan produktivitas tenaga kerja daerah	Masih rendahnya investasi daerah	Belum optimalnya pengelolaan Aset Daerah yang menjadi peluang investasi
		Masih kurangnya penguatan Kapasitas dan Daya Saing Perusahaan Daerah
		Belum optimalnya promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta
		Belum optimalnya efisiensi dan Kemudahan Perizinan
	produktivitas tenaga kerja belum optimal	Belum optimalnya Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif.
		Belum optimalnya kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional
		Masih kurangnya pelatihan untuk disabilitas
		Belum optimalnya fungsi Balai Latihan
		Kerja Kota Sawahluhto
Masih rendahnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Belum semua desa yang dapat mempercepat pembangunannya	Menurunnya semangat gotong royong dalam percepatan pembangunan kota
		Pengelolaan Sumber Daya/potensi daerah yang Kurang Optimal
		Keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas
		Keterbatasan akses infrastruktur
		Masih terbatasnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan desa
		Masih terbatasnya akses terhada informasi, komunikasi
Belum optimalnya produktivitas dan cadangan pangan pertanian dan perikanan	Keterbatasan ketersediaan dan aksesibilitas pangan	Masih kurangnya Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah
		Belum Optimalnya Lumbung Pangan Masyarakat

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
		Belum kuatnya jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan
		Belum optimalnya Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan
		Masih kuragnya ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal
		Belum optimalnya dukungan agroindustri skala mikro: pengolahan pangan, produk olahan hortikultura, pertanian dan perkebunan
	Belum berkembangnya sektor pertanian berbasis kawasan dan komoditas bernilai ekonomi tinggi	Belum adanya daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi
		Belum adanya Pemetaan komoditi unggulan daerah
	Belum optimalnya Peningkatan produksi/produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian serta kelautan dan perikanan	Belum optimalnya Peningkatan produksi/produktivitas Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto
		Masih kurangnya sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata
		Belum optimalnya Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto
		Belum optimalnya Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		Belum adanya Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi
		Belum adanya Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Pemetaan kesesuaian lahan berdasarkan potensi dan kesesuaiannya untuk ditanami tanaman tertentu
		Belum optimalnya operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging
		Belum optimalnya Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
		Belum optimalnya Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis
		Belum optimalnya Pencegahan dan vaksinasi hewan liar
	Belum optimalnya Pengembangan teknologi budidaya perikanan	Belum optimalnya Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian
		Belum optimalnya Peningkatan budidaya perikanan

2.3.1.2 Belum Optimalnya Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Berbasis IT

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Belum optimalnya Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)	Masih kurangnya penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah
		Masih kurangnya layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto
		Masih kurangnya Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
		Masih kurangnya bangunan daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower
		Belu adanya satu Server dan pengadaan Command Centre
		Belum optimalnya infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung
		Masih kurangnya pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan
		Masih kurangnya pemanfaatan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia
		Masih kurangnya infrastruktur digital yang

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC
	Masih kurangnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Belum optimalnya penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Masih kurangnya jaminan keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai
		Masih kurangnya Pengamanan infrastruktur TIK
		Belum optimalnya Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan Command Centre, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan Cyber Pemerintahan
		Belum optimalnya pengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.
	Masih kurangnya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional	Belum optimalnya koordinasi dalam Forum data
		Belum optimalnya fungsi wali data
Belum optimalnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien	Belum optimalnya digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu	Belum optimalnya peningkatatan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan

2.3.1.3 Belum Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur Penunjang untuk Kesejahteraan Masyarakat

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Belum optimalnya peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas	Peningkatan kualitas dokumen lingkungan dan laporan pengawasan lingkungan hidup
		Belum optimalnya pelestarian lingkungan dengan meningkatkan pengelolaan sampah dengan sistem yang lebih baik
	Belum optimalnya pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana	Belum optimalnya kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan
		Belum optimalnya tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.
	Masih kurangnya sarana prasarana kebakaran	Masih kurangnya kualitas SDM Petugas Kebakaran
		Masih kurangnya sarana prasarana kebakaran
Keterbatasan Aksesbilitas/Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Belum optimalnya kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air	Belum optimalnya Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir
	Belum optimalnya Akses Air Minum Perpipaan	Belum optimalnya Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto
	Masih kurangnya Infrastruktur Sanitasi	Masih kurangnya akses masyarakat terhadap sanitasi layak
	Belum optimalnya Kualitas drainase perkotaan, infrastruktur permukiman, bangunan gedung	Belum optimalnya sistem drainase perkotaan
		Belum optimalnya penataan gedung-gedung perkantoran
	Belum optimalnya Pemantapan kondisi infrastruktur terutama jalan dan jembatan	Belum optimalnya Peningkatan kualitas Jalan Kota
		Belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah
	Belum optimalnya Pembangunan kawasan perumahan yang memenuhi standar hunian layak dan ramah lingkungan	Belum adanya Maping digitalisasi RTRW
		Belum adanya Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan
		Masih kurangnya Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama
	Keterbatasan Percepatan status lahan untuk pembangunan	Keterbatasan Penyelesaiaan status tanah pemerintah,

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
	Keterbatasan kapasitas dan kualitas transportasi darat	Belum optimalnya Pengelolaan penerangan Jalan umum
		Masih kurangnya Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)

2.3.1.4 Belum optimalnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Belum optimalnya Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat	Belum optimalnya Penguatan koloboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)
		Belum optimalnya peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama
		Belum optimalnya pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya
		Belum optimalnya Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter
	Masih kurangnya rasa aman dan nyaman	Belum optimalnya Penguatan koordinasi,

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
	masyarakat	kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat
		Belum optimalnya peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial
	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan	Belum optimalnya pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawa
		Belum optimalnya Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak
		Belum optimalnya perkembangam komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif
		Masih kurangnya kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya
		Masih kurangnya kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian
		Masih kurangnya kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni
		Belum adanya rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian
		Belum optimalnya Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya
	Belum optimalnya pelestarian warisan budaya dan kearifan lokal	Belum optimalnya pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto
		Belum optimalnya upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan serta kawasan cagar budaya
		Keterbatasan Mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya
		Belum optimalnya penataan ulang ruang museum

2.3.1.5 Belum optimalnya fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Masih kurangnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	Belum optimalnya peningkatan keunggulan daya tarik dan promosi wisata	Belum optimalnya Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable
		Masih kurangnya destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian
		Belum optimalnya fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto
		Keterbatasan Pengembangan kawasan terpadu kandih di sawahlunto
		Keterbatasan pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata
		Belum optimalnya Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto
		Belum optimalnya Penyelenggaraan multi event yang berkualitas
		Masih kurangnya kemitraan pariwisata antar

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		daerah
		Keterbatasan sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)
		Belum optimalnya branding destinasi dan produk wisata
		Belum optimalnya kualitas layanan pariwisata
		Belum optimalnya promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder
		Keterbatasan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia
	Keterbatasan Pelaku ekonomi kreatif yang berkualitas	Belum optimalnya peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata
		Belum optimalnya Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal
		Keterbatasan kapasitas SDM pariwisiata melalui pelatihan

2.3.1.6 Masih rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum terciptanya pendidikan yang berkualitas	Belum optimalnya penyelenggaraan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Belum optimalnya pemenuhan SPM pendidikan
		Belum optimalnya perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru
		Belum optimalnya pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah
		Belum meratanya akses pendidikan
		Penyelenggaraan pendidikan belum optimal
	Belum optimalnya Penguatan pendidikan berkarakater melalui kurikulum muatan lokal	Keterbatasan Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang terstandarisasi
Belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat	Keterbatasan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan	Belum optimalnya pelayanan dasar publik pemenuhan standar pelayanal minimal
		Keterbatasan kapasitas sumber daya tenaga kesehatan
		Keterbatasan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
	Belum optimalnya Pencegahan Stunting melalui penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi ibu	Belum optimalnya kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
		Belum optimalnya koloboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Keterbatasan terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Belum optimalnya Pengendalian Fertilitas dan Mortalitas	Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluarga sejahtera
		Belum optimalnya program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak
		Masih kurangnya edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini
	Belum optimalnya ketahanan keluarga, dan pemberdayaaan perempuan dan perlindungan anak	Belum optimalnya Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK
		Masih kurangnya peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga
		Masih kurangnya Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia
		Masih kurangnya PUG dan peran perempuan dalam pembangunan daerah
	Belum optimalnya kesejahteraan sosial	Belum optimalnya pemberiaan jaminan dan dukungan kepada masyarakat, terutama yang rentan, dalam menghadapi risiko dan kemiskinan
		Belum optimalnya pendampingan dan fasilitas pada penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lainya
Belum optimalnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Masih kurangnya sarana prasarana generasi muda (milenial & gen z) untuk berkarya melalui	Masih kurangnya pelatihan dan event pemuda

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
	kelembagaan pemuda	
		Maih kurangnya Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda
	Belum optimalnya pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga	Masih kurangnya kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas
		Masih kurangnya sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat
		Masih kurangnya dukungan pelaksanaan turnamen dan event olahraga berkelanjutan untuk pengembangan prestasi atlet sampai ke tingkat nasional/internasional
		Masih kurangnya rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa
		Masih kurangnya aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional
		Masih kurangnya pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda
		Masih kurangnya pelatihan atlet berprestasi,

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		kompetisi olahraga lokal,
		Masih kurangnya penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah
		Masih kurangnya Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga

2.3.1.7 Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	Belum optimalnya kinerja Akuntabilitas	Belum optimalnya kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah
		Belum optimalnya daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR
		Belum optimalnya penerapan sistem akuntablitas kinerja
	Belum optimalnya kinerja Perencanaan	Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal
		Masih kurangnya kapasitas SDM Perencana
	Belum optimalnya peran pengawasan internal dan eksternal	Masih rendahnya pembangunan melalui penerapan manajemen risiko

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
		Belum optimalnya penerapan maturitas SPIP
	Masih kurangnya kualitas penelitian dan inovasi daerah	Masih kurangnya kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Rriset, Inovasi dan teknologi
		Belum optimalnya kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah
	Belum optimalnya kerjasama pembangunan	Belum optimalnya sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tertetapkan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat
		Belum optimalnya Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota
Belum optimalnya profesionalitas ASN	Belum optimalnya Penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN	Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana
		Masih kurangnya sarana/prasaran untuk mendukung sistem meritokrasi
Belum optimalnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Belum optimalnya tata kelola karsipan	Belum optimalnya pelayanan Pengelolaan Arsip untuk perangkat daerah, desa/kelurahan dan arsip masyarakat dalam mewujudkan kampung sadar arsip
	Belum optimalnya literasi masyarakat	Belum optimalnya pembinaan perpustakaan yang ada didesa/kel, masjid dan TBM

Masalah	Rincian Masalah	Akar Masalah
Belum optimalnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah	Belum optimalnya melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang
		Belum optimalnya Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas
		Belum optimalnya Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran
		kapasitas SDM dan kelembagaan keuangan daerah
	Belum optimalnya pengelolaan aset fisik dan tak berwujud milik daerah secara produktif.	Belum optimalnya Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Belum optimalnya Pajak dan Retribusi Daerah melalui Pengembangan Sumber daya alam dan infrastruktur serta Ekonomi Digital	Belum optimalnya Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai
		Belum optimalnya Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
		Belum optimalnya Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien
		Belum optimalnya Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah
		Belum optimalnya profesionalisme pengelolaan BUMD
		Belum optimalnya inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru

2.3.2 Isu Strategis

2.3.2.1 Isu Strategis Global

Isu strategis global pada tahun 2025 mencakup berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan. Beberapa isu penting yang diperkirakan akan mendominasi agenda global adalah: ketidakpastian ekonomi global, persaingan antar kekuatan besar, perubahan iklim, disinformasi, dan keamanan siber. Selain itu, isu-isu seperti konflik di berbagai wilayah, termasuk Israel-Palestina dan Laut China Selatan, juga diperkirakan akan terus menjadi perhatian. Berikut adalah beberapa isu strategis global yang perlu diperhatikan pada tahun 2025:

1. Ketidakpastian Ekonomi Global
   - Perang dagang AS-Tiongkok berlanjut dan memberikan dampak pada pertumbuhan ekonomi global
   - Perlambatan ekonomi di negara-negara maju dapat memengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.
   - Fluktuasi harga pangan dan minyak dunia menjadi tantangan bagi stabilitas ekonomi global.
2. Geopolitik dan Persaingan Kekuatan
   - Persaingan antara kekuatan besar seperti AS dan Tiongkok, serta blok BRICS, dapat memicu ketegangan geopolitik.
   - Konflik di berbagai wilayah, seperti Israel-Palestina dan Laut China Selatan, berpotensi memperburuk situasi global.
   - Multilateralisme menghadapi tantangan karena meningkatnya persaingan antar negara.
3. Perubahan Iklim dan Lingkungan
   - Peningkatan suhu global dan cuaca ekstrem menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan masyarakat.
   - Transisi energi menjadi isu penting untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan.
   - Indonesia memiliki potensi sumber daya untuk kendaraan listrik dan berupaya mempercepat transisi energi ramah lingkungan.
4. Keamanan Siber dan Disinformasi
   - Ancaman serangan siber terhadap infrastruktur kritis menjadi perhatian utama.
   - Penyebaran disinformasi dan berita palsu di platform media sosial semakin canggih dan sulit dideteksi.
   - Perlu upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi penyebaran disinformasi dan meningkatkan literasi media.
5. Isu Sosial Budaya
   - Kelangkaan air dan eksistensi bahasa di Indonesia menjadi isu penting yang perlu diperhatikan.
   - Perdagangan orang, korupsi, dan narkoba lintas negara menjadi tantangan global yang perlu ditangani.

- Literasi digital dan disinformasi juga menjadi perhatian dalam konteks sosial budaya.

6. Keamanan dan Konflik
   - Terorisme, perang siber, dan masalah pengungsi menjadi isu keamanan global yang kompleks
   - Konflik perbatasan wilayah dan isu imigran ilegal juga menjadi perhatian.
7. Pembangunan Berkelanjutan
   - Indonesia memiliki target penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas SDM, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
   - Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan nasional sangat penting.
   - Pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah yang belum merata menjadi tantangan.
8. Kesehatan
   - Perawatan kesehatan menjadi isu yang semakin penting bagi masyarakat global.
   - Indonesia perlu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan aksesibilitasnya.

2.3.2.2 Isu Strategis Nasional

1. Kebijakan Ekonomi Nasional dan Proteksionisme

Ekonomi Global Kebijakan Ekonomi Nasional dan Proteksionisme Ekonomi Global Beberapa dekade terakhir, Indonesia menganut kebijakan perekonomian yang terbuka. Hal ini memiliki resiko terhadap daya tahan terhadap kebijakan proteksionisme global. Pada saat terjadi gangguan pada pasar global, hal ini memberikan pengaruh terhadap lemahnyaekspor Indonesia, secara simultan juga dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional dan memiliki resiko terhadap lapangan pekerjaan nasional. Indonesia juga mengalami gangguan dalam hal aliran investasi asing. Investor lebih memilih negara yang mempunyai kebijakan ekonomi yang stabil daripada pasar yang terdampak perang dagang global. Rendahnya investasi asing masuk ke Indonesia memberikan dampak melambatnya pembangunan infrastruktur dan pengembangan sektor manufaktur.

Proteksionisme perdagangan global juga memberikan imbas terhadap sektor keuangan Indonesia. Melemahnya nilai tukar rupiah memberikan imbas terjadinya inflasi yang tinggi. Harga produk impor menjadi mahal. Sehingga masyarakat menghadap penurunan daya beli semakin besar. Instrumen moneter dapat dilakukan dalam meredam inflasi dan mencapai stabilitas nilai tukar rupiah. Salah satu langkahnya adalah menaikan suku bunga oleh Bank Indonesia. Hal ini memberikan pengaruh negatif terhadap kinerja sektor riil nasional yang berujung penurunan perekonomian nasional. Terjadinya pelemahan nilai tukar Rupiah di awal tahun 2025 ini, memperlihatkan adanya tekanan yang kuat terhadap perekonomian nasional. Secara ekonomi dalam menghadapi situasi ini, investor membutuhkan kepastian

pasar keuangan nasional. Disamping itu, perencanaan dan kebijakan fiskal pemerintah yang dipublikasi ke publik dibutuhkan lebih transparan, akurable dan timetable. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian nasional. Jika hal tersebut tidak terjadi dengan baik memberikan respon negative terhadap perekonomian nasional baik dari pelaku ekonomi dalam negeri maupun luar negeri. Hal ini akan memberikan dampak terhadap terjadinya capital fligth dan menjadikan resiko mahalnya biaya intervensi dengan menguras cadangan devisa.

Kedepan, Indonesia harus mampu mengurangi ketergantungan kepada modal asing dengan cara memperkuat industry dalam negeri dan diversifikasi ekspor. Ketergantungan modal asing yang dimaksud adalah investasi asing jangka pendek yang rentan terhadap guncangan eksternal. Secara nasional, pemerintah harus mampu menciptakan lingkungan investasi yang stabil dan nyaman terutama bagi investor domestik. Kebijkan fiskal perlu dilakukan dengan pengurangan terhadap pengeluaran terhadap barang strategis. Pemerintah harus dapat meningkatkan kapasitas produksi dalam negeridalam usaha melakukan subtitusi impor. Hal ini dapat memperkuat nilai tukar Rupiah Guna mendorong peningkatan investasi nasional, perlu membangun kepastian pasar dimana pemerintah harus meluncurkan strategi yang jelas dalam menghadapi tekanan perekonomian global. Saat ini investor terus memonitor perkembangan dan situasi ekonomi nasional terutama dalam menjaga nilai tukar dan arus modal asing.

Pemerintah harus memperkuat produksi dalam negeri agar ketergantung impor bisa ditanggulangi. Sementara itu, perlu peningkatan daya saing ekspor nasional sebagai factor utama untuk tidak mengandalkan komoditas mentah tetapi mengembangkan industri bernilai tambah tinggi. Transparasi dalam kebijakan dan informasi yang dibutuhkan public dan investor sangat diperlukan untuk menghindari sentiment negative pasar. Pemerintah harus memiliki strategi yang tepat dan terukur guna mengembalikan kepercayaan masyarakat. Tidak mesti pemerintah selalu mengandalkan Bank Indonesia untuk mempertahankan nilai tukar Rupiah. Namun kebijakan moneter perlu diimbangi secara efektif dengan kebijakan fiskal nasional.

2. Kinerja Pengelolaan Keuangan Negara

Awal tahun 2025, yang menjadi sorotan publik adalah defisit Angaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Pemerintah terlihat meyakini bahwa target defisit APBN terhadap PDB tidak melampuai 2.54%. Namun perkembangan yang terjadi saat ini adalah melemahnya penerimaan pajak. Terlihat kecenderungan bahwa penurunan penerimaan pajak salah satunya disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang berasal dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dalam negeri. Kebijakan pembatalan menaikan tarif PPN 11% menjadi 12% memberikan dampak pendapatan negara dari pajak konsumsi tidak mengalami peningkatan sesuai harapan. Selanjutnya juga terjadi penurunan pendapatan dari Pajak Penghasilan (PPh) badan secara drastis. Hal ini dapat diartikan bahwa kinerja koorporasi nasional terlihat melemah. Jika situasi ini

tidak ditanggulangi dengan baik dapat untuk mencapai target penerimaan APBN nantinya.

Sementara pada sisi belanja negara terlihat kecenderungan yang terjadi adalah mengalami peningkatan. Hal ini di sebabkan oleh belanja non-kementerian dan lembaga (non- K/L) memperlihatkan kenaikan yang sangat drastis. Indikasi yang terlihat pada bagian ini adalah alokasi yang besar untuk subsidi dan pembanyaran bunga hutang. Transfer keuangan pusat ke daerah juga mengalami peningkatan dibandingkan dengan K/L. Jika hal ini terus berlanjut, dapat memberikan resiko defisit terhadap APBN. Meskipun saat ini pemerintah dapat menganggap bahwa defisit saat ini masih dalam batas aman. Dimana pemerintah memiliki ruang kebijakan fiskal untuk memotong belanja dengan agresif. Tetapi disisi pendapat memperlihatkan kecenderungan tidak memenuhi target yang telah ditetapkan. Pemerintah perlu menemukan langkah-langkah alternatif untuk menutup kesenjangan tersebut dimana salah satu instrumennya adalah penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Pemerintah harus mampu mengurangi beban hutang negara dalam menutup deficit anggaran. Jika hal ini tidak dilakukan maka biaya pembbayaran bunga terus meningkat. Investor akan mencermati hal ini sebagai sebuah resiko fiskal yang makin meningkat dan dapat mengancam stabilitas perekonomian nasional.

Pemerintahan Presiden Prabowo baru saja meluncurkan kebijakan untuk memberikan katalisator terhadap pertumbuhan ekonomi nasional berupa pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Pemerintah menyatakan bahwa badan ini mengelola kekayaan negara terpisah dari APBN untuk mengoptimasi investasi sektor strategis.

3. Danantara sebagai Mesin Pertumbuhan Ekonomi

Isu strategis nasional yang perlu dicermati provinsi Sumatera Barat adalah diluncurkannya Badan pengelola Investasi (BPI) Danantara. Beberapa harapan yang juga perlu dicermati Provinsi Sumatera Barat adalah menjadikan lembaga ini sebagai katalis kebutuhan investasi yang mampu menggerakan perekonomian daerah. Lembaga ini dinyatakan pengelolaannya dilakukan secara terpisah dari APBN yang bertujuan untuk mengoptimalkan investasi strategis di Provinsi Sumatera Barat. Keberadaan lembaga ini bertujuan untukpenguatan infratruktur, ketahanan pangan, hilirisasi industri dan pengembangan energi terbarukan.

Pemerintah menyatakan bahwa Danantara ini mengacu kepada berbagai model *Sovereign Wealth Fund* (SWF) yang telah dikembangkan dan suskses di beberapa negara diantaranya Singapura, dan Norwegia. Model yang dikembangkan ini diharapkan mampu menarik investasi asing, mengola aset negara yang lebih efisien dan mempercepat pertumbuhan ekonomi melalui berbagai proyek strategis nasional. Danantara ini merupakan model konsolidasi dari beberapa BUMN yang juga termasuk Bank Himbara dimana tujuannya adalah untuk menciptakan sinergi antara sektor keuangan dan sektor ril nasional.

Isu yang perlu dicermati adalah kehadiran Danantara terhadap stabilitas perbankan nasional dimana 3 perbankan nasional yang ada di dalamnya merupakan tulang punggung dari sistem keuangan nasional. Ketiga perbankan ini memiliki andil besar terhadap pembiayaan UMKM dan pengelolaan dana pihak ketiga nasional. Jika Danatara tidak dikelola secara baik dan profesional akan mengalami tekanan terhadap perekonomian nasional dan melemahkan daya saing perbankan nasional dalam jangka Panjang.

4. Koperasi Desa Merah – Putih

Pemerintah berencana mengalokan pendanaan nasional untuk masing-masing desa di Indonesia melalui Koperasi Desa Merah – Putih dengan jumlah pendanaan yang lebih besar dari KUR BRI pada tahun 2024. Pendanaan ini mengubah konsep dan ekosistem pembiayaan mikro dan dapat mempengaruhi perbankan secara keseluruhan dalam jangka panjang. Dalam pengelolaan dana secara efektif dengan kepemilikan koperasi di desa untuk mendapatkan modal usaha. Hal ini akan memberikan pengaruh terhadap permihtaan kredit mikro ke perbankan yang akan mengalami penurunan. Perbakan harus melakukan pengalihan fokus dan strategi dalam model pembiayaan wholesale lending kepada koperasi desa. Seandainya koperasi tidak mampu melakukan pengelolaan pendanaan dengan baik, masyarakat akan kembali ke perbankan untuk melakukan pinjaman usaha. Perbankan diharapkan cepat beradaptasi terhadap digitalisasi pelayanan, meningkatkan penjaman berbasis teknologi dan memperkuat pengawasan terhadap koperasi penerima kredit. Perubahan ini akan menggeser dominasi perbankan nasional maupun perbankan daerah dalam pembiayaan mikro dalam masyarakat dan menciptakan ekonomi yang berbasis koperasi. Apabila perbankan tidak segera melakukan adjustment secara cepat maka koperasi desa akan menjadi pemain utama dalam perekonomian mikro masyaralat yang dapat mengubah peta industri perbankan nasional dan daerah di Indonesia.

2.3.2.3 Isu Strategis Regional

Pertumbuhan Ekonomi Kota Sawahlunto mengalami perlambatan belakangan ini disebabkan sebagian produksi lapangan usaha dominan mengalami perlambatan dan terdapat satu lapangan usaha yang mengalami kontraksi (pertumbuhan minus) beberapa tahun terakhir ini. Di samping itu, produktivitas tenaga kerja Kota Sawahlunto juga mengalami penurunan beberapa tahun terakhir. PDRB per kapita Kota Sawahlunto tergolong tinggi namun pengeluaran per kapitanya rendah, hal ini mengindikasikan masyarakat Kota Sawahlunto melakukan konsumsi (terutama non-makanan) di luar Kota Sawahlunto sehingga perekonomian di Kota Sawahlunto tidak berkembang.

Gini Rasio Kota Sawahlunto tergolong tinggi dibandingkan kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Barat. Hal ini mengindikasikan tingginya perbedaan pengeluaran/pendapatan antara golongan masyarakat berpendapatan tinggi dan berpendapatan rendah di Kota Sawahlunto (tingginya konsentrasi kekayaan pada sekelompok kecil masyarakat). Namun untuk Tingkat pengangguran terbuka rata-rata Kota Sawahlunto masih di atas angka ideal (< 5 %). Tingginya tingkat pengangguran terbuka Kota Sawahlunto disebabkan kurangnya kesempatan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja dan kompetensi tenaga kerja, rendahnya minat kewirausahaan dan kurangnya minat pencari kerja Kota Sawahlunto untuk bekerja di luar daerah dan luar negeri.

Dengan angka kemiskinan terendah di Nasional, sehingga penurunan angka kemiskinan di Kota Sawahlunto cendrung melambat dan sulit untuk ditekan karena potensi kemiskinan sebagian besar berada pada kelompok lansia dan disabilitas yang memerlukan perlindungan sosial.

2.3.2.4 Isu Strategis Daerah

1. Pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan

Peningkatan kualitas dan daya saing produk unggulan juga akan diprioritaskan melalui pengembangan sentra Industri Kecil Menengah (IKM) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah sektor pertanian dan peternakan yang menjadi salah satu sektor dominan dalam perekonomian masyarakat sekaligus mendukung pengembangan sektor pariwisata Kota Sawahlunto. Keberadaan mall Pelayanan publik yang telah diresmikan oleh Menteri PAN RB RI pada tahun 2022 diharapkan mampu meningkatkan minat investor untuk berinvestasi di Kota Sawahlunto dengan adanya kemudahan perizinan, ketersediaan bahan baku yang berkualitas, serta penyediaan iklim investasi yang kondusif. Hal lain yang menjadi perhatian adalah perlunya optimalisasi potensi dan pengelolaan pendapatan asli daerah. Proyeksi jumlah penduduk yang bertambah setiap tahunnya menjadi tantangan yang luar biasa dalam ketersediaan pangan di Kota Sawahlunto untuk 20 tahun yang akan datang. Diestimasi konsumsi beras di Kota Sawahlunto pada tahun 2025 meningkat dan terjadi krisis pangan (defisit beras) sebesar 746,48 ton.

2. Penguatan Smart Governance berbasis IT

Penguatan smart governance berbasis IT adalah upaya untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi tata kelola pemerintahan melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Hal ini melibatkan transformasi digital dalam berbagai aspek pemerintahan, termasuk pelayanan publik, manajemen internal, dan pengambilan keputusan. Penguatan smart governance berbasis IT merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan transparan. Dengan mengatasi tantangan yang ada, pemerintah dapat memanfaatkan potensi TIK secara optimal untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong pembangunan berkelanjutan.

3. Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat

Infrastruktur Kota Sawahlunto memiliki peranan penting dalam peningkatan ekonomi dan daya saing daerah, terutama untuk mendukung potensi wisata sejarah dunia UNESCO Ombilin Coal Meaning Heritage of Sawahlunto (OCMHS) dan Geopark Nasional Sawahlunto yang dicanangkan menjadi wisata unggulan dan memberikan multiplier effect dalam pertumbuhan ekonomi. Di samping itu masih terdapat gap antara kebutuhan dan ketersediaan infrastruktur secara kuantitas maupun kualitas. Perlu pemenuhan, peningkatan dan pemeliharaan yang optimal pada infrastruktur tersebut, hingga dapat menjadi penopang yang kuat dalam penggerak kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat di Kota Sawahlunto.

Konektivitas jalan antar daerah baik didalam maupun diluar kota belum memadai, seperti daerah perbatasan menuju Kabupaten Tanah Datar belum memadai untuk dilalui kendaraan berat, kondisi rusak dengan volume jalan yang kecil serta sarana dan prasarana jalan belum lengkap. Aksesibilitas dari dan menuju Kota Sawahlunto dapat mempengaruhi alur produksi dan distribusi barang jasa, kelancaran transportasi, biaya logistik, hingga kunjungan wisata.

Di samping infrastruktur jalan, saat ini Kota Sawahlunto memiliki sumber air baku dari 5 aliran Sungai dan 5 danau untuk memenuhi kebutuhan debit air, namun keterbatasan sarana prasarana menjadi penghambat dalam pemanfaatan sumber air yang lebih besar untuk pemenuhan air bersih dan air minum. Disamping itu, pemenuhan sanitasi layak belum optimal, pengelolaan limbah Kota Sawahlunto masih secara mandiri di setiap rumah tangga dan belum terpadu dalam skala besar. Pemenuhan sistem drainase masih di bawah 50% karena pemeliharaan yang sangat minim setiap tahunnya. Sedangkan infrastruktur urusan perumahan kawasan permukiman juga belum optimalnya. Setiap tahunnya telah dilaksanakan kegiatan seperti penanganan RTLH, Kawasan kumuh, PSU perumahan permukiman, namun kegiatan tersebut masih perlu dioptimalkan baik dari segi mekanisme pengajuan lokasi, besaran anggaran yang dibutuhkan serta stakeholder terkait.

Penyediaan sarana dan prasaranan kota yang pengembangannya tidak secara komprehensif berdasarkan kajian dampak lingkungan yang ditimbulkan, memberikan pengaruh pada kualitas air, udara, ketersediaan lahan dan sampah yang ditimbulkan. Oleh sebab itu, perlu analisis dan kajian mendalam pada aplikasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Untuk pemenuhan infrastruktur, Kota Sawahlunto dihadapkan dengan peluang dan tantangan eksternal baik di tingkat provinsi maupun nasional. Infrastruktur air minum, sanitasi, dan perumahan kawasan permukiman merupakan pelayanan dasar yang menjadi urusan wajib Standar Pelayanan Minimal (SPM) berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014. Penyediaan dan peningkatan akses rumah tangga dengan air minum dan sanitasi aman juga didukung pengembangannya dalam RPJPN 2025-2045, dalam arah kebijakan Agenda Kewilayahan dan Sarana Prasarana untuk wilayah Sumatera. Sektor irigisi menjadi pendukung rencana pengembangan Provinsi Sumatera Barat menjadi Kawasan ketahanan pangan yang sudah ditetapkan dalam arah kebijakan RPJPN 2025 – 2045.

4. Penguatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan

Pengembangan komunitas seni dapat menjadi jembatan untuk memperkuat nilai-nilai keagamaan dan melestarikan budaya, yang pada akhirnya mendukung terwujudnya kota wisata yang estetis, memiliki fungsi ekonomi, dan mensejahterakan. Dengan kata lain, seni bisa menjadi alat untuk menjaga identitas budaya sekaligus menciptakan daya tarik wisata yang berkelanjutan. Seni tradisional seringkali memiliki akar kuat dalam nilai-nilai keagamaan. Pengembangan komunitas seni dapat menjadi wadah untuk menghidupkan kembali dan memperkuat nilai-nilai tersebut melalui berbagai pertunjukan, karya seni, dan kegiatan keagamaan yang terintegrasi.

Komunitas seni berperan penting dalam menjaga keberlangsungan budaya lokal. Melalui latihan, pertunjukan, dan edukasi, seni tradisional dapat terus hidup dan diwariskan kepada generasi muda. Komunitas seni yang berkembang dapat menciptakan lapangan kerja dan peluang ekonomi baru, seperti pariwisata berbasis budaya, kerajinan tangan, dan penjualan produk seni. Dengan adanya peningkatan pendapatan dan lapangan kerja, kesejahteraan masyarakat di sekitar komunitas seni juga akan meningkat. Selain itu, rasa memiliki dan kebanggaan terhadap budaya lokal akan semakin kuat. Dengan demikian, pengembangan komunitas seni yang terencana dan berkelanjutan dapat menjadi kunci untuk mewujudkan kota wisata yang tidak hanya indah secara visual, tetapi juga memiliki nilai-nilai budaya yang kuat dan memberikan manfaat ekonomi serta kesejahteraan bagi masyarakat.

5. Fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan

Keberhasilan Kota Sawahlunto mendapatkan predikat dan Status Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) Tahun 2019 dan Geopark Nasional Tahun 2018 belum memberikan dampak yang signifikan terhadap kunjungan wisatawan ke Kota Sawahlunto sekaligus terhadap perekonomian masyarakat Kota Sawahlunto. Merujuk pada desain pembangunan jangka panjang 2025-2045 Provinsi Sumatera yang bertemakan “Mandala Pengembangan Agrikultur Bernilai Tinggi, Ekonomi Hijau, dan Pariwisata Kelas Dunia, yang Bersendi Kearifan Budaya Lokal”, hal ini membuka peluang bagi Kota Sawahlunto untuk mewujudkan visi daerah Tahun 2025-2045 menjadi kota wisata yang berkelas dunia dan menjadi daya tarik bagi akademisi tingkat Nasional dan Internasional dalam kegiatan edukasi dan riset.

6. Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat

Peningkatan kualitas pendidikan harus menjadi salah satu isu strategis utama pemerintah Pusat sampai Daerah. Mengingat di tahun 2045 Indonesia akan memperoleh bonus demografi, maka harus dipersiapkan dari sekarang generasi yang berakhlak, tangguh, mandiri, berkualitas dan punya daya saing. Pendidikan yang berkualitas dan merata masuk dalam Misi 1 RPJPN 2025-2045. Faktor penting yang harus ditingkatkan untuk mencapai pendidikan berkualitas adalah dengan menciptakan pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas dan berkuantitas, menyediakan sarana dan prasarana sekolah yang berkualitas dan berkuantitas, mendorong dan menumbuhkan minat/bakat siswa untuk senantiasa meningkatkan ilmu pengetahuan, meningkatkan peran orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah dalam mengawal proses tumbuh kembang pendidikan anak dan mengantisipasi kuatnya arus informasi melalui media sosial yang dapat membawa efek positif maupun negatif bagi perkembangan pola pikir, sikap dan adab siswa/guru/tenaga pendidik.

Selain pendidikan, peningkatan kualitas kesehatan juga menjadi salah satu isu strategis utama pemerintah Pusat sampai Daerah. Pada tahun 2030 Indonesia akan mencapai puncak bonus demografi, dimana 68,3 % penduduk berusia produktif sehingga dapat menjadi peluang untuk meraih Indoesia emas tahun 2045. Urusan kesehatan masuk dalam Misi 1 RPJPN 2025-2045 yaitu membangun manusia Indonesia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing. Untuk mewujudkan Indonesia sehat diwujudkan melalui membangun sistem kesehatan yang tangguh dan responsif serta memastikan penduduk berusia panjang dan hidup sehat. Upaya transformasi kesehatan adalah melalui penguatan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan berkuantitas, menyediakan sarana dan prasarana kesehatan yang berkualitas dan berkuantitas, jaminan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan untuk penurunan stunting.

Pada Tahun 2024, sebanyak 3120 individu masuk dalam masyarakat Perlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang didominasi oleh fakir miskin dan lansia terlantar. Di sisi lain, kemiskinan menuju 0% merupakan salah satu indikator sasaran visi dari Indonesia Emas 2045. Sejalan dengan hal tersebut, diperlukan pemberian bantuan sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan ekonomi dan penggunaan data terfragmentasi secara sistematis sehingga kesalahan sasaran tidak terjadi. Pembangunan sumber daya manusia tidak terlepas dari isu kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak mengingat jumlah kasus kekerasan pada perempuan dan anak yang terlapor mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Namun kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terlapor belum bisa menjadi representasi dari kasus yang sebenarnya terjadi di tengah masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat masih tabu membahas permasalahan KDRT.

7. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lain

Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi, berfokus pada pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lain, membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Hal ini melibatkan upaya untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta memastikan bahwa kinerja Pemda selaras dengan tujuan pembangunan nasional.Integritas pemberi layanan tata kelola pemerintahan masih rentan praktik korupsi. Disamping itu belum ada unit kerja/perangkat daerah yang memperoleh prediket menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

BAB III
VISI, MISI, DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.1 PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA SAWAHLUNTO 2025-2045

Pembangunan Jangka Panjang Daerah (PJPD) Kota Sawahlunto Tahun 2025–2045 merupakan gambaran arah pembangunan kota selama 20 tahun ke depan yang disusun untuk mewujudkan visi jangka panjang daerah secara sistematis, terarah, dan berkelanjutan. Dokumen ini menjadi landasan bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) setiap periode lima tahunan, serta menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan cita-cita pembangunan daerah.

3.1.1 Visi dan Sasaran Visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045

Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 mencerminkan upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah serta kualitas lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025 – 2045 maka ditetapkan Visi Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 adalah ;

“SAWAHLUNTO KOTA WISATA TAMBANG BERBUDAYA KELAS DUNIA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN”

Dengan kata kunci sebagai berikut:

1. **Kelas Dunia**
   Pada Tahun 2045, Status warisan dunia *Ombilin Coal Mining Heritage Of Sawahlunto* (OCMHS) dan *Geopark* Nasional menjadi keunggulan pariwisata Kota Sawahlunto sampai tingkat dunia yang mampu meningkatkan daya saing daerah dalam Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan kelembagaan pemerintahan yang akuntabel
2. **Maju**
   Pada Tahun 2045, masyarakat Kota Sawahlunto telah maju berdaya saing dan inovatif dalam perekonomian melalui keunggulan pariwisata dan meningkatnya ekonomi kreatif serta produktif dalam menjaga ketahanan pangan dalam menyongsong Indonesia Emas tahun 2045.
3. **Berkelanjutan**
   Pada Tahun 2045 terwujudnya pembangunan infrastruktur yang mendukung keunggulan pariwisata sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ketangguhan masyarakat dan infrastruktur terhadap kebencanaan dan krisis iklim.

Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 merupakan cetak biru pembangunan yang berorientasi pada keadilan, kemandirian, dan kelestarian lingkungan. Melalui sasaran-sasaran strategis berikut, Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto beserta seluruh pemangku kepentingan berupaya menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang akuntabel, demi terwujudnya masyarakat yang unggul, berdaya saing, dan berketahanan di masa depan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut;

Tabel 3.1
Sasaran Visi RPJPD Tahun 2025-2045

VISI	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN		
			2025	2030	2045
SAWAHLUNTO KOTA WISATA TAMBANG BERBUDAYA KELAS DUNIA YANG MAJU DAN BERKELANJUTAN	1. Peningkatan Pendapatan per kapita	1. PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)	73,78	179,83	424,21
		2. Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,00	11,85	14,39
	2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan berkurang	3. Tingkat Kemiskinan (%)	1,73-1,96	1,22-1,43	0,01-0,16
		4. Rasio gini (Indeks)	0,285	0,267	0,219
		5. Pertumbuhan Ekonomi	5,44	5,71	5,03
	3. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	6. Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,15	3,20	4,50
	4. Peningkatan Daya saing sumber daya manusia	7. Indeks Pembangunan Manusia	76,55	79,47	89,05
		8. Tingkat produktivitas tenaga kerja	93,842	98,311	111,72
	5. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup	9. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,07	78,87

Sumber: Perda No.1 Tahun 2025, RPJPD Tahun 2025-2045

3.1.2 Misi RPJPD Kota Sawahlunto

Berdasarkan kepada visi jangka panjang daerah, maka untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 8 (delapan) misi pembangunan yang merupakan upaya utama pembangunan yaitu :

1. **Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing**
   Dengan transformasi sosial untuk membangun manusia yang sehat, cerdas, kreatif, sejahtera, unggul dan berdaya saing. Transformasi sumber daya manusia ini menjadi modal penting dalam meningkatkan pendidikan, kesehatan, pemberdayaan gender dan sosial.
2. **Transformasi ekonomi yang inklusif dalam mewujudkan Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) dan Geopark Nasional**
   Transformasi ekonomi yang inklusif dengan meningkatkan kinerja perekonomian melalui keunggulan pariwisata (OCMHS dan *Geopark* Nasional), perluasan kesempatan kerja dan investasi, Ekonomi kreatif dan UMKM lokal serta ketahanan pangan yang secara merata sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat.
3. **Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif**
   Tata Kelola Pemerintah yang memegang prinsip *good governance* dan *good government*. Tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kualitas penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan publik yang transparan, akuntabel dan partisipatif melalui inovasi digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan adaptif untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat dan mudah terjangkau.
4. **Memantapkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah**
   Merupakan suatu upaya yang penting untuk memperkuat posisi dan kemampuan suatu daerah dalam menghadapi persaingan di tingkat lokal, nasional, maupun global dengan mendukung asas pembangunan berkelanjutan
5. **Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi**
   Merupakan tujuan yang sangat penting untuk keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakat dengan penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat, serta peningkatan upaya pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem alami.

6. **Mewujudkan Pembangunan Kewilayahan yang Adil dan Merata**
   Merupakan pembangunan wilayah secara merata dan berkeadilan melalui penerjemahan agenda transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, dilengkapi dengan transformasi supremasi hukum, stabilitas ekonomi dan kepemimpinan, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah.
7. **Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang Berkualitas dan Ramah Lingkungan**
   Membangun sarana dan prasarana yang berkualitas sesuai dengan penataan ruang, mengutamakan pemenuhan pelayanan dasar, sarana dan prasarana yang mendukung keunggulan pariwisata (OCMHS dan *Geopark Nasional*) dengan terintegrasi dan berkelanjutan dan memantapkan pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan menjadi faktor kunci pengembangan wilayah sekaligus sebagai pilar pendukung agenda transformasi
8. **Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah**
   Perwujudan pembangunan yang berkesinambungan diperlukan mitigasi risiko yang efektif dalam upaya pencapaian target yang akan dicapai melalui penerapan manajemen risiko terhadap pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan secara tepat dan terukur. Sehingga pencapaian target kinerja pembangunan daerah dapat diwujudkan secara efektif dengan deviasi capaiannya cukup kecil terhadap target. Disamping itu, pembiayaan pembangunan yang integratif menjadi landasan utama untuk mewujudkan pembangunan berkesinambungan. Sehingga terwujudnya kesinambungan pembangunan untuk mengawal pencapaian Indonesia Emas pada tahun 2045

3.1.3 Arah dan Sasaran Pembangunan RPJPD Kota Sawahlunto

Arah dan sasaran pembangunan RPJPD Tahun 2025-2045 dibagi dengan 4 tahapan RPJMD dengan penekanan sebagai berikut :

1. Tahap ke-1 Tahun 2025 - 2029: **Perkuatan Fondasi Transformasi**
   Pada Tahapan ini merupakan perkuatan dalam membangun fondasi transformasi selama 5 tahun pertama. Tahap pertama ini dilakukan dengan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan penguatan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan penguatan landasan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan.

2. Tahap ke-2 Tahun 2030 - 2034: **Akselerasi Transformasi**
   Periode kedua dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto diarahkan pada kebijakan “Akselerasi Transformasi”. Tahap kedua ini dilakukan dengan akselerasi transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan akselerasi ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta penguatan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan akselerasi transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta penguatan pembiayaan pembangunan

3. Tahap ke-3 Tahun 2035 - 2039: **Ekspansi Global**
   Periode ketiga dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto diarahkan pada kebijakan “Pemantapan Transformasi”. Tahap ketiga ini dilakukan dengan pemantapan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan pemantapan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta pemantapan keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan pemantapan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta pemantapan pembiayaan pembangunan.

4. Tahap ke-4 Tahun 2040 - 2045 : **Perwujudan Indonesia Emas**
   Periode keempat dari pembangunan jangka panjang daerah Kota Sawahlunto diarahkan pada kebijakan "Perwujudan Kota Sawahlunto dalam menyongsong Indonesia Emas 2045". Tahap keempat ini dilakukan dengan perwujudan transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola, yang disertai dengan perwujudan ketahanan sosial budaya dan ekologi, serta stabilitas keamanan daerah, demokrasi substansial, dan stabilitas ekonomi makro daerah. Tahapan perwujudan transformasi ini didukung implementasi pembangunan kewilayahan yang semakin merata dengan pemenuhan sarana prasarana, serta pembiayaan pembangunan yang semakin menguat.

Tahap I Pelaksanaan RPJPD Kota Sawahlunto 2025-2045 yang menjadi pedoman untuk penyusunan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025 – 2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.2
Arah dan Sasaran Tahap I Pelaksanaan RPJPD Kota Sawahlunto

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
			2025	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Kesehatan untuk Semua	Usia Harapan Hidup (tahun)	74,44	76,08
		Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)	0	0
		Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)	17,7	12,9
		Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*Treatment Coverage*) (%)	45	88
		Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate*) (%)	95	95
		Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional (%)	100	100
2	Pendidikan Berkualitas yang Merata	Persentase Kabupaten/Kota yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasiona		
		- Literasi Membaca	54,5	60,71
		- Numerasi	16,25	30,87
		Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional		
		- Literasi Membaca	54,47	59,72
		- Numerasi	33,92	42,57
		Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	10,65	11,19
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	14,45	14,84
		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)	16,89	16,68
		Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)	74,18	76,57
3	Perlindungan Sosial yang Adaptif	Tingkat Kemiskinan (%)	1,73-1,96	1,22-1,43
		Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)	39,74	51,16
		Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%)	55,2	57,7
4	Iptek, Inovasi, dan Produktivitas Ekonomi	Rasio PDRB Industri Pengolahan	11	11,85
		Rasio PDRB Akomodasi Mamin	2,33	2,5
		Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang)	233	269
		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)	6,205	6,866
		Proporsi jumlah UKM non pertanian	19,2	19,69
		Proporsi jumlah IKM	4	4,39
		Rasio Kewirausahaan	3,65	4,75
		Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	1,673	2,128
		ROA BUMD	0	1,01
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,96	4,91
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)	52,55	62,62
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)	60,49	63,72
		Indek Inovasi Daerah	73,21	80,53
5	Penerapan Ekonomi Hijau	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)	8,86	9,08
		Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)	50,881	58,881
6	Transformasi Digital	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	53,8	60,35
7	Integrasi Ekonomi Domestik dan Regional	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	72,09	83,72
		Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)	23,69	23,73
		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	13,08	13,38
8	Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi	Proporsi kontribusi PDRB Kota	1,59	1,68
		Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	89,2	92,4
		Persentase Desa Mandiri (%)	9,44%	13,44%
9	Regulasi dan Tata Kelola yang Berintegritas dan Adaptif	Indeks Reformasi Hukum	72,15	77,3
		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	3,09	3,57
		Indeks Pelayanan Publik	3,85	4
		Survey penilaian integritas (SPI) KPK (Nilai)	77,25	82,95

NO	ARAH PEMBANGUNAN	INDIKATOR UTAMA PEMBANGUNAN	TARGET	
			2025	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Indeks Persepsi Anti Korupsi	-	-
10	Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional Tangguh, Dan Demokrasi Substansial	Pelanggaran Peraturan Daerah	200	190
		Angka Kriminalitas	4,44	4,16
		Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu	83,01	86,03
11	Stabilitas Ekonomi Makro	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,5	0,68
		Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	2,99	16,49
		Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)	831.886	1.665.535
		Total Kredit/PDRB	13,13	16,66
		Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)	3,46	3,61
12	Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan	Persentase Kerjasama yang Terlaksana	100	100
		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	3,06	3,1
13	Beragama Maslahat dan Berkebudayaan Maju	Persentase pelestarian cagar budaya	-	-
		Kampung Moderasi Beragama	4	14
14	Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga	65,4	69,4
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,22-0,21	0,20-0,19
		Indeks Perlindungan Khusus Anak	79,66	82,16
15	Lingkungan Hidup Berkualitas	Indeks tutupan lahan	60,54	60,81
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,97
		RT dengan Akses Sanitasi Aman	11	33,94
		Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)	20,66	37,98
		Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)	73,46	78,96
16	Berketahanan Energi, Air, dan Kemandirian Pangan	Konsumsi listrik per kapita	1237	1820
		Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	7,81	4,91
		Kapasitas Air Baku (m3/detik)	0,149	0,161
		Akses Rumah Tangga Terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan	50	62,5
17	Resiliensi terhadap Bencana dan Perubahan Iklim	Indeks Risiko Bencana (IRBI)	120,2	13,88-107,56
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,97

Sumber: Perda No.1 Tahun 2025, RPJPD Tahun 2025-2045

3.2 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH NASIONAL 2025-2029

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode lima tahun yang menjadi penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045. RPJMN 2025–2029 merupakan RPJMN pertama dalam kerangka RPJPN baru dan memiliki posisi yang sangat strategis sebagai fondasi awal menuju Visi Indonesia Emas 2045.

3.2.1 Visi RPJMN Tahun 2025-2029

Visi Presiden 2025–2029 berdasarkan peraturan presiden Nomor 12 Tahun 2025 adalah **"BERSAMA INDONESIA MAJU MENUJU INDONESIA EMAS 2045"**. Visi ini menjadi dasar penyusunan RPJMN 2025–2029 dan merupakan bagian dari upaya mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yaitu menjadikan Indonesia sebagai negara maju, berdaulat, adil, dan makmur pada tahun 2045, tepat 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Visi tersebut mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita. Asta Cita tersebut memuat 17 program prioritas Presiden yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor.

3.2.2 Misi RPJMN Tahun 2025-2029

Misi RPJMN Tahun 2025–2029 sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Misi ini dikenal juga sebagai Asta Cita, yakni delapan arah kebijakan utama pembangunan nasional yang merupakan turunan dari visi Presiden :

1. Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia, yang berfokus pada upaya simultan yang ditujukan untuk memperkokoh ideologi pancasila, penguatan demokrasi, dan penegakan hak asasi manusia.
2. Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan proses melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas,mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.
4. Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, yang bertujuan untuk mengawal keberhasilan memperkuat pembangunan sumber daya manusia, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, yang bertujuan untuk membangun fondasi industrialisasi yang terintegrasi domestik dalam rangka meningkatkan nilai tambah ekonomi di dalam negeri yang berdaya saing global sehingga menjadi pengungkit perekonomian.
6. Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, yang ditujukan untuk pemerataan dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif sehingga berdampak pada pengentasan kemiskinan.
7. Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, yang dilaksanakan melalui reformasi politik; reformasi hukum; reformasi tata kelola pemerintahan; dan pemberantasan narkoba, judi, dan penyelundupan; serta penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Negara.
8. Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, yang diarahkan untuk memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta meningkatkan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

3.2.3 Sasaran Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029

Representasi keberhasilan pembangunan nasional tahun 2025-2029 tergambar pada pencapaian sasaran pembangunan nasional sebagai berikut;

1. Meningkatkan pendapatan per kapita menuju setara negara maju
   a) Laju pertumbuhan ekonomi menuju 8% di tahun 2029
   b) GNI per kapita meningkat jadi 8.000 USD di tahun 2029
   c) Distribusi PDRB Maritim meningkat menjadi 9,1% di tahun 2029
   d) PDB Manufaktur meningkat menjadi 21,9% di tahun 2029

2. Kepemimpinan dan pengaruh di dunia internasional meningkat
   a) Global Power Index menjadi peringkat 29 di tahun 2029
3. Kemiskinan menurun dan ketimpangan berkurang
   a) Tingkat Kemiskinan turun menjadi 4,5-5% di tahun 2029 serta kemiskinan ekstrem kurang dari 0,5% di tahun 2026
   b) Rasio Gini turun menjadi 0,372 - 0,375 di tahun 2029
   c) Kontribusi PDRB KTI meningkat menjadi 22,4% di tahun 2029
4. Daya Saing Sumber Daya Manusia meningkat
   a) Indeks Modal Manusia menjadi 0,59 tahun 2029
5. Emisi Gas Rumah Kaca menurun menuju *net zero emission*
   a) Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca menjadi 45,17 tahun 2029
   b) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup meningkat menjadi 77,20 tahun 2029

3.3 PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2025-2029

3.3.1 Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 4 Tahun 2025 visi pembangunan jangka menengah Provinsi Sumatera Barat adalah **"SUMATERA BARAT MADANI YANG MAJU DAN BERKEADILAN"** Visi ini memuat tiga kata kunci utama yang menjadi dasar pijakan arah pembangunan lima tahun ke depan, yaitu Madani, Maju, dan Berkeadilan. Ketiga kata ini memiliki makna strategis dan nilai filosofis yang kuat sebagai refleksi dari identitas, potensi, dan harapan masyarakat Sumatera Barat di masa depan.

1. **MADANI**

   Dalam konteks pembangunan, "madani" mencerminkan masyarakat berperadaban tinggi, menjunjung nilai-nilai etika, moral, dan spiritual, serta menjaga harmoni sosial, hidup dalam keteraturan, menghargai hak dan kewajiban, dan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat. Selain itu, madani juga mencerminkan bahwa masyarakat hidup dengan berbasiskan pada kearifan lokal, yakni masyarakat yang memelihara adat dan budaya Minangkabau yang berlandaskan filosofi "Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah (ABS-SBK)". Madani juga menunjukkan kondisi masyarakat yang maju secara sosial dan spiritual, tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi semata tetapi juga keseimbangan nilai-nilai kemanusiaan dan keagamaan. Dengan demikian, Sumatera Barat Madani adalah daerah yang menjadikan nilai-nilai keagamaan dan adat sebagai fondasi kehidupan sosial dan pemerintahan yang adil, beretika, dan bermartabat.

2. **MAJU**

   Kata maju dalam visi ini dimaknai sebagai kondisi pembangunan daerah yang berdaya saing tinggi, baik dalam skala nasional maupun internasional melalui penguatan kualitas sumber daya manusia, teknologi, inovasi, dan infrastruktur. Maju juga menunjukkan konsep pembangunan yang berkelanjutan dimana pembangunan ekonomi dilakukan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup dan sosial budaya masyarakat. Maju juga mencerminkan modern namun tetap berakar pada nilai tradisional, yang berarti tidak meninggalkan identitas lokal dalam proses pembangunan. Sehingga kemajuan pembangunan diharapkan mencakup peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh pendidikan, kesehatan, ekonomi, serta kapasitas daya saing daerah di berbagai bidang strategis.

3. **BERKEADILAN**

   Keadilan dalam konteks pembangunan tidak hanya bermakna persamaan formal, tetapi juga keadilan substantif yang mencakup terjadinya Pemerataan hasil pembangunan antar wilayah, antar kelompok sosial, dan antar sektor, sehingga tidak ada daerah atau kelompok masyarakat yang tertinggal, terjadinya Kesempatan yang setara dalam mengakses pelayanan dasar, seperti

pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur serta terwujudnya Pemberdayaan kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat untuk terlibat aktif dalam pembangunan. Berkeadilan juga mencerminkan semangat inklusivitas dan keberpihakan terhadap kelompok marjinal, serta pengambilan kebijakan berbasis data dan prinsip no one left behind.

3.3.2 Misi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ke dalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan yaitu ;

Misi 1. Pendidikan Merata, Kesehatan Berkualitas

Bertujuan untuk mewujudkan pembangunan manusia yang berkualitas dan berdaya saing, diperlukan perbaikan menyeluruh terhadap akses dan kualitas pendidikan serta layanan Kesehatan, yang difokuskan pada pemerataan akses dan peningkatan kualitas pendidikan di semua jenjang, penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan yang merata dan terjangkau serta percepatan penurunan stunting dan angka kematian ibu.

Misi 2. Lumbung Pangan Nasional dan Ekonomi Berkelanjutan

Terkait dengan Provinsi Sumatera Barat yang memiliki potensi besar sebagai lumbung pangan, namun masih menghadapi tantangan produktivitas, keberlanjutan, dan ketahanan pangan. Transformasi sektor pertanian melalui inovasi, digitalisasi, dan modernisasi alat produksi, dan pengembangan kawasan sentra produksi pangan, hilirisasi hasil pertanian serta peningkatan pengelolaan SDA yang ramah lingkungan dan lestari berbasis ekonomi hijau dan biru harus dipercepat untuk menciptakan ekonomi yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Misi 3. Nagari/Desa sebagai basis Kemajuan

Menekankan bahwa pembangunan berbasis nagari/desa menjadi hal penting untuk pemerataan kesejahteraan. Kemandirian ekonomi lokal harus diperkuat melalui pemanfaatan potensi daerah, perbaikan infrastruktur dasar, serta penguatan kapasitas kelembagaan nagari dan desa.Dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi nagari, lebih ditekankan kepada digitalisasi di nagari dengan memperkuat aktivitas ekonomi saat ini. Secara natural pertumbuhan daerah akan bertumpu pada pusat-pusat kegiatan yang berada di kawasan perkotaan. Share ekonomi perkotaan diprediksi akan meningkat dari 38% menjadi 40% di tahun 2030 mendatang. Dengan adanya potensi ekonomi di kawasan perdesaan, maka yang perlu dibangun adalah urban-rural linkage yang baik dan saling mendukung satu sama lain.

Misi 4. Sumatera Barat Pusat Perdagangan dan Bisnis Sumatera Bagian Barat

Bertujuan untuk menjadikan Sumatera Barat sebagai simpul ekonomi di pesisir barat Sumatera, sehingga perlu dilakukan penguatan sektor industri, perdagangan, dan investasi. Ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif dan dorongan terhadap UKM harus ditingkatkan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan kompetitif.

Misi 5. Membangun Infrastruktur Berkeadilan dan Siap Tanggap Bencana

Menekankan bahwa Pembangunan infrastruktur harus menjawab tantangan keberlanjutan dan ketangguhan terhadap bencana. Diperlukan investasi infrastruktur yang merata dan responsif terhadap risiko bencana serta integrasi TIK untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi Pembangunan

Misi 6. Membangun Kehidupan Beradat dan Berbudaya Berbasiskan Agama, Kearifan Lokal Melalui Dukungan Keluarga Yang Berkualitas

Menekan pada penguatan jati diri masyarakat Sumatera Barat yang religius dan berbudaya menjadi fondasi pembangunan. Pelestarian nilai-nilai adat, budaya, dan penguatan keluarga berkualitas penting untuk mewujudkan masyarakat harmonis dan berkarakter.

Misi 7. Tingkatkan Daya Saing Pariwisata dan Akselerasi Ekonomi Kreatif Untuk UKM

Bertujuan untuk mendorong Pembangunan kepariwisataan dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi besar untuk menjadi pusat pertumbuhan ekonomi masa depan yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Penguatan branding destinasi, pengembangan SDM pariwisata, dan fasilitasi pelaku kreatif menjadi prioritas untuk meningkatkan kontribusi sektor ini terhadap PDRB daerah.

Misi 8. Tata Kelola Pemerintahan Bersih dan Pelayanan Publik yang Efektif

Bertujuan untuk terbentuknya Pemerintahan yang bersih dan layanan publik yang efisien merupakan pondasi pembangunan daerah. Reformasi birokrasi berbasis digital, perbaikan pelayanan, dan optimalisasi PAD akan memperkuat kapasitas fiskal dan kepercayaan publik

3.3.3 Sasaran Pembangunan Provinsi Sumatera Barat

Sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Barat dalam mendukung visi Sumatera Barat dijabarkan dalam sasaran visi sebagai berikut;

1. Peningkatan pendapatan per kapita
   a) Meningkatkan PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dari 58,3 di tahun 2025 menjadi 142,65 di tahun 2030 (dalam Rp Juta);
   b) Meningkatkan Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI) dari 25,19 tahun 2025 menjadi 36,41 di tahun 2030;
   c) Meningkatkan Kontribusi PDRB Sektor Industri dari 8,53% di tahun2025 menjadi 9,38% di tahun 2030
2. Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan
   a) Menurunkan tingkat kemiskinan dari 4,50%-5,10% di tahun 2025 menjadi 3,39%– 3,96% di tahun 2030;
   b) Menurunkan Rasio Gini dari 0,274 di tahun 2025 menjadi 0,266 di tahun 2030
   c) Meningkatkan Kontribusi PDRB Provinsi dari 1,49% menjadi tahun 2025 menjadi 1,51% di tahun 2030
   d) Meningkatkan Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi dari 1,94% di tahun 2025 menjadi 2,00% di tahun 2030.
   e) Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dari 5,40% di tahun 2025 menjadi 5,90% di tahun 2030
3. Peningkatan daya saing daerah
   a) Meningkatkan indeks daya saing daerah 3,58 di tahun 2025 menjadi 3,94 di tahun 2030
4. Peningkatan daya saing sumber daya manusia
   a) Meningkatkan Indeks Modal Manusia dari 0,58 di tahun 2025 menjadi 0,63 di tahun 2030
5. Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju *zero emission*
   a) Penurunan Intensitas Emisi GRK dari 52,62 di tahun 2025 menjadi 62,27 di tahun 2030
   b) Meningkatkan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah dari 77,95 di tahun 2025 menjadi 79,00 di tahun 2030

3.4 VISI DAN MISI RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029

3.4.1 Visi RPJMD Tahun 2025-2029

Pembangunan Kota Sawahlunto lima tahun kedepan merupakan penjabaran dari Visi Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih yang mencerminkan upaya untuk terwujudnya visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 yaitu ”Sawahlunto Kota Wisata Tambang Berbudaya Kelas Dunia yang Maju dan Berkelanjutan”. Berdasarkan arah pembangunan jangka panjang Kota Sawahlunto, kondisi daerah, permasalahan, tantangan pembangunan yang harus dihadapi dan isu-isu strategis yang ada, maka rumusan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Sawahlunto untuk tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

"Sawahlunto Kota Wisata Yang Estetik, Futuristik, Hidup Dan Menghidupi"

Dengan penjelasan kata kunci yang menunjukkan arah pembangunan Kota Sawahlunto yaitu : Estetik, Futuristik dan Hidup dan Menghidupi adalah sebagai berikut:

1. **Estetik**

   Pada tahun 2030, tranformasi Sawahlunto kota Wisata dengan segala tatanan keindahannya dapat dirasakan keberadaannya dan menunjukkan kesiapannya menuju kota pariwisata kelas dunia 2045, dimana telah terjadi transformasi atas tata kelola keuangan daerah, pelayanan dasar publik dan pelayanan umum pemerintahan. Transformasi atas hal tersebut dapat diketahui dari peningkatan atas indeks penilaian terhitung dari lembaga resmi pemerintah Republik Indonesia, sehingga visi estetik dapat dirasakan kemanfaatannya dan terukur kinerjanya dengan penilaian tertetapkan.

2. **Futuristik**

   Pada Tahun 2030, telah terbentuk sebuah pola pengembangan program-program kerja yang berbasiskan data (primer dan sekunder) yang dianalisis dan disusun oleh aparatur pelaksana yang telah melalui proses maksimalisasi peningkatan kemampuan personal (melalui diklat dan tinjauan langsung ke Pemerintah Daerah sasaran yang kualitasnya jauh lebih baik) dan dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan dengan komitmen yang kuat, terintegrasi dan berkelanjutan, dimana dilaksanakan dalam kondisi telah terjadi penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, ketahanan sosial budaya, pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan. Dengan stabilitas ekonomi makro daerah yang telah terbentuk di Kota Sawahlunto, maka pada tahun 2030 masyarakat di Kota Sawahlunto telah dinyatakan siap untuk menyongsong dan mensukseskan tahapan pembentukan kota wisata kelas dunia yang maju dan berkelanjutan 2045.

3. **Hidup Menghidupi**

   Pada tahun 2030, telah terwujud sebuah tatanan kota wisata yang telah tertata dengan keindahan berdaya guna, terukur pelaksanaan kinerjanya, kesiapan setiap SDM Aparatur pelaksana pendukung atas perencanaan program dan konsistensinya terhadap penganggarannya, sehingga tercipta sebuah pola tatanan kehidupan dunia kepariwisataan di Kota Sawahlunto yang mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kota Sawahlunto yang berkeadilan.

Berdasarkan penjelasan kata kunci dalam visi tersebut, maka pencapaian visi dapat diukur dengan 5 (lima) sasaran visi sebagai berikut :

Tabel 3.3
Sasaran Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

NO	RPJMD KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2025-2029						
	SASARAN VISI /INDIKATOR	TARGET					
		2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Peningkatan Pendapatan per kapita						
	PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	8,82	9,0325	9,245	9,4575	9,67	11,85
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan						
	Tingkat Kemiskinan (%)	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71
	Gini Ratio (Indeks)	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291
	Pertumbuhan Ekonomi	4,63	5,84	6,89	7,01	7,29	5,87
3	Peningkatan Daya Saing Daerah						
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20
4	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia						
	Indeks Pembangunan Manusia	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81
	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	93,84	94,74	95,63	96,50	97,42	98,31
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,12	72,33	72,55	72,76	72,97

3.4.2 Misi RPJMD Tahun 2025-2029

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Sawahlunto, Adapun rumusan misi dari Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

PERNYATAAN VISI	MISI
SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI	1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan
	2. Mewujudkan Smart Governance berbasis IT
	3. Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat
	4. Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan
	5. Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan
	6. Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat
	7. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya

Uraian masiung-masing misi pembangunan jangka menengah Kota Sawahlunto sebagai berikut :

1. **Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan**
   Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian melalui kemandirian desa dan ekonomi kerakyatan untuk memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan daya saing ekonomi dengan meningkatkan produktivitas pertanian, ketahanan pangan, hilirisasi industri, aktivitas perdagangan dan meningkatkan kinerja investasi daerah.

2. **Mewujudkan smart governance berbasis IT**
   Mewujudkan smart governance berbasis IT adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Konsep ini berfokus pada penggunaan data dan teknologi digital untuk pengambilan keputusan yang lebih baik, pelayanan publik yang lebih efektif, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

3. **Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan Masyarakat**
   Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang vital bagi kehidupan masyarakat, seperti jalan, jembatan, irigasi, sanitasi, dan sarana prasaran lainnya, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, pertumbuhan ekonomi, dan mengurangi kesenjangan. Pembangunan sarana dan prasarana yang berkualitas dan ramah lingkungan melalui penguatan infrastruktur pelayanan dasar dan konektivitas wilayah dalam memperkuat fondasi ekonomi.

4. **Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan**
   Memperkuat pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama dalam mewujudkan kerukunan antar umat beragama serta menjadikan seni budaya sebagai daya tarik wisata serta memberdayakan masyarakat melalui komunitas seni.

5. **Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan**
   mengoptimalkan potensi pariwisata (OCMHS dan *Geopark* Nasional) dan ekonomi kreatif sebagai sumber pendapatan daerah yang berkelanjutan dengan pendekatan berbasis infrastruktur, digitalisasi, keberlanjutan lingkungan, serta dukungan pelaku usaha lokal sehingga pertumbuhan sektor wisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tetapi juga melestarikan budaya dan alam.

6. **Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat**
   Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat untuk menuju kota sehat dan meningkatkan sarana/parasarana pendidikan, kompetensi tenaga pendidik serta kualitas proses belajar dan mengajar untuk pendidikan yang berkarakter.

7. **Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya**
   Tata Kelola Pemerintah yang memegang prinsip *good governance* dan *good government*. Tata kelola pemerintahan yang mencerminkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

3.4.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Tahun 2024-2030

Perumusan tujuan pembangunan jangka menengah Kota Sawahlunto, secara teknoratik dengan menelaah arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045, tujuan dan sasaran pembangunan daerah sangat penting dalam perencanaan pembangunan daerah serta menjadi acuan dalam perumusan tujuan dan sasaran rencana strategis perangkat daerah.

Tujuan diturunkan dari visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah merupakan rangkaian kinerja yang menggambarkan tercapainya visi selama 5 tahun. Tujuan dapat mencakup beberapa prioritas pembangunan untuk mendukung Asta Cita atau Misi RPJMN Tahun 2025-2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029.

Sasaran diturunkan dari tujuan yang merupakan rangkaian kerja berupa hasil penyelenggaraan pembangunan daerah menuju tercapainya tujuan RPJMD. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil program perangkat daerah. Tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah Kota Sawahlunto dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.5
Penjabaran Visi Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Jangka Menengah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*
MISI 1: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR PEREKONOMIAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN	Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berwawasan lingkungan		Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,63	5,84	6,89	7,01	7,29	5,87	5,87	
			PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta) (Rp. Juta Per Tahun)	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45	136,45	
			Tingkat Kemiskinan ((%))	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71	1,71	
			Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) (%)	23,69	23,70	23,71	23,71	23,72	23,73	23,73	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,61	4,66	4,35	4,31	4,20	4,09	4,09	
			Rasio Gini (Indeks)	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291	0,291	
			Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (Angka)	1,52	1,52	1,52	1,53	1,54	1,54	1,54	
			Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)	84,5	85,6	86,7	87,8	88,9	90	90	
		Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	8,82	9,0325	9,245	9,4575	9,67	11,85	11,85	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
			Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	1,673	1,715	1,757	1,799	1,841	2,128	2,128	
			Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%)	7,61	8,048	8,486	8,924	9,362	13,38	13,38	
		Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	93,84	94,74	95,63	96,50	97,42	98,31	98,31	Dinas Penanaman Modal PTSP Naker
			Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) (%)	52,96	54,16	55,36	56,56	57,76	62,62	62,62	
			Persentase peningkatan Investasi (%) (Persentase)	8,83	9,03	9,23	9,43	9,63	9,83	9,83	
		Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Indeks Desa (Rata-rata indeks desa) (Indeks)	78,72	79,02	79,32	79,62	79,92	80,22	80,22	Dinas Sosial PMDesPPA
		Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%) (%)	8,86	8,90	8,95	8,99	9,04	9,08	9,08	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
			Prevalansi ketidakcukupan konsumsi	7,81	7,33	6,85	6,36	5,39	4,91	4,91	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
			pangan (Prevalence of Undernourishment) (%) (%)								
			Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang) (Rp Juta/Orang/Bulan)	50,881	52,481	54,081	55,681	57,281	58,881	58,881	
MISI 2: MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE BERBASIS IT	Terwujudnya Smart Governance berbasis IT		Indeks Masyarakat Digital Indonesia (*)	53,80	55,11	56,42	57,73	59,04	60,35	60,35	
		Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Indeks Pemerintah Digital (Angka)	-	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,1	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Terwujudnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien	Indeks Pelayanan Publik (*)	3,19	3,20	3,21	3,22	3,22	4,00	4,00	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
MISI 3: PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan		Indeks Kinerja Infrastruktur (Indeks)	70,13	71,33	72,52	73,32	74,92	76,12	76,12	
			Indeks Risiko Bencana (IRBI) (Angka)	103.52-	103.51 - 102.24	111.65-110.38	110.37-109.1	109.09-107.82	107.81-106.54	107.81-106.54	
		Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	71,91	72,12	72,33	72,55	72,76	72,97	72,97	Dinas Kawasan Permukiman Perumahan LH
			Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,55	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya Aksesbilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar (Indeks)	51,25	53,16	55,09	57,03	59,44	62,71	62,71	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Dinas Kawasan Permukiman Perumahan LH
			Indek Konektivitas Darat (Indeks)	53,65	55,34	57,13	59,12	61,21	63,58	63,58	Dinas Perhubungan
			Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)	47,79	49,90	52,01	54,12	56,23	58,34	58,34	Dinas Kawasan Permukiman Perumahan LH
MISI 4: PENINGKATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MELALUI PENGEMBANGAN KOMUNITAS SENI DEMI MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA WISATA YANG ESTETIK DAN MEMILIKI FUNGSI	Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis		Indeks Ketahanan Nasional (Indeks)	3,06	3,07	3,08	3,09	3,10	3,11	3,11	
		Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	3,20	3,50	3,70	4,20	4,30	4,50	4,50	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
			Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Angka)	100	100	100	100	100	100	100	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
			Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (*)	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	14,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Meningkatnya komunitas seni dalam pelestarian cagar	Persentase pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan (%)	74,00	76,80	78,77	80,76	83,43	85,49	85,49	Dinas Kebudayaan

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
EKONOMI DAN MENSEJAHTERAKAN		budaya dan adat istiadat									
MISI 5: MENINGKATKAN FUNGSI EKONOMI SEKTOR PARIWISATA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI POTENSI KEPARIWISATAAN	Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat		Rasio PDRB Akomodasi Mamin (%)	2,33	2,35	2,37	2,39	2,41	2,50	2,50	
		Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	PAD sektor Pariwisata (Angka)	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,20	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
		Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%) (%)	6,205	6,195	6,185	6,165	6,155	6,866	6,866	
Misi 6: KOTA SAWAHLUNTO MENUJU KOTA SEHAT DAN DESTINASI PENDIDIKAN UTAMA YANG BERKARAKTER DI SUMATERA BARAT	Terwujudnya SDM yang berdaya saing		Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81	80,81	
		Meningkatnya kualitas pendidikan	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca (Angka)	82,83	82,90	83,00	83,10	83,20	83,25	83,25	Dinas Pendidikan
			Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (Angka)	79,67	79,70	79,85	79,90	79,91	79,92	79,92	
			Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	10,65	10,78	10,90	11,02	11,13	11,25	11,25	
			Harapan Lama Sekolah (Tahun)	14,10	14,32	14,53	14,76	14,97	15,19	15,19	
			Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))	14,00	14,12	14,24	14,36	14,47	14,58	14,58	
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	74,43	74,75	75,07	75,39	75,71	76,03	76,03	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
			Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (%)	17,30	16,05	14,80	13,55	12,30	11,05	11,05	
			Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	100	100	100	100	100	100	100	
		Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Indeks Pembangunan Keluarga (*)	65,20	66,40	67,50	68,60	69,70	70,60	70,60	Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB
			Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	0,270	0,270	0,269	0,269	0,268	0,268	0,268	Dinas Sosial PMDesPPA
			Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	67,52	67,706	67,892	68,078	68,264	68,45	68,45	
			Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	95,83	95,93	96,03	96,13	96,23	96,33	96,33	
			Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	56,70	57,30	57,90	58,50	59,10	59,70	59,70	
		Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Persentase peningkatan partisipasi pemuda berwirausaha (%)	0,36	0,43	0,50	0,70	0,80	1,00	1,00	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga
			Persentase peningkatan prestasi Olahraga (%)	0,25	0,30	1,20	1,70	1,90	2,05	2,05	
MISI 7: PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG BERDAYA SAING TINGGI ATAS PENGUKURAN INDEKS	Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing		Indeks Reformasi Birokrasi (Indeks)	76,35	77,56	78,17	79,01	80,47	82,72	82,72	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	73,21	74,67	76,14	77,60	79,07	80,53	80,53	
		Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ()	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20	3,20	Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan
			Nilai AKIP Instansi Pemerintah (Nilai)	65,23	68,17	70,11	71,02	72,03	73,20	73,20	Sekretariat Daerah, ,

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TAHUN						Kondisi Akhir RPJMD	OPD PENANGGUNG JAWAB
				2025	2026	2027	2028	2029	2030		
KINERJA YANG DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA LAINNYA											Barenlitbangda, Inspektorat
			Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,45	Inspektorat
		Terwujudnya profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	78,72	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00	90,00	Badan Kepegawaian SDM
		Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)	50,56	50,60	50,65	50,70	50,75	60,00	60,00	Dinas Perpustakaan dan Karsipan
			Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)	5,39	15,40	15,45	15,50	15,55	15,60	15,60	
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)	70,85	71	72	73	74	75	75	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

3.4.4 Keterkaitan Antara Visi Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045

Untuk mencapai visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 yaitu **"Sawahlunto Kota Wisata Tambang Berbudaya Kelas Dunia yang Maju dan Berkelanjutan"** yang menjadikan keunggulan pariwisata Kota Sawahlunto sampai tingkat dunia sehingga mampu meningkatkan daya saing daerah dalam perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sedangkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 yang merupakan tahap I dari RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 dengan visi menjadikan Sawahlunto kota wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tahap I RPJPD ini mempersiapkan kota Sawahlunto menjadi Kota Wisata Tambang Berbudaya Kelas Dunia. Keselarasan antara dokumen ini dengan mengakomodir indikator-indikator sasaran visi RPJPD Kota Sawahlunto tahun 2025-2045 dalam RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025-2029, seperti pada tabel berikut :

Tabel 3.6
Penyelarasan Sasaran Visi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045 dengan Sasaran Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

No	RPJPD Kota Sawahlunto tahun 2025-2045			RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025-2029						
	Sasaran Visi /Indikator	Target		Sasaran Visi /Indikator	Target					
		2025	2030		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Peningkatan Pendapatan per kapita			Peningkatan Pendapatan per kapita						
	PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)	73,78	179,83	PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45
	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,44	14,8	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	8,82	9,0325	9,245	9,4575	9,67	11,85
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan			Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan						
	Tingkat Kemiskinan (%)	1,73-1,96	1,22-1,43	Tingkat Kemiskinan (%)	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71
	Rasio gini (Indeks)	0,285	0,267	Rasio gini (Indeks)	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291
	Pertumbuhan Ekonomi	5,44	5,71	Pertumbuhan Ekonomi	4,63	5,84	6,89	7,01	7,29	5,87
3	Peningkatan Daya Saing Daerah			Peningkatan Daya Saing Daerah						
	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,15	3,20	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20
4	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia			Peningkatan Daya saing sumber daya manusia						
	Indeks Pembangunan Manusia	76,55	79,47	Indeks Pembangunan Manusia	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81
	Tingkat produktivitas tenaga kerja	93.842	98.311	Tingkat produktivitas tenaga kerja	93,84	94,74	95,63	96,50	97,42	98,31
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,97	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,12	72,33	72,55	72,76	72,97

Dalam rangka menjabarkan visi tersebut ke dalam arah kebijakan yang lebih aplikatif dan sistematis, disusunlah 8 (delapan) misi pembangunan. Misi ini menjadi penjabaran operasional dari visi, yang menggambarkan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh oleh Pemerintah Daerah untuk menjawab tantangan dan permasalahan pembangunan daerah, sekaligus menangkap peluang dan potensi strategis yang dimiliki Kota Sawahlunto

Penyelarasan Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045, menunjukkan hubungan yang bersifat hierarkis, di mana RPJMD menjadi langkah operasional untuk mencapai visi jangka panjang RPJPD. Untuk kerterkaitan misi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.7
Penyelarasan Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan Misi RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045

MISI RPJMD TAHUN 2025-2029		RPJPD TAHUN 2025-2045
1	Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan	Misi 2. Transformasi ekonomi yang inklusif dalam mewujudkan Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) dan Geopark Nasional
2	Mewujudkan Smart Governance berbasis IT	Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif
3	Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Misi 7. Mewujudkan Sarana dan Prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan
4	Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan	Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing
		Misi 5. Mewujudkan Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi
5	Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan	Misi 2. Transformasi ekonomi yang inklusif dalam mewujudkan Wisata Sejarah Dunia (OCMHS) dan Geopark Nasional
6	Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat	Misi 1. Mewujudkan Transformasi Sosial untuk Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkarakter dan berdaya saing
7	Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya	Misi 3. Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas dan Inovatif
		Misi 8. Mewujudkan Kesinambungan Pembangunan Daerah

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Misi RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025-2025 telah selaras dengan 8 Misi RPJPD Kota Sawahlunto tahun 2025-2045. dimana diharapkan pada Tahap I RPJPD dapat menjadi kan fondasi Transformasi

3.4.5 Keterkaitan Antara Visi Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan Visi Misi RPJMN

Keterkaitan antara Visi Misi RPJMD dengan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat dan Visi Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) seperti tabel dibawah ini :

Tabel 3.8
Penyelarasan Visi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat dan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

Visi RPJMD Kota Sawahlunto	Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat	Visi RPJMN
Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik, Hidup dan Menghidupi	Sumatera Barat Madani yang Maju dan Berkeadilan	Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045

Dari tabel diatas terlihat adanya keselarasan antara masing-masing visi, yaitu: Visi RPJMN Tahun 2025-2029, dengan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa dan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045, kondisi yang diharapkan adalah mencapai penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan, yang diperkuat dengan sasaran pada aspek politik luar negeri dan lingkungan. Dalam RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025-2029, dengan pencapaian menjadikan Sawahlunto kota wisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga diharapkan penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan pertumbuhan ekonomi tinggi berkelanjutan pada tahun 2030, penyelarasan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9
Penyelarasan Sasaran Visi RPJMN Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

No	RPJMN tahun 2025-2029			RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025-2029						
	Sasaran Visi /Indikator	Target		Sasaran Visi /Indikator	Target					
		2025	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Meningkatkan pendapatan perkapita menuju setara negara maju			Peningkatan Pendapatan per kapita						
	Pertumbuhan ekonomi (%)	5,3	8							
	GNI per kapita meningkat USD)	5410	8000	PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45
	Kontribusi PDBMaritim meningkat(%)	8,1	9,1							
	Kontribusi PDB Manufaktur meningkat (%)	20,8	21,9	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	8,82	9,0325	9,245	9,4575	9,67	11,85
2	Kemiskinan Menurun dan Ketimpangan Berkurang			Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan						
	Tingkat Kemiskinan (%)	08-Jul	4.5-5	Tingkat Kemiskinan (%)	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71
	Rasio gini (Indeks)	0.378-0.382	0.372-0.375	Rasio gini (Indeks)	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291
	Kontribusi PDRB KTI meningkat	21,4	22,4	Pertumbuhan Ekonomi	4,63	5,84	6,89	7,01	7,29	5,87
3	Kepemimpinan dan P!ngaruh di osnia lnterna5ion.l Meningkat			Peningkatan Daya Saing Daerah						
	Globol Power Indeks meningkat (peringkat)	33,00	29,00	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20
4	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia			Peningkatan Daya saing sumber daya manusia						
	Indeks Modal Manusia (lMM) meningkat	0,56	0,59	Indeks Pembangunan Manusia	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81
				Tingkat produktivitas tenaga kerja	93,84	94,74	95,63	96,5	97,42	98,31
5	Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
	Penurunan intensitas emisi GRK	35,53	45,17	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,122	72,334	72,546	72,758	72,97
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	76,49	77,2	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,12	72,33	72,55	72,76	72,97

Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bertekad untuk mewujudkan tatanan masyarakat yang bermartabat, berdaya saing, dan harmonis dalam balutan nilai-nilai lokal dan keagamaan yang kuat. RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025-2029, dengan meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dan penguatan landasan transformasi sosial, ekonomi dan tata kelola, ketahanan sosial budaya, pembangunan kewilayahan yang merata dengan pemenuhan sarana dan prasarana yang merata dan berkeadilan sehingga tercipta sebuah pola tatanan kehidupan dunia kepariwisataan di Kota Sawahlunto yang mampu mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, penyelarasan ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.10
Penyelarasan Sasaran Visi RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dengan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

No	RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029			RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029						
	Sasaran Visi /Indikator	Target		Sasaran Visi /Indikator	Target					
		2025	2029		2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*	*(11)*
1	Peningkatan Pendapatan per kapita			Peningkatan Pendapatan per kapita						
	PDRB Per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) (Rp Juta)	58,32	142,65	PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45
	Indeks Ekonomi Biru Indonesia (IBEI)	25,19	36,41							
	Kontribusi PDRB Sektor Industri (%)	8,53	9,38	Kontribusi PDB Industri Pengolahan (%)	11,44	11,522	11,604	11,686	11,768	11,85
2	Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan			Pengentasan kemiskinan dan ketimpangan						
	Tingkat Kemiskinan (%)	4.50-5.10	3.39-3.96	Tingkat Kemiskinan (%)	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71
	Rasio gini (Indeks)	0,274	0,266	Rasio gini (Indeks)	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291
	Kontribusi PDRB Provinsi (%)	1,49	1,51							
	Kontribusi PDRB Kab.Kep Mentawai terhadap PDRB Provinsi (%)	1,94	2,00							
	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,40	5,90	Pertumbuhan Ekonomi	4,63	5,84	6,89	7,01	7,29	5,87
3	Peningkatan daya saing daerah			Peningkatan Daya Saing Daerah						
	Indeks Daya Saing Daerah	3,58	3,94	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3,15	3,16	3,17	3,18	3,19	3,20
4	Peningkatan Daya saing sumber daya manusia			Peningkatan Daya saing sumber daya manusia						
	Indeks Modal Manusia	0,58	0,63	Indeks Pembangunan Manusia	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81
				Tingkat produktivitas tenaga kerja	93,84	94,74	95,63	96,5	97,42	98,31
5	Penurunan emisi Gas Rumah Kaca menuju zero emission			Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup						
	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	52,62	62,27	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,12	72,33	72,55	72,76	72,97
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	77,95	79,00	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	71,91	72,12	72,33	72,55	72,76	72,97

Penyelarasan Misi RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan RPJMN Tahun 2025- 2029 dan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.11
Penyelarasan Misi RPJMD Kota Sawahlunto dengan , RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029 dan RPJMN

RPJMD Kota Sawahlunto	RPJMD Provinsi Sumatera Barat	RPJMN
1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan	Lumbung pangan nasional dan ekonomi berkelanjutan	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
	Membangun kehidupan beradat dan berbudaya berbasiskan agama, kearifan lokal melalui dukungan keluarga yang berkualitas	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan Alam dan budaya, sena peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur
	Sumatera Barat pusat perdagangan dan bisnis Sumatera Bagian Barat	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
	Nagari/desa sebagai basis kemajuan	Membangun dari desa dan dari bawah untuk penumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.
2. Mewujudkan smart governance berbasis IT	Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
		Memperkokoh ideologi Pancasila,demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)
3. Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat	Pendidikan merata, kesehatan berkualitas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sena pmguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan qenerasi Z), dan penyandang disabilitas
	Membangun infrastruktur berkeadilan dan siap tanggap bencana	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi
4. Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan	Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi
5. Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan	Tingkatkan daya saing pariwisata dan akselerasi ekonomi kreatif untuk UMKM	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri disentra produksi melalui peran aktif koperasi
6. Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat	Pendidikan merata, kesehatan berkualitas	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, sena pmguatan peran perempuan. pemuda (generasi milenial dan qenerasi Z), dan penyandang disabilitas
7. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya	Tata kelola pemerintahan bersih dan pelayanan publik yang efektif	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan
		Memperkokoh ideologi Pancasila,demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)

3.5 STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

3.5.1 Strategi, Arah Kebijakan Menurut Tujuan dan Sasaran

Strategi merupakan rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, penahapan pembangunan, lokus dan penentuan program prioritas dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana pembangunan jangka menengah daerah. Dengan Pendekatan komprehensif tersebut strategi dapat digunakan sebagai instrument untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan manajemen kinerja birokrasi secara menyeluruh sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi setiap program pembangunan. Adapun Strategi menurut Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut ;

Tabel 3.12
Strategi dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029
VISI: SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
MISI 1. MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR PEREKONOMIAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN					
1	Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan	1	Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	1	Meningkatkan penataan pasar dan mengoptimalkan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan
				2	Meningkatkan daya saing industri
				3	Memaksimalkan potensi koperasi
		2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	1	Meningkatkan investasi daerah
				2	Penguatan Pelatihan kerja serta peningkatan produktivitas tenaga kerja
		3	Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	1	Mempercepat pembangunan desa
				2	Pembentukan Pusat Kreatifitas Desa (*Creative Hub*) sebagai inovasi dan wirausaha
				3	Meningkatkan kesejahteraan sosial
				4	Memberikan pendampingan dan fasilitas pada penyandang disabilitas dan berkebutuhan khusus lainya
		4	Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	1	Meningkatkan ketersediaan dan aksesibilitas pangan, stabilitas pasokan, serta pemanfaatan sumber daya yang efisien.
				2	Pengembangan sektor pertanian berbasis
					kawasan dan komoditas bernilai ekonomi tinggi
				3	Peningkatan produksi/ produktivitas dan nilai tambah hasil pertanian serta kelautan dan perikanan
				4	Pengembangan teknologi budidaya perikanan
MISI 2. MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE BERBASIS IT					
2	Terwujudnya smart governance berbasis IT	1	Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	1	Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
				2	Memperkuat keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah
				3	Penguatan kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)
		2	Terwujudnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien	1	Peningkatan digitalisasi layanan publik yang terintegrasi dan terpadu
MISI 3. PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT					
3	Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh	1	Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh	1	Peningkatan pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
	bencana dan berkelanjutan		bencana	2	Percepatan pembangunan sarana prasarana mitigasi bencana dan rehabilitasi rekonstruksi pasca bencana
				3	Penguatan sarana prasarana kebakaran
		2	Meningkatnya Aksesbilitas/Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	1	Meningkatkan kelestarian dan pendayagunaan sumber daya air
				2	Pemerataan Akses Air Minum Perpipaan
				3	Penguatan Infrastruktur Sanitasi
				4	Peningkatan Kualitas drainase perkotaan , infrastruktur permukiman, bangunan gedung
				5	Pemantapan kondisi infrastruktur terutama jalan dan jembatan
				6	Pembangunan kawasan perumahan yang memenuhi standar hunian layak dan ramah lingkungan
				7	Percepatan status lahan untuk pembangunan
				8	Peningkatan kapasitas dan kualitas transportasi darat
MISI 4. PENINGKATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MELALUI PENGEMBANGAN KOMUNITAS SENI DEMI MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA WISATA YANG ESTETIK DAN MEMILIKI FUNGSI EKONOMI DAN MENSEJAHTERAKAN					
4	Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis	1	Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	1	Meningkatkan Penerapan Nilai-nilai Agama dan Pancasila dalam kehidupan masyarakat
				2	Meningkatkan rasa aman dan nyaman masyarakat
		2	Meningkatnya komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan adat istiadat	1	Memperluas tingkat partisipasi dan kolaborasi masyarakat dalam meningkatkan jumlah objek pemajuan kebudayaan
				2	Melestarikan warisan budaya dan kearifan lokal
MISI 5 OPTIMALISASI POTENSI KEPARIWISATAAN					
5	Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat	1	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	1	Meningkatkan keunggulan daya tarik dan promosi wisata
		2	Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	1	Peningkatan Pelaku ekonomi kreatif yang berkualitas
MISI 6 KOTA SAWAHLUNTO MENUJU KOTA SEHAT DAN DESTINASI PENDIDIKAN UTAMA YANG BERKARAKTER DI SUMATERA BARAT					
6	Terwujudnya SDM yang berdaya saing	1	Terciptanya pendidikan yang berkualitas	1	Menyelenggarakan Pendidikan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau
				2	Penguatan pendidikan berkarakater melalui kurikulum muatan lokal
		2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1	Meningkatkan kualitas dan Pemerataan Pelayanan Kesehatan
				2	Pencegahan Stunting melalui penerapan pola hidup sehat dan pemenuhan gizi ibu
		3	Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	1	Pengendalian Fertilitas dan Mortalitas
				2	Meningkatkan ketahanan keluarga, dan pemberdayaaan perempuan dan perlindungan anak
		4	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	1	Memberikan sarana prasarana generasi muda (milenial & gen z) untuk berkarya melalui kelembagaan pemuda
				2	Meningkatkan Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga
MISI 7. PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG BERDAYA SAING TINGGI ATAS PENGUKURAN INDEKS KINERJA YANG DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA LAINNYA					
7	Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing	1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih.	1	Meningkatkan penerapan reformasi birokrasi
				2	Meningkatkan kerjasama pembangunan
		2	Terwujudnya profesionalitas ASN	1	Penerapan sistem meritokrasi dalam pengelolaan dan pendayagunaan ASN

TUJUAN		SASARAN		STRATEGI	
		3	Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	1	Penguatan tata kelola karsipan
				2	Penguatan literasi masyarakat
		4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	1	Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah
				2	Peningkatan kualitas penelitian dan inovasi daerah
				3	Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah
				4	Mengelola dan mengoptimalkan aset fisik dan tak berwujud milik daerah secara produktif.
				5	Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah melalui Pengembangan Sumber daya alam dan infrastruktur serta Ekonomi Digital
				6	penguatan peran pengawasan internal dan eksternal

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikiran/kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran misi yang selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan sasaran RPJMD. Adapun Strategi dan arah kebijakan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.13
Arah Kebijakan Pembangunan Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
Misi 1. Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan						
Tujuan 1. Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berwawasan lingkungan						
1	Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Penyediaan pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan	Penyediaan pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan	Optimalisasi pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan	Optimalisasi pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan	Pemeliharaan pusat cenderamata dan oleh-oleh khas Sawahlunto yang lengkap dan mudah diakses wisatawan
		Revitalisasi Pasar Sawahlunto melalui kerjasama dengan investor	Revitalisasi Pasar Sawahlunto melalui kerjasama dengan investor	Pengembangan Pasar Sawahlunto melalui kerjasama dengan investor	Optimalisasi pemanfaatan Pasar Sawahlunto	Pemeliharaan Pasar Sawahlunto
		Revitalisasi / pembangunan pasar wisata terintegrasi (RPJMN)	Revitalisasi / pembangunan pasar wisata terintegrasi (RPJMN)	Optimalisasi pasar wisata terintegrasi (RPJMN)	Pemeliharaan pasar wisata terintegrasi (RPJMN)	Pemeliharaan pasar wisata terintegrasi (RPJMN)
		Pendataan dalam rangka Penataan pasar tradisional dan pengoptimalan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan	Penataan pasar tradisional dan pengoptimalan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan	Digitalisai dan transparansi pengelolaan pasar tradisional sebagai pusat perdagangan	Pengembangan konektivitas pasar tradisional dengan sentra produksi	Pemeliharaan pasar tradisional dan pengoptimalan fungsi pasar sebagai pusat perdagangan
		Pendataan pedagang kaki lima dan peningkatan sarana dan prasarana pedagang kaki lima	Penataan pedagang kaki lima dan peningkatan sarana dan prasarana pedagang kaki lima	Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pemanfaatan pedagang kaki lima	Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pemanfaatan pedagang kaki lima	Optimalisasi sarana dan prasarana dalam pemanfaatan pedagang kaki lima
		Pendataan UKM dalam Mendorong pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah	Digitalisasi pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah	Digitalisasi pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah	Digitalisasi pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah	Optimalisasi Digitalisasi pengembangan pasar online dan ekspor produk unggulan daerah
		Penataan kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan	Penataan kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan	Optimalisasi kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan	Pemeliharaan kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan	Pemeliharaan kawasan Rest Area di Kebun Jeruk dan Muaro Kalaban (Kecamatan Silungkang) sebagai kawasan perdagangan
		Operasionalisasi sentra IKM Tenun di Silungkang sebagai pusat pelatihan tenun	Operasionalisasi sentra IKM Tenun di Silungkang sebagai pusat pelatihan tenun	Operasionalisasi sentra IKM Tenun di Silungkang sebagai pusat pelatihan tenun	Operasionalisasi sentra IKM Tenun di Silungkang sebagai pusat pelatihan tenun	Operasionalisasi sentra IKM Tenun di Silungkang sebagai pusat pelatihan tenun
		Optimalisasi fungsi UPTD tekstil di Muaro Kalaban	Optimalisasi fungsi UPTD tekstil di Muaro Kalaban	Optimalisasi fungsi UPTD tekstil di Muaro Kalaban	Pengembangan dan Digitalisasi UPTD tekstil di Muaro Kalaban	Pengembangan dan Digitalisasi UPTD tekstil di Muaro Kalaban
		Pendataan IKM dalam rangka membangkitkan daya saing ekonomi	Meningkatkan kapasitas produksi dan SDM IKM untuk meningkatkan daya saing ekonomi	Meningkatkan kapasitas produksi dan SDM IKM untuk meningkatkan daya saing ekonomi	Membangkitkan daya saing ekonomi melalui dukungan dan fasilitasi kepada industri kecil dan menengah	Membangkitkan daya saing ekonomi melalui dukungan dan fasilitasi kepada industri kecil dan menengah
		Operasionalisasi sentra IKM pengolahan	Operasionalisasi sentra IKM pengolahan	Operasionalisasi sentra IKM pengolahan	Operasionalisasi sentra IKM pengolahan	Operasionalisasi sentra IKM pengolahan
		Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform	Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform	Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform	Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform	Pembinaan terhadap IKM unggulan dapat memiliki akses pasar pada e-commerce platform
		Pendataan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi	Pengembangan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi	Pengembangan klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi	Digitalisasi klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi	Optimalisasi Digitalisasi klaster industri, kemitraan dan pemanfaatan teknologi
		Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program Kopdes Merah Putih.
		Peningkatan kapasitas pelaku usaha koperasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Peningkatan kapasitas pelaku usaha koperasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Peningkatan kapasitas pelaku usaha koperasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Peningkatan kapasitas pelaku usaha koperasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis	Peningkatan kapasitas pelaku usaha koperasi melalui pelatihan dan bimbingan teknis

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi	Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi	Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi	Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi	Peningkatan kemampuan wirausaha masyarakat melalui Koperasi
		Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan	Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan	Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan	Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan	Pengembangan Koperasi Merah Putih yang fokus pada sektor produksi/jasa potensial di masing-masing desa/kelurahan
		Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola.	Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola.	Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola.	Pembinaan penguatan kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola.	optimalisasi kelembagaan koperasi, termasuk penyusunan anggaran dasar, manajemen, dan tata kelola.
2	Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja	Pendataan Aset Daerah yang produktif	Optimalisasi Aset Daerah melalui Skema Investasi BUMD	Optimalisasi Aset Daerah melalui Skema Investasi BUMD	Optimalisasi Aset Daerah melalui Skema Investasi BUMD	Optimalisasi Aset Daerah melalui Skema Investasi BUMD
		Melakukan pemutakhiran data potensi investasi daerah secara berkala	Melakukan pemutakhiran data potensi investasi daerah secara berkala	Menyusun Peta Potensi Investasi (PIR) berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem nasional (Nasional Single Window For Investment (NSWI)/Sistem OSS).	Menyusun Peta Potensi Investasi (PIR) berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem nasional (Nasional Single Window For Investment (NSWI)/Sistem OSS).	Menyusun Peta Potensi Investasi (PIR) berbasis digital yang terintegrasi dengan sistem nasional (Nasional Single Window For Investment (NSWI)/Sistem OSS).
		Menetapkan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah.	optimalisasi kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah.	optimalisasi kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah.	optimalisasi kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah.	optimalisasi kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah.
		Fasilitasi percepatan pengelolaan perizinan	Peningkatan Efisiensi dan Kemudahan Perizinan	Peningkatan Efisiensi dan Kemudahan Perizinan	Peningkatan Efisiensi dan Kemudahan Perizinan	Peningkatan Efisiensi dan Kemudahan Perizinan
		Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi investasi untuk menarik investor	Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi investasi untuk menarik investor	Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi investasi untuk menarik investor	Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi investasi untuk menarik investor	Meningkatkan transparansi dan ketersediaan informasi investasi untuk menarik investor
		Mendorong Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif.	Mendorong Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif.	Mendorong Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif.	Mendorong Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif.	Mendorong Kemitraan Strategis antara Perusahaan Daerah dan Investor dalam rangka pengembangan sektor-sektor potensial seperti pariwisata, energi terbarukan, pertambangan ramah lingkungan, dan ekonomi kreatif.
		Menetapkan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah.	optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah.	optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah.	optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah.	optimalisasi pelaksanaan kebijakan pemberian insentif, kemudahan, dan fasilitas penanaman modal sesuai potensi unggulan daerah.
		Melaksanakan evaluasi berkala untuk mengukur dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan evaluasi berkala untuk mengukur dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan evaluasi berkala untuk mengukur dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan evaluasi berkala untuk mengukur dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat	Meningkatkan evaluasi berkala untuk mengukur dampak investasi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan PAD, dan kesejahteraan masyarakat
		Memperkuat kapasitas lembaga daerah (DPMPTSP) dalam pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi potensi daerah	Meningkatkan kapasitas lembaga daerah (DPMPTSP) dalam pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi potensi daerah	Meningkatkan kapasitas lembaga daerah (DPMPTSP) dalam pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi potensi daerah	Meningkatkan kapasitas lembaga daerah (DPMPTSP) dalam pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi potensi daerah	Meningkatkan kapasitas lembaga daerah (DPMPTSP) dalam pelayanan perizinan, fasilitasi investasi, dan promosi potensi daerah
		Menyusun strategi promosi investasi daerah yang fokus pada sektor unggulan sesuai potensi lokal	optimalisasi strategi promosi investasi daerah yang fokus pada sektor unggulan sesuai potensi lokal	optimalisasi strategi promosi investasi daerah yang fokus pada sektor unggulan sesuai potensi lokal	optimalisasi strategi promosi investasi daerah yang fokus pada sektor unggulan sesuai potensi lokal	optimalisasi strategi promosi investasi daerah yang fokus pada sektor unggulan sesuai potensi lokal
		Mengintegrasikan promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta	Mengintegrasikan promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta	Mengintegrasikan promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta	Mengintegrasikan promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta	Mengintegrasikan promosi peluang investasi Kota Sawahlunto dengan kemitraan dengan perusahaan daerah dan swasta

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	Melaksanakan promosi investasi secara langsung melalui pameran, forum bisnis, misi dagang, dan business matching	Mengoptimalkan promosi investasi secara langsung melalui pameran, forum bisnis, misi dagang, dan business matching	Mengoptimalkan promosi investasi secara langsung melalui pameran, forum bisnis, misi dagang, dan business matching	Mengoptimalkan promosi investasi secara langsung melalui pameran, forum bisnis, misi dagang, dan business matching	Mengoptimalkan promosi investasi secara langsung melalui pameran, forum bisnis, misi dagang, dan business matching
	Mendorong koordinasi lintas sektor (BUMD, asosiasi usaha, lembaga pendidikan) untuk mendukung keberhasilan promosi investasi.	Memperkuat koordinasi lintas sektor (BUMD, asosiasi usaha, lembaga pendidikan) untuk mendukung keberhasilan promosi investasi.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor (BUMD, asosiasi usaha, lembaga pendidikan) untuk mendukung keberhasilan promosi investasi.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor (BUMD, asosiasi usaha, lembaga pendidikan) untuk mendukung keberhasilan promosi investasi.	Meningkatkan koordinasi lintas sektor (BUMD, asosiasi usaha, lembaga pendidikan) untuk mendukung keberhasilan promosi investasi.
	Memperkuat teknologi digital untuk promosi (website investasi, media sosial, platform OSS/NSWI).	Optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk promosi (website investasi, media sosial, platform OSS/NSWI).	Mengembangkan sistem informasi investasi daerah yang terintegrasi dengan nasional untuk mempermudah akses calon investor	Optimalisasi penggunaan sistem informasi investasi daerah yang terintegrasi dengan nasional untuk mempermudah akses calon investor	Optimalisasi penggunaan sistem informasi investasi daerah yang terintegrasi dengan nasional untuk mempermudah akses calon investor
	Memperkuat layanan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) agar terintegrasi penuh dengan sistem perizinan pusat dan daerah	Mengoptimalkan layanan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) agar terintegrasi penuh dengan sistem perizinan pusat dan daerah	Mengoptimalkan layanan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) agar terintegrasi penuh dengan sistem perizinan pusat dan daerah	Mengoptimalkan layanan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) agar terintegrasi penuh dengan sistem perizinan pusat dan daerah	Mengoptimalkan layanan OSS-RBA (Online Single Submission – Risk Based Approach) agar terintegrasi penuh dengan sistem perizinan pusat dan daerah
	Penguatan infrastruktur digital untuk mendukung integrasi sistem data penanaman modal dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).	Optimalisasi infrastruktur digital untuk mendukung integrasi sistem data penanaman modal dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).	Optimalisasi infrastruktur digital untuk mendukung integrasi sistem data penanaman modal dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).	Optimalisasi infrastruktur digital untuk mendukung integrasi sistem data penanaman modal dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).	Optimalisasi infrastruktur digital untuk mendukung integrasi sistem data penanaman modal dengan OSS-RBA (Online Single Submission Risk Based Approach).
	penguatan kelembagaan dan basis data ketenagkerjaan (pemetaan angkatan kerja, potensi sektor unggulan)	Optimalisasi kelembagaan dan basis data ketenagkerjaan (pemetaan angkatan kerja, potensi sektor unggulan)	Menyusun dokumen rencana tenaga kerja daerah	optimalisasi pemanfaatan dokumen rencana tenaga kerja daerah	optimalisasi pemanfaatan dokumen rencana tenaga kerja daerah
	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional	Peningkatan kompetensi calon tenaga kerja melalui pelatihan kerja yang relevan dengan kebutuhan dunia industri, dunia usaha, dan pasar kerja lokal maupun nasional
	Menyusun kurikulum pelatihan yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan tren permintaan tenaga kerja	Sosialisasi dan penerapan kurikulum pelatihan yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan tren permintaan tenaga kerja	Evaluasi dan Pengembangan kurikulum pelatihan yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan tren permintaan tenaga kerja	Evaluasi dan Pengembangan kurikulum pelatihan yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan tren permintaan tenaga kerja	Evaluasi dan Pengembangan kurikulum pelatihan yang adaptif mengikuti perkembangan teknologi dan tren permintaan tenaga kerja
	Memberikan pelatihan untuk disabilitas	Meningkatkan pelatihan untuk disabilitas	Meningkatkan pelatihan untuk disabilitas	Meningkatkan pelatihan untuk disabilitas	Meningkatkan pelatihan dan bantuan teknis untuk disabilitas
	Pengembangan Balai Latihan Kerja Kota Sawahluhto	Optimalisasi Balai Latihan Kerja Kota Sawahluhto	Peningkatan Balai Latihan Kerja Kota Sawahluhto	Peningkatan Balai Latihan Kerja Kota Sawahluhto	Peningkatan Balai Latihan Kerja Kota Sawahluhto
	peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja
	Penguatan motivasi angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatkan motivasi angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatkan motivasi angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatkan motivasi angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi	Meningkatkan motivasi angkatan kerja untuk mengikuti pelatihan kerja berbasis kompetensi
	Penyebar luasan informasi pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan di BLK secara digitalisasi	Meningkatkan penyebar luasan informasi pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan di BLK secara digitalisasi	Meningkatkan penyebar luasan informasi pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan di BLK secara digitalisasi	Meningkatkan penyebar luasan informasi pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan di BLK secara digitalisasi	Meningkatkan penyebar luasan informasi pelatihan tenaga kerja yang diselenggarakan di BLK secara digitalisasi
	Mengembangkan program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kerja yang layak	Menguatkan program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kerja yang layak	Optimalisasi program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kerja yang layak	Optimalisasi program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kerja yang layak	Optimalisasi program pelatihan kerja khusus bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan akses kerja yang layak

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		Pelaksanaan Job fair	Penguatan pelaksanaan Job fair	optimalisasi pelaksanaan Job fair	optimalisasi pelaksanaan Job fair	optimalisasi pelaksanaan Job fair
		menyediakan bursa kerja online yang terintegrasi dengan sistem nasional ketenagakerjaan	penguatan bursa kerja online yang terintegrasi dengan sistem nasional ketenagakerjaan	optimalisasi bursa kerja online yang terintegrasi dengan sistem nasional ketenagakerjaan	optimalisasi bursa kerja online yang terintegrasi dengan sistem nasional ketenagakerjaan	optimalisasi bursa kerja online yang terintegrasi dengan sistem nasional ketenagakerjaan
		Mendorong skema kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta koperasi dalam mencipatkan lapangan kerja baru	Menguatkan skema kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta koperasi dalam mencipatkan lapangan kerja baru	Meningkatkan skema kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta koperasi dalam mencipatkan lapangan kerja baru	Optimalisasi skema kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta koperasi dalam mencipatkan lapangan kerja baru	Optimalisasi skema kemitraan dengan BUMN, BUMD, swasta koperasi dalam mencipatkan lapangan kerja baru
		Mengadakan kerjasama strategis dengan perusahaan, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan dalam membuka akses kerja	Menguatkan kerjasama strategis dengan perusahaan, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan dalam membuka akses kerja	Meningkatkan kerjasama strategis dengan perusahaan, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan dalam membuka akses kerja	Meningkatkan kerjasama strategis dengan perusahaan, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan dalam membuka akses kerja	Meningkatkan kerjasama strategis dengan perusahaan, asosiasi industri, dan lembaga pendidikan dalam membuka akses kerja
		Mendorong peningkatan jumlah perusahaan yang memiliki PKB sebagai bentuk kemitraan yang sehat antara pekerja dan pengusaha.	Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki PKB sebagai bentuk kemitraan yang sehat antara pekerja dan pengusaha.	Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki PKB sebagai bentuk kemitraan yang sehat antara pekerja dan pengusaha.	Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki PKB sebagai bentuk kemitraan yang sehat antara pekerja dan pengusaha.	Meningkatkan jumlah perusahaan yang memiliki PKB sebagai bentuk kemitraan yang sehat antara pekerja dan pengusaha.
		Memperluas cakupan kepesertaan pekerja formal dan informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.	Memperluas cakupan kepesertaan pekerja formal dan informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.	Memperluas cakupan kepesertaan pekerja formal dan informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.	Memperluas cakupan kepesertaan pekerja formal dan informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.	Memperluas cakupan kepesertaan pekerja formal dan informal dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.
		Mendorong peran lembaga kerja sama bipartit di perusahaan dan tripartite dalam membangun komunikasi sosial yang efektif.	Memperkuat peran lembaga kerja sama bipartit di perusahaan dan tripartite dalam membangun komunikasi sosial yang efektif.	Meningkatkan peran lembaga kerja sama bipartit di perusahaan dan tripartite dalam membangun komunikasi sosial yang efektif.	Meoptimalkan peran lembaga kerja sama bipartit di perusahaan dan tripartite dalam membangun komunikasi sosial yang efektif.	Meoptimalkan peran lembaga kerja sama bipartit di perusahaan dan tripartite dalam membangun komunikasi sosial yang efektif.
3	Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam percepatan pembangunan kota	Membangkitkan kembali semangat gotong royong dalam percepatan pembangunan kota	Meningkatkan semangat gotong royong untuk percepatan pembangunan kota	Meningkatkan semangat gotong royong untuk percepatan pembangunan kota	Mengembangkan semangat gotong royong untuk percepatan pembangunan kota
		Memberikan pelatihan kerja ke desa/kelurahan dalam menciptakan enterpreneur muda	Memberikan pelatihan kerja ke desa/kelurahan dalam menciptakan enterpreneur muda	Memberikan pelatihan kerja ke desa/kelurahan dalam menciptakan enterpreneur muda	Memberikan pelatihan kerja ke desa/kelurahan dalam menciptakan enterpreneur muda	Memberikan pelatihan kerja ke desa/kelurahan dalam menciptakan enterpreneur muda
		Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Meningkatkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Meoptimalkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Meoptimalkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Meoptimalkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan
		mendorong kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes dengan pemanfaatan potensi desa melalui berbagai usaha	menguatkan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes dengan pemanfaatan potensi desa melalui berbagai usaha	meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes dengan pemanfaatan potensi desa melalui berbagai usaha	meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes dengan pemanfaatan potensi desa melalui berbagai usaha	meningkatkan kemandirian ekonomi desa melalui BUMDes dengan pemanfaatan potensi desa melalui berbagai usaha
		Pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Penguatan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa
		identifikasi menyeluruh terhadap potensi ekonomi dan sumber daya alam yang dimiliki desa	Kembangkan inovasi yang berbasis pada potensi dan keunikan sumber daya lokal, seperti melalui konsep "one village one product".	Kembangkan inovasi yang berbasis pada potensi dan keunikan sumber daya lokal, seperti melalui konsep "one village one product".	optimalisasi untuk "one village one product".	optimalisasi untuk "one village one product".
		Partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan produk untuk membangun ekonomi daerahnya sendiri.	meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan produk untuk membangun ekonomi daerahnya sendiri.	meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan produk untuk membangun ekonomi daerahnya sendiri.	meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan produk untuk membangun ekonomi daerahnya sendiri.	optimalisasi partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan produk untuk membangun ekonomi daerahnya sendiri.
4	Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian	Pemetaan agroindustri skala mikro yang cocok di Kota Sawahlunto: pengolahan pangan, produk olahan hortikultura, pertanian dan	Fasilitasi pengembangan agroindustri skala mikro yang cocok di Kota Sawahlunto: pengolahan pangan, produk olahan hortikultura, pertanian dan perkebunan	Fasilitasi pengembangan agroindustri skala mikro yang cocok di Kota Sawahlunto: pengolahan pangan, produk olahan hortikultura, pertanian	Fasilitasi pengembangan dan peningkatan agroindustri skala mikro yang cocok di Kota Sawahlunto: pengolahan pangan,	Fasilitasi pengembangan dan peningkatan agroindustri skala mikro yang cocok di Kota Sawahlunto: pengolahan pangan, produk olahan

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
dan perikanan	perkebunan		dan perkebunan	produk olahan hortikultura, pertanian dan perkebunan	hortikultura, pertanian dan perkebunan
	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.	Peningkatan ketahanan keluarga dan lingkungan pendukung berbasis kearifan lokal.
	Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah	Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah	Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah	Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah	Diversifikasi produk pangan lokal bernilai tambah
	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.	Optimalisasi Lumbung Pangan Masyarakat dan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
	Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan	Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan	Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan	Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan	Penguatan jejaring antarwilayah dan kerja sama antarprovinsi dalam perdagangan pangan
	Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi)	Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi)	Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi)	Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi)	Pemantauan fluktuasi harga komoditi pangan (inflasi)
	Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi	Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi	Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi	Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi	Penetapan daerah kawasan komoditi khusus bernilai ekonomi tinggi
	Pemetaan komoditi pertanian unggulan daerah	Pemetaan komoditi pertanian unggulan daerah	optimalisasi terhadap komoditi pertanian unggulan daerah	optimalisasi terhadap komoditi pertanian unggulan daerah	optimalisasi terhadap komoditi pertanian unggulan daerah
	Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto	Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto	Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto	Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto	Peningkatan varietas tanaman dan bibit di Kebun Buah Kandi yang mencirikan kekhasan di Kota Sawahlunto
	Peningkatan sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata	Peningkatan sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata	Peningkatan sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata	Peningkatan sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata	Peningkatan sarana dan prasarana Kebun Buah Kandi sebagai destinasi wisata dan eduwisata
	Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto	Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto	Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto	Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto	Peremajaan kembali tanaman perkebunan dan hortikultura terutama tanaman lokal di Kota Sawahlunto
	Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi	Pendampingan penyusunan RDKK dan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi
	Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.	Peningkatan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis.
	Pengelolaan penggunaan brigade Alsintan	Meningkatkan pengelolaan penggunaan brigade Alsintan	Meningkatkan pengelolaan penggunaan brigade Alsintan	optimalisasi pengelolaan penggunaan brigade Alsintan	optimalisasi pengelolaan penggunaan brigade Alsintan
	Pengadaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi	Pengadaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi	Pengadaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi	Optimalisasi penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi	Optimalisasi penggunaan Perangkat Uji Tanah Sawah (PUTS), Perangkat Uji Tanah Kering (PUTK), fasilitasi saprodi
	Pemetaan kesesuaian lahan berdasarkan potensi dan kesesuaiannya untuk ditanami tanaman tertentu	Pemetaan kesesuaian lahan berdasarkan potensi dan kesesuaiannya untuk ditanami tanaman tertentu	optimalisasi penggunaan lahan sesuai potensi dan ditanami tanaman	optimalisasi penggunaan lahan sesuai potensi dan ditanami tanaman	optimalisasi penggunaan lahan sesuai potensi dan ditanami tanaman
	Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin	Peningkatan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin	Optimalisasi penggunaan sarana dan prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin
	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskeswan	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskeswan	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskeswan	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskeswan	Pembangunan/ Rehabilitasi Puskeswan

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging	Operasionalisasi Rumah Potong Hewan (RPH) Air Dingin sebagai standar RPH bersertifikasi halal dalam rangka mendukung sertifikasi halal produk-produk olahan daging
		peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan,	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan,	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan,	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan,	peningkatan kualitas pelayanan kesehatan hewan,
		Pencegahan dan vaksinasi hewan liar	Pencegahan dan vaksinasi hewan liar	Pencegahan dan vaksinasi hewan liar	Pencegahan dan vaksinasi hewan liar	Pencegahan dan vaksinasi hewan liar
		Pengendalian penyakit hewan	Pengendalian penyakit hewan	Pengendalian penyakit hewan	Pengendalian penyakit hewan	Pengendalian penyakit hewan
		Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi	Pembangunan / Rehabilitasi Jaringan irigasi
		Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani	Pembangunan / Rehabilitasi Jalan Usaha Tani
		Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian	Peningkatan kapasitas Penyuluh Pertanian
		Peningkatan budidaya perikanan	Peningkatan budidaya perikanan	Peningkatan budidaya perikanan	Peningkatan budidaya perikanan	Peningkatan budidaya perikanan
		sosialisasi gemar makan ikan kepada masyarakat	sosialisasi gemar makan ikan kepada masyarakat	meningkatkan kemauan masyarakat untuk gemar makan ikan	meningkatkan kemauan masyarakat untuk gemar makan ikan	meningkatkan kemauan masyarakat untuk gemar makan ikan
Misi 2. Mewujudkan Smart Governance berbasis IT						
Tujuan 2. Terwujudnya smart governance berbasis IT						
1	Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Meningkatkan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah	Meningkatkan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah	Meningkatkan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah	Meningkatkan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah	Meningkatkan penyediaan akses internet gratis bagi masyarakat di ruang publik seperti taman, objek wisata, terminal, dan tempat ibadah
		Meningkatkan layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto	Meningkatkan layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto	Meningkatkan layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto	Meningkatkan layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto	Meningkatkan layanan perluasan infrastruktur komunikasi untuk mengatasi daerah blank spot di Sawahlunto
		Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat	Pemanfaatan TIK untuk meningkatkan partisipasi masyarakat
		Membangun daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower	Membangun daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower	Membangun daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower	Membangun daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower	Membangun daerah sulit signal harus diperbaiki kualitas signal nya atau dengan pengadaan Tower
		pembangunan dan pengelolaan *comand center* (pusat data pemerintahan daerah)	pembangunan dan pengelolaan *comand center* (pusat data pemerintahan daerah)	pembangunan dan pengelolaan *comand center* (pusat data pemerintahan daerah)	pembangunan dan pengelolaan *comand center* (pusat data pemerintahan daerah)	pembangunan dan pengelolaan *comand center* (pusat data pemerintahan daerah)
		Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung	Membangun dan meningkatkan infrastruktur TIK seperti jaringan internet, fasilitas telekomunikasi, dan perangkat keras pendukung
		Mendukung pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan	Mendukung pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan	Mendukung pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan	Mendukung pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan	Mendukung pengembangan industri digital, startup, dan e-commerce melalui berbagai program dan layanan
		Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia
		Menyediakan informasi publik melalui portal online, media sosial, dan	Menyediakan informasi publik melalui portal online, media sosial, dan saluran komunikasi	Menyediakan informasi publik melalui portal online, media sosial, dan	Menyediakan informasi publik melalui portal online, media sosial,	Menyediakan informasi publik melalui portal online, media sosial, dan

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		saluran komunikasi lainnya	lainnya	saluran komunikasi lainnya	dan saluran komunikasi lainnya	saluran komunikasi lainnya
		Membangun infrastruktur digital yang berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC	Membangun infrastruktur digital yang berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC	Membangun infrastruktur digital yang berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC	Membangun infrastruktur digital yang berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC	Membangun infrastruktur digital yang berkualitas dan berkelanjutan setiap ASN harus dilengkapi dengan PC
		Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Mengoptimalkan penerapan dan pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
		Menjamin keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai.	Menjamin keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai.	Menjamin keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai.	Menjamin keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai.	Menjamin keamanan informasi dan pembatasan akses bagi pengguna internet di ruang publik khususnya terhadap konten-konten yang tidak sesuai.
		Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber dan IT.	Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber dan IT.	Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber dan IT.	Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber dan IT.	Melatih dan mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang keamanan siber dan IT.
		Pengamanan infrastruktur TIK	Pengamanan infrastruktur TIK	Pengamanan infrastruktur TIK	Pengamanan infrastruktur TIK	Pengamanan infrastruktur TIK
		Mengoptimalkan Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan Command Centre, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan Cyber Pemerintahan	Mengoptimalkan Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan Command Centre, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan Cyber Pemerintahan	Mengoptimalkan Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan Command Centre, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan Cyber Pemerintahan	Mengoptimalkan Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan Command Centre, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan Cyber Pemerintahan	Mengoptimalkan Edukasi Keamanan SPBE, Satu Server dan pengadaan Command Centre, Layanan Kesehata Digital yang Optimal Keamanan Cyber Pemerintahan
		Mengoptimalkan pengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.	Mengoptimalkan pengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.	Mengoptimalkan pengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.	Mengoptimalkan pengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.	Mengoptimalkan pengintegrasian data, pelaporan dan penilaian atas kinerja aparatur pelaksana yang akuntabel.
		meningkatkan koordinasi dalam Forum data Penguatan fungsi wali data	meningkatkan koordinasi dalam Forum data Penguatan fungsi wali data	meningkatkan koordinasi dalam Forum data Penguatan fungsi wali data	meningkatkan koordinasi dalam Forum data Penguatan fungsi wali data	meningkatkan koordinasi dalam Forum data Penguatan fungsi wali data
2	Terwujudnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien	meningkatkan kualitas dan sarana parasarana pelayanan administrasi kependudukan	meningkatkan kualitas dan sarana parasarana pelayanan administrasi kependudukan	meningkatkan kualitas dan sarana parasarana pelayanan administrasi kependudukan	meningkatkan kualitas dan sarana parasarana pelayanan administrasi kependudukan	meningkatkan kualitas dan sarana parasarana pelayanan administrasi kependudukan
		Meningkatkan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan	Meningkatakan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan	Meningkatakan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan	Meningkatakan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan	Meningkatakan kualitas dan ketersediaan data dan informasi kependudukan
		Pengembangan Sistem dan Inovasi Pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.	Pengembangan Sistem dan Inovasi Pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.	Pengembangan Sistem dan Inovasi Pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.	Pengembangan Sistem dan Inovasi Pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.	Pengembangan Sistem dan Inovasi Pelayanan untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani.
		memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK, serta menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah	memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK, serta menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah	memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK, serta menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah	memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK, serta menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah	memastikan keakuratan data dan ketunggalan NIK, serta menyediakan data yang akurat dan mutakhir untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional dan daerah
Misi 3. Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat						
Tujuan 3. Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan						
1	Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Penyusunan Dokumen RPPLH	Penyusunan Dokumen KLHS Perubahan RPJMD		Penyusunan Dokumen KLHS Dokumen RPJMD	
		Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup	Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan hidup	ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan hidup	ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan hidup	ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan hidup	ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan hidup
	Sertifikasi labor lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas tenaga Labor lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas tenaga Labor lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas tenaga Labor lingkungan hidup	Peningkatan kapasitas tenaga Labor lingkungan hidup
	Peningkatan sarana dan prasarana labor lingkungan hidup	Peningkatan sarana dan prasarana labor lingkungan hidup	Peningkatan sarana dan prasarana labor lingkungan hidup	Peningkatan sarana dan prasarana labor lingkungan hidup	Peningkatan sarana dan prasarana labor lingkungan hidup
		peningkatan pendapatan labor lingkungan hidup	peningkatan pendapatan labor lingkungan hidup	peningkatan pendapatan labor lingkungan hidup	peningkatan pendapatan labor lingkungan hidup
	meningkatkan ruang terbuka hijau	meningkatkan ruang terbuka hijau	meningkatkan ruang terbuka hijau	meningkatkan ruang terbuka hijau	meningkatkan ruang terbuka hijau
	meningkatkan kebersihan/kerapian/keindahan taman-taman kota	meningkatkan kebersihan/kerapian/keindahan taman-taman kota	meningkatkan kebersihan/kerapian/keindahan taman-taman kota	meningkatkan kebersihan/kerapian/keindahan taman-taman kota	meningkatkan kebersihan/kerapian/keindahan taman-taman kota
	Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan limbah B3	Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan limbah B3	Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan limbah B3	Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan limbah B3	Meningkatkan pengawasan dan pengelolaan limbah B3
	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
	pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap keberadaan MHA,	pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap keberadaan MHA,	pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap keberadaan MHA,	pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap keberadaan MHA,	pembinaan dan peningkatan kapasitas terhadap keberadaan MHA,
	pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan lingkungan hidup	pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan lingkungan hidup	pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan lingkungan hidup	pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan lingkungan hidup	pembinaan dan peningkatan kapasitas penyuluhan lingkungan hidup
	pemenuhan indikator-indikator penilaian lingkungan hidup	pemenuhan indikator-indikator penilaian lingkungan hidup	pemenuhan indikator-indikator penilaian lingkungan hidup	pemenuhan indikator-indikator penilaian lingkungan hidup	pemenuhan indikator-indikator penilaian lingkungan hidup
	penyelesaian permasalahan2 lingkungan hidup	penyelesaian permasalahan2 lingkungan hidup	penyelesaian permasalahan2 lingkungan hidup	penyelesaian permasalahan2 lingkungan hidup	penyelesaian permasalahan2 lingkungan hidup
	meningkatkan pengelolaan sampah dari rumah tangga	meningkatkan pengelolaan sampah dari rumah tangga	meningkatkan pengelolaan sampah dari rumah tangga	meningkatkan pengelolaan sampah dari rumah tangga	meningkatkan pengelolaan sampah dari rumah tangga
			pembangunan dan rehabilitasi TPA yang ramah lingkungan	pembangunan dan rehabilitasi TPA yang ramah lingkungan	
	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan	Meningkatkan sarana dan prasarana persampahan
	Pengembangan TPS3R, Bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Pengembangan TPS3R, Bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Pengembangan TPS3R, Bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Pengembangan TPS3R, Bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Pengembangan TPS3R, Bank sampah dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat
	Meningkatkan kapasitas dan edukasi terkait PRK melalui pelatihan intensif untuk memperkuat pemahaman, perencanaan, penegakan, dan pemantauan program.	Meningkatkan kapasitas dan edukasi terkait PRK melalui pelatihan intensif untuk memperkuat pemahaman, perencanaan, penegakan, dan pemantauan program.	Meningkatkan kapasitas dan edukasi terkait PRK melalui pelatihan intensif untuk memperkuat pemahaman, perencanaan, penegakan, dan pemantauan program.	Meningkatkan kapasitas dan edukasi terkait PRK melalui pelatihan intensif untuk memperkuat pemahaman, perencanaan, penegakan, dan pemantauan program.	Meningkatkan kapasitas dan edukasi terkait PRK melalui pelatihan intensif untuk memperkuat pemahaman, perencanaan, penegakan, dan pemantauan program.
	Membentuk kelompok kerja PRK melalui keputusan Walikota yang mengintegrasikan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, sektor swasta dan komunitas lokal sehingga terciptanya struktur tata Kelola yang terkoordinasi.	Membentuk kelompok kerja PRK melalui keputusan Walikota yang mengintegrasikan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, sektor swasta dan komunitas lokal sehingga terciptanya struktur tata Kelola yang terkoordinasi.	Membentuk kelompok kerja PRK melalui keputusan Walikota yang mengintegrasikan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, sektor swasta dan komunitas lokal sehingga terciptanya struktur tata Kelola yang terkoordinasi.	Membentuk kelompok kerja PRK melalui keputusan Walikota yang mengintegrasikan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, sektor swasta dan komunitas lokal sehingga terciptanya struktur tata Kelola yang terkoordinasi.	Membentuk kelompok kerja PRK melalui keputusan Walikota yang mengintegrasikan kolaborasi antara pemerintah kota, provinsi, sektor swasta dan komunitas lokal sehingga terciptanya struktur tata Kelola yang terkoordinasi.
	Menfasilitasi percepatan penyelesaian konflik lahan, khususnya agar lahan dapat dikelola secara optimal untuk	Menfasilitasi percepatan penyelesaian konflik lahan, khususnya agar lahan dapat dikelola secara optimal untuk pengembangan potensi	Menfasilitasi percepatan penyelesaian konflik lahan, khususnya agar lahan dapat dikelola secara optimal untuk	Menfasilitasi percepatan penyelesaian konflik lahan, khususnya agar lahan dapat dikelola	Menfasilitasi percepatan penyelesaian konflik lahan, khususnya agar lahan dapat dikelola secara optimal untuk

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		pengembangan potensi wisata.	wisata.	pengembangan potensi wisata.	secara optimal untuk pengembangan potensi wisata.	pengembangan potensi wisata.
		Membentuk forum CSR dan mekanisme kemitraan publik, swasta serta pengembangan skema insentif fiskal dan non fiskal sebagai sarana pendanaan inovatif untuk inisiatif PRK.	Membentuk forum CSR dan mekanisme kemitraan publik, swasta serta pengembangan skema insentif fiskal dan non fiskal sebagai sarana pendanaan inovatif untuk inisiatif PRK.	Membentuk forum CSR dan mekanisme kemitraan publik, swasta serta pengembangan skema insentif fiskal dan non fiskal sebagai sarana pendanaan inovatif untuk inisiatif PRK.	Membentuk forum CSR dan mekanisme kemitraan publik, swasta serta pengembangan skema insentif fiskal dan non fiskal sebagai sarana pendanaan inovatif untuk inisiatif PRK.	Membentuk forum CSR dan mekanisme kemitraan publik, swasta serta pengembangan skema insentif fiskal dan non fiskal sebagai sarana pendanaan inovatif untuk inisiatif PRK.
		Mengimplementasikan proyek percontohan di AFOLU (berbasi lahan) dan ekonomi sirkular untuk menopang pariwisata sebagai percontohan Kawasan tambang yang berkelanjutan.	Mengimplementasikan proyek percontohan di AFOLU (berbasi lahan) dan ekonomi sirkular untuk menopang pariwisata sebagai percontohan Kawasan tambang yang berkelanjutan.	Mengimplementasikan proyek percontohan di AFOLU (berbasi lahan) dan ekonomi sirkular untuk menopang pariwisata sebagai percontohan Kawasan tambang yang berkelanjutan.	Mengimplementasikan proyek percontohan di AFOLU (berbasi lahan) dan ekonomi sirkular untuk menopang pariwisata sebagai percontohan Kawasan tambang yang berkelanjutan.	Mengimplementasikan proyek percontohan di AFOLU (berbasi lahan) dan ekonomi sirkular untuk menopang pariwisata sebagai percontohan Kawasan tambang yang berkelanjutan.
		Mendorong Masyarakat untuk menggunakan kendaran Listrik atau berbahan bakar rendah emisi.	Mendorong Masyarakat untuk menggunakan kendaran Listrik atau berbahan bakar rendah emisi.	Mendorong Masyarakat untuk menggunakan kendaran Listrik atau berbahan bakar rendah emisi.	Mendorong Masyarakat untuk menggunakan kendaran Listrik atau berbahan bakar rendah emisi.	Mendorong Masyarakat untuk menggunakan kendaran Listrik atau berbahan bakar rendah emisi.
		Mengembangkan pariwisata hijau dan inklusif melalui peningkatan destinasi wisata penerapan konsep Zero Waste Tourism, Promosi Agroedu Wisata dan Integrasi Paket Wisata yang meningkatkan daya tarik serta aksesbilitas antar objek wisata.	Mengembangkan pariwisata hijau dan inklusif melalui peningkatan destinasi wisata penerapan konsep Zero Waste Tourism, Promosi Agroedu Wisata dan Integrasi Paket Wisata yang meningkatkan daya tarik serta aksesbilitas antar objek wisata.	Mengembangkan pariwisata hijau dan inklusif melalui peningkatan destinasi wisata penerapan konsep Zero Waste Tourism, Promosi Agroedu Wisata dan Integrasi Paket Wisata yang meningkatkan daya tarik serta aksesbilitas antar objek wisata.	Mengembangkan pariwisata hijau dan inklusif melalui peningkatan destinasi wisata penerapan konsep Zero Waste Tourism, Promosi Agroedu Wisata dan Integrasi Paket Wisata yang meningkatkan daya tarik serta aksesbilitas antar objek wisata.	Mengembangkan pariwisata hijau dan inklusif melalui peningkatan destinasi wisata penerapan konsep Zero Waste Tourism, Promosi Agroedu Wisata dan Integrasi Paket Wisata yang meningkatkan daya tarik serta aksesbilitas antar objek wisata.
		Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan	Meningkatkan kesiapsiagaan daerah dalam menghadapi bencana yang meliputi pemetaan risiko bencana, perencanaan penanggulangan bencana, peningkatan sistem peringatan dini dan infrastruktur kesiapsiagaan
		Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.	Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.	Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.	Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.	Memperkuat tata kelola kesiapsiagaan terhadap bencana yang meliputi kemampuan tanggap darurat antar berbagai pihak, kepedulian dan kesiapsiagaan masyarakat, sinkronisasi dokumen perencanaan daerah (RTRW, RPJPD, dan RPJMD) dengan Rencana Penanggulangan Bencana, serta sinkronisasi data kebencanaan daerah dengan data nasional (BNPB) dan K/L terkait.
		penyusunan dokumen kebencanaan dan pengadaan sarana prasarana keselamatan	penyusunan dokumen kebencanaan dan pengadaan sarana prasarana keselamatan	penyusunan dokumen kebencanaan dan pengadaan sarana prasarana keselamatan	penyusunan dokumen kebencanaan dan pengadaan sarana prasarana keselamatan	penyusunan dokumen kebencanaan dan pengadaan sarana prasarana keselamatan
		pembangunan gedung PUSDALOPS	pembangunan gedung PUSDALOPS	Optimalisasi penggunaan gedung PUSDALOPS	Optimalisasi penggunaan gedung PUSDALOPS	Optimalisasi penggunaan gedung PUSDALOPS
2	Meningkatnya Aksesbilitas/Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,	Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,	Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,	Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,	Peningkatan potensi-potensi sumber daya air : Pembangunan Embung Lurah Bomben Desa Kolok Nan Tuo Kota Sawahlunto,

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir	Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir	Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir	Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir	Normalisasi/ Restorasi Sungai Kali Hitam Kota Sawahlunto untuk mencegah terjadinya banjir
	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)
	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi layak
	Peningkatan sistem drainase perkotaan	Peningkatan sistem drainase perkotaan	Peningkatan sistem drainase perkotaan	Peningkatan sistem drainase perkotaan	Peningkatan sistem drainase perkotaan
	Peningkatan penataan gedung-gedung perkantoran	Peningkatan penataan gedung-gedung perkantoran	Peningkatan penataan gedung-gedung perkantoran	Peningkatan penataan gedung-gedung perkantoran	Peningkatan penataan gedung-gedung perkantoran
	Peningkatan kualitas Jalan Kota	Peningkatan kualitas Jalan Kota	Peningkatan kualitas Jalan Kota	Peningkatan kualitas Jalan Kota	Peningkatan kualitas Jalan Kota
	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua
	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah dengan Kab. Solok dengan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Talawi - Rawang (Segmen SMK 1 Talawi - Batas Kab. Solok)	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah dengan Kab. Solok dengan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Talawi - Rawang (Segmen SMK 1 Talawi - Batas Kab. Solok)	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah dengan Kab. Solok dengan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Talawi - Rawang (Segmen SMK 1 Talawi - Batas Kab. Solok)	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah dengan Kab. Solok dengan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Talawi - Rawang (Segmen SMK 1 Talawi - Batas Kab. Solok)	Meningkatnya konektivitas dan aksesibilitas untuk pengembangan wilayah dengan Kab. Solok dengan Peningkatan Jalan Ruas Jalan Talawi - Rawang (Segmen SMK 1 Talawi - Batas Kab. Solok)
	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan Kab. Tanah Datar untuk mendukung pariwisata dengan 1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Segmen Simp. Bank Mandiri - Batas Kab, Tanah Datar)	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan Kab. Tanah Datar untuk mendukung pariwisata dengan 1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Segmen Simp. Bank Mandiri - Batas Kab, Tanah Datar)	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan Kab. Tanah Datar untuk mendukung pariwisata dengan 1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Segmen Simp. Bank Mandiri - Batas Kab, Tanah Datar)	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan Kab. Tanah Datar untuk mendukung pariwisata dengan 1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Segmen Simp. Bank Mandiri - Batas Kab, Tanah Datar)	Meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas wilayah dengan Kab. Tanah Datar untuk mendukung pariwisata dengan 1. Peningkatan Jalan Ruas Jalan Guguk Cino - Sawahlunto (Segmen Simp. Bank Mandiri - Batas Kab, Tanah Datar)
	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Maping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Maping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Maping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Maping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Maping digitalisasi RTRW
		Normalisasi Batang Lunto	Normalisasi Batang Lunto		
	Optimalisasi Embung Sumpahan	Optimalisasi Embung Sumpahan	Optimalisasai Embung Sumpahan	Optimalisasai Embung Sumpahan	Optimalisasai Embung Sumpahan
		Bendungan Sawah Pampuan		Bendungan sawah patai	
	Optimalisasi jaringan Irigasi	Optimalisasai jaringan Irigasi	Optimalisasai jaringan Irigasi	Optimalisasai jaringan Irigasi	Optimalisasai jaringan Irigasi
	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)
	Optimalisasi SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Optimalisasi SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Optimalisasi SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Optimalisasi SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)	Optimalisasi SPAM Perkotaan Sawahlunto (RPJMN)
	Penyusunan Perencanaan Pembangunan IPLT	Pembangunan IPLT	Pembangunan IPLT	Pemeliharaan IPLT	Pemeliharaan IPLT
	Pembangunan Tankiseptik individu	Pembangunan Tankiseptik individu	Pembangunan Tankiseptik individu	Pembangunan Tankiseptik individu	Pembangunan Tankiseptik individu
	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi aman	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi aman	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi aman	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi aman	Peningkatan akses masyarakat terhadap sanitasi aman
	Peningkatan sistem drainase Perkotaan	Peningkatan sistem drainase Perkotaan	Peningkatan sistem drainase Perkotaan	Peningkatan sistem drainase Perkotaan	Peningkatan sistem drainase Perkotaan
		Peningkatan drainase kawasan SILO	Penataan drainase dari Puncak Polan sampai ke Kota Lama	Penataan drainase dari Puncak Polan sampai ke Kota Lama	
	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah	Pembangunan Gedung Perkantoran Pemerintah

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	Optimalisasi Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Optimalisasi Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Optimalisasi Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Optimalisasi Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Optimalisasi Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan
	Pembangunan Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Pembangunan Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Pembangunan Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Pembangunan Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan	Pembangunan Bangunan, Drainase dan jalan lingkungan
	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban -Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua	Pembangunan jalan Muaro Kalaban - Pondok Kapua
	Guguak bungo simarambang	Guguak bungo simarambang			
	Peningkatan jalan puskesmas Silungkang- sungai cancang silungkang- taratak bancah	Peningkatan jalan puskesmas Silungkang- sungai cancang silungkang- taratak bancah	Peningkatan jalan puskesmas Silungkang- sungai cancang silungkang- taratak bancah	Peningkatan jalan puskesmas Silungkang- sungai cancang silungkang- taratak bancah	Peningkatan jalan puskesmas Silungkang- sungai cancang silungkang- taratak bancah
	Peningkatan jalan muaro kalaban - taratak bancah	Peningkatan jalan muaro kalaban -taratak bancah	Peningkatan jalan muaro kalaban - taratak bancah	Peningkatan jalan muaro kalaban - taratak bancah	Peningkatan jalan muaro kalaban - taratak bancah
	Peningkatan jalan pasar guguak - kelumindai	Peningkatan jalan pasar guguak - kelumindai	Peningkatan jalan pasar guguak - kelumindai	Peningkatan jalan pasar guguak - kelumindai	Peningkatan jalan pasar guguak - kelumindai
			Peningkatan jalan sungai durian medan bapaneh	Peningkatan jalan lubuak pinang - kalimato	Peningkatan Jalan sijantang-tigo tanjung, tigo tanjung - datar mansiang
			Peningkatan jalan simpang kubang - Lunto		
		Peningkatan jalan pasar baru- kelok cendol, simpang sapan - pasar baru	Peningkatan jalan pasar baru- kelok cendol, simpang sapan - pasar baru		
	Pembinaan bagi tenaga jasa kontruksi	Pembinaan bagi tenaga jasa kontruksi	Pembinaan bagi tenaga jasa kontruksi	Pembinaan bagi tenaga jasa kontruksi	Pembinaan bagi tenaga jasa kontruksi
	Penyusunan PERDA RTRW	Penyusunan PERDA RTRW	Penyusunan PERDA RDTR	Penyusunan PERDA RDTR	
	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Maping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Maping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Maping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Maping digitalisasi RTRW	Peningkatan kualitas penataan ruang melalui Maping digitalisasi RTRW
	Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan (RPJMN)	Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan (RPJMN)	Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan (RPJMN)	Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan (RPJMN)	Pembangunan Rumah Murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan Milenial di kawasan perkotaan (RPJMN)
	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama	Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU) di kawasan Kota Lama
	Pembangunan/Rehabilitasi rumah yang korban bencana	Pembangunan/Rehabilitasi rumah yang korban bencana	Pembangunan/Rehabilitasi rumah yang korban bencana	Pembangunan/Rehabilitasi rumah yang korban bencana	Pembangunan/Rehabilitasi rumah yang korban bencana
	Peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai SK Walikota yaitu Kolok mudiak dan kolok nan tuo	Peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai SK Walikota yaitu Kolok mudiak dan kolok nan tuo	Peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai SK Walikota yaitu Kolok mudiak dan kolok nan tuo	Peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai SK Walikota yaitu Kolok mudiak dan kolok nan tuo	Peningkatan kualitas kawasan kumuh sesuai SK Walikota yaitu Kolok mudiak dan kolok nan tuo
	Peningkatan kualitas kawasan rawan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan rawan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan rawan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan rawan kumuh	Peningkatan kualitas kawasan rawan kumuh
	Koordinasi penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah	Koordinasi penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah	Koordinasi penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah	Koordinasi penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah	Koordinasi penyerahan PSU perumahan ke pemerintah daerah
	Penerbitan perwako PSU Perumahan	Penerbitan perwako PSU Perumahan	Penerbitan perwako PSU Perumahan	Penerbitan perwako PSU Perumahan	Penerbitan perwako PSU Perumahan
	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitasi Perumahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitasi Perumahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitasi Perumahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitasi Perumahan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana fasilitasi Perumahan
	Penyelesaiaan status tanah pemerintah,	Penyelesaiaan status tanah pemerintah,	Penyelesaiaan status tanah pemerintah,	Penyelesaiaan status tanah pemerintah,	Penyelesaiaan status tanah pemerintah,
	pembentukan tim satuan tugas penyelesaian konflik agraria daerah	pembentukan tim satuan tugas penyelesaian konflik agraria daerah			

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		peningkatan koordinasi tim satuan tugas dalam penyelesaian konflik agraria daerah	peningkatan koordinasi tim satuan tugas dalam penyelesaian konflik agraria daerah	peningkatan koordinasi tim satuan tugas dalam penyelesaian konflik agraria daerah	peningkatan koordinasi tim satuan tugas dalam penyelesaian konflik agraria daerah	peningkatan koordinasi tim satuan tugas dalam penyelesaian konflik agraria daerah
		inventarisasi dan identifikasi status tanah kota sawahlunto	inventarisasi dan identifikasi status tanah kota sawahlunto	inventarisasi dan identifikasi status tanah kota sawahlunto	inventarisasi dan identifikasi status tanah kota sawahlunto	inventarisasi dan identifikasi status tanah kota sawahlunto
		inventarisasi dan identifikasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	inventarisasi dan identifikasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	inventarisasi dan identifikasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	inventarisasi dan identifikasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente	inventarisasi dan identifikasi tanah kelebihan maksimum dan tanah absente
		Penutasan sertifikat tanah 393 hektar	Penutasan sertifikat tanah 393 hektar	Penutasan sertifikat tanah 393 hektar	Penutasan sertifikat tanah 393 hektar	Penutasan sertifikat tanah 393 hektar
		Pengadaan penerangan Jalan umum	Peningkatan penerangan Jalan umum	Pengelolaan penerangan Jalan umum	Pengelolaan penerangan Jalan umum	Pengelolaan penerangan Jalan umum
		Pengadaan Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)	Peningkatan Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)	Peningkatan Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)	Peningkatan Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)	Peningkatan Perlengkapan Jalan (Warning Light, Guard Rail, Cermin Tikungan (Safety Mirror), Rambu Standar, RPPJ (Wisata), Zona Selamat Sekolah (ZOSS), Marka Jalan)
		penerapan standar dan prosedur keselamatan yang lebih ketat untuk lalu lintas dan angkutan jalan.	Meningkatkan penerapan standar dan prosedur keselamatan yang lebih ketat untuk lalu lintas dan angkutan jalan.	Meningkatkan penerapan standar dan prosedur keselamatan yang lebih ketat untuk lalu lintas dan angkutan jalan.	Meningkatkan penerapan standar dan prosedur keselamatan yang lebih ketat untuk lalu lintas dan angkutan jalan.	Meningkatkan penerapan standar dan prosedur keselamatan yang lebih ketat untuk lalu lintas dan angkutan jalan.
		Koordinasi ke KAI dan balai perkeretapian terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran operasional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Koordinasi ke KAI dan balai perkeretapian terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran operasional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Koordinasi ke KAI dan balai perkeretapian terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran operasional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Koordinasi ke KAI dan balai perkeretapian terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran operasional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat	Koordinasi ke KAI dan balai perkeretapian terkait dengan keselamatan, keamanan, kenyamanan, kelancaran operasional, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat
Misi 4. Peningkatan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan						
Tujuan 4. Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis						
1	Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Penguatan koloboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)	Penguatan koloboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)	Meningkatkan koloboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)	Meningkatkan koloboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)	Meningkatkan koloboratif lintas sektor dalam mewujudkan desa BERSINAR (Bersih Narkoba)
		Membina kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan lainnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	Membina kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan lainnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatkan pembinaan kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan lainnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatkan pembinaan kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan lainnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	Meningkatkan pembinaan kerukunan antarsuku, agama, ras, dan golongan lainnya untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
		Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.	Mendorong partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan politik dan sosial untuk menciptakan iklim demokrasi yang sehat.
		Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama	Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama	Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama	Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama	Meningkatkan peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam meningkatkan kerukunan intra antar umat beragama
		Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya	Melaksanakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya	Meningkatkan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya	Meningkatkan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya	Meningkatkan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) dan penyakit masyarakat lainnya

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter	Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter	Meningkatkan Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter	Meningkatkan Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter	Meningkatkan Pemberdayaan remaja dan anak melalui forum generasi muda untuk pencegahan kenakalan remaja dan pembentukan karakter
		Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat	Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat	Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat	Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat	Penguatan koordinasi, kelembagaan, dan peran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan mencegah penyakit masyarakat
		Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial	Menguatkan peran forum-forum strategis daerah: Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dalam memediasi isu-isu sensitif seperti intoleransi, diskriminasi dan konflik sosial
		menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.	menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.	menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.	menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.	menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah guna menciptakan kondisi yang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.
		menjaga keamanan dan ketertiban di ruang publik, serta mencegah terjadinya gangguan ketenteraman yang dapat meresahkan masyarakat	meningkatkan keamanan dan ketertiban di ruang publik, serta mencegah terjadinya gangguan ketenteraman yang dapat meresahkan masyarakat	meningkatkan keamanan dan ketertiban di ruang publik, serta mencegah terjadinya gangguan ketenteraman yang dapat meresahkan masyarakat	meningkatkan keamanan dan ketertiban di ruang publik, serta mencegah terjadinya gangguan ketenteraman yang dapat meresahkan masyarakat	meningkatkan keamanan dan ketertiban di ruang publik, serta mencegah terjadinya gangguan ketenteraman yang dapat meresahkan masyarakat
		memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul.	meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul.	meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul.	meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul.	meningkatkan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan yang mungkin timbul.
		Meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.	Meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.	Meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.	Meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.	Meningkatkan kemampuan dan keahlian petugas pemadam kebakaran serta meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan bahaya kebakaran.
		Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko kebakaran.	Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko kebakaran.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko kebakaran.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko kebakaran.	Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana proteksi kebakaran untuk memastikan kesiapan menghadapi risiko kebakaran.
2	Meningkatnya komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan adat istiadat	Melestarikan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Melestarikan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto
		Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak	Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak	Meningkatkan Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak	Meningkatkan Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak	Meningkatkan Pembinaan untuk pengkaderan ninik mamak
		Menumbuhkembangkan komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif	Menumbuhkembangkan komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif	Menumbuhkembangkan komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif	Menumbuhkembangkan komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif	Menumbuhkembangkan komunitas seni tradisional dan modern melalui pendampingan, pelatihan, dan fasilitasi ruang kreatif
		Mendukung dan memfasilitasi kalender acara budaya seperti festival, pameran seni, pentas kesenian	Mendukung dan memfasilitasi kalender acara budaya seperti festival, pameran seni, pentas kesenian sebagai sarana ekspresi lokal dan	Mendukung dan memfasilitasi kalender acara budaya seperti festival, pameran seni, pentas kesenian	Mendukung dan memfasilitasi kalender acara budaya seperti festival, pameran seni, pentas	Mendukung dan memfasilitasi kalender acara budaya seperti festival, pameran seni, pentas kesenian

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	sebagai sarana ekspresi lokal dan daya tarik wisata	daya tarik wisata	sebagai sarana ekspresi lokal dan daya tarik wisata	kesenian sebagai sarana ekspresi lokal dan daya tarik wisata	sebagai sarana ekspresi lokal dan daya tarik wisata
	Mendorong kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya	Mendorong kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya	Meningkatkan kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya	Meningkatkan kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya	Meningkatkan kemitraan antara seniman, UMKM lokal, dan investor (termasuk BUMN/BUMD) untuk komersialisasi budaya
	Pembentukan kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian	Pembentukan kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian	pengembangan kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian	pengembangan kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian	pengembangan kelompok-kelompok seni yang produktif dengan program yang berkualitas Melahirkan Komunitas yang baru, berkompeten Studi Banding dan Evaluasi yang berkelanjutan sesuai peningkatan kompetensi seni dan mengemas hal yang estetik untuk Kota Sawahlunto dan Pelatihan Kurator Seni, Bimtek Pelatih Kesenian
	Peningkatan kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni.	Peningkatan kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni.	Peningkatan kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni.	Peningkatan kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni.	Peningkatan kualitas seni pertunjukan (teater, musik, tari).Event event berkesinambungan yang menghidupi warga kota, Pasar Seni.
	Terbentuknya rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian	Terbentuknya rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian	meoptimalkan rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian	meoptimalkan rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian	meoptimalkan rumah seni dengan pemenuhan sarana dan prasarana penunjangnya.Kampung Seni Rumah Seni atau pemberdayaan Museum Seni yang lebih aktif dalam menampung aspirasi warga yang sangat menyukai seni dan berprofesi di bid kesenian
	Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya	Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya	Meningkatkan Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya	Meningkatkan Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya	Meningkatkan Pemberdayaan lembaga adat, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan sebagai mitra pendidikan karakter dan pelestarian budaya
	Melestarikan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Melestarikan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Meningkatkan pelestariaan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Meningkatkan pelestariaan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto	Meningkatkan pelestariaan tradisi lokal, kearifan budaya, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi identitas Sawahlunto
	Meningkatkan upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan serta kawasan cagar budaya	Meningkatkan upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan serta kawasan cagar budaya	Meningkatkan upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan serta kawasan cagar budaya	Meningkatkan upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan serta kawasan cagar budaya	Meningkatkan upaya inventarisasi, konservasi, dan revitalisasi bangunan serta kawasan cagar budaya
	mempertahankan dan mengelola nilai universalnya yang luar biasa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO	mempertahankan dan mengelola nilai universalnya yang luar biasa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO	mempertahankan dan mengelola nilai universalnya yang luar biasa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO	mempertahankan dan mengelola nilai universalnya yang luar biasa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO	mempertahankan dan mengelola nilai universalnya yang luar biasa sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO
	Mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya	Mendorong kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya	Meningkatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga adat, perguruan tinggi, BPCB, serta sumber dana multilateral/BUMN untuk mendukung pengelolaan, penelitian, dan pemeliharaan warisan budaya

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		Menjaga pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Sawahlunto	Menjaga pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Sawahlunto	Meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya di Kota Sawahlunto
		pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya	pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya	pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya	pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya	pengembangan pariwisata yang memanfaatkan warisan budaya
		pengelolaan museum secara optimal	Meningkatkan pengelolaan museum secara optimal	Meningkatkan pengelolaan museum secara optimal	Meningkatkan pengelolaan museum secara optimal	Meningkatkan pengelolaan museum secara optimal
		Melaksanakan penataan ulang ruang museum	Melaksanakan penataan ulang ruang museum	Melaksanakan penataan ulang ruang museum	Melaksanakan penataan ulang ruang museum	Melaksanakan penataan ulang ruang museum
Misi 5. Meningkatkan Fungsi Ekonomi Sektor Pariwisata untuk Kesejahteraan Masyarakat melalui Optimalisasi Potensi Kepariwisataan						
Tujuan 5 Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat						
1	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable	Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable	Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable	Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable	Penataan sarana prasarana pendukung kepariwisataan dengan Infrastruktur yang Futuristik, Instagramable
		Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian	Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian	Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian	Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian	Pembangunan destinasi wisata baru di Kota Sawahlunto dengan memperhatikan keberdayagunaan, tingkat daya saing, dan dampaknya terhadap pertumbuhan perekonomian
		Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto	Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto	Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto	Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto	Mengoptimalkan fungsi Geopark nasional di Kota Sawahlunto
		Pengembangan kawasan terpadu kandih di sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan kawasan terpadu kandih di sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan kawasan terpadu kandih di sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan kawasan terpadu kandih di sawahlunto (RPJMN)	Pengembangan kawasan terpadu kandih di sawahlunto (RPJMN)
		Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata	Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata	Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata	Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata	Meningkatkan daya tarik dan keunggulan pariwisata seperti pembangunan infrastruktur pendukung seperti jalan, penginapan, fasilitas rekreasi dan fasilitas umum lainnya di destinasi pariwisata
		Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto	Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto	Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto	Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto	Pengembangan potensi wisata dan destinasi wisata unggulan di Sawahlunto yang mendukung status sebagai Warisan Dunia UNESCO Tambang Batubara Ombilin dan Geopark Nasional Sawahlunto
		Penyelenggaraan multi eventyang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal	Penyelenggaraan multi eventyang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal	Penyelenggaraan multi eventyang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal	Penyelenggaraan multi eventyang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal	Penyelenggaraan multi eventyang berkualitas yang mampu memacu tumbuh kembangnya elektabilitas dunia kepariwisataan Kota Sawahlunto seperti Multi Event Tourism, Event SISSCA melibatkan International Event yang optimal
		Membangun kemitraan pariwisata antar daerah	Membangun kemitraan pariwisata antar daerah	Membangun kemitraan pariwisata antar daerah	Membangun kemitraan pariwisata antar daerah	Membangun kemitraan pariwisata antar daerah
		Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)	Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)	Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)	Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)	Membangun sistem manajemen kepariwisataan yang efektif dan efisien (Top Management Tourism)
		Penguatan branding destinasi dan produk wisata dDengan Branding	Penguatan branding destinasi dan produk wisata dDengan Branding ulang destinasi yang	Penguatan branding destinasi dan produk wisata dDengan Branding	Penguatan branding destinasi dan produk wisata dDengan Branding	Penguatan branding destinasi dan produk wisata dDengan Branding

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		ulang destinasi yang ada	ada	ulang destinasi yang ada	ulang destinasi yang ada	ulang destinasi yang ada
		Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisataan)	Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisataan)	Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisataan)	Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisataan)	Peningkatan kualitas layanan pariwisata. (Service Excellent Pariwisata, SOP Pelayanan Kepariwisataan)
		Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non-halal	Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non-halal	Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non-halal	Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non-halal	Mendukung penerapan pariwisata halal mencakup penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, akomodasi ramah muslim, dan lingkungan yang bebas dari alkohol atau produk non-halal
		Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga)	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga)	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga)	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga)	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Penyelenggaraan Event Kreatif (festival seni, musik, olahraga)
		Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)	Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)	Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)	Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)	Meningkatkan kunjungan wisatawan dengan penyediaan sarana MICE (Meetings, Incentives, Conventions, and Exhibitions)
		Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder	Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder	Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder	Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder	Memperluas promosi dan pemasaran, termasuk pemanfaatan kanal digital dan kolaborasi multi-stakeholder
		Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia	Memanfaatkan TIK untuk mempromosikan potensi pariwisata dan produk lokal ke seluruh dunia
2	Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata.	Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata.	Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata.	Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata.	Mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan daya tarik wisata dan penyediaan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, restoran, transportasi, biro travel, kuliner, pusat oleh-oleh dan cinderamata.
		Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya	Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya	Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya	Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya	Mendukung penyelenggaraan event kreatif yang diinisiasi oleh kelompok/komunitas, BUMN/BUMD, swasta dan lain sebagainya
		Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal	Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal	Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal	Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal	Penguatan Ekonomi Kreatif untuk meningkatkan nilai tambah dan keterlibatan masyarakat lokal
		Memberikan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan fasilitasi akses terhadap sumber daya hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.	Memberikan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan fasilitasi akses terhadap sumber daya hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.	Memberikan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan fasilitasi akses terhadap sumber daya hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.	Memberikan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan fasilitasi akses terhadap sumber daya hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.	Memberikan perlindungan kekayaan intelektual (KI) dan fasilitasi akses terhadap sumber daya hukum bagi pelaku ekonomi kreatif.
		Mempermudah akses ke pasar melalui promosi produk dan jasa kreatif.	Mempermudah akses ke pasar melalui promosi produk dan jasa kreatif.	Mempermudah akses ke pasar melalui promosi produk dan jasa kreatif.	Mempermudah akses ke pasar melalui promosi produk dan jasa kreatif.	Mempermudah akses ke pasar melalui promosi produk dan jasa kreatif.
		Peningkatan kapasitas SDM pariwisiata melalui pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM pariwisiata melalui pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM pariwisiata melalui pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM pariwisiata melalui pelatihan	Peningkatan kapasitas SDM pariwisiata melalui pelatihan
Misi 6. Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat						

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
Tujuan 6. Terwujudnya SDM yang berdaya saing						
1	Meningkatnya Kualitas Pendidikan	Penerapan pembelajaran interaktif dan vokatif serta individual yaitu PISA (Program International Student Asessment) - Program Penilaian Siswa Internasional, Computational Thinking Era.	Penerapan pembelajaran interaktif dan vokatif serta individual yaitu PISA (Program International Student Asessment) - Program Penilaian Siswa Internasional, Computational Thinking Era.	Meningkatkan Penerapan pembelajaran interaktif dan vokatif serta individual yaitu PISA (Program International Student Asessment) - Program Penilaian Siswa Internasional, Computational Thinking Era.	Meningkatkan Penerapan pembelajaran interaktif dan vokatif serta individual yaitu PISA (Program International Student Asessment) - Program Penilaian Siswa Internasional, Computational Thinking Era.	Meningkatkan Penerapan pembelajaran interaktif dan vokatif serta individual yaitu PISA (Program International Student Asessment) - Program Penilaian Siswa Internasional, Computational Thinking Era.
		Mengoptimalkan pemenuhan SPM pendidikan	Mengoptimalkan pemenuhan SPM pendidikan	Mengoptimalkan pemenuhan SPM pendidikan	Mengoptimalkan pemenuhan SPM pendidikan	Mengoptimalkan pemenuhan SPM pendidikan
		Pelaksanaan kompetisi pendidikan yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi atas bergairahnya dunia pendidikan dan memberikan multiplier effect, terutama dalam pembentukan kota wisata pendidikan seperti Kompetisi melibatkan Antar Provinsi dan capaian rekor MURI.	Pelaksanaan kompetisi pendidikan yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi atas bergairahnya dunia pendidikan dan memberikan multiplier effect, terutama dalam pembentukan kota wisata pendidikan seperti Kompetisi melibatkan Antar Provinsi dan capaian rekor MURI.	Pelaksanaan kompetisi pendidikan yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi atas bergairahnya dunia pendidikan dan memberikan multiplier effect, terutama dalam pembentukan kota wisata pendidikan seperti Kompetisi melibatkan Antar Provinsi dan capaian rekor MURI.	Pelaksanaan kompetisi pendidikan yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi atas bergairahnya dunia pendidikan dan memberikan multiplier effect, terutama dalam pembentukan kota wisata pendidikan seperti Kompetisi melibatkan Antar Provinsi dan capaian rekor MURI.	Pelaksanaan kompetisi pendidikan yang berkelanjutan yang memberikan kontribusi atas bergairahnya dunia pendidikan dan memberikan multiplier effect, terutama dalam pembentukan kota wisata pendidikan seperti Kompetisi melibatkan Antar Provinsi dan capaian rekor MURI.
		Perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru	Perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru	Perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru	Perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru	Perluasan akses pendidikan dengan Perda Pendidikan Terbaru
		Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu	Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu	Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu	Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu	Bantuan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu
		mengadakan kelengkapan sekolah bagi peserta didik (SD dan SMP) bagi siswa yang tidak mampu	mengadakan kelengkapan sekolah bagi peserta didik (SD dan SMP) bagi siswa yang tidak mampu	mengadakan kelengkapan sekolah bagi peserta didik (SD dan SMP) bagi siswa yang tidak mampu	mengadakan kelengkapan sekolah bagi peserta didik (SD dan SMP) bagi siswa yang tidak mampu	mengadakan kelengkapan sekolah bagi peserta didik (SD dan SMP) bagi siswa yang tidak mampu
		pemberian transportasi dan kelengkapan sekolah untuk sekolah Non Formal	pemberian transportasi dan kelengkapan sekolah untuk sekolah Non Formal	pemberian transportasi dan kelengkapan sekolah untuk sekolah Non Formal	pemberian transportasi dan kelengkapan sekolah untuk sekolah Non Formal	pemberian transportasi dan kelengkapan sekolah untuk sekolah Non Formal
		pemeratan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	pemeratan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	pemeratan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	pemeratan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	pemeratan kuantitas dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan
		Penjaminan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan	Penjaminan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan	Penjaminan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan	Penjaminan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan	Penjaminan keamanan pendidik dan tenaga kependidikan
		Peningkatan kompetensi guru sebagai pengajar dengan TOT	Peningkatan kompetensi guru sebagai pengajar dengan TOT	Peningkatan kompetensi guru sebagai pengajar dengan TOT	Peningkatan kompetensi guru sebagai pengajar dengan TOT	Peningkatan kompetensi guru sebagai pengajar dengan TOT
		Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah	Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana Utulitas Sekolah
		Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang terstandarisasi seperti Pendidikan Tauhid , Indikator Kuantitatif Karakter	Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang terstandarisasi seperti Pendidikan Tauhid , Indikator Kuantitatif Karakter	Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang terstandarisasi seperti Pendidikan Tauhid , Indikator Kuantitatif Karakter	Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang terstandarisasi seperti Pendidikan Tauhid , Indikator Kuantitatif Karakter	Pembangunan pendidikan berkarakter dengan satuan ukur yang terstandarisasi seperti Pendidikan Tauhid , Indikator Kuantitatif Karakter
		Mendukung optimalisasi peran tokoh agama dan adat dalam kegiatan Pendidikan	Mendukung optimalisasi peran tokoh agama dan adat dalam kegiatan Pendidikan	Mendukung optimalisasi peran tokoh agama dan adat dalam kegiatan Pendidikan	Mendukung optimalisasi peran tokoh agama dan adat dalam kegiatan Pendidikan	Mendukung optimalisasi peran tokoh agama dan adat dalam kegiatan Pendidikan
		sinergitas dengan semua stake holders terkait dengan tata kelola pendidikan dengan Muatan Lokal Agama dan Budaya , serapan ajar dari semua profesi pakar, Reward /Beasiswa	sinergitas dengan semua stake holders terkait dengan tata kelola pendidikan dengan Muatan Lokal Agama dan Budaya , serapan ajar dari semua profesi pakar, Reward /Beasiswa	sinergitas dengan semua stake holders terkait dengan tata kelola pendidikan dengan Muatan Lokal Agama dan Budaya , serapan ajar dari semua profesi pakar, Reward /Beasiswa	sinergitas dengan semua stake holders terkait dengan tata kelola pendidikan dengan Muatan Lokal Agama dan Budaya , serapan ajar dari semua profesi pakar, Reward /Beasiswa	sinergitas dengan semua stake holders terkait dengan tata kelola pendidikan dengan Muatan Lokal Agama dan Budaya , serapan ajar dari semua profesi pakar, Reward /Beasiswa
		Menggiatkan Kurikulum Anti Narkoba	Menggiatkan Kurikulum Anti Narkoba (IKAN)	Menggiatkan Kurikulum Anti Narkoba	Menggiatkan Kurikulum Anti	Menggiatkan Kurikulum Anti Narkoba

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		(IKAN) ke sekolah2	ke sekolah2	(IKAN) ke sekolah2	Narkoba (IKAN) ke sekolah2	(IKAN) ke sekolah2
		Percepatan peraturan daerah tentang muatan lokal untuk mendukung pendidikan/sekolah berkarakter	Percepatan peraturan daerah tentang muatan lokal untuk mendukung pendidikan/sekolah berkarakter	Percepatan peraturan daerah tentang muatan lokal untuk mendukung pendidikan/sekolah berkarakter	Percepatan peraturan daerah tentang muatan lokal untuk mendukung pendidikan/sekolah berkarakter	Percepatan peraturan daerah tentang muatan lokal untuk mendukung pendidikan/sekolah berkarakter
		Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat seperti Muatan Lokal diajar oleh Niniak mamak atau tigo tungku sajarangan, Pembangunan Sekretariat MUI,LKAAM, Kaderisasi).	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat seperti Muatan Lokal diajar oleh Niniak mamak atau tigo tungku sajarangan, Pembangunan Sekretariat MUI,LKAAM, Kaderisasi).	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat seperti Muatan Lokal diajar oleh Niniak mamak atau tigo tungku sajarangan, Pembangunan Sekretariat MUI,LKAAM, Kaderisasi).	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat seperti Muatan Lokal diajar oleh Niniak mamak atau tigo tungku sajarangan, Pembangunan Sekretariat MUI,LKAAM, Kaderisasi).	Peningkatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam kehidupan masyarakat seperti Muatan Lokal diajar oleh Niniak mamak atau tigo tungku sajarangan, Pembangunan Sekretariat MUI,LKAAM, Kaderisasi).
		Fasilitasi status dan perizinan sekolah dan institusi pendidikan	Fasilitasi status dan perizinan sekolah dan institusi pendidikan	Fasilitasi status dan perizinan sekolah dan institusi pendidikan	Fasilitasi status dan perizinan sekolah dan institusi pendidikan	Fasilitasi status dan perizinan sekolah dan institusi pendidikan
		Pengendalian, pembinaan dan pengawasan institusi pendidikan	Pengendalian, pembinaan dan pengawasan institusi pendidikan	Pengendalian, pembinaan dan pengawasan institusi pendidikan	Pengendalian, pembinaan dan pengawasan institusi pendidikan	Pengendalian, pembinaan dan pengawasan institusi pendidikan
		Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Meningkatkan kualitas dan distribusi institusi pendidikan
		terlestarinya bahasa dan sastra daerah	terlestarinya bahasa dan sastra daerah	terlestarinya bahasa dan sastra daerah	terlestarinya bahasa dan sastra daerah	terlestarinya bahasa dan sastra daerah
2	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terpenuhinya pelayanan dasar publik atas program stunting dan imunisasi serta pemenuhan standar pelayanal minimal (SPM)	Terpenuhinya pelayanan dasar publik atas program stunting dan imunisasi serta pemenuhan standar pelayanal minimal (SPM)	Terpenuhinya pelayanan dasar publik atas program stunting dan imunisasi serta pemenuhan standar pelayanal minimal (SPM)	Terpenuhinya pelayanan dasar publik atas program stunting dan imunisasi serta pemenuhan standar pelayanal minimal (SPM)	Terpenuhinya pelayanan dasar publik atas program stunting dan imunisasi serta pemenuhan standar pelayanal minimal (SPM)
		Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional	Peningkatan kepesertaan jaminan kesehatan nasional
		Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan	Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan	Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan	Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan	Peningkatan kapasitas sumberdaya tenaga kesehatan
		Peningkatan Kualitas Obat	Peningkatan Kualitas Obat	Peningkatan Kualitas Obat	Peningkatan Kualitas Obat	Peningkatan Kualitas Obat
		Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Sawahlunto (PHTC)	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Sawahlunto (PHTC)	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Sawahlunto (PHTC)	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Sawahlunto (PHTC)	Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu dan anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Sawahlunto (PHTC)
		Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis dan standar layanan optimal.
		Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat.Fasilitas Puskesmas	Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat.Fasilitas Puskesmas	Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat.Fasilitas Puskesmas	Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat.Fasilitas Puskesmas	Menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata untuk seluruh masyarakat.Fasilitas Puskesmas
		Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis, Kualitas Obat dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis, Kualitas Obat dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis, Kualitas Obat dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis, Kualitas Obat dan standar layanan optimal.	Peningkatan kualitas layanan kesehatan.Tata Kelola Manajemen RSUD, Dokter Spesialis, Kualitas Obat dan standar layanan optimal.
		Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi	Peningkatan upaya promosi dan pencegahan, pemberian pengobatan pencegahan TBC dan pengendalian Infeksi
		Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC	Peningkatan peran serta komunitas, Mitra, organinsasi profesi, multi sektor, dunia pendidikan dalam eliminasi TBC

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	Peningkatan Kualitas sarana, prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
		Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat	Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat
		Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas	Pemberdayaan Masyarakat lokal untuk diarahkan menjadi tenaga kesehatan yang berkualitas
		Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat	Peningkatan upaya promotif, preventif dan pembudayaan prilaku hidup sehat
		Peningkatan koloboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan koloboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan koloboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan koloboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan	Peningkatan koloboratif penurunan stunting dengan seluruh pemangku kepentingan
3	Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluargas sejahtera	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluargas sejahtera	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluargas sejahtera	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluargas sejahtera	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka menjadikan keluargas sejahtera
		Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak	Penguatan program KB dan keluarga sejahtera untuk ketahanan keluarga dan perlindungan perempuan dan anak
		Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini	Peningkatan edukasi kesehatan reproduksi dan pencegahan perkawinan dini
		Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK	Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK	Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK	Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK	Pemberdayaan perempuan.UMKM Wanita/PKK
		Penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	Penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	Penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	Penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga	Penguatan peran perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga
		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.	Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, pemuda, penyandangdisabilitas, dan orang lanjut usia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang.
		Optimalisasi SPM bidang sosial	Optimalisasi SPM bidang sosial	Optimalisasi SPM bidang sosial	Optimalisasi SPM bidang sosial	Optimalisasi SPM bidang sosial
		meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.	meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.	meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.	meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.	meningkatkan kemandirian dan kualitas hidup masyarakat, terutama kelompok yang membutuhkan.
		Melindungi kelompok rentan dan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.	Melindungi kelompok rentan dan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.	Melindungi kelompok rentan dan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.	Melindungi kelompok rentan dan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.	Melindungi kelompok rentan dan korban bencana, baik bencana alam maupun bencana sosial.
		identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (data DTKS)	identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (data DTKS)	identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (data DTKS)	identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (data DTKS)	identifikasi dan verifikasi penerima bantuan sosial (data DTKS)
		Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Meningkatnya ketahanan dan kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
		Penguatan PUG dan peran perempuan	Penguatan PUG dan peran perempuan dalam	Penguatan PUG dan peran perempuan	Penguatan PUG dan peran	Penguatan PUG dan peran

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		dalam pembangunan daerah	pembangunan daerah	dalam pembangunan daerah	perempuan dalam pembangunan daerah	perempuan dalam pembangunan daerah
		Peningkatan kelas kemandirian ABK	Peningkatan kelas kemandirian ABK	Peningkatan kelas kemandirian ABK	Peningkatan kelas kemandirian ABK	Peningkatan kelas kemandirian ABK
		Pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pemenuhan hak dan perlindungan tumbuh kembang anak.	Pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pemenuhan hak dan perlindungan tumbuh kembang anak.	Pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pemenuhan hak dan perlindungan tumbuh kembang anak.	Pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pemenuhan hak dan perlindungan tumbuh kembang anak.	Pencegahan segala bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap anak, serta pemenuhan hak dan perlindungan tumbuh kembang anak.
		Peningkatan dan penyebarluasan data terpilah terkait perempuan dan anak untuk mendukung penyusunan dan evaluasi kebijakan.	Peningkatan dan penyebarluasan data terpilah terkait perempuan dan anak untuk mendukung penyusunan dan evaluasi kebijakan.	Peningkatan dan penyebarluasan data terpilah terkait perempuan dan anak untuk mendukung penyusunan dan evaluasi kebijakan.	Peningkatan dan penyebarluasan data terpilah terkait perempuan dan anak untuk mendukung penyusunan dan evaluasi kebijakan.	Peningkatan dan penyebarluasan data terpilah terkait perempuan dan anak untuk mendukung penyusunan dan evaluasi kebijakan.
4	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Mendorong program pelatihan dan event pemuda	Mendorong program pelatihan dan event pemuda	Mendorong program pelatihan dan event pemuda	Mendorong program pelatihan dan event pemuda	Mendorong program pelatihan dan event pemuda
		Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan sekolah, perguruan tinggi, komunitas pemuda, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event pemuda
		Mendorong pemuda untuk berwirausaha dan menjadi pencipta lapangan kerja	Mendorong pemuda untuk berwirausaha dan menjadi pencipta lapangan kerja	Mendorong pemuda untuk berwirausaha dan menjadi pencipta lapangan kerja	Mendorong pemuda untuk berwirausaha dan menjadi pencipta lapangan kerja	Mendorong pemuda untuk berwirausaha dan menjadi pencipta lapangan kerja
		Membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan pemuda.	Membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan pemuda.	Membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan pemuda.	Membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan pemuda.	Membangun kemitraan dan jejaring kerja dengan pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pembangunan pemuda.
		Meningkatkan kualitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja agar mampu bersaing dan berdaya.	Meningkatkan kualitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja agar mampu bersaing dan berdaya.	Meningkatkan kualitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja agar mampu bersaing dan berdaya.	Meningkatkan kualitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja agar mampu bersaing dan berdaya.	Meningkatkan kualitas pemuda melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan keterampilan kerja agar mampu bersaing dan berdaya.
		Mewujudkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) orang siswa sekolah menengah atas yang memenuhi standarisasi tertinggi setiap tahunnya dengan dukungan pembiayaan APBD dan pembiayaan lainnya yang sah seperti Kuliah seperti di Al Azhar dll dan mengabdi di kampung halaman.	Mewujudkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) orang siswa sekolah menengah atas yang memenuhi standarisasi tertinggi setiap tahunnya dengan dukungan pembiayaan APBD dan pembiayaan lainnya yang sah seperti Kuliah seperti di Al Azhar dll dan mengabdi di kampung halaman.	Mewujudkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) orang siswa sekolah menengah atas yang memenuhi standarisasi tertinggi setiap tahunnya dengan dukungan pembiayaan APBD dan pembiayaan lainnya yang sah seperti Kuliah seperti di Al Azhar dll dan mengabdi di kampung halaman.	Mewujudkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) orang siswa sekolah menengah atas yang memenuhi standarisasi tertinggi setiap tahunnya dengan dukungan pembiayaan APBD dan pembiayaan lainnya yang sah seperti Kuliah seperti di Al Azhar dll dan mengabdi di kampung halaman.	Mewujudkan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi luar negeri yang berkualitas dan memberikan kesempatan kepada 8 (delapan) orang siswa sekolah menengah atas yang memenuhi standarisasi tertinggi setiap tahunnya dengan dukungan pembiayaan APBD dan pembiayaan lainnya yang sah seperti Kuliah seperti di Al Azhar dll dan mengabdi di kampung halaman.
		Penyediaan sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat	Penyediaan sarana dan prasarana olahraga indoor beberapa cabor unggulan dan pemfungsian kembali sarana dan prasarana olahraga masyarakat
		Mendukung pelaksanaan turnamen dan event olahraga berkelanjutan untuk pengembangan prestasi atlet	Mendukung pelaksanaan turnamen dan event olahraga berkelanjutan untuk pengembangan prestasi atlet sampai ke tingkat	Mendukung pelaksanaan turnamen dan event olahraga berkelanjutan untuk pengembangan prestasi atlet	Mendukung pelaksanaan turnamen dan event olahraga berkelanjutan untuk pengembangan prestasi atlet	Mendukung pelaksanaan turnamen dan event olahraga berkelanjutan untuk pengembangan prestasi atlet

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		sampai ke tingkat nasional/internasional	nasional/internasional	sampai ke tingkat nasional/internasional	sampai ke tingkat nasional/internasional	sampai ke tingkat nasional/internasional
		Peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa	Peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa	Peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa	Peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa	Peningkatan, rehabilitasi, dan pembangunan sarana/prasarana olahraga di pusat kota, kecamatan, dan desa
		Penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional	Penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional	Penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional	Penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional	Penyediaan aksesibilitas bagi masyarakat dalam mendukung gaya hidup sehat, dan prestasi olahraga amatir serta profesional
		Penguatan pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda	Penguatan pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda	Penguatan pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda	Penguatan pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda	Penguatan pembinaan olahraga melalui kompetisi tingkat daerah (POPDA), kejuaraan lokal, dan program peningkatan prestasi atlet muda
		Mendorong program pelatihan atlet berprestasi, kompetisi olahraga lokal,	Mendorong program pelatihan atlet berprestasi, kompetisi olahraga lokal,	Mendorong program pelatihan atlet berprestasi, kompetisi olahraga lokal,	Mendorong program pelatihan atlet berprestasi, kompetisi olahraga lokal,	Mendorong program pelatihan atlet berprestasi, kompetisi olahraga lokal,
		Penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah	Penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah	Penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah	Penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah	Penyelenggaraan event olahraga daerah (sepak bola, voli, futsal, atletik) sebagai ajang rekreasi dan promosi daerah
		Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga	Sinergi antara Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dengan induk olahraga (KONI), sekolah, perguruan tinggi, swasta, dan BUMN/BUMD untuk pengembangan sumber daya, fasilitas, pendanaan, dan event olahraga
Misi 7. Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan Lembaga lainnya						
Tujuan 7. Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing						
1	Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas.	Meningkatkan kualitas fasilitasi produk hukum yang dihasilkan	Meningkatkan kualitas fasilitasi produk hukum yang dihasilkan	Meningkatkan kualitas fasilitasi produk hukum yang dihasilkan	Meningkatkan kualitas fasilitasi produk hukum yang dihasilkan	Meningkatkan kualitas fasilitasi produk hukum yang dihasilkan
		Meningkatkan kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah	Meningkatkan kualitas kematangan organisasi pemerintah daerah
		Support System Penilaian Kinerja Walikota,	Support System Penilaian Kinerja Walikota,	Support System Penilaian Kinerja Walikota,	Support System Penilaian Kinerja Walikota,	Support System Penilaian Kinerja Walikota,
		Komitmen penuh atas pembangunan di bidang keagamaan Fasilitasi honor Guru Tahfidz dan Ketersediaan lahan TPU	Komitmen penuh atas pembangunan di bidang keagamaan Fasilitasi honor Guru Tahfidz dan Ketersediaan lahan TPU	Komitmen penuh atas pembangunan di bidang keagamaan Fasilitasi honor Guru Tahfidz dan Ketersediaan lahan TPU	Komitmen penuh atas pembangunan di bidang keagamaan Fasilitasi honor Guru Tahfidz dan Ketersediaan lahan TPU	Komitmen penuh atas pembangunan di bidang keagamaan Fasilitasi honor Guru Tahfidz dan Ketersediaan lahan TPU
		Mengoptimalkan fungsi rumah Tahfidz untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama	Mengoptimalkan fungsi rumah Tahfidz untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama	Mengoptimalkan fungsi rumah Tahfidz untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama	Mengoptimalkan fungsi rumah Tahfidz untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama	Mengoptimalkan fungsi rumah Tahfidz untuk meningkatkan pemahaman nilai-nilai agama
		Mengoptimalkan fungsi mesjid/musala untuk sebagai tempat ibadah, sosial dan pemberdayaan umat	Mengoptimalkan fungsi mesjid/musala untuk sebagai tempat ibadah, sosial dan pemberdayaan umat	Mengoptimalkan fungsi mesjid/musala untuk sebagai tempat ibadah, sosial dan pemberdayaan umat	Mengoptimalkan fungsi mesjid/musala untuk sebagai tempat ibadah, sosial dan pemberdayaan umat	Mengoptimalkan fungsi mesjid/musala untuk sebagai tempat ibadah, sosial dan pemberdayaan umat
		melakukan pembinaan dan evaluasi rumah tahfiz dan TPA serta stadarisasinya	melakukan pembinaan dan evaluasi rumah tahfiz dan TPA serta stadarisasinya	melakukan pembinaan dan evaluasi rumah tahfiz dan TPA serta stadarisasinya	melakukan pembinaan dan evaluasi rumah tahfiz dan TPA serta stadarisasinya	melakukan pembinaan dan evaluasi rumah tahfiz dan TPA serta stadarisasinya
		Meningkatkan daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR	Meningkatkan daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR	Meningkatkan daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR	Meningkatkan daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR	Meningkatkan daya saing daerah melalui koordinasi forum CSR

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal
	Penyaluran dana CSR yang berdasarkan sektor prioritas mendukung tujuan pembangunan daerah	Penyaluran dana CSR yang berdasarkan sektor prioritas mendukung tujuan pembangunan daerah	Penyaluran dana CSR yang berdasarkan sektor prioritas mendukung tujuan pembangunan daerah	Penyaluran dana CSR yang berdasarkan sektor prioritas mendukung tujuan pembangunan daerah	Penyaluran dana CSR yang berdasarkan sektor prioritas mendukung tujuan pembangunan daerah
	percepatan pembentukan forum CSR dalam meningkatkan partisipasi BUMN, BUMD, perusahaan Swasta dalam pembangunan Kota	percepatan pembentukan forum CSR dalam meningkatkan partisipasi BUMN, BUMD, perusahaan Swasta dalam pembangunan Kota	percepatan pembentukan forum CSR dalam meningkatkan partisipasi BUMN, BUMD, perusahaan Swasta dalam pembangunan Kota	percepatan pembentukan forum CSR dalam meningkatkan partisipasi BUMN, BUMD, perusahaan Swasta dalam pembangunan Kota	percepatan pembentukan forum CSR dalam meningkatkan partisipasi BUMN, BUMD, perusahaan Swasta dalam pembangunan Kota
	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.	Pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko.
	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal	Meningkatkan perekonomian daerah melalui pemberdayaan UMKM dan industri lokal
	Penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tertetapkan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat	Penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tertetapkan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat	Penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tertetapkan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat	Penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tertetapkan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat	Penguatan sinergitas antara Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Barat, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota/Provinsi tertetapkan. MOU dengan Pemprov dan Proposal Pusat
	Meningkatkan Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota	Meningkatkan Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota	Meningkatkan Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota	Meningkatkan Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota	Meningkatkan Peran Perantau (diaspora sawahlunto) dalam pembangunan kota
	Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal	Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal	Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal	Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal	Optimalisasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan dengan menjunjung tinggi kebudayaan dan kearifan lokal
	Musrenbang Digital dilengkapi Core Values ERA BARU	Musrenbang Digital dilengkapi Core Values ERA BARU	Musrenbang Digital dilengkapi Core Values ERA BARU	Musrenbang Digital dilengkapi Core Values ERA BARU	Musrenbang Digital dilengkapi Core Values ERA BARU
	Perencanaan digitalisasi partisipatif personal yang terintegrasi.	Perencanaan digitalisasi partisipatif personal yang terintegrasi.	Perencanaan digitalisasi partisipatif personal yang terintegrasi.	Perencanaan digitalisasi partisipatif personal yang terintegrasi.	Perencanaan digitalisasi partisipatif personal yang terintegrasi.
	peningkatan kapasitas SDM Perencana	peningkatan kapasitas SDM Perencana	peningkatan kapasitas SDM Perencana	peningkatan kapasitas SDM Perencana	peningkatan kapasitas SDM Perencana
	meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.	meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.	meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.	meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.	meningkatkan konsistensi dan keselarasan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
	menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah	menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah	menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah	menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah	menjaga sinkronisasi perencanaan pembangunan pusat dan daerah
	penguatan koordinasi dan partisipasi dalam Musrenbang untuk memastikan program pembangunan daerah efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan nasional	penguatan koordinasi dan partisipasi dalam Musrenbang untuk memastikan program pembangunan daerah efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan nasional	penguatan koordinasi dan partisipasi dalam Musrenbang untuk memastikan program pembangunan daerah efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan nasional	penguatan koordinasi dan partisipasi dalam Musrenbang untuk memastikan program pembangunan daerah efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan nasional	penguatan koordinasi dan partisipasi dalam Musrenbang untuk memastikan program pembangunan daerah efektif, efisien, dan akuntabel demi mencapai tujuan pembangunan nasional
	Perencanaan pembangunan wilayah yang adil dan merata demi terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah Master Plan, air	Perencanaan pembangunan wilayah yang adil dan merata demi terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah Master Plan, air dan jalan dan penerangan	Perencanaan pembangunan wilayah yang adil dan merata demi terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah Master Plan, air	Perencanaan pembangunan wilayah yang adil dan merata demi terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah Master Plan,	Perencanaan pembangunan wilayah yang adil dan merata demi terwujudnya kesinambungan pembangunan daerah Master Plan, air

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		dan jalan dan penerangan		dan jalan dan penerangan	air dan jalan dan penerangan	dan jalan dan penerangan
		Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Rriset, Inovasi dan teknologi	Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Rriset, Inovasi dan teknologi	Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Rriset, Inovasi dan teknologi	Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Rriset, Inovasi dan teknologi	Peningkatan kerjasama dengan berbagai institusi pendidikan dan penelitian untuk meningkatkan Rriset, Inovasi dan teknologi
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah	Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi perangkat daerah untuk Indeks Inovasi Daerah
		Dashboard Monitoring Kinerja Pemerintahan dan Support System Penilaian Kinerja Walikota, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).	Dashboard Monitoring Kinerja Pemerintahan dan Support System Penilaian Kinerja Walikota, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).	Dashboard Monitoring Kinerja Pemerintahan dan Support System Penilaian Kinerja Walikota, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).	Dashboard Monitoring Kinerja Pemerintahan dan Support System Penilaian Kinerja Walikota, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).	Dashboard Monitoring Kinerja Pemerintahan dan Support System Penilaian Kinerja Walikota, Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (ZI-WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI WBBM).
		memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan berpedoman pada pertimbangan aturan yang berlaku	memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan berpedoman pada pertimbangan aturan yang berlaku	memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan berpedoman pada pertimbangan aturan yang berlaku	memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan berpedoman pada pertimbangan aturan yang berlaku	memastikan penyelenggaraan pemerintahan daerah berjalan efektif, efisien, dan berpedoman pada pertimbangan aturan yang berlaku
		peningkatan kualitas pengawasan internal, fokus pada area berisiko tinggi seperti kinerja dan keuangan, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem deteksi, cegah dan respon untuk mendukung reformasi birokrasi dan good governance.	peningkatan kualitas pengawasan internal, fokus pada area berisiko tinggi seperti kinerja dan keuangan, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem deteksi, cegah dan respon untuk mendukung reformasi birokrasi dan good governance.	peningkatan kualitas pengawasan internal, fokus pada area berisiko tinggi seperti kinerja dan keuangan, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem deteksi, cegah dan respon untuk mendukung reformasi birokrasi dan good governance.	peningkatan kualitas pengawasan internal, fokus pada area berisiko tinggi seperti kinerja dan keuangan, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem deteksi, cegah dan respon untuk mendukung reformasi birokrasi dan good governance.	peningkatan kualitas pengawasan internal, fokus pada area berisiko tinggi seperti kinerja dan keuangan, pencegahan korupsi, dan penerapan sistem deteksi, cegah dan respon untuk mendukung reformasi birokrasi dan good governance.
		Memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIP) dan Manajemen Resiko di lingkungan pemerintah daerah.	Memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIP) dan Manajemen Resiko di lingkungan pemerintah daerah.	Memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIP) dan Manajemen Resiko di lingkungan pemerintah daerah.	Memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIP) dan Manajemen Resiko di lingkungan pemerintah daerah.	Memberikan fasilitasi dan pembinaan terhadap Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terintegrasi (SPIP) dan Manajemen Resiko di lingkungan pemerintah daerah.
		Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja, keuangan dan Pengawasan Dengan Tu7juan Tertentu (PDTT) perangkat daerah.	Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja, keuangan dan Pengawasan Dengan Tu7juan Tertentu (PDTT) perangkat daerah.	Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja, keuangan dan Pengawasan Dengan Tu7juan Tertentu (PDTT) perangkat daerah.	Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja, keuangan dan Pengawasan Dengan Tu7juan Tertentu (PDTT) perangkat daerah.	Melakukan audit, reviu, evaluasi, dan pemantauan terhadap kinerja, keuangan dan Pengawasan Dengan Tu7juan Tertentu (PDTT) perangkat daerah.
2	Terwujudnya profesionalitas ASN	Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana. Core Values Sawahlunto Maju	Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana. Core Values Sawahlunto Maju	Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana. Core Values Sawahlunto Maju	Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana. Core Values Sawahlunto Maju	Penguatan kualitas sumber daya manusia aparatur pelaksana. Core Values Sawahlunto Maju
		Penyusunan standar kompetensi manajerial dan teknis yang jelas untuk menjadi acuan bagi instansi dalam mengembangkan ASN.	Penyusunan standar kompetensi manajerial dan teknis yang jelas untuk menjadi acuan bagi instansi dalam mengembangkan ASN.	meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial ASN, sehingga sesuai dengan kebutuhan jabatan dan dinamika masyarakat.	meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial ASN, sehingga sesuai dengan kebutuhan jabatan dan dinamika masyarakat.	meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial ASN, sehingga sesuai dengan kebutuhan jabatan dan dinamika masyarakat.
		Penguatan Penerapan sistem merit	Penguatan Penerapan sistem merit	Penerapan sistem merit	optimalisasi sistem merit	optimalisasi sistem merit
		Mendorong ASN memiliki orientasi pada pelayanan publik, bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan kolaborasi	Mendorong ASN memiliki orientasi pada pelayanan publik, bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan kolaborasi	Meningkatkan ASN memiliki orientasi pada pelayanan publik, bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan kolaborasi	Meningkatkan ASN memiliki orientasi pada pelayanan publik, bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan kolaborasi	Meningkatkan ASN memiliki orientasi pada pelayanan publik, bekerja dengan disiplin, tanggung jawab, serta kemampuan kolaborasi

SASARAN		ARAH KEBIJAKAN				
		TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
		penguatan sistem manajemen ASN yang terpadu (melalui pendidikan, pelatihan, dan Standar Kompetensi)	penguatan sistem manajemen ASN yang terpadu (melalui pendidikan, pelatihan, dan Standar Kompetensi)	pengembangan sistem manajemen ASN yang terpadu (melalui pendidikan, pelatihan, dan Standar Kompetensi)	pengembangan sistem manajemen ASN yang terpadu (melalui pendidikan, pelatihan, dan Standar Kompetensi)	pengembangan sistem manajemen ASN yang terpadu (melalui pendidikan, pelatihan, dan Standar Kompetensi)
		Menjaga ASN untuk tidak berpihak pada kepentingan politik atau pribadi dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.	Menjaga ASN untuk tidak berpihak pada kepentingan politik atau pribadi dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.	Menjaga ASN untuk tidak berpihak pada kepentingan politik atau pribadi dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.	Menjaga ASN untuk tidak berpihak pada kepentingan politik atau pribadi dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.	Menjaga ASN untuk tidak berpihak pada kepentingan politik atau pribadi dalam menjalankan tugas dan pelayanan publik.
		Memastikan ASN bekerja dengan jujur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).	Penguatan ASN bekerja dengan jujur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).	Meoptimalkan ASN bekerja dengan jujur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).	Meoptimalkan ASN bekerja dengan jujur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).	Meoptimalkan ASN bekerja dengan jujur, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
3	Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Meningkatkan Pengelolaan Arsip untuk perangkat daerah dan desa/kelurahan.	Peningkatan pembinaan, monitoring, dan evaluasi pengelolaan arsip pada perangkat daerah dan desa/kelurahan.	Optimalisasi penerapan aplikasi Srikandi pada seluruh perangkat daerah dan desa/kelurahan.	Pemantapan pengelolaan arsip digital melalui penerapan penuh aplikasi Srikandi yang terintegrasi dalam kerangka Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada perangkat daerah dan desa/kelurahan.	Terwujudnya tata kelola arsip yang modern, digital, dan berkelanjutan sebagai basis smart governance daerah.
		Optimalisasi input data arsip dan informasi arsip digital (JIKN)	Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital.	Pemanfaatan arsip digital untuk layanan informasi arsip kepada masyarakat	Evaluasi dan pemantauan implementasi arsip digital.	Terwujudnya layanan kearsipan digital berbasis JIKN yang transparan, inklusif, dan mendukung smart governance daerah
		Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital.	Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital.	Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital.	Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital.	Peningkatan akses dan pemanfaatan arsip secara digital.
		Mengoptimalkan pembinaan perpustakaan yang ada didesa/kel, masjid dan TBM	Mengoptimalkan pembinaan perpustakaan yang ada di desa/kelurahan, masjid dan TBM	Memperkuat kualitas dan standar layanan perpustakaan desa/ kelurahan, masjid dan TBM melalui peningkatan kapasitas SDM pengelola perpustakaan	Mendorong tansformasi layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial yang terintegrasi dengan pemberdayaan masyarakat.	Penguatan digitalisasi layanan serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan literasi berkelanjutan
		peningkatan minat baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang inovatif dan inklusif.	peningkatan minat baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang inovatif dan inklusif.	peningkatan minat baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang inovatif dan inklusif.	peningkatan minat baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang inovatif dan inklusif.	peningkatan minat baca dan kecakapan literasi masyarakat melalui program dan kegiatan yang inovatif dan inklusif.
		pengarusutamaan dan pelestarian naskah Nusantara dalam kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan koleksi naskah kuno	pengarusutamaan dan pelestarian naskah Nusantara dalam kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan koleksi naskah kuno	pengarusutamaan dan pelestarian naskah Nusantara dalam kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan koleksi naskah kuno	pengarusutamaan dan pelestarian naskah Nusantara dalam kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan koleksi naskah kuno	pengarusutamaan dan pelestarian naskah Nusantara dalam kebijakan untuk memelihara dan mengembangkan koleksi naskah kuno
		Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan local	Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan local	Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan local	Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan local	Pengembangan koleksi perpustakaan berbasis kearifan local
4	Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang	Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang	Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang	Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang	Menyusun dan melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan prinsip anggaran berimbang
		Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas	Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas	Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas	Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas	Pemenuhan Kebutuhan Belanja untuk Urusan Wajib Secara Prioritas
		Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran	Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Anggaran
		Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance
		Peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui publikasi	Peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui publikasi laporan keuangan	Peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui publikasi	Peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui publikasi	Peningkatan transparansi dan partisipasi publik melalui publikasi

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
	laporan keuangan yang mudah diakses masyarakat.	yang mudah diakses masyarakat.	laporan keuangan yang mudah diakses masyarakat.	laporan keuangan yang mudah diakses masyarakat.	laporan keuangan yang mudah diakses masyarakat.
	Implementasi penuh akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah terbaru	Implementasi penuh akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah terbaru	Implementasi penuh akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah terbaru	Implementasi penuh akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah terbaru	Implementasi penuh akuntansi berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintah terbaru
	Digitalisasi penuh siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, kas, akuntansi, dan pelaporan).	Digitalisasi penuh siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, kas, akuntansi, dan pelaporan).	Digitalisasi penuh siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, kas, akuntansi, dan pelaporan).	Digitalisasi penuh siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, kas, akuntansi, dan pelaporan).	Digitalisasi penuh siklus pengelolaan keuangan daerah (perencanaan, penganggaran, kas, akuntansi, dan pelaporan).
	Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penganggaran terpadu (integrated budgeting).	Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penganggaran terpadu (integrated budgeting).	Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penganggaran terpadu (integrated budgeting).	Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penganggaran terpadu (integrated budgeting).	Optimalisasi perencanaan anggaran berbasis kinerja dan penganggaran terpadu (integrated budgeting).
	Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	Optimalisasi Pengelolaan Aset dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai
	Penertiban penggunaan aset untuk memastikan status hukum dan kepemilikan jelas	Penertiban penggunaan aset untuk memastikan status hukum dan kepemilikan jelas	Penertiban penggunaan aset untuk memastikan status hukum dan kepemilikan jelas	Penertiban penggunaan aset untuk memastikan status hukum dan kepemilikan jelas	Penertiban penggunaan aset untuk memastikan status hukum dan kepemilikan jelas
	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD	Optimalisasi pemanfaatan aset daerah untuk peningkatan PAD
	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah	Ekstensifikasi dan Intensifikasi Sumber-Sumber Pendapatan Daerah
	Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien	Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien	Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien	Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien	Pemutakhiran data wajib pajak dan pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem pengelolaan PAD yang lebih akurat dan efisien
	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah	Peningkatan Kapasitas dan Kualitas Manajemen Pendapatan Daerah
	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD	Peningkatan profesionalisme pengelolaan BUMD
	Mendorong inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru	Mendorong inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru	Mendorong inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru	Mendorong inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru	Mendorong inovasi daerah dalam menciptakan potensi pendapatan baru
	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kebocoran PAD	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kebocoran PAD	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kebocoran PAD	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kebocoran PAD	Pengawasan dan Penegakan Hukum terhadap Kebocoran PAD
	Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah secara Bertahap	Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah secara Bertahap	Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah secara Bertahap	Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah secara Bertahap	Peningkatan Kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Daerah secara Bertahap
	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai	Pendataan ulang aset-aset daerah yang menjadi sumber pendapatan dan yang tidak layak pakai
	Pemutakhiran dan integrasi basis data wajib pajak & objek pajak berbasis NIK, NIB, dan data sectoral	Pemutakhiran dan integrasi basis data wajib pajak & objek pajak berbasis NIK, NIB, dan data sectoral	Pemutakhiran dan integrasi basis data wajib pajak & objek pajak berbasis NIK, NIB, dan data sectoral	Pemutakhiran dan integrasi basis data wajib pajak & objek pajak berbasis NIK, NIB, dan data sectoral	Pemutakhiran dan integrasi basis data wajib pajak & objek pajak berbasis NIK, NIB, dan data sectoral
	Penerapan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis digital (online payment & e-billing).	Penerapan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis digital (online payment & e-billing).	Penerapan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis digital (online payment & e-billing).	Penerapan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis digital (online payment & e-billing).	Penerapan sistem informasi pajak dan retribusi berbasis digital (online payment & e-billing).
	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended	Pengembangan pembiayaan inovatif, termasuk KPBU dan Blended Finance

SASARAN	ARAH KEBIJAKAN				
	TAHUN 1 (2026)	TAHUN 2 (2027)	TAHUN 3 (2028)	TAHUN 4 (2029)	TAHUN 5 (2030)
				Finance	
	Menggali potensi sektor unggulan daerah (pariwisata, industri kreatif, pertanian, perikanan, dll.) untuk menciptakan pendapatan baru	Menggali potensi sektor unggulan daerah (pariwisata, industri kreatif, pertanian, perikanan, dll.) untuk menciptakan pendapatan baru	Menggali potensi sektor unggulan daerah (pariwisata, industri kreatif, pertanian, perikanan, dll.) untuk menciptakan pendapatan baru	Menggali potensi sektor unggulan daerah (pariwisata, industri kreatif, pertanian, perikanan, dll.) untuk menciptakan pendapatan baru	Menggali potensi sektor unggulan daerah (pariwisata, industri kreatif, pertanian, perikanan, dll.) untuk menciptakan pendapatan baru
	Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.	Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.	Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.	Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.	Mengembangkan kebijakan pendapatan daerah yang berkelanjutan dan berorientasi pada pembangunan jangka panjang.

3.5.2 Program Prioritas Tahun 2025-2029

Program Prioritas Pemerintah Daerah adalah Program Unggulan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 yang merupakan pendukung terhadap pencapaian Visi dan Misi :

Tabel 3.14
Program Prioritas Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2025-2029

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
VISI: SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI						
MISI 1: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR PEREKONOMIAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN						
	TUJUAN 1.1: Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berwawasan lingkungan			Tingkat Pengangguran Terbuka(%)		
				Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi(Angka)		
				PDRB per kapita ADHB (Rp. Juta)(Rp. Juta Per Tahun)		
				Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)(%)		
				Tingkat Kemiskinan((%))		
				Rasio Gini(Indeks)		
				Laju Pertumbuhan Ekonomi(%)		
		SASARAN 1.1.1.: Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan		Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB) (%)		
				Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)		
				Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)		
			Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
				Rasio Kewirausahaan (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
			Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
				Proporsi jumlah UKM non pertanian (*)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
			Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	
			Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	
			Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	
			Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	
			Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase pertumbuhan informasi industri (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	
			Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	
			Meningkatnya	Persentase Promosi Produk Lokal yang	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	PRODUK DALAM NEGERI	
			Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	
			Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Proporsi jumlah IKM (*)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
				Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
			Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	
		SASARAN 1.1.2: Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) (%)		
				Persentase peningkatan Investasi (%) (Persentase)		
				Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)		
			Meningkatnya jangkauan promos penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	
			Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
				Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
			Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	
			Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	
			Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	
			Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	
		SASARAN 1.1.3: Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa		Indeks Desa (Rata-rata indeks desa) (Indeks)		
			Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	
			Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
				Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
				Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
			Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air Dingin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	
			Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (Persentase)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	
			Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	
			Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Barangin)	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Lembah Segar)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
			Terselenggaranya	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Pemerintahan Desa Dengan Baik(Silungkang)	Dengan Baik (%)	PEMERINTAHAN DESA	
			Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Talawi)	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	
		SASARAN 1.1.4: Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan		Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan (%) (%)		
				Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishme nt) (%) (%)		
				Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang) (Rp Juta/Orang/Bulan)		
			Menigkatnya pengawasan dan mutu dan kemanan pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang Aman dari Cemaran Mikroba, Bahan Kimia/Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Sawah yang Diairi (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Kopi Robusta (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Padi (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah Produksi Kakao (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Jumlah produksi daging sapi (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
			Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	
			Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang ditangani (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersedian cadangan pangan (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
			Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	
			Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	
			Meningkatnya produksi	Produktifitas perikanan budidaya (Kg)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			perikanan budidaya		BUDIDAYA	
VISI: SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI						
MISI 2: MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE BERBASIS IT						
	TUJUAN 2.1: Terwujudnya Smart Governance berbasis IT			Indeks Masyarakat Digital Indonesia(*)		
		SASARAN 2.1.1: Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi		Indeks Pemerintah Digital (Angka)		
			Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Aspek Teknologi Digital (Nilai) (Nilai)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			Tercapainya kolaborasi integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
		SASARAN 2.1.2: Terwujudnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien		Indeks Pelayanan Publik (*)		
			Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Terselenggaranya Pencatatan Sipil (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	
			Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	
			Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	
			Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Barangin)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Air Dingin)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Aur Mulyo)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Durian 1)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pemerintahan Dan	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Durian 2)			
			Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Lubang Panjang)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Saringan)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Lembah Segar)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Silungkang)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
			Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Talawi)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	
VISI: SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI						
MISI 3: PENGUATAN INFRASTRUKTUR PENUNJANG TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	TUJUAN 3.1: Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan			Indeks Risiko Bencana (IRBI)(Angka)		
				Indeks Kinerja Infrastruktur(Indeks)		
		SASARAN 3.1.1.: Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)		
				Indeks Ketahanan Daerah (Angka)		
			Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRF	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	
			Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	2.11.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	
			Meningkatnya ketersediaan dan kualitas	Persentase sampel uji kualitas lingkungan yang dianalisis tepat waktu (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			data hasil pemantauan lingkungan sebagai dasar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup			
			Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.09 PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (Persentase)	2.11.04 PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	
			Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
			Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)	2.11.10 PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	
			Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya tata kelola persampahan	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	
			Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Nilai Indeks Udara Model EU (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
				Tutupan Lahan (Hektar)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		SASARAN 3.1.2: Meningkatnya Aksesbilitas dan		Indeks Layanan Infrastruktur Dasar (Indeks)		
				Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)		
				Indek Konektivitas Darat (Indeks)		

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
		Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Jumlah Perjalanan Kereta Api Wisata	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	
			Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)	Persentase hunian rusunawa yang dihuni MBR (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
			Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
				Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Ha)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	
			Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)	1.03.09 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	
			Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	
			Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.08 PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	
			Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase luas kawasan permukiman rawan kumuh yang ditangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	
			Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	
			Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	
			Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)	1.03.06 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	
			Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	
			Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
				Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
			Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			tanah untuk pembangunan			
			Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	
			Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
				Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
			Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	
			Meningkatnya tertib pertanahan dar kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase bidang tanah yang sudah terdaftar / bersertifikat (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	
			Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Persentase pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW / RDTR) (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	
			Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
VISI: SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI						
MISI 4: PENINGKATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MELALUI PENGEMBANGAN KOMUNITAS SENI DEMI MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA WISATA YANG ESTETIK DAN MEMILIKI FUNGSI EKONOMI DAN MENSEJAHTERAKAN						
	TUJUAN 4.1: Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis			Indeks Ketahanan Nasional(Indeks)		
		SASARAN 4.1.1: Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama		Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (*)		
				Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (Angka)		
				Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)		
			Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
			Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	
			Meningkatnya ketahanan	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)
			ekonomi sosial,dan budaya masyarakat	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
			Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	
			Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
			Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik(Barangin)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik(Lembah Segar)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik(Silungkang)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (Talawi)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	
			Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Barangin)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Lembah Segar)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Silungkang)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
			Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Talawi)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
		SASARAN 4.1.2: Meningkatnya komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan adat istiadat		Persentase pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan (%)		
			Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya tata kelola museum	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum (Orang)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
			Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
VISI: SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI						
MISI 5: MENINGKATKAN FUNGSI EKONOMI SEKTOR PARIWISATA UNTUK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI OPTIMALISASI POTENSI KEPARIWISATAAN						
	TUJUAN 5.1: Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat			Rasio PDRB Akomodasi Mamin(%)		
		SASARAN 5.1.1: Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah		PAD sektor Pariwisata (Angka)		
			Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang) (Orang)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
		SASARAN 5.1.2: Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah		Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%) (%)		
			Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	
VISI: SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI						
MISI 6: KOTA SAWAHLUNTO MENUJU KOTA SEHAT DAN DESTINASI PENDIDIKAN UTAMA YANG BERKARAKTER DI SUMATERA BARAT						
	TUJUAN 6.1: Terwujudnya SDM yang berdaya saing			Indeks Pembangunan Manusia(Indeks)		
		SASARAN 6.1.1: Meningkatnya kualitas pendidikan		Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))		
				Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)		
				Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca (Angka)		
				Harapan Lama Sekolah (Tahun)		
				Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (Angka)		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	
			Meningkatnya kualitas	Persentase Satuan Pendidikan yang	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			kurikulum pendidikan	Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)		
			Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	
			Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Lulusan SD yang hafal alqur''an juz 30 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
				Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
			Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	
		SASARAN 6.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat		Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (%)		
				Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))		
				Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))		
			Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD RSUD)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
				Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
			Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
			Meningkatnya mutu dan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			distribusi tenaga kesehatan (UPTD RSUD)	Kesehatan (Persentase)	DAYA MANUSIA KESEHATAN	
		SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif		Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)		
				Indeks Pembangunan Keluarga (*)		
				Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)		
				Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	
			Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	
			Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korbna tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (Persentase)	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
				Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
			Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
				Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
			Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
				persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
			Meningkatnya pencegahan dan	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Komprehensif (Persentase)		
			Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				persentase daerah yang melalsanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
				persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
			Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
				persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
			Meningkatnya rehabilitasi sosial	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
				Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
			Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik (%)	1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	
			Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	
			Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	persentase desa/kelurahan ramah anak (%)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	
			Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
				Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
		SASARAN 6.1.4: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga		Persentase peningkatan prestasi Olahraga (%)		
				Persentase peningkatan partisipasi pemuda berwirausaha (%)		
			Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing Kepemudaan (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	
			Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase peningkatan kapasitas anggota kepramukaan (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya	Persentase Atlet yang berdaya saing (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			pembudayaan dan prestasi olah raga		SAING KEOLAHRAGAAN	
VISI: SAWAHLUNTO KOTA WISATA YANG ESTETIK, FUTURISTIK, HIDUP DAN MENGHIDUPI						
MISI 7: PELAKSANAAN TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH YANG BERDAYA SAING TINGGI ATAS PENGUKURAN INDEKS KINERJA YANG DITETAPKAN OLEH KEMENTERIAN DAN LEMBAGA LAINNYA						
	SASARAN 7.1: Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing			Indeks Inovasi Daerah(Angka)		
				Indeks Reformasi Birokrasi(Indeks)		
		SASARAN 7.1.1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas		Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) (Nilai)		
				Nilai AKIP Instansi Pemerintah (Nilai)		
				Nilai evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah ()		
			Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah		5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan		5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Indeks Reformasi Hukum (*)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (*)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
				Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
			Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
				Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
			Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
				Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (Persentase)	4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	
			Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)	5.05.02 PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
			Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	
			Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	
		SASARAN 7.1.2: Terwujudnya profesionalitas ASN		Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)		
			Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
			Meningkatnya layanan	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA	

VISI / MISI	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	KETERANGAN
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*
			penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Kompetensi (Persentase)	MANUSIA	
			Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
		SASARAN 7.1.3: Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat		Indeks pembangunan literasi masyarakat (Indeks)		
				Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah (Indeks)		
			Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	
			Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan dan Didaftarkan (%)	2.23.03 PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	
			Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)	2.24.03 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	
			Meningkatnya tata kelola arsir dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)	2.24.02 PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	
		SASARAN 7.1.4: Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) (Indeks)		
			Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	
			Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
				Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
			Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	

3.5.3 Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah Terhadap Fokus Prioritas RPJMN Tahun 2025-2029

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah dalam RPJMN 2025-2029 difokuskan pada tiga sasaran utama: penurunan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan visi "Asta Cita" yang menekankan pada penguatan ideologi Pancasila, pembangunan SDM unggul, reformasi politik dan hukum, serta pemerataan ekonomi. Adapun uraian masing-masing sasaran utama adalah sebagai berikut:

A. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Penurunan Tingkat Kemiskinan Kota Sawahlunto dengan Baseline dan target kinerja Tahun 2026-2030

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk penurunan tingkat kemiskinan mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia (pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan), perbaikan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Program-program ini harus terpadu dan melibatkan berbagai pihak untuk mencapai hasil yang optimal. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.15
Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah terhadap Penurunan Kemiskinan Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
SASARAN 6.1.1: Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Lulusan SD yang hafal alqur''an juz 30 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
SASARAN 6.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD RSUD)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	(UPTD RSUD)			
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SASARAN 3.1.2: Meningkatnya Aksesbilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)	Persentase hunian rusunawa yang dihuni MBR (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase luas kawasan permukiman rawan kumuh yang ditangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
SASARAN 3.1.1.: Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
SASARAN 4.1.1: Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)		
		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		persentase daerah yang melalsanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
SASARAN 3.1.1.: Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
SASARAN 1.1.2: Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL,

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		Tinggi (%) (%)		PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	persentase desa/kelurahan ramah anak (%)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SASARAN 1.1.4:Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersedian cadangan pangan (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang ditangani (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN,

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Menigkatnya pengawasan dan mutu dan kemanan pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang Aman dari Cemaran Mikroba, Bahan Kimia/Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
SASARAN 2.1.2: Terwujudnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Terselenggaranya Pencatatan Sipil (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SASARAN 1.1.3: Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
SASARAN 2.1.1: Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya kualitas	Nilai Aspek Teknologi Digital (Nilai) (Nilai)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
dalam mendukung transparansi	pengelolaan aplikasi informatika		INFORMATIKA	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN 1.1.1.: Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Proporsi jumlah UKM non pertanian (*)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Rasio Kewirausahaan (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
SASARAN 6.1.4:Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing Kepemudaan (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SASARAN 2.1.1: Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Tercapainya kolaborasi integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online (%)	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN 4.1.2: Meningkatnya komunitas	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
seni dalam pelestarian cagar budaya dan adat istiadat	pengembangan kebudayaan			
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
SASARAN 7.1.3: Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SASARAN 1.1.4: Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produktifitas perikanan budidaya (Kg)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
SASARAN 5.1.1: Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang) (Orang)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SASARAN 5.1.2: Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SASARAN 1.1.4: Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Kopi Robusta (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Produksi Padi (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		Jumlah Produksi Kakao (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		Jumlah produksi daging sapi (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Sawah yang Diairi (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN,

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	bencana pertanian			PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
SASARAN 1.1.1.: Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Proporsi jumlah IKM (*)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
SASARAN 7.1.1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
		Indeks Reformasi Hukum (*)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (*)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
SASARAN 7.1.4: Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya penerapan	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN	

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	sistem informasi keuangan berbasis digital	Berbasis Digital (%)	DAERAH	
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
SASARAN 1.1.3: Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air Dingin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN DURIAN 1
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN SARINGAN
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
SASARAN 4.1.1: Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (Persentase)	8.01.03 PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial,dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

B. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Manusia Kota Sawahlunto dengan Baseline dan target kinerja Tahun 2026-2030

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah untuk peningkatan kualitas dan daya saing manusia, dengan baseline dan target kinerja tahun 2026-2030, perlu difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Adapun uraian program dapat dijelaskan pada tabel berikut ini :

Tabel 3.16
Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan Pagu Indikatif Pembangunan Daerah terhadap Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Manusia Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
SASARAN 6.1.1: Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Lulusan SD yang hafal alqur''an juz 30 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.01.05 PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)	1.01.06 PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
SASARAN 6.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD RSUD)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (UPTD RSUD)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SASARAN 3.1.2: Meningkatnya Aksesbilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (%)	1.03.11 PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
SASARAN 4.1.1: Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		sosial (%)		
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		persentase daerah yang melalsanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
SASARAN 3.1.1.: Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
SASARAN 1.1.2: Meningkatnya iklim investasi yang	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah				PINTU DAN TENAGA KERJA
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SASARAN 3.1.1.: Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.11.07 PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	2.11.08 PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
SASARAN 1.1.3: Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa				PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
SASARAN 1.1.1.: Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Proporsi jumlah UKM non pertanian (*)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Rasio Kewirausahaan (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
SASARAN 6.1.4: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing Kepemudaan (%)	2.19.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang berdaya saing (%)	2.19.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase peningkatan kapasitas anggota kepramukaan (%)	2.19.04 PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
SASARAN 7.1.3: Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	2.23.02 PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
SASARAN 5.1.2: Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SASARAN 1.1.4: Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
SASARAN 7.1.2: Terwujudnya profesionalitas ASN	Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)	5.03.02 PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	
	Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
	Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)	5.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	
SASARAN 1.1.3: Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air Dingin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
	Meningkatnya kegiatan	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA	7.01.0.00.0.00.01.0001 -

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)		DAN KELURAHAN	KELURAHAN DURIAN 1
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN SARINGAN
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
SASARAN 4.1.1: Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (Persentase)	8.01.02 PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (Persentase)	8.01.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

C. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kota Sawahlunto dengan Baseline dan target kinerja Tahun 2026-2030

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kota Sawahlunto untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan tahun 2026-2030 akan fokus pada diversifikasi ekonomi, pengembangan pariwisata berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Uraian masing-masing program pendukung dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.17
Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
SASARAN 3.1.2: Meningkatnya Aksesbilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Persentase pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW / RDTR) (%)	1.03.12 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)	Persentase hunian rusunawa yang dihuni MBR (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase luas kawasan permukiman rawan kumuh yang ditangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
SASARAN 4.1.1: Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
SASARAN 1.1.2: Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja (%)	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
		Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
		Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) (%)	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	
	Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SASARAN 1.1.4: Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersedian cadangan pangan (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang ditangani (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Menigkatnya pengawasan dan mutu dan kemanan pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang Aman dari Cemaran Mikroba, Bahan Kimia/Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
SASARAN 3.1.2: Meningkatnya Aksesbilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)	2.10.04 PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)	2.10.05 PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Ha)	2.10.06 PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)	2.10.07 PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)	2.10.08 PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya tertib pertanahan dar kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah	Persentase bidang tanah yang sudah terdaftar / bersertifikat (%)	2.10.10 PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
SASARAN 3.1.1.: Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRF	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)	2.11.02 PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan sebagai dasar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase sampel uji kualitas lingkungan yang dianalisis tepat waktu (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	lingkungan hidup	Nilai Indeks Udara Model EU (Indeks)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
		Tutupan Lahan (Hektar)	2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	
	Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)	2.11.05 PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya tata kelola persampahan	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	2.11.11 PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
SASARAN 3.1.2:Meningkatnya Aksesbilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)	2.15.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
	Jumlah Perjalanan Kereta Api Wisata	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (Persentase)	2.15.05 PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
SASARAN 2.1.1: Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Aspek Teknologi Digital (Nilai) (Nilai)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN 1.1.1.: Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (Persentase)	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (Persentase)	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (Persentase)	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (Persentase)	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		Proporsi jumlah UKM non pertanian (*)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Rasio Kewirausahaan (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
SASARAN 1.1.2: Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)	2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Meningkatnya jangkauan promos penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)	2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)	2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)	2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)	2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
SASARAN 4.1.2: Meningkatnya komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan adat istiadat	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)	2.22.04 PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
	Meningkatnya tata kelola museum	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum (Orang)	2.22.06 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
SASARAN 1.1.4: Terwujudnya ketahanan pangan dengan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produktifitas perikanan budidaya (Kg)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
SASARAN 5.1.1: Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang) (Orang)	3.26.02 PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SASARAN 5.1.2: Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)	3.26.04 PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
SASARAN 1.1.4: Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Kopi Robusta (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Produksi Padi (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		Jumlah Produksi Kakao (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		Jumlah produksi daging sapi (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Sawah yang Diairi (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
SASARAN 1.1.1.: Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	pokok dan barang penting			DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (Persentase)	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Proporsi jumlah IKM (*)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri (Persentase)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	
	Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase pertumbuhan informasi industri (%)	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
SASARAN 7.1.1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
SASARAN 7.1.4: Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)	5.02.03 PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
SASARAN 7.1.1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)	5.05.03 PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
SASARAN 1.1.3: Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Dingin)			
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN DURIAN 1
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN SARINGAN
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
SASARAN 4.1.1: Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial,dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan (Persentase)	8.01.05 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
	Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (Persentase)	8.01.06 PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

D. Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah untuk Program Penanggulangan Stunting Kota Sawahlunto dengan Baseline dan target kinerja Tahun 2026-2030

Arah kebijakan dan program pembangunan daerah Kota Sawahlunto untuk penanggulangan stunting tahun 2026-2030 akan fokus pada program pembangunan daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan, dengan mengedepankan pendekatan lintas sektor. Upaya yang dilakukan mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, penyediaan gizi seimbang melalui intervensi spesifik dan sensitif, penguatan ketahanan pangan keluarga, peningkatan kualitas sanitasi dan air bersih, serta optimalisasi pendidikan dan pemberdayaan masyarakat. Uraian masing-masing program pendukung dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 3.18
Arah kebijakan, Program Prioritas dan Target Kinerja dan pagu indikatif Pembangunan Daerah terhadap Penanggulangan Stunting Kota Sawahlunto Tahun 2026-2030

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
SASARAN 6.1.1: Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
		Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Lulusan SD yang hafal alqur''an juz 30 (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
		Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal (%)	1.01.02 PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
	Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	1.01.03 PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.01.04 PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
SASARAN 6.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD RSUD)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) (%)	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
		Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (UPTD RSUD)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	1.02.03 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	
	Meningkatnya kualitas dan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat	1.02.04 PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	1.02.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
SASARAN 3.1.2: Meningkatnya Aksesbilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
		Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	1.03.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)	1.03.03 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	1.03.05 PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
		Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)	1.03.10 PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	
	Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)	Persentase hunian rusunawa yang dihuni MBR (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	1.04.02 PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	
	Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	1.04.03 PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase luas kawasan permukiman rawan kumuh yang ditangani (%)	1.04.04 PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
		Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)	1.04.05 PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	
SASARAN 4.1.1: Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	1.05.02 PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	
SASARAN 3.1.1.: Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (Persentase)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana (%)	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	
SASARAN 4.1.1: Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (Persentase)	1.05.04 PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	
SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
		persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	1.06.02 PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	
	Meningkatnya rehabilitasi sosial	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
		Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)	1.06.04 PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	
	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		persentase daerah yang melalsanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
		persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	1.06.05 PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	
SASARAN 3.1.1.: Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (Persentase)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
		persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	
SASARAN	Meningkatnya kualitas dan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	2.08.02 PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
6.1.3:Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	(Persentase)	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	2.08.03 PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	2.08.04 PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	persentase desa/kelurahan ramah anak (%)	2.08.06 PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)	2.08.07 PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
SASARAN 1.1.4: Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersedian cadangan pangan (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang ditangani (%)	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Menigkatnya pengawasan dan mutu dan kemanan pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang Aman dari Cemaran Mikroba, Bahan Kimia/Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
SASARAN 2.1.2:Terwujudnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk (%)	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase Terselenggaranya Pencatatan Sipil (%)	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
	Meningkatnya pemanfaatan	Persentase Informasi Kependudukan yang	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	informasi kependudukan	DImanfaatkan (Persentase)	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
SASARAN 1.1.3: Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
		Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	
SASARAN 6.1.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	2.14.02 PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	2.14.03 PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	
	Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
		Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	2.14.04 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	
SASARAN 2.1.1: Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Aspek Teknologi Digital (Nilai) (Nilai)	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
SASARAN 1.1.1.:Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (Persentase)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
		Proporsi jumlah UKM non pertanian (*)	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	
	Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (Persentase)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		Rasio Kewirausahaan (%)	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	
SASARAN 1.1.4: Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produktifitas perikanan budidaya (Kg)	3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
SASARAN 1.1.4: Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Kopi Robusta (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
		Jumlah Produksi Padi (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		Jumlah Produksi Kakao (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
		Jumlah produksi daging sapi (Ton)	3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Sawah yang Diairi (%)	3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)	3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)	3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
SASARAN 1.1.1.:Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (Persentase)	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (Persentase)	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	3.30.05 PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
				DAN PERDAGANGAN
SASARAN 7.1.1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (Persentase)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
		Indeks Reformasi Hukum (*)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (*)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
		Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	4.01.02 PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	
	Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
		Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Indeks)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
		Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)	4.01.03 PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
	Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
SASARAN 7.1.4: Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
		Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
		Persentase Penurunan SILPA (Persentase)	5.02.02 PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	
	Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
	Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	5.02.04 PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	
SASARAN 7.1.1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)	6.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
	Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP) (Level)	6.01.03 PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
SASARAN 1.1.3: Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air Dingin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN DURIAN 1
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
	Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN SARINGAN
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN

SASARAN	OUTCOME	INDIKATOR	PROGRAM PRIORITAS	PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
	Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI

3.5.4 Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029

Arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat yang dalam terdapat dalam RPJMN Tahun 2025-2029, dapat dilihat pada pada gambar berikut ini;

Gambar 3.1
Arah Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029

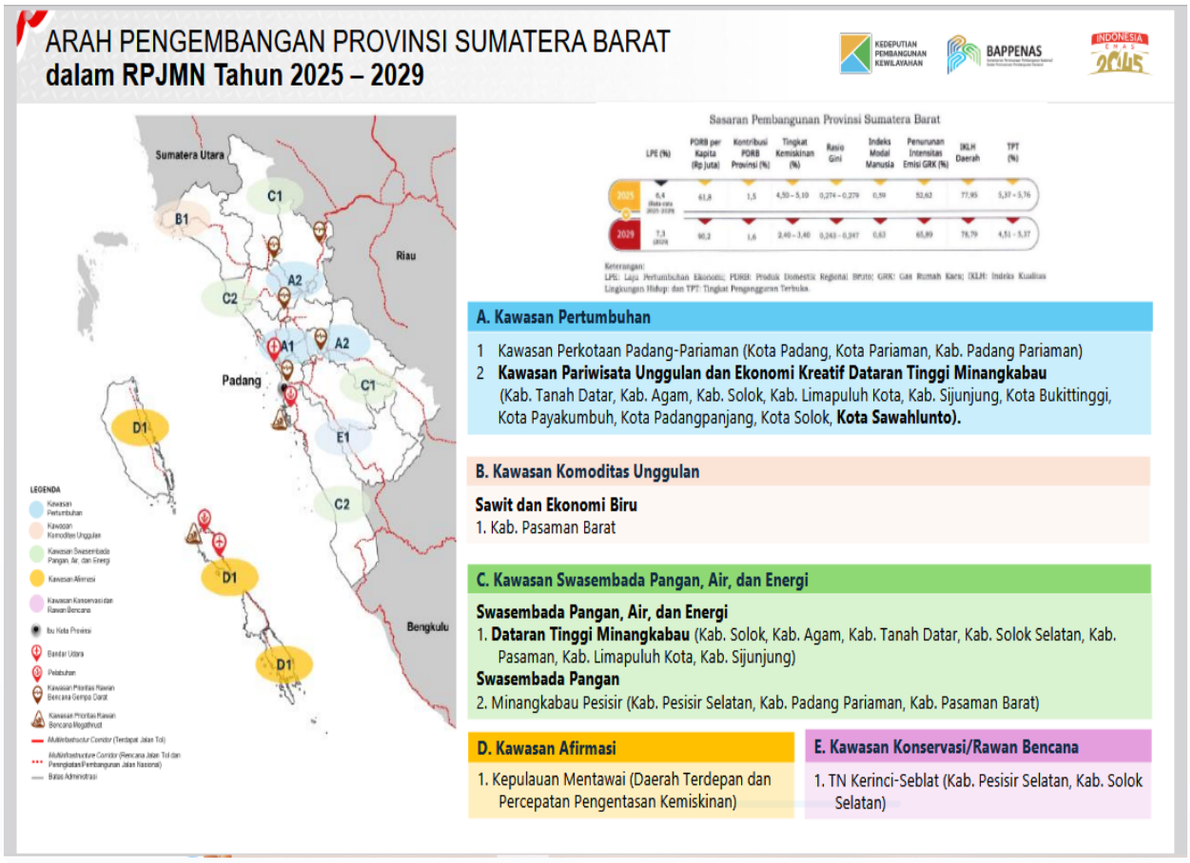

Sumber; Perpres RI No. 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

Berdasarkan gambar diatas, terlihat arah pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat difokuskan pada; 1) kawasan pertumbuhan, 2) kawasan komoditas unggulan, 3) kawasan swasembada pangan, air, dan energi, 4) kawasan afirmasi Kepulauan Mentawai dan 5) kawasan konservasi/rawan bencana. Lokasi prioritas dan highlight indikasi intervensi fokus pembangunan kewilayahan Provinsi Sumatera Barat, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.19
Lokasi Prioritas dan Highlight Indikasi Intervensi Pembangunan Wilayah Provinsi Sumatera Barat RPJMN Tahun 2025-2029

NO	FOKUS/LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
A.	**KAWASAN PERTUMBUHAN NASIONAL**	
1.	Kawasan Perkotaan Padang-Pariaman • Kota Padang • Kota Pariaman • Kab. Padang Pariaman	a. Pengembangan dari penataan kawasan perkotaan Padang-Pariaman, antara lain, melalui: • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi dan masalah perkotaan secara terpadu • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ peLatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakeiaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		b. Pengembangan koridor industri rintisan Padang-Pariaman {sektor industri prioritas: hilirisasi kelapa, hilirisasi kelapa sawit, industri makanan, dan minuman, dan industri transportasi laut dan

NO	FOKUS/LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		galangan kapal)
		c. Penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, serta produktivitas tenaga kerja, melalui pembangunan/ pengembangan/peningkatan Balai l,atihan Kerja sesuai kebutuhan industri wilayah
		d. Pengembangan pelabuhan perikanan PPS Bungus
		e. Pembangunan SPAM Regional Padang-Padang Pariaman-Pariaman
		f. Pembangunan TPST Regional Padang-Padang Pariaman-Pariaman
		g. Pembangunan rumah murah bersanitasi baik bagi MBR, Gen Z, dan milenial di kawasan perkotaan Padang (PHTC)
		h. Preservasi jalan nras Padang-Maideh Painan-Tapan
		i. ketangguhan terhadap banjir di kawaasan perkotaan Padang-Pariaman
2.	Kawasan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Unggulan Dataran Tinggi Minangkabau: Kab. Sijunjung Kab. Tanah Datar Kab. Solok Kab. Limapuluh Kota Kab. Agam **Kota Sawahlunto** Kota Solok Kota Bukittinggi Kota Padang Panjang Kota Payakumbuh	a. Pengembangan kawasan pariwisata budaya Kampung Adat Sijunjung
		b. **Pengembangan dan penataan kawasan perkotaan Bukittinggi, Padang Panjang dan Solok-Sawahlunto, antara lain melalui:** • Penyusunan masterplan penataan kawasan perkotaan dan rencana tata ruang yang mengintegrasikan potensi darn masalah perkotaan secara terpadu. • Pemenuhan layanan dasar air minum, penanganan limbah dan penyediaan ruang terbuka hijau. • Penyediaan dan peningkatan layanan pendidikan/ pelatihan tenaga kerja yang terintegrasi dengan sektor ketenagakerjaan • Penataan permukiman kumuh terpadu perkotaan
		c. **Preservasi jalan ruas Padang-Arosuka-Solok, Solok-Padang Aro,Solok-Sawahlunto-Muaro Sijunjung-Pulau Punjung-Muaro Bungo.**
		d. Preservasi jalan Muaro Sijunjung-Teluk Kuantan, Padangpanjang-Batusangkar, Bukittinggi-Danau Maninjau Lubukbasung - Padang- sawah-Simpang Ampek, Bukittinggi-Lubuksikaping
		e. Pembangunan sabo dam sebagai upaya mitigasi bencana alam gunung api, terutama pada Kab. Agam, Kab. Padang Pariaman, dan Kab. Tanah Datar
		f. **Peningkatan 6A pariwisata, Urban Rehewal, dan pembangunan pasar wisata terintegrasi pusat seni dan kebudayaan di Bukittinggi, Sawahlunto, Solok, Batusangkar, Payakumbuh dan Padang Panjang**
		g. Pengembangan kawasan terpadu Kandi di Sawahlunto
		h. Pengembangan kawasan pariwisata sejarah PDRI di Kototinggi
		i. Revitalisasi situs purbakala Gua Lida Ajer
		j. Penataan waterfront danau Singkarak, Maninjau, Diatas dan Dibawah
		k. Pembangunan Jalan Tol Padang-Bukittinggi-Pekanbaru
		l. Pembangunan Fly Ouer Sitinjau Lauik
		m. Peningkatan jalur KA Kayutanam-Padang Panjang
		n. Pengembangan kota agropolitan Bukittinggi dan Solok
		o. **Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi**

NO	FOKUS/LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD Dr. Achrnad Mochtar di Bukittinggi dan RSUD Sawahlunto {PHTC)
		p. Pembangunan TPST Regional Bukittinggi-Agam-Padang Panjang
		q. Pengembangan SPAM Regional Bukittinggi-Agam-Padang Panjang
		r. **Pengembangan SPAM perkotaan Sotok dan SPAM Perkotaan Sawahlunto**
		s. Peningkatan ketangguhan terhadap banjir di Kawasan Perkotaan Bukittinggi
		t. Kawasan Perdesaan Prioritas Kab. Agam
B.	**KAWASAN KOMODITAS UNGGULAN**	
1.	Kawasan Komoditas Unggulan Sawit dan Ekonomi Biru • Kab. Pasaman Barat	a. Pengembangan pelabuhan perikanan PPI Airbangis
		b. Pembangunan infrastruktur pengamanan pantai dan kawasan pesisir di Pasaman Barat
		c. Pengelolaan dari pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan tangkap
		d. Pengembangan input produksi, sarana, dan prasarana produksi perikanan budidaya
		e. Pengembangan kawasan berbasis komoditas unggulan perikanan budidaya dan revitalisasi tambak rakyat
		f. Peningkatan kualitas, mutu, dan daya saing hasil perikanan
		g. Peningkatan kapasitas usaha dan investasi kelautan dan perikanan
		h. Penguatan logistik dan sistem rantai dingin produk perikanan
		i. Peningkatan produktivitas perkebunan dan kualitas produksi (sawit)
		j. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung produksi pertanian (sawit)
		k. Pengendalian OPT dan DPI pada komoditas produksi industri (sawit)
		l. Pembangunan dan pengelolaa! tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian sawit
		m. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri darl silvopastura
C.	**KAWASAN SWASEMBADA PANGAN, AIR, DAN ENERGI :**	
1.	Dataran Tinggi Minangkabau • Kab. Siiunjung • Kab. Tanah Datar • Kab. Solok • Kab. Limapuluh Kota • Kab. Agam • Kab. Solok Selatan • Kab. Pasaman	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pernerintah Daerah
		b. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
		c. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
		d. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
		e. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, petemakan, dan hortikultura
		f. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain; melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistriibusi, dan konsolidasi lahan Pertanian: optimatisasi dan revitalisasi lahan pertanian; darn peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
		g. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasarana produksi, antara lain melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan

NO	FOKUS/LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas trarsportasi dan digital bagi petani: peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen
		h. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dari pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen Poktan/Gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan koperasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asulansi usaha tani; peningkatan infiastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		i. Pengembangan Kawasan Transmigrasi Muara Takung-Kamang Baru (Kab. Sijunjung)
		j. Pengembangan pusat/laboratorium riset prrtanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
		k. Konservasi sumber daya air melalui rehabilitasi hutan dan lahan pada cathment area WS Indragiri, WS Akuaman, WS Selaut-Tarusan, WS Masang-Pasaman
		l. Pembangunan infrasruktur pemantauat kualitas air di sungai dan danau, terutama pada Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah
		m. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I Batang Sinamar, D.I Batang Antokan, dan D.I Panti Rao
		n. Revitalisasi Danau Singkarak, Maninjau, Diatas, dan Dibawah
		o. Pembangunan infrastruktur PLTP Muaralaboh
		p. Pembangunan infrastruktur PLTA Masang Il
		q. Pembangunan PLTS Apung Danau Singkarak
		r. Pembangunan infrastruktur Sistem Jaringan Transmisi Listrik 275 kV Payakumbuh-Perawang
2.	Kawasan Swasembada Pangan Minangkabau Pesisir	a. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan Pernerintah Daerah
		b. Peningkatan daya guna lahan pertanian (intensifikasi)
		c. Peningkatan produktivitas peternakan/pangan hewani (termasuk pengembangan kawasan peternakan)
		d. Pengembangan dan peningkatan produktivitas hortikultura
		e. Pembangunan dan pengelolaan tampungan air, serta penyediaan air berkelanjutan untuk pertanian tanaman pangan, petemakan, dan hortikultura
		f. Pengelolaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, antara lain; melalui kebijakan tata ruang untuk perlindungan lahan pertanian; reforma agraria, redistriibusi, dan konsolidasi lahan Pertanian: optimatisasi dan revitalisasi lahan pertanian; darn peningkatan penggunaan pupuk/pestisida/pakan organik
		g. Peningkatan produktivitas melalui intensifikasi dan peningkatan prasararna produksi, antara lain

NO	FOKUS/LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
		melalui: penyediaan dan perluasan akses alsintan modern/benih dan bibit berkualitas/pupuk dan pestisida berkualitas; mitigasi OPT dan kesehatan hewan; peningkatan infrastruktur konektivitas trarsportasi dan digital bagi petani: peningkatan kualitas pascapanen melalui peningkatan prasarana pasca panen
		h. Peningkatan manajemen usaha tani, perluasan akses pasar dari pembiayaan usaha tani, perluasan akses asuransi usaha tani, serta pengendalian kepastian pasar, antara lain melalui: peningkatan literasi keuangan petani dan penguatan manajemen Poktan/Gapoktan; penguatan kelembagaan koperasi dan koperasi petani; pembiayaan dana bergulir dan kredit lunak petani; perluasan akses asulansi usaha tani; peningkatan infiastruktur logistik dan perluasan akses layanan sistem resi gudang; pengelolaan dan pengendalian penyerapan hasil panen komoditas pangan utama
		i. Pengembangan pusat/laboratorium riset pertanian skala lokal dalam rangka pengembangan varietas unggul dan budidaya lokal, peningkatan produktivitas petani, serta penguatan implementasi hasil riset pertanian
		i. Rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi kewenangan pemerintah pusat, antara lain pada D.I Batang Anai, D.I Batang Bayang dan D.I Batang Tonga
		j. Pengembangan kawasan transmigrasi Lunang Silaut (Kab. Pesisir Selatan)
D.	**KAWASAN AFIRMASI (DAERAH TERDEPAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN) :**	
1.	Kab. Kepulauan Mentawai	a. Penyediaan infrastruktur layanan dasar (air baku, air minum, dan sanitasi, infrastruktur jaringan transmisi, infrastmktur distribusi dan Iistrik perdesaan, serta rumah layak huni), serta peningkatan ketahanen air, energi, dan pargan
		b. Peningkatan ketahanan bencana
		c. Pembangunan jalan Trans Mentawai
		d. Pengembangan rintisan PSDKU (Proglam Studi Di Luar Kampus Utama) dengan program studi sesuai keunggulan dan kebutuhan wilayah
		e. Pemberdayaan aktivitas ekonomi high value unggulan: perkebunan {kelapa dan sagu), hasil hutan dan agroforestri, dan perikanan
		f. Peningkatan tipe RS dari tipe D ke tipe C, dan pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi
		g. Peningkatan 6A Pariwisata di Sipora dan Siberut
		h. Pembangunan rumah murah bersanitasi bailk bagi pekerja, MBR, Gen Z, dan milenial di kawasai perkotaan Tuapejat (PHTC)
		i. Pengembangan SPAM Perkotaan Tuapejat
		j. Percepatan transformasi digital pada kawasan afirmasi: perluasan jaringan telekomunikasi dan akses intemet cepat, pengembangan SDM TIK dan digitalisasi masyarakat, dan perluasan layanan penyiaran digital
		k. Pelaksanaan bantuan sosial adaptif sebagai salah satu upaya percepatan pengentasai kemiskinan
E.	**KAWASAN KONSERVASI/RAWAN BENCANA :**	
1.	• TN Kerinci-Seblat • Kab. Pesisir Selatan • Kab. Solok Selatan	a. Perlindungan, pemulihan, pengelolasn ekosistem dan area bemilai keanekaragaman hayati tinggi
		b. Pengurangan status keterancaman spesies tumbuhan, satwa, dan biota perairan

NO	FOKUS/LOKASI PRIORITAS	HIGHLIGHT INDIKASI INTERVENSI
	• Kab. Siiunjung • Kab. Solok • Kab. Kepulauan Mentawai	c. Pemantaatan sumber daya hayati dan jasa ekosistem berkelanjutan mendukung bioekonomi
		d. Peningkatan bioprospeksi, bioteknologi, keahanan hayati, serta akses dan pembagian keuntungan sumber daya genetik
		e. Pengembangan produk bioekonomi hutan melalui agroforestri
		f. Penguatan pengelolaan hutan lestari
		g. Peningkatan fungsi sosial kawassn hutan
		h. Perlindungan dan pengamanan hutan
		i. Peningkatan upaya pencegahan dan mitigasi
		j. Peningkatan layanan peringatan dini dan penanganan kedaruratan bencana
		k. Indikasi daerah prioritas intervensi Program Malan Bergizi Gratis, BantuanPangan, dan Penanganan Rawan Pangan (PHTC

Sumber; Perpres RI No. 12/2025 tentang RPJMN Tahun 2025-2029, 2025

3.5.5 Strategis Pembangunan Kota Sawahlunto RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2030

Dalam rangka mewujudkan Kota Sawahlunto sebagai kota wisata skala nasional yang berbasis kegiatan kepariwisataan, pertambangan, pertanian dan industri kecil dengan didukung oleh sumber daya manusia, infrastruktur yang handal dan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan serta berbasis mitigasi bencana, maka yang menjadi *Core Bussiness* Kota Sawahlunto adalah :

1. Pengembangan Pariwisata berbasis budaya, tambang, dan rekreasi;
2. Pertambangan;
3. Perkebunan rakyat yang akan dikembangkan menjadi Agrobisnis dan
4. Kegiatan Industri kecil dan kerajinan.

Strategi pembangunan Kota Sawahlunto :

1) Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota, meliputi :
   - Menetapkan Kecamatan Barangin sebagai Pusat Pelayanan Kota.
   - Menetapkan Sub Pusat Pelayanan Kota terletak di Desa Muaro Kalaban Kec. Silungkang, dan Kelurahan Kolok Nan Tuo Kec. Talawi.
   - Menetapkan Pusat Lingkungan di setiap pusat kelurahan dan pusat desa.
   - Mengembangkan sub-sub pusat kota sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan pusat-pusat pelayanan Kecamatan.
2) Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi: sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan infrastruktur perkotaan, meliputi :
   - Meningkatkan aksesibilitas Kota Sawahlunto dengan Kota sekitar, antar sub-sub pusat pelayanan kota melalui pengembangan sistem jaringan jalan, pengembangan sistem terminal dan pengembangan dan pemanfaatan jalur kereta api;
   - Mengembangkan potensi sumber-sumber daya air dan pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah yang ada;
   - Mengembangkan sistem jaringan drainase kota secara terpadu untuk seluruh wilayah kota dalam rangka penanggulangan erosi dan banjir serta peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota dilakukan dengan membangun dan memelihara saluran drainase baik saluran primer, sekunder maupun tersier terutama di sekitar kawasan pusat kota dan sub pusat kota;
   - Mengembangkan sistem jaringan pengolahan limbah kota dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota dilakukan dengan melayani pengolahan limbah rumah tangga di kawasan permukiman dengan tingkat kepadatan rendah dan sedang dengan onsite system dan Kawasan kepadatan tinggi dengan *offsite system* atau minimal dengan *onsite system* komunal;

- Mengembangkan dan meningkatkan sistem persampahan kota secara terpadu untuk seluruh wilayah kota dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota;
- Mengembangkan sistem pelayanan energi, listrik, telekomunikasi dan informasi melalui diversifikasi teknologi dan sumber perluasan jaringan pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan.

3) Pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian Kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan, meliputi :
   - Menetapkan batas-batas kawasan lindung;
   - Melestarikan hutan, taman-taman kota, dan sempadan-sempadan sungai dan mata air;
   - Melakukan konservasi didaerah rawan bencana longsor di Lembah Segar dan Kecamatan Silingkang dengan reboisasi, konservasi tanah dan air, serta upaya-upaya rehabilitasi.
   - Mengelola hutan lindung, sempadan-sempadan sungai, mata air dan taman-taman kota.
   - Mengendalikan kawasan lindung dari kegiatan alih fungsi.
4) Pelestarian dan perlindungan kawasan cagar budaya (*Heritage*) meliputi :
   - Melestarikan kawasan inti yang telah ditetapkan oleh UNESCO.
   - Memberikan insentif bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah.
   - Meningkatkan fungsi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai objek wisata budaya.
5) Pengembangan kegiatan budidaya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah, dengan menekankan pada pengembangan wisata berbasis pada sektor/subsektor unggulan yaitu industri kecil, pariwisata, perdagangan/jasa, perkebunan, dan kehutanan, meliputi :
   - Mengembangkan kegiatan industri kecil untuk mendukung pengembangan kegiatan pariwisata;
   - Mengembangkan potensi pariwisata alam, buatan dan khusus;
   - Mengembangkan kegiatan perdagangan dan jasa;
   - Mengembangkan perkebunan rakyat yang berorientasi pada agrowisata;
   - Mengembangkan kawasan hutan untuk mendukung kegiatan pariwisata.
6) Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi :
   - Mengoptimalkan ruang bagi kegiatan budidaya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
   - Mengendalikan intensitas kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk mengurangi potensi terjadinya kerugian akibat bencana;
   - Mitigasi bencana dengan membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi ejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
   - Mengatur penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana.
   - Menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya. Untuk empertahankan ketersediaan sumber air;
   - Mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan;
   - Memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya.
   - Mengembangkan kegiatan budidaya yang aman, nyaman dan berkelanjutan.
7) Pengembangan kawasan permukiman yang layak huni meliputi :
   - Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan kawasan perumahan.
   - Mengembangkan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun (Lisiba) untuk perumahan.
   - Meningkatkan prasarana permukiman yang berkualitas.

8) Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang melayani, representative dan berwawasan lingkungan meliputi :
   - Menyediakan lahan untuk pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kota Sawahlunto di Kolok.
   - Mengembangkan dan meningkatkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pusat pemerintahan secara bertahap.
   - Membangun prasarana dan sarana untuk menunjang kawasan pusat pemerintahan di Kolok.
9) Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat perkembangan kota meliputi :
   - Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan fasilitas pelayanan umum yang dikelola pemerintah melalui penyerahan sebagian dari setiap kawasan yang dikembangkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota untuk dijadikan areal pelayanan umum;
   - Mengembangkan dan membangun fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap sub pusat kota dan di pusat lingkungan.
10) Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya meliputi :
   - Menetapkan kawasan budidaya dan memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis melalui mekanisme perijinan yang tepat untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan kota;
   - Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menarik investasi dan menunjang pengembangan sumberdaya manusia, lingkungan, aspek politik, pertahanan dan keamanan, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kota Sawahlunto perlu mengembangkan ekonominya sektor tersier atau jasa mulai dari sektor akomodasi dan makan minum dan sektor jasa keuangan. Sedangkan secara spasial ekonomi Kota Sawahlunto lebih lokal dengan daerah tujuan utama Kota Padang, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Solok. Daerah tujuan lain di luar Provinsi Sumatera Barat diantaranya berinteraksi dengan Kabupaten Kampar dan Kota Pekanbaru di Provinsi Riau dan Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang di Provinsi Jawa Barat.

Gambar 3.2
Daerah Tujuan Ekspor Utama Kota Sawahlunto

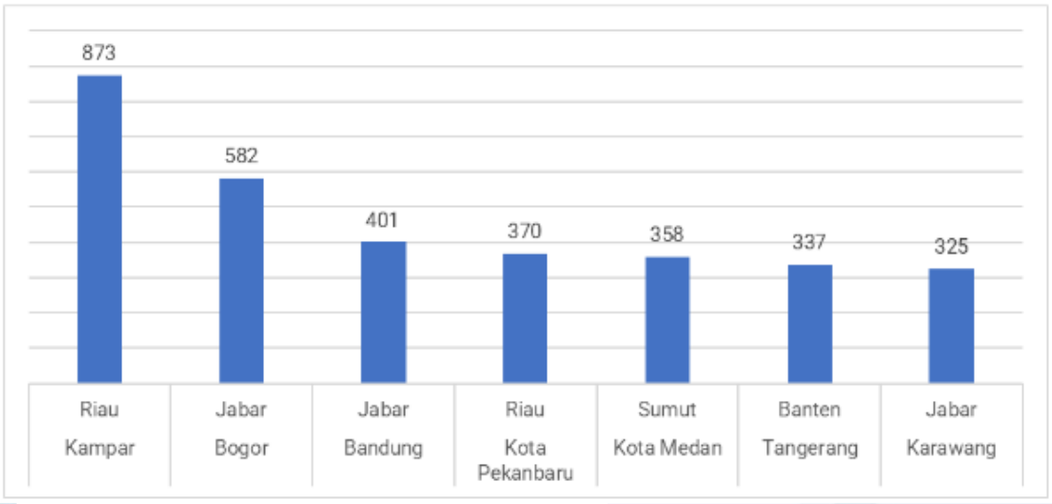

Sumber : RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025-2029

Selain itu beberapa kebijakan yang perlu didorong adalah: Pengembangan ekosistem dan destinasi kepariwisataan holistik 6A guna mewujudkan *quality* dan *sustainable tourism*, termasuk melalui urban *renewal*, revitalisasi/pengembangan Kawasan prioritas, serta pengembangan MICE *economy*; dan Pengembangan ekosistem holistik dan infrastruktur pendukung *high value economy* dan industri.

3.5.6 Arah Pembangunan Penataan Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

Penentuan tujuan penataan ruang dalam Dokumen Revisi RTRW 2025-2045, berdasarkan pada hasil analisis visi dan misi pembangungan wilayah, *core bussiness* dan isu strategis Kota Sawahlunto. Dari ketiga unsur tersebut maka tujuan penataan ruang yaitu:

"Mewujudkan Kota Wisata Skala Nasional Yang Berbasis Kegiatan Kepariwisataan, Pertambangan, Pertanian Dan Industri Kecil Dengan Di Dukung Oleh Sumber Daya Manusia, Infrastruktur Yang Handal Dan Pemanfaatan Ruang Yang Berwawasan Lingkungan Serta Berbasis Mitigasi Bencana"

A. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Kebijakan Penataan Ruang Kota Sawahlunto, terdiri dari kebijakan pengembangan struktur ruang dan pola ruang, dengan uraian sebagai berikut:

1. Struktur Ruang

Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dengan hubungan fungsional yang bersifat hirarkis. Oleh sebab itu dalam penataan ruang kota harus menentukan pusat pelayanan yang menjadi penyedia fungsi bagi daerah disekitarnya sehingga terbentukan hubungan hierarkis antar wilayah dalam suatu kota.

Gambar 3.3
Peta Rencana Struktur Ruang Kota Sawahlunto 2025-2045

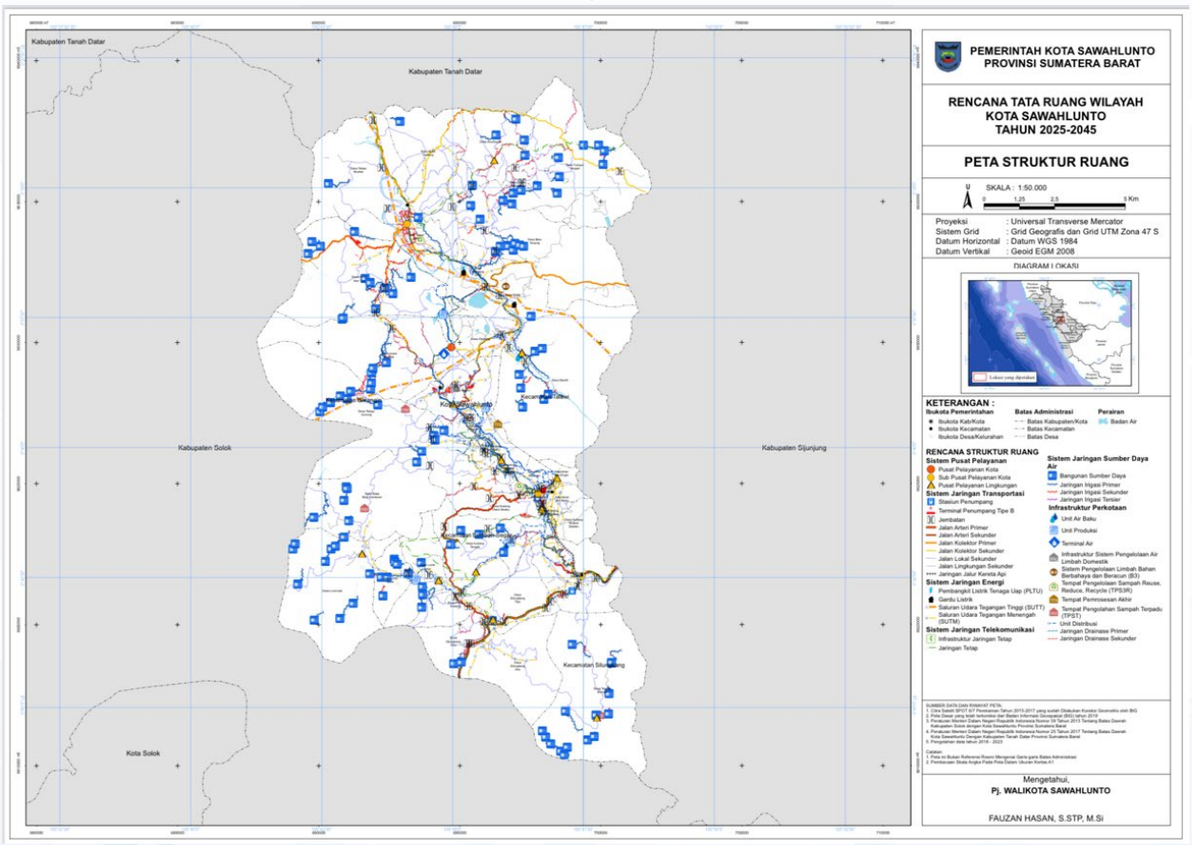

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Tabel 3.20
Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Rencana Struktur Ruang
Kota Sawahlunto 2025-2045

KEBIJAKAN	STRATEGI
Pengembangan pusat-pusat kegiatan pelayanan perkotaan sebagai satu kesatuan sistem secara terpadu, berhirarki, dan saling berhubungan untuk mendukung fungsi-fungsi kegiatan kota	1. Menetapkan Pusat Pelayanan Kota untuk masa mendatang di Kawasan Kandi 2. Menetapkan Sub Pusat Kota di Muaro Kalaban dan Kolok Nan Tuo. 3. Menetapkan Pusat Lingkungan di setiap pusat kelurahan dan pusat desa
Pengembangan sistem jaringan prasarana wilayah, yang meliputi : sistem jaringan transportasi, jaringan energi, jaringan telekomunikasi, dan sistem jaringan sumber daya air.	1. Pengembangan sistem jaringan transportasi untuk meningkatkan aksesibilitas melalui pengembangan sistem jaringan jalan, pengembangan sistem terminal dan pengembangan dan pemanfaatan jalur kereta api. 2. Peningkatan kapasitas dan mengembangkan sistem pelayanan energi, listrik, telekomunikasi dan informasi melalui diversifikasi teknologi dan sumber, perluasan jaringan pelayanan, dan peningkatan kualitas pelayanan. 3. peningkatan sistem telekomunikasi dan informasi melalui diversifikasi teknologi dan sumber, dilakukan dengan meningkatkan jaringan telekomunikasi dengan menambah dan membangun sentral-sentral telepon baru dan membangun BTS/menara bersama 4. Pengembangan sistem jaringan sumber daya air bagi penyediaan air bersih perkotaan melalui pengembangan potensi sumber-sumber daya air dan pelestarian sumber daya air permukaan dan air tanah yang ada 5. Pengembangan sistem jaringan drainase kota, secara terpadu untuk seluruh wilayah kota dalam rangka penanggulangan erosi dan banjir serta peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota. 6. Pengembangan sistem jaringan pengolahan air limbah kota dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman kota. 7. Pengembangan sistem persampahan kota secara terpadu untuk seluruh wilayah kota dalam rangka peningkatan penyehatan lingkungan permukiman

Sumber Data: Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

2. Pola Ruang

Pola Ruang adalah distribusi atau pengaturan peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang terdiri dari kawasan lindung (untuk pelestarian lingkungan) dan kawasan budidaya (untuk aktivitas manusia).

Gambar 3.4
Peta Rencana Pola Ruang Kota Sawahlunto Tahun 2025-2045

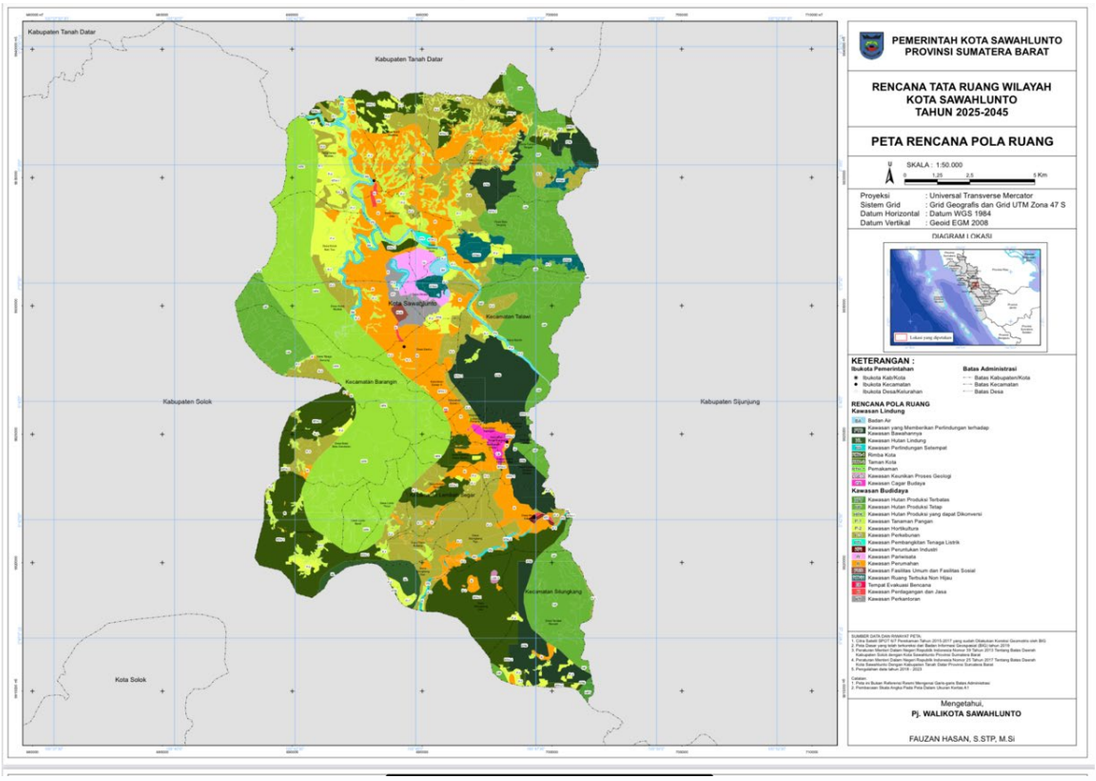

Sumber Data : Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

Dalam perwujudan rencana pola ruang yang seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah, berikut kebijakan dan strategi yang akan dilakukan:

Tabel 3.21
Kebijakan dan Strategi Pelaksanaan Rencana Pola Ruang
Kota Sawahlunto 2025-2045

KEBIJAKAN	STRATEGI
Pelestarian, perlindungan, rehabilitasi, pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung untuk mewujudkan pemanfaatan ruang yang berwawasan lingkungan	1. Menetapkan batas-batas kawasan lindung 2. Melestarikan hutan, taman-taman kota, serta sempadan-sempadan sungai dan mata air. 3. Melakukan konservasi didaerah rawan bencana longsor di Lembah Segar dan Kecamatan Silungkang dengan reboisasi, konservasi tanah dan air, serta upaya-upaya rehabilitasi 4. Mengelola hutan lindung, sempadan-sempadan sungai, mata air dan taman-taman kota. 5. Mengendalikan kawasan lindung dari kegiatan alih fungsi
Pengembangan RTH kota untuk menunjang fungsi lindung dan wisata kota	1. Membangun kawasan yang potensial sebagai jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk garis sempadan sungai dan jalur rel kereta api. 2. Membuat RTH kota meliputi hutan kota, jalur hijau kota, taman kota, taman lingkungan, zona penyangga hijau (buffer zone) dan lain-lain, untuk memenuhi proporsi ruang terbuka hijau sekurang-kurangnya 30 % (tiga puluh persen) dari luas kota;
Pelestarian dan Perlindungan Kawasan Cagar Budaya	1. Memberikan insentif bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah. 2. Meningkatkan fungsi bangunan tua, bangunan bernilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi, serta potensi sosial budaya masyarakat yang memiliki nilai sejarah sebagai objek wisata budaya
Pengembangan kegiatan budidaya secara seimbang dan serasi sesuai potensi dan daya dukung wilayah, dengan menekankan pada pengembangan wisata	1. Pengembangan potensi tambang mineral dan batubara 2. Pengembangan Industri Kecil 3. Pengembangan potensi Pariwisata 4. Pengembangan kegiatan perdagangan dan jasa

KEBIJAKAN	STRATEGI
berbasis pada sektor/subsektor unggulan yaitu pertambangan, pariwisata, perkebunan, kehutanan, industri kecil dan perdagangan/jasa	5. Pengembangan Perkebunan Rakyat Berorentasi pada Agrobisnis dan Agrowisata
Pengelolaan kawasan kehutanan, pertanian dan perkebunan agar dapat berfungsi sebagai resapan air dan ruang terbuka hijau kota.	1. Menetapkan batas-batas kawasan hutan 2. Merehabilitasi dan mengelola hutan produksi dengan penanaman yang memiliki ekonomi tinggi dan memiliki kemampuan meresapkan air dan mencegah bencana longsor. 3. Mengelola hutan dengan melibatkan masyarakat (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat/PHBM)
Pengembangan Kawasan Permukiman yang Layak Huni	1. Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan kawasan perumahan 2. Mengembangkan kawasan siap bangun (Kasiba) dan lingkungan siap bangun(Lisiba) untuk perumahan 3. Meningkatkan prasarana permukiman yang berkualitas
Pengembangan kawasan pusat pemerintahan yang melayani, representative dan berwawasan lingkungan	1. Menyediakan lahan untuk pengembangan kawasan pusat pemerintahan Kota Sawahlunto di Kawasan Kandi. 2. Menetapkan kawasan pusat pemerintahan di Kawasan Kandi sebagai kawasan strategis kota 3. Mengembangkan infrastruktur untuk mendukung pengembangan pusat pemerintahan secara bertahap 4. Membangun prasarana dan sarana perkantoran di Kawasan Kandi
Pengembangan fasilitas pelayanan umum yang memadai sesuai dengan tingkat Perkembangan kota	1. Mencadangkan dan meningkatkan persediaan lahan kota bagi pengembangan fasilitas pelayanan umum yang dikelola pemerintah melalui penyerahan sebagian dari setiap kawasan yang dikembangkan oleh pengembang kepada Pemerintah Kota untuk dijadikan areal pelayanan umum. 2. Mengembangkan dan membangun fasilitas umum sesuai dengan kebutuhan pelayanan di setiap sub pusat kota dan di pusat lingkungan
Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya	1. Menetapkan kawasan budidaya dan memanfaatkan sumberdaya alam di ruang darat dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi secara sinergis melalui mekanisme perijinan yang tepat untuk mewujudkan keseimbangan pengembangan wilayah; 2. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menarik investasi dan menunjang pengembangan sumberdaya manusia, lingkungan, aspek politik, pertahana dan keamanan, sosial budaya serta ilmu pengetahuan dan teknologi
Pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan	1. Menetapkan ketentuan-ketentuan peraturan zonasi pada masing-masing kawasan budidaya sesuai dengan karakteristiknya; 2. Mitigasi bencana dengan membatasi perkembangan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana; 3. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara kompak di kawasan perkotaan; 4. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air; 5. Mengendalikan pemanfaatan di kawasan budidaya melalui mekanisme perizinan; 6. Memberikan insentif bagi kegiatan yang sesuai dengan fungsi dan disinsentif bagi kegiatan yang mengakibatkan gangguan bagi fungsi utamanya; dan 7. Melakukan penertiban bagi kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai fungsi.

Sumber Data: Rancangan Revisi RTRW Kota Sawahlunto 2025-2045

3.5.7 Strategi dan Arah Kebijakan Pengelolaan Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto

Visi dari Rencana Pengelolaan ini adalah Warisan Tambang Batubara Ombilin Sawahlunto (WTBOS) akan dilindungi dan dilestarikan sebagai bukti luar biasa dari teknologi perintis tingkat dunia yang secara sistemik menghubungkan tambang batubara, fasilitas kereta api dan pelabuhan, yang bersama-sama membentuk ansambel (kesatuan) teknologi yang ideal untuk ekstraksi dan distribusi batubara yang merupakan sumber daya energi penting di abad ke-19 dan awal abad ke-20. Atribut atribut dan objek-objek signifikan dari kesatuan teknologi yang terdiri dari tiga bagian yang inovatif ini didukung oleh sistem yang handal terkait pengorganisasian tenaga kerja. Atribut-atribut dan objek-objek tersebut, akan ditafsirkan dan harus dapat diakses oleh generasi sekarang dan mendatang sehingga semua orang dapat memahami kejeniusan dan keunikan dari pencapaian bersejarah di wilayah geografis terpencil Sumatera Barat ini serta maknanya bagi perkembangan teknologi pertambangan di seluruh dunia.

Pelestarian WTBOS harus mendukung pembangunan yang berkelanjutan dalam bidang sosial dan ekonomi, serta memperkuat jati diri bersama yang kohesif dari komunitas keturunan dan pewaris WTBOS yang dalam sejarahnya berasal dari beragam kelompok sosial. Hal ini dapat dicapai melalui konservasi bangunan bangunan warisan bersejarah, pengembangan usaha-usaha budaya yang terkait dengan WTBOS, promosi dan edukasi untuk menciptakan pengalaman pengunjung yang baik, yang seluruhnya berlandaskan pada komunikasi agar tercipta pemahaman yang otentik dan komprehensif tentang terobosan teknologi inovatif untuk eksploitasi batubara di WTBOS.

Strategi 1 : Mendokumentasikan dan Melestarikan Sejarah Sosial Sawahlunto
Konsep : Mengenali dan memaknai Sawahlunto beragam Sejarah Sosial.
Kegiatan :

- Pengumpulan sejarah lisan Saawahlunto.
- Meneliti, mendigitalkan, dan memanfaatkan arsip untuk interpretasi
- Mengumpulkan dan memanfaatkan arsip komunitas untuk interpretasi
- Pengembangan pendidikan.

Strategi 2 : Mengembangkan Interpretasi Digital
Konsep : Menggunakan teknologi digital untuk melibatkan pengunjung.
Kegiatan :

- Pengembangan situs web dan aplikasi telepon selular.
- Pengembangan aplikasi seluler.
- Pengembangan database dan katalog online.
- Pengembangan media sosial professional.

Strategi 3 : Sawahlunto sebagai kota bersejarah yang ramah pejalan kaki (*Sawahlunto Walkable Heritage City*)
Konsep : Meningkatkan akses dan kenyamanan pejalan kaki, mengembangkan signage & menghubungkan situs.
Kegiatan :

- Meningkatkan kualitas infrastruktur untuk masyarakat local dan pengunjung
- Adaptive reuse untuk Gedung Pusat Kebudayaan (GPK) Sawahlunto sebagai pusat pengunjung
- Mengembangkan interpretasi dan penunjuk jalan baru untuk Kawasan Kota Tua Sawahlunto
- Mengembangkantur dan jalur warisan budaya
- Seni public dan industri kreatif

Strategi 4 : Jalur Sejarah Tambang Ombilin (Ombilin Mining Heritage Track)

Konsep : Mengembangkan interpretasi di situs di luar kota & dukung akses pengunjung.

Kegiatan :

- Pengembangan PLTU Salak sebagai pusat interpretasi
- Pengembangan Museum Orang Rantai dan area penjara
- Pengembangan Gedung Kompres sebagai pusat interpretasi warisan untuk Situs Tambang Sungai Durian
- Peningkatan kualitas transportasi dan akses

Strategi 5 : Susur Jalur Kereta Api Sawahlunto (Sawahlunto Heritage Railway Experience)

Konsep : Maksimalkan potensi warisan perkeretaapian dan menciptakan keterkaitan dengan Silungkang.

Kegiatan

- Pengembangan website Mak Hitam, peningkatan pelayanan dan promosi.
- Pengembangan Interpretasi 'hub' di Muara Kalaban.
- Peningkatan Koridor Jalur rel kereta api dari Sawahlunto ke Silungkang.

3.5.8 Strategi dan Arah Kebijakan Pengembangan *Geosite Potensial Geopark* Sawahlunto 2025–2029

Kawasan Geopark dikembangkan dengan pendekatan penklasteran keunikan geoheritage yang diikat oleh fasilitas pelayanan geopark berupa *information center* dan pusat kegiatan tematik pada setiap zona. Pada setiap zona dan antar zona dirancang jalur kegiatan geoedukasi dan geowisata yang menghubungkan geosite.

Gambar 3.5
Konsep Lokasi Pusat Pengembangan Informasi Geopark

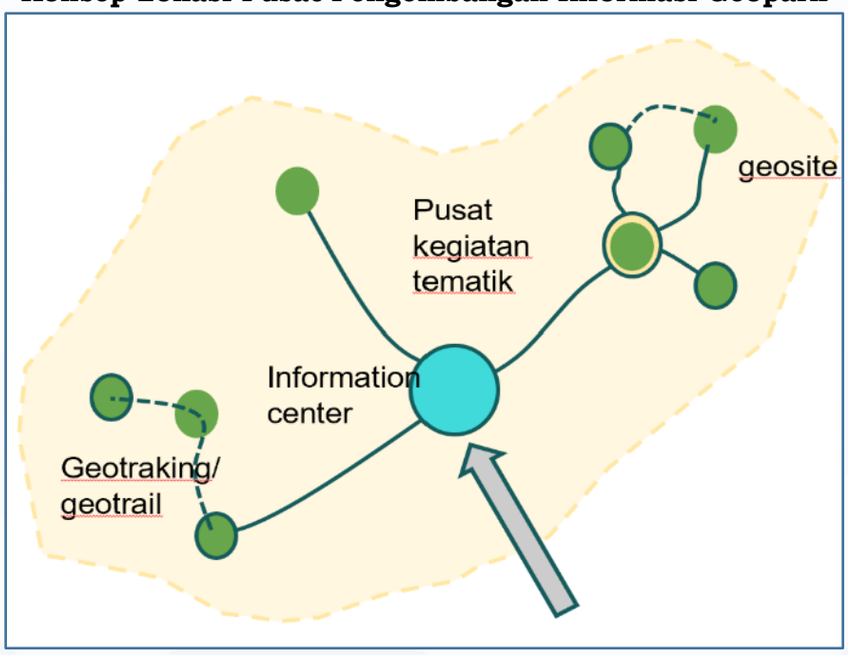

Sumber: Rencana Induk Pengembangan Geopark Nasional Sawahlunto 2023-2032

Kawasan Geopark Sawahlunto yang memiliki 22 geosite, 14 cultural diversity site and buildings serta kekayaan biodivesity dibagi atas tiga zona :

1. ***Zona cultural diversity* dan geoedukasi Sawahlunto Minning Old Town**

   Kota Tambang Sawahlunto merupakan warisan geologi dan budaya yang unik di dunia. Zona pada kawasan pusat kota dan sekitarnya ini menjadi tempat representasi geoedukasi dan wisata tambang. Geosite yang penting yaitu Museum Lubang tambang Soero, Lubang Sawah Luwung, dan Sawahlunto dan aset budaya berupa bangunan yang terkait dengan kegiatan tambang (Taman silo, Museum Kereta Api, Gedung Pusat Kebudayaan, Gedung PT. BA dan Musem Goedang Ransoem).

   Bekas area tambang yang direklamasi menjadi area wisata di Kawasan Kandi bisa menjadi objek geoedukasi tentang penanganan pasca tambang bagi siswa sekolah.

2. ***Zona geodiversity* dan *biodiversity* cekungan ombilin**

   Zona ini menceritakan tentang proses geologi pembentukan cekungan ombilin yang menghasilkan berbagai tampilan keindahan alam. Fosil gurami di Desa Tumpuak Tangah serta Kawasan bentang alam Hutan Rantih dan beberapa air terjun disekitarnya menjadi situs dan objek penting di kawasan ini. Di kawasan ini juga terdapat kekayaan fauna seperti harimau sumatera, beruang madu, tapir dan siamang. Pada zona ini dirancang jalur tracking penjelajahan hutan menghubungkan objek wisata.

3. **Zona geoedukasi dan penelitian geologi cekungan ombilin**

   Pada kawasan ini terdapat beragam geosite yang bisa menjadi objek geoedukasi dan penelitian geologi yang mengungkapkan proses geologi cekungan ombilin. Zona ini memanjang pada sisi barat kota dari arah utara ke arah selatan.

Gambar 3.6
Peta Sebaran Geopark Kota Sawahlunto

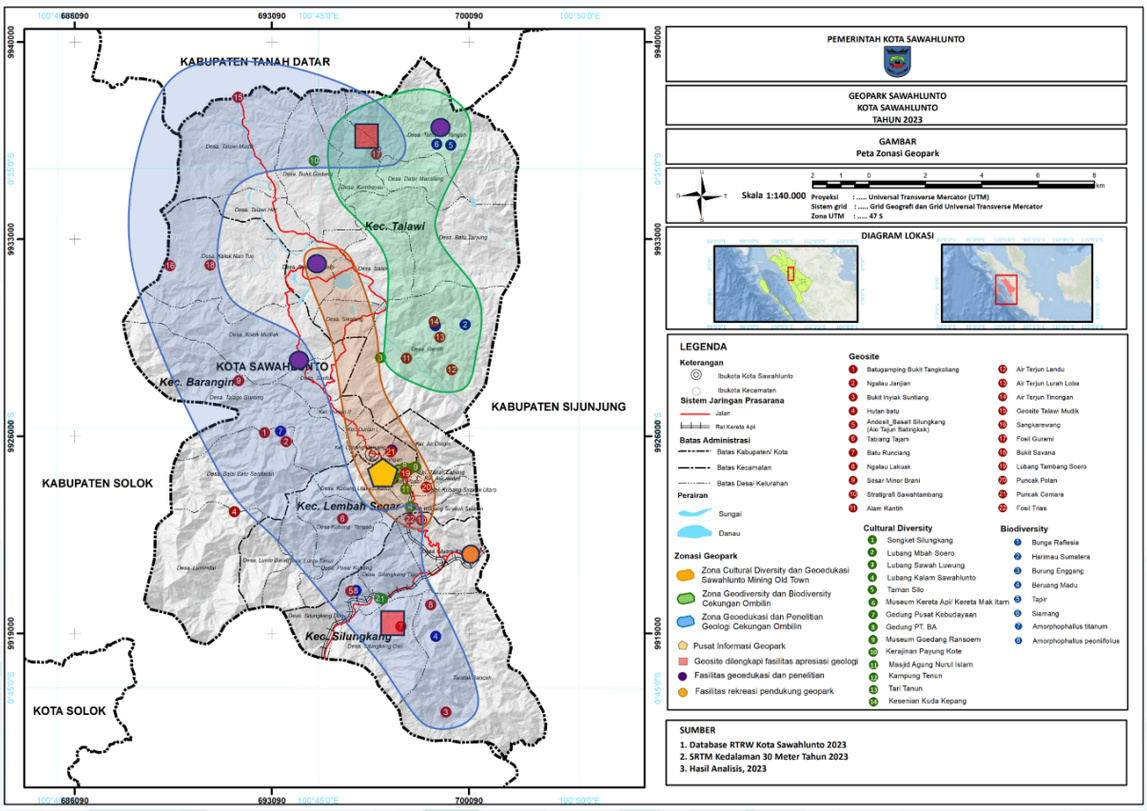

1. **Geosite Batu Runcing**

Arah pengembangan geosite Batu Runcing dalam 5 tahun ke depan Adalah menjadi ikon wisata geologi unggulan di Sawahlunto dengan daya tarik visual kekhasan fosil batu yang didukung oleh fasilitas penunjang pariwisata yang memadai. Sasaran dari pengembangan objek ini Adalah kelompok wisatawan nusantara baik lokal maupun regional dan mancanegara yang mampu mendatangkan efek *multiplier* bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan pengembangan wilayah disekitarnya.

Strategi Pengembangan :

- Konservasi formasi batuan unik sebagai warisan geologi bernilai tinggi.
- Penyediaan jalur interpretasi geologi dengan panel informasi edukatif.
- Pengembangan spot wisata fotografi dan edukasi geowisata berbasis *outdoor activity*.
- Penyediaan sarana dan prasarana wisata serta fasilitas penunjang pariwisata di sekitar Kawasan.

2. **Geosite Fosil Ikan Air Tawar Tumpuk Tangah**

Arah pengembangan geosite Fosil Ikan Air Tawar di Tumpuk Tangah ditekankan kepada wisata minat khusus, yaitu sebagai sarana penelitian dan pengabdian masyarakat (sarana Pendidikan) yang bersinergi dengan masyarakat lokal sebagai pelaku dan pengelola objek dan mampu memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat lokal. Tujuan pengembagan Adalah menjadikan geosite ini sebagai pusat pembelajaran geologi purba yang unik di Sumatera Barat.

Strategi Pengembangan:

- Penelitian lebih lanjut dan konservasi fosil ikan air tawar sebagai bukti sejarah evolusi geologi Sawahlunto.
- Pembangunan pusat interpretasi kecil (mini museum) untuk edukasi publik.
- Pengembangan paket wisata edukasi sekolah/universitas berbasis fosil.
- Penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai.

3. **Geosite Lubang Tambang Suro di Air Dingin**

Dampak yang dituju dalam pengembangan geosite Lobang Tambang Suro adalah menguatkan identitas Sawahlunto sebagai “kota tambang bersejarah warisan budaya UNESCO”.

Strategi Pengembangan:

- Revitalisasi lubang tambang sebagai wisata heritage dengan pendekatan edukatif
- Narasi interpretasi yang mengaitkan geologi dengan sejarah sosial budaya masyarakat tambang.
- Peningkatan standar keselamatan dan infrastruktur akses pengunjung.
- Memberikan pengalaman dan pengetahuan yang mendalam tentang aktivitas pertambangan bawah tanah dan kehidupan sosial budaya yang mengikuti perjalanan sejarah tambang tersebut.

4. **Geosite Puncak Cemara**

Untuk memperkuat pengelolaan dan meningkatkan nilai dari Geosite Puncak Cemara, berikut arah kebijakan dan strategi yang bisa menjadi prioritas;

Strategi Pengembangan:

- Pengembangan sebagai salah satu destinasi geowisata unggulan dengan menonjolkan bentang alam geologi Pusat Kota Sawahlunto.
- Penyediaan fasilitas trekking, area bermain, fasilitas umum, dan jalur interpretasi geologi.

- Fasilitasi kegiatan dan atraksi yang dapat meningkatkan kunjungan dan daya Tarik objek.

5. Geosite Lahan Bekas Tambang Kandi (Kebun Buah Kandi)

Rencana pengembangan Kebun Buah Kandi diharapkan menjadi contoh sukses pemanfaatan lahan pascatambang untuk ekonomi berkelanjutan.

Strategi Pengembangan:

- Rehabilitasi kawasan bekas tambang menjadi ruang hijau produktif dengan konsep agro-eduwisata.
- Pengembangan kebun buah dan eduwisata pertanian berwawasan lingkungan.
- Edukasi tentang transformasi lahan pascatambang melalui program wisata edukatif.

6. Geosite Hutan Batu di Desa BBS dan Lumindai

Upaya Menjadikan Hutan Batu BBS dan Lumindai sebagai geosite edukatif, konservatif, dan berdaya ekonomi lokal yang dikelola berkelanjutan dalam koridor Geopark Sawahlunto untuk melindungi warisan geologi, memperkuat ekonomi desa, dan menarik wisatawan edukatif serta alam.

Strategi Pengembangan:

- Konservasi kawasan hutan batu sebagai keunikan geologi bernilai tinggi.
- Pembangunan jalur interpretasi geologi serta wisata minat khusus (geotrek, penelitian lapangan).
- Pemberdayaan masyarakat desa untuk mengelola homestay, kuliner lokal, dan jasa pemandu wisata.

Dalam periode lima tahun ke depan, arah kebijakan pengembangan Geopark Sawahlunto diarahkan pada penguatan fungsi geopark sebagai pusat konservasi, edukasi, dan pembangunan ekonomi berkelanjutan. Pengembangan wilayah difokuskan pada:

1. **Konservasi dan Revitalisasi Geosite Potensial** untuk menjaga kelestarian nilai geologi dan lingkungan.
2. **Integrasi geosite dengan pengembangan wilayah** agar menjadi simpul pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pariwisata dan ekonomi kreatif.
3. **Pengembangan Infrastruktur ramah lingkungan** berupa akses jalan, fasilitas wisata, serta pusat informasi geologi di tiap geosite utama.
4. Penciptaan **rantai nilai ekonomi** dari sektor pariwisata, ekonomi kreatif, dan UMKM lokal yang berorientasi pada keberlanjutan.
5. **Peningkatan Kapasitas Masyarakat Lokal** sebagai aktor utama dalam pelestarian sekaligus pemanfaatan geopark.
6. **Penguatan Kelembagaan dan Kemitraan** dengan melibatkan pemerintah, akademisi, komunitas, dan swasta dalam konservasi serta promosi geopark ke level nasional dan global.

Dengan strategi tersebut, Geopark Sawahlunto diharapkan tidak hanya menjadi simbol konservasi warisan geologi dan sejarah tambang, tetapi juga sebagai motor penggerak pembangunan wilayah yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing internasional.

3.6 Tema dan Fokus Pembangunan Tahunan 2026-2030

Untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah Kota Sawahlunto sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Kota Tahun 2025–2029, maka arah kebijakan tahunan dijabarkan melalui penetapan tema pembangunan beserta fokus prioritasnya. Tema pembangunan tahunan dimaksud menjadi landasan dalam penyusunan RKPD setiap tahunnya, sekaligus sebagai instrumen pengendali pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah.

Tema pembangunan tahunan memberikan arah strategis bagi prioritas program dan kegiatan perangkat daerah, sementara fokus arah pembangunan tahunan menjadi penjabaran praktis yang lebih operasional sesuai dengan kebutuhan dan tantangan pada setiap tahunnya. Dengan demikian, tema dan fokus pembangunan tahunan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam kurun waktu lima tahun mendatang, pembangunan diarahkan agar tidak hanya berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga menekankan aspek inklusivitas, keadilan sosial, pelestarian lingkungan, serta penguatan nilai budaya dan keluarga. Langkah ini diharapkan dapat memberikan pondasi yang kokoh untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya mendorong peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat Kota Sawahlunto secara berkelanjutan

Tabel 3.22
Tema dan Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2026 - 2030

TAHAP I - TAHUN 2026	TAHAP II - TAHUN 2027	TAHAP III - TAHUN 2028	TAHAP IV - TAHUN 2029	TAHAP V - TAHUN 2030
Tema: **Memperkuat Fondasi Transformasi Pelayanan Publik dan Pelayanan Dasar yang Berkualitas dalam Mendukung Kota Wisata**	**Tema:** **Akselerasi Transformasi Ekonomi dan Inklusi Sosial untuk menguatkan Ketahanan Pangan dan Pariwisata**	**Tema:** **Peningkatan Konektivitas Wilayah, Daya Saing Daerah, dan Ekonomi Inklusif yang berkelanjutan**	**Tema:** **Konsolidasi Transformasi Menuju Kota Wisata yang Estetik, Futuristik,Hidup dan Menghidupi**	**Tema:** **Memantapkan Pembangunan Menuju Sawahlunto Kota Wisata yang Estetik, Futuristik,Hidup dan Menghidupi**
1. Penguatan akses dan mutu pelayanan dasar (pendidikan, kesehatan, sosial).	1. Percepatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan kehutanan	1. Peningkatan integrasi sistem transportasi dan konektivitas antar wilayah.	1. Penguatan Kawasan Perdagangan dan Industri	1. Pemantapan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan
2. Penguatan perlindungan sosial, jaminan kesehatan dan pengurangan stunting	2. Transformasi ekonomi desa berbasis BUMNag/koperasi	2. Peningkatan investasi sektor pariwisata unggulan, ekspor dan industri kecil/UMKM	2. Pengembangan sistem Smart City dan digitalisasi pelayanan publik.	2. Pemantapan Smart Governance berbasis IT
3. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.	3. Peningkatan kualitas pelestarian cagar budaya dan komunitas seni	3. Peningkatan nilai tambah sektor pariwisata berbasis warisan budaya tambang dan desa mandiri.	3. Optimalisasi PAD dan Kinerja BUMD.	3. Finalisasi Penguatan Infrastruktur penunjang terwujudnya kesejahteraan masyarakat
4. Menguatkan tata kelola pariwisata/ekonomi kreatif dan mendorong pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan ketahanan pangan, pertanian dan UMKM.	4. Penguatan IKM dan UMKM berbasis kearifan lokal	4. Penguatan kapasitas SDM untuk pasar tenaga kerja, inovasi daerah, dan teknologi tepat guna.	4. Penguatan daya saing SDM unggul dan produktif melalui pelestarian dan pemajuan kebudayaan.	4. Pemantapan nilai-nilai keagamaan dan Pelestarian budaya melalui Pengembangan komunitas seni demi mendukung terwujudnya kota wisata yang estetik dan memiliki fungsi ekonomi dan mensejahterakan
5. Penguatan sinergi pembangunan antar-perangkat daerah dan antar-sektor.	5. Pengembangan konektifitas dan infrastruktur pelayanan dasar.	5. Pengembangan infrastruktur penunjang produktivitas pertanian.	5. Sinergi Pariwisata dan Ekonomi kreatif	5. Pemantapan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan
6. Peningkatan konektifitas dan infrastruktur pelayanan dasar.	6. Penguatan ekonomi masyarakat miskin dan rentan melalui pemberdayaan lokal.	6. Peningkatan kualitas lingkungan dan pengurangan risiko bencana	6. Penguatan Keluarga dalam pembangunan ekonomi	6. Pemantapan Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat
7. Memperkuat kapasitas ASN dan reformasi birokrasi berbasis kinerja	7. Pengembangan Pariwisata berkelanjutan dan penguatan ekosistem ekraf		7. Pembangunan ekonomi hijau dan berkelanjutan berbasis potensi lokal.	7. Pemantapan Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya
			8. Peningkatan kolaborasi antar daerah dan jejaring kerja sama nasional.	

3.7 Pembangunan Rendah Karbon

Pembangunan Rendah Karbon sebagai Bentuk Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca di Kota Sawahlunto

Kota Sawahlunto merupakan salah satu daerah penghasil batubara di Indonesia. Sampai saat ini kegiatan pertambangan masih aktif dilaksanakan di Kota Sawahlunto tetapi hanya dalam bentuk tambang terbuka. Pemanfaatan potensi batubara dijadikan sebagai salah satu bahan utama pembangkit listrik yaitu Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ombilin. Akan tetapi, kegiatan pertambangan dan PLTU tersebut mengakibatkan adanya dampak lingkungan.

Kondisi lingkungan disekitar PLTU Ombilin saat ini telah mengalami perubahan lingkungan akibat adanya aktivitas pengoperasian pembangkit. Perubahan lingkungan tersebut memberikan dampak positif maupun negatif terhadap lingkungan sekitar. Dampak positif yaitu tersedianya energi listrik sebagai kebutuhan masyarakat di Sumatera Bagian Selatan dan sekitarnya, sedangkan dampak negatif yaitu timbulnya gas buang emisi dari proses pengoperasian mesin pembangkit. Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi RKL RPL Tahun 2023 semua gas emisi yang dibuang telah sesuai standar dan berada di bawah baku mutu sehingga efek rumah kaca tidak berdampak langsung di Kota Sawahlunto. Selain itu luasan kawasan hutan yang masih tinggi juga mengurangi dampak gas buang emisi. Namun, Pemerintah Kota tetap melakukan tindakan preventif dalam pengendalian emisi sebagai wujud kontribusi dalam penurunan emisi gas rumah kaca secara global, melalui Pembangunan rendah karbon.

Pembangunan Rendah Karbon merupakan respons terhadap berbagai isu global dan nasional, sebagai salah satu platform untuk mewujudkan target-target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Pembangunan Rendah Karbon mendorong pembangunan yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga pertumbuhan ekonomi yang mampu meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pembangunan rendah karbon (PRK) merupakan prioritas nasional di Indonesia, yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan sosial melalui kegiatan rendah emisi dan pelestarian sumber daya alam. Pemerintah pusat telah mengintegrasikan PRK ke dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah dan menetapkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) di berbagai sektor seperti kehutanan, pertanian, energi, transportasi, dan pengelolaan limbah. Namun, implementasi di tingkat regional dan lokal masih belum konsisten dan kurang menekankan faktor sosial-ekonomi, sehingga menjadi tantangan bagi kerangka kerja pembangunan yang komprehensif, berketahanan iklim, dan berkelanjutan.

Pembangunan rendah karbon terwujudkan dalam beberapa program kegiatan yang diampu oleh Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan dan Lingkungan Hidup, berikut program kegiatan yang diimplementasikan :

1. Program Kampung Iklim

Program Kampung Iklim (Proklim) adalah sebuah inisiatif nasional yang digagas oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim di tingkat lokal. Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak negatif perubahan iklim serta mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK). KLHK memberikan penghargaan berupa tingkatan berdasarkan nilai yang di raih dari proses inventarisasi, tingkatannya adalah sebagai berikut :

a. Pratama (berupa SK)
b. Madya (berupa SK)
c. Utama (berupa SK dan piagam)
d. Lestari (berupa SK dan piagam)

Ketentuan mengenai program kampung iklim ini dapat dilihat lebih jelas pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.84/Menlhk-Setjen/Kum.1/11/2016 dan Peraturan Dirjen PPI No. P.4/PPI/API/PPI.0/3/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Kampung Iklim.

Dinas PKP2LH telah melaksanakan kegiatan dalam mendukung program ini berupa pemberian bantuan kepada komunitas ataupun pada kegiatan yang beruhubungan dengan proklim yang telah dilakukan di Kota Sawhalunto adalah:

a. Bantuan bibit
b. Bantuan pestisida organik
c. Bantuan alat pertanian
d. Unit pengolahan pupuk organik (uppo)
e. Pelatihan di bidang pertanian maupun pengelolaan limbah

2. *Refused Derived Fuel*

RDF (Refuse Derived Fuel) adalah bahan bakar alternatif yang dihasilkan dari pengolahan sampah padat. Prosesnya melibatkan pengumpulan sampah, pemilahan, pengeringan, dan penghancuran sampah menjadi potongan-potongan kecil yang memiliki nilai kalori cukup tinggi untuk digunakan sebagai bahan bakar.

Kota Sawahlunto sedang melakukan pembangunan pengolahan sampah menjadi RDF dengan kapasitas 10 ton/hari. Saat ini, gedung pengolahan sampah telah selasai dibangunan yang berlokasi di Kayu Gadang, Desa Santur Kecamatan Barangin. Namun masih menunggu serah terima dari Kementerian KLHK kepada Pemerintah Kota Sawahlunto, sebelum dapat dioperasikan.

3. Bank Sampah

Terdapat 10 Bank Sampah di Kota Sawahlunto hingga tahun 2024:

No	Nama	Alamat
1.	Bank Sampah Sekolah SDN 19 Santur	Desa Santur
2.	Bank Induk Sampah Cemara	Kelurahan Lubang Panjang
3.	Bank Sampah Berkah SDN 13 Pasar remaja	Kelurahan Pasar
4.	Bank Sampah Kampung Teleng	Kelurahan Pasar
5	Bank Sampah Rusunawa Mandiri	Kelurahan Durian II
6	Bank Sampah Talago Biru	Desa Talago Gunung
7	Bank Sampah Sijantang Koto	Desa Sijantang Koto
8	Bank Sampah MIN Muaro Kalaban	MIN Muaro Kalaban
9	Bank Sampah Induk Emas Bersih	Dusun Kayu Gadang, Desa Santur
10	Bank Sampah Sikalang	Desa Sikalang

4. Pemulihan Lahan Bekas Tambang

Program pemulihan lahan bekas tambang berfokus di Kawasan Kandi, Kota Sawahlunto, dengan beberapa kegiatan, di antaranya:

- Kebun Buah Kandi

Lahan bekas tambang batu bara seluas 3 hektare dibudidayakan dengan berbagai tanaman buah-buahan. Kebun ini dikelola oleh UPTD Pembibitan Tanaman Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Sawahlunto.

- Taman Kehati Emil Salim

Lahan bekas reklamasi tambang seluas 24,28 hektar ditanami dengan berbagai tumbuhan lokal, endemik, dan langka. Taman ini menjadi kawasan pencadangan sumber daya alam yang melengkapi kawasan wisata Kandis.

- Reklamasi

Kegiatan yang dilakukan untuk menata, memulihkan, dan memperbaiki kualitas lingkungan dan ekosistem agar dapat berfungsi kembali.

5. Inovasi Smart Proklim

SMART PROKLIM adalah inovasi dari Program Kampung Iklim (ProKlim) yang mengintegrasikan teknologi informasi (IT) untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi program dalam menangani perubahan iklim di tingkat lokal. SMART PROKLIM memanfaatkan teknologi digital untuk berbagai tujuan, seperti pemantauan, pelaporan, dan penyebaran informasi.

Smart proklim merupakan pengembangan program kampung iklim yang dicanangkan oleh KLHK, sehingga tidak hanya berupa inventarisasi data terkait kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim serta kelembagaan dan dukungan terhadap proklim tetapi merupakan suatu langkah pembinaan dari Dinas PKP2LH untuk membentuk kampung-kampung iklim yang tangguh dan berketahanan iklim di Kota Sawahlunto sehingga kampung-kampung iklim ini nantinya akan berkembang sesuai dengan karakteristik masing-masing wilayah dengan bantuan teknologi dan informasi .

Sebagai contoh, pada kampung iklim dengan potensi kebencanaan yang tinggi maka dapat dikembangkan kegiatan maupun mitigasi bencana serta pembentukan komunitas tangguh bencana (jika belum ada) serta dapat mengembangkan IT untuk antisipasi bencana/peringatan bencana dan program-program pencegahan bencana terutama bencana yang terkait perubahan iklim.

Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kapasitas dan edukasi terkait PRK melalui pelatihan intensif untuk memperkuat pemahaman perencanaan, penegakan, dan pemantauan program
2. Membentuk kelompok kerja (Pokja) PRK melalui penyusunan Keputusan Walikota
3. Melakukan inventarisasi dan perhitungan baseline emisi gas rumah kaca (GRK) di tingkat kota
4. Membentuk forum corporate social responsibility (CSR) dan mekanisme kemitraan publik-swasta (public-private partnership atau PPP), serta pengembangan skema insentif fiskal dan nonfiskal sebagai sarana pendanaan inovatif untuk inisiatif PRK
5. Mengembangkan pariwisata hijau dan inklusif melalui pemugaran destinasi wisata, penerapan konsep zero waste tourism, promosi agroeduwisata, dan integrasi paket wisata yang meningkatkan daya tarik serta aksesibilitas antar objek wisata

BAB IV
PROGRAM PERANGKAT DAERAH DAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Program Perangkat Daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah bagian penting dari perencanaan pembangunan daerah. Program ini dirancang untuk mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan oleh kepala daerah. Dalam RPJMD, program-program ini mencakup berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

Penyusunan program Perangkat Daerah dilakukan dengan ketentuan :

1. Mengacu visi, misi, tujuan, dan sasaran RPJMD
2. Mampu mengatasi permasalahan serta isu strategis daerah
3. Memperhatikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM)
4. Sebagai operasionalisasi tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Gambaran program Perangkat Daerah Kota Sawahlunto beserta indikasi alokasi anggaran belanja langsung program disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Program Perangkat Daerah

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.01 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					89.460.584.464		90.148.117.997		94.527.111.179		94.106.019.079		101.796.590.156	
1.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					79.498.636.614		58.128.989.430		52.192.986.107		50.848.966.741		51.311.122.508	
Tercapainya penunjang urusan pemerintahan kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	79.498.636.614	100	58.128.989.430	100	52.192.986.107	100	50.848.966.741	100	51.311.122.508	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN					9.266.923.800		31.360.390.455		41.646.172.769		42.562.317.458		49.988.359.751	
Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	67,35	69,39	69,59	9.266.923.800	69,79	31.360.390.455	69,99	41.646.172.769	70,19	42.562.317.458	70,39	49.988.359.751	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	51,28	60,16	60,31		60,46		60,61		60,76		60,91		
	Rata-rata kompetensi Literasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	73,78	74,72	74,92		75,12		75,32		75,52		75,72		
	Rata-rata kompetensi Numerasi SMP berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)	64,6	65,01	65,16		65,31		65,46		65,61		65,76		
	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal (%)	70	71	72		72,5		73		73,5		73,75		
	Lulusan SD yang hafal alqur'an juz 30 (%)	32	33	34		35		36		37		38		
1.01.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM					250.000.000		230.516.263		231.325.384		234.619.534		136.819.182	
Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (%)	17,48	17,58	18,58	250.000.000	20	230.516.263	20	231.325.384	25	234.619.534	25	136.819.182	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN					217.832.041		202.065.052		229.776.590		229.823.254		138.071.931	
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat	90	92	94	217.832.041	96	202.065.052	96	229.776.590	98	229.823.254	100	138.071.931	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
tenaga pendidikan	Pendidik (%)													
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN					118.128.006		117.437.865		117.900.219		117.309.767		108.409.591	
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (%)	100	100	100	118.128.006	100	117.437.865	100	117.900.219	100	117.309.767	100	108.409.591	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA					109.064.003		108.718.932		108.950.110		112.982.325		113.807.193	
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra(%)	0	10	10	109.064.003	15	108.718.932	16	108.950.110	16	112.982.325	18	113.807.193	1.01.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PENDIDIKAN
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					146.999.083.766		146.825.904.202		158.645.734.504		160.374.416.372		177.184.000.081	
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					116.296.763.248		116.240.510.247		125.065.445.655		126.761.815.539		141.306.791.728	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	42.560.796.543	100	28.537.930.529	100	29.107.803.056	100	29.436.531.609	100	29.889.141.411	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD RSUD)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	68.925.771.855	100	82.844.157.790	100	90.721.040.493	100	92.008.221.614	100	105.480.009.002	1.02.2.14.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas Kolok)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	460.290.019	100	464.904.893	100	501.093.149	100	508.792.428	100	568.175.951	1.02.2.14.0.00.01.0002 - UPTD PUSKESMAS KOLOK
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas Sungai Durian)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	816.429.204	100	824.614.734	100	888.802.849	100	902.459.274	100	1.007.789.482	1.02.2.14.0.00.01.0003 - UPTD PUSKESMAS SUNGAI DURIAN
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Puskesmas Silungkang)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	893.932.776	100	902.895.358	100	973.176.847	100	988.129.675	100	1.103.458.872	1.02.2.14.0.00.01.0004 - UPTD PUSKESMAS SILUNGKANG
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Talawi)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	1.642.901.324	100	1.659.373.075	100	1.788.538.884	100	1.816.019.723	100	2.027.975.805	1.02.2.14.0.00.01.0005 - UPTD PUSKESMAS TALAWI
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan	Persentase ketercapaian penunjang urusan	100	100	100	633.192.224	100	639.540.617	100	689.322.540	100	699.913.957	100	781.604.160	1.02.2.14.0.00.01.0006 - UPTD PUSKESMAS KAMPUNG TELENG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
daerah kabupaten/kota (UPTD Kampung Teleng)	pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)													
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (UPTD Lunto)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	363.449.303	100	367.093.251	100	395.667.837	100	401.747.259	100	448.637.045	1.02.2.14.0.00.01.0007 - UPTD PUSKESMAS LUNTO
1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT					28.807.608.571		28.668.672.027		30.447.445.469		30.426.187.128		32.740.351.429	
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	94	95	95	14.270.754.528	95	13.919.022.418	95	14.802.217.250	95	14.501.926.985	95	14.912.288.313	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134		134		134		134		0		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD RSUD)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%)	94	95	95	13.867.924.772	95	14.041.840.503	95	14.845.994.351	95	15.074.102.546	95	16.833.470.949	1.02.2.14.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134		134		134		134		0		
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	94	95	95	668.929.271	95	707.809.106	95	799.233.868	95	850.157.597	95	994.592.167	1.02.2.14.0.00.01.0008 - UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	268	134	134		134		134		134		0		1.02.2.14.0.00.01.0008 - UPTD INSTALASI FARMASI KOTA
1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN					1.531.009.571		1.555.731.588		2.753.998.799		2.795.664.779		2.821.269.419	
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	0	0	35	307.436.192	36	312.371.135	37	605.474.917	38	614.128.902	39	635.116.374	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (UPTD RSUD)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (%)	0	0	35	1.223.573.379	36	1.243.360.453	37	2.148.523.882	38	2.181.535.877	39	2.186.153.045	1.02.2.14.0.00.01.0001 - RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN					146.758.233		95.330.626		100.289.894		109.450.752		113.129.181	
Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman (%)	0	0	55	146.758.233	56	95.330.626	57	100.289.894	58	109.450.752	59	113.129.181	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN					216.944.143		265.659.714		278.554.687		281.298.174		202.458.324	
Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (%)	0	0	65	216.944.143	66	265.659.714	67	278.554.687	68	281.298.174	69	202.458.324	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
1.03 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					32.696.525.600		37.852.282.352		39.188.428.887		38.007.087.007		42.505.741.238	
1.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.092.159.781		15.183.977.365		11.940.109.304		11.984.320.847		13.217.662.765	
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	10.517.389.040	100	10.606.537.896	100	11.215.150.424	100	11.270.292.952	100	12.453.664.747	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota (UPTD Alat Berat)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	1.574.770.741	100	4.577.439.469	100	724.958.880	100	714.027.895	100	763.998.018	1.03.2.15.2.10.01.0001 - UPTD ALAT BERAT
1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)					2.812.800.624		2.530.975.787		3.769.024.119		3.490.623.223		3.209.150.897	
Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (%)	0	20	20,66	2.812.800.624	22,03	2.530.975.787	23,41	3.769.024.119	24,79	3.490.623.223	26,17	3.209.150.897	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (%)	44,11	45	45,32		46,74		47,7		48,91		51,03		1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)	0,11	0,149	0,151		0,154		0,156		0,159		0,161		1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM					1.178.320.406		1.220.650.525		1.842.516.445		1.884.781.373		2.564.815.219	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Akses Rumah Tangga terhadap Sumber Air Minum Jaringan Perpipaan (%)	49,67	50	52,5	1.178.320.406	55	1.220.650.525	57,5	1.842.516.445	60	1.884.781.373	62,5	2.564.815.219	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH					1.106.400.312		1.071.893.232		1.184.512.059		1.125.134.865		1.380.719.311	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))	8,19	15,95	18,9	1.106.400.312	21,9	1.071.893.232	24,91	1.184.512.059	27,91	1.125.134.865	32,91	1.380.719.311	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE					2.266.000.780		2.266.922.404		2.416.529.600		2.423.367.402		2.969.390.667	
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (%)	46,22	46,95	47,45	2.266.000.780	48,81	2.266.922.404	49,38	2.416.529.600	50,62	2.423.367.402	52	2.969.390.667	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG					2.719.200.936		3.290.058.343		3.583.037.275		3.115.758.089		3.497.822.253	
Meningkatnya kualitas bangunan gedung	Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (%)	91,01	91,63	92,13	2.719.200.936	93,25	3.290.058.343	94,37	3.583.037.275	95,49	3.115.758.089	96,61	3.497.822.253	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA					2.266.000.780		2.266.922.404		2.416.529.600		2.423.367.402		2.461.438.621	
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (%)	80,13	80,71	81,71	2.266.000.780	82,9	2.266.922.404	83,6	2.416.529.600	84,8	2.423.367.402	87	2.461.438.621	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN					7.438.401.872		9.103.252.625		11.055.098.668		10.654.883.580		12.345.754.484	
Meningkatnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)	55,62	55,92	57,47	7.438.401.872	59,02	9.103.252.625	60,57	11.055.098.668	62,12	10.654.883.580	63,67	12.345.754.484	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.11 - PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI					235.960.047		339.502.917		352.151.864		305.787.904		374.891.113	
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi	Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli (%)	27,1	28	29	235.960.047	30	339.502.917	32	352.151.864	33	305.787.904	35	374.891.113	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG					581.280.062		578.126.750		628.919.953		599.062.322		484.095.908	
Persentase Penyelesaian Kasus Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Persentase pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW / RDTR) (%)	75	77	80	581.280.062	83	578.126.750	85	628.919.953	88	599.062.322	90	484.095.908	1.03.2.15.2.10.01.0000 - DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
1.04 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					10.026.055.536		14.087.440.810		15.772.357.377		16.265.330.681		18.674.959.324	
1.04.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					6.331.290.402		10.525.279.054		11.884.740.881		12.641.855.386		14.789.691.514	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	6.331.290.402	100	10.525.279.054	100	11.884.740.881	100	12.641.855.386	100	14.789.691.514	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN					567.092.126		566.195.157		689.329.769		589.469.761		528.022.986	
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)	16,67	33,33	50	289.437.665	66,67	283.533.525	83,33	338.399.808	91,67	282.185.299	100	243.760.943	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)	Persentase hunian rusunawa yang dihuni MBR (%)	70	82	83	277.654.461	84	282.661.632	85	350.929.961	86	307.284.462	87	284.262.043	1.04.2.10.2.11.01.0001 - UPTD RUSUNAWA
1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN					1.006.400.312		1.015.487.894		1.048.711.621		926.072.543		994.117.904	
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)	0	10	20	1.006.400.312	40	1.015.487.894	60	1.048.711.621	80	926.072.543	100	994.117.904	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					290.344.066		201.816.511		305.852.522		307.717.206		430.119.885	
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Luas kawasan permukiman rawan kumuh yang ditangani (%)	-	20	35	290.344.066	50	201.816.511	70	305.852.522	90	307.717.206	100	430.119.885	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)					1.830.928.630		1.778.662.194		1.843.722.584		1.800.215.785		1.933.007.035	
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)	1.237	1.237	1.353	1.830.928.630	1.469	1.778.662.194	1.585	1.843.722.584	1.707	1.800.215.785	1.820	1.933.007.035	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (%)	84	85	86		87		88		89		90		
1.05 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					14.811.582.228		15.789.419.571		17.398.095.435		18.315.822.816		20.981.709.971	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
1.05.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					13.634.394.823		14.426.859.805		16.068.797.877		16.867.731.611		19.482.342.642	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/ kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	9.556.173.931	100	10.111.602.558	100	11.417.676.262	100	12.145.161.251	100	14.208.521.208	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	4.078.220.892	100	4.315.257.247	100	4.651.121.615	100	4.722.570.360	100	5.273.821.434	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					139.359.048		151.599.564		171.394.599		209.937.919		192.950.922	
Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	100	100	100	27.192.009	100	30.952.210	100	42.513.021	100	45.099.162	100	36.819.182	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (%)	100	100	100	22.660.008	100	25.436.613	100	24.165.296	100	43.454.734	100	24.852.948	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (%)	100	100	100	48.719.017	100	54.929.274	100	62.650.767	100	74.407.838	100	85.254.815	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	0	35	40.788.014	50	40.281.467	65	42.065.515	80	46.976.185	95	46.023.977	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.05.03 - PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					815.760.281		984.703.909		905.509.867		978.939.522		1.028.431.586	
Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana (%)	100	100	100	453.200.156	100	535.946.616	100	497.505.482	100	532.744.179	100	560.239.770	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase penanganan tanggap darurat bencana (%)	100	100	100	271.920.094	100	311.567.970	100	293.503.289	100	309.646.507	100	326.143.862	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Meningkatnya penanganan bencana pada saat pasca bencana	Persentase Penanganan Pasca Bencana (%)	100	100	100	90.640.031	100	137.189.323	100	114.501.096	100	136.548.836	100	142.047.954	1.05.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN					222.068.076		226.256.293		252.393.092		259.213.764		277.984.821	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran (%)	100	100	100	9.064.003	100	8.718.932	100	8.950.110	100	8.654.884	100	9.204.795	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (%)	100	100	100	213.004.073	100	217.537.361	100	243.442.982	100	250.558.880	100	268.780.026	1.05.0.00.0.00.01.0000 - SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
1.06 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL					6.633.550.810		8.446.665.273		9.641.131.977		10.097.487.344		11.705.347.195	
1.06.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.406.755.356		5.721.009.442		6.459.968.470		6.871.569.743		8.038.991.201	
Terselenggaranya urusean pemerintahan daerah yang berjalan lancar dan tertib	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	5.406.755.356	100	5.721.009.442	100	6.459.968.470	100	6.871.569.743	100	8.038.991.201	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL					272.656.757		845.364.660		954.556.902		915.377.142		1.187.881.113	
Meningkatnya pemberdayaan sosial	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial (%)	100	100	100	272.656.757	100	845.364.660	100	954.556.902	100	915.377.142	100	1.187.881.113	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	76	76	76		81		87		93		100		
	persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.03 - PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN					0		47.954.128		54.148.163		57.598.250		67.383.705	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korbna tindak kekerasan	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani (%)	0	0	0	0	100	47.954.128	100	54.148.163	100	57.598.250	100	67.383.705	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL					589.559.034		1.028.801.117		1.309.803.368		1.313.682.164		1.422.777.031	
Meningkatnya rehabilitasi sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	71	71	75	589.559.034	85	1.028.801.117	95	1.309.803.368	100	1.313.682.164	100	1.422.777.031	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	60	60	66		73		80		88		97		
	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)	0	45	51		56		61		67		74		
1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL					171.595.404		394.955.513		400.304.204		439.927.815		506.149.724	
Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar (%)	100	100	100	171.595.404	100	394.955.513	100	400.304.204	100	439.927.815	100	506.149.724	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (%)	50	50	54		56		58		60		62		
	persentase daerah yang melalsanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)	2,6	2,6	2,7		2,97		3,2		3,5		3,8		
1.06.06 - PROGRAM PENANGANAN BENCANA					181.280.062		375.033.489		424.470.830		459.038.637		435.025.288	
Meningkatnya perlindungan sosiaal korban bencana	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada	100	100	100	181.280.062	100	375.033.489	100	424.470.830	100	459.038.637	100	435.025.288	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana (%)													PERLINDUNGAN ANAK
	persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (%)	100	100	100		100		100		100		100		
	persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (%)	100	100	100		100		100		100		100		
1.06.07 - PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN					11.704.197		33.546.924		37.880.040		40.293.593		47.139.133	
Meningkatnya Tata Kelola Taman Makam Pahlawan	persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik (%)	100	100	100	11.704.197	100	33.546.924	100	37.880.040	100	40.293.593	100	47.139.133	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA					1.659.618.609		2.222.086.712		2.444.377.736		2.479.624.146		2.859.341.721	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA					90.640.031		104.627.188		125.301.535		129.823.254		138.071.931	
Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	100	100	100	90.640.031	100	104.627.188	100	125.301.535	100	129.823.254	100	138.071.931	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA					725.120.250		984.703.909		995.010.963		952.037.194		1.104.575.448	
Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja (%)	26,78	27	27,28	725.120.250	27,78	984.703.909	29,78	995.010.963	33	952.037.194	35	1.104.575.448	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA					421.476.145		549.292.736		716.008.770		739.523.707		972.358.664	
Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (%)	43,32	44	45	421.476.145	47	549.292.736	50	716.008.770	55	739.523.707	65	972.358.664	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) (%)	-	55,2	55,7		56,2		56,7		57,2		57,7		
	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (%)	-	74,18	74,66		75,14		75,61		76,09		76,57		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL					422.382.183		583.462.879		608.056.468		658.239.991		644.335.678	
Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)	91	91	91,2	422.382.183	91,48	583.462.879	91,66	608.056.468	91,85	658.239.991	92	644.335.678	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.08 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					852.261.749		1.152.668.546		1.313.383.232		1.383.338.117		1.791.241.111	
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN					176.600.078		209.770.639		270.740.816		287.991.251		336.918.524	
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (%)	8,49	8,49	8,5	176.600.078	8,51	209.770.639	8,52	270.740.816	8,53	287.991.251	8,54	336.918.524	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN					117.832.041		115.089.907		120.826.480		121.168.370		231.628.574	
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	117.832.041	100	115.089.907	100	120.826.480	100	121.168.370	100	231.628.574	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA					244.432.119		364.451.371		411.526.041		437.746.702		512.116.156	
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)	100	100	100	244.432.119	100	364.451.371	100	411.526.041	100	437.746.702	100	512.116.156	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)					156.108.030		191.112.843		202.881.510		209.436.675		328.029.039	
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif	persentase desa/kelurahan ramah anak (%)	100	100	100	156.108.030	100	191.112.843	100	202.881.510	100	209.436.675	100	328.029.039	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK					157.289.481		272.243.786		307.408.385		326.995.119		382.548.818	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)	100	100	100	157.289.481	100	272.243.786	100	307.408.385	100	326.995.119	100	382.548.818	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN					12.486.883.398		12.273.790.793		12.787.624.735		12.627.594.294		13.611.878.244	
2.09.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.015.425.756		11.733.067.225		12.205.376.380		11.983.119.061		12.852.837.340	
Peningkatan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, serta peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	12.015.425.756	100	11.733.067.225	100	12.205.376.380	100	11.983.119.061	100	12.852.837.340	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN					159.064.003		213.078.398		213.425.164		215.146.046		316.108.392	
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Ketersedian cadangan pangan (%)	101,89	100	100	159.064.003	100	213.078.398	100	213.425.164	100	215.146.046	100	316.108.392	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT					134.443.212		147.082.235		183.976.151		195.203.719		201.252.749	
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	91,1	91,2	91,2	134.443.212	91,25	147.082.235	91,3	183.976.151	91,35	195.203.719	91,4	201.252.749	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN					100.305.217		102.313.594		105.490.680		155.391.255		160.751.650	
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang ditangani (%)	2,7	2,7	2,7	100.305.217	5,4	102.313.594	8,1	105.490.680	10,8	155.391.255	13,5	160.751.650	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN					77.645.210		78.249.341		79.356.360		78.734.213		80.928.113	
Menigkatnya pengawasan dan mutu dan kemanan pangan	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang aman dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia /Berbahaya dan Residu Pestisida (%)	96,3	96,3	96,5	77.645.210	96,7	78.249.341	96,8	79.356.360	96,9	78.734.213	97	80.928.113	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.10 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN					344.322.496		1.178.069.209		1.296.716.006		1.267.002.767		1.927.320.718	
2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN					81.928.857		52.313.594		62.650.767		69.239.069		73.638.363	
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (%)	-	-	100	81.928.857	100	52.313.594	100	62.650.767	100	69.239.069	100	73.638.363	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN					0		770.870.100		851.002.100		796.672.680		1.270.648.211	
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (%)	-	-	-	0	100	770.870.100	100	851.002.100	100	796.672.680	100	1.270.648.211	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE					80.817.611		82.313.594		82.650.767		89.239.069		82.843.159	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Ha)	1	1	1	80.817.611	1	82.313.594	1	82.650.767	1	89.239.069	1	82.843.159	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.07 - PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT					60.331.999		111.032.526		111.600.877		107.893.952		192.047.954	
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (%)	-	-	14,29	60.331.999	29,18	111.032.526	43,77	111.600.877	55,41	107.893.952	70	192.047.954	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG					77.192.009		60.516.263		65.800.439		68.946.976		106.023.977	
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (%)	0	30	30	77.192.009	35	60.516.263	40	65.800.439	45	68.946.976	50	106.023.977	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH					44.052.020		101.023.132		123.011.056		135.011.021		202.119.054	
Meningkatnya tertib pertanahan dar kepastian	Persentase bidang tanah yang sudah	-	12,84	12,84	44.052.020	13,34	101.023.132	13,84	123.011.056	14,34	135.011.021	14,84	202.119.054	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
hukum bagi pemegang hak atas tanah	terdaftar / bersertifikat (%)													KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP					3.062.352.990		3.110.803.967		3.201.935.303		3.275.173.904		3.875.436.640	
2.11.02 - PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP					181.280.062		217.973.308		223.752.741		216.372.090		230.119.885	
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRF	Persentase Rekomedasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (%)	100	100	100	181.280.062	100	217.973.308	100	223.752.741	100	216.372.090	100	230.119.885	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.03 - PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					552.904.190		387.189.323		307.401.316		329.823.254		306.481.522	
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	Nilai Indeks Udara Model EU (Indeks)	0,22	0,22	0,21	22.660.008	0,2	146.156.797	0,19	106.850.329	0,18	110.292.093	0,18	106.819.182	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
	Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)	7,14	7,14	14,29		21,43		28,57		35,71		42,86		
	Tutupan Lahan (Hektar)	0,19	0,19	0,21		0,22		0,24		0,26		0,28		
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan sebagai dasar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	Persentase sampel uji kualitas lingkungan yang dianalisis tepat waktu (%)	100	100	100	530.244.182	100	241.032.526	100	200.550.987	100	219.531.161	100	199.662.340	1.04.2.10.2.11.01.0002 - UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)					634.480.218		697.514.586		705.509.867		722.213.940		920.479.540	
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	Persentase RTH (%)	16,5	16,5	17,17	634.480.218	17,84	697.514.586	18,51	705.509.867	19,18	722.213.940	19,88	920.479.540	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					63.448.022		169.751.459		170.550.987		182.221.394		192.047.954	
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Persentase Limbah B3 yang Terkelola (%)	100	100	100	63.448.022	100	169.751.459	100	170.550.987	100	182.221.394	100	192.047.954	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.11.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)					57.192.009		54.875.729		60.275.493		63.274.418		60.626.375	
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)	78,26	78,26	80	57.192.009	82	54.875.729	85	60.275.493	87	63.274.418	90	60.626.375	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH					77.192.009		64.875.729		74.750.548		71.929.301		79.831.170	
Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	-	-	30	77.192.009	40	64.875.729	50	74.750.548	60	71.929.301	65	79.831.170	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					77.192.009		80.516.263		85.800.439		88.946.976		86.023.977	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	0	0	30	77.192.009	40	80.516.263	50	85.800.439	60	88.946.976	70	86.023.977	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					72.512.025		74.110.925		80.550.987		82.221.394		92.047.954	
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (%)	77	79	80	72.512.025	82	74.110.925	84	80.550.987	86	82.221.394	88	92.047.954	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP					77.192.009		56.156.797		61.325.384		60.292.093		66.819.182	
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup	Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan	100	100	100	77.192.009	100	56.156.797	100	61.325.384	100	60.292.093	100	66.819.182	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	Hidup (%)													LINGKUNGAN HIDUP
2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					1.268.960.437		1.307.839.848		1.432.017.541		1.457.879.044		1.840.959.081	
Meningkatnya tata kelola persampahan	Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)	73,02	73,46	74,56	1.268.960.437	75,66	1.307.839.848	76,76	1.432.017.541	77,86	1.457.879.044	78,96	1.840.959.081	1.04.2.10.2.11.01.0000 - DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2.12 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					4.900.777.397		5.001.876.697		5.355.562.686		5.467.498.277		6.078.197.323	
2.12.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.264.882.090		4.267.878.813		4.612.137.808		4.653.175.579		5.200.996.056	
Persentase ketercapaia n penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	94,35	0	100	4.264.882.090	100	4.267.878.813	100	4.612.137.808	100	4.653.175.579	100	5.200.996.056	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.02 - PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					293.821.684		255.306.032		256.868.914		303.613.316		350.518.609	
Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk	Persentase terselenggaranya pendaftaran penduduk (%)	95,91	100	100	293.821.684	100	255.306.032	100	256.868.914	100	303.613.316	100	350.518.609	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.03 - PROGRAM PENCATATAN SIPIL					196.951.536		229.872.293		236.206.688		258.680.111		267.010.911	
Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil	Persentase terselenggaranya pencatatan sipil (%)	35,47	100	100	196.951.536	100	229.872.293	100	236.206.688	100	258.680.111	100	267.010.911	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.04 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					111.058.084		212.182.964		213.563.891		214.046.876		216.295.249	
Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (%)	100	100	100	111.058.084	100	212.182.964	100	213.563.891	100	214.046.876	100	216.295.249	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.12.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					34.064.003		36.636.595		36.785.385		37.982.395		43.376.498	
Meningkatnya kualitas profil kependudukan	Cakupan pengelolaan profil kependudukan (%)	100	100	100	34.064.003	100	36.636.595	100	36.785.385	100	37.982.395	100	43.376.498	2.12.5.04.0.00.01.0000 - DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2.13 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					1.050.980.413		1.126.042.518		1.271.656.385		1.264.993.368		1.485.668.177	
2.13.02 - PROGRAM PENATAAN DESA					67.980.023		107.189.323		118.451.206		125.037.113		101.075.557	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kualitas penataan desa	Persentase Fasilitasi Penataan Desa (%)	100	100	100	67.980.023	100	107.189.323	100	118.451.206	100	125.037.113	100	101.075.557	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.03 - PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA					195.320.016		147.954.128		153.649.260		157.598.250		167.383.705	
Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (%)	100	100	100	195.320.016	100	147.954.128	100	153.649.260	100	157.598.250	100	167.383.705	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.04 - PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA					434.480.218		471.357.789		558.074.286		506.375.503		643.371.867	
Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (%)	100	100	100	434.480.218	100	471.357.789	100	558.074.286	100	506.375.503	100	643.371.867	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
2.13.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT					353.200.156		399.541.278		441.481.633		475.982.502		573.837.048	
Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (%)	100	100	100	353.200.156	100	399.541.278	100	441.481.633	100	475.982.502	100	573.837.048	1.06.2.13.2.08.01.0000 - DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (%)	0	0	50		50		60		60		70		
2.14 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA					708.270.967		1.050.850.392		989.318.828		1.040.192.534		1.231.699.127	
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK					116.108.974		111.688.651		114.650.009		110.868.193		117.912.509	
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)	75,1	80,4	83,8	116.108.974	86	111.688.651	87,4	114.650.009	88,3	110.868.193	88,9	117.912.509	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (%)	100	100	100		100		100		100		100		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)					227.249.811		295.756.028		316.855.026		389.910.453		540.099.585	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (%)	15,2	15	14,8	227.249.811	14,6	295.756.028	14,4	316.855.026	14,2	389.910.453	14,1	540.099.585	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)	82	82,3	82,6		82,9		83.20`		83,5		83,8		
2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)					364.912.182		643.405.713		557.813.793		539.413.888		573.687.033	
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)	Indeks Lansia Berdaya (Indeks)	56,9	57,7	58,5	364.912.182	59,3	643.405.713	60,1	557.813.793	60,8	539.413.888	61,5	573.687.033	1.02.2.14.0.00.01.0000 - DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
	Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)	90,2	91,1	91,8		92,5		93,1		93,7		94,3		
2.15 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN					9.551.019.812		10.256.250.284		11.494.703.447		12.146.616.333		14.047.816.891	
2.15.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.191.419.344		8.666.653.143		9.786.178.232		10.409.797.766		12.178.426.224	
Meningkatnya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	8.191.419.344	100	8.666.653.143	100	9.786.178.232	100	10.409.797.766	100	12.178.426.224	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)					1.223.640.421		1.438.623.833		1.545.271.378		1.547.348.806		1.663.126.920	
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (%)	14,28	16,5	20,5	1.223.640.421	24,7	1.438.623.833	30,5	1.545.271.378	36	1.547.348.806	42,5	1.663.126.920	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN					135.960.047		150.973.308		163.253.837		189.469.761		206.263.747	
Jumlah Perjalanan Kereta Api Wisata	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani (%)	70	70	60	135.960.047	70	150.973.308	80	163.253.837	90	189.469.761	100	206.263.747	2.15.0.00.0.00.01.0000 - DINAS PERHUBUNGAN
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					6.722.699.000		7.402.381.752		6.769.426.975		6.804.542.612		8.439.350.066	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.195.396.688		5.300.552.851		4.770.362.014		4.797.814.478		5.312.144.311	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	4.195.396.688	100	5.300.552.851	100	4.770.362.014	100	4.797.814.478	100	5.312.144.311	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					622.188.206		539.265.964		591.485.470		592.015.615		667.019.883	
Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	0	77	78	622.188.206	79	539.265.964	81	591.485.470	83	592.015.615	85	667.019.883	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					1.905.114.106		1.562.562.937		1.407.579.491		1.414.712.519		2.460.185.872	
Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Nilai Aspek Teknologi Digital (Nilai) (Nilai)	0	0	0,185	1.905.114.106	0,190	1.562.562.937	0,195	1.407.579.491	0,200	1.414.712.519	0,205	2.460.185.872	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.17 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH					10.814.120.415		10.999.066.782		11.151.552.453		10.965.626.104		11.850.675.690	
2.17.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.328.157.758		8.496.425.168		8.724.835.372		8.441.367.602		8.979.554.060	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	8.328.157.758	100	8.496.425.168	100	8.724.835.372	100	8.441.367.602	100	8.979.554.060	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI					349.260.086		289.770.639		294.028.234		295.319.066		299.155.851	
Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi (%)	7,25	9	10	349.260.086	11	289.770.639	12	294.028.234	13	295.319.066	14	299.155.851	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.04 - PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI					281.280.062		244.378.646		269.002.193		273.097.672		284.095.908	
Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Persentase Koperasi Aktif (%)	54	54	56	281.280.062	58	244.378.646	60	269.002.193	62	273.097.672	64	284.095.908	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN					238.152.056		274.378.646		223.752.741		259.646.507		276.143.862	
Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi	67	69	70	238.152.056	73	274.378.646	75	223.752.741	78	259.646.507	80	276.143.862	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH,

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Pelatihan (%)													PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI					304.088.053		248.221.849		252.151.864		247.133.021		256.481.522	
Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)	0	10	10	304.088.053	20	248.221.849	30	252.151.864	40	247.133.021	50	256.481.522	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)					850.326.310		993.042.797		928.228.870		998.070.612		1.288.305.420	
Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri	Pertumbuhan Wirausaha (%)	21	21	22	850.326.310	23	993.042.797	24	928.228.870	25	998.070.612	26	1.288.305.420	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Proporsi jumlah UKM non pertanian (*)	0,61	10,74	10,76		10,78		10,80		10,82		19,69		
2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM					462.856.090		452.849.037		459.553.179		450.991.624		466.939.067	
Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor (%)	10	11	12	462.856.090	13	452.849.037	14	459.553.179	15	450.991.624	16	466.939.067	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Rasio Kewirausahaan (%)	3,56	3,96	4,09		4,23		4,36		4,49		4,75		
2.18 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL					6.849.517.868		6.700.998.542		6.846.723.258		6.803.106.952		7.387.380.956	
2.18.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.397.926.067		5.395.139.697		5.477.775.381		5.498.312.912		6.061.674.832	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	5.397.926.067	100	5.395.139.697	100	5.477.775.381	100	5.498.312.912	100	6.061.674.832	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL					335.368.115		235.411.173		250.603.070		242.336.740		266.939.067	
Meningkatnya kemudahan berinvestasi	Realisasi Total terhadap Target Investasi (%)	549,24	100	100	335.368.115	100	235.411.173	100	250.603.070	100	242.336.740	100	266.939.067	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.03 - PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL					334.147.246		230.783.985		236.041.666		233.285.207		243.594.808	
Meningkatnya jangkauan promos penanaman modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (%)	30,88	37	45	334.147.246	46	230.783.985	47	236.041.666	48	233.285.207	49	243.594.808	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.18.04 - PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL					328.768.037		330.783.985		341.101.973		381.752.555		320.915.090	
Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (%)	99,82	100	100	328.768.037	100	330.783.985	100	341.101.973	100	381.752.555	100	320.915.090	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL					240.344.066		286.585.152		295.112.390		192.138.415		204.346.458	
Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (%)	100	100	100	240.344.066	100	286.585.152	100	295.112.390	100	192.138.415	100	204.346.458	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.18.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL					212.964.337		222.294.550		246.088.778		255.281.123		289.910.701	
Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (%)	100	100	100	212.964.337	100	222.294.550	100	246.088.778	100	255.281.123	100	289.910.701	2.18.2.07.0.00.01.0000 - DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA					4.485.201.716		5.174.954.055		5.206.297.960		4.935.807.524		5.412.207.523	
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN					1.042.360.359		1.102.944.939		1.145.407.755		1.124.759.755		1.549.825.209	
Meningkatnya daya saing kepemudaan	Persentase Peningkatan kapasitas daya saing Kepemudaan (%)	0	0	0,62	1.042.360.359	0,65	1.102.944.939	0,67	1.145.407.755	0,69	1.124.759.755	1	1.549.825.209	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					2.989.641.201		3.692.467.838		3.669.408.572		3.435.065.267		3.488.545.266	
Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	Persentase Atlet yang berdaya saing (%)	0	0	14,7	2.989.641.201	15	3.692.467.838	16	3.669.408.572	17	3.435.065.267	18	3.488.545.266	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					453.200.156		379.541.278		391.481.633		375.982.502		373.837.048	
Meningkatnya kualitas kepramukaan	Persentase peningkatan kapasitas anggota kepramukaan (%)	0	0	17	453.200.156	19	379.541.278	21	391.481.633	23	375.982.502	25	373.837.048	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					266.824.997		268.061.216		270.826.480		247.133.021		388.698.306	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					266.824.997		268.061.216		270.826.480		247.133.021		388.698.306	
Tercapainya kolaborasi integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online (%)	70	75	80	266.824.997	85	268.061.216	90	270.826.480	95	247.133.021	100	388.698.306	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					265.059.012		213.346.120		225.301.535		229.823.254		247.276.726	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					265.059.012		213.346.120		225.301.535		229.823.254		247.276.726	
Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	49,4	60	65	265.059.012	70	213.346.120	75	225.301.535	80	229.823.254	85	247.276.726	2.16.2.21.2.20.01.0000 - DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					8.102.271.341		8.139.751.010		9.182.861.813		9.202.711.256		10.635.439.887	
2.22.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.445.031.724		4.455.589.698		4.770.371.933		4.815.887.887		5.352.345.303	
Terselenggaranya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	4.445.031.724	100	4.455.589.698	100	4.770.371.933	100	4.815.887.887	100	5.352.345.303	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					372.216.059		373.942.700		382.482.421		370.363.082		412.581.241	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (%)	51,28	60	64,1	372.216.059	67,95	373.942.700	69,23	382.482.421	71,79	370.363.082	73,08	412.581.241	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					467.684.058		469.365.260		472.548.674		485.353.528		406.986.997	
Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (%)	57,14	59	62,5	467.684.058	64,29	469.365.260	66,07	472.548.674	67,86	485.353.528	69,64	406.986.997	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH					208.620.055		283.097.579		225.542.763		261.723.679		334.023.616	
Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (%)	100	100	100	208.620.055	100	283.097.579	100	225.542.763	100	261.723.679	100	334.023.616	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					345.320.016		345.774.395		1.049.337.479		1.050.095.548		1.755.942.432	
Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (%)	63,92	65	67	345.320.016	70	345.774.395	74	1.049.337.479	78	1.050.095.548	82	1.755.942.432	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					2.263.399.429		2.211.981.378		2.282.578.543		2.219.287.532		2.373.560.298	
Meningkatnya tata kelola museum	Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum (Orang)	28.676	31.000	34.000	2.263.399.429	35.000	2.211.981.378	35.000	2.282.578.543	36.000	2.219.287.532	37.000	2.373.560.298	2.22.0.00.0.00.01.0000 - DINAS KEBUDAYAAN
2.23 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN					3.820.604.182		4.208.188.764		4.796.052.975		5.012.194.784		6.076.209.714	
2.23.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					3.280.290.944		3.566.517.127		4.015.896.529		4.260.318.986		4.971.341.956	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	3.280.290.944	100	3.566.517.127	100	4.015.896.529	100	4.260.318.986	100	4.971.341.956	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.02 - PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN					519.321.956		620.337.025		757.626.293		728.893.473		1.080.140.085	
Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai tingkat kegemaran mambaca masyarakat (%)	67,45	67,5	67,75	519.321.956	67,9	620.337.025	68	757.626.293	68,3	728.893.473	68,5	1.080.140.085	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.23.03 - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO					20.991.282		21.334.612		22.530.153		22.982.325		24.727.673	
Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno	Persentase naskah kuno milik daerah yang dilestarikan dan didaftarkan (%)	0	16,67	33,33	20.991.282	50,00	21.334.612	66,67	22.530.153	83,33	22.982.325	100,00	24.727.673	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN					61.211.617		87.189.323		98.451.206		108.186.044		124.264.738	
2.24.02 - PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP					38.975.213		61.032.526		67.125.822		73.566.510		82.843.159	
Meningkatnya tata kelola arsir dinamis dan statis	Tingkat Ketersediaan Arsip (%)	79	79	79,05	38.975.213	79,1	61.032.526	79,15	67.125.822	79,2	73.566.510	79,25	82.843.159	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
2.24.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP					22.236.404		26.156.797		31.325.384		34.619.534		41.421.579	
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (%)	40	40	40,05	22.236.404	40,1	26.156.797	40,15	31.325.384	40,2	34.619.534	40,25	41.421.579	2.23.2.24.0.00.01.0000 - DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN					290.492.049		315.028.770		359.243.420		341.189.949		458.066.542	
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA					127.044.027		193.996.244		216.592.653		236.278.322		289.030.576	
Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Produktifitas perikanan budidaya (Kg)	5,16	5,16	5,17	127.044.027	5,18	193.996.244	5,19	216.592.653	5,2	236.278.322	5,21	289.030.576	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN					163.448.022		121.032.526		142.650.767		104.911.627		169.035.966	
Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat	Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)	44,73	44,74	44,76	163.448.022	44,77	121.032.526	44,78	142.650.767	44,79	104.911.627	44,8	169.035.966	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					15.438.750.822		19.740.775.360		23.374.345.563		23.353.486.797		26.824.715.115	
3.26.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.492.920.682		6.687.535.114		6.971.019.883		7.361.162.267		8.568.042.256	
Persentase Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	5.492.920.682	100	6.687.535.114	100	6.971.019.883	100	7.361.162.267	100	8.568.042.256	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					8.140.946.662		11.325.813.569		14.613.684.783		14.591.351.149		15.059.793.517	
Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang) (Orang)	0,041	0,1	0,128	8.140.946.662	0,158	11.325.813.569	0,183	14.613.684.783	0,213	14.591.351.149	0,269	15.059.793.517	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					1.025.120.250		641.109.247		687.609.648		487.594.406		1.865.250.768	
Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata		0	0	10	1.025.120.250	20	641.109.247	30	687.609.648	40	487.594.406	50	1.865.250.768	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					425.379.209		529.644.370		539.380.482		448.467.348		657.990.211	
Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (%)	0	0	21,92	425.379.209	28,77	529.644.370	35,62	539.380.482	42,47	448.467.348	49,32	657.990.211	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					354.384.019		556.673.060		562.650.767		464.911.627		673.638.363	
Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (%)	0	0	48	354.384.019	55	556.673.060	62	562.650.767	68	464.911.627	75	673.638.363	3.26.2.19.0.00.01.0000 - DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAHRAGA
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					2.099.675.619		2.791.534.408		2.760.662.686		2.785.502.091		3.187.288.378	
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					871.957.100		874.508.912		941.999.039		945.546.031		1.049.346.676	
Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Jumlah Produksi Padi (Ton)	18.006,25	18.010	18.065	871.957.100	18.095	874.508.912	18.115	941.999.039	18.145	945.546.031	18.170	1.049.346.676	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
	Jumlah Produksi Kopi Robusta (Ton)	38,43	40,1	42,85		47,55		52,3		57,53		64,33		
	Jumlah Produksi Kakao (Ton)	592,7	592,7	596,32		598,16		600,01		601,87		603,74		
	Jumlah produksi daging sapi (Ton)	413,07	413,07	413,47		413,87		414,27		414,67		415,7		
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					866.971.898		1.367.128.588		1.230.297.420		1.224.990.487		1.462.641.990	
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Persentase Sawah yang Diairi (%)	2,2	2,5	2,5	866.971.898	2,5	1.367.128.588	2,5	1.230.297.420	2,5	1.224.990.487	2,5	1.462.641.990	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					147.742.548		224.948.454		246.713.267		272.628.833		317.565.441	
Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)	-	2,5	2,5	147.742.548	2,75	224.948.454	3	246.713.267	3,25	272.628.833	3,5	317.565.441	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.05 - PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					40.788.014		141.850.875		144.750.548		143.274.418		146.023.977	
Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian	Persentase Penanganan Bencana Pertanian (%)	5,24	5,5	6,13	40.788.014	6,51	141.850.875	6,9	144.750.548	7,28	143.274.418	7,66	146.023.977	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					172.216.059		183.097.579		196.902.412		199.062.322		211.710.294	
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang	5	5	5	172.216.059	5	183.097.579	5	196.902.412	5	199.062.322	5	211.710.294	2.09.3.27.3.25.01.0000 - DINAS KETAHANAN

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
pertanian	jabatan (%)													PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN
3.30 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					2.841.564.978		3.012.658.838		3.104.518.908		3.072.945.057		3.949.265.828	
3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					906.400.312		959.082.555		1.074.013.156		1.038.586.030		1.196.623.402	
Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien,merata dan terintegrasi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (%)	14,29	14,29	28,57	906.400.312	28,57	959.082.555	42,86	1.074.013.156	42,86	1.038.586.030	42,86	1.196.623.402	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.04 - PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					552.904.190		592.887.398		571.258.222		519.700.454		819.226.791	
Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting (%)	69,76	72,09	74,42	552.904.190	76,74	592.887.398	79,07	571.258.222	81,40	519.700.454	83,72	819.226.791	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR					861.080.296		959.082.555		918.763.704		968.409.283		980.719.311	
Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor	Nilai Ekspor Barang (Nilai)	800.000.000	800.000.000	800.000.000	861.080.296	900.000.000	959.082.555	900.000.000	918.763.704	1.000.000.000	968.409.283	1.000.000.000	980.719.311	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.06 - PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN					249.260.086		252.849.037		272.978.344		276.956.275		308.360.646	
Meningkatnya tertib niaga dan mutu produk	Persentase penanganan pengaduan konsumen (%)	100	100	100	249.260.086	100	252.849.037	100	272.978.344	100	276.956.275	100	308.360.646	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI					271.920.094		248.757.293		267.505.482		269.293.015		644.335.678	
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/ Dilaksanakan (%)	80	82	84	271.920.094	87	248.757.293	90	267.505.482	93	269.293.015	95	644.335.678	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN					1.060.932.313		1.093.690.563		1.135.286.457		1.121.745.101		1.298.720.301	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI					892.804.307		867.533.766		899.486.018		878.470.683		943.491.529	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya realisasi pembangunan industri	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri (%)	50	53	55	892.804.307	58	867.533.766	60	899.486.018	62	878.470.683	64	943.491.529	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
	Proporsi jumlah IKM	3,92	4	4,08		4,16		4,23		4,31		4,39		
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL					168.128.006		226.156.797		235.800.439		243.274.418		355.228.772	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Persentase pertumbuhan informasi industri (%)	10	15	18	168.128.006	25	226.156.797	32	235.800.439	40	243.274.418	45	355.228.772	2.17.3.30.3.31.01.0000 - DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
4.01 - SEKRETARIAT DAERAH					32.582.262.920		31.361.636.416		32.310.477.843		31.770.695.220		33.231.998.066	
4.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					22.434.052.777		21.773.622.967		22.570.671.835		22.042.606.464		23.783.221.004	
Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	22.434.052.777	100	21.773.622.967	100	22.570.671.835	100	22.042.606.464	100	23.783.221.004	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
4.01.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT					9.496.794.967		9.225.771.761		9.364.241.233		9.340.422.954		9.032.356.875	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat (%)	-	70	75	9.496.794.967	80	9.225.771.761	85	9.364.241.233	88	9.340.422.954	95	9.032.356.875	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan (*)	-	70	75		80		85		88		95		
	Indeks Reformasi Hukum (*)	97,5	72	73,18		74,21		75,24		76,27		77,3		
	Indeks Zakat Nasional (IZN) (Poin)	0,61	0,64	0,67		0,7		0,73		0,76		0,79		
4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					651.415.176		362.241.688		375.564.775		387.665.802		416.420.187	
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (%)	-	65	70	651.415.176	75	362.241.688	80	375.564.775	85	387.665.802	91	416.420.187	4.01.2.16.2.20.01.0000 - SEKRETARIAT DAERAH
	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (%)	-	70	75		80		85		90		94		
	Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)	4,75	4,78	4,8		4,82		4,83		4,85		4,87		
	Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Indeks)	82	84	88		90		92		94		94		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
4.02 - SEKRETARIAT DPRD					27.427.348.469,44		25.491.581.972,93		27.957.019.840,19		28.156.578.375,01		32.949.710.352,75	
4.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.478.523.197		12.203.806.041		14.231.591.968		14.450.259.892		16.136.816.726	
Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	12.478.523.197	100	12.203.806.041	100	14.231.591.968	100	14.450.259.892	100	16.136.816.726	4.02.2.16.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD					14.948.825.272,44		13.287.775.931,93		13.725.427.872,19		13.706.318.483,01		16.812.893.626,75	
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N (%)	100	100	100	203.940.070,18	100	191.816.511,07	100	196.902.411,89	100	243.323.396,97	100	226.566.834,06	4.02.2.16.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan (%)	100	100	100	14.744.885.202,26	100	13.095.959.420,86	100	13.528.525.460,3	100	13.462.995.086,04	100	16.586.326.792,69	4.02.2.16.0.00.01.0000 - SEKRETARIAT DPRD
5.01 - PERENCANAAN					6.528.198.126,79		6.591.967.239,98		7.259.898.208,31		7.222.388.615,81		8.333.205.809,53	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.798.972.093		5.922.976.045		6.417.555.145		6.408.184.569		7.212.624.119	
Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	5.798.972.093	100	5.922.976.045	100	6.417.555.145	100	6.408.184.569	100	7.212.624.119	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					349.523.172		351.061.656		378.624.588		375.329.260		669.188.626	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (%)	100	100	100	349.523.172	100	351.061.656	100	378.624.588	100	375.329.260	100	669.188.626	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (%)	100	100	100		100		100		100		100		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					379.702.861,79		317.929.538,98		463.718.475,31		438.874.786,81		451.393.064,53	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	100	100	100	117.593.253,32	100	105.829.857,05	100	154.871.162,09	100	146.355.905,65	100	150.093.708,52	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	100	100	100	136.815.951,69	100	105.797.248,38	100	155.318.667,57	100	146.192.184,76	100	151.014.188,06	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (%)	100	100	100	125.293.656,78	100	106.302.433,55	100	153.528.645,65	100	146.326.696,4	100	150.285.167,95	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
5.02 - KEUANGAN					73.770.134.272		71.089.505.179		71.606.936.984		70.924.895.648		75.463.997.119	
5.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					8.654.217.611		8.407.995.013		8.717.237.284		8.513.989.629		9.145.498.862	
Meningkatnya Ketercapaian Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	8.654.217.611	100	8.407.995.013	100	8.717.237.284	100	8.513.989.629	100	9.145.498.862	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.02 - PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH					64.322.684.179		61.910.846.073		61.990.690.886		61.530.526.620		65.480.235.682	
Meningkatnya tata kelola anggaran	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (%)	10	10	10	758.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	40	748.978.229	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD (%)	47	47	47		30		30		30		30		
Meningkatnya tata kelola perbendaharaan	Persentase Penurunan SILPA (%)	4,5	4,5	4,5	63.503.868.325	4	61.102.868.325	3,5	61.182.713.138	3	60.724.548.872	3	64.674.257.934	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar (%)	100	100	100		100		100		100		100		
Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan	Persentase laporan keuangan tepat waktu (%)	100	100	100	59.837.625	100	58.999.519	100	58.999.519	100	56.999.519	100	56.999.519	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH					318.883.357		309.810.753		321.205.453		313.716.354		336.985.676	
Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (%)	3	3	3	318.883.357	3	309.810.753	3	321.205.453	3	313.716.354	3	336.985.676	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH					474.349.125		460.853.340		577.803.361		566.663.045		501.276.899	
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)	10,24	11,03	11,6	375.121.895	12	361.626.110	12,62	408.626.110	13,09	397.485.794	13,62	380.099.648	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)	25	50	75	52.434.730	100	52.434.730	100	96.384.751	100	96.384.751	100	71.384.751	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)	100	100	100	46.792.500	100	46.792.500	100	72.792.500	100	72.792.500	100	49.792.500	5.02.0.00.0.00.02.0000 - BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
5.03 - KEPEGAWAIAN					5.208.606.287		5.648.863.921,11		5.824.242.242,49		6.123.197.589,98		6.769.231.235,68	
5.03.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					4.144.751.057		4.174.931.769		4.243.983.010		4.526.875.378		4.995.334.640	
Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	4.144.751.057	100	4.174.931.769	100	4.243.983.010	100	4.526.875.378	100	4.995.334.640	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.03.02 - PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH					1.063.855.230		1.473.932.152,11		1.580.259.232,49		1.596.322.211,98		1.773.896.595,68	
Meningkatnya kualitas layanan administrasi kepegawaian	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi (%)	100	100	100	57.986.001,71	100	113.497.611,62	100	116.506.933,36	100	112.663.865,14	100	119.822.273,56	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya pengembangan kompetensi ASN	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya (%)	75,97	76,72	77	886.434.111,41	77,5	1.127.627.494,92	78	1.215.402.161,8	79	1.234.076.774,92	80	1.378.111.594,74	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya tata kelola pengembangan karir ASN	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (%)	-	68	70	89.027.657,61	71	180.735.402,01	72	194.897.845,09	73	197.892.443,46	75	220.989.388,03	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (%)	99	100	100	30.407.459,27	100	52.071.643,56	100	53.452.292,24	100	51.689.128,46	100	54.973.339,35	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.04 - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					579.800.234		553.919.924		571.258.222		592.390.686		674.455.563	
5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA					579.800.234		553.919.924		571.258.222		592.390.686		674.455.563	
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (%)	-	-	80	0	80	0	80	0	80	0	80	0	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis	Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (%)	-	-	85	579.800.234	85	553.919.924	85	571.258.222	85	592.390.686	85	674.455.563	5.03.5.04.0.00.01.0000 - BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					422.364.043		423.862.384		435.422.149		376.559.625		302.505.499	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					177.044.027		157.598.498		158.451.206		199.531.161		115.059.943	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
DAERAH														
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (%)	-	-	100	177.044.027	100	157.598.498	100	158.451.206	100	199.531.161	100	115.059.943	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan					0		0		0		0		0	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah					0		0		0		0		0	
Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah					0		0		0		0		0	
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					245.320.016		266.263.886		276.970.943		177.028.464		187.445.556	
Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (%)	0	0	0	245.320.016	87	266.263.886	88	276.970.943	88	177.028.464	89	187.445.556	5.01.5.05.0.00.01.0000 - BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
6.01 - INSPEKTORAT DAERAH					8.101.212.659		8.908.517.621		9.256.065.486		8.942.733.724		9.480.875.272	
6.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.385.175.231		8.152.379.903		8.450.472.693		8.136.002.087		8.690.810.910	
Meningkatnya Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	7.385.175.231	100	8.152.379.903	100	8.450.472.693	100	8.136.002.087	100	8.690.810.910	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN					500.732.265		548.596.133		581.660.458		579.315.315		534.580.288	
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (%)	76	77	78	500.732.265	79	548.596.133	80	581.660.458	81	579.315.315	82	534.580.288	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN,					215.305.163		207.541.585		223.932.335		227.416.322		255.484.074	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI														
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi	Level Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP) (Level)	3	3	3,1	215.305.163	3,2	207.541.585	3,3	223.932.335	3,4	227.416.322	3,5	255.484.074	6.01.0.00.0.00.01.0000 - INSPEKTORAT
7.01 - KECAMATAN					20.007.814.225,54		22.820.594.783,79		24.416.629.017,02		24.722.635.956,58		27.562.100.681,33	
7.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					16.575.477.013,08		17.537.838.743,51		18.902.449.316,85		19.192.365.337,26		21.431.843.191,1	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Talawi)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	2.227.735.280,56	100	2.356.170.530,82	100	2.539.038.135,41	100	2.577.531.076,06	100	2.877.814.391,84	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Barangin)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	5.185.335.200,86	100	5.486.719.796,4	100	5.913.806.757,39	100	6.004.672.022,71	100	6.705.505.329,31	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Lembah Segar)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	7.084.057.017,14	100	7.495.800.052,38	100	8.079.274.074,12	100	8.203.411.843,81	100	9.160.870.077,42	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (Silungkang)	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	2.078.349.514,52	100	2.199.148.363,91	100	2.370.330.349,93	100	2.406.750.394,68	100	2.687.653.392,53	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
7.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK					518.595.416,61		814.315.509,56		864.757.498,21		865.440.792,49		947.430.991,66	
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Talawi)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	8.376.803,74	100	11.334.612,02	100	12.530.153,48	100	12.982.325,37	100	14.727.672,65	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Barangin)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	6.755.797,43	100	9.348.596,18	100	10.076.292,08	100	10.231.113,57	100	11.425.234,14	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Lembah Segar)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	11.949.471,21	100	14.594.341,81	100	15.730.367,21	100	15.972.063,16	100	12.313.359,75	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Silungkang)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	11.315.045,38	100	14.168.265,02	100	15.438.939,11	100	15.795.162,53	100	17.719.231,15	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Durian 1)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	27.413.681,05	100	56.979.284,68	100	61.414.559,48	100	62.358.192,13	100	69.636.305,96	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN DURIAN 1
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Durian 2)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	44.532.667,96	100	74.269.907,49	100	80.051.086,36	100	81.281.068,61	100	90.767.758,45	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Lubang Panjang)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	38.520.007,11	100	68.196.963,61	100	73.505.423,68	100	74.634.832,04	100	83.345.809,5	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Saringan)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	44.209.527,19	100	73.943.526,46	100	79.699.299,62	100	80.923.877,23	100	90.368.877,85	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN SARINGAN
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Air Dingin)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	61.640.031,19	100	87.189.323,21	100	89.501.096,31	100	86.548.835,8	100	92.047.954,03	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Aur Mulyo)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	45.602.157,79	100	75.350.433,43	100	81.215.382,85	100	82.463.253,87	100	92.087.923,1	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	61.640.031,19	100	87.189.323,21	100	89.501.096,31	100	86.548.835,8	100	92.047.954,03	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	46.487.061,91	100	76.243.895,56	100	82.178.730,59	100	83.441.403,71	100	93.180.236,84	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Pasar)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	48.513.102,27	100	78.317.713,67	100	84.413.974,82	100	85.710.992,87	100	95.714.720,18	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN PASAR
Meningkatnya Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (Kelurahan Tanah Lapang)	Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Terlaksana Dengan Baik (%)	100	100	100	61.640.031,19	100	87.189.323,21	100	89.501.096,31	100	86.548.835,8	100	92.047.954,03	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN TANAH LAPANG
7.01.03 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN					2.579.274.942,54		4.120.173.804,02		4.240.888.652,78		4.252.397.174,32		5.035.219.284,95	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Talawi)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	0	0	0	139.785.144,21	0	225.018.791,26	0	227.534.281,81	0	233.760.813,4	0	275.003.054,74	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Barangin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	50.450.175,54	100	95.397.134,28	100	97.822.859,25	100	135.177.146,47	100	116.588.055,48	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Lembah Segar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	101.622.949,76	100	163.243.383,2	100	170.950.268,79	100	166.153.739,03	100	199.505.244,6	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (Silungkang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	153.769.889,48	100	239.143.747,6	100	242.758.727,07	100	249.219.181,52	100	292.081.544,68	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 1)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	234.277.014,65	100	360.859.078,49	100	372.948.394,94	100	369.924.573,32	100	441.018.051,31	7.01.0.00.0.00.01.0001 - KELURAHAN DURIAN 1
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Durian 2)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	270.262.205,59	100	397.205.057,79	100	412.123.549,27	100	409.701.653,16	100	485.437.698,76	7.01.0.00.0.00.01.0002 - KELURAHAN DURIAN 2
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Lubang Panjang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	236.021.044,87	100	362.620.594,03	100	374.847.027,34	100	371.852.378,53	100	443.170.859,66	7.01.0.00.0.00.01.0003 - KELURAHAN LUBANG PANJANG
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Saringan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	323.412.446,71	100	450.888.183,24	100	469.985.376,16	100	468.452.525,3	100	551.045.657,65	7.01.0.00.0.00.01.0004 - KELURAHAN SARINGAN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Air Dingin)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.02.0001 - KELURAHAN AIR DINGIN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Aur Mulyo)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	176.255.818,14	100	302.256.160,33	100	309.783.817,84	100	305.789.475,61	100	369.397.449,19	7.01.0.00.0.00.02.0002 - KELURAHAN AUR MULYO
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Utara)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.310,03	100	296.265.183,14	100	303.326.502,59	100	299.232.943,45	100	362.075.673,26	7.01.0.00.0.00.02.0003 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK UTARA
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Kubang Sirakuk Selatan)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	180.893.273,94	100	306.940.112,02	100	314.832.368,83	100	310.915.596,98	100	375.121.863,59	7.01.0.00.0.00.02.0004 - KELURAHAN KUBANG SIRAKUK SELATAN
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Pasar)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	201.552.051,37	100	327.806.014,1	100	337.322.475,5	100	333.751.263,24	100	400.622.787,35	7.01.0.00.0.00.02.0005 - KELURAHAN PASAR
Meningkatnya kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan (Kelurahan Tanah Lapang)	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif (%)	100	100	100	170.324.308,22	100	296.265.181,4	100	303.326.500,8	100	299.232.940,86	100	362.075.671,42	7.01.0.00.0.00.02.0006 - KELURAHAN TANAH LAPANG

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
7.01.04 - PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM					106.512.209,12		106.767.122,22		128.774.602,47		129.080.408,83		52.262.807,89	
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Talawi)	indeks layanan infrastruktur	100	100	100	15.997.040,34	100	16.046.271,88	100	21.163.514,25	100	21.211.683,7	100	3.880.719,31	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Barangin)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100	100	100	34.064.003,12	100	34.590.825,55	100	40.740.131,56	100	41.251.348,65	100	20.386.713,56	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Lembah Segar)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100	100	100	36.239.363,87	100	35.898.665,4	100	41.277.138,14	100	40.991.702,15	100	19.282.138,12	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Silungkang)	Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)	100	100	100	20.211.801,79	100	20.231.359,39	100	25.593.818,52	100	25.625.674,33	100	8.713.236,9	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
7.01.05 - PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM					118.630.781,29		140.195.149,88		144.420.333,85		146.054.888,39		52.327.635,37	
Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (Talawi)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	0	0	0	34.064.003,12	0	39.590.825,55	0	40.740.131,56	0	41.251.348,65	0	12.886.713,56	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik(Barangin)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100	100	100	20.438.401,87	100	26.103.252,62	100	27.160.087,7	100	27.789.395,22	100	9.204.795,4	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik(Lembah Segar)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100	100	100	21.344.802,18	100	26.539.199,24	100	27.160.087,7	100	27.356.651,04	100	8.284.315,86	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR
Meningkatnya Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik(Silungkang)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100	100	100	42.783.574,12	100	47.961.872,47	100	49.360.026,89	100	49.657.493,48	100	21.951.810,55	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
7.01.06 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA					109.323.862,9		101.304.454,6		135.338.612,86		137.297.355,29		43.016.770,36	
Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Talawi)	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	0	0	0	34.064.003,12	0	31.590.825,55	0	40.740.131,56	0	41.251.348,65	0	12.886.713,56	7.01.0.00.0.00.04.0000 - KECAMATAN TALAWI
Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Barangin)	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	100	100	100	19.532.001,56	100	18.231.359,39	100	26.265.076,74	100	26.923.906,86	100	8.284.315,86	7.01.0.00.0.00.01.0000 - KECAMATAN BARANGIN
Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Lembah Segar)	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum dengan baik (%)	100	100	100	20.710.321,97	100	19.364.820,59	100	27.428.590,99	100	28.049.041,73	100	9.480.939,27	7.01.0.00.0.00.02.0000 - KECAMATAN LEMBAH SEGAR

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik(Silungkang)	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik (%)	100	100	100	35.017.536,25	100	32.117.449,07	100	40.904.813,57	100	41.073.058,05	100	12.364.801,67	7.01.0.00.0.00.03.0000 - KECAMATAN SILUNGKANG
8.01 - KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					4.877.555.537		4.430.814.519		4.647.567.837		4.713.579.461		5.112.563.385	
8.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					2.770.914.726		2.645.498.445		2.709.645.691		2.827.983.210		3.056.544.362	
Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota	Persentase ketercapaian penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota (%)	100	100	100	2.770.914.726	100	2.645.498.445	100	2.709.645.691	100	2.827.983.210	100	3.056.544.362	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.02 - PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN					987.680.374		435.946.616		492.256.030		476.018.597		552.287.724	
Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan (%)	0	0	100	987.680.374	100	435.946.616	100	492.256.030	100	476.018.597	100	552.287.724	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.03 - PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					509.800.234		653.919.924		671.258.222		649.116.269		690.359.655	
Meningkatnya etika dan budaya politik	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik (%)	100	100	100	509.800.234	100	653.919.924	100	671.258.222	100	649.116.269	100	690.359.655	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN					145.320.016		143.594.662		153.700.658		160.584.185		150.626.375	
Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif (%)	100	-	100	145.320.016	70	143.594.662	75	153.700.658	80	160.584.185	85	150.626.375	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
8.01.05 - PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA					110.640.031		115.908.256		128.451.206		123.858.603		110.457.545	
Meningkatnya ketahanan ekonomi sosial,dan budaya masyarakat	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	100	100	100	110.640.031	100	115.908.256	100	128.451.206	100	123.858.603	100	110.457.545	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASE LINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	*(02)*	*(03)*	*(04)*	*(05)*	*(06)*	*(07)*	*(08)*	*(09)*	*(10)*	*(11)*	*(12)*	*(13)*	*(14)*	*(15)*
	di Daerah yang Dilaksanakan (%)													
8.01.06 - PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL					353.200.156		435.946.616		492.256.030		476.018.597		552.287.724	
Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan (%)	100	100	100	353.200.156	100	435.946.616	100	492.256.030	100	476.018.597	100	552.287.724	8.01.1.05.0.00.01.0000 - BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TOTAL KESELURUHAN					**577.868.092.938**		**597.991.158.787**		**34.895.207.235,01**		**36.647.852.486,38**		**05.917.150.670,29**	

4.2 KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

4.2.1 INDIKATOR KINERJA MAKRO

Indikator Kinerja Makro (IKM) merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai capaian pembangunan daerah secara menyeluruh. IKM menggambarkan hasil kinerja pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, IKM bukan hanya berfungsi sebagai alat evaluasi capaian pembangunan, melainkan juga sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Penyajian indikator ini juga penting untuk memastikan adanya arah kebijakan yang berbasis pada data dan kondisi objektif daerah serta untuk memandu perumusan prioritas pembangunan berikutnya, termasuk sebagai dasar evaluasi dan penyesuaian target jika diperlukan. Pemantauan terhadap capaian indikator kinerja makro maka pemerintah daerah dapat lebih cepat merespons tantangan atau memanfaatkan peluang, agar pembangunan dapat berlangsung lebih inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Indikator Kinerja Makro RPJMD Kota Sawahlunto tahun 2025 -2030 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Makro

PROYEKSI INDIKATOR MAKRO PEMBANGUNAN									KONDISI AKHIR RPJMD
NO	INDIKATOR	SATUAN	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,63	5,84	6,89	7,01	7,29	5,87	5,87
2	PDRB Per Kapita ADHB	Rp. Juta	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45	136,45
3	PDRB Per Kapita ADHK	Rp. Juta	47,81	50,32	53,16	56,13	59,29	61,93	61,93
4	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81	80,81
5	Angka Harapan Hidup	Tahun	74,43	74,75	75,07	75,39	75,71	76,03	76,03
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,1	14,32	14,53	14,76	14,97	15,19	15,19
7	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,65	10,78	10,9	11,02	11,13	11,25	11,25
8	Pengeluaran Per Kapita	Rp. ribu	11.354	11.527	11.706	11.891	12.082	12.280	12.280
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	4,61	4,66	4,35	4,31	4,2	4,09	4,09
10	Jumlah Penduduk Miskin	Jiwa	1.379	1.358	1.337	1.315	1.294	1.275	1.275
11	Tingkat Kemiskinan	Persentase	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71	1,71
12	Gini Ratio	Indeks	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291	0,291

4.2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan indikator yang berfungsi sebagai alat ukur kuantitatif yang akan memberikan infrmasi sejauh mana keberhasilan peaksanaan pembangunan daerah. Tujuan dari penetapan IKU adalah sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja pembangunan daerah yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang digunakan untuk perbaiakan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Secara rinci, Indikator Kinerja Utama (IKU) beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada RPJMD tahun 2025 -2030 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	INDIKATOR TUJUAN								
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	4,63	5,84	6,89	7,01	7,29	5,87	5,87
2	PDRB per kapita ADHB	Rp. Juta	80,61	89,48	99,53	110,71	123,5	136,45	136,45
3	Tingkat Kemiskinan	Persentase	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71	1,71
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	23,69	23,7	23,71	23,71	23,72	23,73	23,73
5	Tingkat Pengangguran Tebuka	Persentase	4,61	4,66	4,35	4,31	4,2	4,09	4,09
6	Gini Ratio	Indeks	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291	0,291
7	Proporsi kontribusi PDRB Kota	Angka	1,52	1,52	1,52	1,53	1,54	1,54	1,54
8	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Indeks	53,8	55,11	56,42	57,73	59,04	60,35	60,35
9	Indeks Kinerja Infrastruktur	Indeks	70,13	71,33	72,52	73,32	74,92	76,12	76,12
10	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)	Indeks	103,52	103,51-102,24	111,65-110,38	110,37-109,1	109,09-107,82	107,81-106,54	107,81-106,54
11	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	3,06	3,07	3,08	3,09	3,10	3,11	3,11
12	Rasio PDRB Akomodasi Mamin	Rasio	2,33	2,35	2,37	2,39	2,41	2,50	2,50
13	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81	80,81
14	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	76,35	77,56	78,17	79,01	80,47	82,72	82,72
15	Indeks inovasi daerah	Indeks	73,21	74,67	76,14	77,60	79,07	80,53	80,53
16	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,5	85,6	86,7	87,8	88,9	90,0	90,0
	INDIKATOR SASARAN								
1	Ratio PDRB Industri Pengolahan	%	8,82	9,03	9,25	9,46	9,67	11,85	11,85
2	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB	Rasio	1,673	1,715	1,757	1,799	1,841	2,128	2,128
3	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	7,61	8,048	8,486	8,924	9,362	13,38	13,38
4	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	93,84	94,74	95,63	96,50	97,42	98,31	98,31
5	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	52,96	54,16	55,36	56,56	57,76	62,62	62,62
6	Persentase peningkatan investasi	%	8,83	9,03	9,23	9,43	9,63	9,83	9,83
7	indeks Desa (rata-rata indeks desa)	Indeks	78,72	79,02	79,32	79,62	79,92	80,22	80,22
8	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	8,86	8,90	8,95	8,99	9,04	9,08	9,08
9	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	7,81	7,33	6,85	6,36	5,39	4,91	4,91
10	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha	Juta/	50,881	52,481	54,081	55,681	57,281	58,88	58,881

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
	sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Orang							
11	Indeks Pemerintah Digital	Indeks	-	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	
12	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,19	3,20	3,21	3,22	3,22	4,00	4,00
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,91	72,12	72,33	72,55	72,76	72,97	72,97
14	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,45	0,47	0,49	0,51	0,53	0,55	0,55
15	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar	Indeks	51,25	53,16	55,09	57,03	59,44	62,71	62,71
16	Indek Konektivitas darat	Indeks	53,65	55,34	57,13	59,12	61,21	63,58	63,58
17	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan	Indeks	47.79	49.90	52.01	54.12	56.23	58.34	58.34
18	Indeks Harmoni Indonesia	Indeks	3,20	3,50	3,70	4,20	4,30	4,50	4,5
19	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Angka	100	100	100	100	100	100	100
20	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	Indeks	4	6	8	10	12	14	14
21	Persentase Pemajuan Kebudayaan yang dilaksanakan	%	74,00	76,80	78,77	80,76	83,43	85,49	85,49
22	PAD sektor Pariwisata	%	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,20
23	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	6,205	6,195	6,185	6,165	6,155	6,866	6,866
24	Persentase Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca	%	82,83	82,90	83,00	83,10	83,20	83,25	83,25
25	Persentase Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk numerasi	%	79,67	79,70	79,85	79,90	79,91	79,92	79,92
26	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,65	10,78	10,9	11,02	11,13	11,25	11,25
27	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,1	14,32	14,53	14,76	14,97	15,19	15,19
28	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	14,00	14,12	14,24	14,36	14,47	14,58	14,58
29	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,43	74,75	75,07	75,39	75,71	76,03	76,03
30	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	17,30	16,05	14,80	13,55	12,30	11,05	11,05
31	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	100
32	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,20	66,40	67,50	68,60	69,70	70,60	70,60
33	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,270	0,270	0,269	0,269	0,268	0,268	0,268
34	Indeks Perlindungan Anak (IPA)	Indeks	67,52	67,706	67,892	68,078	68,264	68,45	68,45
35	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	95,83	95,93	96,03	96,13	96,23	96,33	96,33
36	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	56,7	57,3	57,9	58,5	59,1	59,7	59,7

NO	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	*2*	*4*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
37	Persentase peningkatan partisipasi pemuda berwirausaha	%	0,36	0,43	0,50	0,70	0,80	1,00	1,00
38	Persentase peningkatan prestasi Olahraga	%	0,25	0,3	1,2	1,7	1,9	2,05	2,05
39	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Angka	3,1500	3,1600	3,1700	3,1800	3,1900	3,2000	3,2000
40	Nilai AKIP Instansi Pemerintah	Angka	65,23	68,17	70,11	71,02	72,03	73,20	73,20
41	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Angka	3,20	3,25	3,30	3,35	3,40	3,45	3,45
42	Indeks Profesional ASN	Indeks	78,72	81,00	84,00	87,00	90,00	90,00	90,00
43	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkungan Pemerintahan Daerah	Indeks	50,56	50,60	50,65	50,70	50,75	60,00	60,00
44	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Indeks	94,83	94,85	94,90	94,95	94,98	95,00	95,00
45	Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	Indeks	70,850	71,000	72,000	73,000	74,000	75,000	75,000

4.2.3 INDIKATOR KINERJA DAERAH

Indikator Kinerja Daerah (IKD) beserta target yang harus dicapai dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan pada RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025 - 2029 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Daerah

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**								
1	Konsumsi listrik per kapita	kWh/kapita	1.237	1.354	1.470	1.587	1.703	1.820	1.820
2	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	84,5	85,6	86,7	87,8	88,9	90,0	90,0
3	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)	%	7,81	7,33	6,85	6,36	5,39	4,91	4,91
4	Kapasitas Air Baku (m3/detik)	(m^3/detik)	0,149	0,151	0,154	0,156	0,159	0,161	0,161
5	Akses Rumah Tang a Perkotaan terhadap Air Minum Perpipaan (%)	%	50,00	52,50	55,00	57,50	60,00	62,50	62,50
6	Indeks tutupan lahan	Indeks	60,54	60,60	60,66	60,72	60,78	60,81	60,81
7	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	71,91	72,12	72,33	72,55	72,76	72,97	72,97
8	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman	%	15,95	18,90	21,90	24,91	27,91	32,91	32,91
9	Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	27,44	30,26	33,31	36,00	39.25	37,98	37,98
10	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	% RT	73,46	74,56	75,66	76,76	77,86	78,96	78,96
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	103,52	103,51-102,24	111,65-110,38	110,37-109,1	109,09-107,82	107,81-106,54	107,81-106,54
12	Jumlah Penduduk	Ribu jiwa	69,70	70,66	71,62	72,56	73,48	74,40	74,40
13	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,46	1,45	1,44	1.42	1,40	1,39	1,39
14	Rasio Penduduk	%	101,17	101,14	101,09	101,02	100,92	100,86	100,86
15	Kepadatan Penduduk	Org/km2	254,87	258,42	261,91	265,34	268,73	277,08	277,08
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**								
1	Pertumbuhan Ekonomi	%	5,44	5,49	5,55	5,60	5,66	5,71	5,71
2	Tingkat Kemiskinan	%	1,98	1,92	1,87	1,81	1,76	1,71	1,71
3	PDRB per kapita	Rp juta	73,78	73,78	73,78	73,78	73,78	179,83	179,83
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	4,61	4,66	4,35	4,31	4,20	4,09	4,09
5	Gini Ratio	Indeks	0,297	0,296	0,295	0,294	0,293	0,291	0,291
6	Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	76,55	77,45	78,11	78,79	79,46	80,13	80,81
7	Tingkat produktivitas tenaga kerja	Juta/org	93,84	94,74	95,63	96,50	97,42	98,31	98,31
8	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,43	74,75	75,07	75,39	75,71	76,03	76,03

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
9	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 kelahiran hidup	134	134	134	134	134	0	0
10	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	17,30	16,05	14,80	13,55	12,30	11,05	11,05
11	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage)*	%	45,00	53,60	62,20	70,80	79,40	88,00	88,00
12	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (*treatment success rate*)	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
13	Cakupan kepesertaan jaminan Kesehatan nasional	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai SKM pada asesmen tingkat nasional								
a	- Angka Literasi	%	82,83	82,90	83,00	83,10	83,20	83,25	83,25
b	- Angka Numerasi	%	79,67	79,70	79,85	79,90	79,91	79,92	79,92
15	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	10,65	10,78	10,90	11,02	11,13	11,25	11,25
16	Harapan Lama Sekolah	Tahun	14,10	14,32	14,53	14,76	14,97	15,19	15,19
17	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi pendidikan tinggi	%	14,00	14,12	14,24	14,36	14,47	14,58	14,58
18	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	%	74,18	74,66	75,14	75,61	76,09	76,57	76,57
19	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	58,55	59,92	61,29	62,66	64,03	65,40	65,40
20	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal	%	55,20	55,70	56,20	56,70	57,20	57,70	57,70
21	Persentase pelestarian cagar budaya	%	39,87	41,69	43,50	45,32	47,13	48,95	48,95
22	Kampung Moderasi Beragama	Indeks	4	6	8	10	12	14	14
23	Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks	65,20	66,40	67,50	68,60	69,70	70,60	70,60
24	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0,270	0,270	0,269	0,269	0,268	0,268	0,268
25	Indeks Perlindungan Khusus Anak	Indeks	79,66	80,16	80,66	81,16	81,66	82,16	82,16
26	Indeks Literasi Digital	Indeks	53,80	53,80	53,80	53,80	53,80	60,35	60,35
27	Indeks Akses Keuangan Daerah (IAKD)	Indeks	4,78	4,80	4,82	4,83	4,85	4,86	4,86
28	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat Kab/Kota/Provinsi	Unit Layanan	1	1	1	1	1	1	1
29	Jumlah Penyandang Disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	493	647	784	909	1.019	1.128	1.128
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**								
1	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	8,82	9,03	9,25	9,46	9,67	11,85	11,85

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	2,33	2,35	2,37	2,39	2,41	2,50	2,50
3	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang	ribu orang	0,100	0,128	0,158	0,183	0,213	0,269	0,269
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi	%	6,205	6,195	6,185	6,165	6,155	6,866	6,866
5	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian	%	10,74	10,76	10,78	10,80	10,82	19,69	19,69
6	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah	%	4,00	4,08	4,16	4,23	4,31	4,39	4,39
7	Rasio Kewirausahaan Daerah	%	3,96	4,09	4,23	4,36	4,49	4,75	4,75
8	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	1,673	1,715	1,757	1,799	1,841	2,128	2,128
9	Return on Aset (ROA) BUMD	%	0	0,20	0,40	0,61	0,81	1,01	1,01
10	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	52,96	54,16	55,36	56,56	57,76	62,62	62,62
11	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	63,35-64,73	63,66-65,27	63,96-65,81	64,27-66,35	64,57-66,89	64,88-67,43	64,88-67,43
12	Indeks Inovasi Daerah	Angka	73,21	74,67	76,14	77,60	79,07	80,53	80,53
13	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan	%	8,86	8,90	8,95	8,99	9,04	9,08	9,08
14	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan	Juta/orang	50,881	52,481	54,081	55,681	57,281	58,881	58,881
15	Indeks Masyarakat Digital Indonesia	Angka	53,80	55,11	56,42	57,73	59,04	60,35	60,35
16	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok	%	72,09	74,42	76,74	79,07	81,40	83,72	83,72
17	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	23,69	23,70	23,71	23,71	23,72	23,73	23,73
18	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	7,610	8,048	8,486	8,924	9,362	13,380	13,380
19	Proporsi kontribusi PDRB Kota	%	1,52	1,52	1,52	1,53	1,54	1,54	1,54
20	Persentase RT yang memiliki akses terhadap hunian layak dan terjangkau	%	87,79	88,09	88,38	88,67	90,40	92,71	92,71
21	Persentase Desa Mandiri	%	29,60	37,00	44,40	65,77	59,30	66,70	66,70
22	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	0,22	0,23	0,25	0,27	0,30	0,68	0,68
23	Total Dana Pihak Ketiga / PDRB	Milyar	2,99	5,69	8,39	11,09	13,79	16,49	16,49
24	Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota	Rupiah	831.886	998.616	1.165.346	1.332.075	1.498.805	1.665.535	1.665.535
25	Total Kredit/PDRB	%	13,13	13,83	14,54	15,24	15,95	16,66	16,66
26	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan	%	3,46	3,49	3,52	3,55	3,58	3,61	3,61
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**								
1	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	72,15	73,18	74,21	75,24	76,27	77,30	77,30

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
2	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3,41	0	0	0	0	0	0
	Nilai Aspek Tata Kelola dan Manajemen	Nilai	0	0,185	0,190	0,195	0,200	0,205	0,205
3	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	3,19	3,20	3,21	3,22	3,22	4,00	4,00
4	Survey penilaian integritas (SPI) KPK	Indeks	74,78	75,00	75,50	76,00	76,50	78,00	78,00
5	Indeks Persepsi Anti Korupsi (Perangkat Daerah Pelaksana Pelayanan Publik)	Nilai (Sudah dikonversi)	86,05	86,75	87,45	88,14	88,84	89,54	89,54
6	Pelanggaran Peraturan Daerah	Angka	200,00	198,00	196,00	194,00	192,00	190,00	190,00
7	Angka Kriminalitas	Angka	0,025	0,024	0,022	0,021	0,019	0,018	0,018
8	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu	%	83,01	83,61	84,22	84,82	85,43	86,03	86,03
9	Persentase Kerjasama yang Terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan	%	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	14,00
11	Penilaian Capaian Aksi HAM	Nilai	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM	Kota Peduli HAM
12	Indeks Pemerintahan Digital	Indeks	-	1,70	1,80	1,90	2,00	2,10	2,10
13	Indeks Zakat Nasional (IZN)	Indeks	0,64	0,67	0,70	0,73	0,76	0,79	0,79
INDIKATOR KINERJA KUNCI									
I	**Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
A	**Pendidikan**								
1	Tingkat partisipasi penduduk usia 5-6 tahun jenjang PAUD	%	75,53	75,90	76,20	76,50	76,70	76,90	76,90
2	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-12 tahun jenjang Pendidikan Dasar	%	98,49	98,78	99,07	99,36	99,65	99,85	99,85
3	Tingkat partisipasi penduduk usia 13-15 tahun jenjang Pendidikan menengah pertama	%	97,28	97,38	97,48	97,68	97,78	97,90	97,90
4	Tingkat partisipasi penduduk usia 7-18 tahun jenjang Pendidikan Kesetaraan	%	36,50	36,75	37,00	37,50	37,75	38,00	38,00
B	**Kesehatan**								
1	Rasio daya tampung Rumah Sakit Rujukan	Rasio	1,46	1,46	1,47	1,47	1,47	1,48	1,48
2	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	%	100	100	100	100	100	100	100
4	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	%	100	100	100	100	100	100	100
5	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	100	100	100	100	100	100	100
6	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	sesuai standar								
8	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
9	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
11	Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
12	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
13	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
14	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	100	100	100	100	100	100	100
C	**Pekerjaan Umum Penataan Ruang**								
1	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota	%	0	0	0	0	0	0	0
2	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	44,49	45,79	47,08	48,38	49,67	50,96	50,96
3	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	%	52,02	54,37	56,73	59,08	61,44	63,79	63,79
4	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	%	93	93.8	94.3	95.79	96.67	98	98
5	Rasio kepatuhan IMB kab/ kota	%	62,85	62,97	63,09	63,21	63,33	63,44	63,44
6	Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota	%	55.92	57.47	59.02	60.57	62.12	63.67	63.67
7	Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi		31,85	36,69	41,54	46,38	51,22	56,06	56,06
8	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	%	100	100	100	100	100	100	100
D	**Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani	%	10	20	40	60	80	100	100
4	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	unit	30	50	50	50	50	50	280
5	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas	%	85,00	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00	90,00

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	Umum)								
E	**Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**								
1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100	100	100
3	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	jiwa	100	100	100	100	100	100	100
4	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	jiwa	100	100	100	100	100	100	100
5	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	jiwa	100	100	100	100	100	100	100
6	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	menit	15	15	15	15	15	15	15
F	**SOSIAL**								
1	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (SPM)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	%	100	100	100	100	100	100	100
II	**Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**								
A	**Tenaga Kerja**								
1	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	0,03	0,05	0,1	0,3	0,5	0,53	0,53
3	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	%	93,84	94,74	95,63	96,50	97,42	98,31	98,31
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	91	91.20	91.48	91.66	91.85	92	92
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	44	45	47	50	55	65	65
B	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**								
1	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	8,49	8,50	8,51	8,52	8,53	8,54	8,54
2	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota	%	0,234	0,266	0,282	0,293	0,309	0,319	0,319
3	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	%	47,31	42,20	37,33	32,45	27,33	22,43	22,43
C	**Pangan**								
1	Persentase ketersediaan cadangan pangan	%	100	100	100	100	100	100	100
D	**Pertanahan**								

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
1	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	%	70,00	75,00	80,00	83,00	86,00	90,00	90,00
2	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	%	86,07	88,85	91,64	94,43	97,21	100,00	100
3	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100	100	100	100
E	**Lingkungan Hidup**								
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	Indeks	71,91	72,122	72,334	72,546	72,758	72,97	72,97
2	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	74,46	74,56	75,66	76,76	77,86	78,96	78,96
3	Ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	78.26	80	82	85	87	90	90
F	**Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**								
1	Perekaman KTP elektronik	%	99.34	99.42	99.45	99.50	99.53	99.55	99.55
2	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	75,98	80	85	90	93	95	95
3	Kepemilikan akta kelahiran	%	99,61	99,69	99,77	99,84	99,92	100	100
4	Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	%	100	100	100	100	100	100	100
G	**Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa**								
1	Persentase pengentasan desa tertinggal	%	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	100	100	100	100	100	100	100
H	**Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana**								
1	TFR (Angka Kelahiran Total)	Angka	2.36	2.34	2.33	2.32	2.30	2.29	2.29
2	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (*Modern Contraceptive Prevalence Rate*/mCPR)	%	82,30	82,60	82,90	83,20	83,50	83,80	83,80
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (*unmet need*)	%	12,82	12,78	12.75	12.73	12.71	12.68	12,68
I	**Perhubungan**								
1	Rasio konektivitas kabupaten/kota	Rasio	0,56	0,57	0,59	0,61	0,62	0,64	0,64
2	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	Rasio	0,25	0,32	0,39	0,46	0,53	0,60	0,60
J	**Komunikasi dan Informatika**								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
3	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	%	77,07	77,30	77,54	77,77	78,00	78,24	78,24
K	**Koperasi, usaha kecil dan menengah**								
1	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	10	10	20	30	40	50	50
2	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	%	0,70	0,89	1,07	1,26	1,45	1,64	1,64
L	**Penanaman Modal**								
1	Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota	%	8,83	9,03	9,23	9,43	9,63	9,83	9,83
M	**Kepemudaan dan Olahraga**								
1	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri		3,01	3,04	3,08	4,02	4,06	4,10	4,10
2	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan		6,04	6,83	7,62	8,42	9,21	10,00	10
3	Peningkatan prestasi olahraga		100	100	100	100	100	100	100
N	**Statistik**								
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
O	**Persandian**								
1	Tingkat keamanan informasi pemerintah	%	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	80,00
P	**Kebudayaan**								
1	Terlestarikannya Cagar Budaya	%	100	100	100	100	100	100	100
Q	**Perpustakaan**								
1	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
2	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	%	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00	95,00
R	**Kearsipan**								
1	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Psl 40 dan 59 U 43/2009)	%	79,00	79,05	79,10	79,15	79,20	79,25	79,25
2	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	%	40,00	40,05	40,10	40,15	40,20	40,25	40,25
III	**Urusan Pilihan**								
A	**Kelautan dan Perikanan**								
1	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
	data: one data KKP)								
B	**Pariwisata**								
1	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	%	12,99	13,02	13,05	13,08	13,11	13,14	13,14
2	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota	%	13,83	13,87	13,91	13,95	13,99	14,03	14,03
3	Tingkat hunian akomodasi	%	17,03	17,27	17,50	17,74	17,98	18,22	18,22
4	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	2,30	2,34	2,38	2,42	2,46	2,50	2,50
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	%	3,20	3,40	3,60	3,80	4,00	4,20	4,20
C	**Pertanian**								
1	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	%	6,05	6,23	6,40	6,58	6,76	6,94	6,94
2	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (Persentase kasus Zoonosis kab/ kota)	%	2,50	2,50	2,75	3,00	3,25	3,50	3,50
3	Peningkatan produktifitas padi per hektar per tahun.	Ton/Ha/Tahun	5,875	5,880	5,885	5,890	5,895	5,900	5,900
D	**Perdagangan**								
1	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	49,09	54,79	60,49	66,18	71,88	77,57	77,57
3	Persentase alat & alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	2,08	2,28	2,48	2,68	2,88	3,08	3,08
E	**Perindustrian**								
1	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota	%	4	4,078	4,156	4,234	4,312	4,39	4,39
2	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	%	100	100	100	100	100	100	100
IV	**Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan**								
A	**Perencanaan**								
1	Indeks Perencanaan Pembangunan	Nilai	95,09	95,29	95,49	95,69	95,89	96,09	96,09
B	**Keuangan**								
1	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	%	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
2	Rasio PAD	%	11,03	11,60	12,00	12,62	13,69	13,62	13,62
3	Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Nilai	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
4	Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Nilai	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
5	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (dikurangi *transfer expenditures*)	%	100	100	100	100	100	100	100

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
6	Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
C	**Pengadaan**								
1	Persentase pengadaan konstruksi pada kuartal pertama tahun berikutnya	%	0	0	0	0	0	0	0
2	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	%	0,73	1,03	1,33	1,63	1,93	2,23	2,23
3	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	%	35	36	37	38	39	40	40
4	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	%	23,66	25,82	27,99	30,16	32,32	34,49	34,49
D	**Kepegawaian**								
1	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menegah/Dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Rasio Pegawai Fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	45,79	47,98	50,17	52,37	54,56	56,75	56,75
3	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	80	80	80	80	80	80	80
E	**Pendidikan dan Pelatihan**								
1	Rasio jabatan fungsional memiliki sertifikat kompetensi selain guru dan tenaga kesehatan	%	80	80	80	80	80	80	80
F	**Penelitian dan Pengembangan**								
1	Persentase fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi riset dan Inovasi daerah	%	100	100	100	100	100	100	100
G	**Manajemen Keuangan**								
1	Deviasi Realisasi Belanja terhadap Belanja Total dalam APBD	%	-11,00	-10,50	-10,20	-10,00	-9,80	-9,50	-9,50
2	Deviasi Realisasi PAD terhadap Anggaran PAD dalam APBD	%	-11,50	-11,00	-10,80	-10,50	-10,00	-9,80	-9,80
3	Manajemen Aset :								
	- Apakah ada daftar asset tetap ?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	- Apakah ada manual untuk Menyusun daftar asset tetap ?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	- Apakah ada proses inventarisasi asset tahunan ?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
	- Apakah nilai asset tercantum dalam laporan anggaran ?	(Ya/Tidak)	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya	Ya
4	Rasio Anggaran Sisa terhadap Total Belanja dalam APBD Tahun Sebelumnya	%	1,25	1,25	1,22	1,20	1,18	1,18	1,18
H	**Transparasi dan Partisipasi Publik**								
1	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)	%	92,91	94,39	95,86	97,34	98,81	100,00	100,00
2	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	%	41,80	41,94	42,07	42,20	42,34	42,47	42,47

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KONDISI AKHIR RPJMD
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*	*(10)*
I	**Sekretariat DPRD**								
1	Persentase penetapan Peraturan Daerah sesuai dengan Propemperda	%	100	100	100	100	100	100	100
V	**Unsur Kewilayahan**								
A	**Kecamatan Lembah Segar**								
1	Persentase kepuasan pelayanan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
B	**Kecamatan Barangin**								
1	Persentase kepuasan pelayanan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
C	**Kecamatan Talawi**								
1	Persentase kepuasan pelayanan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
D	**Kecamatan Silungkang**								
1	Persentase kepuasan pelayanan masyarakat	%	100	100	100	100	100	100	100
VI	**Unsur Pemerintahan Umum**								
A	**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik**								
1	Persentase penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	100	100	100
2	Persentase Partai Politik yang melaksanakan pendidikan politik	%	100	100	100	100	100	100	100

BAB V
PENUTUP

5.1 PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN RPJMD

5.1.1 Pedoman Transisi

Pada saat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 belum tersusun dan untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD Tahun 2025-2029 berakhir, maka RPJMD Tahun 2025-2029 menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD tahun pertama dibawah kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih hasil pemilihan umum Kepala Daerah (Pemilukada) periode berikutnya dengan tetap berpedoman pada RPJPD Kota Sawahlunto tahun 2025-2045 dan RPJMN Tahun 2030-2034.

5.1.2 Kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 merupakan panduan bagi Pemerintah Kota Sawahlunto dalam melakukan pembangunan 5 (lima) tahun kedepan dan merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Oleh karena itu konsistensi, kerjasama, transparansi dan inovasi serta rasa tanggung jawab yang tinggi diperlukan guna pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Wali Kota Sawahlunto berkewajiban menyebarluaskan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 kepada masyarakat;
2. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dilaksanakan dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah yang sepenuhnya dijalankan secara bersama dan diarahkan oleh Wali Kota dalam kewajiban menyelenggarakan pemerintahan daerah;
3. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Sawahlunto dan seluruh pemangku kepentingan agar mendukung pencapaian target-target sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029;
4. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Sawahlunto dan seluruh pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program yang tercantum di dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dengan sebaik-baiknya;
5. Seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kota Sawahlunto agar segera menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 setelah penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ini;
6. Penetapan target indikator kinerja daerah dalam RPJMD 2025-2029 dilakukan berdasarkan hasil kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD;
7. RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahun mulai Tahun 2025-2029;
8. Dalam hubungannnya dengan keuangan daerah, keberadaan RKPD Kota Sawahlunto merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun anggaran berikutnya, yang sebelumnya dirumuskan kedalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);

9. Program-program yang dituangkan dalam RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 dilaksanakan secara operasional oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto yang didukung oleh Instansi vertikal yang ada diwilayah Kota Sawahlunto serta masyarakat dan dunia usaha;
10. Program-program dalam RPJMD adalah program yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

5.2 PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RPJMD

Pengendalian dan evaluasi RPJMD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang bertujuan untuk menjamin dan memastikan pelaksanaan pembangunan daerah selaras dengan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD. Melalui mekanisme pengendalian pemerintah daerah dapat memantau pelaksanaan program dan kegiatan secara berkala,serta mengidentifikasi potensi deviasi atau penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk mencapai menilai capaian kinerja pembangunan berdasarkan indikator dan target yang telah dirumuskan. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan keputusan strategis, perbaikan kebijakan, penyesuaian program serta penguatan akuntabilitas dan transparansi pembangunan sehingga dapat mendorong terwujudnya pembangunan daerah yang efektif, efisien, adaptif dan berkelanjutan.

5.2.1 Pengendalian Pelaksanaan RPJMD

Pengendalian terhadap RPJMD dilakukan untuk mengawal ketercapaian sasaran pembangunan daerah dengan memastikan pelaksanaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta menyusun rekomendasi atas penyesuaian kebijakan apabila diperlukan. Pengendalian dilakukan secara menyeluruh baik oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja pembangunan daerah. Pengendalian pelaksanaan pembangunan tidak hanya mencakup penilaian atas kesesuaian pelaksanaan dengan sasaran dan target pembangunan, tetapi juga mempertimbangkan dukungan intervensi pemerintah pusat maupun intervensi lainnya yang dilaksanakan di daerah sebagai bagian dari strategi pencapaian pembangunan. Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto juga dilakukan berbasis manajemen risiko pembangunan daerah. Dalam proses pengendalian tahunan, pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kebijakan dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan. Risiko yang telah teridentifikasi dan rencana mitigasinya perlu terus dipantau dan disesuaikan secara berkala agar pelaksanaan kebijakan pembangunan tetap pada jalurnya. Pengendalian pelaksanaan dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan *supervise* terhadap pelaksanaan program dan kegiatan yang tercantum dalam RPJMD. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan daerah berjalan sesuai rencana, serta dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, maka dilakukan tindakan korektif dan/atau penyempurnaan kebijakan untuk memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pengendalian pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 diharapkan dapat menghasilkan tindakan korektif yang berkelanjutan selama periode perencanaan. Tindakan korektif ini terdiri atas :

1. Tindakan konstruktif, berupa penyesuaian pelaksanaan tahunan untuk memastikan bahwa intervensi pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana. Penyesuaian ini meliputi dan tidak terbatas pada perbaikan strategi pelaksanaan, percepatan implementasi, dan penyesuaian teknis lainnya;
2. Tindakan korektif dilakukan dalam konteks kebijakan, yakni dalam kerangka perencanaan antar tahun dalam periode RPJMD untuk memastikan sasaran pembangunan pada akhir periode RPJMD dapat tercapai. Penyesuaian

kebijakan dalam kerangka pengendalian RPJMD ini fokus pada perencanaan kebijakan antar tahun yang meliputi dan tidak terbatas pada terminasi program/proyek, penajaman lokus, penyesuaian strategi, desain dan sasaran, serta tata kelola pelaksanaan (regulasi dan kelembagaan).

Tindak lanjut dari proses pengendalian ditetapkan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029. Pengendalian ini menggambarkan keterkaitan yang erat antara aktivitas pemantauan, evaluasi dan pengendalian secara terpadu sepanjang periode jangka menengah, adalah sebagai berikut :

1. Pemantauan pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029, mencakup :
   - Pemantauan atas perkembangan pelaksanaan prioritas Pembangunan daerah, baik yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, Kementerian/Lembaga (K/L), maupun pemangku kepentingan lainnya.
   - Pemantauan terhadap perkembangan pelaksanaan mitigasi risiko pembangunan daerah sebagai bagian dari pendekatan manajemen risiko. Pemantauan pelaksanaan RPJMD dilakukan secara rutin dan berkala serta diselaraskan dengan pemantauan pelaksanaan RKPD. Hasil pemantauan ini menjadi dasar pengambilan keputusan dalam pengendalian operasional terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan daerah.
2. Evaluasi saat pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 untuk menilai efektifitas kebijakan dan ketercapaian sasaran secara berkala, mencakup dua hal, yaitu :
   - Evaluasi tahunan melalui evaluasi pelaksanaan RKPD dan evaluasi kinerja perangkat daerah, evaluasi terhadap pencapaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah.
   - Evaluasi paruh waktu yang dilaksanakan pada pertengahan periode RPJMD. Evaluasi ini memberikan umpan balik (feedback) bagi penyesuaian kebijakan pembangunan daerah untuk sisa periode RPJMD.

5.2.2 Evaluasi Akhir RPJMD Tahun 2025-2029

Evaluasi akhir ini dilakukan pada akhir tahun terakhir periode pelaksanaan RPJMD, dan dapat diperbaharui (dimutakhirkan) pada triwulan pertama tahun berikutnya setelah periode pelaksanaan RPJMD. Evaluasi akhir RPJMD bertujuan untuk :

1. Menilai capaian sasaran pembangunan daerah secara menyeluruh;
2. Mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan faktor-faktor penghambat selama periode lima tahun pelaksanaan; dan
3. Memberikan masukan strategis untuk penyusunan dokumen RPJMD periode berikutnya dalam kerangka RPJPD Kota Sawahlunto Tahun 2025–2045.

Mekanisme evaluasi akhir pelaksanaan RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029 ini mencakup evaluasi kinerja pembangunan secara menyeluruh, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program strategis daerah. Hasil evaluasi akhir RPJMD akan menjadi bahan utama dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka menengah berikutnya yang dikoordinasikan oleh Bappeda Kota Sawahlunto.

5.3 MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Manajemen risiko dalam organisasi pemerintah memiliki peran penting, terutama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mencakup penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas dalam pengelolaan urusan publik. Manajemen risiko mendukung pencapaian prinsip-prinsip tersebut, khususnya dalam meminimalkan potensi risiko yang dapat menghambat pelaksanaan tugas organisasi. dapat

diminimalkan. Hal ini dilakukan melalui proses identifikasi dan pengelolaan risiko secara sistematis sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, yang wajib dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Dalam konteks organisasi pemerintah, risiko didefinisikan sebagai ketidakpastian yang dapat berdampak pada pencapaian tujuan. Risiko tersebut meliputi, antara lain: korupsi, penurunan penerimaan daerah, kegagalan dalam pelaksanaan program prioritas, hingga penurunan kualitas pelayanan publik. Keberadaan risiko ini tidak hanya mengancam efektivitas organisasi, tetapi juga dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah. Oleh karena itu, penerapan manajemen risiko yang efektif menjadi kebutuhan mendesak agar potensi risiko dapat diantisipasi dan dikelola. bagi organisasi pemerintah untuk mengantisipasi dan mengelola potensi risiko tersebut. Dalam sistem pemerintahan daerah, tujuan pembangunan secara jelas tertuang dalam dokumen perencanaan, yang seharusnya sinkron dengan perencanaan nasional (RPJMN). Tujuan tersebut terbagi dalam 3 jenis, yaitu tujuan strategis pemerintah daerah yang tertuang dalam dokumen RPJMD, tujuan strategis Perangkat Daerah yang tertuang dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkat kegiatan/operasional yang tertuang dalam dokumen Renja Perangkat Daerah.

Dalam penerapannya, pengendalian yang dilakukan dalam proses manajemen risiko terutama dalam rangka mencapai target kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah tersebut dilakukan dalam 2 tahapan pengendalian, yaitu pada tahapan perencanaan dan tahapan pelaksanaan.

1. Pengendalian pada tahap perencanaan
   Pengendalian pada tahapan perencanaan bertujuan untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan, penganggaran dan pelaksanaannya. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi terhadap perencanaan jangka menengah dan jangka pendek yang mencakup:
   a. Konsistensi penjabaran perencanaan pada setiap dokumen perencanaan meliputi konsistensi rumusan tujuan dan sasaran pembangunan berikut indikator kinerja, konsistensi kebijakan yang dituangkan dalam program yang relevan hingga pada rumusan kegiatan indikatif yang mendukung pencapaian target tujuan perencanaan pembangunan. Konsistensi penjabaran ini dilakukan antar dokumen perencanaan yang meliputi: konsistensi dokumen RPJPD dengan RPJPN, RPJMD dengan RPJMN, RKPD dengan RKP dan RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renja Perangkat Daerah dengan RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.
   b. Penentuan prioritas pembangunan daerah yang diimplementasikan dalam program-program prioritas dengan indikator keberhasilan yang terukur dan berbatas waktu.
   c. Konsistensi perencanaan dan penganggaran, yang menjamin bahwa rencana yang di tetapkan dapat diimplementasikan melalui anggaran yang sesuai.
   d. Identifikasi risiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Identifikasi risiko dalam perencanaan pembangunan dilakukan dengan mengacu pada indikator kinerja sasaran, untuk mengantisipasi potensi hambatan pencapaian tujuan pembangunan. Risiko diuraikan mencakup jenis dan penyebabnya, dampak terhadap pencapaian sasaran, serta kategori dan sumber risiko, baik internal maupun eksternal. Berdasarkan identifikasi tersebut, disusun rencana tindak pengendalian (mitigasi) yang bertujuan menurunkan level risiko dan menjaga agar manfaat pembangunan tetap dapat dirasakan masyarakat secara optimal.

2. Pengendalian pada tahap pelaksanaan

Pengendalian pada tahapan pelaksanaan bertujuan untuk menjamin implementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan Pengendalian ini dilakukan melalui pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi ini mencakup :

a. Pemantauan terhadap pelaksanaan prioritas pembangunan daerah
b. Pemantauan terhadap pelaksanaan mitigasi risiko dalam rangka pencapaian target tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dilakukan.
c. Evaluasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah.
d. Evaluasi pencapaian sasaran Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Program yang mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah.

Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan pengendalian pada proses manajemen risiko dalam rangka menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan daerah, perlu didukung dengan regulasi agar pelaksanaan pengendalian berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. Tatanan regulasi tersebut menyinergikan regulasi terkait pemantauan, evaluasi pengendalian, manajemen risiko pembangunan dan manajemen kinerja. Sinergi regulasi ini diperlukan untuk menjaga konsistensi pelaksanaan pengendalian dengan kinerja yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya, untuk menjaga kualitas pengendalian yang dilakukan, regulasi pengendalian ini dievaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan kebijakan tertinggi yang berlaku.

5.4 TATA KELOLA SATU DATA INDONESIA TINGKAT KOTA SAWAHLUNTO

5.4.1 Memperkuat Tata Kelola Pembangunan dan Mendorong *Transformasi Digital* Daerah

Pemerintah Kota Sawahlunto menempatkan tata kelola data yang andal, akurat, mutakhir, dan terintegrasi sebagai fondasi utama pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Data berkualitas diperlukan untuk mendukung perencanaan yang berbasis bukti, pengambilan keputusan yang tepat sasaran, alokasi sumber daya yang efisien, serta evaluasi program yang akuntabel. Tanpa sistem data yang tertata, pembangunan berisiko tidak optimal dan rawan *inefisiensi*. Sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia, penguatan tata kelola data menjadi prioritas strategis daerah melalui peningkatan integrasi, standardisasi, dan pemanfaatan lintas sektor. Data juga digunakan untuk memantau capaian pembangunan secara *real-time,* memastikan kebijakan sesuai standar, serta mengukur dampak intervensi terhadap indikator kinerja. Dengan demikian, data menjadi instrumen krusial dalam seluruh siklus pembangunan daerah, dari perencanaan hingga evaluasi, guna mewujudkan pembangunan Kota Sawahlunto yang terukur, transparan, dan responsif.

Pemerintah Kota Sawahlunto menyambut baik implementasi Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan berkomitmen untuk menginternalisasi prinsip-prinsipnya. Berbagai langkah strategis telah dan akan terus dilakukan, mulai dari peningkatan akurasi, kualitas, serta kemutakhiran data oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), hingga penguatan integrasi dan kolaborasi antar-instansi untuk mencegah tumpang tindih informasi. Penerapan standar data, metadata yang baku, serta penggunaan kode referensi menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem data yang *interoperabel* di seluruh wilayah provinsi. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendukung perencanaan pembangunan yang lebih *responsif, adaptif*, dan berbasis data.

5.4.2 Portal Satu Data Indonesia Tingkat Kota Sawahlunto

Sejalan dengan kebijakan nasional Satu Data Indonesia, Pemerintah Kota Sawahlunto memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan mengoptimalkan portal data daerah sebagai *single source of truth* bagi informasi pembangunan di tingkat kota. Portal ini dirancang untuk mengintegrasikan data dari berbagai Perangkat Daerah, serta menyediakan akses data yang cepat, efektif, dan efisien bagi seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, akademisi, dunia usaha, dan masyarakat. Kunci keberhasilan dari portal ini terletak pada terwujudnya *interoperabilitas* antar sistem data di berbagai level pemerintahan, sehingga memungkinkan pertukaran data yang lancar dan mendukung pengambilan keputusan yang lebih berbasis bukti (*evidence-based*). Selain itu, pemanfaatan sistem penghubung layanan pemerintah juga dapat diintegrasikan untuk mendorong *efisiensi, akuntabilitas*, dan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik, sekaligus mempercepat agenda *transformasi* digital daerah.

Keberadaan *platform* Satu Data Indonesia di tingkat Kota Sawahlunto diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan tata kelola data pemerintah daerah secara menyeluruh. Peningkatan kualitas, integrasi, koordinasi, dan keterbukaan data akan meminimalisasi *duplikasi* dan *inefisiensi* dalam pengelolaan informasi pembangunan. Dengan data yang lebih terstruktur dan dapat diakses secara luas, proses perumusan kebijakan pembangunan diharapkan menjadi lebih *adaptif*, berbasis data, dan *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat. Evaluasi dan pengendalian pembangunan juga akan menjadi lebih terukur dan objektif, sehingga mendorong alokasi sumber daya yang lebih efisien dan mendukung pencapaian hasil pembangunan yang optimal bagi masyarakat Kota Sawahlunto.

5.4.3 Portal Satu Data Indonesia Kota Sawahlunto Mendorong Reformasi Birokrasi dan Transformasi Layanan Publik Berbasis Kebutuhan Masyarakat

Implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di Kota Sawahlunto memegang peran strategis dalam mendukung agenda reformasi birokrasi dan mempercepat *transformasi* digital di tingkat daerah. Dengan tersedianya data yang akurat, akuntabel, transparan, dan mudah diakses, tingkat kepercayaan publik terhadap kinerja pemerintah daerah diharapkan semakin meningkat. Tata kelola data yang terstandar dan terpercaya juga menjadi landasan utama dalam memperkuat sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) dan memperluas adopsi teknologi digital di berbagai aspek pelayanan publik, perencanaan, hingga pengambilan keputusan strategis di Kota Sawahlunto. Penguatan tata kelola data dan pemanfaatan teknologi digital secara menyeluruh, arah kebijakan pembangunan di Kota Sawahlunto diharapkan semakin berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

5.5 KOLABORASI MULTIPIHAK DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Kolaborasi multipihak dalam perencanaan pembangunan merupakan strategi kunci dalam mewujudkan pembangunan yang *inklusif,* berkelanjutan, dan *responsif* terhadap kebutuhan masyarakat. Kolaborasi mencakup peran serta berbagai pemangku kepentingan yang berada di daerah atau tempat pelaksanaan pembangunan dilakukan, termasuk diantaranya adalah pemerintah, pemerintah daerah, DPRD, Dunia Usaha/sektor swasta, masyarakat, akademisi dan perguruan tinggi, dan lembag non-pemerintah, media dan termasuk kelompok rentan, dengan mengedepankan prinsip-prinsip *inklusivitas*, partisipatif, transparansi, aksesibilitas, kesetaraan, keadilan, akuntabilitas, kemitraan, sinergi, serta keberlanjutan.

Kolaborasi multipihak dalam perencanaan pembangunan daerah baik pada dokumen rencana pembangunan daerah maupun dokumen rencana Perangkat Daerah mencakup pada tahapan siklus perencanaan, mulai dari penyusunan, penetapan, pengendalian pelaksanaan, hingga evaluasi hasil. Setiap tahapan ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan peran dan tanggung jawab yang berbeda-beda, sehingga proses pembangunan dapat berjalan secara partisipatif, inklusif, transparan, dan akuntabel.

Adapun ruang lingkup kolaborasi multipihak pada setiap tahapan perencanaan pembangunan, yakni :

1. Kolaborasi multipihak dalam tahapan penyusunan rencana pembangunan daerah yakni proses yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan tujuan, prioritas, dan strategi pembangunan di suatu daerah. Proses ini penting untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang dihasilkan adalah inklusif, partisipatif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat dan lingkungan. Ruang lingkup kolaborasi pada tahapan ini antara lain melalui pelaksanaan Konsultasi Publik / Forum Perangkat Daerah, pelaksanaan diskusi tematik, kajian dan analisis kebijakan, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pelaksanaan lokakarya atau seminar serta penyampaian saran dan masukan penyusunan rencana pembangunan daerah;

2. Kolaborasi pada tahapan penetapan rencana pembangunan merupakan tahapan rancangan rencana yang telah disusun disahkan menjadi dokumen formal yang menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Dokumen ini biasanya mencakup perincian program, kegiatan, serta alokasi anggaran. Pada tahapan penetapan rencana pembangunan daerah, kolaborasi multipihak sangat penting untuk memastikan bahwa dokumen perencanaan yang akan ditetapkan mencerminkan kesepakatan bersama dan merespon kebutuhan berbagai pihak yang terlibat. Ruang lingkup kolaborasi pada tahapan ini antara lain yakni berupa penyelarasan rencana pembangunan daerah dengan rencana program/kegiatan dari lembaga non pemerintah (masyarakat dan dunia usaha/swasta) serta pelaksanaan sosialisasi terhadap rencana pembangunan daerah yang telah di tetapkan yakni memberikan informasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terkait dengan rencana pembangunan yang akan dilaksanakan, yang bertujuan untuk memastikan semua pihak mengetahui secara detail rencana pembangunan yang akan dilakukan serta manfaat yang akan di terimanya, sehingga masyarakat dapat melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap rencana yang dilaksanakan;

3. Kolaborasi pada tahapan pengendalian pelaksanaan rencana bertujuan untuk memastikan bahwa rencana pembangunan yang telah disepakati dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, baik dari segi waktu, anggaran, maupun tujuan. Proses pengendalian ini melibatkan monitoring dan koordinasi antar pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pembangunan. Ruang lingkup kolaborasi pada tahapan ini antara lain yakni pemantauan secara berkala, publikasi informasi laporan kemajuan kegiatan secara berkala kepada pemangku kepentingan serta adanya forum diskusi dan konsultasi terbuka antara pemerintah daerah, masyarakat, dan sektor swasta untuk membahas isu-isu dan permasalahan yang muncul selama pelaksanaan rencana.

4. Kolaborasi pada tahapan evaluasi hasil pelaksanaan rencana bertujuan untuk mengukur sejauh mana rencana pembangunan yang telah dijalankan mencapai target dan sasaran yang ditetapkan. Evaluasi ini juga menjadi masukan untuk perencanaan pembangunan selanjutnya agar lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ruang lingkup kolaborasi pada tahapan ini antara lain yakni pelaksanaan *Focus Group Discussions* (FGD) dengan berbagai kelompok untuk mendapatkan perspektif mendalam tentang dampak dan efektivitas rencana pembangunan, penyusunan laporan evaluasi dan rekomendasi perbaikan mencakup temuan, analisis, rekomendasi, dan kesimpulan dari hasil evaluasi serta publikasi laporan evaluasi kepada seluruh pihak terutama yang terdampak dari pelaksanaan rencana pembangunan yang dilaksanakan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas.

19 AUG 2025
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

INDRA MULYONO, SH, MH
NIP. 19820411 201001 1 014

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ttd

RIYANDA PUTRA

LAMPIRAN I. METADATA INDIKATOR KINERJA DAERAH

1. Metadata Indikator Kinerja Makro

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Manusia**
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$ IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran.
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianyasemakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah : IPM < 60 - Sedang : 60 ≤ IPM < 70 - Tinggi : 70 ≤ IPM < 80 - Sangat tinggi : IPM ≥ 80
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Tingkat Kemiskinan (%)**
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$P\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i-l}^{q}[\frac{z - y_i}{z}]$ **Dimana :** a = 0 z = garis kemiskinan y_i = Rata-Rata Pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinann(i=1,2,3,…,q), $y_i<z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	**Tingkat Pengangguran Terbuka**
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu : • penduduk yang aktif mencari pekerjaan; • penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru;

	• penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; • kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$$TPT = \frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$$ **Keterangan :** TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	2 kali per Tahun

Nama Indikator	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$$LPE = \frac{PDRB\ ADHK(t) - PDRB\ ADHK(t-1)}{PDRB\ ADHK(t-1)} x100\%$$ **Keterangan :** t = Tahun Tertentu (t-1) = Tahun Sebelum
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**PDRB Per Kapita ADHB (Rp Juta)**
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$$PDRB\ Per\ Kapita\ ADHB = \frac{PDRB\ ADHB}{Populasi}$$ **Keterangan :** PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^{n} (p_i - p_{i-1})\,(y_i - y_{i-1})$$ **Dimana** : i = 1; p_i = proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i; y_i = proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i; n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut : 1. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 2. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 3. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva *Lorenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

2. Metadata Indikator Kinerja Sasaran Visi

Nama Indikator	PDRB Per Kapita ADHB (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$$PDRB\ Per\ Kapita\ ADHB = \frac{PDRB\ ADHB}{Populasi}$$ **Keterangan :** PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku; populasi = jumlah penduduk regional; t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$$Kontribusi\ PDRB\ Industri\ Pengolahan = \frac{X}{Y} x100\%$$ **Keterangan :** X = Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan Y = Nilai Total PDRB ADHB
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap nilai PDRB ADHB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$$P\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i-l}^{q}[\frac{z - y_i}{z}]$$ **Dimana :** a = 0 z = garis kemiskinan y_i = Rata-Rata Pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinann(i=1,2,3,…,q), $y_i<z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^{n}(p_i - p_{i-1})\,(y_i - y_{i-1})$$ **Dimana** : i = 1 p_i = proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i y_i = proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1.

	• Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut : 4. Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. 5. Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. 6. Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva *Lorenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$$LPE\ (t) = \frac{PDRB\ ADHK(t) - PDRB\ ADHK(t-1)}{PDRB\ ADHK(t-1)} x100\%$$ **Keterangan :** t = Tahun Tertentu (t-1) = Tahun Sebelum
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**
Definisi	Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. (Permendagri No. 18/2020).
Rumus Perhitungan	EPPD = [CKM + CKUP] x 0.75 + [PKM] x 0.25 **Keterangan** : CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi : 1. Skor kinerja 1,00 – 1,80 dengan status kinerja Sangat Rendah; 2. Skor kinerja 1,81 – 2,60 dengan status kinerja Rendah; 3. Skor kinerja 2,61 – 3,40 dengan status kinerja Sedang; 4. Skor kinerja 3,41 – 4,20 dengan status kinerja Tinggi; 5. Skor kinerja 4,21 – 5,00 dengan status kinerja Sangat Tinggi.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Satu kali per tahun

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$ IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran.
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianyasemakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah : IPM < 60 - Sedang : 60 ≤ IPM < 70 - Tinggi : 70 ≤ IPM < 80 - Sangat tinggi : IPM ≥ 80
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$Tingkat\ Produktivitas\ Tenaga\ Kerja = \frac{PDRB\ ADHK}{Jumlah\ Tenaga\ Kerja}\ x\ 100\ \%$ (Permendagri No. 18/2020)
Interpretasi	1. Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. 2. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK dengan total penduduk yang bekerja. 3. Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0{,}376\ x\ IKA) + (0{,}405\ x\ IKU) + (0{,}219\ x\ IKTL)$ **Keterangan :** IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Dinas PKP2LH Kota Sawahlunto)
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : - Sangat Baik : 90 ≤ IKLH ≤ 100 - Baik : 70 ≤ IKLH < 90 - Sedang : 50 ≤ IKLH < 70 - Kurang : 25 ≤ IKLH < 50 - Sangat Kurang : 0 ≤ IKLH < 25
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara dan tutupan lahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Frekuensi	Tahunan

3. Metadata Indikator Kinerja Utama

Misi 1 :

Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Perekonomian yang Berwawasan Lingkungan

Nama Indikator	**Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)**
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$$LPE\ (t) = \frac{PDRB\ ADHK(t) - PDRB\ ADHK(t-1)}{PDRB\ ADHK(t-1)} x100\%$$ **Keterangan :** t = Tahun Tertentu (t-1) = Tahun Sebelum
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**PDRB Per Kapita ADHB (Rp Juta)**
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$$PDRB\ Per\ Kapita\ ADHB = \frac{PDRB\ ADHB}{Populasi}$$ **Keterangan :** PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Tingkat Kemiskinan (%)**
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$$P\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i-l}^{q}[\frac{z - y_i}{z}]$$ **Dimana :** a = 0 z = garis kemiskinan y_i = Rata-Rata Pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinann(i=1,2,3,…,q), $y_i<z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB Daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Pembentukan Modal Tetap Bruto (\% PDRB)} = \frac{\text{PMTB Kota Sawahlunto}}{\text{PDRB ADHK Kota Sawahlunto}} \times 100\%$ **Keterangan :** PMTB = Nilai PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Milliar Rupiah) PDRB ADHK = Total Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah
Interpretasi	Semakin tinggi Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB), semakin besar peranan atau kontribusi komponen PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganggguran. Pengangguran yaitu : • penduduk yang aktif mencari pekerjaan; • penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; • penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; • kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.
Rumus Perhitungan	$TPT = \frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$ **Keterangan :** TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	2 kali per Tahun

Nama Indikator	Rasio Gini
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^{n} (p_i - p_{i-1})\,(y_i - y_{i-1})$$ **Dimana** : i = 1; p_i = proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i; y_i = proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i; n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut : • Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. • Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. • Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva *Lorenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	Proporsi Kontribusi PDRB Kota (%)
Definisi	Proporsi kontribusi PDRB Kota merupakan share PDRB ADHB Kota Sawahlunto terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat.
Rumus Perhitungan	$$\text{Proporsi Kontribusi PDRB Kota} = \frac{\text{PDRB ADHB Kota Sawahlunto}}{\text{PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat}} \times 100\%$$
Interpretasi	Semakin tinggi proporsi kontribusi PDRB Kota, semakin besar peranan atau kontribusi Kota Sawahlunto terhadap ekonomi Provinsi Sumatera Barat.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$Kontribusi\ PDRB\ Industri\ Pengolahan = \frac{X}{Y} x100\%$ **Keterangan :** X = Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan Y = Nilai Total PDRB ADHB
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap nilai PDRB ADHB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB} = \frac{\text{Volume Usaha Koperasi Daerah}}{\text{PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)
Definisi	Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kota Sawahlunto Ekspor Barang dan Jasa didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri). Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah Kota Sawahlunto terdiri dari: • Ekspor ke luar provinsi/Kota Sawahlunto • Impor dari luar provinsi/Kota Sawahlunto
Rumus Perhitungan	$\text{Ekspor Barang dan Jasa (\% PDRB)} = \frac{\text{Ekspor Barang dan Jasa ADHK}}{\text{PDRB ADHK Kota Sawahlunto}} \times 100\%$ **Keterangan :** Ekspor Barang dan Jasa = Nilai PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Milliar Rupiah) PDRB ADHK = Total Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah

Interpretasi	Semakin tinggi Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB), semakin besar peranan atau kontribusi komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (Juta Rupiah)/orang} = \frac{\text{PDRB ADHK}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja}}$
Interpretasi	1. Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. 2. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK dengan total penduduk yang bekerja. 3. Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)**
Definisi	Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	$Tenaga\ Kerja\ Formal = \left(\frac{\sum_{i=3}^{4} \gamma i}{\sum_{i=1}^{7} \gamma i}\right) \times 100\%; i = 1,2,3,\ldots,7$ Keterangan : *Tenaga Kerja Formal* = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal yi = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/karyawan/pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menununjukan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Investasi
Definisi	**Persentase Peningkatan Investasi** adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Investasi} = \frac{(\text{Nilai Investasi Akhir} - \text{Nilai Investasi Awal})}{\text{Nilai Investasi Awal}} \times 100\%$ Keterangan : • Nilai Investasi Akhir: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu setelah terjadi peningkatan. • Nilai Investasi Awal: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu sebelumnya atau nilai investasi mula-mula. • (Nilai Investasi Akhir−Nilai Investasi Awal): Selisih ini menunjukkan besarnya peningkatan nilai investasi. • 100%: Faktor pengali untuk mengubah rasio menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Desa
Defenisi	Pengukuran pembangunan desa di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID) mulai tahun 2025 berdasarkan Permendesa PDT Nomor 9 Tahun 2024. Perubahan tersebut mencakup : penyederhanaan nama, penghitungan dimensi, penambahan indikator, serta perubahan metode pengumpulan data. Perubahan ini juga menyentuh aspek metodologi, fokus pengukuran, dan implikasi kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa Membangun (IDM) digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan di tingkat desa dan untuk menilai status kemajuan desa berdasarkan tiga dimensi utama : sosial, ekonomi, dan ekologi. Dimensi ini diterjemahkan dalam indikator yang mencakup akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keberlanjutan lingkungan. Indeks Desa (ID) menawarkan pendekatan yang lebih sederhana namun berupaya lebih komprehensif dalam menangkap dinamika pembangunan desa. Dalam pengukuran ID, terdapat enam komponen dimensi yang diukur yaitu: Dimensi Layanan Dasar, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonoi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dalam penyusunan Indeks Desa (ID), 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator. Dalam pengukurannya, klasifikasi status kemajuan serta kemandirian desa antara IDM dan ID ditetapkan dengan ambang batas yang berbeda pula.
Rumus Perhitungan	$\text{IDM} = \frac{\sum \text{Indikator Pembangunan Desa}}{\text{Jumlah Indikator}}$ **Keterangan Rumus:** • Indikator Pembangunan Desa: Merupakan ukuran atau variabel yang mencakup berbagai aspek pembangunan

Nama Indikator	Indeks Desa
	desa, seperti tingkat kemiskinan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Setiap indikator diberikan bobot yang mencerminkan pentingnya dalam pembangunan desa. • Jumlah Indikator: Jumlah total indikator atau variabel yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan desa. Setiap indikator memiliki skor atau nilai tertentu berdasarkan data yang dihimpun. • Hasil dihitung dalam skala 0 hingga 100, dengan nilai 100 menunjukkan desa yang sepenuhnya maju dalam semua aspek pembangunan yang diukur. Perbedaan klasifikasi status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar IDM dan ID **Klasifikasi Status Desa** — **IDM** — **ID** Desa Sangat Tertinggal — IDM < 0,4907 — 0% ≤ ID 48,48% Desa Tertinggal — 0,4907 < IDM ≤ 0,5989 — 49,49% ≤ ID ≤ 57,38% Desa Berkembang — 0,5989 < IDM ≤ 0,7072 — 57,39% ≤ ID ≤ 6934% Desa Maju — 0,7072 < IDM ≤ 0,8155 — 69,35% ≤ ID ≤ 79,62 Desa Mandiri — IDM > 0,8155 — 79,63% ≤ ID ≤ 100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IDM menunjukkan bahwa desa tersebut semakin maju dalam hal pembangunan, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur.
Sumber Data	Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan data terkait lainnya
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)
Definisi	Proporsi Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap Total PDRB ADHB Kota Sawahlunto.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan} = \frac{\text{Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, semakin tinggi rasionya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Sawahlunto, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)
Definisi	Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang

	secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x<MDER} f(x)dx$ Keterangan : PoU = Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER = Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy Requirement*) f(x) = Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Juta/orang)**
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja pada lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan dalam menghasilkan produk.
Rumus Perhitungan	Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Juta/orang) = $\frac{\text{Nilai PDRB ADHK Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan}}{\text{Jumlah Tenaga Kerja Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan}}$
Interpretasi	Semakin tinggi Produktivitas Tenaga Kerja sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, semakin baik kualitas pembangunan sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Misi 2 :
Mewujudkan Smart Governance Berbasis IT

Nama Indikator	**Indeks Masyarakat Digital Indonesia**
Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya.
Rumus Perhitungan	Pengukuran IMDI bersumber dari data primer dan berbagai data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei kepada responden individu dan responden perusahaan Indonesia dengan skala 1-100. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu : 1. Infrastruktur dan Ekosistem; 2. Keterampilan Digital; 3. Pemberdayaan; 4. Pekerjaan
Interpretasi	IMDI dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan dan program pengembangan SDM digital di Indonesia karena nilai IMDI dapat menjadi basis pengukuran tingkat kompetensi digital masyarakat Indonesia hingga tingkat kabupaten dan kota. Hasil pengukuran indeks dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan fokus target berdasarkan indikator-indikator di setiap pilar, mendorong koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi setiap pemangku

	kepentingan di level kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia untuk merencanakan dan menetapkan program prioritas pembangunan SDM digital di wilayah masing-masing.
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah**
Definisi	**Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah** adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kapabilitas pemerintah dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah telah bertransformasi secara digital dalam berbagai aspek operasional dan pelayanannya, yang diukur melalui berbagai indikator yang dikelompokkan ke dalam pilar-pilar transformasi digital pemerintah yang telah ditetapkan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Pilar Pemerintah} = \frac{\sum \text{Skor Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100$ Keterangan : • Skor Indikator: nilai dari masing-masing indikator (biasanya dalam skala 0–1 atau 0–100). • Bobot: persentase atau proporsi pentingnya setiap indikator terhadap keseluruhan indeks. • Jumlah Indikator: total indikator yang digunakan dalam pilar pemerintah (misalnya: digitalisasi layanan publik, keterbukaan data, kapasitas SDM digital, keamanan sistem, dsb).
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat transformasi digital yang lebih baik pada pilar tersebut. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian/Lembaga terkait
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Pelayanan Publik**
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. 1. Menentukan nilai untuk setiap indikator $nilai\ per\ indikator = \frac{nilai\ F01 + nilai\ F02 + nilai\ F03}{3}\ x\ bobot\ per\ indikator$ 2. Menentukan nilai setiap aspek $nilai\ per\ aspek = \sum nilai\ per\ indikator$ 3. Menentukan indeks $nilai\ indeks = \sum(nilai\ aspek_n\ x\ bobot\ aspek_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1. Keadilan (*Fairness*); 2. Partisipasi (*Participation*);

	3. Akuntabilitas (*Accountability*); 4. Transparansi (*transparency*); 5. Berdayaguna (*useful*); 6. Aksesibilitas (*accessibility*) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator 111 penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

Misi 3 :
Penguatan Infrastruktur Penunjang Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat

Nama Indikator	**Indeks Kinerja Infrastruktur (IKI)**
Defenisi	Nilai indeks yang menggambarkan kondisi dan kualitas infrastruktur di suatu wilayah atau sektor tertentu, Indeks ini mencakup berbagai aspek infrastruktur fisik seperti jalan, bangunan, air bersih, sanitasi, drainase, saluran irigasi.
Rumus Perhitungan	IKI = (0,2 x Jalan Mantap) + (0,15 x Akses Air bersih) + (0,15 x Akses Sanitasi) + (0,2 x Drainase) + (0,1 x Bangunan Gedung) + (0,2 x Saluran Irigasi) **Keterangan:** • IKI = Indeks Kinerja Infrastruktur • 0,2 : 0,15 : 0,1 : Bobot • Jalan Mantap, Akses Air Bersih, Akses Sanitasi, Drainase dalam Kondisi Baik, Bangunan Gedung Pemerintah dalam kondisi Baik, Saluran Irigasi dalam kondisi baik adalah capaian komponen kinerja infrastruktur
Interpretasi	Nilai yang menunjukkan kualitas infrastruktur suatu wilayah, semakin tinggi nilai IKI semakin baik kualitas infrastruktur wilayah tersebut. Interpretasi Skor 0-60 : Kurang 61-75 : Cukup 76-90 : Baik 91-100 : Sangat Baik
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
Definisi	IRBI dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	Risk $= Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$ **Keterangan :** Hazard = (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability = (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan Capacity = Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu : 1. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 2. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 3. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 4. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 5. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 6. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; 7. Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut : - Rendah : Indeks < 13 - Sedang : Indeks 13 - 144 - Tinggi : Indeks > 144
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0{,}376\ x\ IKA) + (0{,}405\ x\ IKU) + (0{,}219\ x\ IKTL)$ **Keterangan :** IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Dinas PKP2LH Kota Sawahlunto)
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : - Sangat Baik : 90 ≤ IKLH ≤ 100 - Baik : 70 ≤ IKLH < 90 - Sedang : 50 ≤ IKLH < 70

	- Kurang : 25 ≤ IKLH < 50 - Sangat Kurang : 0 ≤ IKLH < 25
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara dan tutupan lahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah**
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai efektivitas dan efisiensi pemerintah daerah dalam melaksanakan pengelolaan sampah.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKPS} = \sum_{i=1}^{n} (\text{Nilai Indikator}_i \times \text{Bobot}_i)$$ **Keterangan Rumus:** • **Nilai Indikator:** Skor capaian dari masing-masing komponen pengelolaan sampah, seperti: o Pengurangan sampah o Penanganan sampah o Regulasi dan kebijakan o Kelembagaan dan SDM o Pendanaan o Partisipasi masyarakat o Infrastruktur dan teknologi • **Bobot:** Nilai bobot yang diberikan untuk masing-masing indikator sesuai dengan prioritas atau kebijakan nasional (misalnya, pengurangan sampah diberi bobot lebih besar daripada dokumentasi). • **N :** Jumlah total indikator yang diukur. • Nilai akhir dinyatakan dalam skala 0 – 100, dengan skala penilaian tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh daerah tersebut.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup, Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Ketahanan Daerah (IKD)**
Defenisi	Upaya untuk mengukur kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi
Rumus Perhitungan	Pengukuran Indeks Ketahanan Daerah (IKD) dengan menggunakan 71 indikator sehingga perangkat pengukuran dimaksud dapat digunakan dengan mekanisme dan prosedur yang sama. Diharapkan hasil yang didapatkan dari proses pengukuran tersebut berupa rekomendasi dapat digunakan sebagai dasar penyusunan kajian risiko bencana dan rencana penanggulangan bencana yang juga sebagai input pengukuran penurunan Indeks Risiko Bencana Kabupaten/Kota.
Interpretasi	Wilayah dengan IKD tinggi memiliki kapasitas yang kuat dalam menghadapi bencana. Mereka memiliki infrastruktur yang memadai, sistem peringatan dini yang efektif, serta partisipasi masyarakat yang tinggi dalam upaya pengurangan risiko
Sumber Data	Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Layanan Infrastruktur Dasar**
Defenisi	Proporsi peningkatan volume atau cakupan layanan akses air minum perpipaan, sanitasi aman dan hunian layak kepada masyarakat atau fasilitas pengguna, dibandingkan dengan kapasitas layanan pada periode sebelumnya.

Nama Indikator	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar

Rumus Perhitungan	$\text{Indeks layanan Infrastruktur Dasar} = \frac{\text{Capaian layanan akses air minum perpipaan, sanitasi aman dan hunian layak}}{3}$
	Keterangan:
	• Kapasitas dapat diukur dalam satuan:
	  ○ Persentase peningkatan (%), atau
	  ○ Jumlah penduduk/rumah tangga yang terlayani
	• Tahun Sebelumnya adalah baseline Indeks layanan infrastruktur dasar
	• Tahun Ini adalah kapasitas setelah ada peningkatan rata-rata capaian air minum perpipaan,sanitasi aman dan hunian layak.

Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks layanan infrastruktur dasar, semakin besar kapasitas layanan infrastruktur dasar
Sumber Data	PDAM, BUMD Air Minum, Dinas PUPR, Dinas Cipta Karya, Sistem Informasi Air Minum (SIM-SPAM), Sistem informasi sanitasi (SI INSAN), DPKP2LH dan Bappenas
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Konektivitas Darat
Definisi	Persentase Jalan dalam kondisi mantap, Persentase Jembatan dalam Kondisi Mantap, Persentase Drainase dalam kondisi baik, Persentase Jalan yang telah memenuhi Standar keselamatan/
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Konektivitas Darat} = \frac{\text{Capaian Jalan kondisi mantap, Jembatan kondisi mantap, Drainase kondisi baik, dan Jalan yang memenuhi standar keselamatan}}{4}$
Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan konektivitas darat yang lebih baik. Perbandingan nilai indeks antar waktu atau antar wilayah dapat memberikan informasi tentang perubahan atau disparitas dalam konektivitas.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
Defenisi	Indikator yang menggambarkan tingkat keteraturan dan kelengkapan administrasi pertanahan dalam suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$$\text{Indeks TAP} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} (S_i \times B_i)}{\sum_{i=1}^{n} B_i} \right) \times 100$$ **Keterangan Rumus:** • S_i = Skor dari komponen administrasi pertanahan ke-i (misalnya: jumlah bidang tanah terdaftar, peta bidang digital, data pemilik, data penggunaan tanah, dll.) • B_i = Bobot dari komponen administrasi pertanahan ke-i (berdasarkan pentingnya komponen terhadap keteraturan data pertanahan) • n = Jumlah total komponen yang dinilai • Skor akhir dikalikan 100 untuk menghasilkan indeks dalam skala 0–100
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tertib dan lengkap administrasi pertanahan di wilayah tersebut.

Nama Indikator	Indeks Tertib Administrasi Pertanahan
Sumber Data	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pertanahan Daerah, Sistem Informasi Pertanahan
Frekuensi	Tahunan atau sesuai pembaruan sistem administrasi pertanahan

Misi 4 :
Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan dan Pelestarian Budaya Melalui Pengembangan Komunitas Seni Demi Mendukung Terwujudnya Kota Wisata yang Estetik dan Memiliki Fungsi Ekonomi dan Mensejahterakan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Nasional
Definisi	Indeks yang menunjukkan tingkat ketahanan nasional suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhannas RI, 2008).
Rumus Perhitungan	$$IKN = \frac{\sum_{i=1}^{k} \text{Vi}\, Gi}{100}$$ **Keterangan :** k = Banyaknya variabel dalam gatra G; Vi = Bobot variabel Gi; Gi = Sub indeks untuk variabel Gi
Interpretasi	Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Lemhanas, RI). Ketahanan Pertahanan diartikan sebagai kemampuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan negara serta mengatasi terjadinya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) dari dalam maupun luar. Dalam prosesnya, pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi gatra, dimensi wilayah/spasial. Indeks Ketahananan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan merupakan salah satu pengukuran ketahanan nasional berdasarkan gatra. Dimensi gatra adalah pengukuran ketahanan nasional melalui pengukuran ketahanan masing-masing gatra, kemudian diagregasikan menjadi ketahanan nasional. Berdasarkan dimensi ini ketahanan nasional adalah resultante dan agregasi menyeluruh dari ketahanan masing-masing gatra. Setiap gatra dirinci menjadi beberapa aspek, aspek dirinci menjadi beberapa variabel, dan variabel dirinci lagi menjadi beberapa indikator. Secara umum dinamika dari setiap variabel diukur dengan melihat dua indikator penting, yaitu - indikator kebijakan dan - indikator kinerja. Oleh karena itu dalam setiap variabel selalu ada indikator kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang merupakan implikasi dari kebijakan tersebut. Setiap indikator dinilai berdasarkan parameter yang terukur. Indeks Ketahanan Nasional dengan kisaran 1 sampai 5 : • Indeks 1 menunjukkan kondisi rawan; • Indeks 2 menunjukkan kondisi kurang tangguh; • Indeks 3 menunjukkan kondisi cukup tangguh; • Indeks 4 menunjukkan kondisi tangguh; • Indeks 5 menunjukkan kondisi sangat tangguh.
Sumber Data	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Harmoni Indonesia
Definisi	Indeks Harmoni Indonesia (IHI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni atau keharmonisan sosial di tengah masyarakat Indonesia berdasarkan aspek kehidupan beragama, kehidupan sosial, dan kehidupan berbangsa. IHI dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai alat untuk memetakan dan memantau kondisi kerukunan serta potensi konflik sosial di daerah.
Rumus Perhitungan	`IHI = (NR + NT + NM) / 3 × 25` Keterangan : • NR = Nilai Kehidupan Beragama • NT = Nilai Kehidupan Bermasyarakat (Toleransi Sosial) • NM = Nilai Kehidupan Berbangsa (Kesadaran Kebangsaan)
Interpretasi	Semakin tinggi skor IHI, semakin harmonis kondisi sosial masyarakat
Sumber Data	• Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan IHI oleh Kementerian Agama RI • Badan Pusat Statistik (BPS) – dalam kerja sama survei sosial • Survei Persepsi Masyarakat terhadap toleransi dan interaksi sosial • Laporan Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan di akhir tahun oleh Kementerian Agama dan BPS)

Nama Indikator	Angka Kriminalitas
Definisi	Angka kriminalitas adalah jumlah kejahatan yang terjadi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan, dikalikan 10.000. Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat
Rumus Perhitungan	$Angka\ Kriminalitas = \frac{Jumlah\ Tindak\ Kriminal\ dalam\ 1\ tahun}{Jumlah\ Penduduk} x10.000$ (Permendagri 86/2017)
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan
Definisi	Indeks yang menunjukkan tingkat ketahanan nasional dari aspek pertahanan dan keamanan kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhannas RI, 2008).
Rumus Perhitungan	$Indeks\ G = \frac{\sum_{i=1}^{k} \mathrm{Vi}\ Gi}{100}$ **Keterangan :** k = Banyaknya variabel dalam gatra G Vi = Bobot variabel Gi Gi = Sub indeks untuk variabel Gi
Interpretasi	Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin

	identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Lemhanas, RI). Dalam prosesnya, pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi gatra, dimensi wilayah/spasial. Indeks Ketahananan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan merupakan salah satu pengukuran ketahanan nasional berdasarkan gatra. Dimensi gatra adalah pengukuran ketahanan nasional melalui pengukuran ketahanan masing-masing gatra, kemudian diagregasikan menjadi ketahanan nasional. Berdasarkan dimensi ini ketahanan nasional adalah resultante dan agregasi menyeluruh dari ketahanan masing-masing gatra. Setiap gatra dirinci menjadi beberapa aspek, aspek dirinci menjadi beberapa variabel, dan variabel dirinci lagi menjadi beberapa indikator. Secara umum dinamika dari setiap variabel diukur dengan melihat dua indikator penting, yaitu - indikator kebijakan dan - indikator kinerja. Oleh karena itu dalam setiap variabel selalu ada indikator kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang merupakan implikasi dari kebijakan tersebut. Setiap indikator dinilai berdasarkan parameter yang terukur. Ketahanan Pertahanan diartikan sebagai kemampuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan negara serta mengatasi terjadinya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) dari dalam maupun luar. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan dengan kisaran 1 sampai 5 : • Indeks 1 menunjukkan kondisi rawan; • Indeks 2 menunjukkan kondisi kurang tangguh; • Indeks 3 menunjukkan kondisi cukup tangguh; • Indeks 4 menunjukkan kondisi tangguh; • Indeks 5 menunjukkan kondisi sangat tangguh.
Sumber Data	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Persentase Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan**
Definisi	Persentase pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan adalah jumlah objek pemajuan kebudayaan yang diduga, ditetapkan, dilindungi, dikembangkan dan dilestarikan
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan} = \frac{\text{Jumlah Pemajuan Kebudayaan yang Dilaksanakan}}{\text{Total Pemajuan Kebudayaan}} \times 100\%$
Interpretasi	Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) adalah warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda yang tercatat dan telah ditetapkan oleh SK Wako, Provinsi dan Nasional (WBTBI) yang memberikan manfaat budaya tetapi juga dapat berdampak positif pada ekonomi lokal melalui pariwisata. Situs bersejarah yang terawat dengan baik dapat menarik pengunjung dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi Masyarakat Kota Sawahlunto
Sumber Data	Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Misi 5 :
Meningkatkan Fungsi Ekonomi Sektor Pariwisata Untuk Kesejahteraan Masysarakat Melalui Optimalisasi Potensi Kepariwisataan

Nama Indikator	**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)**
Definisi	Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum adalah persen bagian PDRB daerah yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum.

Rumus Perhitungan	$\text{Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan Minum} = \frac{\text{Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum}}{\text{Total PDRB ADHB}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**PAD Sektor Pariwisata**
Definisi	Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari kegiatan pariwisata, yang merupakan bagian penting dari pendapatan daerah.
Rumus Perhitungan	Sektor pariwisata menyumbang PAD melalui berbagai jenis pajak dan retribusi, seperti pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan retribusi tempat rekreasi.
Interpretasi	Meningkatnya PAD dari pariwisata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)**
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan 6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 94 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior Untuk tingkat kabupaten/kota disepakati bahwa PDRB Ekonomi Kreatif meliputi lapangan usaha Jasa Lainnya.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif} = \frac{\text{PDRB Ekonomi Kreatif Kota Sawahlunto}}{\text{PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB provinsi, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Misi 6 :
Kota Sawahlunto Menuju Kota Sehat dan Destinasi Pendidikan Utama yang Berkarakter di Sumatera Barat

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Manusia**
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$ IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran.
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianyasemakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah : IPM < 60 - Sedang : 60 ≤ IPM < 70 - Tinggi : 70 ≤ IPM < 80 - Sangat tinggi : IPM ≥ 80
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :** **a. Literasi membaca** **b. Numerasi**
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di daerah X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar 84 kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.
Rumus Perhitungan	$\%\ Satdik\ \min.SKM\ = \frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Satdik}\ min.SKM}{n}$ **Keterangan :** Satdik min.SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal : Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi (%) tahun 2023 sebesar 44,44%. Artinya, terdapat 44,44 % satuan

	pendidikan di Kota Sawahlunto yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap").
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)**
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut : a. Tidak punya ijazah = 0 tahun b. SD = 6 tahun c. SMP = 9 tahun d. SMA = 12 tahun e. D1/D2 = 14 tahun f. D3 = 15 tahun g. D4 = 16 tahun h. S1 = 17 tahun i. S2 = 19 tahun j. S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini : 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1.
Rumus Perhitungan	$$RLS\ 15+= \frac{1}{P15+}\sum_{i=l}^{n} Xi$$ **Keterangan :** P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di suatu wilayah Xi = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	**Misal:** RLS Kota Sawahlunto Tahun 2023 = 10,44 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kota Sawahlunto yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,44 tahun atau telah menamatkan kelas X.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Harapan Lama Sekolah (Tahun)**
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$$HLS = FK\sum_{i=7}^{k}[\frac{Ei_i}{Pi}]$$ **Keterangan :** Pi = Jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas di suatu wilayah pada tahun tertentu

	Ei = Jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas yang masih sekolah di suatu wilayah pada tahun tertentu *i* = Usia (7, 8, 9,.....,k) *FK* = Faktor koreksi pesantren
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal : HLS Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebesar 13,69 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,69 tahun atau setara dengan Diploma II.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)**
Definisi	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan Pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup : - Diploma I-IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (\%)} = \frac{\text{Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang lulus atau berijazah pendidikan tinggi}}{\text{Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$
Interpretasi	• Positif • Tingginya proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi Pendidikan semakin baik
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Usia Harapan Hidup (UHH)(tahun)**
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian. yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (*Z-score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek = Zscore < -3,0 b. Pendek = Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0.
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB\ (5)P\ = \frac{JAB\ (5)\ P\ stunting}{JAB\ (5)} x100\ \%$ **Keterangan :** PAB (5)P = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (*stunting*) JAB (5)P *stunting* = Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu pada waktu tertentu JAB (5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB\ (5)SP\ = \frac{JAB\ (5)\ SP\ stunting}{JAB\ (5)} x100\ \%$ **Keterangan :** PAB(5)SP = Prevalensi anak balita yang stunting menderita sangat pendek (*stunting*) JAB (5)SP *stunting* = Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu JAB (5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi stunting = PAB(5)P + PAB(5)SP
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk : 1. Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. 3. Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. 4. Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak.

	5. Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) (%)**
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $$Cakupan\ Kepesertaan\ JKN\ = \frac{Jumlah\ peserta\ JKN}{Jumlah\ penduduk} x100\ \%$$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: 1. Akses Pelayanan Kesehatan : Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. 2. Kesadaran Masyarakat : Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. 3. Komitmen Pemerintah Daerah : Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. 4. Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) : Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS DJSN
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (UU NO.52/2009 dan Peraturan BKKBN Nomor 3 Tahun 2022)
Rumus Perhitungan	Pengukuran iBangga dilakukan oleh BKKBN meliputi dimensi: a. Ketenteraman; b. Kemandirian; dan c. Kebahagiaan. • Dimensi Ketenteraman terdiri atas indikator : a. kegiatan ibadah; b. legalitas Keluarga; c. jaminan kesehatan; d. keharmonisan Keluarga. • Dimensi Kemandirian terdiri atas indikator : a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. jaminan keuangan; c. keberlangsungan pendidikan; d. kesehatan Keluarga; e. akses media online/daring.

	• Dimensi Kebahagiaan terdiri atas indikator : a. interaksi Keluarga; b. interaksi sosial.
Interpretasi	Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kriteria sebagai berikut : • Nilai iBangga < 40 : kurang baik (rentan) • Nilai iBangga 40 – 70 : cukup baik (berkembang) • Nilai iBangga > 70 : baik (tangguh)
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Ketimpangan Gender**
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_P \times SE_P\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_P}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks lakilaki dengan rata-rata harmonic $HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM\left(G_P, G_L\right)}{G_{P,L}}$ Keterangan : G_P : Indeks Perempuan

	G_L : Indeks Laki-laki MTF : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan MHPK20 : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P : Persentase perempuan di legislative PR_L : Persentase laki-laki di legislative SE_P : Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L : Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$: Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$: Persentase angkata kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja HARM (G_P, G_L) : Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonic IKR : Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP : Indeks dimensi pemberdayaan IPK : Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{PL} : Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric IKG : Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Perlindungan Anak**
Definisi	Indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.
Rumus Perhitungan	IPA = $\sum$ 5j = 1 (Wj x Indeks Kj) Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator: A. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 1. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran 2 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat 3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet 4. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar 5. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah B. KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 1. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun 2. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak 3. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua 4. Angka kesiapan sekolah

	C. KLASTER KESEHATAN 1. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan 2. Persentase balita stunting 3. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal 5. Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 6. Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok 8. Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap D. KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA 1. 1. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia 3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar) 4. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni E. KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS 1. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 2. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet 3. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) 4. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan 5. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar II. melakukan normalisasi indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) III. menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Interpretasi	sebagai indikator yang mengukur capaian pembangunan perlindungan anak baik secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Sumber Data	BPS dan KemenPPPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Gender**
Definisi	Alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesetaraan gender dalam pembangunan suatu negara. IPG menghitung perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi dasar pembangunan manusia, yaitu: 1. Kesehatan: Diukur dengan angka harapan hidup saat lahir. 2. Pendidikan: Diukur dengan angka melek huruf dewasa dan tingkat partisipasi pendidikan dasar hingga tinggi. 3. Pendapatan: Diukur dengan Pendapatan Nasional Bruto (PNB) per kapita yang disesuaikan.
Rumus Perhitungan	$IPG = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-Laki}} \times 100\%$ **Keterangan** : IPG: adalah Indeks Pembangunan Gender. IPM Perempuan: adalah Indeks Pembangunan Manusia untuk perempuan. IPM Laki-laki: adalah Indeks Pembangunan Manusia untuk laki-laki.

	Rumus ini menunjukkan perbandingan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki, yang kemudian dikalikan dengan 100 untuk mendapatkan persentase. Penting untuk dicatat bahwa: IPM itu sendiri dihitung berdasarkan tiga dimensi: umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Semakin mendekati angka 100, semakin baik kesetaraan gender dalam pembangunan. Semakin jauh dari 100, semakin besar kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan
Interpretasi	Sebagai indikator yang mengukur capaian pembangunan gender secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Kesejahteraan Sosial**
Defenisi	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan beberapa dimensi penting, seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, partisipasi sosial, ketahanan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial dasar.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKS} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$ **Keterangan:** • **IKS =** Indeks Kesejahteraan Sosial • **$X_1, X_2, \ldots, X_n$ =** Skor masing-masing dimensi kesejahteraan sosial (sudah dinormalisasi dalam skala 0–100) • **n =** Jumlah dimensi indikator
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemensos
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda Berwirausaha**
Definisi	Persentase Jumlah Pemuda berumur 16-30 yang berwirausaha dibabdingkan denga jumlah Pemuda yang berumur 16 – 30 tahun di kota Sawahlunto
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Peningkatan Partisipasi Pemuda Berwirausaha} = \frac{\text{Jumlah Pemuda yang Berwirausaha (tahun n) - Jumlah Pemuda yang Berwirausaha (tahun n -1)}}{\text{Jumlah Pemuda yang Berwirausaha (tahun n -1)}} \times 100\%$$
Interpretasi	Data tentang pemuda dalam berwirausaha sangat berdampak terhadap perekonomian daerah ataupun nasional. Sikap positif dapat mendorong pemuda utk aktif dalam mencari peluang dan mengatasi segala hambatan yang ada
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga**
Definisi	Jumlah Perolehan Medali tahun (n) kurangi jumlah perolehan medali tahun (n-1) dibandingkan dengan jumlah perolehan medali tahun (n-1)
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Peningkatan Prestasi Olahraga} = \frac{\text{Jumlah Perolehan Medali (tahun n) - Jumlah Perolehan Medali (tahun n-1)}}{\text{Jumlah Perolehan Medali (tahun n-1)}} \times 100\%$$

Interpretasi	Data Atlet berprestasi membutuhkan pemahaman yang komprenshif tentang berbagi factor yang mempengaruhi atlet untuk mencapai prestasinya. Atlet sangat penting untuk mendapatlan dukungan yang sesuai kebutuhan dan kondisi masing-masing atlet untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

Misi 7 :
Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Daerah yang Berdaya Saing Tinggi Atas Pengukuran Indeks Kinerja yang Ditetapkan oleh Kementerian dan Lembaga Lainnya

Nama Indikator	**Indeks reformasi birokrasi**
Definisi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup berbagai aspek perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)} = \frac{\sum(\text{Nilai Komponen x Bobot})}{\text{Total Bobot}}$
Interpretasi	Semakin tinggi skor IRB, menunjukkan reformasi birokrasi berjalan baik dan efektif
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Inovasi Daerah**
Definisi	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rumus Perhitungan	$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ total\ maksimum\ x\ 100}$
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**
Definisi	Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. (Permendagri No. 18/2020).
Rumus Perhitungan	EPPD = [CKM + CKUP] x 0.75 + [PKM] x 0.25 **Keterangan** : CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi : • Skor kinerja 1,00 – 1,80 dengan status kinerja Sangat Rendah; • Skor kinerja 1,81 – 2,60 dengan status kinerja Rendah; • Skor kinerja 2,61 – 3,40 dengan status kinerja Sedang; • Skor kinerja 3,41 – 4,20 dengan status kinerja Tinggi; • Skor kinerja 4,21 – 5,00 dengan status kinerja Sangat Tinggi.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Satu kali per tahun

Nama Indikator	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Definisi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Skor_i \times Bobot_i)}{\sum_{i=1}^{n} Bobot_i}$ Keterangan : • Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100) • Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan • Aspek penilaian meliputi, misalnya: ➢ Kelengkapan dokumen ➢ Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja) ➢ Keterpaduan dengan prioritas nasional ➢ Tingkat partisipasi masyarakat ➢ Penggunaan sistem informasi (SIPD) ➢ Ketepatan waktu penyusunan
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola perencanaan
Sumber Data	Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD, Renja, Renstra)
Frekuensi	Tahunan, 5 tahunan, 20 Tahunan

Nama Indikator	Nilai AKIP Instansi Pemerintah
Definisi	Nilai AKIP adalah nilai yang diberikan kepada instansi pemerintah sebagai hasil evaluasi penerapan *Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).*
Rumus Perhitungan	Nilai ini mencerminkan sejauh mana instansi tersebut berhasil dalam mengelola dan mencapai kinerja, termasuk dalam hal perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja Tingkatan Nilai AKIP : AA : Sangat Memuaskan (nilai absolut > 90-100) A : Memuaskan (nilai absolut > 80-90) BB : Sangat Baik (nilai absolut > 70-80) B : Baik (nilai absolut > 60-70) CC : Cukup (nilai absolut > 50-60) C : Kurang (nilai absolut > 30-50) D : Sangat Kurang (nilai absolut > 0-30)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai AKIP, semakin baik pula akuntabilitas dan kinerja instansi tersebut.
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)
Definisi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah daerah, yang mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian intern diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai SPIP} = \frac{\text{Jumlah nilai komponen SPIP (dari 5 unsur)}}{\text{Jumlah unsur SPIP (5)}}$ Keterangan : • Jumlah nilai komponen SPIP: Penjumlahan skor dari 5 komponen utama SPIP. • Jumlah unsur SPIP: Tetap 5 unsur (komponen utama sistem pengendalian).

	• Penilaian dilakukan oleh Inspektorat atau BPKP, bisa melalui self-assessment, review, dan verifikasi lapangan. • Hasil nilai tersebut menjadi rujukan pengukuran maturitas SPIP daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi level maturitas, semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern
Sumber Data	Laporan Penilaian Maturitas SPIP
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Profesionalitas ASN**
Definisi	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik dari ASN di suatu instansi pemerintah. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ASN memenuhi standar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Profesionalitas ASN} = \frac{\sum(\text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin})}{\text{Jumlah ASN}}$
Interpretasi	Semakin tinggi skor, semakin profesional ASN pada instansi tersebut
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah**
Definisi	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat kepatuhan, kualitas, dan efektivitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota), berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Nasional (ANRI) atau Lembaga Kearsipan Daerah.
Rumus Perhitungan	**Indeks Pengawasan = Nilai Pengawasan Eksternal** **+** **Nilai Pengawasan Internal** **Keterangan :** • Skor Total Hasil Pengawasan: Penjumlahan dari seluruh poin nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek-aspek pengelolaan arsip (seperti: kebijakan kearsipan, SDM, sarana prasarana, pengelolaan arsip aktif-inaktif, pengawasan internal, dll.) • Skor Maksimal: Nilai maksimum yang bisa dicapai (biasanya = 100 poin). • Output: Nilai indeks dalam skala 0–100.
Interpretasi	Semakin tinggi skor, menunjukkan tata kelola kearsipan semakin baik dan sesuai standar nasional kearsipan
Sumber Data	• Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI atau LKD • Berita Acara Hasil Pengawasan Kearsipan • Dokumentasi Audit Arsip Internal
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan dalam siklus audit/pengawasan kearsipan per tahun anggaran)

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**
Definisi	Mengukur Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
Rumus Perhitungan	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat dengan penentuan bobot dimensi

No	Dimensi	Bobot
1	Kepatuhan	30 %
2	Kinerja	70 %

	IPLM = ((0,30 x Dimensi Kepatuhan) + (0,70 x Dimensi Kinerja)) x 100
Satuan Hasil	5,39
Definisi Operasional	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) merupakan suatu ukuran nilai yang menggambarkan capaian kinerja dalam pembangunan Perpustakaan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. Kajian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat. IPLM dengan mengukur variable: Kepatuhan dengan variabel (Koleksi, Tenaga) Kinerja dengan variabel (Pelayanan, Penyelenggaraan dan pengelolaan)
Data Pendukung	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan nilai indeks pembangunan literasi masyarakat yang bersumber dari buku kajian indeks pembangunan literasi masyarakat yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Sumber Data: Perpustakaan Nasional RI
Regulasi	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Perpustakaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi

Nama Indikator	**Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah**
Definisi	Satuan ukuran yang ditetapkan berdasarkan seperangkat dimensi dan indikator untuk menilai kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam periode tertentu sesuai dengan Peraturan Kementerian Dalam Negeri No. 19 Tahun 2020
Rumus Perhitungan	Pengelolaan keuangan daerah yang benar akan mendorong peningkatan ekonomi daerah. Terdapat 6 (Enam) Dimensi yang digunakan yaitu : • Kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran (Dimensi 1), • Kualitas anggaran belanja dalam APBD (Dimensi 2), • Transparansi pengelolaan keuangan daerah (Dimensi 3), • Penyerapan anggaran (Dimensi 4), • Kondisi keuangan daerah (Dimensi 5), • Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) (Dimensi 6)
Interpretasi	Semakin besar nilai Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah menunjukkan semakin efektif, semakin efisien, semakin transparan, dan semakin akuntabel kualitas kinerja tata kelola keuangan daerah tersebut
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Frekuensi	Tahunan

4. Metadata Indikator Kinerja Daerah

4a. Metadata IUP RPJPD Berdasarkan 4 Aspek

I. Aspek Geografi Dan Demografi

Nama Indikator	**Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)**
Definisi	Ketidakcukupan konsumsi pangan merupakan kondisi seseorang secara reguler mengkonsumsi sejumlah makanan yang tidak cukup untuk menyediakan energi yang dibutuhkan untuk hidup sehat, aktif, dan produktif. Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*/PoU) adalah proporsi penduduk di suatu wilayah yang mengkonsumsi pangan lebih rendah dari standar kecukupan energi untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif, yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Atau, probabilitas individu yang dipilih secara acak dari suatu populasi referensi, yang secara reguler mengkonsumsi makanan yang kurang dari kebutuhan energinya
Rumus Perhitungan	$PoU = \int_{x<\text{MDER}} f(x)dx$ Keterangan : PoU = Proporsi populasi yang mengalami ketidakcukupan konsumsi pangan di bawah kebutuhan minimum energi (MDER) yang diukur dengan kkal MDER = Kebutuhan Minimum Energi yang diukur dengan kkal (*Minimum Dietery Energy Requirement*) f(x) = Fungsi kepadatan probabilitas tingkat konsumsi kalori umumnya sehari-hari untuk rata-rata per kapita individu dalam suatu populasi tertentu
Interpretasi	Mengidentifikasi seberapa banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan dibawah standar kecukupan energi yang direkomendasikan. Semakin tinggi nilai PoU mengidentifikasikan semakin banyak penduduk yang mengkonsumsi pangan tidak ideal secara kandungan nutrisinya.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Konsumsi listrik perkapita (Kwh)**
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi.
Rumus Perhitungan	$KLpk = \frac{KLpln + KLnonpln}{P}$ Keterangan : $KLpk$ = Konsumsi listrik per kapita $KLpln$ = Total Konsumsi Listrik yang disalurkan oleh PT. PLN $KLnonpln$ = Total Konsumsi Listrik yang disalurkan oleh Non PT. PLN P = Jumlah Penduduk Catatan: Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha PT. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	Kementerian ESDM, PT PLN, dan BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya.
Interpretasi	-
Sumber Data	Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Kapasitas Air Baku (m3/detik)
Definisi	Debit air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri, dan lain-lain yang bersumber dari mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, atau sumber air lainnya.
Rumus Perhitungan	Total kapasitas debit pengambilan air yang dapat diolah dan atau dimanfaatkan untuk keperluan domestik, perkotaan, industri dan lain-lain di setiap sumber air meliputi mata air, air tanah, air permukaan, air hujan, dan atau sumber air lainnya.
Interpretasi	-
Sumber Data	1. Buku Informasi Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat)
Frekuensi	1. Buku Informasi Pusat Statistik Infrastruktur PUPR (Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat) – Per Tahun

Nama Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0{,}376\ x\ IKA) + (0{,}405\ x\ IKU) + (0{,}219\ x\ IKTL)$ **Keterangan :** IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Dinas PKP2LH Kota Sawahlunto)
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : - Sangat Baik : 90 ≤ IKLH ≤ 100 - Baik : 70 ≤ IKLH < 90 - Sedang : 50 ≤ IKLH < 70 - Kurang : 25 ≤ IKLH < 50 - Sangat Kurang : 0 ≤ IKLH < 25
Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara dan tutupan lahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)

Rumus Perhitungan	$\text{PSA} = \frac{JRTSPAL + JRTIPLT}{JRTS} x\ 100\ \%$ **Keterangan :** PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian 133 besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virusyang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS • Data Infrastruktur Kementerian PUPR
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (%)**
Definisi	Timbulan Sampah Timbulan sampah merupakan sampah yang berasal dari sumber sampah. Jenis sampah yang dimaksud adalah Sampah Rumah Tangga (SRT) dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (SSSRT). Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Kegiatan pengolahan sampah merupakan kegiatan mengubah karakteristik, komposisi, dan/atau jumlah sampah. Pengolahan sampah yang dimaksud mempertimbangkan; karakteristik sampah, teknologi pengolahan yang ramah lingkungan, keselamatan kerja, dan kondisi sosial masyarakat. Sampah diolah berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Kegiatan pengolahan sampah yang diukur meliputi kegiatan; a. Pengolahan sampah organik seperti pengomposan, dan/atau pengolahan sampah organik lainnya seperti biokonversi maggot BSF, vermi composting, biodigester, dsb. b. Daur ulang materi (material recovery) merupakan upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melalui suatu proses pengolahan terlebih dahulu. Jenis sampah yang diutamakan di daur ulang seperti; plastik, kardus, kertas, kaca, logam, dan sejenisnya. Rantai nilai daur ulang materi biasanya melibatkan beberapa langkah seperti industri daur ulang swasta yang membeli, memproses, dan memperdagangkan bahan mulai dari pengambilan hingga diproses ulang menjadi produk, bahan, atau zat yang memiliki nilai pasar. Pada rantai daur ulang materi ini melibatkan pemulung informal, lapak, pengepul, bandar, dan pendaur ulang rantai akhir. Kegiatan pengolahan sampah berlangsung di fasilitas pengolahan sebagai berikut; TPS3R, TPST, Pusat Olah Organik (POO), Bank

	Sampah, Pusat Daur Ulang (PDU), fasilitas pengolahan lainnya yang dikelola operator pemerintah dan/atau swasta. Catatan : Mengacu pada definisi global dari UN-Habitat, bahwa makna dari waste recovery sepadan dengan kegiatan pengolahan sampah. Pemulihan (recovery) itu sendiri merupakan setiap kegiatan yang secara prinsip utamanya adalah sampah memiliki fungsi untuk mengganti bahan material lain untuk memenuhi fungsi tertentu, dalam alur produksi atau ekonomi yang lebih luas. Kegiatan pengolahan sampah menjadi energi dan/atau bahan bakar lainnya tidak dihitung ke dalam indikator sampah terolah.
Rumus Perhitungan	**Langkah ke-1: Menghitung Jumlah Sampah Terolah** Terdapat dua alternatif menghitung jumah sampah terolah: **Cara (1)** *SO = ST – MFPA + RPD* **Keterangan :** SO = Sampah terolah (ton/hari) ST = Sampah terkumpul (ton/hari) MFPA = Sampah yang masuk ke fasilitas pemrosesan akhir sampah (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari) **Cara (2)** *SO = MFPD + DPA – RPD* **Keterangan :** SO = Sampah terolah (ton/hari) MFPD = Sampah yang masuk ke fasilitas pengolahan daur ulang sampah (ton/hari) DPA = Material daur ulang yang diambil dari fasilitas pemrosesan akhir oleh sektor informal (ton/hari) RPD = Residu dari fasilitas pengolahan-daur ulang sampah (ton/hari **Langkah ke-2: Menghitung Timbulan Sampah** *TS = TP x (TPRT + TPNRT)* **Keterangan :** TS = Timbulan sampah (kg/hari) TP = Total populasi (orang) TPRT = Timbulan sampah per kapita dari rumah tangga (kg/orang/hari) TPNRT = Timbulan sampah per kapita dari non-rumah tangga (kg/hari) Jika tidak terdapat informasi TPNRT, maka pendekatan dapat di estimasi menggunakan perhitungan berikut: *TS = 70 % dari rumah tangga + 30 % dari non rumah tangga* $$\text{TS} = \frac{TSRT}{70\ \%}$$ **Keterangan :** TS = Timbulan sampah (ton/hari) TSRT = Timbulan sampah rumah tangga (ton/hari) **Langkah ke-3: Menghitung Tingkat Sampah Terolah** $$\%\ \text{SO} = \frac{SO}{TS} x\ 100\ \%$$ **Keterangan :** % SO = Tingkat sampah terolah (%) SO = Sampah terolah (ton/hari) TS = Timbulan sampah (ton/hari)
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengolahan sampah di daerah
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes (masih dalam proses uji coba)

	• Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan • SI INSAN Kementerian PUPR
Frekuensi	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS dan Podes: Tahunan • Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Tahunan • SI INSAN Kementerian PUPR: Tahunan

Nama Indikator	**Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)**
Definisi	**Pengumpulan Sampah** Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang : • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan : Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa : (a) Sampah terkumpul Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam “Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah”, namun jumlah “sampah terkumpul” dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	**Unit Satuan :** Persentase Rumah tangga **Cara Perhitungan :** $\text{PRTLP} = \frac{JRTLP}{JRTS} x\ 100\ \%$ **Keterangan :** PRTLP = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah

	JRTLP = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya **Sumber :** • Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 • Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah.
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS (masih dalam tahap pengusulan
Frekuensi	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) MKP BPS: 3 Tahunan. • Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS: Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Kualitas Tutupan Lahan**
Definisi	Merupakan alat ukur yang mengukur tingkat kualitas penutupan lahan dalam suatu wilayah. IKTL dibuat dengan mempertimbangkan beberapa faktor seperti tipe dan luas dari tutupan lahan, stabilitas ekosistem, dan tingkat degradasi lahan.
Rumus Perhitungan	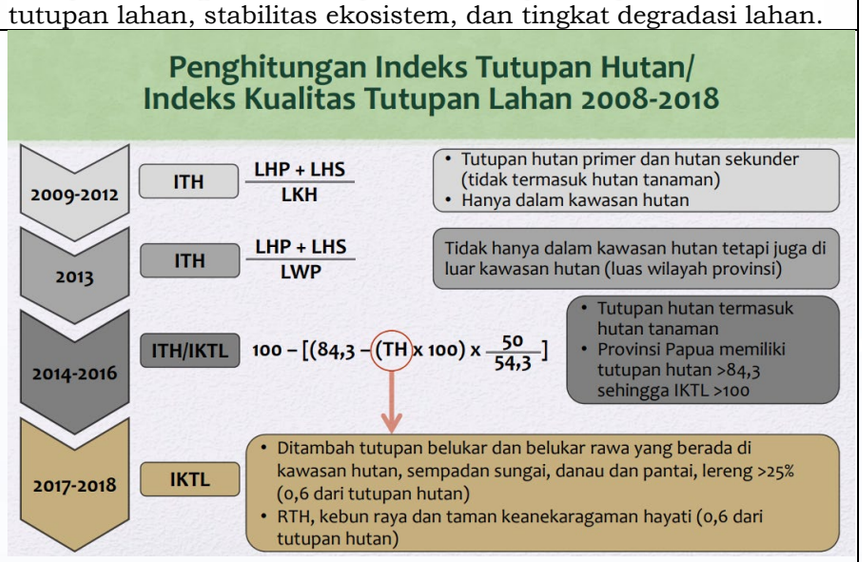 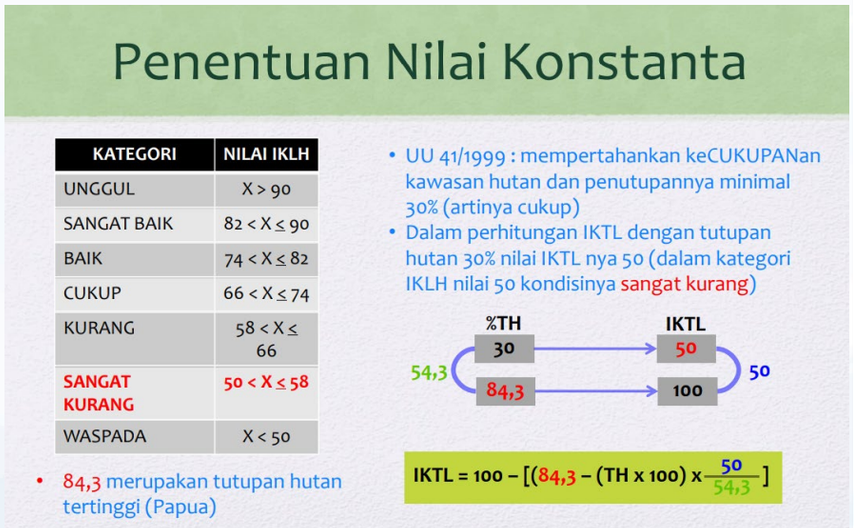
Interpretasi	faktor penyebab perubahan penutupan lahan diantaranya pertumbuhan penduduk, mata pencaharian, aksesibilitas, dan fasilitas pendukung kehidupan serta kebijakan pemerintah.
Sumber Data	Kementerian Lingkungan Hidup
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI)
Definisi	IRB dihasilkan dari suatu kajian risiko bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul dari suatu potensi bencana yang ada di suatu wilayah. Potensi tersebut dihitung dengan mempertimbangkan tingkat bahaya, kerentanan, dan kapasitas wilayah tersebut. Maka dari itu, terdapat 3 (tiga) komponen yang membentuk risiko, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Interaksi antara tiga komponen tersebut digunakan untuk memperoleh potensi risiko bencana suatu wilayah dengan memperhitungkan potensi jiwa terpapar, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan.
Rumus Perhitungan	Risk $= Hazard\ x\ \frac{Vulnerability}{Capacity}$ **Keterangan :** Hazard = (bahaya) dihitung berdasarkan probabilitas spasial, frekuensi dan kekuatan (magnitude) dari suatu fenomena alam seperti gempabumi, banjir, letusan gunung api, dan lainnya. Vulnerability = (kerentanan) dihitung berdasarkan parameter sosial budaya, ekonomi, fisik dan lingkungan Capacity = Kapasitas dinilai dengan menggunakan pendekatan tingkat ketahanan daerah berdasarkan tujuh prioritas yaitu : 8. Perkuatan kebijakan dan kelembagaan; 9. Pengkajian risiko dan perencanaan terpadu; 10. Pengembangan sistem informasi, diklat dan logistik; 11. Penanganan tematik kawasan rawan bencana; 12. Peningkatan efektivitas pencegahan dan mitigasi bencana; 13. Perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana; 14. Pengembangan sistem pemulihan bencana
Interpretasi	Semakin kecil nilai Indeks Risiko Bencana (IRB), diartikan semakin baik. Semakin kecil nilai indeks yang dihasilkan, dapat diartikan bahwa tingkat kapasitas semakin baik (meningkat), dengan nilai bahaya dan kerentanan yang cenderung dianggap konstan. Pembagian kelas tingkat Indeks Risiko Bencana sebagai berikut : - Rendah : lndeks < 13 - Sedang : lndeks 13 - 144 - Tinggi : lndeks > 144
Sumber Data	BNPB
Frekuensi	Tahunan

II. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Nama Indikator	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
Definisi	Merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan seberapa jauh keberhasilan pembangunan suatu daerah dalam periode waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$LPE\ (t) = \frac{PDRB\ ADHK(t) - PDRB\ ADHK(t-1)}{PDRB\ ADHK(t-1)} x100\%$ **Keterangan :** t = Tahun Tertentu (t-1) = Tahun Sebelum
Interpretasi	Hasil perhitungan Laju Pertumbuhan Ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Kemiskinan (%)
Definisi	Kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar makanan maupun bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Penduduk dikategorikan miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan Garis Kemiskinan (GK) merupakan akumulasi dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Rumus Perhitungan	$$P\alpha = \frac{1}{n}\sum_{i-l}^{q}\left[\frac{z - y_i}{z}\right]$$ **Dimana :** a = 0 z = garis kemiskinan y_i = Rata-Rata Pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang berada di bawah garis kemiskinann(i=1,2,3,…,q), $y_i<z$ q = banyaknya penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan n = jumlah penduduk
Interpretasi	Persentase penduduk miskin merupakan banyaknya penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran di bawah garis kemiskinan dibandingkan dengan total populasi penduduk regional.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	PDRB Per Kapita ADHB (Rp Juta)
Definisi	PDRB per kapita menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. PDRB per kapita dihitung dengan cara membagi total PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.
Rumus Perhitungan	$$PDRB\ Per\ Kapita\ ADHB = \frac{PDRB\ ADHB}{Populasi}$$ **Keterangan :** PDRB ADHB = PDRB Atas Dasar Harga Berlaku populasi = jumlah penduduk regional t = periode
Interpretasi	Peningkatan PDRB per kapita biasanya dianggap sebagai tanda pertumbuhan ekonomi yang positif dan dapat meningkatkan standar hidup penduduk. Namun, penting untuk diingat bahwa PDRB per kapita tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang merata di dalam wilayah tersebut, sehingga tidak memberikan gambaran lengkap tentang ketidaksetaraan ekonomi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat Pengangguran Terbuka
Definisi	Tingkat pengangguran terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengggangguran. Pengangguran yaitu : • penduduk yang aktif mencari pekerjaan; • penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru; • penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan; • kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Rumus Perhitungan	$$TPT = \frac{PP}{PAK}\ x\ 100\%$$ **Keterangan :** TPT = Tingkat pengangguran terbuka (%) PP = Jumlah pengangguran (orang) PAK = Jumlah angkatan kerja (orang)
Interpretasi	Tingkat pengangguran terbuka menunjukkan kemampuan ekonomi untuk menciptakan lapangan kerja yang mampu menyerap persediaan (*supply*) tenaga kerja yang ada. Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin banyak persediaan tenaga kerja yang tidak termanfaatkan. Indikator ini dapat memberikan sinyal tentang kinerja pasar kerja dan berlangsungnya kondisi ekonomi tertentu, seperti resesi dan perubahan siklus bisnis dan teknologi. Pembedaan menurut jenis kelamin, kelompok umur, dan tingkat pendidikan dapat menggambarkan kesenjangan keterserapan di lapangan kerja antarkelompok tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	2 kali per Tahun

Nama Indikator	**Rasio Gini**
Definisi	Rasio gini merupakan salah satu teknik statistik untuk mengukur ketimpangan pendapatan. Keistimewaan dari alat ukur ini adalah dapat ditampilkan secara geometris, sehingga mempunyai dua aspek sekaligus yaitu aspek visual melalui kurva yang disebut kurva *Lorenz* dan aspek matematis.
Rumus Perhitungan	$$Rasio\ Gini = 1 - \sum_{i=1}^{n} (p_i - p_{i-1})\ (y_i - y_{i-1})$$ **Dimana** : i = 1 p_i = proporsi kumulatif dari penerima pendapatan i y_i = proporsi kumulatif pengeluaran perkapita i n = jumlah observasi
Interpretasi	Angka rasio gini sebagai ukuran pemerataan mempunyai selang nilai antara 0 dan 1. • Rasio Gini bernilai 0 menunjukan ketimpangan sebaran yang rendah (pemerataan sempurna). • Sedangkan, nilai 1 menunjukan tingkat ketimpangan sebaran yang tinggi (ketimpangan sempurna). Menurut Todaro (2006), klasifikasi nilai dari rasio gini adalah sebagai berikut : • Nilai rasio gini terletak antara 0,50 – 0,70 menandakan pemerataan sangat timpang. • Nilai rasio gini terletak antara 0,36 – 0,49 menunjukan ketimpangan sedang. • Nilai rasio gini berada pada selang 0,20 – 0,35 menunjukan pemerataan relatif baik. Secara visual, rasio gini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva *Lorenz*, yaitu kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu variabel tertentu (misalnya pengeluaran) dengan distribusi seragam yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Grafik persentase kumulatif penduduk yang diurut dari termiskin ke terkaya digambar pada sumbu horizontal dan persentase kumulatif pengeluaran digambar pada sumbu vertikal. Rasio gini merupakan formula yang menghitung rasio luas bidang antara garis diagonal (*perfect equality*) dan kurva *Lorenz*. Semakin jauh jarak kurva *Lorenz* dengan garis diagonal, maka tingkat ketimpangan semakin tinggi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)
Frekuensi	Dua kali per tahun (Maret dan September)

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Manusia
Definisi	Indeks komposit yang mengukur pembangunan manusia dari tiga aspek dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup.
Rumus Perhitungan	$IPM = \sqrt[3]{I_{Kesehatan} \times I_{Pendidikan} \times I_{Pengeluaran}}$ IPM dihitung menggunakan rata-rata geometrik dari indeks Indeks Kesehatan (UHH), indeks pengetahuan (rata-rata dari indeks HLS dan RLS), dan indeks pengeluaran.
Interpretasi	Nilai IPM berkisar antara 0 sampai dengan 100. Angka IPM memberikan gambaran komprehensip mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianyasemakin baik. Capaian IPM di suatu wilayah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori : - Rendah : IPM < 60 - Sedang : 60 ≤ IPM < 70 - Tinggi : 70 ≤ IPM < 80 - Sangat tinggi : IPM ≥ 80
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Usia Harapan Hidup (UHH)(tahun)
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian. yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%)
Definisi	Stunting (pendek/sangat pendek) adalah kondisi kurang gizi kronis yang diukur berdasarkan indeks tinggi badan menurut umur (TB/U) dengan menggunakan standar WHO tahun 2005. Data tinggi badan pada menjadi analisis untuk status gizi dan tinggi badan setiap anak balita dikonversikan ke dalam nilai terstandar (*Z-score*) menggunakan baku antropometri anak balita WHO 2005. Klasifikasi berdasarkan indikator TB/U adalah sebagai berikut standar dari WHO dan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor : 1995/MENKES/SK/XII/2010. a. Sangat pendek = Zscore < -3,0 b. Pendek = Zscore ≥ -3,0 s/d Zscore < -2,0.
Rumus Perhitungan	Cara perhitungan (1) (1) Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $PAB\ (5)P\ = \frac{JAB\ (5)\ P\ stunting}{JAB\ (5)} x100\ \%$

	Keterangan : PAB (5)P = Prevalensi anak balita yang stunting menderita pendek (*stunting*) JAB (5)P *stunting* = Jumlah anak balita pendek pada waktu tertentu pada waktu tertentu JAB (5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (2) (2) Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu dibagi dengan jumlah anak balita pada waktu yang sama dan dinyatakan dalam satuan persen (%). $$PAB\ (5)SP\ = \frac{JAB\ (5)\ SP\ stunting}{JAB\ (5)} x100\ \%$$ **Keterangan :** PAB(5)SP = Prevalensi anak balita yang stunting menderita sangat pendek (*stunting*) JAB (5)SP *stunting* = Jumlah anak balita sangat pendek pada waktu tertentu JAB (5) = Jumlah anak balita pada waktu yang sama Cara perhitungan (3) Prevalensi stunting = PAB(5)P + PAB(5)SP
Interpretasi	Prevalensi stunting yang tinggi di suatu wilayah menggambarkan beberapa masalah serius, termasuk : • Kekurangan Gizi: Stunting adalah indikator kekurangan gizi kronis. Prevalensi stunting yang tinggi menunjukkan bahwa banyak anak di wilayah tersebut menderita kekurangan gizi dalam jangka waktu yang lama. • Akses Pelayanan Kesehatan: Prevalensi stunting yang tinggi dapat mencerminkan akses yang terbatas ke pelayanan kesehatan berkualitas, termasuk pelayanan gizi dan kesehatan ibu dan anak. • Kemiskinan: Stunting sering kali terkait dengan kemiskinan. Keluarga yang miskin mungkin tidak mampu menyediakan makanan bergizi untuk anak-anak mereka, yang pada gilirannya dapat menyebabkan stunting. • Pendidikan: Tingkat pendidikan orang tua, khususnya ibu, juga berpengaruh terhadap prevalensi stunting. Orang tua yang berpendidikan cenderung lebih memahami pentingnya gizi dan kesehatan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. • Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan seperti sanitasi yang buruk dan akses terbatas ke air bersih juga dapat berkontribusi terhadap prevalensi stunting.
Sumber Data	SSGI
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)**
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	$$AKI = \frac{JKI}{JLH} x100.000$$

	Keterangan : AKI = Angka kematian ibu JKI = Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu JLH = Jumlah kelahiran hidup
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting : 1. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 2. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 3. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 4. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisamencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 5. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkolosis *(treatment coverage)* (%)**
Definisi	Persentase kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan di suatu wilayah dalam periode tertentu
Rumus Perhitungan	Cakupan penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis dihitung berdasarkan jumlah seluruh kasus tuberkulosis yang berhasil ditemukan dan mendapatkan pengobatan dibandingkan dengan perkiraan jumlah kasus tuberkulosis yang ada di suatu wilayah dalam periode tertentu.
Interpretasi	Indikator ini adalah ukuran penting dalam penanggulangan tuberkulosis, karena menunjukkan sejauh mana upaya penemuan dan pengobatan kasus tuberkulosis berhasil dilakukan. Indikator ini mencakup dua aspek penting : 1. Penemuan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk mengidentifikasi dan mendiagnosis individu yang menderita tuberkulosis. 2. Pengobatan Kasus: Ini merujuk pada kemampuan sistem kesehatan untuk memberikan pengobatan yang tepat dan efektif kepada individu yang didiagnosis dengan tuberkulosis.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan BPS Provinsi Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (*treatment success rate) (%)***
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap.
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.
Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Data Program Kementerian Kesehatan BPS Provinsi Sumatera Barat
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) (%)**
Definisi	Indikator ini menyatakan jumlah penduduk yang terdaftar sebagai kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) atau BPJS Kesehatan di mana bagi fakir miskin dan orang tidak mampu dibayarkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	Metode perhitungan yang digunakan adalah jumlah peserta jaminan kesehatan nasional dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia dikali 100%. $Persentase\ cakupan\ kepesertaan\ JKN\ = \frac{Jumlah\ peserta\ JKN}{Jumlah\ penduduk} x100\ \%$
Interpretasi	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional yang tinggi di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting: • Akses Pelayanan Kesehatan : Cakupan kepesertaan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk di wilayah tersebut memiliki akses ke pelayanan kesehatan. • Kesadaran Masyarakat : Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya asuransi kesehatan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas. • Komitmen Pemerintah Daerah : Cakupan yang tinggi juga bisa mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendaftarkan penduduknya ke dalam program jaminan kesehatan nasional. • Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) : Cakupan yang tinggi adalah langkah positif menuju pencapaian Universal Health Coverage (UHC), yaitu kondisi di mana semua orang dapat memperoleh layanan kesehatan yang mereka butuhkan tanpa mengalami kesulitan keuangan.
Sumber Data	BPJS DJSN
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)**
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut : a. Tidak punya ijazah = 0 tahun b. SD = 6 tahun c. SMP = 9 tahun d. SMA = 12 tahun e. D1/D2 = 14 tahun

	f. D3 = 15 tahun g. D4 = 16 tahun h. S1 = 17 tahun i. S2 = 19 tahun j. S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini : • Tidak pernah sekolah = 0 tahun; • Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; • Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; • Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; • Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1.
Rumus Perhitungan	$RLS\ 15+= \frac{1}{P15+}\sum_{i=l}^{n} Xi$ **Keterangan :** P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di suatu wilayah Xi = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	**Misal:** RLS Kota Sawahlunto Tahun 2023 = 10,44 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kota Sawahlunto yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,44 tahun atau telah menamatkan kelas X.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Harapan Lama Sekolah (Tahun)**
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$HLS = FK\sum_{i=7}^{k}[\frac{Ei_i}{Pi}]$ **Keterangan :** Pi = Jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas di suatu wilayah pada tahun tertentu Ei = Jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas yang masih sekolah di suatu wilayah pada tahun tertentu i = Usia (7, 8, 9,.....,k) FK = Faktor koreksi pesantren
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal : HLS Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebesar 13,69 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,69 tahun atau setara dengan Diploma II.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :** **a. Literasi membaca** **b. Numerasi**
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di daerah X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar 84 kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang

	diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah "mencapai kompetensi minimum" jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap".
Rumus Perhitungan	$$\%\ Satdik\ \min.SKM\ = \frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Satdik}\ min.SKM}{n}$$ **Keterangan :** Satdik min.SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal : Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi (%) tahun 2023 sebesar 44,44%. Artinya, terdapat 44,44 % satuan pendidikan di Kota Sawahlunto yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap").
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Proporsi Penduduk Berusia 15 tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi (%)**
Definisi	• Proporsi penduduk berusia 15 Tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi adalah untuk memantau jumlah penduduk berusia 15 tahun keatas yang berhasil menyelesaikan pendidikan hingga ke jenjang perguruan tinggi. • Nilai tertinggi dari indikator ini mencapai 100% (seluruh penduduk berusia 15 tahun ke atas di daerah tersebut sudah menyelesaikan Pendidikan tinggi). • Jenjang pendidikan tinggi mencakup : - Diploma I-IV - S1 - S2 - S2 Terapan - S3
Rumus Perhitungan	$$Z = \frac{X}{Y} x100\ \%$$ **Keterangan :** Z = Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang berkualifikasi pendidikan tinggi (%) X = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas yang lulus atau berijazah pendidikan tinggi Y = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas

Interpretasi	• Positif • Tingginya proporsi penduduk berusia 15 tahun keatas yang berkualifikasi pendidikan tinggi menggambarkan kualitas penduduk dari segi Pendidikan semakin baik
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)**
Definisi	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. • Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi. • Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi. Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.

Tingkat Pendidikan Rendah	**Tingkat Pendidikan Menengah**	**Tingkat Pendidikan Tinggi**
• Tidak/ belum tamat SD	• SMA/ MA/ SMLB/ Paket C	• Diploma I/ II/ III
• SD/ MI/ SDLB/ Paket A	• SMK	• Diploma IV
• SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B	• MAK	• S1
		• S2
		• S2 Terapan
		• S3

Rumus Perhitungan	$$\beta = \frac{A}{C} x\ 100\ \%$$ **Keterangan :** β = Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (kota x) A = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi, pada tahun tertentu di kota X C = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada tahun tertentu di kota X
Interpretasi	Positif : Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan *link and match* tenaga kerja antara dunia pendidikan (*supply*) dan lapangan kerja (*demand*) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (%)
Definisi	Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan adalah proksi yang digunakan untuk mengukur perlindungan jaminan sosial nasional bagi pekerja di Kota Sawahlunto. Definisinya adalah jumlah pekerja yang memiliki Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja.
Rumus Perhitungan	$Cakupan\ Jamsos\ Naker = \frac{Jumlah\ peserta\ BPJS\ Ketenagakerjaan}{Jumlah\ semesta\ penduduk\ bekerja} x100\ \%$ **Dimana :** Peserta = Pekerja Penerima Upah (PPU), Jasa Konstruksi, dan Pekerja Bukan Penerima Upah Semesta Penduduk Bekerja = Penduduk Bekerja yang berusia 15-65 tahun
Interpretasi	Semakin tinggi Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan menunjukkan tingkat perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan yang semakin tinggi. Jaminan sosial ini mencakup perlindungan terhadap risiko-risiko seperti kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kematian. Manfaat yang diperoleh peserta maupun keluarga meliputi santunan tunai, fasilitasi pengembalian ke pasar kerja, dan beasiswa bagi anak.
Sumber Data	BPJS Ketenagakerjaan dan BPS, Susenas.
Frekuensi	Setiap bulan dan survei dua kali setahun, bulan Maret dan September setiap tahunnya.

Nama Indikator	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\%\ PD\ formal\ = \frac{\sum PD\ formal}{\sum AKPD} x100\ \%$ **Dimana :** PD *formal* = Pekerja penyandang disabilitas sektor formal AKPD = Angkatan kerja penyandang disabilitas
Interpretasi	Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal merupakan proporsi penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar dan bekerja sebagai buruh/karyawan/pegawai terhadap total angkatan kerja penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal mendapatkan jobs security, penghasilan yang stabil, serta cakupan perlindungan sosial yang lebih baik untuk mendapatkan kehidupan yang layak dibandingkan mereka yang bekerja di sektor informal.
Sumber Data	Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Kerukunan Umat Beragama (Kampung Moderasi Beragama)
Definisi	Kampung Moderasi Beragama adalah Kampung dengan sifat toleransi umat beragama yang tinggi dan menciptakan kerukunan antar umat beragama di tengah masyarakat.
Rumus Perhitungan	Moderasi beragama diukur dari 4 indikator : Komitmen kebangsaan, Tolerasi, Anti kekerasan, Adaptif budaya lokal
Interpretasi	Semakin banyak Kampung Moderasi Beragama pada suatu daerah, semakin tinggi toleransi umat beragama di daerah tersebut.
Sumber Data	Kementerian Agama
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pelestarian Cagar Budaya
Definisi	Persentase pelestarian cagar budaya adalah jumlah cagar budaya (*tangible dan Intangible)* yang dilestarikan dibandingkan dengan jumlah cagar budaya yang terdata.
Rumus Perhitungan	Persentase Pelestarian Cagar Budaya $= \frac{Jumlah\ cagar\ budaya\ yang\ dilestarikan}{Jumlah\ cagar\ budaya\ yang\ terdata} x\ 100\ \%$ (Permendagri 18/2020)
Interpretasi	Cagar budaya merupakan warisan sejarah yang tidak hanya mencerminkan identitas suatu bangsa, tetapi juga berfungsi sebagai jembatan antara generasi. Pelestarian cagar budaya sangat penting untuk menjaga dan melestarikan nilai-nilai historis, budaya, dan artistik yang ada di dalamnya. Pelestarian cagar budaya tidak hanya memberikan manfaat budaya tetapi juga dapat berdampak positif pada ekonomi lokal melalui pariwisata. Situs bersejarah yang terawat dengan baik dapat menarik pengunjung dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi komunitas setempat.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Perlindungan Khusus Anak
Definisi	Indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.
Rumus Perhitungan	IPKA = ∑5j = 1 (Wj x Indeks Kj) Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator : **A. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN** 1. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran 2. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/memanfaatkan taman bacaan Masyarakat 3. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet 4. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar 5. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah **B. KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF** 6. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun

	7. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak 8. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua 9. Angka kesiapan sekolah **D. KLASTER KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN** 10. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan 11. Persentase balita stunting 12. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 13. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal 14. Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 15. Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 16. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok 17. Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap **E. KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA** 18. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah 19. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia 20. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar) 21. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler 22. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni **E. KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS** 23. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 24. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet 25. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia I7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) 26. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan 27. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar
Interpretasi	Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPHA) menghitung capaian yang menggambarkan kondisi anak yang membutuhkan perlindungan khusus seperti anak penyadang disabilitas, pekerja anak dan anak terlantar baik secara nasional, provinsi dan kabupaten/kota.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)**
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (UU NO.52/2009 dan Peraturan BKKBN Nomor 3 Tahun 2022)
Rumus Perhitungan	Pengukuran iBangga dilakukan oleh BKKBN meliputi dimensi: a. Ketenteraman; b. Kemandirian; dan c. Kebahagiaan.

	• Dimensi Ketenteraman terdiri atas indikator : e. kegiatan ibadah; f. legalitas Keluarga; g. jaminan kesehatan; h. keharmonisan Keluarga. • Dimensi Kemandirian terdiri atas indikator : f. pemenuhan kebutuhan dasar; g. jaminan keuangan; h. keberlangsungan pendidikan; i. kesehatan Keluarga; j. akses media online/daring. • Dimensi Kebahagiaan terdiri atas indikator : c. interaksi Keluarga; d. interaksi sosial.
Interpretasi	Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kriteria sebagai berikut : • Nilai iBangga < 40 : kurang baik (rentan) • Nilai iBangga 40 – 70 : cukup baik (berkembang) • Nilai iBangga > 70 : baik (tangguh)
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Ketimpangan Gender**
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: • Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_P \times SE_P\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_P}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ • Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks lakilaki dengan rata-rata harmonic $HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ • Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF}} \times \frac{0,01}{MHPK20} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$

	• Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ • Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ • Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ Keterangan : G_P : Indeks Perempuan G_L : Indeks Laki-laki MTF : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan MHPK20 : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P : Persentase perempuan di legislative PR_L : Persentase laki-laki di legislative SE_P : Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L : Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$: Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$: Persentase angkata kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja HARM (G_P, G_L) : Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonic IKR : Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP : Indeks dimensi pemberdayaan IPK : Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{PL} : Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric IKG : Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

III. Aspek Daya Saing Daerah

Nama Indikator	**Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja**
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$Tingkat\ Produktivitas\ Tenaga\ Kerja = \frac{PDRB\ ADHK}{Jumlah\ Tenaga\ Kerja}\ x\ 100\ \%$ (Permendagri No. 18/2020)
Interpretasi	• Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. • Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK dengan total penduduk yang bekerja. • Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)
Definisi	Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang bersumber dari sektor Industri Pengolahan yang mencerminkan proporsi nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap PDRB.
Rumus Perhitungan	$Kontribusi\ PDRB\ Industri\ Pengolahan = \frac{X}{Y} x100\%$ **Keterangan :** X = Nilai Tambah Sektor Industri Pengolahan Y = Nilai Total PDRB ADHB
Interpretasi	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industri pengolahan terhadap nilai PDRB ADHB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor Industri Pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (%)
Definisi	Rasio PDRB penyediaan akomodasi dan makan minum adalah persen bagian PDRB daerah yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi penyediaan akomodasi bagi wisatawan dan penyediaan jasa makan dan minum.
Rumus Perhitungan	$Rasio\ PDRB\ Akomodasi\ Makan\ Minum = \frac{x_n}{y_n} x100\%$ Keterangan: Xn = Nilai Tambah Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum Yn = Total PDRB ADHB Daerah
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait pariwisata, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Jumlah Tamu Wisatawan Mancanegara (Ribu orang)
Definisi	Jumlah tamu wisatawan mancanegara yang menginap di hotel berbintang di Kota Sawahlunto
Rumus Perhitungan	*Data jumlah tamu wisatawan mancanegara (di setiap Hotel berbintang daerah tertentu dalam periode 1 (satu) tahun*
Interpretasi	Semakin banyak jumlah tamu mancanegara yang menginap di hotel berbintang di Kota Sawahlunto maka akan semakin meningkatkan devisa dari sektor pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik; Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif Terhadap PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi (%)
Definisi	PDRB pada definisi BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada satu daerah. Dengan demikian, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas ekonomi kreatif dari 17 subsektor yang termasuk: 1. Fesyen 2. Kuliner 3. Kriya 4. Film, Animasi dan Video 5. Pengembang Permainan

	6. Aplikasi 7. Musik 8. Seni Pertunjukan 94 9. Fotografi 10. Desain Komunikasi Visual 11. Televisi dan Radio 12. Seni Rupa 13. Desain Produk 14. Periklanan 15. Penerbitan 16. Arsitektur 17. Desain Interior Untuk tingkat kabupaten/kota disepakati bahwa PDRB Ekonomi Kreatif meliputi lapangan usaha Jasa Lainnya.
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ PDRB\ Ekonomi\ Kreatif = \frac{EK}{TQ} x100\%$ Keterangan: EK = PDRB Ekonomi Kreatif Kota Sawahlunto TQ = PDRB Ekonomi Kreatif Provinsi
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh subsektor ekonomi kreatif, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB provinsi, ceteris paribus. Namun dalam penerjemahannya ke depan, perlu diperhatikan nilai rupiah dari PDRB subsektor ekonomi kreatif untuk menghindari misinterpretasi.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)**
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ UKM = \frac{Jumlah\ unit\ UKM\ Non\ Pertanian}{Total\ Jumlah\ Unit\ Usaha} x100\%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)**
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ IKM = \frac{Jumlah\ Unit\ Industri\ Kecil\ dan\ Menengah}{Total\ Jumlah\ Unit\ Industri} x100\%$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan Daerah
Definisi	Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumus Perhitungan	$$Rasio\ Kewirausahaan\ Daerah = \frac{Berusaha\ dibantu\ buruh\ tetap\ daerah}{Total\ angkatan\ kerja\ daerah} x100\%$$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)
Definisi	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
Rumus Perhitungan	$$Rasio\ volume\ usaha\ koperasi\ terhadap\ PDRB = \frac{Volume\ usaha\ koperasi\ daerah}{PDRB\ ADHB} x100\%$$
Interpretasi	Semakin besar rasio volume usaha koperasi daerah terhadap PDRB, merepresentasikan semakin besar kontribusi koperasi terhadap perekonomian daerah tersebut.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	*Return on Asset* (ROA) BUMD
Definisi	*Return On Asset* (ROA) adalah indikator untuk mengukur kemampuan aset perusahaan dalam menghasilkan laba bersih. *Return On Asset* (ROA) dihitung dengan membandingkan laba bersih dengan total aset yang dimiliki perusahaan.
Rumus Perhitungan	$$Return\ on\ Asset\ (ROA) = \frac{Laba\ Bersih}{Total\ Asset} x100\%$$
Interpretasi	*Return On Asset* (ROA) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur produktivitas perusahaan melalui pemanfaatan asset yang dimiliki. Dengan mengetahui tingkat ROA perusahaan, maka dapat diketahui tingkat produktivitas perusahaan jika dibandingkan dengan perusahaan lain dalam sektor atau industri yang sama. Dengan demikian, data ROA dapat dimanfaatkan untuk perencanaan strategis dalam mencapai sasaran pembangunan daerah, yang

	pada akhirnya akan berdampak pada pencapaian sasaran pembangunan nasional secara keseluruhan.
Sumber Data	LKPD, BPS, Laporan keuangan BUMD
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%)**
Definisi	Tenaga Kerja Formal adalah tenaga kerja yang dengan status pekerjaan utama termasuk dalam pekerja dengan kategori berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar, dan buruh/karyawan/pegawai.
Rumus Perhitungan	$Tenaga\ Kerja\ Formal = \left(\frac{\sum_{i=3}^{4} \gamma i}{\sum_{i=1}^{7} \gamma i}\right) \times 100\%; i = 1,2,3,\ldots,7$ Keterangan : *Tenaga Kerja Formal* = Proporsi penciptaan lapangan kerja formal yi = Jumlah pekerja dari status pekerjaan utama ke-i 1 = Berusaha sendiri 2 = Berusaha dibantu buruh tidak tetap 3 = Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar 4 = Buruh/karyawan/pegawai 5 = Pekerja bebas di pertanian 6 = Pekerja bebas di nonpertanian 7 = Pekerja keluarga/tak dibayar
Interpretasi	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal dengan satuan nilai dalam bentuk persentase menununjukan seberapa dominan pekerja dengan status pekerjaan utama yang termasuk dalam pekerja formal sesuai dengan ketentuan nasional yang berlaku. Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin dominan kekuatan ekonomi nasional dalam menciptakan lapangan kerja formal.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan (%)**
Definisi	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan adalah persentase jumlah angkatan kerja perempuan terhadap jumlah penduduk usia kerja perempuan. Angkatan kerja perempuan adalah penduduk usia kerja perempuan yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengganguran. Penduduk usia kerja perempuan adalah penduduk berjenis kelamin perempuan yang berusia 15 tahun ke atas.
Rumus Perhitungan	$$TPAKp = \frac{PAKp}{P(15+p)}\ x\ 100\%$$ **Keterangan :** TPAK*p* = Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan (%) PAK*p* = Jumlah angkatan kerja perempuan (orang) P(*15+p*) = Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun ke at (orang)
Interpretasi	TPAK menunjukkan indikasi besarnya pasokan tenaga kerja (*labor supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa relatif terhadap penduduk usia kerja. Pembagian berdasarkan jenis kelamin (perempuan) menunjukkan ukuran dan komposisi penduduk perempuan yang aktif dalam pasar kerja. Kegunaan indikator ini antara lain untuk memproyeksikan pasokan tenaga kerja, menetapkan kebijakan tenaga kerja, merancang kebijakan perawatan, menentukan kebutuhan pelatihan, dan merencanakan pembiayaan sistem perlindungan sosial.

Sumber Data	Badan Pusat Statistik Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas)
Frekuensi	2 kali per Tahun

Nama Indikator	**Indeks Inovasi Daerah**
Definisi	Himpunan inovasi daerah yang telah dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri sebagai sebuah bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Rumus Perhitungan	$$Indeks\ Inovasi\ Daerah = \frac{Skor\ Total}{Skor\ total\ maksimum\ x\ 100}$$
Interpretasi	Indeks inovasi daerah dapat dijadikan ukuran yang menggambarkan kondisi dan kemampuan suatu daerah dalam mengoptimalkan pemanfaatan seluruh potensi yang dimilikinya guna tercapainya kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan berdaya saing
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (%)**
Definisi	Proporsi Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap Total PDRB ADHB Kota Sawahlunto.
Rumus Perhitungan	$$Ag\ (\%) = \frac{Ag}{TQ}\ x\ 100\%$$ **Keterangan :** Ag (%) = Rasio PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Ag = Nilai PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan TQ = Total PDRB ADHB
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, semakin tinggi rasionya terhadap Produk Domestik Regional Bruto Kota Sawahlunto, ceteris paribus.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Tingkat Produktifitas Tenaga Kerja Pada Lapangan Usaha Sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan (Juta/orang)**
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja pada lapangan usaha sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan dalam menghasilkan produk.
Rumus Perhitungan	$$Tingkat\ Produktivitas\ Tenaga\ Kerja\ (Ag) = \frac{PDRB(Ag)\ ADHK}{Jumlah\ Tenaga\ Kerja\ (Ag)}\ x\ 100\ \%$$
Interpretasi	Semakin tinggi Produktivitas Tenaga Kerja sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan, semakin baik kualitas pembangunan sektor Pertanian, Kehutanan Dan Perikanan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Masyarakat Digital Indonesia**
Definisi	Indeks Masyarakat Digital Indonesia merupakan suatu pengukuran tingkat kompetensi dan keterampilan masyarakat dalam penggunaan teknologi digital, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun terkait pekerjaannya.

Rumus Perhitungan	Pengukuran IMDI bersumber dari data primer dan berbagai data sekunder. Data primer diperoleh melalui survei kepada responden individu dan responden perusahaan Indonesia dengan skala 1-100. IMDI terdiri dari empat pilar penyusun, yaitu : • Infrastruktur dan Ekosistem; • Keterampilan Digital; • Pemberdayaan; • Pekerjaan
Interpretasi	IMDI dapat menjadi acuan dalam perencanaan kebijakan dan program pengembangan SDM digital di Indonesia karena nilai IMDI dapat menjadi basis pengukuran tingkat kompetensi digital masyarakat Indonesia hingga tingkat kabupaten dan kota. Hasil pengukuran indeks dapat dijadikan sebagai landasan dalam menetapkan fokus target berdasarkan indikator-indikator di setiap pilar, mendorong koordinasi yang lebih baik antar pemangku kepentingan, serta menjadi acuan bagi setiap pemangku kepentingan di level kabupaten/kota maupun provinsi di Indonesia untuk merencanakan dan menetapkan program prioritas pembangunan SDM digital di wilayah masing-masing.
Sumber Data	Kementerian Komunikasi dan Informatika
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok**
Definisi	Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok adalah perbandingan standar deviasi harga rata-rata selama bulan Januari sampai Desember dengan rata-rata harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari sampai Desember yang dinyatakan dalam persentase (Permendagri No.18/2020). Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat (Permen Perdagangan RI No. 22 Tahun 2021). Jenis barang kebutuhan pokok menurut Perpres No.59 Tahun 2020 adalah: 1. Barang kebutuhan pokok hasil pertanian: - Beras - Kedele bahan baku tahu dan tempe - Cabe - Bawang merah 2. Barang kebutuhan pokok hasil industri: - Gula - Minyak goreng - Tepung terigu 3. Barang kebutuhan pokok hasil peternakan & perikanan: - Daging sapi - Daging ayam ras - Telur ayam ras - Ikan segar (bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang
Rumus Perhitungan	KVpt = Sn/P x 100 % KVpt = Koefisien Variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu Sn = Standar deviasi harga rata-rata selama bulan Januari sampai Desember P = rata-rata harga barang kebutuhan pokok selama bulan Januari sampai Desember (Permendagri No.18/2020)

	Perhitungan koefisien variasi harga dilakukan dengan langkah-langkah : 1. menghitung rata-rata harga setahun per komoditas; 2. menghitung standar deviasi untuk data komoditas; 3. menghitung koefisien variasi dengan cara membagi standar deviasi tiap komoditas terhadap rata-rata harga per komoditas; 4. menghitung realisasi koefisien variasi per tahun didapatkan dengan cara menghitung rata-rata koefisien variasi seluruh komoditas.
Interpretasi	Semakin kecil persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) menunjukkan bahwa harga barang kebutuhan pokok selama satu tahun tersebut berada dalam keadaan stabil. Target Persentase stabilitas harga dan jumlah ketersediaan barang kebutuhan pokok (koefisien variasi harga barang kebutuhan pokok antar waktu) tahun 2020-2024 berada pada kisaran 5,9 % – 6 % (Permen Perdagangan Republik Indonesia No.46 Tahun 2020),
Sumber Data	Disperindagkop
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB)**
Definisi	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adalah pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi. PMTB mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan. Pengeluaran barang modal untuk keperluan militer tidak dicakup dalam rincian ini tetapi digolongkan sebagai konsumsi pemerintah. PMTB juga merupakan salah satu unsur yang dipakai dalam metode penghitungan PDRB. Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) merupakan share PMTB terhadap PDRB Daerah.
Rumus Perhitungan	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) $= \frac{PMTB\ Kota\ Sawahlunto}{PDRB\ ADHK\ Kota\ Sawahlunto} x100\%$ **Keterangan :** PMTB = Nilai PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Milliar Rupiah) PDRB ADHK = Total Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah
Interpretasi	Semakin tinggi Pembentukan Modal tetap Bruto (% PDRB), semakin besar peranan atau kontribusi komponen PMTB terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)**
Definisi	Ekspor barang dan jasa (% PDRB) merupakan share ekspor barang dan jasa terhadap PDRB Kota Sawahlunto Ekspor Barang dan Jasa didefiniskan sebagai alih kepemilikan ekonomi (melalui aktivitas penjualan/ pembelian, barter, pemberian atau hibah) barang dan jasa antar residen wilayah tersebut dengan non-residen (yang berada di luar wilayah atau luar negeri). Ekspor-Impor ke dan dari suatu wilayah Kota Sawahlunto terdiri dari: • Ekspor ke luar provinsi/Kota Sawahlunto • Impor dari luar provinsi/Kota Sawahlunto

Rumus Perhitungan	Ekspor barang dan jasa (% PDRB) $= \frac{Ekspor\ barang\ dan\ jasa\ \ ADHK}{PDRB\ ADHK} x100\%$ **Keterangan :** Ekspor Barang dan Jasa = Nilai PMTB berdasarkan PDRB Sisi Pengeluaran (Milliar Rupiah) PDRB ADHK = Total Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan (Milliar Rupiah
Interpretasi	Semakin tinggi Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB), semakin besar peranan atau kontribusi komponen Ekspor Barang dan Jasa terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Sawahlunto.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Proporsi Kontribusi PDRB Kota (%)**
Definisi	Proporsi kontribusi PDRB Kota merupakan share PDRB ADHB Kota Sawahlunto terhadap PDRB ADHB Provinsi Sumatera Barat.
Rumus Perhitungan	Proporsi Kontribusi PDRB Kota $= \frac{PDRB\ ADHB\ Kota\ Sawahlunto}{PDRB\ ADHB\ Provinsi\ Sumatera\ Barat} x100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi proporsi kontribusi PDRB Kota, semakin besar peranan atau kontribusi Kota Sawahlunto terhadap ekonomi Provinsi Sumatera Barat.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak dan Terjangkau (%)**
Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: • Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; • Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut : • Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat; • Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m^2; • Memiliki akses air minum layak; • Memiliki akses sanitasi layak.
Rumus Perhitungan	• Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan bekelanjutan Persentase Rumah Tangga yang mengakses hunian layak, terjangkau, dan bekelanjutan $PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRTx100}$

	PHLTB : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRTHLTB : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRT : Jumlah rumah tangga • Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan 108 indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $PHLTB(proksi) = \frac{JRTHLTB(proksi)}{JRTx100}$ PHLTB (proksi) : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRTHLTB (proksi) : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRT : Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaanperdesaan, dan desil pengeluaran.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Persentase Desa Mandiri (%)**
Definisi	Desa Mandiri (Desa Sembada) adalah Desa Maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
Rumus Perhitungan	Persentase Desa Mandiri (%) $= \frac{Jumlah\ Desa\ Mandiri\ di\ Kota\ Sawahlunto}{Total\ Jumlah\ Desa\ di\ Kota\ Sawahlunto} x100\ \%$
Interpretasi	Klasifikasi Status Desa berdasarkan ambang batas Indeks Desa Membangun (IDM) sebagai berikut : • Mandiri (IDM > 0,815) Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah sangat baik. • Maju (IDM > 0,707 dan ≤ 0,815) Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah baik. • Berkembang (IDM > 0,599 dan ≤ 0,707) Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang sudah cukup baik. • Tertinggal (IDM > 0,491 dan ≤ 0,599) Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih terbatas. • Sangat Tertinggal (IDM ≤ 0,491)

	Merupakan desa yang mempunyai ketersediaan dan akses terhadap layanan dasar, kegiatan sosial, kegiatan ekonomi, lingkungan, aksesibilitas dan administrasi pemerintahan yang masih sangat terbatas.
Sumber Data	Kementerian Desa PDTT
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB (%)**
Definisi	• Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. • PDRB adalah Penjumlahan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu regional/negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen, di mana barang dan jasa dihitung menggunakan harga yang berlaku pada periode penghitungan. • Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa besar kontribusi penerimaan pajak daerah terhadap PDRB suatu daerah. Persentase rasio tersebut menggambarkan sejauh mana penerimaan pajak daerah bagi pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{RPDRB (t)} = \frac{Penerimaan\ Pajak\ Daerah\ (t)}{PDRB(t)} x\ 100\ \%$ **Keterangan :** RPDRB_t = Kontribusi Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) pada tahun t.
Interpretasi	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB (%) yang semakin besar menunjukkan bahwa Semakin tinggi penerimaan pajak daerah, maka semakin besar nilai rasio pajak daerah. Semakin tinggi nilai rasio pajak daerah maka pemerintah daerah dapat lebih mengandalkan APBD untuk membiayai pembangunan di daerah.
Sumber Data	BPS, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Total Dana Pihak Ketiga/PDRB**
Definisi	Dana pihak ketiga adalah dana yang berasal dari masyarakat, baik perorangan maupun badan usaha yang diperoleh bank dengan menggunakan berbagai instrumen produk simpanan yang dimiliki oleh Bank. Produk simpanan yang ditawarkan bank kepada pihak ke tiga ini antara lain : simpanan giro, tabungan, deposito dan simpanan deposito. Simpanan giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek/bilyet giro, saran perintah lainnya, atau pemindah bukuan. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat yang telah disepakati dimana nasabah bertindak sebagai penitip dana dan bank sebagai penerima titipan dana. Deposito merupakan jenis simpanan uang yang penarikannya dapat dilakukan dalam jangka waktu yang telah dijanjikan antara bank dan nasabah. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu daerah. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan

	nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) adalah persentase rasio total dana pihak ketiga perbankan di suatu daerah terhadap PDRB daerah tersebut pada suatu waktu tertentu. Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (%) menggambarkan tingkat besaran perbandingan DPK perbankan suatu daerah terhadap PDRB atau pendapatan total perekonomian daerahnya. Nilai Total DPK/PDRB menggambarkan tingkat pendalaman keuangan di suatu daerah, dimana peningkatan angka rasio Total DPK/PDRB (%), menunjukkan peningkatan tingkat simpanan masyarakat di sektor keuangan yang mengarah pada semakin dalamnya sektor keuangan di suatu daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Total Dana Pihak Ketiga/PDRB (\%)} = \frac{Total\ Dana\ Pihak\ Ketiga}{PDRB} x\ 100\ \%$ **Keterangan :** Total Dana Pihak Ketiga (DPK) : Total DPK Bank Umum + Total DPK BPR-BPRS (di suatu daerah) PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Semakin tinggi rasio total dana pihak ketiga terhadap PDRB menunjukkan semakin meningkat jumlah simpanan masyarakat
Sumber Data	Total Dana Pihak Ketiga (Otoritas Jasa Keuangan (OJK)) PDRB (Badan Pusat Statistik (BPS))
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Nilai Transaksi Saham Per Kapita Per Kabupaten/Kota (Rupiah)**
Definisi	Nilai transaksi saham per kapita adalah total nilai transaksi saham yang dilakukan oleh investor berdasarkan domisili (daerah/Provinsi/Kabupaten/Kota) selama setahun dibagi dengan jumlah penduduk daerah tersebut (Provinsi/Kabupaten/Kota). Total nilai transaksi saham merupakan hasil dari volume atau jumlah saham yang ditransaksikan dikali dengan harga saham.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai transaksi saham/kapita} = \frac{Nilai\ transaksi\ saham\ per\ daerah\ selama\ setahun}{Jumlah\ penduduk\ per\ daerah}$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai transaksi saham per kapita menunjukkan partisipasi masyarakat yang masuk dalam pasar modal meningkat, dengan kata lain ukuran atau likuditas di pasar modal meningkat yang pada akhirnya akan meningkatkan kapitalisasi pasar modal.
Sumber Data	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Total Kredit/PDRB**
Definisi	Total Kredit adalah penjumlahan dari total penyaluran kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan yang terdiri dari Bank Umum (termasuk Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah) dan Bank Perekonomian Rakyat (BPR-BPRS) di lingkup daerah. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu regional/wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.

	Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan persentase rasio total kredit dan pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan di suatu daerah terhadap PDRB (atas dasar harga berlaku) daerah tersebut pada suatu waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$$\text{Total Kredit/PDRB (\%)} = \frac{Total\ Kredit}{PDRB} x\ 100\ \%$$ **Keterangan :** Total Kredit : Total penyaluran kredit Bank Umum + Total penyaluran kredit BPR-BPRS di lingkup daerah) PDRB : Produk Domestik Regional Bruto (atas dasar harga berlaku)
Interpretasi	Total Kredit/PDRB (%) menggambarkan tingkat pemanfaatan kredit dan pembiayaan perbankan di lingkup daerah sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan daerah. Semakin tinggi nilai Total Kredit/PDRB (%) menunjukkan semakin berfungsinya perbankan sebagai lembaga intermediasi keuangan yang berperan dalam menyalurkan pendanaan pada usaha-usaha dalam perekonomian lingkup daerah tersebut.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%)**
Definisi	Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (%) adalah persen bagian PDRB Daerah yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait Jasa Keuangan.
Rumus Perhitungan	$$\text{Rasio PDRB Sektor Jasa Keuangan (\%)} = \frac{Nilai\ Tambah\ Sektor\ Jasa\ Keuangan}{Total\ PDRB\ ADHB} x\ 100\ \%$$
Interpretasi	Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh aktivitas terkait Jasa Keuangan, semakin tinggi proporsinya terhadap PDRB Daerah, ceteris paribus..
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

IV. Aspek Pelayanan Umum

Nama Indikator	**Indeks Reformasi Hukum**
Definisi	Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Indeks Reformasi Hukum

No	Kategori	Nilai/Angka	Prediket
1	AA	> 90 - 100	Istimewa
2	A	> 80 - 90	Sangat Baik
3	BB	> 70 - 80	Baik
4	B	> 60 - 70	Cukup Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup
6	C	> 30 - 50	Buruk
7	D	0 - 30	Sangat Buruk

Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap *self-assesment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.

Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut : $\text{Indeks Domain (i)} = \frac{1}{BD}\sum_{j=m}^{n} NAij\ xBAij$ **Keterangan:** NDj = nilai indeks domain ke-j BDj = nilai bobot domain ke j
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Pelayanan Publik**
Definisi	Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah Indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan Pengaduan serta Aspek Inovasi. Hasil pengukuran yang diperoleh dari Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks.
Rumus Perhitungan	Penentuan nilai indeks dilakukan dengan menentukan nilai setiap indikator, menentukan nilai setiap aspek, menentukan nilai indeks formulir dan menentukan nilai indeks pelayanan publik. • Menentukan nilai untuk setiap indikator $nilai\ per\ indikator = \frac{nilai\ F01 + nilai\ F02 + nilai\ F03}{3}\ x\ bobot\ per\ indikator$ • Menentukan nilai setiap aspek $nilai\ per\ aspek = \sum nilai\ per\ indikator$ • Menentukan indeks • $nilai\ indeks = \sum(nilai\ aspek_n\ x\ bobot\ aspek_n)$
Interpretasi	Angka indeks yang dihasilkan merupakan komposit dari berbagai data, baik data primer dan sekunder serta data obyektif maupun persepsi. Prinsip yang digunakan dalam menyusun indikator IPP berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Prinsip-prinsip tersebut adalah: 7. Keadilan (*Fairness*); 8. Partisipasi (*Participation*);

	9. Akuntabilitas (*Accountability*); 10. Transparansi (*transparency*); 11. Berdayaguna (*useful*); 12. Aksesibilitas (*accessibility*) Aspek yang harus dipenuhi oleh unit penyelenggara pelayanan publik sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, meliputi: Kebijakan Pelayanan, Profesionalisme SDM, Sarana Prasarana, Sistem Informasi Pelayanan Publik, Konsultasi dan Pengaduan serta Inovasi. Indikator dihasilkan melalui persilangan antara prinsip dan aspek yang dijadikan dasar penilaian. Berdasarkan persilangan tersebut diperoleh 37 indikator 111 penilaian yang diisi melalui Formulir F01 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik), Formulir F02 (Evaluator) dan Formulir F03 (Pengguna Layanan). Perhitungan Indeks Pelayanan Publik dikategorikan menjadi:

Range Nilai	Kategori	Makna
0 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Survey Penilaian Integritas (SPI) KPK (Nilai)**
Definisi	Survey Penilaian Integritas (SPI) adalah indeks yang diukur dengan survei masyarakat yang dibangun untuk memetakan risiko korupsi dan kemajuan upaya pencegahan korupsi yang dilakukan kementerian/lembaga/pemerintah daerah (K/L/PD)
Rumus Perhitungan	Penilaian Internal (0,305) + Penilaian Eksternal (0,328) + Penilaian Eksper (0,367) – Faktor Koreksi (0,2)
Interpretasi	Hasil dari Survey Penilaian Integritas (SPI) dijadikan dasar untuk menyusun rekomendasi peningkatan upaya pencegahan korupsi di masing-masing K/L/PD sesuai karakteristik dan temuan pemetaan empiris
Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)**
Definisi	Gambaran tentang situasi dan kondisi korupsi pada unit kerja Persepsi atau penilaian masyarakat terhadap berbagai bentuk perilaku korupsi di masyarakat yang tercakup dalam tiga subdimensi yaitu subdimensi keluarga, subdimensi komunitas, dan subdimensi publik.
Rumus Perhitungan	1. Menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian 2. Mencari bobot rata-rata indikator 3. Mencari nilai indeks per unsur yang diperoleh dari rumus 1/10 X bobot rata-rata tiap indikator. 4. Menghitung nilai indeks IPK dengan menjumlahkan seluruh indeks per unsur
Interpretasi	Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100. 1 = 25 - 43,75 : Tidak Bersih dari Korupsi 2 = 43,76 - 62,50 : Kurang Bersih dari Korupsi 3 = 62,51 - 81,25 : Cukup Bersih dari Korupsi 4 = 81,26 - 100,00 : Bersih dari Korupsi

Sumber Data	Komisi Pemberantasan Korupsi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu**
Definisi	Kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk turut serta secara aktif dalam kehidupan politik, dengan jalan memilih pimpinan negara, dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah, public policy. (Budiardjo, 2009)
Rumus Perhitungan	Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu $= \frac{Jumlah\ Pengguna\ Hak\ Pilih}{Jumlah\ Daftar\ Pemilih\ Tetap} x\ 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi Tingkat Partisipasi Pemilih Pada Pemilu, semakin demokratis negara tersebut. Tingginya partisipasi pemilih dapat dibaca sebagai penerimaan masyarakat atas penerapan sistem demokrasi di suatu Negara dan harapan bagi terwujudnya kemajuan Negara. Sementara rendahnya partisipasi pemilih dapat menunjukkan bentuk ketidakpercayaan serta perilaku apatis masyarakat terhadap proses politik serta kehidupan bernegara.
Sumber Data	KPU Kota Sawahlunto
Frekuensi	Lima Tahunan

Nama Indikator	**Angka Kriminalitas**
Definisi	Angka kriminalitas adalah jumlah kejahatan yang terjadi dalam satu tahun dibagi dengan jumlah penduduk pada tahun yang bersangkutan, dikalikan 10.000. Kriminalitas adalah tindakan yang melanggar hukum, undang-undang, norma, dan nilai yang berlaku di masyarakat
Rumus Perhitungan	$Angka\ Kriminalitas = \frac{Jumlah\ Tindak\ Kriminal\ dalam\ 1\ tahun}{Jumlah\ Penduduk} x10.000$ (Permendagri 86/2017)
Interpretasi	Semakin tinggi angka kriminalitas berarti semakin rendah tingkat keamanan di suatu wilayah.
Sumber Data	BPS
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Pelanggaran Peraturan Daerah**
Definisi	Perbuatan yang bersifat melawan, melanggar dan menyimpang terhadap Peraturan Daerah yang dilakukan oleh seseorang atas dasar kesadaran.
Rumus Perhitungan	Mengidentifikasi seberapa banyak orang yang melakukan pelanggaran terhadap Peraturan Daerah yang dimasukkan ke dalam laporan Pelanggaran.
Interpretasi	Peraturan Daerah adalah peraturan perundangan-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan Daerah dapat mengatur berbagai hal, seperti : pajak dan retribusi daerah, kebersihan dan ketertiban umum, Administrasi Kependudukan, Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan lain-lain.
Sumber Data	Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Persentase Kerjasama Wajib yang Dilaksanakan**
Definisi	Kerja Sama Wajib merupakan kerja sama antar daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki eksternalitas lintas daerah dan penyediaan layanan publik yang lebih efesien jika dikelola bersama.

Rumus Perhitungan	$\%\ \boldsymbol{kerjasama\ wajib\ yang\ dilaksanakan} = \frac{\boldsymbol{jumlah\ kerjasama\ yang\ dilaksanakan}}{\boldsymbol{jumlah\ total\ kerjasama}} \times \mathbf{100}\%$
Interpretasi	Kerja sama meliputi : 1. Kesepakatan Bersama merupakan dokumen kerja sama antara suatu daerah dengan daerah lain yang berisi kesepakatan yang isinya bersifat umum. 2. Perjanjian Kerja Sama yang merupakan dokumen kerja sama antara suatu daerah dengan daerah lain yang memuat hak dan kewajiban.
Sumber Data	Bagian Pemerintahan Setdako Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan**
Definisi	Indeks yang menunjukkan tingkat ketahanan nasional dari aspek pertahanan dan keamanan kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhannas RI, 2008).
Rumus Perhitungan	$Indeks\ G = \frac{\sum_{i=1}^{k} \mathrm{Vi}\ Gi}{100}$ **Keterangan :** k = Banyaknya variabel dalam gatra G Vi = Bobot variabel Gi Gi = Sub indeks untuk variabel Gi
Interpretasi	Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan, baik yang datang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integritas, keberlangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasionalnya (Lemhanas, RI). Dalam prosesnya, pengukuran ketahanan nasional meliputi 3 dimensi, yaitu dimensi gatra, dimensi wilayah/spasial. Indeks Ketahananan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan merupakan salah satu pengukuran ketahanan nasional berdasarkan gatra. Dimensi gatra adalah pengukuran ketahanan nasional melalui pengukuran ketahanan masing-masing gatra, kemudian diagregasikan menjadi ketahanan nasional. Berdasarkan dimensi ini ketahanan nasional adalah resultante dan agregasi menyeluruh dari ketahanan masing-masing gatra. Setiap gatra dirinci menjadi beberapa aspek, aspek dirinci menjadi beberapa variabel, dan variabel dirinci lagi menjadi beberapa indikator. Secara umum dinamika dari setiap variabel diukur dengan melihat dua indikator penting, yaitu - indikator kebijakan dan - indikator kinerja. Oleh karena itu dalam setiap variabel selalu ada indikator kebijakan dan indikator-indikator kinerja yang merupakan implikasi dari kebijakan tersebut. Setiap indikator dinilai berdasarkan parameter yang terukur. Ketahanan Pertahanan diartikan sebagai kemampuan menjaga stabilitas pertahanan dan keamanan, menjaga kedaulatan

	negara serta mengatasi terjadinya Ancaman Tantangan Hambatan dan Gangguan (ATHG) dari dalam maupun luar. Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan dengan kisaran 1 sampai 5 : • Indeks 1 menunjukkan kondisi rawan; • Indeks 2 menunjukkan kondisi kurang tangguh; • Indeks 3 menunjukkan kondisi cukup tangguh; • Indeks 4 menunjukkan kondisi tangguh; • Indeks 5 menunjukkan kondisi sangat tangguh.
Sumber Data	Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah**
Definisi	Suatu proses pengumpulan dan analisis data secara sistematis terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan menggunakan sistem pengukuran kinerja. (Permendagri No. 18/2020).
Rumus Perhitungan	EPPD = [CKM + CKUP] x 0.75 + [PKM] x 0.25 **Keterangan** : CKM = Capaian Kinerja Makro CKUP = Capaian Kinerja Urusan Pemerintahan PKM = Perubahan Kinerja Makro
Interpretasi	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klasifikasi : 6. Skor kinerja 1,00 – 1,80 dengan status kinerja Sangat Rendah; 7. Skor kinerja 1,81 – 2,60 dengan status kinerja Rendah; 8. Skor kinerja 2,61 – 3,40 dengan status kinerja Sedang; 9. Skor kinerja 3,41 – 4,20 dengan status kinerja Tinggi; 10. Skor kinerja 4,21 – 5,00 dengan status kinerja Sangat Tinggi.
Sumber Data	Kementerian Dalam Negeri
Frekuensi	Satu kali per tahun

4b. Metadata Indikator Kinerja Kunci
Urusan Pendidikan

Nama Indikator	**Persentase satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk :** **a. Literasi membaca** **b. Numerasi**
Definisi	Jumlah satuan pendidikan di daerah X yang memiliki capaian asesmen tingkat nasional mencapai standar 84 kompetensi minimum dibagi jumlah satuan pendidikan di daerah X. Asesmen Nasional adalah ukuran hasil asesmen peserta didik secara nasional untuk aspek literasi membaca dan numerasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Asesmen Nasional diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada tiap satuan pendidikan, Asesmen Nasional akan diikuti oleh sebagian peserta didik kelas V, VIII, dan XI yang dipilih secara acak oleh Kemendikbudristek. Hasil capaian Asesmen Nasional dibagi menjadi empat kategori, yaitu: 1. Perlu intervensi khusus 2. Dasar 3. Cakap 4. Mahir Dikategorikan sudah “mencapai kompetensi minimum” jika paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal “cakap”.

Rumus Perhitungan	$\%\ Satdik\ \min.SKM\ = \frac{\sum_{i=1}^{n} \text{Satdik}\ min.SKM}{n}$ **Keterangan :** Satdik min.SKM = Satuan pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk literasi membaca atau numerasi n = Jumlah satuan pendidikan
Interpretasi	Misal : Persentase Satuan Pendidikan Yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum Pada Asesmen Tingkat Nasional untuk Numerasi (%) tahun 2023 sebesar 44,44%. Artinya, terdapat 44,44 % satuan pendidikan di Kota Sawahlunto yang telah mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (paling sedikit 75% peserta didik pada satuan pendidikan tersebut memiliki level hasil belajar minimal "cakap").
Sumber Data	Asesmen Nasional, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Harapan Lama Sekolah (Tahun)**
Definisi	Lamanya waktu bersekolah yang diharapkan dapat dirasakan oleh anak-anak usia tertentu pada jenjang pendidikan usia tersebut di masa mendatang.
Rumus Perhitungan	$HLS = FK \sum_{i=7}^{k} [\frac{Ei_i}{Pi}]$ **Keterangan :** Pi = Jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas di suatu wilayah pada tahun tertentu Ei = Jumlah penduduk yang berusia 7 tahun ke atas yang masih sekolah di suatu wilayah pada tahun tertentu i = Usia (7, 8, 9,.....,k) FK = Faktor koreksi pesantren
Interpretasi	Angka HLS menunjukkan peluang anak usia 7 tahun ke atas untuk menempuh pendidikan formal pada waktu tertentu. Misal : HLS Kota Sawahlunto pada tahun 2023 sebesar 13,69 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang pendidikan formal di Kota Sawahlunto pada tahun 2023 memiliki peluang untuk bersekolah selama 13,69 tahun atau setara dengan Diploma II.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Rata-Rata Lama Sekolah (tahun)**
Definisi	Rerata waktu (dalam satuan tahun) yang ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal yang pernah dijalani. Rata-rata Lama Sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas (RLS 15+) dihitung dengan cara mengkonversikan ijazah terakhir dan tingkat pendidikan yang sedang dijalani ke dalam satuan tahun dengan tidak memperhitungkan adanya kejadian pengulangan kelas. Ijazah yang dimiliki akan dikonversi ke dalam lama waktu bersekolah (satuan tahun) berdasarkan ketentuan berikut : a. Tidak punya ijazah = 0 tahun b. SD = 6 tahun c. SMP = 9 tahun d. SMA = 12 tahun e. D1/D2 = 14 tahun f. D3 = 15 tahun g. D4 = 16 tahun h. S1 = 17 tahun

	i. S2 = 19 tahun j. S3 = 22 tahun Konversi ijazah ke menjadi lamanya waktu bersekolah memenuhi perhitungan berikut ini : 1. Tidak pernah sekolah = 0 tahun; 2. Masih sekolah di SD sampai dengan S1= konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1; 3. Masih sekolah di S2/S3 = konversi ijazah terakhir + 1; 4. Tidak bersekolah lagi dan tamat kelas terakhir = konversi ijazah terakhir; 5. Tidak bersekolah lagi dan tidak tamat di kelas terakhir = konversi ijazah terakhir + kelas terakhir –1.
Rumus Perhitungan	$RLS\ 15+= \frac{1}{P15+} \sum_{i=l}^{n} Xi$ **Keterangan :** P15+ = Jumlah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas di suatu wilayah Xi = Lama sekolah penduduk ke- i
Interpretasi	**Misal:** RLS Kota Sawahlunto Tahun 2023 = 10,44 tahun, artinya secara rata-rata, penduduk Kota Sawahlunto yang berusia 15 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 10,44 tahun atau telah menamatkan kelas X.
Sumber Data	Susenas, Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Urusan Kesehatan

Nama Indikator	**Usia Harapan Hidup (UHH)(tahun)**
Definisi	Rata-rata jumlah tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada tahun tertentu.
Rumus Perhitungan	Idealnya dihitung berdasarkan Angka Kematian. yang datanya diperoleh dari catatan registrasi kematian secara bertahun-tahun sehingga dimungkinkan dibuat tabel kematian. Namun, karena catatan registrasi tidak tersedia dengan baik, maka dihitung dengan cara tidak langsung dengan paket program *Micro Computer Program for Demographic Analysis* (MCPDA) atau *Mortpack*.
Interpretasi	Semakin tinggi usia harapan hidup di suatu daerah, menandakan semakin baik pula derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut. Ini menunjukkan adanya perbaikan status kesehatan masyarakat, termasuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Keluarga Sehat**
Definisi	IKS adalah alat yang komprehensif untuk menilai kualitas hidup keluarga dengan mengintegrasikan aspek kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan lingkungan.
Rumus Perhitungan	Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes) telah menetapkan 12 Indikator Keluarga Sehat, yaitu : 1. Keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) 2. Ibu melahirkan di fasilitas kesehatan 3. Bayi mendapat imunisasi dasar lengkap 4. Bayi mendapat air susu ibu (ASI) eksklusif 5. Balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan 6. Pengidap TB Paru Mendapatkan Penanganan Sesuai Standar 7. Pengidap Hipertensi Harus Diobati secara Teratur 8. Seseorang dengan Gangguan Jiwa Diobati dan Tidak Ditelantarkan

	9. Anggota Keluarga Tidak Ada yang Merokok 10. Keluarga merupakan anggota Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 11. Keluarga memiliki akses ke sarana air bersih 12. Keluarga memiliki akses atau menggunakan jamban bersih
Interpretasi	Kategori IKS • Keluarga Sehat : IKS > 0,8 (80%) • Keluarga Pra Sehat : IKS 0,5 <-> 0,8 (50% s/d 80%) • Keluarga Tidak Sehat : IKS < 0,5 (50%)
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan KB Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Urusan Pekerjaan Umum

Nama Indikator	**Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**
Defenisi	Nilai indeks yang menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur publik yang disediakan oleh pemerintah, seperti jalan, jembatan, drainase, air bersih, sanitasi, fasilitas transportasi, dan lainnya.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKLI} = \left(\frac{\sum(\text{Nilai Jawaban Responden})}{\text{Jumlah Responden} \times \text{Skor Maksimal}} \right) \times 100$$ **Keterangan:** • Nilai Jawaban Responden: Penilaian tiap responden terhadap pertanyaan terkait layanan infrastruktur, biasanya dengan skala likert (misalnya 1–4 atau 1–5). • Jumlah Responden: Total individu yang mengisi survei. • Skor Maksimal: Nilai tertinggi dalam skala likert (misalnya 4 atau 5). • Hasil IKLI: Disajikan dalam bentuk indeks (0–100) agar mudah dibandingkan antar wilayah atau tahun.
Interpretasi	Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat kepuasan yang lebih baik terhadap layanan infrastruktur
Sumber Data	Survei pengguna, Dinas PUPR, Bappeda, atau lembaga independen
Frekuensi	Tahunan / 2 Tahunan

Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Nama Indikator	**Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian Layak, Terjangkau Dan Berkelanjutan (%)**
Definisi	Maka rumah tangga dengan akses rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan adalah rumah tangga yang menempati rumah layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan. Mengacu pada Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, rumah yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan memenuhi: • Persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuninya, yang mampu dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; • Prasyarat tata ruang, kesesuaian hak atas tanah dan rumah, dan tersedianya prasarana, sarana, dan utilitas umum yang memenuhi persyaratan baku mutu lingkungan. Pengukuran indikator tersebut menggunakan PBG (Persetujuan Bangunan Gedung) dan SLF (Sertifikat Laik Fungsi). Mempertimbangkan variasi penerapan PBG dan SLF di tingkat pemerintah daerah (kabupaten/kota) maka pengukuran indikator ini dapat menggunakan proksi yaitu memenuhi empat kriteria sebagai berikut : • Ketahanan bangunan (durable housing) yaitu bahan bangunan atap, dinding dan lantai rumah memenuhi syarat;

	• Kecukupan luas tempat tinggal (*sufficient living space*) yaitu luas lantai perkapita ≥ 7,2 m^2; • Memiliki akses air minum layak; • Memiliki akses sanitasi layak.
Rumus Perhitungan	• Bagi kabupaten/kota yang telah menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh menggunakan rumus sebagai berikut: $$PHLTB = \frac{JRTHLTB}{JRTx100}$$ PHLTB : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRTHLTB : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRT : Jumlah rumah tangga • Bagi kabupaten/kota yang belum menerapkan PBG dan SLF secara menyeluruh maka dapat menggunakan 108 indikator proksi yaitu 4 kriteria (ketahanan bangunan, kecukupan luas tempat tinggal, memiliki akses air minum layak, dan memiliki akses sanitasi layak). $$PHLTB(proksi) = \frac{JRTHLTB(proksi)}{JRTx100}$$ PHLTB (proksi) : Persentase rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRTHLTB (proksi) : jumlah rumah tangga hunian layak, terjangkau, berkelanjutan JRT : Jumlah rumah tangga Segregasi pengolahan data ini dapat digunakan untuk tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, perkotaanperdesaan, dan desil pengeluaran.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase rumah tangga yang menghuni hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan maka semakin baik kesejahteraan rumah tangga di Indonesia dari sektor perumahan.
Sumber Data	• Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) KOR BPS • Data Kementerian PUPR (untuk mengetahui status pelaksanaan PBG dan SLF di Kabupaten/Kota)
Frekuensi	Tahunan

Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Nama Indikator	**Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas**
Defenisi	Indikator yang menggambarkan kinerja pemerintah dan aparat keamanan dalam menjaga ketertiban umum (trantib), ketentraman masyarakat (bum), dan perlindungan masyarakat (linmas).
Rumus Perhitungan	$$\text{Indeks Penyelenggaraan Trantibumlinmas} = \frac{\sum \text{Skor Kinerja Program Trantibumlinmas}}{\text{Jumlah Program Trantibumlinmas}} \times 100$$ **Keterangan:** • Skor Kinerja Program Trantibumlinmas diukur berdasarkan penilaian terhadap sejumlah faktor, seperti tingkat partisipasi masyarakat dalam program keamanan, efektivitas patroli dan penegakan hukum, serta hasil survei kepuasan publik. • Jumlah Program Trantibumlinmas adalah jumlah program yang dievaluasi dalam pengukuran ini (misalnya program keamanan, kegiatan bimbingan sosial, pengawasan ketertiban umum, dll.)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif pelaksanaan kebijakan dan program yang berkaitan dengan trantibumlinmas
Sumber Data	Dinas Satpol PP, Kepolisian, Bappeda, Dinas Sosial, Polda, Instansi Pemerintah Daerah terkait
Frekuensi	Tahunan

Urusan Sosial

Nama Indikator	Indeks Kesejahteraan Sosial
Defenisi	Indikator komposit yang menggambarkan tingkat kesejahteraan sosial masyarakat berdasarkan beberapa dimensi penting, seperti: pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan sosial, partisipasi sosial, ketahanan keluarga, dan akses terhadap layanan sosial dasar.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKS} = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} X_i$$ **Keterangan:** • **IKS =** Indeks Kesejahteraan Sosial • **$X_1, X_2, \ldots, X_n$ =** Skor masing-masing dimensi kesejahteraan sosial (sudah dinormalisasi dalam skala 0–100) • **n =** Jumlah dimensi indikator
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi tingkat kesejahteraan sosial masyarakat di suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Sosial, BPS, Bappeda, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Kemensos
Frekuensi	Tahunan

Urusan Tenaga Kerja

Nama Indikator	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja
Definisi	Tingkat kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan produk
Rumus Perhitungan	$Tingkat\ Produktivitas\ Tenaga\ Kerja = \frac{PDRB\ ADHK}{Jumlah\ Tenaga\ Kerja}\ x\ 100\ \%$ (Permendagri No. 18/2020)
Interpretasi	4. Sebagai gambaran kemampuan tenaga kerja nasional dan daerah dalam menghasilkan barang dan jasa, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke level yang tinggi. 5. Tingkat produktivitas tenaga kerja merupakan rasio antara jumlah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) ADHK dengan total penduduk yang bekerja. 6. Semakin tinggi nilai aktual Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja semakin baik kualitas pembangunan ketenagakerjaan
Sumber Data	Badan Pusat Statistik
Frekuensi	Tahunan

Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Gender (IPG)
Defenisi	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan terhadap IPM laki-laki, yang digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek dasar pembangunan manusia: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak.
Rumus Perhitungan	$$\text{IPG} = \left(\frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}\right) \times 100$$ Atau jika menggunakan skala desimal: $$\text{IPG} = \frac{\text{IPM Perempuan}}{\text{IPM Laki-laki}}$$ **Keterangan Rumus:** • IPM Perempuan Indeks Pembangunan Manusia untuk penduduk perempuan, dihitung dari: ○ Angka harapan hidup perempuan ○ Rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah perempuan ○ Pengeluaran riil per kapita perempuan • IPM Laki-laki

	• Sama seperti IPM perempuan, namun untuk penduduk laki-laki. • × 100, Untuk menyajikan IPG dalam bentuk persentase (biasa digunakan oleh BPS).
Interpretasi	Semakin mendekati 100 atau 1.000, semakin kecil kesenjangan pembangunan gender
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian PPPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Ketimpangan Gender**
Definisi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) terdiri dari 3 (tiga) dimensi dan 5 (lima) indikator, yaitu dimensi kesehatan reproduksi perempuan yang dibentuk dari indikator proporsi perempuan yang melahirkan hidup tidak di fasilitas kesehatan (MTF) dan proporsi perempuan yang saat melahirkan hidup pertama berumur kurang dari 20 tahun (MHPK20), dimensi pemberdayaan yang dibentuk dari indikator persentase penduduk usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA/sederajat ke atas dan persentase anggota legislatif, serta dimensi pasar tenaga kerja yang diwakili dengan indikator tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) laki-laki dan TPAK perempuan.
Rumus Perhitungan	Langkah-langkah metode penghitungan IKG berikut formula yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Menghitung Indeks Perempuan dan Indeks Laki-laki $G_P = \sqrt[3]{\left(\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}\right)^{\frac{1}{2}} \times \left(PR_P \times SE_P\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_P}$ $G_L = \sqrt[3]{1 \times \left(PR_L \times SE_L\right)^{\frac{1}{2}} \times TPAK_L}$ 2. Menghitung agregasi indeks perempuan dan indeks lakilaki dengan rata-rata harmonic $HARM\left(G_P, G_L\right) = \left[\frac{\left(G_P\right)^{-1} + \left(G_L\right)^{-1}}{2}\right]^{-1}$ 3. Menghitung indeks masing – masing dimensi $IKR = \frac{\left(\sqrt{\frac{0,005}{MTF} \times \frac{0,01}{MHPK20}} + 1\right)}{2}$ $IPK = \frac{TPAK_P + TPAK_L}{2}$ $IP = \frac{\left(\sqrt{PR_P \times SE_P} + \sqrt{PR_L \times SE_L}\right)}{2}$ 4. Menghitung agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric $G_{P,L} = \sqrt[3]{IKR \times IP \times IPK}$ 5. Menghitung Indeks Kesetaraan Gender $Indeks\ Kesetaraan\ Gender = \frac{HARM(G_P, G_L)}{G_{P,L}}$ 6. Menghitung Indeks Ketimpangan Gender $IKG = 1 - \frac{HARM\left(G_P, G_L\right)}{G_{P,L}}$

	Keterangan : G_P : Indeks Perempuan G_L : Indeks Laki-laki MTF : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup tidak di fasilitas Kesehatan MHPK20 : Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun PR_P : Persentase perempuan di legislative PR_L : Persentase laki-laki di legislative SE_P : Persentase perempuan usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas SE_L : Persentase laki-laki usia 25 tahun ke atas dengan pendidikan SMA ke atas $TPAK_P$: Persentase angkatan kerja perempuan terhadap penduduk perempuan usia kerja $TPAK_L$: Persentase angkata kerja laki-laki terhadap penduduk laki-laki usia kerja HARM (G_P, G_L) : Agregasi indeks perempuan dan laki-laki dengan rata-rata harmonic IKR : Indeks dimensi kesehatan reproduksi IP : Indeks dimensi pemberdayaan IPK : Indeks dimensi pasar tenaga kerja G_{PL} : Agregasi indeks dimensi dengan rata-rata geometric IKG : Indeks Ketimpangan Gender
Interpretasi	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) bernilai antara 0 dan 1. Semakin kecil nilainya maka tingkat ketimpangan gender di suatu wilayah akan semakin setara dan sebaliknya.
Sumber Data	Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS, dan Sekretaris Dewan (Sekwan)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Perlindungan Anak**
Definisi	Indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan hak Anak dan perlindungan khusus Anak meliputi hak sipil dan kebebasan, hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, hak pendidikan dan pemanfaatan waktu luang, dan perlindungan khusus.
Rumus Perhitungan	IPA = $\sum$ 5j = 1 (Wj x Indeks Kj) Menghitung angka indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) yang terdiri dari 5 klaster dengan 27 indikator: F. KLASTER HAK SIPIL DAN KEBEBASAN 6. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran 2 7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah mengunjungi perpustakaan/ memanfaatkan taman bacaan masyarakat 8. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang pernah menggunakan internet 9. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang pernah mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar 10. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang ikut serta dalam kegiatan organisasi selain di tempat kerja atau sekolah

	G. KLASTER LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF 5. Persentase perempuan berusia 20-24 tahun yang menikah sebelum berusia 18 tahun 6. Persentase balita yang mendapatkan pengasuhan tidak layak 7. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang tidak tinggal bersama kedua orang tua 8. Angka kesiapan sekolah H. KLASTER KESEHATAN 9. Persentase perempuan pernah kawin berusia 15-49 Tahun yang melahirkan terakhirnya di fasilitas kesehatan dan ditolong oleh tenaga Kesehatan 10. Persentase balita stunting 11. Persentase anak berusia 0-5 bulan yang mendapatkan ASI eksklusif 12. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang konsumsi kalorinya < 1400 kkal 13. Persentase anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak 14. Persentase Anak berusia 0-17 Tahun yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak 15. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang merokok 16. Persentase anak berusia 12-23 Bulan yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap I. KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA 1. 6. Persentase anak berusia 7-17 tahun yang tidak sekolah 7. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengunjungi peninggalan sejarah dan warisan budaya Indonesia 8. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang mengikuti kursus (selain bimbingan belajar) 9. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang masih bersekolah yang pernah mengikuti ekstrakurikuler 10. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang terlibat dalam pertunjukan seni J. KLASTER PERLINDUNGAN KHUSUS 6. Persentase anak berusia 10-17 tahun yang bekerja 7. Rasio anak berusia 5-17 tahun (disabilitas/non disabilitas) yang pernah mengakses internet 8. Rasio Angka Partisipasi Sekolah (APS) anak berusia 7-17 Tahun (disabilitas/non disabilitas) 9. Persentase anak berusia 0-17 tahun yang hidup di bawah garis kemiskinan 10. Persentase anak berusia 5-17 tahun yang telantar II. melakukan normalisasi indikator penyusun Indeks Perlindungan Anak (IPA) III. menghitung Indeks Perlindungan Anak (IPA)
Interpretasi	Semakin tinggi IPA, semakin terpenuhi hak Anak dan perlindungan khusus Anak di daerah tersebut
Sumber Data	BPS dan KemenPPPA
Frekuensi	Tahunan

Urusan Pangan

Nama Indikator	**Indeks Ketahanan Pangan (IKP)**
Defenisi	Indeks Ketahanan Pangan (IKP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat ketahanan pangan suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota) berdasarkan tiga dimensi utama.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKP} = \frac{\sum (\text{Skor Dimensi} \times \text{Bobot Dimensi})}{\sum \text{Bobot}}$$ Atau jika bobot sama rata: $$\text{IKP} = \frac{\text{Skor Ketersediaan} + \text{Skor Akses} + \text{Skor Pemanfaatan}}{3}$$

	Keterangan Rumus: **Tiga Dimensi Utama IKP:** 1. Ketersediaan Pangan o Indikator: Produksi pangan lokal, cadangan pangan, luas panen, distribusi pangan. o Sumber: Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, BPS. 2. Akses Pangan o Indikator: Persentase penduduk miskin, harga pangan, aksesibilitas geografis, infrastruktur distribusi. o Sumber: BPS, Dinas Sosial, Dinas Perhubungan. 3. Pemanfaatan Pangan o Indikator: Angka gizi buruk, stunting, ketersediaan air bersih dan sanitasi, pengetahuan gizi. o Sumber: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, BPS. Setiap dimensi memiliki skor 0–100 berdasarkan normalisasi indikator turunan.
Interpretasi	Nilai IKP semakin tinggi menunjukkan ketahanan pangan yang semakin baik
Sumber Data	Badan Pangan Nasional (Bapanas), BPS, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian
Frekuensi	Tahunan

Urusan Pertanahan

Nama Indikator	**Indeks Tertib Administrasi Pertanahan**
Defenisi	Indikator yang menggambarkan tingkat keteraturan dan kelengkapan administrasi pertanahan dalam suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$$\text{Indeks TAP} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(S_i \times B_i)}{\sum_{i=1}^{n} B_i}\right) \times 100$$ **Keterangan Rumus:** • S_i = Skor dari komponen administrasi pertanahan ke-i (misalnya: jumlah bidang tanah terdaftar, peta bidang digital, data pemilik, data penggunaan tanah, dll.) • B_i = Bobot dari komponen administrasi pertanahan ke-i (berdasarkan pentingnya komponen terhadap keteraturan data pertanahan) • n = Jumlah total komponen yang dinilai • Skor akhir dikalikan 100 untuk menghasilkan indeks dalam skala 0–100
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, maka semakin tertib dan lengkap administrasi pertanahan di wilayah tersebut.
Sumber Data	Kementerian ATR/BPN, Dinas Pertanahan Daerah, Sistem Informasi Pertanahan
Frekuensi	Tahunan atau sesuai pembaruan sistem administrasi pertanahan

Urusan Lingkungan Hidup

Nama Indikator	**Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)**
Definisi	Nilai yang menggambarkan kualitas Lingkungan Hidup dalam suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).
Rumus Perhitungan	$IKLH = (0{,}376\ x\ IKA) + (0{,}405\ x\ IKU) + (0{,}219\ x\ IKTL)$ IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKTL = Indeks Kualitas Tutupan Lahan (Dinas PKP2LH Kota Sawahlunto)
Interpretasi	Kategori Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) : - Sangat Baik : 90 ≤ IKLH ≤ 100 - Baik : 70 ≤ x < 90 - Sedang : 50 ≤ x < 70 - Kurang : 25 ≤ x < 50 - Sangat Kurang : 0 ≤ x < 25

Sumber Data	Data yang dipergunakan dalam perhitungan IKLH berasal dari data pemantauan kualitas lingkungan pada media air, udara dan tutupan lahan, yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Frekuensi	Tahunan

Urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota

Nama Indikator	**Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Administrasi Kependudukan**
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh instansi penyelenggara administrasi kependudukan, seperti pelayanan KTP, KK, akta kelahiran, dan lainnya.
Rumus Perhitungan	$$\text{IKM} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n} (\text{Skor Unsur}_i \times \text{Bobot}_i)}{n} \right) \times 25$$ **Keterangan Rumus:** • Skor Unsur: Nilai persepsi masyarakat terhadap masing-masing unsur pelayanan (biasanya menggunakan skala 1–4 atau 1–5). • Bobot Unsur: Tingkat kepentingan relatif dari setiap unsur layanan (umumnya bobot sama jika tidak ditentukan berbeda). • n: Jumlah unsur pelayanan yang dinilai (umumnya terdiri dari 9 unsur seperti prosedur, waktu pelayanan, biaya, produk, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, penanganan pengaduan, dan kepastian jadwal). • Dikalikan 25 agar hasilnya berada dalam rentang skala 0–100.
Interpretasi	Skor IKM digunakan sebagai dasar pembenahan dan peningkatan kualitas layanan adminduk.
Sumber Data	Survei Kepuasan Masyarakat, Dinas Dukcapil, Laporan Evaluasi Layanan Publik
Frekuensi	Semesteran atau Tahunan

Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Nama Indikator	**Indeks Desa Membangun (IDM)**
Defenisi	IDM digunakan untuk mengukur tingkat kemajuan pembangunan di tingkat desa dan untuk menilai status kemajuan desa berdasarkan tiga dimensi utama : sosial, ekonomi, dan ekologi. Dimensi ini diterjemahkan dalam indikator yang mencakup akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga keberlanjutan lingkungan. Pengukuran pembangunan desa di Indonesia mengalami perubahan signifikan dari Indeks Desa Membangun (IDM) ke Indeks Desa (ID) mulai tahun 2025 berdasarkan Permendesa PDT Nomor 9 Tahun 2024. Perubahan tersebut mencakup : penyederhanaan nama, penghitungan dimensi, penambahan indikator, serta perubahan metode pengumpulan data. Perubahan ini juga menyentuh aspek metodologi, fokus pengukuran, dan implikasi kebijakan pembangunan desa. Indeks Desa (ID) menawarkan pendekatan yang lebih sederhana namun berupaya lebih komprehensif dalam menangkap dinamika pembangunan desa. Dalam pengukuran ID, terdapat enam komponen dimensi yang diukur yaitu: Dimensi Layanan Dasar, Dimensi Sosial, Dimensi Ekonoi, Dimensi Lingkungan, Dimensi Aksesibilitas dan Dimensi Tata Kelola Pemerintahan Desa. Dalam penyusunan Indeks Desa (ID), 6 dimensi dibentuk oleh sejumlah 13 Sub Dimensi dan 48 indikator. Dalam pengukurannya, klasifikasi status kemajuan serta kemandirian desa antara IDM dan ID ditetapkan dengan ambang batas yang berbeda pula.

Nama Indikator	Indeks Desa Membangun (IDM)
Rumus Perhitungan	$$IDM = \frac{\sum \text{Indikator Pembangunan Desa}}{\text{Jumlah Indikator}}$$ **Keterangan Rumus:** • Indikator Pembangunan Desa: Merupakan ukuran atau variabel yang mencakup berbagai aspek pembangunan desa, seperti tingkat kemiskinan, akses terhadap pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan keberlanjutan lingkungan. Setiap indikator diberikan bobot yang mencerminkan pentingnya dalam pembangunan desa. • Jumlah Indikator: Jumlah total indikator atau variabel yang digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan desa. Setiap indikator memiliki skor atau nilai tertentu berdasarkan data yang dihimpun. • Hasil dihitung dalam skala 0 hingga 100, dengan nilai 100 menunjukkan desa yang sepenuhnya maju dalam semua aspek pembangunan yang diukur. Perbedaan klasifikasi status kemajuan dan kemandirian Desa berdasar IDM dan ID **Klasifikasi Status Desa** / **IDM** / **ID** Desa Sangat Tertinggal: IDM < 0,4907; 0% ≤ ID 48,48% Desa Tertinggal: 0,4907 < IDM ≤ 0,5989; 49,49% ≤ ID ≤ 57,38% Desa Berkembang: 0,5989 < IDM ≤ 0,7072; 57,39% ≤ ID ≤ 6934% Desa Maju: 0,7072 < IDM ≤ 0,8155; 69,35% ≤ ID ≤ 79,62 Desa Mandiri: IDM > 0,8155; 79,63% ≤ ID ≤ 100%
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IDM menunjukkan bahwa desa tersebut semakin maju dalam hal pembangunan, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur.
Sumber Data	Data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), dan data terkait lainnya
Frekuensi	Tahunan

Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)
Definisi	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) adalah indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya mewujudkan Keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga Berkualitas adalah Keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. (UU NO.52/2009 dan Peraturan BKKBN Nomor 3 Tahun 2022)
Rumus Perhitungan	Pengukuran iBangga dilakukan oleh BKKBN meliputi dimensi: a. Ketenteraman; b. Kemandirian; dan c. Kebahagiaan. • Dimensi Ketenteraman terdiri atas indikator : a. kegiatan ibadah; b. legalitas Keluarga; c. jaminan kesehatan; d. keharmonisan Keluarga. • Dimensi Kemandirian terdiri atas indikator : a. pemenuhan kebutuhan dasar; b. jaminan keuangan;

	c. keberlangsungan pendidikan; d. kesehatan Keluarga; e. akses media online/daring. • Dimensi Kebahagiaan terdiri atas indikator : a. interaksi Keluarga; b. interaksi sosial.
Interpretasi	Nilai iBangga berkisar antara 0-100 dengan kriteria sebagai berikut : • Nilai iBangga < 40 : kurang baik (rentan) • Nilai iBangga 40 – 70 : cukup baik (berkembang) • Nilai iBangga > 70 : baik (tangguh)
Sumber Data	BKKBN
Frekuensi	Tahunan

Urusan Perhubungan

Nama Indikator	**Rasio Konektivitas**
Definisi	Indeks Rasio Konektivitas adalah ukuran yang menggambarkan tingkat keterhubungan atau aksesibilitas suatu wilayah atau entitas (misalnya rumah tangga, individu, bisnis, atau infrastruktur) terhadap jaringan atau layanan tertentu dibandingkan dengan total populasi atau jumlah entitas yang ada di wilayah tersebut.
Rumus Perhitungan	$\mathbf{JKA} = \text{Jumlah Keluarga di BKB} \cup \text{BKR} \cup \text{BKL} \cup \text{UPPKA} \cup \text{PIK-R}$ Keterangan : Rasio Konektivitas bisa merujuk ke beberapa hal tergantung konteksnya (misalnya: jaringan, infrastruktur, sistem sosial, dll). Tapi secara umum, Rasio Konektivitas mengukur tingkat keterhubungan antar elemen dalam suatu sistem atau jaringan**.**
Interpretasi	Menggambarkan tingkat ketersediaan dan adopsi suatu jaringan atau layanan. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat konektivitas yang lebih baik.Dapat digunakan untuk mengidentifikasi disparitas konektivitas antar wilayah atau kelompok populasi. Penting untuk perencanaan pembangunan infrastruktur dan layanan.
Sumber Data	Survei Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh BPS
Frekuensi	Dilakukan dua kali setahun (semesteran) atau tahunan.

Urusan Wajib Komunikasi dan Informatika

Nama Indikator	**Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah**
Definisi	**Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah** adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat kemajuan dan kapabilitas pemerintah dalam mengadopsi dan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, kualitas layanan publik, dan tata kelola pemerintahan. Indeks ini mencerminkan sejauh mana pemerintah telah bertransformasi secara digital dalam berbagai aspek operasional dan pelayanannya, yang diukur melalui berbagai indikator yang dikelompokkan ke dalam pilar-pilar transformasi digital pemerintah yang telah ditetapkan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Pilar Pemerintah} = \frac{\sum \text{Skor Indikator}}{\text{Jumlah Indikator}} \times 100$ Keterangan : • Skor Indikator: nilai dari masing-masing indikator (biasanya dalam skala 0–1 atau 0–100). • Bobot: persentase atau proporsi pentingnya setiap indikator terhadap keseluruhan indeks. • Jumlah Indikator: total indikator yang digunakan dalam pilar pemerintah (misalnya: digitalisasi layanan publik, keterbukaan data, kapasitas SDM digital, keamanan sistem, dsb).

Interpretasi	Nilai indeks yang lebih tinggi menunjukkan tingkat transformasi digital yang lebih baik pada pilar tersebut. Perbandingan nilai indeks dari waktu ke waktu atau antar unit pemerintahan dapat memberikan wawasan tentang kemajuan dan disparitas.
Sumber Data	Kementerian/Lembaga terkait
Frekuensi	Tahunan

Urusan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Nama Indikator	**Kontribusi UMKM terhadap PDRB**
Definisi	Kontribusi UMKM terhadap PDRB adalah ukuran yang menggambarkan besarnya peran atau sumbangan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam menghasilkan nilai tambah ekonomi suatu wilayah (provinsi atau kabupaten/kota) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini dihitung sebagai persentase nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha yang termasuk dalam kategori UMKM.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi UMKM terhadap PDRB} = \left(\frac{\text{PDRB dari UMKM}}{\text{Total PDRB}}\right) \times 100\%$ Keterangan : • PDRB dari UMKM = total nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh seluruh sektor UMKM di suatu wilayah. • Total PDRB = nilai tambah bruto dari seluruh kegiatan ekonomi di wilayah tersebut (termasuk usaha besar, pemerintah, investasi, dll).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar kontribusi UMKM terhadap perekonomian regional. Indeks ini menunjukkan seberapa penting sektor UMKM dalam menciptakan nilai tambah dan menggerakkan ekonomi wilayah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Tahunan

Urusan Penanaman Modal

Nama Indikator	**Persentase Peningkatan Investasi**
Definisi	**Persentase Peningkatan Investasi** adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Investasi} = \frac{(\text{Nilai Investasi Akhir} - \text{Nilai Investasi Awal})}{\text{Nilai Investasi Awal}} \times 100\%$ Keterangan : • Nilai Investasi Akhir: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu setelah terjadi peningkatan. • Nilai Investasi Awal: Ini adalah nilai investasi pada periode waktu sebelumnya atau nilai investasi mula-mula. • (Nilai Investasi Akhir−Nilai Investasi Awal): Selisih ini menunjukkan besarnya peningkatan nilai investasi. • 100%: Faktor pengali untuk mengubah rasio menjadi bentuk persentase.
Interpretasi	Nilai indeks positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai indeks negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.

Sumber Data	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi/Kabupaten/Kota
Frekuensi	Tahunan

Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**
Definisi	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) adalah indikator komposit yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan pemuda secara holistik di suatu wilayah dalam lima domain utama, yaitu: pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, kesempatan kerja dan kewirausahaan, partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan inklusi. IPP menggambarkan sejauh mana pemuda memiliki akses terhadap sumber daya dan peluang yang mendukung pertumbuhan dan partisipasi aktif mereka dalam pembangunan nasional. IPP disusun dalam skala 0 sampai 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tingkat pembangunan pemuda yang lebih baik.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Domain} = \frac{\text{Skor Indikator 1} + \text{Skor Indikator 2} + \cdots + \text{Skor Indikator ke-n}}{\text{Jumlah Indikator dalam Domain}}$ Keterangan : Metodologi dan rumus pasti dapat bervariasi dari waktu ke waktu dan mungkin tidak dipublikasikan secara detail.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IPP, semakin baik capaian pembangunan pemuda dalam berbagai aspek penting kehidupannya. IPP juga bisa digunakan untuk membandingkan kinerja pembangunan kepemudaan antar daerah atau antar waktu.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Kemendikbudristek
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	**Indeks Partisipasi Olahraga**
Definisi	Indeks Partisipasi Olahraga (IPO) adalah indikator komposit yang menggambarkan tingkat keterlibatan penduduk dalam aktivitas olahraga dan/atau aktivitas fisik secara teratur dalam periode tertentu. IPO mencerminkan perilaku aktif masyarakat terhadap olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat dan produktif. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi efektivitas program peningkatan budaya olahraga di masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Partisipasi} = \frac{\text{Jumlah Individu yang Berolahraga Minimal Frekuensi Tertentu}}{\text{Total Jumlah Populasi atau Sampel}} \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah Individu yang Berolahraga Minimal Frekuensi Tertentu: Ini adalah jumlah orang yang melakukan aktivitas olahraga dengan frekuensi yang ditetapkan (misalnya, minimal 1 kali seminggu, 3 kali seminggu, dll.). • Total Jumlah Populasi atau Sampel: Ini adalah total jumlah orang dalam kelompok yang diukur.
Interpretasi	Dapat digunakan sebagai indikator penunjang kualitas hidup, kesehatan masyarakat, serta keberhasilan program promosi olahraga.
Sumber Data	BPS (Survei Sosial Ekonomi Nasional / Susenas), Kemenpora (Survei SKJ, Survei Partisipasi Olahraga Nasional)
Frekuensi	Setiap 2 Tahun (biennial)

Urusan Statistik

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Statistik (IPS)**
Definisi	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) adalah ukuran komposit yang digunakan untuk menilai tingkat kemajuan pembangunan statistik pada Unit Pengelola Statistik (UPS) di kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya.

	Indeks ini menilai aspek kelembagaan, sumber daya manusia, proses bisnis statistik, serta ketersediaan dan kualitas data statistik yang dikelola oleh UPS.
Rumus Perhitungan	$\text{IPS UPS} = \frac{\sum(SkorKomponen \times BobotKomponen)}{\sum Bobot}$ Keterangan : ❖ **Kelembagaan Statistik (Bobot 25%)** ❖ Ketersediaan Unit Pengelola Data ❖ Penetapan SDM statistik ❖ SOP Pengelolaan Data ❖ **Proses Bisnis Statistik (Bobot 25%)** • Perencanaan dan Pengumpulan Data • Pengolahan dan Penyajian • Diseminasi dan Pemanfaatan Data
Interpretasi	IPS dapat digunakan untuk Mengidentifikasi kelemahan atau gap statistik dalam organisasi. Menyusun roadmap pembangunan statistik sektoral. Meningkatkan koordinasi dan integrasi sistem statistik nasional
Sumber Data	Dokumen pembentukan UPS, regulasi internal, SK penunjukan UPS
Frekuensi	Tahunan

Urusan Persandian

Nama Indikator	**Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik**
Definisi	SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan layanan SPBE. Nilai indeks SPBE merupakan nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan penerapan SPBE secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	Nilai indeks SPBE dihitung berdasarkan penjumlahan dari penghitungan perkalian antara nilai indeks domain dan bobot domain. Rumus penghitungan nilai indeks SPBE dijabarkan sebagai berikut : $\text{Indeks Domain (i)} = \frac{1}{BD}\sum_{j=m}^{n} NAij\ xBAij$ **Keterangan:** NDj = nilai indeks domain ke-j BDj = nilai bobot domain ke j
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

Urusan Kebudayaan

Nama Indikator	**Persentase Pelestarian Cagar Budaya**
Definisi	Persentase pelestarian cagar budaya adalah jumlah cagar budaya (*tangible dan Intangible)* yang dilestarikan dibandingkan dengan jumlah cagar budaya yang terdata. Pelestarian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk : a). melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; b). meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; c). memperkuat kepribadian bangsa; d). meningkatkan

	kesejahteraan rakyat; dan e).mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Pelestarian menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya. Pelestarian Cagar Budaya bertujuan untuk : a). melestarikan warisan budaya bangsa dan warisan umat manusia; b). meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui Cagar Budaya; c). memperkuat kepribadian bangsa; d). meningkatkan kesejahteraan rakyat; dan e).mempromosikan warisan budaya bangsa kepada masyarakat internasional. Cagar budaya menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan. Benda cagar budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia. Bangunan cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap. Struktur cagar budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasarana untuk menampung kebutuhan manusia. Situs cagar budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu. Kawasan cagar budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas. Warisan budaya adalah peninggalan yang merepresentasikan sistem nilai, kepercayaan, tradisi, gaya hidup, dan jejak-jejak suatu kebudayaan yang terus menerus diwariskan dari masa lalu hingga sekarang. Warisan budaya terdiri dari dua jenis, yaitu warisan budaya benda dan warisan budaya tak benda. Warisan budaya benda adalah warisan budaya berupa benda-benda material atau fisik yang dapat dilihat dan juga diraba, seperti candi, keris, batik, dan lain-lain. Warisan Budaya Tak Benda adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia, Warisan budaya takbenda Indonesia terdiri atas: a).tradisi dan ekspresi lisan; b).seni pertunjukan; c).adat-istiadat masyarakat, ritus, dan perayaan-perayaan; d).pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam dan semesta; dan/atau e).keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional.
Rumus Perhitungan	Persentase Pelestarian Cagar Budaya $= \frac{Jumlah\ cagar\ budaya\ yang\ dilestarikan}{Jumlah\ cagar\ budaya\ yang\ terdata} x\ 100\ \%$

Interpretasi	Pelestarian cagar budaya tidak hanya memberikan manfaat budaya tetapi juga dapat berdampak positif pada ekonomi lokal melalui pariwisata. Situs bersejarah yang terawat dengan baik dapat menarik pengunjung dan memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi komunitas setempat.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Urusan Perpustakaan

Nama Indikator	**Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)**
Definisi	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah ukuran komposit yang menggambarkan tingkat pembangunan literasi di masyarakat berdasarkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan fasilitas layanan perpustakaan serta aktivitas literasi di suatu daerah. IPLM dikembangkan untuk menilai kemampuan masyarakat dalam mengakses, memahami, dan menggunakan informasi melalui aktivitas membaca, belajar, dan berpartisipasi dalam kegiatan literasi yang difasilitasi oleh perpustakaan dan lembaga sejenis.
Rumus Perhitungan	$$\text{IPLM} = \frac{\sum_{i=1}^{n} (w_i \times I_i)}{\sum_{i=1}^{n} w_i}$$ Keterangan : • Ii = Skor indikator ke-i pada dimensi pembangunan literasi masyarakat • wi = Bobot indikator ke-i • n = Jumlah indikator yang digunakan dalam penghitungan • IPLM memiliki rentang nilai dari 0 sampai 100, di mana makin tinggi nilai IPLM, makin baik tingkat pembangunan literasi masyarakat di wilayah tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi skor IPLM, semakin baik pembangunan dan pencapaian literasi masyarakat di wilayah tersebut
Sumber Data	Perpustakaan Nasional RI (Perpusnas), Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi/Kabupaten/Kota, BPS, data survei literasi daerah
Frekuensi	Tahunan (1 kali per tahun, disesuaikan dengan pelaporan nasional)

Urusan Kearsipan

Nama Indikator	**Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah**
Definisi	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada Lingkup Pemerintahan Daerah adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menunjukkan tingkat kepatuhan, kualitas, dan efektivitas pengelolaan arsip di lingkungan pemerintahan daerah (provinsi/kabupaten/kota), berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga Kearsipan Nasional (ANRI) atau Lembaga Kearsipan Daerah.
Rumus Perhitungan	Indeks = (Skor Total Hasil Pengawasan Kearsipan / Skor Maksimal) x 100 Keterangan : • Skor Total Hasil Pengawasan: Penjumlahan dari seluruh poin nilai yang diperoleh berdasarkan hasil evaluasi terhadap aspek-aspek pengelolaan arsip (seperti: kebijakan kearsipan,

	SDM, sarana prasarana, pengelolaan arsip aktif-inaktif, pengawasan internal, dll.) • Skor Maksimal: Nilai maksimum yang bisa dicapai (biasanya = 100 poin). • Output: Nilai indeks dalam skala 0–100.
Interpretasi	Semakin tinggi skor, menunjukkan tata kelola kearsipan semakin baik dan sesuai standar nasional kearsipan
Sumber Data	• Laporan Hasil Pengawasan Kearsipan oleh ANRI atau LKD • Formulir Penilaian Mandiri Kearsipan (AMANI/IKM) • Berita Acara Hasil Pengawasan Kearsipan • Dokumentasi Audit Arsip Internal • Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan dalam siklus audit/pengawasan kearsipan per tahun anggaran)

Urusan Kelautan dan Perikanan

Nama Indikator	**Nilai Tukar Pembudidaya Perikanan (NTPi)**
Definisi	Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi) adalah rasio antara indeks harga yang diterima pembudidaya ikan (It) dengan indeks harga yang dibayar pembudidaya ikan (Ib). NTPi digunakan untuk mengukur daya beli atau tingkat kesejahteraan ekonomi pembudidaya ikan, termasuk pembudidaya ikan air tawar, air payau, dan laut. Jika NTPi > 100, artinya pendapatan pembudidaya lebih tinggi dibandingkan pengeluarannya (daya beli naik). Jika NTPi < 100, maka pengeluaran lebih tinggi dari pendapatan (daya beli menurun).
Rumus Perhitungan	$$NTPi = \frac{\text{Indeks Harga yang Diterima Pembudidaya (It)}}{\text{Indeks Harga yang Dibayar Pembudidaya (Ib)}} \times 100$$ Keterangan : • It (Indeks Harga yang Diterima) = Rata-rata harga jual hasil budidaya perikanan (contoh: ikan nila, lele, udang vaname, bandeng, rumput laut). • Ib (Indeks Harga yang Dibayar) = Biaya untuk keperluan konsumsi rumah tangga dan produksi usaha (contoh: pakan, listrik, vitamin, tenaga kerja, pupuk kolam, dll.)
Interpretasi	Nilai > 100 = pendapatan > pengeluaran → kesejahteraan meningkat
Sumber Data	• Survei BPS Nilai Tukar Petani Perikanan • Data harga komoditas budidaya (ikan, udang, kepiting, rumput laut, dll.) • Data harga kebutuhan rumah tangga dan produksi (pakan, listrik, pupuk, dll.) • Laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah • Sistem Informasi KKP atau SIKOMANDAN
Frekuensi	Bulanan oleh BPS (Namun dapat digunakan sebagai nilai rata-rata tahunan untuk laporan daerah)

Urusan Pariwisata

Nama Indikator	**Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum**
Definisi	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, dan Minum adalah persentase kontribusi sektor penyediaan akomodasi dan penyediaan makanan dan minuman terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku di suatu wilayah dalam periode tertentu (biasanya tahunan). Sektor ini mencerminkan aktivitas ekonomi hotel, penginapan, restoran, kafe, rumah makan, warung, dan sejenisnya.
Rumus Perhitungan	$$\text{Rasio PDRB Akomodasi, Makan, dan Minum (\%)} = \frac{\text{PDRB Sektor Akomodasi \& Mamin}}{\text{Total PDRB}} \times 100\%$$ Keterangan :

	• PDRB Sektor Akomodasi & Mamin: Diambil dari sektor "Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum" dalam tabel PDRB menurut lapangan usaha (ADHB). • Total PDRB: Total seluruh sektor PDRB atas dasar harga berlaku. • Data diperoleh dari publikasi BPS provinsi/kabupaten.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar kontribusi sektor pariwisata & kuliner dalam perekonomian daerah
Sumber Data	• Badan Pusat Statistik (BPS) – Publikasi PDRB menurut Lapangan Usaha (ADHB & ADHK) • Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota • Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Dinas Perdagangan/UMKM • Publikasi Statistik Daerah atau Statistik Sektoral
Frekuensi	Tahunan (Umumnya dirilis oleh BPS setiap tahun dalam publikasi PDRB)

Urusan Pertanian

Nama Indikator	**Nilai Tukar Petani (NTP)**
Definisi	Nilai Tukar Petani (NTP) adalah indikator kesejahteraan relatif petani yang mengukur kemampuan tukar (daya beli) hasil produksi pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun dibutuhkan untuk produksi. NTP menunjukkan tingkat keseimbangan antara harga yang diterima petani dan harga yang dibayar petani**.**
Rumus Perhitungan	$$\text{NTP} = \frac{\text{Indeks Harga yang Diterima Petani (It)}}{\text{Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib)}} \times 100$$ Keterangan : • It (Indeks Harga yang Diterima Petani): Indeks yang menggambarkan perubahan rata-rata harga produk pertanian yang dijual petani. • Ib (Indeks Harga yang Dibayar Petani): Indeks yang menggambarkan perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga petani (konsumsi rumah tangga) dan biaya produksi serta penambahan barang modal (input produksi).
Interpretasi	Menunjukkan tingkat kesejahteraan dan daya beli petani terhadap konsumsi dan produksi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS), Dinas Pertanian, survei harga komoditas pertanian dan input produksi
Frekuensi	Bulanan dan tahunan

Urusan Perdagangan

Nama Indikator	**Kontribusi Sektor Perdagangan Terhadap PDRB**
Definisi	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB adalah persentase nilai tambah bruto (gross value added) yang dihasilkan oleh sektor perdagangan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah dalam periode tertentu. Sektor perdagangan meliputi kegiatan perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor.
Rumus Perhitungan	$$\text{Kontribusi Sektor Perdagangan (\%)} = \left(\frac{\text{PDRB Sektor Perdagangan}}{\text{Total PDRB}}\right) \times 100$$ Keterangan : • PDRB Sektor Perdagangan: Nilai PDRB atas dasar harga berlaku (atau konstan) yang berasal dari sektor perdagangan besar dan eceran. • Total PDRB: Jumlah seluruh nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi dalam wilayah tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin besar peran sektor perdagangan dalam membentuk PDRB
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS): Tabel PDRB Menurut Lapangan Usaha
Frekuensi	Tahunan

Urusan Perindustrian

Nama Indikator	Kontribusi Sektor Industri Terhadap PDRB
Definisi	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB adalah persentase nilai tambah bruto (gross value added) dari sektor industri pengolahan terhadap total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada suatu wilayah dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Kontribusi Sektor Industri (\%)} = \left(\frac{\text{PDRB Sektor Industri}}{\text{Total PDRB}}\right) \times 100$ Keterangan : • PDRB Sektor Industri: Nilai tambah bruto yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan. • Total PDRB: Total nilai tambah bruto dari seluruh sektor ekonomi dalam satu wilayah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan sektor industri menjadi pilar utama perekonomian daerah.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Triwulanan, Tahunan

Unsur Sekretariat Daerah

Nama Indikator	Indeks Reformasi Birokrasi
Definisi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) adalah indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur capaian pelaksanaan program reformasi birokrasi pada instansi pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup berbagai aspek perubahan birokrasi menuju tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)} = \frac{\sum(\text{Nilai Komponen x Bobot})}{\text{Total Bobot}}$
Interpretasi	Semakin tinggi skor IRB, menunjukkan reformasi birokrasi berjalan baik dan efektif
Sumber Data	Kementerian PANRB
Frekuensi	Tahunan

Unsur Sekretariat DPRD

Nama Indikator	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD Terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD
Defenisi	Ukuran kuantitatif yang digunakan untuk menilai tingkat kepuasan Anggota Dewan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.
Rumus Perhitungan	$\text{IKM} = \left(\frac{\sum_{i=1}^{n}(\text{Skor Unsur}_i \times \text{Bobot}_i)}{n}\right) \times 25$ **Keterangan Rumus:** • Skor Unsur: Nilai persepsi masyarakat terhadap masing-masing unsur pelayanan (biasanya menggunakan skala 1–4 atau 1–5). • Bobot Unsur: Tingkat kepentingan relatif dari setiap unsur layanan (umumnya bobot sama jika tidak ditentukan berbeda). • n: Jumlah unsur pelayanan yang dinilai (umumnya terdiri dari 9 unsur seperti prosedur, waktu pelayanan, produk, kompetensi petugas, perilaku petugas, sarana prasarana, penanganan pengaduan, dan kepastian jadwal). • Dikalikan 25 agar hasilnya berada dalam rentang skala 0–100.
Interpretasi	Skor Tingkat Kepuasan digunakan sebagai dasar pembenahan dan peningkatan kualitas layanan Sekretariat DPRD.
Sumber Data	Survei Kepuasan Anggota DPRD Kota Sawahlunto
Frekuensi	Semesteran atau Tahunan

Unsur Perencanaan

Nama Indikator	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah
Definisi	Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah adalah ukuran komposit yang menggambarkan kualitas dan konsistensi proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, keterpaduan, partisipatif, serta ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan pembangunan.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah} = \frac{\sum_{i=1}^{n}(Skor_i \times Bobot_i)}{\sum_{i=1}^{n} Bobot_i}$ Keterangan : • Skor i = Nilai dari setiap aspek penilaian (0–100) • Bobot i = Bobot pentingnya aspek tersebut terhadap kualitas perencanaan • Aspek penilaian meliputi, misalnya: ➢ Kelengkapan dokumen ➢ Konsistensi antar dokumen (RPJMD–RKPD–Renja) ➢ Keterpaduan dengan prioritas nasional ➢ Tingkat partisipasi masyarakat ➢ Penggunaan sistem informasi (SIPD) ➢ Ketepatan waktu penyusunan
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas tata kelola perencanaan
Sumber Data	Bappeda (dokumen RPJMD, RKPD, Renja, Renstra)
Frekuensi	Tahunan

Unsur Keuangan

Nama Indikator	Opini BPK atas laporan keuangan
Definisi	Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) adalah pernyataan profesional yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap kewajaran penyajian informasi dalam laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan kriteria akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
Rumus Perhitungan	-
Interpretasi	Semakin tinggi kualitas opini (misal WTP), maka semakin baik pengelolaan keuangan daerah
Sumber Data	Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPD
Frekuensi	Tahunan (setelah LKPD selesai diaudit oleh BPK)

Unsur Kepegawaian

Nama Indikator	Indeks profesionalitas ASN
Definisi	Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran yang menggambarkan tingkat kompetensi, kualifikasi, kinerja, disiplin, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik dari ASN di suatu instansi pemerintah. Indeks ini digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana ASN memenuhi standar profesional dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Profesionalitas ASN} = \frac{\sum(\text{Nilai Kualifikasi} + \text{Nilai Kompetensi} + \text{Nilai Kinerja} + \text{Nilai Disiplin})}{\text{Jumlah ASN}}$
Interpretasi	Semakin tinggi skor, semakin profesional ASN pada instansi tersebut
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)
Frekuensi	Tahunan

Unsur Pendidikan dan Pelatihan

Nama Indikator	Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi
Definisi	Indeks Profesionalitas ASN – Dimensi Kompetensi adalah ukuran kuantitatif yang menggambarkan tingkat kecakapan atau kemampuan ASN dalam menjalankan tugas jabatannya, berdasarkan kesesuaian antara kompetensi yang dimiliki dengan standar kompetensi jabatan.

Rumus Perhitungan	$\text{Indeks Kompetensi ASN} = \left(\frac{\sum \text{ASN yang Kompetensinya Sesuai dengan Jabatannya}}{\text{Jumlah Seluruh ASN yang Dinilai}}\right) \times 100$ Keterangan : • ASN yang Kompetensinya Sesuai: ASN yang memiliki hasil uji kompetensi yang memenuhi standar jabatan sesuai PermenPANRB dan Permen BKN. • Jumlah Seluruh ASN yang Dinilai: ASN yang telah menjalani uji kompetensi sesuai regulasi dalam periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai menunjukkan ASN makin kompeten menjalankan fungsinya
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM)
Frekuensi	Tahunan

Unsur Penelitian dan Pengembangan

Nama Indikator	**Persentase kebijakan berbasis bukti**
Definisi	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti adalah proporsi dokumen kebijakan (peraturan, program, atau kegiatan) yang disusun berdasarkan hasil kajian, data, analisis, atau riset yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, terhadap total jumlah kebijakan yang disusun dalam satu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kebijakan Berbasis Bukti} = \left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti}}{\text{Total Jumlah Kebijakan}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Kebijakan Berbasis Bukti: Dokumen kebijakan (misalnya: RPJMD, RKPD, Renja, Perkada, Perda, Program, atau kegiatan) yang dilengkapi dengan justifikasi berbasis data, kajian akademik, riset, statistik, survei, atau analisis kebijakan. • Total Jumlah Kebijakan: Keseluruhan dokumen kebijakan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah pada periode tertentu (misalnya dalam satu tahun anggaran).
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya menunjukkan semakin kuatnya penerapan prinsip evidence-based policy
Sumber Data	Bappeda (Dokumen RPJMD, RKPD, Renstra, Renja)
Frekuensi	Tahunan

Unsur Pengawasan

Nama Indikator	**Maturitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintahan (SPIP)**
Definisi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan (maturity level) penyelenggaraan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah daerah, yang mencerminkan sejauh mana sistem pengendalian intern diterapkan secara efektif dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai SPIP} = \frac{\text{Jumlah nilai komponen SPIP (dari 5 unsur)}}{\text{Jumlah unsur SPIP (5)}}$ Keterangan : • Jumlah nilai komponen SPIP: Penjumlahan skor dari 5 komponen utama SPIP. • Jumlah unsur SPIP: Tetap 5 unsur (komponen utama sistem pengendalian). • Penilaian dilakukan oleh Inspektorat atau BPKP, bisa melalui self-assessment, review, dan verifikasi lapangan. • Hasil nilai tersebut menjadi rujukan pengukuran maturitas SPIP daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi level maturitas, semakin baik pelaksanaan sistem pengendalian intern
Sumber Data	Laporan Penilaian Maturitas SPIP
Frekuensi	Tahunan

Unsur Pemerintahan Umum

Nama Indikator	Indeks Demokrasi Indonesia
Definisi	• IDI merupakan indeks komposit yang mengukur kualitas demokrasi di Indonesia. IDI diukur sejak tahun 2009 (IDI 2009). Pada tahun 2021 metode pengukuran IDI mengalami perubahan karena terdapat perluasan konsep demokrasi yang digunakan. Pada IDI 2009 s.d 2020 konsep demokrasi hanya dilihat dari ranah politik, sedangkan pada IDI metode baru, demokrasi tidak hanya mencakup ranah politik, tetapi juga mencakup ranah ekonomi dan sosial. Selain itu, metode baru juga menghitung nilai IDI pada tingkat pusat. IDI 2021 merupakan IDI pertama yang dihitung dengan menggunakan metode baru. • IDI metode baru terdiri dari tiga angka indeks: • IDI tingkat provinsi (merupakan agregasi dari nilai 34 provinsi) • IDI tingkat pusat (Kementerian/Lembaga), dan • IDI tingkat nasional (merupakan agregasi dari nilai IDI provinsi dan pusat). • IDI metode baru terdiri atas 3 aspek dan 22 indikator, yaitu: • Aspek Kebebasan (7 indikator); • Aspek Kesetaraan (7 indikator); • Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi (8 indikator).
Metode Perhitungan	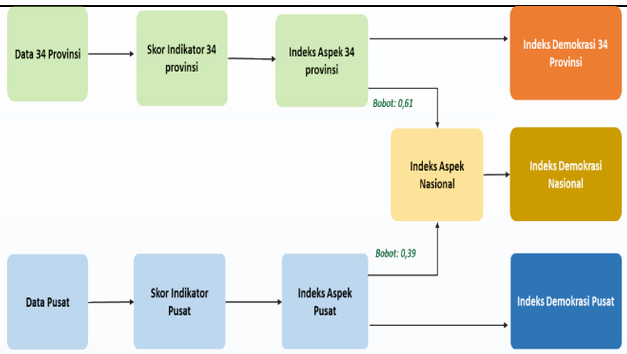 • Metode penghitungan IDI menggunakan triangulasi, yakni mengkombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan memvalidasi (*cross validate*) data yang didapat dengan metode yang lain. • Pendekatan kuantitatif yaitu melalui penelusuran dan analisis isi surat kabar lokal dengan oplah terbesar di provinsi tersebut. Pengumpulan berita juga dilakukan melalui proses *web scrapping* dari berbagai portal online dan reviu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Provinsi (SK Gubernur, Perda, SE, SK DPRD, data pemilih, data pelanggaran pemilu, dan lainnya). Data ini kemudian dikoding. • Pendekatan kualitatif yaitu ketika hasil data kuantitatif divalidasi melalui FGD yang melibatkan para ahli dan narasumber yang relevan. Tujuannya antara lain untuk menggali dan menjaring data kualitatif, mendapatkan informasi tambahan (verifikasi, konfirmasi, atau diskonfirmasi), serta melakukan eksplorasi atas kasus-kasus yang memiliki tingkat relevansi tinggi dengan indikator- indikator IDI. • IDI dihitung secara tertimbang menggunakan skala 0-100. • Bobot pada aspek, variabel, dan indikator diperoleh dengan AHP yang melibatkan juri dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi, pejabat pemerintah, Ormas LSM, serta pers.
Interpretasi	Makin tinggi nilai IDI, makin baik kualitas demokrasi. Ada tiga kategori nilai: Kategori Tinggi (>80) Kategori Sedang (60-80) Kategori Rendah (<60)
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS) RI
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks harmoni indonesia
Definisi	Indeks Harmoni Indonesia (IHI) adalah indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat harmoni atau keharmonisan sosial di tengah masyarakat Indonesia berdasarkan aspek kehidupan beragama, kehidupan sosial, dan kehidupan berbangsa. IHI dikembangkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai alat untuk memetakan dan memantau kondisi kerukunan serta potensi konflik sosial di daerah.
Rumus Perhitungan	`IHI = (NR + NT + NM) / 3 × 25` Keterangan : • NR = Nilai Kehidupan Beragama • NT = Nilai Kehidupan Bermasyarakat (Toleransi Sosial) • NM = Nilai Kehidupan Berbangsa (Kesadaran Kebangsaan)
Interpretasi	Semakin tinggi skor IHI, semakin harmonis kondisi sosial masyarakat
Sumber Data	• Survei Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB) dan IHI oleh Kementerian Agama RI • Badan Pusat Statistik (BPS) – dalam kerja sama survei sosial • Survei Persepsi Masyarakat terhadap toleransi dan interaksi sosial • Laporan Pemerintah Daerah dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan di akhir tahun oleh Kementerian Agama dan BPS)

Indikator Kinerja Outcome Program RPJMD Kota Sawahlunto Tahun 2025-2029

URUSAN PENDIDIKAN

Program Pengelolaan Pendidikan

Nama Indikator	Rata-Rata Kemampuan Literasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)
Defenisi	Nilai rata rata hasil kemampuan literasi siswa SD
Rumus Perhitungan	$\text{Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SD} = \frac{\text{Jumlah Nilai Literasi Siswa SD}}{\text{Jumlah Siswa SD yang Ikut Kompetensi Literasi}}$ Keterangan : • Rata-rata literasi siswa SD : nilai rata-rata literasi siswa SD (dalam angka) • Pembilang : Jumlah nilai literasi Siswa SD • Penyebut : Jumlah siswa SD yang ikut kompetensi literasi
Interpretasi	Semakin tinggi nilai rata rata hasil kemampuan literasi siswa SD, semakin baik kemampuan literasi siswa SD
Sumber Data	Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan (melalui pendataan sektoral)

Nama Indikator	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SD Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)
Defenisi	Nilai rata rata hasil kemampuan numerasi siswa SD
Rumus Perhitungan	$\text{Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SD} = \frac{\text{Jumlah Nilai Numerasi Siswa SD}}{\text{Jumlah Siswa SD yang Ikut Kompetensi Numerasi}}$ Keterangan: • Rata-rata numerasi siswa SD : nilai rata-rata numerasi siswa SD (dalam angka) • Pembilang : Jumlah nilai numerasi Siswa SD • Penyebut : Jumlah siswa SD yang ikut kompetensi numerasi
Interpretasi	Semakin tinggi nilai rata rata hasil kemampuan numerasi siswa SD, semakin baik kemampuan numerasi siswa SD
Sumber Data	Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan (melalui pendataan sektoral)

Nama Indikator	Rata-Rata Kemampuan Literasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)
Defenisi	Nilai rata rata hasil kemampuan literasi siswa SMP
Rumus Perhitungan	$\text{Rata-Rata Kemampuan Literasi Siswa SMP} = \frac{\text{Jumlah Nilai Literasi Siswa SMP}}{\text{Jumlah Siswa SMP yang Ikut Kompetensi Literasi}}$ Keterangan: • Rata-rata literasi siswa SMP : nilai rata-rata literasi siswa SMP (dalam angka) • Pembilang : Jumlah nilai literasi Siswa SMP • Penyebut : Jumlah siswa SMP yang ikut kompetensi literasi
Interpretasi	Semakin tinggi nilai rata rata hasil kemampuan literasi siswa SMP, semakin baik kemampuan literasi siswa SMP
Sumber Data	Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan (melalui pendataan sektoral)

Nama Indikator	Rata-Rata Kemampuan Numerasi SMP Berdasarkan Asesmen Nasional (Nilai)
Defenisi	Nilai rata rata hasil kemampuan numerasi siswa SMP
Rumus Perhitungan	$\text{Rata-Rata Kemampuan Numerasi Siswa SMP} = \frac{\text{Jumlah Nilai Numerasi Siswa SMP}}{\text{Jumlah Siswa SMP yang Ikut Kompetensi Numerasi}}$ Keterangan: • Rata-rata numerasi siswa SMP : nilai rata-rata numerasi siswa SMP (dalam angka) • Pembilang : Jumlah nilai numerasi Siswa SMP • Penyebut : Jumlah siswa SMP yang ikut kompetensi numerasi
Interpretasi	Semakin tinggi nilai rata rata hasil kemampuan numerasi siswa SMP, semakin baik kemampuan numerasi siswa SMP
Sumber Data	Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan (melalui pendataan sektoral)

Nama Indikator	Persentase Anak Putus Sekolah (APS) yang Melanjutkan Pendidikan ke Pendidikan Non Formal (NF)
Defenisi	Persentase anak yang melanjutkan pendidikan ke Pendidikan NF dibagi dengan jumlah seluruh anak putus sekolah x 100 %
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase APS yang melanjutkan Pendidikan NF} = \frac{\text{Jumlah APS yang melanjutkan Pendidikan NF}}{\text{Jumlah Total APS}} \times 100\%$ Keterangan: • % APS yg melanjutkan ke Pendidikan NF (dalam persen) • Pembilang : Jumlah APS yang melanjutkan Pendidikan ke Pendidikan Non Formal • Penyebut : Jumlah seluruh APS
Interpretasi	Semakin tinggi % APS yang melanjutkan pendidikan ke Pendidikan NF, semakin besar peningkatan nilai Rata-rata Lama Sekolah (RLS)
Sumber Data	Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan (melalui Survei atau pendataan sektoral)

Nama Indikator	Persentase Lulusan SD yang Hafal Al-Qur''an Juz 30
Defenisi	Persentase Lulusan SD yang hafal juz 30 dibagi dengan jumlah seluruh anak SD yang lulus x 100 %
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Lulusan SD yang Hafal Al-Qur''an Juz 30} = \frac{\text{Jumlah Lulusan SD yang Hafal Al-Qur''an Juz 30}}{\text{Jumlah Seluruh Anak SD yang Lulus}} \times 100\%$ Keterangan: • % anak lulusan SD yang hafal juz 30 (dalam persen) • Pembilang : Jumlah Lulusan SD yang hafal juz 30 • Penyebut : Jumlah seluruh anak SD yang lulus
Interpretasi	Semakin tinggi % anak lulusan SD yang hafal juz 30 , semakin besar jumlah anak lulusan SD yang hafal Alquran juz 30
Sumber Data	Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan (melalui Survei atau pendataan sektoral)

Program Pengembangan Kurikulum

Nama Indikator	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal
Defenisi	Proporsi satuan pendidikan (sekolah) yang telah menyusun dan menerapkan kurikulum muatan lokal dalam kegiatan pembelajaran terhadap total seluruh satuan pendidikan yang ada pada wilayah atau jenjang tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase KML} = \left(\frac{\text{Jumlah satuan pendidikan yang mengembangkan kurikulum muatan lokal}}{\text{Jumlah total satuan pendidikan}}\right) \times 100\%$ Keterangan: • Persentase KML: Persentase sekolah yang mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal • Pembilang: Jumlah satuan pendidikan yang secara resmi mengembangkan dan menerapkan kurikulum muatan lokal • Penyebut: Jumlah seluruh satuan pendidikan yang terdaftar di wilayah analisis
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak sekolah yang mengadopsi dan mengembangkan kekhasan lokal dalam kurikulum
Sumber Data	Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

Program Pendidik dan Tenaga Pendidikan

Nama Indikator	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik
Defenisi	Proporsi guru yang telah memiliki sertifikat pendidik (serdik) sebagai bukti profesionalisme dalam menjalankan tugas keprofesiannya, terhadap seluruh jumlah guru yang aktif mengajar di satuan pendidikan tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Guru Bersertifikat} = \left(\frac{\text{Jumlah Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik}}{\text{Jumlah Total Guru}}\right) \times 100\%$ Keterangan: • Pembilang: Jumlah guru yang telah memiliki sertifikat pendidik resmi (PPG/sertifikasi sebelumnya) • Penyebut: Jumlah seluruh guru aktif yang terdaftar di satuan pendidikan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak guru yang memenuhi standar profesional dalam mengajar.
Sumber Data	Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

Program Pengendalian Perizinan Pendidikan

Nama Indikator	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan (Diperbarui)
Defenisi	Proporsi dari jumlah permohonan izin operasional satuan pendidikan (baik baru maupun pembaruan) yang telah diterbitkan atau diperbarui secara resmi oleh instansi berwenang, terhadap total jumlah usulan izin yang diajukan dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan (Diperbarui)} = \frac{\text{Jumlah Usulan Izin yang telah Diterbitkan (Diperbarui)}}{\text{Jumlah Total Usulan Izin}} \times 100\ \%$

Nama Indikator	Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan (Diperbarui)
	Keterangan: • Pembilang : Jumlah izin satuan pendidikan (baru atau perpanjangan) yang telah selesai diproses dan diterbitkan dalam periode waktu tertentu. • Penyebut : Total usulan izin yang masuk ke sistem/perizinan dalam periode waktu yang sama.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi penyelesaian dan legalisasi izin satuan pendidikan
Sumber Data	Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan

Program Pengembangan Bahasa dan Sastra

Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra

Nama Indikator	Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra
Defenisi	Proporsi satuan pendidikan, lembaga, atau komunitas yang secara aktif melakukan kegiatan pelestarian, pembinaan, atau pengembangan bahasa dan sastra (terutama bahasa daerah atau bahasa Indonesia) terhadap total jumlah satuan yang menjadi target dalam wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra} = \frac{\text{Jumlah satuan pendidikan/lembaga/komunitas yang menyelenggarakan kegiatan pengembangan bahasa dan/atau sastra}}{\text{Jumlah total satuan pendidikan/lembaga yang menjadi sasaran atau populasi dalam wilayah}} \times 100\ \%$ Keterangan: • Pembilang: Jumlah satuan pendidikan/lembaga/ komunitas yang menyelenggarakan minimal 1 kegiatan pengembangan bahasa dan/atau sastra dalam periode tertentu. • Penyebut: Jumlah total satuan pendidikan/lembaga yang menjadi sasaran atau populasi dalam wilayah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin aktif pelaksanaan kegiatan pengembangan bahasa dan sastra di suatu wilayah
Sumber Data	Dinas Pendidikan
Frekuensi	Tahunan / Semesteran

URUSAN KESEHATAN

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Nama Indikator	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (*Treatment Success Rate) (%)*
Definisi	Persentase pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan lengkap.
Rumus Perhitungan	Jumlah pasien tuberkulosis yang sembuh dan menyelesaikan pengobatan dibandingkan dengan semua kasus tuberkulosis yang diobati dan dilaporkan.

Interpretasi	Ini adalah indikator penting dalam evaluasi pengobatan tuberkulosis dan merupakan penjumlahan dari angka kesembuhan dan angka pengobatan lengkap. Angka ini dapat memberikan gambaran tentang efektivitas program pengobatan tuberkulosis di suatu wilayah.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Angka Kematian Ibu (per 100.000 kelahiran hidup)
Definisi	Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya perempuan yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan, bunuh diri atau kasus insidentil) selama kehamilan, melahirkan, dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup.
Rumus Perhitungan	$\text{Angka Kematian Ibu} = \frac{\text{Jumlah kematian ibu yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas atau estimasi pada waktu tertentu}}{\text{Jumlah Kelahiran Hidup}} \times 100.000$
Interpretasi	Indikator Angka Kematian Ibu (AKI) adalah ukuran yang digunakan untuk memantau jumlah kematian ibu yang terjadi sebagai akibat langsung dari komplikasi kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Angka Kematian Ibu (AKI) yang rendah di suatu wilayah mencerminkan beberapa hal penting : 6. Kualitas Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah biasanya mencerminkan kualitas pelayanan kesehatan yang baik, termasuk pelayanan kesehatan ibu dan anak, pelayanan antenatal, persalinan, dan pascapersalinan. 7. Akses Pelayanan Kesehatan: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan akses yang baik ke pelayanan kesehatan. Ini bisa berarti bahwa fasilitas kesehatan mudah dijangkau dan terjangkau oleh masyarakat. 8. Pendidikan Kesehatan: AKI yang rendah bisa mencerminkan tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang kesehatan reproduksi dan pentingnya pelayanan kesehatan selama kehamilan dan persalinan. 9. Status Gizi: AKI yang rendah juga bisamencerminkan status gizi ibu yang baik. Gizi yang baik selama kehamilan sangat penting untuk mencegah komplikasi yang bisa mengancam nyawa ibu. 10. Kesadaran Masyarakat: AKI yang rendah juga bisa mencerminkan tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan kesehatan selama kehamilan dan persalinan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB
Frekuensi	Tahunan

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan
Defenisi	Proporsi tenaga kesehatan (SDM Kesehatan) yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, seperti pelatihan, workshop, seminar, kursus, atau pendidikan lanjutan yang relevan dengan profesinya dalam periode waktu tertentu, dibandingkan dengan jumlah total SDM Kesehatan yang ada.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Kompetensi} = \left(\frac{\text{Jumlah SDM Kesehatan yang Meningkatkan Kompetensi}}{\text{Jumlah Total SDM Kesehatan}}\right) \times 100\%$ Keterangan: • Pembilang : Jumlah SDM Kesehatan yang mengikuti pelatihan atau pengembangan kompetensi dalam periode tertentu (misalnya setahun). • Penyebut : Jumlah total SDM Kesehatan di wilayah atau instansi terkait. • Dikalikan 100% agar hasil dalam bentuk persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin banyak SDM Kesehatan yang ditingkatkan kapasitas dan kompetensinya
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB
Frekuensi	Tahunan

Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minumar

Nama Indikator	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Defenisi	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang memiliki ketersediaan dan keterjangkauan sediaan farmasi, alat kesehatan (alkes), serta makanan dan minuman yang aman dan layak konsumsi, sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM) atau regulasi yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Cakupan Sediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman} = \frac{\text{Jumlah Fasilitas (Unit) yang Memenuhi Ketersediaan dan Standar}}{\text{Jumlah Total Fasilitas (Unit)}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai cakupan, semakin tinggi ketersediaan Farmasi Alat Kesehatan dan Makanan Minuman
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB
Frekuensi	Tahunan

Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan

Nama Indikator	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan
Defenisi	Proporsi anggota masyarakat yang terlibat aktif dalam upaya peningkatan derajat kesehatan melalui program pemberdayaan, seperti kader kesehatan, posyandu, kelompok sadar gizi, dan komunitas sehat, dibandingkan dengan jumlah total masyarakat sasaran dalam suatu wilayah.

Nama Indikator	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan
Rumus Perhitungan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan = (Jumlah individu yang aktif menjadi kader kesehatan atau tergabung dalam kegiatan/program kesehatan berbasis masyarakat) / (Total penduduk sasaran di wilayah tersebut (misal: jumlah penduduk usia dewasa, atau seluruh penduduk desa/kelurahan)) x 100 %
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak masyarakat yang berperan aktif dalam pembangunan kesehatan
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB
Frekuensi	Tahunan

URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Program Pengelolaan Sumber Daya Air

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir
Defenisi	Proporsi peningkatan jumlah kawasan permukiman rawan banjir yang telah mendapatkan intervensi perlindungan (baik struktural maupun non-struktural), dibandingkan dengan total kawasan rawan banjir yang ada dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir = (Jumlah kawasan rawan banjir yang mendapatkan perlindungan tambahan atau intervensi baru pada periode berjalan) / (Total kawasan permukiman rawan banjir berdasarkan data pemetaan atau dokumen resmi pemerintah) x 100 %
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak kawasan rawan banjir yang terlindungi dengan baik
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Luas Layanan Irigasi Mutikomoditas
Defenisi	Proporsi luas wilayah pertanian yang memperoleh layanan irigasi dan dapat digunakan untuk menanam lebih dari satu jenis komoditas pertanian (multikomoditas), dibandingkan dengan total luas lahan irigasi yang tersedia.
Rumus Perhitungan	Persentase Luas Layanan Irigasi Mutikomoditas = (Total luas lahan pertanian yang mendapatkan layanan irigasi dan digunakan untuk menanam lebih dari satu jenis komoditas) / (Total luas lahan yang terlayani sistem irigasi (baik teknis maupun non-teknis) dalam wilayah tersebut) x 100 %
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar cakupan layanan irigasi yang mendukung diversifikasi komoditas
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Air Minum Jaringan Perpipaan
Definisi	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan adalah rumah tangga di perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum melalui jaringan perpipaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut : 1) Rumah tangga menggunakan sumber air minum jaringan perpipaan; 2) Lokasi sumber air minum berada di dalam atau di halam rumah (on premises); 3) Tersedia setiap saat dibutuhkan; dan 4) Memenuhi syarat kualitas air minum sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 2 Tahun 2023. Air minum perpipaan adalah air minum yang berasal dari ledeng (PDAM) atau rumah tangga yang memakai air minum galon/air isi ulang tetapi air mandinya berasal dari ledeng (PDAM).
Rumus Perhitungan	$\text{PASMPP} = \frac{JRTASMPP}{JRT} x\ 100\ \%$ Keterangan : PASMPP = Persentase rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan JRTASMPP = Jumlah rumah tangga perkotaan yang memiliki akses terhadap air siap minum perpipaan JRT = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur capaian target RPJMD yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah

Nama Indikator	Persentase Rumah Tangga Dengan Akses Sanitasi Aman
Definisi	Akses Aman adalah apabila rumah tangga memiliki fasilitas sanitasi sendiri, dengan bangunan atas dilengkapi kloset dengan leher angsa, dan bangunan bawahnya menggunakan tangki septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT), atau tersambung ke sistem pengolahan air limbah domestik terpusat (SPALD-T)
Rumus Perhitungan	$\text{PSA} = \frac{JRTSPAL + JRTIPLT}{JRTS} x\ 100\ \%$

	Keterangan : PSA = Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses sanitasi aman JRTSPAL = Jumlah rumah tangga yang memiliki akses terhadap SPALD-T JRTIPLT = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap tangka septik yang disedot setidaknya sekali dalam 5 (lima) tahun terakhir dan diolah dalam instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT) JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mendapatkan data akses sanitasi aman sebagai pemenuhan layanan dasar bagi masyarakat. Akses terhadap sanitasi yang aman serta sanitasi sangat penting bagi kesehatan, kesejahteraan dan produktivitas dan diakui sebagai hak asasi manusia. Sebagian 133 besar penyakit menular disebabkan oleh bakteri atau virusyang ditularkan baik melalui udara, melalui permukaan atau makanan, atau melalui kotoran manusia. Untuk itu persentase rumah tangga yang menggunakan layanan sanitasi yang dikelola secara aman dinilai penting untuk melihat terpenuhinya layanan sanitasi dan kebersihan dasar dari masyarakat
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase

Nama Indikator	Persentase Cakupan Drainase Dalam Kondisi Baik
Defenisi	Ukuran proporsi Drainase di kawasan permukiman yang berfungsi dengan baik dibandingkan dengan Total Drainase yang tersedia di wilayah permukiman.

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Drainase Dalam Kondisi Baik} = \frac{\text{Panjang Drainase Dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Panjang Drainase yang Ada}} \times 100\%$
	Keterangan :
	• Drainase mencakup :
	  ○ Drainase Permukiman
	  ○ Drainase Lingkungan
	  ○ Drainase Perkotaan/Perdesaan
	• Kondisi Baik artinya berfungsi optimal, memenuhi standar teknis, tidak rusak sedang/berat
	• Dapat dinilai per komponen atau total secara agregat

Interpretasi	Semakin panjang (banyak) drainase yang dipelihara, semakin besar proporsi drainase dalam kondisi baik
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

Program Penataan Bangunan Gedung

Nama Indikator	Persentase Bangunan Gedung Dalam Kondisi Baik
Defenisi	Ukuran proporsi jumlah bangunan gedung milik pemerintah atau publik (seperti sekolah, kantor, puskesmas, dan fasilitas umum lainnya) yang secara struktural dan fungsional berada dalam kondisi layak, aman, dan berfungsi optimal, dibandingkan dengan total bangunan yang ada.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Gedung dalam Kondisi Baik} = \left(\frac{\text{Jumlah Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik}}{\text{Total Bangunan Gedung}}\right) \times 100\%$ Keterangan: • Kondisi Baik meliputi : ○ Struktur bangunan utuh (tidak retak, roboh, atau rusak berat) ○ Atap, lantai, dinding, dan pondasi berfungsi baik ○ Terpenuhi standar kenyamanan, keamanan, dan keselamatan • Data dapat dibagi per jenis gedung: sekolah, puskesmas, kantor, balai desa, dll.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak bangunan Asset yang masih dalam kondisi fisik yang baik
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya

Nama Indikator	Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi kawasan atau unit bangunan yang telah mengalami penataan fisik dan fungsional, termasuk peningkatan kualitas bangunan gedung serta penataan elemen lingkungan sekitarnya, seperti aksesibilitas, penghijauan, drainase, pencahayaan, dan sirkulasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan} = \frac{\text{Jumlah Unit/Luas Kawasan yang Telah Ditata}}{\text{Jumlah Unit/Luas Kawasan yang Direncanakan untuk Ditata}} \times 100\ \%$ Keterangan: • Penataan Bangunan : mencakup perbaikan fasad, struktur, utilitas bangunan, dan fungsi bangunan. • Penataan Lingkungan : mencakup pedestrian, drainase, RTH, pencahayaan, akses jalan, tata ruang, penghijauan. • Satuan dapat berupa : ○ Jumlah unit bangunan (jika penataan bersifat individual) ○ Luas kawasan (jika penataan bersifat kawasan/lingkungan)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas atau banyak bangunan dan lingkungan yang tertata dan berkualitas baik
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

Program Penyelenggaraan Jalan

Nama Indikator	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota
Defenisi	Indikator yang menunjukkan persentase panjang jalan dalam kondisi mantap (baik dan sedang) terhadap total panjang jalan yang menjadi tanggung jawab pemerintah (nasional, provinsi, atau kabupaten/kota). Jalan dalam kondisi mantap adalah jalan yang memenuhi kriteria layak fungsi pelayanan, dari segi struktur, permukaan, dan keselamatan lalu lintas.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Kemantapan Jalan (\%)} = \left(\frac{\text{Panjang Jalan dalam Kondisi Mantap (Baik + Sedang)}}{\text{Total Panjang Jalan}}\right) \times 100\%$ Keterangan: • Kondisi Jalan Mantap: jalan dengan kondisi baik atau sedang, sesuai standar teknis Direktorat Jenderal Bina Marga. • Kondisi Tidak Mantap: jalan dalam kondisi rusak ringan atau rusak berat. • Data kondisi jalan diperoleh dari survei visual jalan (SVJ) atau sistem pemantauan jalan elektronik (e-monitoring).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak jalan yang dalam kondisi baik dan siap mendukung mobilitas
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

Program Pengembangan Jasa Konstruksi

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja Kontruksi Kualifikasi Ahli
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi tenaga kerja konstruksi yang telah memiliki sertifikasi kualifikasi sebagai tenaga ahli (minimal setara SKA – Sertifikat Keahlian) dari total tenaga kerja konstruksi yang terlibat dalam kegiatan pembangunan infrastruktur.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tenaga Ahli Konstruksi} = \left(\frac{\text{Jumlah Tenaga Konstruksi Berkualifikasi Ahli}}{\text{Total Tenaga Keria Konstruksi}}\right) \times 100\%$ Keterangan: • Tenaga Ahli Konstruksi: mereka yang telah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) sesuai klasifikasi LPJK (misalnya ahli madya, ahli muda, ahli utama). • Tenaga Kerja Konstruksi: semua pekerja yang terlibat langsung dalam kegiatan konstruksi (baik ahli maupun terampil). • Dapat dikelompokkan berdasarkan bidang (sipil, arsitektur, ME, dsb).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan profesionalitas tinggi
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

Program Penyelenggaraan Penataan Ruang

Nama Indikator	Persentase Pembangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang (RTRW/RDTR)
Defenisi	Pembangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang (RTRW/RDTR) berarti pelaksanaan aktivitas pembangunan yang selaras, terpadu dan seimbang dengan kebijakan dan aturan pemanfaatan ruang yang

Nama Indikator	Persentase Pembangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang (RTRW/RDTR)
	telah ditetapkan dalam dokumen RTRW dan RDTR. Ini mencakup pembangunan yang mematuhi peraturan zonasi, mempertimbangkan aspek lingkungan, ekonomi. Dan social, serta bertujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan demi generasi sekarang dan mendatang
Rumus Perhitungan	Persentase Pembangunan Sesuai Dengan Rencana Tata Ruang (RTRW/RDTR) = $\frac{\text{Jumlah Pembangunan yang Sesuai Tata Ruang}}{\text{Jumlah Bangunan}}$ x 100 %
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin selaras, semakin terpadu dan semakin seimbang pelaksanaan aktivitas pembangunan dengan kebijakan dan aturan pemanfaatan ruang
Sumber Data	Dinas PUPR
Frekuensi	Tahunan

URUSAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Program Pengembangan Perumahan

Nama Indikator	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni
Defenisi	Indikator yang menggambarkan proporsi korban bencana (alam atau non-alam) yang telah mendapatkan fasilitas hunian layak huni melalui program rehabilitasi dan rekonstruksi, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pihak lain (CSR, NGO, dll), dibandingkan dengan jumlah total korban bencana yang memerlukan hunian pengganti.
Rumus Perhitungan	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni = $\frac{\text{Jumlah KK Korban Bencana yang Mendapat Rumah Layak Huni}}{\text{Total KK Korban Bencana yang Kehilangan Rumah}}$ x 100 % Keterangan: • Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi standar teknis minimum kelayakan (struktur aman, memiliki sanitasi, ventilasi, air bersih, dan sesuai kaidah kesehatan). • Data penerima bisa diperoleh dari SK korban terdampak, DTKS darurat, atau verifikasi lapangan. • Termasuk rumah tetap (huntap), rumah sementara (huntara) yang memenuhi standar kelayakan tertentu, atau bantuan perbaikan rumah rusak berat.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak korban bencana yang telah terpenuhi hak tempat tinggal layaknya
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan / per kejadian bencana

Nama Indikator	Persentase Hunian Rusunawa yang Dihuni MBR
Defenisi	Persentase unit hunian rumah susun sewa (rusunawa) yang dihuni oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) terhadap total unit Rusunawa yang tersedia atau terisi pada periode tertentu.

Nama Indikator	Persentase Hunian Rusunawa yang Dihuni MBR
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Hunian Rusunawa yang Dihuni MBR} = \frac{\text{Jumlah Unit Rusunawa yang Dihuni oleh MBR}}{\text{Jumlah Total Unit Rusunawa yang Tersedia}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin tepat sasaran program tersebut
Sumber Data	UPTD Rusunawa
Frekuensi	Tahunan

Program Kawasan Permukiman

Nama Indikator	Persentase Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani
Defenisi	Persentase dari luas kumuh <10ha yang sudah ditangani terhadap total kumuh <10 ha yang telah ditetapkan (SK Wali Kota Sawahlunto tahun 2025)
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kawasan Kumuh Dibawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang Ditangani} = \frac{\text{Luas Kawasan Kumuh <10 Ha yang Ditangani}}{\text{Total Luas Kawasan Kumuh <10 Ha}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Persentase Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha dikab/kota yang ditangani menunjukkan sejauh mana upaya pemerintah daerah dalam menangani kawasan permukiman kumuh <10 ha
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh

Nama Indikator	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Kumuh yang Ditangani
Defenisi	Proporsi luas kawasan permukiman rawan Kumuh yang telah ditangani melalui program atau kegiatan peningkatan kualitas permukiman terhadap total luas kawasan rawan Kumuh teridentifikasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Luas Permukiman Rawan Kumuh yang Ditangani} = \frac{\text{Luas Kawasan Rawan Kumuh yang ditangani}}{\text{Total Luas Kawasan Rawan Kumuh}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya,maka semakin banyak kawasan kumuh yang berhasil ditangani, yang mencerminkan keberhasilan program pemerintah dalam meningkatkan kualitas permukiman
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Peningkatan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Nama Indikator	Konsumsi Listrik Per Kapita (Kwh)
Definisi	Konsumsi Listrik per kapita (Kwh/Kapita) adalah pemakaian tenaga listrik dibagi jumlah penduduk pada suatu wilayah dalam periode satu tahun. Pemakaian tenaga listrik tersebut merupakan jumlah kWh (kilo Watt hours) energi listrik yang

	digunakan secara langsung ataupun tidak langsung dari sumber energi.
Rumus Perhitungan	$\text{Konsumsi Listrik per Kapita} = \frac{\text{Total Konsumsi Listrik yang Disalurkan oleh PT. PLN + Total Konsumsi Listrik yang Disalurkan oleh Non PT. PLN}}{\text{Jumlah Penduduk}}$ Catatan : Jumlah pemakaian tenaga listrik adalah total penjualan listrik PT. PLN dan non PT. PLN yang disalurkan ke pelanggan. Perhitungan indikator masih difokuskan pada wilayah usaha PT. PLN.
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengetahui kualitas pemenuhan kebutuhan listrik dan rata-rata konsumsi listrik per kapita yang didukung oleh pengelolaan ketenagalistrikan guna mencapai keberhasilan pembangunan nasional.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi kawasan permukiman (baik formal maupun non-formal) yang telah memiliki kelengkapan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) sesuai standar teknis, dibandingkan dengan total kawasan permukiman yang ada.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU} = \frac{\text{Jumlah Kawasan Permukiman yang Memiliki PSU Lengkap}}{\text{Total Kawasan Permukimant}} \times 100\ \%$ Keterangan: • PSU dikatakan lengkap jika minimal 80% komponen utama PSU tersedia dan berfungsi. • Data kawasan permukiman bisa merujuk pada wilayah hasil pendataan RTRW/RDTR atau SK pengembangan kawasan permukiman. • Indikator dapat digunakan untuk evaluasi permukiman formal (perumahan developer) dan informal (swadaya).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak permukiman yang telah memiliki fasilitas dasar yang memadai
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

URUSAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

Nama Indikator	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan
Defenisi	Indikator yang mengukur tingkat implementasi dan penegakan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) oleh pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan} = \frac{\text{Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan}}{\text{Jumlah Total Perda dan Perkada yang Ada}} \times 100\ \%$ Keterangan: • Perda : Peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (Provinsi, Kabupaten/Kota) yang harus ditaati oleh masyarakat dalam ruang lingkup daerah tersebut. • Perkada : Peraturan yang diterbitkan oleh kepala daerah (Gubernur, Bupati, atau Wali Kota) yang berfungsi untuk mendukung pelaksanaan Perda dan mengatur hal-hal teknis yang lebih rinci. • Penegakan : Mengacu pada tindakan administratif, sanksi hukum, atau langkah-langkah preventif yang dilakukan oleh aparat yang berwenang untuk memastikan peraturan tersebut diterapkan dengan baik.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif penegakan perda dan perkada di daerah
Sumber Data	Satpol PP & Damkar
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah daerah berhasil dalam melaksanakan program-program yang bertujuan untuk menjaga ketertiban umum, ketentraman masyarakat, dan perlindungan masyarakat (Tibumtranmas).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas} = \frac{\text{Jumlah Program Tibumtranmas yang Diselenggarakan dengan Baik}}{\text{Jumlah Total Program Tibumtranmas yang Direncanakan}} \times 100\ \%$ Keterangan: • Program Tibumtranmas mencakup kegiatan yang berkaitan dengan pengamanan wilayah, pengawasan ketertiban umum, penanganan kerusuhan sosial, serta program perlindungan masyarakat. • Dilaksanakan dengan Baik berarti program yang sudah mencapai target yang ditetapkan, seperti pengurangan tingkat kriminalitas, peningkatan partisipasi masyarakat dalam keamanan, dan efisiensi dalam penanganan masalah ketertiban. • Jumlah Total Program Tibumtranmas yang Direncanakan adalah jumlah seluruh program yang direncanakan untuk dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu.

Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin efektif penyelenggaraan Tibumtranmas di daerah
Sumber Data	Satpol PP & Damkar
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana program perlindungan masyarakat yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau lembaga terkait dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat yang membutuhkan perlindungan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat} = \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Terlindungi}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Membutuhkan Perlindungan}} \times 100\ \%$ Keterangan: • Jumlah Masyarakat yang Terlindungi: Adalah jumlah masyarakat yang terdaftar atau tercatat dalam program perlindungan yang diselenggarakan (misalnya, dalam program perlindungan sosial, bencana, atau kekerasan). • Jumlah Masyarakat yang Membutuhkan Perlindungan: Adalah estimasi jumlah masyarakat yang membutuhkan perlindungan sesuai dengan kriteria tertentu, seperti miskin, rentan, atau terkena dampak bencana.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan perlindungan masyarakat di daerah tersebut
Sumber Data	Satpol PP & Damkar
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana peningkatan kompetensi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugas penyidikan terkait pelanggaran hukum di bidang administrasi negara.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya} = \frac{\text{Jumlah PPNS yang Telah Mengikuti Pelatihan}}{\text{Jumlah Total PPNS yang Ada}} \times 100\ \%$ Keterangan: • Jumlah PPNS yang Telah Mengikuti Pelatihan: Merupakan jumlah PPNS yang telah menyelesaikan pelatihan atau pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kompetensi penyidikan mereka. • Jumlah Total PPNS yang Ada: Merupakan jumlah keseluruhan PPNS yang aktif di daerah atau instansi yang bersangkutan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik program peningkatan kompetensi PPNS yang dilaksanakan
Sumber Data	Satpol PP & Damkar P
Frekuensi	Tahunan

Program Penanggulangan Bencana

Nama Indikator	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana informasi dan edukasi terkait kesiapsiagaan dan mitigasi bencana telah tersebar di masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana} = \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Informasi dan Edukasi}}{\text{Jumlah Total Masyarakat di Daerah Rawan Bencana}} \times 100\ \%$ Keterangan: • Jumlah Masyarakat yang Mendapatkan Informasi dan Edukasi: Merupakan jumlah masyarakat yang telah menerima informasi dan edukasi mengenai mitigasi bencana, kesiapsiagaan, serta langkah-langkah yang harus diambil untuk mengurangi risiko bencana. • Jumlah Total Masyarakat di Daerah Rawan Bencana: Merupakan jumlah seluruh masyarakat yang tinggal di kawasan yang rawan bencana (misalnya, kawasan rawan gempa, banjir, tanah longsor, atau tsunami).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana di Masyarakat.
Sumber Data	BPBD
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana penanganan darurat dalam menghadapi bencana dapat diselesaikan sesuai dengan prosedur, waktu, dan standar yang ditetapkan oleh pihak berwenang.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penanganan Tanggap Darurat Bencana} = \frac{\text{Jumlah Tindakan Tanggap Darurat yang Berhasil}}{\text{Jumlah Tindakan Tanggap Darurat yang Diperlukan}} \times 100\ \%$ Keterangan: • Jumlah Tindakan Tanggap Darurat yang Berhasil: Merupakan jumlah tindakan atau langkah tanggap darurat yang telah dilakukan dengan sukses, seperti evakuasi yang aman, distribusi bantuan yang tepat waktu, dan pemulihan infrastruktur darurat. • Jumlah Tindakan Tanggap Darurat yang Diperlukan: Merupakan jumlah total tindakan tanggap darurat yang seharusnya dilakukan untuk menangani bencana, berdasarkan standar operasional prosedur (SOP) dan kebutuhan yang telah dianalisis sebelumnya.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin cepat dan tepat penanganan darurat yang dilakukan saat terjadi bencana
Sumber Data	BPBD
Frekuensi	Setelah setiap kejadian bencana atau secara berkala untuk evaluasi penanganan darurat

Nama Indikator	Persentase Penanganan Pasca Bencana
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana upaya pemulihan dan rehabilitasi pasca bencana telah dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penanganan Pasca Bencana} = \left(\frac{\text{Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diperlukan}}\right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diselesaikan: Merupakan jumlah langkah pemulihan yang telah berhasil dilaksanakan, seperti pembangunan rumah, perbaikan infrastruktur, pemulihan layanan kesehatan, dan lain-lain. • Jumlah Tindakan Pemulihan yang Diperlukan: Merupakan jumlah total langkah pemulihan yang direncanakan atau dibutuhkan untuk mengembalikan kondisi pasca bencana ke keadaan normal atau lebih baik.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik proses pemulihan dan rehabilitasi yang dilakukan setelah bencana
Sumber Data	BPBD
Frekuensi	Tahunan atau sesuai kebutuhan pasca bencana

Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

Nama Indikator	Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana upaya penyebarluasan informasi serta edukasi kepada masyarakat tentang potensi bahaya kebakaran dan cara pencegahannya telah dilakukan oleh instansi terkait di wilayah tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran} = \left(\frac{\text{Jumlah Wilayah Rawan yang Telah Diedukasi}}{\text{Jumlah Total Wilayah Rawan Kebakaran}}\right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah Wilayah Rawan yang Telah Diedukasi: Jumlah wilayah yang sudah mendapatkan penyuluhan, sosialisasi, simulasi, atau distribusi materi edukasi terkait kebakaran. • Jumlah Total Wilayah Rawan Kebakaran: Wilayah yang dikategorikan rawan berdasarkan analisis risiko oleh instansi terkait (misalnya berdasarkan data historis kebakaran atau kepadatan bangunan).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas wilayah yang telah menerima penyebaran informasi dan edukasi kebakaran
Sumber Data	Satpol PP & Damkar
Frekuensi	Tahunan atau sesuai program edukasi

Nama Indikator	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau instansi terkait memberikan layanan penyelamatan (rescue) dan edukasi kepada korban kebakaran, termasuk pemberian bantuan awal, pendampingan psikososial, informasi keselamatan lanjutan, serta pelatihan mitigasi pascakebakaran.

Nama Indikator	Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Layanan Penyelamatan dan Edukasi Korban Kebakaran} = \left(\frac{\text{Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Edukasi}}{\text{Jumlah Total Korban Kebakaran}}\right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah Korban yang Mendapat Layanan dan Edukasi: Termasuk korban yang mendapat bantuan penyelamatan, pertolongan pertama, layanan psikososial, serta pelatihan mitigasi pasca kebakaran. • Jumlah Total Korban Kebakaran : Jumlah seluruh individu yang terdampak langsung dari kejadian kebakaran pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin luas cakupan layanan penyelamatan dan edukasi terhadap korban kebakaran.
Sumber Data	Satpol PP & Damkar.
Frekuensi	Tahunan atau per kejadian kebakaran.

URUSAN SOSIAL

Pemberdayaan Sosial

Nama Indikator	Persentase Pekerja Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial) yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitas Sosial
Defenisi	Ukuran proporsi tenaga profesional yang terlibat aktif dalam pemberian layanan rehabilitasi sosial kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di luar lembaga/panti rehabilitasi yang dikelola pemerintah atau swasta.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pekerja Sosial/ Tenaga Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial di Luar Panti Rehabilitas Sosial} = \frac{\text{Jumlah Pekerja Sosial/TKS yang Aktif}}{\text{Total Pekerja Sosial/TKS yang Terdata}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Pekerja Sosial/TKS yang Aktif : Mereka yang secara aktif memberikan layanan (bukan hanya administrasi atau non-teknis). • Total Pekerja Sosial/TKS yang Terdata: Jumlah tenaga profesional kesejahteraan sosial secara keseluruhan di wilayah tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak tenaga kesejahteraan sosial yang aktif memberikan pelayanan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pekerja Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial) yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi tenaga kesejahteraan sosial (TKS), pekerja sosial profesional, dan/atau relawan sosial yang melaksanakan penanganan korban bencana pada masa tanggap darurat dan pasca bencana sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) dan ketentuan yang berlaku.

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pekerja Sosial /Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar} = \frac{\text{Jumlah TKS/Peksos/Relawan yang Menangani Korban Sesuai Standar}}{\text{Total TKS/Peksos/Relawan yang Terlibat}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Menangani Sesuai Standar : Mengacu pada SOP Penanggulangan Bencana dari BNPB/Kemensos, seperti memiliki pelatihan dasar penanganan bencana, menggunakan sistem pelaporan resmi, dan mengikuti prosedur koordinasi lintas sektor. • Relawan Sosial : Termasuk Taruna Siaga Bencana (TAGANA) atau komunitas yang sudah mendapatkan pembekalan dasar.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar peran tenaga sosial yang terstandarisasi dalam penanganan korban bencana
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan / per kejadian bencana

Nama Indikator	Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang kesejahteraan sosial—termasuk pekerja sosial, tenaga kesejahteraan sosial (TKS), relawan sosial, dan pendamping sosial—yang mengalami peningkatan kompetensi melalui pelatihan, pendidikan, sertifikasi, atau pembinaan dalam bidang pelayanan sosial sesuai dengan standar dan kebutuhan tugas.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kompetensinya dalam Pelayanan Sosial} = \frac{\text{Jumlah SDM Sosial yang Meningkat Kompetensinya}}{\text{Total SDM Kesejahteraan Sosial}} \times 100\ \%$ Keterangan : • SDM Sosial : Termasuk pekerja sosial, TKS, pendamping sosial, relawan sosial, pengurus panti, dll. • Meningkat Kompetensinya : Terbukti melalui sertifikat pelatihan, uji kompetensi, pembinaan rutin, atau pendidikan formal terkait pelayanan sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak SDM sosial yang memiliki kompetensi yang ditingkatkan
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi lembaga kesejahteraan sosial (seperti Lembaga Kesejahteraan Sosial/LKS, yayasan sosial, balai rehabilitasi, dan panti sosial) yang mengalami peningkatan kualitas dalam penyelenggaraan pelayanan sosial sesuai dengan standar pelayanan minimal (SPM), standar nasional pelayanan sosial (SNPS), serta regulasi dan kebijakan yang berlaku.

Nama Indikator	Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kualitasnya dalam Pelayanan Sosial} = \frac{\text{Jumlah Lembaga Sosial yang Meningkat Kualitasnya}}{\text{Total Lembaga Sosial}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Meningkat Kualitasnya : Terpenuhi jika lembaga mendapatkan akreditasi lebih tinggi, pembaruan sistem manajemen mutu, atau berhasil dalam inovasi layanan sosial yang berdampak positif dan diakui oleh pemerintah atau mitra lembaga. • Lembaga Sosial : Termasuk LKS, panti, balai rehabilitasi, yayasan sosial, rumah singgah, dll.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak lembaga sosial yang meningkatkan kualitas pelayanan
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan

Nama Indikator	Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi Warga Negara Indonesia (WNI) migran yang menjadi korban tindak kekerasan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang telah mendapatkan penanganan sesuai dengan standar perlindungan dan pelayanan sosial.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan yang Tertangani} = \frac{\text{Jumlah WNI Migran Korban Kekerasan yang Tertangani}}{\text{Total WNI Migran Korban Kekerasan}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Tertangani : Dinyatakan tertangani jika korban telah mendapatkan paling tidak 2 bentuk layanan utama (pemulangan, konseling, rehabilitasi, bantuan hukum, atau reintegrasi). • Total Korban : Merujuk pada data korban kekerasan WNI migran yang tercatat oleh instansi resmi pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin besar jumlah korban yang tertangani secara tepat dan manusiawi
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Program Rehabilitasi Sosial

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi penyandang disabilitas terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui layanan sosial, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.

Nama Indikator	Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya} = \frac{\text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Penyandang Disabilitas Terlantar}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 jenis bantuan dasar dari layanan resmi. • Terlantar: Tidak memiliki tempat tinggal tetap, pengasuh, atau akses layanan dasar secara mandiri.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak penyandang disabilitas terlantar yang terbantu
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi anak terlantar yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi program pemerintah, pemerintah daerah, atau lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya} = \frac{\text{Jumlah Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Anak Terlantar}} \times 100\ \%$ Keterangan: • Terpenuhi kebutuhan dasar: Anak telah mendapatkan minimal 3 layanan dasar seperti pendidikan, makanan, tempat tinggal, atau layanan kesehatan. • Total anak terlantar: Berdasarkan data by name by address dari lembaga terkait.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak anak terlantar yang terbantu dan terlindungi
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase lanjut usia (lansia) terlantar yang telah menerima pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi dari program perlindungan dan pelayanan sosial oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun lembaga sosial masyarakat.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya} = \frac{\text{Jumlah Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Lanjut Usia Terlantar}} \times 100\ \%$ Keterangan: • Terpenuhi kebutuhan dasar: Telah menerima minimal 3 layanan dasar dari pemerintah atau lembaga sosial. • Data lansia terlantar: Mengacu pada data terverifikasi dari Dinsos, panti, atau lembaga sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan semakin banyak lansia terlantar yang mendapat perlindungan sosial.

Nama Indikator	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) lainnya—selain penderita HIV/AIDS dan penyalahguna NAPZA—yang telah memperoleh pemenuhan kebutuhan dasar melalui intervensi layanan sosial oleh pemerintah dan/atau lembaga kesejahteraan sosial.
Rumus Perhitungan	Persentase PPKS lainnya di Luar HIV/ AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya = (Jumlah PPKS Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya / Jumlah Total PPKS Lainnya yang Terdata) x 100 % Keterangan : • PPKS lainnya mengacu pada 24 jenis PPKS di luar kategori HIV/AIDS dan NAPZA. • Terpenuhi kebutuhan dasar jika mendapat minimal 3 layanan pokok. • Data terverifikasi diperoleh melalui lembaga resmi atau survei sosial oleh Dinas Sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan keberhasilan dalam menjangkau kelompok rentan melalui layanan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Nama Indikator	Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar
Defenisi	Persentase individu atau rumah tangga penerima manfaat yang telah terpenuhi kebutuhan dasarnya dari program-program sosial, kesejahteraan, atau bantuan yang diberikan oleh pemerintah atau lembaga sosial.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar} = \left(\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar}}{\text{Jumlah Penerima Manfaat Total}}\right) \times 100$ Dimana: • Jumlah Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar = Jumlah penerima manfaat yang telah memenuhi kebutuhan dasar mereka. • Jumlah Penerima Manfaat Total = Jumlah seluruh penerima manfaat yang terdaftar dalam program. Keterangan : • Kebutuhan dasar dapat bervariasi tergantung pada jenis program sosial yang dijalankan. Biasanya, program bantuan sosial bertujuan untuk memenuhi setidaknya sebagian besar kebutuhan dasar yang disebutkan di atas.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin besar jumlah penerima manfaat yang memenuhi kebutuhan dasar

Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi
Defenisi	Persentase individu atau rumah tangga penerima bantuan sosial atau program pemberdayaan yang menunjukkan peningkatan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidup secara mandiri secara ekonomi, tanpa tergantung bantuan dari pihak lain.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kemandirian Ekonomi} = \left(\frac{\text{Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi}}{\text{Jumlah Total Penerima Manfaat}}\right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi : Penerima manfaat yang secara objektif menunjukkan tanda-tanda peningkatan ekonomi mandiri. • Jumlah Total Penerima Manfaat : Total penerima manfaat yang menjadi sasaran program pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak penerima manfaat yang berhasil mandiri secara ekonomi
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan atau sesuai siklus program

Nama Indikator	Persentase Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin
Defenisi	Persentase wilayah administrasi (provinsi, kabupaten/kota, atau kecamatan) yang telah melakukan kegiatan pengelolaan, pembaruan, dan validasi data fakir miskin sesuai dengan pedoman dan standar yang ditetapkan oleh pemerintah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Daerah Aktif Pendataan} = \left(\frac{\text{Jumlah Daerah yang Melaksanakan Pengelolaan dan Pendataan Data Fakir Miskin}}{\text{Jumlah Total Daerah}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Daerah yang Melaksanakan : Wilayah yang melaksanakan seluruh tahapan proses pendataan dan pelaporan sesuai ketentuan. • Jumlah Total Daerah : Total wilayah administrasi yang menjadi cakupan kebijakan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin banyak daerah yang aktif dalam pendataan fakir miskin
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Keluarga Miskin dan Rentan Penerima Perlindungan Sosial yang Tergraduasi dari Kemiskinan
Defenisi	Indikator ini mengukur persentase keluarga miskin dan rentan yang sebelumnya menerima bantuan perlindungan sosial, namun kemudian berhasil keluar dari status kemiskinan (tergraduasi) karena peningkatan kondisi sosial-ekonomi mereka, baik melalui pemberdayaan ekonomi, bantuan produktif, peningkatan keterampilan, maupun intervensi sosial lainnya.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tergraduasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Keluarga Miskin/Rentan Penerima Bantuan yang Tergraduasi}}{\text{Total Keluarga Miskin/Rentan Penerima Bantuan}}\right) \times 100\%$

	Keterangan: • Tergraduasi berarti tidak lagi memenuhi kriteria kemiskinan dan dikeluarkan dari daftar penerima bantuan sosial setelah evaluasi yang sah. • Verifikasi dilakukan melalui pemutakhiran DTKS, survey sosial ekonomi, dan/atau *verifikasi by name by address.*
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, berarti semakin banyak keluarga penerima bantuan yang berhasil mandiri secara ekonomi, sehingga tidak lagi tergantung pada bantuan sosial.
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Program Penanganan Bencana

Nama Indikator	Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi korban bencana (baik bencana alam, sosial, maupun non-alam) yang telah mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar selama fase tanggap darurat dan setelahnya (pemulihan awal).

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Korban yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya}}{\text{Jumlah Total Korban Bencana}}\right) \times 100$
	Keterangan :
	• Korban bencana meliputi korban bencana :
	  ○ Alam (gempa bumi, banjir, tsunami, dll)
	  ○ Non-alam (pandemi, wabah, kebakaran besar)
	  ○ Sosial (konflik sosial, kerusuhan)
	• Terpenuhi kebutuhan dasar apabila korban menerima minimal 3 jenis layanan dasar selama masa tanggap darurat dan/atau setelahnya.
	Data diambil dari laporan resmi dan hasil asesmen lapangan oleh BPBD, Tagana, atau lembaga kemanusiaan lainnya.

Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pula upaya pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, air bersih, tempat tinggal sementara, dan layanan kesehatan bagi korban.
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Setiap kejadian bencana / Tahunan (rekapitulasi)

Nama Indikator	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya
Defenisi	Persentase masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana dan telah mengalami peningkatan kesiapsiagaan terhadap bencana melalui kegiatan seperti pelatihan, sosialisasi, simulasi, atau kegiatan pengurangan risiko bencana lainnya dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kesiapsiagaan} = \left(\frac{\text{Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan}}{\text{Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana}}\right) \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah masyarakat di daerah rawan bencana yang mengikuti kegiatan peningkatan kesiapsiagaan Adalah total individu yang tinggal di wilayah rawan

Nama Indikator	Persentase Masyarakat di Daerah Rawan Bencana yang Meningkat Kesiapsiagaannya
	bencana dan telah berpartisipasi dalam kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesiapsiagaan, seperti : ○ Pelatihan atau edukasi kebencanaan ○ Simulasi evakuasi bencana ○ Penyuluhan mitigasi bencana ○ Kegiatan pembentukan atau penguatan kelompok siaga bencana • Total masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana Merupakan jumlah seluruh penduduk yang tinggal di wilayah yang dikategorikan sebagai daerah rawan bencana, berdasarkan peta risiko bencana dari instansi resmi (seperti BNPB atau BPBD). Termasuk semua penduduk tanpa memperhatikan apakah mereka sudah mendapatkan pelatihan atau belum.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak masyarakat yang siap menghadapi bencana
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan atau sesuai periode program

Nama Indikator	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Pemulihan Sosial
Defenisi	Persentase korban bencana yang memperoleh layanan pemulihan sosial, yaitu bantuan yang diberikan untuk memulihkan kondisi sosial, psikologis, dan ekonomi korban pasca bencana.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pemulihan Sosial} = \left(\frac{\text{Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial}}{\text{Total korban bencana}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial merupakan jumlah korban bencana (individu atau keluarga) yang menerima bantuan seperti : ○ Dukungan psikososial atau konseling trauma ○ Tempat tinggal sementara atau relokasi ○ Bantuan sosial ekonomi pascabencana ○ Reintegrasi sosial dan pemberdayaan ○ Akses ke fasilitas layanan dasar setelah bencana • Total korban bencana merupakan jumlah keseluruhan individu yang terdampak langsung oleh bencana, baik kehilangan tempat tinggal, harta benda, maupun mengalami trauma sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik cakupan layanan pemulihan sosial
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Pasca terjadi bencana (ad-hoc) atau berkala jika bencana terus berlangsung

Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

Nama Indikator	Pesentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik
Defenisi	Persentase Taman Makam Pahlawan (TMP) Nasional yang dikelola secara baik berdasarkan kriteria tertentu seperti kondisi fisik, kebersihan, perawatan rutin, kelengkapan

Nama Indikator	Pesentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang Terkelola dengan Baik
	fasilitas, penghormatan upacara nasional, dan administrasi yang tertib.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase TMP Terkelola Baik} = \left(\frac{\text{Jumlah TMP Nasional yang memenuhi kriteria pengelolaan baik}}{\text{Total TMP Nasional}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah TMP Nasional yang memenuhi kriteria pengelolaan baik adalah jumlah Taman Makam Pahlawan yang dinilai layak dan baik berdasarkan indikator pengelolaan seperti: ○ Terawat secara fisik dan estetika (rumput dipotong, makam bersih, cat terawat) ○ Memiliki petugas tetap dan sistem pelaporan ○ Fasilitas umum berfungsi (toilet, tempat ibadah, parkir, akses difabel) ○ Digunakan dalam upacara kenegaraan secara berkala ○ Ada alokasi anggaran dan pelaporan rutin • Total TMP Nasional adalah jumlah seluruh Taman Makam Pahlawan berstatus nasional yang terdaftar secara resmi di Indonesia.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik kualitas pengelolaan TMP nasional
Sumber Data	Dinas Sosial, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

URUSAN TENAGA KERJA

Program Perencanaan Tenaga Kerja

Nama Indikator	Persentase Kegiatan yang Dilaksanakan yang Mengacu ke Rencana Tenaga Kerja
Defenisi	Persentase dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang telah sesuai atau mengacu pada dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase kegiatan yang mengacu ke RTKD} = \left(\frac{\text{Jumlah kegiatan yang mengacu ke RTKD}}{\text{Jumlah seluruh kegiatan yang dilaksanakan di kabupaten/kota}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD merupakan total kegiatan/program yang dijalankan oleh perangkat daerah dan tercantum atau sesuai dengan dokumen Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD). • Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota merupakan total seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam satu periode waktu (biasanya 1 tahun), tanpa melihat apakah kegiatan tersebut mengacu ke RTKD atau tidak.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, menunjukkan semakin besar komitmen dan konsistensi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan yang sejalan dengan perencanaan tenaga kerja yang telah dirumuskan.
Sumber Data	Dinas PM, PTSP & Naker
Frekuensi	Tahunan

Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja

Nama Indikator	Persentase Lulusan Pelatihan yang Bekerja
Defenisi	Persentase peserta pelatihan kerja yang berhasil mendapatkan pekerjaan, baik sebagai pekerja pada orang lain maupun dengan cara membuka usaha sendiri (berwirausaha) setelah menyelesaikan pelatihan.
Tujuan	Untuk mengukur efektivitas program pelatihan kerja dalam meningkatkan peluang kerja dan kemandirian lulusan pelatihan.

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase lulusan pelatihan yang bekerja} = \left(\frac{\text{Jumlah lulusan pelatihan yang bekerja atau berwirausaha}}{\text{Jumlah peserta pelatihan keseluruhan}}\right) \times 100\%$
	Keterangan Rumus:
	• Jumlah lulusan pelatihan yang bekerja atau berwirausaha merupakan lulusan pelatihan yang pasca pelatihan telah :
	  ○ Bekerja di sektor formal atau informal, atau
	  ○ Membuka usaha sendiri (wirausaha)
	• Jumlah peserta pelatihan keseluruhan adalah total peserta yang mengikuti dan menyelesaikan pelatihan kerja pada periode tertentu.

Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan bahwa pelatihan yang diberikan relevan dengan kebutuhan pasar kerja dan mampu meningkatkan peluang kerja atau kewirausahaan bagi peserta.
Sumber Data	Dinas PM, PTSP & Naker
Frekuensi	Tahunan atau per angkatan pelatihan

Program Penempatan Tenaga Kerja

Nama Indikator	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri
Defenisi	Persentase tenaga kerja yang berhasil ditempatkan pada lapangan kerja di dalam negeri oleh instansi pemerintah, lembaga pelatihan kerja, atau lembaga penempatan tenaga kerja (publik maupun swasta), dibandingkan dengan total pencari kerja yang terdaftar.

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penempatan Dalam Negeri} = \left(\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri}}{\text{Jumlah pencari kerja terdaftar}}\right) \times 100\%$
	Keterangan Rumus:
	• Jumlah tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri
	  Adalah total pencari kerja yang berhasil mendapat pekerjaan di wilayah Indonesia melalui mekanisme resmi seperti:
	  ○ Penempatan oleh Disnaker, LPK, atau sistem digital pemerintah
	  ○ Penyaluran dari hasil pelatihan kerja (BLK/LPK)
	  ○ Penempatan langsung melalui bursa kerja atau job fair
	• Jumlah pencari kerja terdaftar adalah jumlah individu yang secara resmi mendaftarkan diri sebagai pencari kerja pada sistem ketenagakerjaan, seperti AK1 (kartu kuning) atau platform penempatan kerja digital pemerintah/swasta.

Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin efektif sistem penempatan kerja domestik
Sumber Data	Dinas PM, PTSP & Naker
Frekuensi	Bulanan / Tahunan

Nama Indikator	Persentase Disabilitas Bekerja di Sektor Formal (%)
Definisi	Pekerja penyandang disabilitas adalah penduduk penyandang disabilitas berusia 15 tahun ke atas yang bekerja dan mengalami satu atau lebih hambatan diantaranya: gangguan dalam penglihatan, pendengaran, mobilitas, menggunakan atau menggerakan jari atau tangan, gangguan berbicara atau memahami atau berkomunikasi dengan orang lain, gangguan mengingat, berkonsentrasi, dan gangguan emosional dengan tingkat keparahan rendah, sedang, sampai parah. Penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal adalah penyandang disabilitas yang bekerja pada status pekerjaan berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar (status pekerjaan 3) dan buruh/karyawan/pegawai (status pekerjaan 4). Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal adalah proporsi penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal (status pekerjaan 3 dan 4) terhadap total penyandang disabilitas pada angkatan kerja. Penyandang disabilitas yang dihitung dalam indikator ini adalah penyandang disabilitas kategori sedang dan berat.
Rumus Perhitungan	$\% \, PD \, formal = \frac{\sum PD \, formal}{\sum AKPD} x100 \, \%$ Dimana : PD *formal* = Pekerja penyandang disabilitas sektor forr AKPD = Angkatan kerja penyandang disabilitas
Interpretasi	Semakin tinggi Persentase penyandang disabilitas bekerja di sektor formal, semakin terpenuhi hak-hak dasar kaum disabilitas sebagai Warga Negara. (UU No. 8 Tahun 2016 menjamin hak-hak dasar penyandang disabilitas di berbagai bidang, termasuk hak untuk hidup, bebas dari stigma, privasi, keadilan dan perlindungan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan dan pariwisata, serta kesejahteraan sosial. Undang-undang ini juga secara spesifik mengatur aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta memberikan perlindungan dari bencana dan pelaksanaan habilitasi dan rehabilitasi)
Sumber Data	Dinas PM, PTSP & Naker
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%)
Definisi	Pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi merupakan penduduk usia 15 tahun ke atas lulusan pendidikan menengah atau pendidikan tinggi.

<table>
<tr>
<td></td>
<td>
a. Bidang keahlian menengah (semi-skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dengan tingkat kompleksitas sedang untuk menyelesaikan tugas yang umumnya bersifat rutin dan tidak membutuhkan kemampuan mental tinggi.
b. Bidang keahlian tinggi (skilled) adalah bidang kerja yang membutuhkan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan komprehensif atas pekerjaan yang dilakukannya sehingga mampu menyelesaikan tugas yang sifatnya kompleks dan membutuhkan kemampuan mental tinggi.
Indikator ini diperoleh dengan membagi jumlah penduduk 15

tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi dengan jumlah penduduk 15 tahun ke atas yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian rendah atau menengah atau tinggi.
<table>
<tr><th>Tingkat Pendidikan Rendah</th><th>Tingkat Pendidikan Menengah</th><th>Tingkat Pendidikan Tinggi</th></tr>
<tr><td>• Tidak/ belum tamat SD</td><td>• SMA/ MA/ SMLB/ Paket C</td><td>• Diploma I/ II/ III</td></tr>
<tr><td>• SD/ MI/ SDLB/ Paket A</td><td>• SMK</td><td>• Diploma IV</td></tr>
<tr><td>• SMP/ MTs/ SMPLB/ Paket B</td><td>• MAK</td><td>• S1
• S2
• S2 Terapan
• S3</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>Rumus Perhitungan</td>
<td>
$$\beta = \frac{A}{C}\ x\ 100\ \%$$
Keterangan :
β = Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi (kota x)
A = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada bidang keahlian menengah atau tinggi, pada tahun tertentu di kota X
C = Jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas, yang lulus pendidikan menengah atau pendidikan tinggi, dan sedang bekerja pada tahun tertentu di kota X
</td>
</tr>
<tr>
<td>Interpretasi</td>
<td>Positif : Meningkatnya persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah dan tinggi menggambarkan peningkatan link and match tenaga kerja antara dunia pendidikan (supply) dan lapangan kerja (demand) dengan klasifikasi keahlian yang sesuai dengan tingkat pendidikan.</td>
</tr>
</table>

Sumber Data	Dinas PM, PTSP & Naker
Frekuensi	Tahunan

Program Hubungan Industrial

Nama Indikator	Persentase Perusahaan Yang Menerapkan Tata Kelola Kerja Yang Layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, Dan Terdaftar Peserta BPJS Ketenagakerjaan)
Defenisi	Persentase Perusahaan yang telah memenuhi indikator tata Kelola kerja yang layak, yaitu memiliki : - Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB) - Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit - Struktur dan Skala Upah - dan terdaftar sebagai peserta aktif BPJS Ketenagakerjaan
Tujuan	Untuk menilai sejauh mana perusahaan di daerah telah melaksanakan prinsip-prinsip hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan sesuai dengan regulasi ketenagakerjaan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak} = \left(\frac{\text{Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak}}{\text{Jumlah seluruh perusahaan}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak adalah Perusahaan yang memiliki PP/PKB, LKS Bipartit, struktur dan skala upah, serta terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. • Jumlah seluruh Perusahaan adalah total Perusahaan aktif yang terdata di wilayah kab/kota pada periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase perusahaan yang memenuhi indikator tata kelola kerja yang layak, maka semakin baik kualitas hubungan industrial di daerah, dan menunjukkan perlindungan serta kesejahteraan tenaga kerja yang lebih baik.
Sumber Data	Dinas PM, PTSP & Naker
Frekuensi	Tahunan

URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan

Nama Indikator	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
Defenisi	Prosentase anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki dampak positif langsung terhadap pemberdayaan perempuan dan pengurangan ketimpangan gender.
Rumus Perhitungan	$\text{ARG} = \left(\frac{\text{Anggaran Responsif Gender}}{\text{Total Anggaran Pemerintah}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Anggaran Responsif Gender merupakan total anggaran yang dialokasikan untuk kegiatan yang memiliki tujuan atau hasil yang jelas terkait dengan pemberdayaan perempuan dan pengurangan kesenjangan gender. Ini bisa mencakup: ○ Program pendidikan untuk perempuan ○ Layanan kesehatan yang ramah gender

Nama Indikator	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)
	○ Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan ○ Infrastruktur yang mendukung kesetaraan gender ○ Proyek pengurangan kemiskinan berbasis gender • Total Anggaran Pemerintah adalah total anggaran yang disetujui untuk setiap tahun oleh pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang mencakup seluruh sektor tanpa memperhitungkan dimensi gender.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin besar komitmen pemerintah terhadap kebijakan responsif gender
Sumber Data	Dinsos, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Program Perlindungan Perempuan

Nama Indikator	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Defenisi	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang Mendapatkan Layanan Komprehensif adalah persentase perempuan korban kekerasan (fisik, seksual, psikis) dan TPPO yang memperoleh akses penuh terhadap layanan yang komprehensif dari lembaga pemerintah dan mitra terkait.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif} = \frac{\text{Jumlah korban Perempuan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif}}{\text{Jumlah Total Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO}} \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah korban Perempuan yang Mendapatkan Layanan Komprehensif adalah jumlah perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan lengkap yang mencakup: 1. Layanan hukum: Pendampingan hukum, bantuan hukum, dan perlindungan hukum. 2. Layanan kesehatan: Pemeriksaan medis, pengobatan, dan perawatan kesehatan pasca kekerasan. 3. Rehabilitasi sosial: Program rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk memulihkan kondisi korban. 4. Konseling psikologis: Dukungan psikologis untuk membantu korban mengatasi trauma. 5. Pemulihan ekonomi: Bantuan untuk kemandirian ekonomi korban, seperti pelatihan keterampilan atau pemberdayaan ekonomi. • Jumlah Total Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO adalah jumlah total perempuan korban kekerasan (baik kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan seksual, kekerasan fisik, dll) dan korban TPPO yang tercatat oleh lembaga penanganan kasus kekerasan dan TPPO, seperti polisi, rumah sakit, LSM, dan dinas sosial.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik ketersediaan layanan bagi korban kekerasan dan TPPO
Sumber Data	Dinsos, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Program Peningkatan Kualitas Keluarga

Nama Indikator	Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar
Defenisi	Indikator ini mengukur jumlah atau persentase Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang telah menerapkan pendekatan berbasis gender dan hak anak sesuai dengan standar nasional.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Puspaga Sesuai Standar} = \left(\frac{\text{Jumlah Puspaga yang memenuhi standar perspektif gender dan hak anak}}{\text{Total Puspaga}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah Puspaga yang memenuhi standar Adalah jumlah unit Puspaga yang telah diverifikasi memiliki: ○ Fasilitator/konselor terlatih perspektif gender dan anak ○ Modul edukasi yang mendukung kesetaraan gender dan perlindungan anak ○ Sarana layanan ramah keluarga dan inklusif ○ Kegiatan rutin pembelajaran dan konseling keluarga ○ Pelaporan dan monitoring berbasis hak anak dan gender • Total Puspaga adalah jumlah seluruh unit Puspaga yang terdaftar dan aktif di wilayah yang menjadi cakupan evaluasi.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, semakin baik kualitas layanan Puspaga dalam mendukung keluarga adil gender dan ramah anak
Sumber Data	Dinsos, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Program Pemenuhan Hak Anak

Nama Indikator	Persentase Desa/Kelurahan Ramah Anak
Definisi	Indikator yang menggambarkan pencapaian pemenuhan Desa/Kelurahan ramah anak untuk mendukung program Kota Layak Anak.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Desa/Kelurahan Ramah Anak} = \frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan yang sudah ditetapkan sebagai Desa/Kelurahan Ramah Anak}}{\text{Jumlah seluruh Desa/Kelurahan}} \times 100\%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, menunjukkan semakin banyak Desa/Kelurahan yang ramah anak
Sumber Data	Dinsos, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Program Perlindungan Khusus Anak

Nama Indikator	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
Defenisi	Indikator ini mengukur proporsi anak yang termasuk dalam kategori Anak Memerlukan Perlindungan Khusus (AMPK) yang telah mendapatkan layanan secara komprehensif, baik berupa perlindungan, pemulihan, pendampingan, rehabilitasi sosial, maupun reintegrasi sosial.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase AMPK dengan Layanan Komprehensif} = \left(\frac{\text{Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Komprehensif}}{\text{Jumlah Total AMPK}}\right) \times 100\%$

Nama Indikator	Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif
	Keterangan Rumus: • Jumlah AMPK yang Mendapatkan Layanan Komprehensif adalah jumlah anak yang masuk dalam kategori AMPK yang menerima layanan perlindungan anak secara terintegrasi dan menyeluruh, misalnya: o Penanganan kasus oleh UPTD PPA o Layanan hukum, psikologis, medis, dan sosial o Pendampingan hingga pemulihan atau reintegrasi • Jumlah Total AMPK adalah seluruh anak dalam wilayah yang teridentifikasi masuk kategori AMPK, baik dari laporan masyarakat, UPTD, data SIMFONI PPA, atau pendataan sektor lain.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, semakin banyak AMPK yang terpenuhi hak-haknya melalui layanan lintas sektor
Sumber Data	Dinsos, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan / Triwulanan

URUSAN PANGAN

Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan

Nama Indikator	Persentase Ketersedian Cadangan Pangan
Defenisi	Ukuran yang menunjukkan seberapa besar cadangan yang tersedia dibandingkan dengan kebutuhan atau target yang di tetapkan
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Ketersediaan Cadangan Pangan} = \frac{\text{Jumlah cadangan pangan pemerintah}}{\text{Jumlah target cadangan pangan pemerintah yang ditetapkan}} \times 100\%$ Keterangan Rumus : Tahapan penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagai berikut: 1. Tahap 1 - Menghitung Data Dasar untuk Penghitungan Cadangan Beras Daerah (DDCBD) - Data dasar cadangan beras daerah (DDCBD) adalah total jumlah CBPD, CBPK, CBPP, dan cadangan Beras masyarakat di 1 (satu) wilayah kab./kota Penghitungan DDCBD berdasarkan rumus: DDCBD = ∑ [(%WTB+%PKP) x IRBI x Pop x K] dimana : WTB : Wilayah terdampak bencana PKP : Prevalensi kerawanan pangan IRBI : Indeks kerawanan bencana Pop : Jumlah penduduk K : Konsumsi per kapita per tahun 2. Tahap 2 Menghitung Cadangan Beras Daerah (CBD) di satu wilayah kabupaten/kota. CBD adalah jumlah CBPP, CBPK dan CBPD di satu wilayah kabupaten/kota. Penghitungan CBD berdasarkan rumus: CBD = 0,5 % X DDCBD Jumlah cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota adalah jumlah cadangan atau persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah yang

	selanjutnya disebut CBPK. • Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten/kota yang ditetapkan adalah jumlah target cadangan/persediaan beras pada pemerintah daerah kabupaten/kota.. • Cadangan Beras Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP adalah persediaan Beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah provinsi. • Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah ditetapkan oleh kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. • Jumlah cadangan Beras pemerintah daerah dihitung dengan mempertimbangkan : a. produksi Beras di daerah ; b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat di daerah;dan c. kerawanan pangan di daerah. • Penghitungan jumlah cadangan Beras pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan konsumsi masyarakat di daerah; dan potensi sumber daya di daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase ketersediaan cadangan pangan maka semakin banyak stok komoditas pangan yang dikelola oleh pemerintah.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi	Tahunan

Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat

Nama Indikator	Skor Pola Pangan Harapan
Defenisi	Indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas konsumsi Pangan penduduk berdasarkan keragaman dan keseimbangan kelompok pangan yang dikonsumsi.
Rumus Perhitungan	Survey index rata-rata Konsumsi Pangan masyarakat terhadap 9 Kelompok Pangan. $$PPH = 100 - \sum_{i=1}^{n} \lvert R_i - D_i \rvert$$ Keterangan Rumus : • Ri= Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan ke-i terhadap total energi konsumsi aktual • Di= Persentase kontribusi energi dari kelompok pangan ke-i dalam Pola Pangan Harapan • n = Jumlah kelompok pangan yang dianalisis (umumnya 9-12 kelompok) • |Ri−DiI= Deviasi dari pola pangan harapan.
Interpretasi	Nilai PPH menunjukkan seberapa dekat pola konsumsi pangan masyarakat dengan pola pangan yang dianjurkan (ideal).
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi	Tahunan atau sesuai kebutuhan analisis

Program Penanganan Kerawanan Pangan

Nama Indikator	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang Ditangani
Defenisi	Persentase Penduduk rawan pangan mengacu pada proporsi penduduk yang mengalami kondisi dimana mereka tidak memiliki akses terhadap pangan yang cukup

	dan berkualitas untuk memenuhi kebutuan nutrisi mereka baik secara pisik maupun ekonomi
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penduduk Rawan Pangan yang Ditangani} = \frac{\text{Jumlah Penduduk Rawan Pangan yang Ditangani}}{\text{Jumlah Penduduk Rawan Pangan}} \times 100\ \%$ Keterangan Rumus : - Jumlah penduduk rawan pangan yang ditangani yaitu Jumlah penduduk rawan pangan pada satu desa yang ditangani pada tahun anggaran berjalan - Jumlah penduduk rawan pangan ini yaitu Total penduduk desa yang rawan pangan pada salah satu desa sebagai pelaksana kegiatan di tahun berjalan
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penurunan jumlah penduduk rawan pangan maka maka semakin sedikit penduduk yang rawan pangan.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi	Tahunan

Program Pengawasan Keamanan Pangan

Nama Indikator	Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang aman dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia/Berbahaya dan Residu Pestisida
Defenisi	Persentase tingkat keamanan produk pangan segar, khususnya yang terdeteksi cemaran mikroba, bahan kimia berbahaya, dan residu pestisida, bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti jenis produk, lokasi geografis, dan praktik pertanian (penanganan). Namun, secara umum, tujuan utama adalah untuk mencapai tingkat keamanan pangan yang setinggi mungkin, dengan fokus pada pengurangan risiko cemaran dan paparan terhadap zat-zat berbahaya.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang aman dari Cemaran Mikroba, Bahan kimia/Berbahaya dan Residu Pestisida} = \frac{\text{Jumlah sampel pangan segar yang tidak terdeteksi residu pestisida dan formalin}}{\text{Jumlah sampel pangan segar yang diperiksa}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase tingkat keamanan pangan segar maka semakin baik tingkat keamanan pangan segar .
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi	Tahunan

URUSAN PERTANAHAN

Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Nama Indikator	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi kasus atau sengketa tanah garapan yang belum bersertifikat dan berhasil diselesaikan melalui mekanisme mediasi dibandingkan dengan total kasus yang ditangani.

Nama Indikator	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan melalui Mediasi
Rumus Perhitungan	Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertifikat yang Dilakukan Melalui Mediasi = (Jumlah kasus tanah garapan belum bersertifikat yang berhasil diselesaikan melalui mediasi) / (Jumlah total kasus tanah garapan belum bersertifikat yang ditangani dalam periode tertentu) x 100 %
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentasenya, maka semakin berhasil pendekatan mediasi dalam menyelesaikan konflik tanah garapan belum bersertifikat.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan / Per semester

Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi jumlah tanah yang terkena proyek pembangunan yang telah diberikan ganti kerugian atau santunan kepada pemiliknya dibandingkan dengan total tanah yang terkena pengadaan untuk pembangunan tersebut.
Rumus Perhitungan	Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan = (Jumlah tanah yang telah diberikan ganti kerugian atau santunan sesuai ketentuan yang berlaku (termasuk tanah yang telah diselesaikan pembayaran ganti kerugian atau santunan)) / (Jumlah total tanah yang terdampak proyek pembangunan (tanah yang termasuk dalam kawasan pengadaan untuk pembangunan)) x 100 %
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik penyelesaian ganti kerugian dan santunan dalam proyek pembangunan.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Triwulan / Semester / Tahunan

Program Redistribusi Tanah dan Ganti Kerugian Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee

Nama Indikator	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Defenisi	Indikator yang mengukur jumlah tanah yang dapat didistribusikan kepada petani atau masyarakat yang berhak sebagai bagian dari program landreform.
Rumus Perhitungan	Tersedianya TOL untuk Didistribusikan = T_{km} + T_a Keterangan : T_{km} : Luas tanah kelebihan maksimum yang telah diidentifikasi dan siap untuk didistribusikan (dalam hektare) T_a : Luas tanah Absentee yang telah diidentifikasi dan siap untuk didistribusikan (dalam hektare)

Nama Indikator	Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang Siap Didistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
Interpretasi	Semakin banyak tanah yang tersedia untuk didistribusikan, semakin besar keberhasilan program landreform dalam menyediakan akses tanah bagi masyarakat.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Penetapan Tanah Ulayat

Nama Indikator	Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi tanah ulayat yang telah mendapatkan pengakuan dan penetapan hukum dari pihak yang berwenang (seperti pemerintah atau lembaga adat) sebagai tanah ulayat yang sah dan terdaftar.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan} = \frac{\text{Luas tanah ulayat yang telah ditetapkan dan diakui oleh pihak yang berwenang sebagai tanah ulayat yang sah (dalam hektare)}}{\text{Luas total tanah ulayat yang ada di wilayah tersebut, baik yang sudah ditetapkan maupun yang belum (dalam hektare)}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik pengakuan dan penetapan tanah ulayat di wilayah tersebut.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan Tanah Kosong

Nama Indikator	Persentase Tanah Kosong yang Dikelola
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi tanah kosong yang telah diambil alih, dimanfaatkan, atau dikelola dengan tujuan produktif dibandingkan dengan total tanah kosong yang ada di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tanah Kosong yang Dikelola} = \frac{\text{Luas tanah kosong yang telah dikelola, baik untuk kegiatan pertanian, perkebunan atau pembangunan infrastruktur (dalam hektare)}}{\text{Luas total tanah kosong yang ada di wilayah tersebut (dalam hektare)}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik pengelolaan tanah kosong yang ada di wilayah tersebut.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Penatagunaan Tanah

Nama Indikator	Persentase Bidang Tanah yang Sudah Terdaftar (Bersertipikat)
Defenisi	Proporsi jumlah bidang tanah yang sudah memiliki bukti kepemilikan sah berupa sertipikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dibandingkan

Nama Indikator	Persentase Bidang Tanah yang Sudah Terdaftar (Bersertipikat)
	dengan total bidang tanah yang ada di wilayah administrasi tertentu. Indikator ini menggambarkan tingkat kepastian hukum dan tertib administrasi pertanahan. Tujuan pengukuran ○ Mengetahui sejauh mana bidang tanah telah memiliki kepastian hukum melalui pendaftaran tanah, sebagai ukuran keberhasilan program penatagunaan tanah dan tertib pertanahan.
Rumus Perhitungan	Persentase Bidang Tanah yang Sudah Terdaftar (Bersertifikat) = $\frac{\text{Jumlah Bidang Tanah yang Sudah Bersertifikat}}{\text{Total Bidang Tanah}}$ x 100 %
Interpretasi	• Semakin tinggi persentase → semakin baik tingkat kepastian hukum dan tertib pertanahan. • Semakin rendah persentase → menunjukkan masih banyak tanah yang belum terdaftar sehingga rawan konflik dan ketidakpastian hukum.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

URUSAN LINGKUNGAN HIDUP

Program Perencanaan Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjut
Defenisi	proses sistematis dalam merumuskan arah, kebijakan, strategi, dan tindakan pengelolaan lingkungan hidup yang terintegrasi dan berkelanjutan guna menjamin kelestarian fungsi lingkungan serta mendukung pembangunan yang berwawasan lingkungan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Rumus Perhitungan	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjut = $\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi Dalam Kajian}}$ x 100 % **Keterangan:** • **Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti**: Rekomendasi dari dokumen kajian lingkungan hidup (misalnya KLHS, RPPLH) yang telah diakomodasi ke dalam dokumen perencanaan, kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan. • **Jumlah Total Rekomendasi dalam Kajian**: Semua poin rekomendasi yang tercantum dalam kajian lingkungan hidup tersebut.
Interpretasi	Indikator ini menggambarkan sejauh mana hasil kajian lingkungan hidup (misalnya KLHS, RPPLH) diintegrasikan dan diimplementasikan dalam perencanaan dan kegiatan pembangunan. Semakin tinggi persentasenya, menunjukkan komitmen dan efektivitas pemangku kepentingan dalam mengakomodasi rekomendasi lingkungan menuju pembangunan berkelanjutan.

Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjut	
	Rentang Persentase	Interpretasi
	≥ 90%	Sangat Baik Hampir seluruh rekomendasi KLH telah diakomodasi dalam rencana/kegiatan.
	75% – 89%	Baik Mayoritas rekomendasi telah ditindaklanjuti dengan baik.
	50% – 74%	Cukup Sebagian rekomendasi sudah diintegrasikan, masih perlu percepatan tindak lanjut.
	30% – 49%	Kurang Banyak rekomendasi belum terealisasi; perlu evaluasi hambatan implementasi.
	< 30%	Sangat Kurang Implementasi rekomendasi KLH masih minim, berisiko pada kelestarian lingkungan.
Sumber Data	DPKP2LH	
Frekuensi	Tahunan	

Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Nilai Indeks Udara Model EU
Defenisi	Nilai yang mengambarkan status dan kondisi mutu udara di lokasi tertentu pada waktu tertentu
Rumus Perhitungan	$IKU = 100 - \left(\frac{50}{0{,}99}\,(I_{INA} - 0{,}01)\right)$ Keterangan : *IKU* = Indeks Kualitas Udara I_{INA} = Jumlah indeks NO2, SO2 dan PM 2.5
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Indeks Udara maka akan semakin baik kualitas udara
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu
Defenisi	Persentase dari jumlah badan air yang memenuhi baku mutu terhadap jumlah badan air yang dilakukan pengujian kualitas air

Nama Indikator	Persentase Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu} = \frac{\text{Jumlah Badan Air yang Memenuhi Baku Mutu}}{\text{Jumlah Badan Air yang Dilakukan Pengujian Kualitas Air}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase maka semakin baik kualitas badan air di Kota Sawahlunto
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tutupan Lahan (Hektar)
Defenisi	Luas kondisi permukaan bumi yang terlihat menutupi suatu area, baik berupa unsur alami maupun buatan manusia.
Rumus Perhitungan	$TL = \frac{\sum_{i=1}^{22} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i\ x\ C_i)}{\sum_{i=1}^{22} (Luas\ Kelas\ Tutupan\ i)}$ Keterangan : TL = tutupan lahan C = Koefisien kelas tutupan lahan
Interpretasi	Semakin berkurang tutupan lahan hijau dan meningkatnya lahan terbangun akan memperbesar risiko pencemaran serta kerusakan lingkungan hidup.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Sampel Uji Kualitas Lingkungan yang Dianalisis Tepat Waktu
Defenisi	Perbandingan antara jumlah sampel kualitas lingkungan (air, udara, tanah, atau lainnya) yang berhasil dianalisis sesuai dengan jadwal atau waktu yang ditetapkan, terhadap total jumlah sampel yang seharusnya dianalisis, dinyatakan dalam persen.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Analisis Tepat Waktu}\ (\%) = \frac{\text{Jumlah sampel yang dianalisis tepat waktu}}{\text{Total jumlah sampel yang direncanakan}} \times 100\%$
Interpretasi	Analisa pengujian kualitas lingkungan dapat dilakukan tepat waktu
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)

Nama Indikator	Persentase RTH
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi luas ruang terbuka hijau (seperti taman, hutan kota, kebun, dan area vegetasi lainnya) terhadap total luas area yang tersedia dalam suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Ruang Terbuka Hijau (RTH)} = \frac{\text{Luas RTH}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\ \%$ Keterangan : Luas RTH : Merupakan luas total Ruang Terbuka Hijau yang ada dalam wilayah yang dihitung (biasanya

Nama Indikator	Persentase RTH
	dalam satuan meter persegi atau hektar) Luas Wilayah : Merupakan luas total area atau wilayah yang dihitung (biasanya dalam satuan meter persegi atau hektar)
Interpretasi	Semakin tinggi persentase RTH, semakin baik kualitas lingkungan dan ketersediaan ruang untuk aktivitas rekreasi serta fungsi ekologis lainnya.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

Nama Indikator	Persentase Limbah B3 yang Terkelola
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang telah dikelola dengan cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku dibandingkan dengan total limbah B3 yang dihasilkan dalam suatu wilayah atau kegiatan industri.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Limbah B3 yang Terkelola} = \left(\frac{\text{Limbah B3 yang Terkelola}}{\text{Total Limbah B3 yang Dihasilkan}}\right) \times 100\%$ Keterangan : • Limbah B3 yang Terkelola : Merupakan jumlah limbah B3 yang telah dikelola sesuai dengan prosedur yang benar dan aman, misalnya dengan cara didaur ulang, diolah, atau dibuang sesuai dengan standar pengelolaan limbah B3 yang berlaku. • Total Limbah B3 yang Dihasilkan : Merupakan jumlah total limbah B3 yang dihasilkan oleh suatu wilayah, sektor, atau kegiatan industri dalam periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase limbah B3 yang terkelola, semakin baik pengelolaannya dan semakin kecil risiko dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

Nama Indikator	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Kab/Kota
Defenisi	Indikator yang menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap seluruh ketentuan dan kewajiban lingkungan yang tercantum dalam dokumen perizinan lingkungan dan regulasi yang berlaku.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Ketaatan} = \left(\frac{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang Taat}}{\text{Jumlah Usaha/Kegiatan yang Diawasi}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah Usaha/Kegiatan yang Taat: Jumlah entitas usaha atau kegiatan yang memenuhi seluruh persyaratan izin lingkungan, izin PPLH, dan PUU LH, baik administratif maupun teknis.

	• Jumlah Usaha/Kegiatan yang Diawasi: Total usaha/kegiatan yang dilakukan pemantauan atau evaluasi kepatuhan oleh instansi terkait selama periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan sesuai peraturan.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA),Kearifan Lokal dan MHA yang Terkait dengan PPLH

Nama Indikator	Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi komunitas MHA yang telah menerima peningkatan kapasitas melalui berbagai bentuk kegiatan pembinaan, pelatihan, pendampingan, atau fasilitasi dari pemerintah atau lembaga terkait, terhadap total komunitas MHA yang telah teridentifikasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya} = \left(\frac{\text{Jumlah MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya}}{\text{Total MHA yang Teridentifikasi}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya: Komunitas Masyarakat Hukum Adat yang telah memperoleh pelatihan, pendampingan, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya pada periode waktu tertentu. • Total MHA yang Teridentifikasi: Total jumlah komunitas MHA yang secara resmi telah diakui atau didata oleh instansi terkait dalam wilayah administratif tertentu.
Interpretasi	Persentase ini mencerminkan sejauh mana pemerintah hadir dalam upaya penguatan dan pemberdayaan masyarakat hukum adat. Semakin tinggi nilainya, semakin baik pelaksanaan program peningkatan kapasitas.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Peningkatan Pendidikan Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Nama Indikator	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi penyuluh lingkungan hidup yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas atau kompetensi (seperti pelatihan, bimbingan teknis, sertifikasi, workshop) dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan total penyuluh lingkungan hidup yang terdata.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Kompetensi Penyuluh LH} = \left(\frac{\text{Jumlah Penyuluh LH yang Ditingkatkan Kompetensinya}}{\text{Total Penyuluh LH}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah Penyuluh LH yang Ditingkatkan Kompetensinya: Jumlah penyuluh lingkungan hidup yang telah mengikuti kegiatan pelatihan, sertifikasi, bimbingan teknis, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya dalam satu tahun.

Nama Indikator	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya
	• Total Penyuluh LH: Jumlah keseluruhan penyuluh lingkungan hidup yang terdata aktif dalam wilayah atau lembaga tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin baik pengembangan kapasitas penyuluh lingkungan hidup untuk mendukung keberhasilan program lingkungan.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

Nama Indikator	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Defenisi	Indikator yang menggambarkan tingkat keterlibatan masyarakat dalam berbagai kegiatan atau program yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara individu maupun berkelompok.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Partisipasi Masyarakat} = \left(\frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi}}{\text{Total Penduduk}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi: Jumlah individu yang ikut serta dalam kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, seperti kegiatan gotong royong kebersihan, konservasi, pelatihan lingkungan, dan sejenisnya dalam periode tertentu. • Total Penduduk: Jumlah total penduduk pada wilayah administratif yang menjadi cakupan pengukuran.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin besar keterlibatan publik dalam upaya pelestarian lingkungan.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Sengketa (Kasus Tindak Pidana) Lingkungan Hidup
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi jumlah sengketa atau kasus pidana lingkungan yang telah diselesaikan (baik melalui jalur hukum, mediasi, atau administrasi) terhadap total kasus yang ditangani dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penyelesaian Kasus} = \left(\frac{\text{Jumlah Kasus yang Diselesaikan}}{\text{Total Kasus yang Ditangani}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah Kasus yang Diselesaikan: Jumlah kasus atau sengketa lingkungan hidup yang telah mendapatkan keputusan tetap, penyelesaian damai, atau bentuk penyelesaian resmi lainnya. • Total Kasus yang Ditangani: Jumlah keseluruhan kasus atau sengketa yang tercatat dan sedang dalam penanganan pada periode pelaporan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator ini, semakin baik kinerja penyelesaian kasus lingkungan hidup, baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Sengketa (Kasus Tindak Pidana) Lingkungan Hidup
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan Persampahan

Nama Indikator	Proporsi Rumah Tangga (RT) Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT)
Definisi	Pengumpulan Sampah Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau TPS 3R. Sampah yang dikumpulkan berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Rumah Tangga dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah adalah rumah tangga yang : • Menerima layanan pengumpulan sampah dari pintu ke pintu dengan frekuensi tetap danrutin (minimal 2 kali dalam seminggu), serta sampah dikumpulkan minimal dalam tiga atau lebih yang terpisah misal: fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu; atau • Memiliki tempat pengumpulan sampah bersama (Komunal) yang disepakati di lingkungan dalam jarak 200m, dilayani dengan frekuensi tetap danrutin tanpa membuang sampah sembarangan dan sampah dikumpulkan dalam tiga fraksi atau lebih yang terpisah, misalnya fraksi basah (organik), daur ulang, dan residu. Catatan : Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota. Penting untuk diketahui bahwa : (a) Sampah terkumpul Sampah Terkumpul mengacu pada jumlah sampah yang mencapai fasilitas pengelolaan sampah (b) Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah mempertimbangkan rumah tangga yang menerima layanan pengumpulan sampah. Praktik lapangan yang terjadi di beberapa Kabupaten/Kota, sampah yang terkumpul dibuang ke lingkungan (tidak diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah). Dalam hal ini rumah tangga tersebut memiliki

	pelayanan pengumpulan sampah, namun sampah terkumpul mencemari lingkungan. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan suatu Kabupaten/Kota memiliki nilai yang tinggi dalam "Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah", namun jumlah "sampah terkumpul" dan diangkut ke fasilitas pengelolaan sampah rendah.
Rumus Perhitungan	Unit Satuan : Persentase Rumah tangga Cara Perhitungan : $\text{PRTLP} = \frac{JRTLP}{JRTS} x\ 100\ \%$ Keterangan : PRTLP = Proporsi rumah tangga dengan layanan penuh pengumpulan sampah JRTLP = Jumlah rumah tangga dengan akses terhadap layanan penuh pengumpulan sampah JRTS = Jumlah rumah tangga seluruhnya Sumber : • Diadaptasi dari Metadata SDGs, 2021 • Rancangan Platform Pengelolaan Persampahan Nasional
Interpretasi	Indikator ini diperlukan untuk mengukur kemajuan kinerja pelayanan rumah tangga untuk pengumpulan sampah.
Sumber Data	DPKP2LH
Frekuensi	Tahunan

URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Program Pendaftaran Penduduk

Nama Indikator	Persentase Perekaman KTP Elektonik
Defenisi	Indikator ini menunjukkan proporsi penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektonik
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Perekaman KTP Elektonik} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Telah Melakukan Perekaman KTP Elektonik}}{\text{Jumlah Penduduk yang Wajib Memiliki KTP Elektonik}} \text{ x } 100\ \%$

Nama Indikator	Persentase Perekaman KTP Elektonik
	Keterangan **:** • Jumlah Penduduk yang telah melakukan perekaman KTP Elektonik : Penduduk berusia 17 tahun keatas yang telah melakukan perekaman KTP Elektonik • Jumlah Penduduk yang Wajib memiliki KTP Elektonik: Seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan wajib memiliki KTP.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi tingkat digitalisasi layanan administrasi kependudukan
Sumber Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Triwulan/Semesteran/Tahunan

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan KTP Elektonik
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang telah memiliki KTP Elektonik
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kepemilikan KTP Elektonik} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki KTP Elektonik}}{\text{Jumlah Penduduk yang Wajib Memiliki KTP Elektonik}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi tingkat digitalisasi layanan administrasi kependudukan
Sumber Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Triwulan/Semesteran/Tahunan

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi penduduk yang telah memiliki Identitas Kependudukan Digital (IKD) terhadap total jumlah penduduk wajib KTP.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Telah Mengaktivasi IKD}}{\text{Jumlah Penduduk yang Wajib Memiliki KTP Elektonik}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Jumlah Penduduk yang mengaktivasi IKD : Penduduk yang telah berhasil mengaktifkan identitas kependudukan digital melalui aplikasi resmi Dukcapil (misalnya: aplikasi IKD) • Jumlah Penduduk yang Wajib memiliki KTP Elektonik: Seluruh penduduk Indonesia yang telah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan wajib memiliki KTP.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi tingkat digitalisasi layanan administrasi kependudukan
Sumber Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Triwulan/Semesteran/Tahunan

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Defenisi	Indikator yang menunjukkan proporsi anak-anak yang telah memiliki Kartu Identitas Anak terhadap total jumlah anak yang seharusnya memiliki KIA sesuai ketentuan.

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase KIA} = \left(\frac{\text{Jumlah Anak yang Memiliki KIA}}{\text{Jumlah Total Anak Usia 0–17 Tahun < 1 Hari}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah Anak yang Memiliki KIA: Anak-anak yang telah tercatat dan memiliki Kartu Identitas Anak aktif. • Jumlah Total Anak Usia 0–17 Tahun < 1 Hari: Anak-anak warga negara Indonesia dalam rentang usia tersebut, baik yang lahir di daerah tersebut maupun yang berdomisili berdasarkan data kependudukan.
Interpretasi	Menggambarkan tingkat kesadaran dan efektivitas pelayanan adminduk untuk anak.
Sumber Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Bulanan / Tahunan

Program Pencatatan Sipil

Nama Indikator	Persentase Penerbitan Akta Kematian bagi Penduduk yang Berstatus Meninggal
Defenisi	Indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akta kematian atas peristiwa kematian pada penduduk yang berstatus meninggal
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kepemilikan Akta Kematian} = \frac{\text{Jumlah Akta Kematian yang Dterbitkan}}{\text{Jumlah Penduduk yang Berstatus Meninggal}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Jumlah penduduk yang memiliki akta kematian: Jumlah penduduk yang berstatus meninggal yang telah memiliki akta kematian. • Jumlah penduduk yang berstatus meninggal: Jumlah total penduduk yang berstatus meninggal dalam kurun waktu tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin responsif dan tertib layanan pencatatan kematian.
Sumber Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Triwulan/Semesteran/Tahunan

Nama Indikator	Persentase Anak Berusia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran
Defenisi	Indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi anak usia 0-4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran 0-4 Tahun} = \frac{\text{Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Anak Usia 0-4 Tahun}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Jumlah anak usia 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran : Jumlah anak usia 0-4 tahun yang telah memiliki akta kelahiran • Jumlah anak usia 0-4 tahun : Jumlah total anak usia 0-4 tahun dalam kurun waktu tertentu
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan pelayanan yang efisien dan tertib dalam penerbitan akta kelahiran

Nama Indikator	Persentase Anak Berusia 0-4 Tahun yang Memiliki Akta Kelahiran
Sumber Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Triwulan/Semesteran/Tahunan

Nama Indikator	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan Bagi Penduduk yang Menikah
Defenisi	Indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akte perkawinan pada penduduk yang berstatus menikah
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Perkawinan}}{\text{Jumlah Penduduk yang Berstatus Menikah}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Jumlah penduduk yang memiliki akta perkawinan: Jumlah penduduk yang berstatus menikah yang telah memiliki akta perkawinan • Jumlah penduduk yang berstatus menikah: Jumlah total penduduk yang berstatus menikah dalam kurun waktu tertentu.
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan pelayanan dan atau pendataan Dukcapil yang efisien dalam penerbitan/pendataan akta perkawinan
Sumber Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Triwulan/Semesteran/Tahunan

Nama Indikator	Persentase Penduduk yang Memiliki Akta Cerai Bagi Penduduk yang Bercerai
Defenisi	Indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akte perceraian pada penduduk yang berstatus bercerai
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kepemilikan Akta Perceraian} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Perceraian}}{\text{Jumlah Penduduk yang Berstatus Bercerai}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Jumlah penduduk yang memiliki akta perceraian: Jumlah penduduk yang berstatus bercerai yang memiliki akta perceraian • Jumlah penduduk yang berstatus bercerai: Jumlah total penduduk yang berstatus bercerai dalam kurun waktu tertentu.
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan pelayanan dan atau pendataan Dukcapil yang efisien dalam penerbitan/pendataan akta perceraian
Sumber Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Triwulan/Semesteran/Tahunan

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Seluruh Penduduk
Defenisi	Indikator yang menunjukkan seberapa besar kepemilikan akte kelahiran untuk seluruh penduduk

Nama Indikator	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Seluruh Penduduk
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Seluruh Penduduk} = \frac{\text{Jumlah Penduduk yang Telah Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Jumlah Total Penduduk}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran: Jumlah penduduk yang telah memiliki akte kelahiran • Jumlah total penduduk: Jumlah total penduduk yang dalam kurun waktu tertentu.
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan pelayanan yang efisien dan tertib dalam penerbitan akta kelahiran seluruh penduduk
Sumber Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Triwulan/Semesteran/Tahunan

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Nama Indikator	Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana informasi yang dimiliki Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), digunakan oleh berbagai pihak yang membutuhkan untuk berbagai keperluan dalam perencanaan pembangunan, kebijakan sosial, pelayanan publik dan kebutuhan administrasi lainnya. Berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Ayat 4
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Informasi Kependudukan yang Dimanfaatkan} = \frac{\text{Jumlah Pengguna Data Kependudukan}}{\text{Jumlah Total Pengguna Data Kependudukan}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Jumlah Penggunaan Data Kependudukan : Jumlah Stakeholder yang memanfaatkan data kependudukan yang telah disediakan oleh Dukcapil untuk semua keperluan • Jumlah Total Pengguna Data Kependudukan : Total jumlah Stakeholder pengguna data kependudukan lingkup Kota
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan efektivitas pemanfaatan data kependudukan dalam pengambilan keputusan dan perencanaan kebijakan.
Sumber Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Triwulan/Semesteran/Tahunan

Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Nama Indikator	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
Defenisi	Indikator yang mengatur sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), berhasil mengelola dan memperbarui data profil kependudukan untuk mencakup seluruh penduduk yang terdaftar, termasuk memastikan bahwa data tersebut tersedia, valid dan digunakan untuk semua keperluan.

Nama Indikator	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan} = \frac{\text{Jumlah Pengguna yang Terdaftar dan Terkelola}}{\text{Jumlah Total Penduduk}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Jumlah Penduduk yang Terdaftar dan Terkelola: Jumlah penduduk yang tercatat dan datanya dikelola dengan baik dalam Sistem Administrasi Kependudukan (SIAK). • Jumlah Total Penduduk: Total jumlah penduduk yang ada di wilayah yang tercatat oleh Kemendagri, yang menjadi sasaran pengelolaan profil kependudukan.
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan tingkat keberhasilan pengelolaan data kependudukan yang tinggi dan keberhasilan dalam menyediakan informasi yang akurat dan valid.
Sumber Data	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Frekuensi	Semesteran/Tahunan

URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Program Penataan Desa

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Penataan Desa
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana kegiatan fasilitasi dalam penataan desa, seperti perencanaan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, pengembangan kawasan, dan penguatan tata kelola desa, telah dilakukan secara efektif.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi Penataan Desa} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penataan Desa yang Dilakukan}}{\text{Jumlah Kegiatan Penataan Desa yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah Kegiatan Fasilitasi Penataan Desa yang Dilakukan: Total jumlah kegiatan atau program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak terkait dalam rangka penataan desa. Ini bisa mencakup perencanaan kawasan, penyusunan dokumen tata ruang, pemberdayaan masyarakat desa, dan lain-lain. • Jumlah Kegiatan Penataan Desa yang Direncanakan: Jumlah total kegiatan atau program penataan desa yang sudah direncanakan dalam suatu periode, misalnya tahunan atau perencanaan lima tahunan.
Interpretasi	Persentase yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan fasilitasi penataan desa telah dilaksanakan dengan baik, meningkatkan efektivitas pembangunan dan pengelolaan desa.
Sumber Data	Dinsos, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Program Peningkatan Kerja Sama Desa

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
Defenisi	Indikator yang menunjukkan sejauh mana pemerintah atau pihak berwenang memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar desa, antara desa dengan pihak ketiga (swasta, LSM), maupun kerja sama dengan pemerintah daerah, untuk mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi Kerja Sama Desa} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah Kegiatan Fasilitasi Kerja Sama yang Dilaksanakan: Jumlah kegiatan nyata yang sudah difasilitasi, seperti pembentukan BUMDes Bersama, kerja sama antar desa dalam pengelolaan sampah, pertanian, pendidikan, atau layanan dasar. • Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Jumlah total kegiatan fasilitasi kerja sama desa yang telah direncanakan dalam dokumen perencanaan tahunan atau RPJMDes.
Interpretasi	Makin tinggi persentasenya, makin baik fasilitasi kerja sama yang dilakukan, menandakan kolaborasi desa berjalan optimal.
Sumber Data	Dinsos, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Nama Indikator	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya
Defenisi	Indikator yang mengukur seberapa besar proporsi aparatur pemerintahan desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang telah mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas, seperti pelatihan, bimbingan teknis, atau workshop, dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Kapasitas} = \left(\frac{\text{Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya}}{\text{Total Aparatur Desa dan Anggota BPD}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya: Total individu yang telah mengikuti pelatihan, bimbingan teknis, workshop, atau bentuk peningkatan kapasitas lainnya dalam periode tertentu. • Total Aparatur Desa dan Anggota BPD: Jumlah keseluruhan aparatur desa (kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat lainnya) serta anggota BPD yang aktif.
Interpretasi	Persentase tinggi menandakan peningkatan kapasitas SDM desa berjalan baik dan merata.
Sumber Data	Dinsos, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
Defenisi	Indikator yang mengukur sejauh mana pemerintah atau pihak terkait telah memfasilitasi kegiatan peningkatan kapasitas dan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa, seperti PKK, Karang Taruna, LPM, RT/RW, dan Posyandu.

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LKD} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan LKD yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemberdayaan LKD yang Dilaksanakan: Merupakan jumlah aktual kegiatan (seperti pelatihan, pembinaan teknis, bantuan operasional, dsb.) yang ditujukan untuk LKD dan benar-benar terlaksana. • Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Total kegiatan fasilitasi pemberdayaan LKD yang tertuang dalam dokumen perencanaan tahunan atau RKPD/RENJA OPD.
Interpretasi	Nilai persentase menunjukkan sejauh mana LKD didukung dalam peningkatan kapasitas dan fungsinya. Semakin tinggi, semakin optimal fasilitasi yang diberikan.
Sumber Data	Dinsos, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat
Defenisi	Indikator yang mengukur proporsi kegiatan fasilitasi yang dilaksanakan oleh pemerintah atau pihak terkait dalam rangka mendukung penguatan kapasitas, peran, dan fungsi Lembaga Adat Desa (LAD) dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (LMHA) dalam menjaga nilai-nilai budaya, hukum adat, serta peran sosialnya di tengah masyarakat desa.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Fasilitasi Pemberdayaan LAD dan LMHA} = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100\%$ Keterangan Rumus: • Jumlah Kegiatan Fasilitasi yang Dilaksanakan: Total kegiatan aktual yang dilakukan seperti pelatihan kelembagaan adat, pengakuan/pengesahan LMHA, pendampingan pengelolaan wilayah adat, penguatan kapasitas kelembagaan adat, dan lain-lain. • Jumlah Kegiatan yang Direncanakan: Seluruh kegiatan fasilitasi terhadap LAD dan LMHA yang tercantum dalam dokumen rencana kegiatan tahunan pemerintah. • x 100% : Untuk mengubah hasil perbandingan menjadi nilai persentase.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin optimal pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan masyarakat hukum adat.
Sumber Data	Dinsos, PMD, PPA
Frekuensi	Tahunan

URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Program Pengendalian Penduduk

Nama Indikator	Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)
Definisi	indeks komposit yang dikembangkan oleh BKKBN untuk mengukur seberapa baik suatu pembangunan telah memperhatikan aspek kependudukan. IPBK terdiri dari

	lima dimensi utama: partisipasi, keberlanjutan, pemihakan, integrasi, dan kesetaraan, yang masing-masing diwakili oleh sejumlah indikator.
Rumus Perhitungan	$$IPBK = \sum_{j=1}^{5} (wj \; x \; Dj)$$ Dimana : j = Dimensi ke-j (Partisipasi, Keberlanjutan, Inklusivitas, Holistik Integratif, Kesetaraan) wj = Bobot dari dimensi ke-j dalam perhitungan keseluruhan (jumlah semua wj adalah 1) Dj = Skor dimensi ke-j Dj dihitung sebagai berikut : $$Dj = \sum_{i=1}^{nj} (vji \; x \; Iji)$$ Dimana : i = Indikator ke-i dalam dimensi ke-j vji = Bobot indikator ke-i dalam dimensi j (jumlah semua vji dalam satu dimensi adalah 1) Iji = Nilai indikator ke-i dalam dimensi ke-j (setelah normalisasi ke skala yang sama, biasanya 0-100)
Interpretasi	Nilai IPBK berkisar dari 0 (terburuk) hingga 100 (terbaik) Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas pembangunan berwawasan kependudukan di suatu daerah.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri
Definisi	Kampung KB Mandiri adalah satuan wilayah setingkat desa dengan kriteria tertentu dimana terdapat peningkatan indikator Program Bangga Kencana dan Keterpaduan dengan pembangunan sektor terkait dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Kampung Keluarga Berkualitas (KB) Mandiri} = \frac{\text{Jumlah Kampung KB Mandiri}}{\text{Jumlah Total Kampung KB}} \times 100\ \%$$ Keterangan : **Jumlah Kampung KB Mandiri** = jumlah kampung yang sudah mencapai kategori "mandiri" (berdasarkan indikator BKKBN) **Total Kampung KB** = total seluruh kampung KB yang ada (mandiri + berkembang + lainnya).
Interpretasi	Semakin besar nilainya semakin banyak jumlah kampong berkualitas mandiri di wilayah tersebut.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB
Frekuensi	Tahunan

Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Nama Indikator	Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)
Definisi	Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) atau **Unintended Pregnancy** adalah kehamilan yang terjadi saat wanita tidak menginginkannya, baik **tidak ingin hamil sama sekali** atau **tidak ingin hamil saat itu (ingin menunda)**.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)} = \frac{\text{Jumlah Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD)}}{\text{Jumlah Seluruh Kehamilan}} \times 100\ \%$
Interpretasi	"Sebanyak **30% kehamilan di kecamatan ini tidak direncanakan**, menandakan **masih rendahnya efektivitas program KB** dan perlunya edukasi lebih lanjut tentang perencanaan keluarga. Hal ini juga bisa mencerminkan kurangnya komunikasi suami-istri atau kendala akses terhadap alat kontrasepsi."
Sumber Data	• **SDKI (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia)**: menyediakan data nasional tentang KTD, termasuk berdasarkan umur, status perkawinan, dan wilayah. • **Pendataan Keluarga (PK)** oleh BKKBN: jika kamu petugas/analisis dari PK, kamu bisa mengambil variabel "status kehamilan" dari wanita usia subur yang sedang hamil. • **Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas)** juga kadang menyertakan data terkait.
Frekuensi	PK setiap 2 tahun SDKI satu kali 5 tahun

Nama Indikator	Proporsi Kebutuhan KB yang Terpenuhi Menurut Alat (Cara) KB Modern (%)
Definisi	Proporsi kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB modern adalah persentase perempuan usia subur (biasanya 15–49 tahun) yang menginginkan untuk menunda atau menghentikan kehamilan, dan sedang menggunakan metode kontrasepsi modern. Istilah Internasionalnya : mDFPS = *Modern Demand for Family Planning Satisfied* CPRm = *Contraceptive Prevalence Rate – modern methods*
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi Kebutuhan KB Terpenuhi Menurut Alat KB Modern} = \frac{\text{Jumlah Perempuan yang Menggunakan KB Metode Modern}}{\text{Jumlah Total Kebutuhan KB}} \times 100\ \%$ Keterangan : Pembilang = Perempuan usia 15-49 tahun yang menggunakan metode KB modern Penyebut = Seluruh Perempuan usia 15-49 tahun yang sedang membutuhkan KB (mau menunda atau tidak mau anak lagi), dan termasuk yang tidak pakai KB (unmet need) pakai metode tradisional, maupun metode modern.

Interpretasi	Semakin tinggi proporsinya (mendekati 100%), artinya semakin banyak perempuan/pasangan yang membutuhkan KB sudah terpenuhi kebutuhannya. Contoh kalau proporsinya 85%, itu berarti dari semua perempuan yang inin mencegah kehamilan, 85% sudah menggunakan KB dan 15 % belum.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB
Frekuensi	Tahunan

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)

Nama Indikator	Indeks Lansia Berdaya
Definisi	Adalah indeks komposit yang menggambarkan tentang lansia yang memenuhi indikator dari dimensi lansia tangguh yaitu dimensi spiritual, dimensi fisik, dimensi emosional, dimensi sosial kemasyarakatan, dimensi intelektual, dimensi vokasional dan dimensi lingkungan.
Rumus Perhitungan	$$ILB = \sum_{d=1}^{D} Wd \; x \; Sd$$ Dimana : D = Jumlah dimensi (dalam kasus ini 7 dimensi: fisik, spiritual, emosional, intelektual, sosial kemasyarakatan, lingkungan, vokasional) Wd = Bobot untuk dimensi ke-d (jumlah semua bobot dimensi =1) Sd = Skor dimensi ke-d dihitung dari beberapa indikator dalam dimensi tersebut Kemudian untuk tiap dimensi : $$Sd = \sum_{i=1}^{nd} Vdi \; x \; Idi$$ Dimana : nd = Jumlah indikator dalam dimensi ke-d Vdi = Bobot indikator i dalam dimensi d (jumlah bobot indikator dalam satu dimensi =1) Idi = Nilai indikator i dalam dimensi d, setelah dilakukan normalisasi /standardisasi ke skala seragam (biasanya 0-100)
Interpretasi	Indeks Lansia Berdaya menunjukkan tingkat ketangguhan/keberdayaan lansia, dimana semakin tinggi angkanya menunjukkan semakin tangguh atau berdaya lansia tersebut. Indeks Lansia Berdaya mempunyai 2 kriteria : • Lansia berdaya : Skor tinggi menunjukkan lansia memiliki kemandirian, partisipasi, dan kesejahteraan yang baik di berbagai dimensi. • Lansia kurang berdaya: Skor rendah menandakan lansia menghadapi tantangan dalam aspek-aspek tertentu.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Pengasuhan Keluarga yang Memiliki Remaja
Definisi	Indeks Komposit yang menggambarkan pengasuhan orang tua/keluarga kepada anaknya (anggota keluarga) yang berusia remaja, dimana remaja adalah anggota keluarga usia 10-24 tahun dan belum menikah.
Rumus Perhitungan	$$Indeks\ Pengasuhan\ Remaja = \sum_{i=1}^{n} (wi\ x\ Vi)$$ Dimana : n = Jumlah indikator yang digunakan (biasanya 8) wi = Bobot untuk indicator ke-i (jika bobot sama maka wi = 1/n) Vi = Nilai capaian indikator ke-i (biasanya dalam persen, antara 0-100)
Interpretasi	Indeks ini berkisar 0-100. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan pengasuhan yang lebih baik, serta mencakup aspek-aspek seperti akses pendidikan, jaminan kesehatan, kondisi ekonomi, dan akses informasi. • Nilai mendekati 100 Keluarga secara umum baik dalam aspek-aspek pengasuhan remaja (legalitas, pendidikan, kesehatan, kondisi ekonomi, akses informasi, dll). • Nilai yang lebih rendah Ada aspek-aspek yang perlu mendapat perhatian (misalnya jaminan kesehatan yang rendah, atau remaja yang harus bekerja, atau putus sekolah) untuk ditingkatkan.
Sumber Data	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk & KB
Frekuensi	Setiap 2 tahun

URUSAN PERHUBUNGAN
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Nama Indikator	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal
Definisi	**Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal** adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana fasilitas dan perlengkapan jalan yang terpasang saat ini memenuhi standar atau kondisi ideal yang ditetapkan untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi penggunaan jalan. Indeks ini dihitung sebagai rasio antara jumlah atau tingkat kelengkapan fasilitas jalan yang ada dengan jumlah atau tingkat kelengkapan ideal yang seharusnya tersedia,
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Kelengkapan Jalan} = \left(\frac{\text{Jumlah Elemen Kelengkapan Jalan yang Telah Terpasang}}{\text{Jumlah Elemen Kelengkapan Jalan Ideal}}\right) \times 100\%$$ Keterangan : • Panjang Jalan yang Terpasang = total panjang jalan yang sudah ada dan terbangun di wilayah tersebut. • Panjang Jalan Ideal (Kebutuhan) = total panjang jalan yang seharusnya dibutuhkan untuk melayani seluruh

	wilayah dengan optimal (misalnya berdasarkan tata ruang atau perencanaan teknis).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai **Persentase**, semakin lengkap fasilitas jalan yang terpasang sesuai dengan kondisi ideal. Nilai 100% menunjukkan bahwa seluruh fasilitas jalan yang dibutuhkan telah terpasang sesuai standar.
Sumber Data	Dinas Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan Perkeretaapian

Nama Indikator	Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani
Definisi	**Indeks Cakupan Perlintasan Kereta Api yang Ditangani** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi perlintasan sebidang antara jalur kereta api dan jalan (raya/setapak) yang telah dilengkapi dengan langkah-langkah penanganan keselamatan. Penanganan keselamatan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan dan dapat berupa pemasangan rambu, marka, palang pintu, sinyal, penjaga perlintasan, atau pembangunan jalan layang/terowongan (tidak sebidang). Indeks ini dihitung sebagai rasio antara jumlah perlintasan kereta api yang telah ditangani dengan jumlah total perlintasan kereta api yang ada,.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Cakupan Perlintasan yang Ditangani} = \left(\frac{\text{Jumlah Perlintasan yang Sudah Ditangani}}{\text{Jumlah Total Perlintasan}}\right) \times 100\%$ Keterangan : • Perlintasan yang Sudah Ditangani = perlintasan sebidang yang sudah diberi penanganan, seperti palang pintu, penjaga, rambu, sirine, atau rekayasa lalu lintas. • Total Perlintasan = seluruh perlintasan sebidang yang ada di wilayah yang dihitung, baik yang sudah maupun belum ditangani.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin besar proporsi perlintasan kereta api yang telah memiliki langkah-langkah pengamanan, sehingga potensi risiko kecelakaan diharapkan lebih rendah. Nilai 100% menunjukkan bahwa seluruh perlintasan kereta api telah ditangani sesuai standar.
Sumber Data	Dinas Perhubungan
Frekuensi	Tahunan

URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

Nama Indikator	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survey)
Definisi	**Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (Survei)** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi masyarakat yang menyatakan puas terhadap kemudahan dalam memperoleh (akses) dan mutu (kualitas) informasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah. Indeks ini diperoleh melalui survei terhadap masyarakat umum atau kelompok masyarakat

	tertentu di wilayah Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Tingkat kepuasan diukur berdasarkan jawaban responden terhadap pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan berbagai aspek akses dan kualitas informasi publik.
Rumus Perhitungan	$$\text{Persentase Kepuasan} = \left(\frac{\text{Jumlah Responden yang Menyatakan Puas}}{\text{Jumlah Total Responden}}\right) \times 100\%$$ Keterangan : • Jumlah Responden yang Menyatakan Puas = responden yang memberikan jawaban dengan kategori *"Puas"* atau *"Sangat Puas"* (tergantung skala yang digunakan). • Jumlah Total Responden = total orang yang mengisi survei.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai **Persentase**, semakin besar proporsi masyarakat yang puas terhadap akses dan kualitas informasi publik Pemerintah Daerah. Nilai 100% menunjukkan kepuasan penuh seluruh responden.
Sumber Data	Data Primer dari Survei
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan Aplikasi Informatika

Nama Indikator	Indeks Domain Manajemen SPBE
Definisi	Indeks Domain Manajemen SPBE adalah ukuran kematangan atau tingkat keberhasilan suatu instansi pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen SPBE, yang mencakup aspek-aspek seperti manajemen risiko, keamanan informasi, data, aset TIK, sumber daya manusia (SDM), pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE.
Rumus Perhitungan	Indeks ini menjadi bagian dari evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) secara keseluruhan dan bertujuan untuk menilai efektivitas pelaksanaan SPBE. $$\text{Indeks Domain (i)} = \frac{1}{BD}\sum_{j=m}^{n} NAij\ xBAij$$ Keterangan: NDj = nilai indeks domain ke-j BDj = nilai bobot domain ke j
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks domain dan bobot domain maka akan semakin besar pula nilai indeks SPBE yang dihasilkan.
Sumber Data	Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo
Definisi	Jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Sawahlunto yang sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dibandingkan dengan jumlah total Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kota Sawahlunto.

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo} = \frac{\text{Jumlah OPD yang Terhubung dengan Akses Internet yang Disediakan oleh Dinas Kominfo}}{\text{Jumlah Total OPD yang ada di Kota Sawahlunto}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo Kota Sawahlunto
Sumber Data	Dinas Kominfo Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

URUSAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

Nama Indikator	Persentase Pengawasan dan Pemerksaan Koperasi
Definisi	**Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi koperasi aktif yang telah menjalani kegiatan pengawasan dan/atau pemeriksaan oleh pihak berwenang (Dinas Koperasi dan UKM atau lembaga yang ditunjuk) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi} = \left(\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi}}{\text{Jumlah Total Koperasi}}\right) \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah Koperasi yang Diperiksa dan Diawasi = jumlah koperasi yang sudah dilakukan pengawasan dan pemeriksaan selama periode tertentu. • Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi yang terdaftar dalam wilayah yang dihitung.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin besar proporsi koperasi aktif yang telah diawasi dan/atau diperiksa, yang diharapkan berkorelasi dengan tingkat kepatuhan dan kesehatan organisasi koperasi yang lebih baik secara keseluruhan.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM Indag
Frekuensi	Tahunan

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi

Nama Indikator	Persentase Koperasi Aktif
Definisi	**Persentase Koperasi Aktif** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koperasi yang masih menjalankan kegiatan usaha dan memenuhi persyaratan keanggotaan serta pelaporan terhadap jumlah total koperasi yang terdaftar dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) pada periode waktu tertentu (biasanya akhir tahun). Angka ini mencerminkan tingkat vitalitas dan keberlangsungan organisasi koperasi secara keseluruhan di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Koperasi Aktif} = \left(\frac{\text{Jumlah Koperasi yang Aktif}}{\text{Jumlah Total Koperasi}}\right) \times 100\%$ Keterangan :

	• Jumlah Koperasi yang Aktif = koperasi yang sedang beroperasi dan menjalankan kegiatan sesuai dengan tujuan dan peraturan yang berlaku. • Jumlah Total Koperasi = jumlah seluruh koperasi yang terdaftar dalam wilayah yang dihitung, baik yang aktif maupun yang tidak aktif.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin besar proporsi koperasi yang aktif dan produktif di suatu wilayah, yang mengindikasikan sektor koperasi yang lebih sehat dan berpotensi memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan anggota.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM Indag
Frekuensi	Tahunan

Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

Nama Indikator	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan
Definisi	Persentase koperasi yang diberikan dukungan fasilitas Pelatihan (%) adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koperasi yang menerima suatu jenis dukungan fasilitas Pelatihan tertentu dari pihak berwenang (pemerintah, lembaga terkait, atau pihak lain) dibandingkan dengan jumlah total koperasi pada periode waktu tertentu (biasanya satu tahun).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan} = \frac{\text{Jumlah Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitas Pelatihan}}{\text{Jumlah Total Koperasi}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin besar proporsi koperasi yang telah menerima dukungan fasilitas Pelatihan.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM Indag
Frekuensi	Tahunan

Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

Nama Indikator	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas
Definisi	**Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi peningkatan jumlah koperasi yang memenuhi kriteria kualitas tertentu dari satu periode waktu ke periode waktu berikutnya dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional). Indeks ini mencerminkan keberhasilan upaya pembinaan dan pengembangan koperasi dalam meningkatkan kualitas organisasi, usaha, dan kontribusinya.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas} = \frac{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Ini} - \text{Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Ini = jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun berjalan.

	• Jumlah Koperasi Berkualitas Tahun Lalu = jumlah koperasi yang memenuhi standar kualitas yang ditetapkan pada tahun sebelumnya.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Nilai negatif menunjukkan penurunan jumlah koperasi berkualitas.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM Indag
Frekuensi	Tahunan

Program Pemberdayaan UMKM

Nama Indikator	Pertumbuhan Wirausaha
Definisi	**Pertumbuhan Wirausaha** adalah ukuran persentase perubahan jumlah wirausahawan atau unit usaha baru yang didirikan oleh wirausahawan dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat perkembangan dan dinamika ekosistem kewirausahaan serta minat dan aktivitas masyarakat dalam memulai usaha baru.
Rumus Perhitungan	$\text{Pertumbuhan Wirausaha} = \left(\frac{\text{Jumlah Wirausaha Tahun Ini} - \text{Jumlah Wirausaha Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Wirausaha Tahun Lalu}}\right) \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah Wirausaha Tahun Ini = jumlah total wirausaha yang terdaftar atau tercatat pada tahun ini. • Jumlah Wirausaha Tahun Lalu = jumlah total wirausaha yang terdaftar atau tercatat pada tahun sebelumnya
Interpretasi	**Pertumbuhan** positif menunjukkan pertumbuhan jumlah wirausahawan/unit usaha baru. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat pertumbuhannya. **Pertumbuhan** negatif menunjukkan penurunan jumlah wirausahawan/unit usaha baru. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM Indag
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Non Pertanian (%)
Definisi	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian merupakan perbandingan jumlah unit usaha kecil dan menengah non pertanian terhadap seluruh unit usaha non pertanian pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ UKM = \frac{Jumlah\ unit\ UKM\ Non\ Pertanian}{Total\ Jumlah\ Unit\ Usaha} x100\%$
Interpretasi	Usaha kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari UMKM yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi UKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi usaha mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM Indag
Frekuensi	Tahunan

Program Pengembangan UMKM

Nama Indikator	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor
Definisi	**Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor** adalah ukuran yang menggambarkan persentase Usaha Kecil dan Menengah (UKM) aktif yang secara bersamaan menjalin kemitraan usaha dengan pihak lain (usaha besar, sesama UKM, koperasi, atau pihak lainnya) dan melakukan kegiatan ekspor produk/jasa ke pasar internasional dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat integrasi UKM dalam rantai nilai yang lebih luas dan partisipasi mereka dalam perdagangan global.
Rumus Perhitungan	$\text{Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan Ekspor} = \left(\frac{\text{Jumlah UKM yang Menjalin Kemitraan dan Ekspor}}{\text{Jumlah Total UKM}}\right) \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah UKM yang Menjalin Kemitraan dan Ekspor = jumlah UKM yang terlibat dalam kemitraan dengan perusahaan besar, pemerintah, atau mitra lainnya serta yang melakukan kegiatan ekspor. • Jumlah Total UKM = jumlah keseluruhan UKM yang ada di wilayah yang dihitung (baik yang menjalankan kemitraan atau ekspor maupun yang tidak).
Interpretasi	Semakin tinggi proporsi, semakin besar proporsi UKM aktif yang terlibat dalam kemitraan dan ekspor secara bersamaan, yang mengindikasikan tingkat integrasi dan daya saing global yang lebih tinggi.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM Indag
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Rasio Kewirausahaan
Definisi	Rasio kewirausahaan merupakan perbandingan jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja daerah pada tahun yang sama. Berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar adalah berusaha atas resiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh atau pekerja tetap yang dibayar. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran.
Rumus Perhitungan	$\text{Rasio Kewirausahaan} = \frac{\text{Berusaha Dibantu Buruh Tetap Daerah}}{\text{Total Angkatan Kerja Daerah}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap mengindikasikan adanya orientasi untuk tumbuh dengan merekrut tenaga kerja tetap. Semakin besar pengusaha yang berusaha dibantu buruh tetap, semakin banyak penyerapan tenaga kerja tetap oleh para pengusaha.
Sumber Data	Dinas Koperasi, UKM Indag
Frekuensi	Tahunan

URUSAN PENANAMAN MODAL
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

Nama Indikator	Realisasi Total terhadap Target Investasi
Definisi	**Persentase Peningkatan Investasi** adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan atau kenaikan nilai investasi yang terealisasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Investasi yang dimaksud dapat mencakup berbagai jenis, seperti Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA), baik dalam bentuk modal tetap bruto (pembangunan fisik) maupun investasi finansial. Indeks ini mencerminkan daya tarik investasi suatu wilayah dan pertumbuhan aktivitas ekonomi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Realisasi} = \frac{\text{Total Realisasi Investasi}}{\text{Total Target Investasi}} \times 100\%$ Keterangan : • Total Realisasi Investasi: Ini adalah jumlah total investasi yang berhasil direalisasikan dalam suatu periode waktu tertentu. • Total Target Investasi: Ini adalah jumlah total investasi yang ditargetkan untuk dicapai dalam periode waktu yang sama.
Interpretasi	**Persentase** positif menunjukkan peningkatan nilai investasi. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. **Persentase** negatif menunjukkan penurunan nilai investasi. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

Program Promosi Penanaman Modal

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi
Definisi	**Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi** adalah ukuran yang menggambarkan tingkat pertumbuhan jumlah investor yang melakukan investasi di suatu wilayah (misalnya, pasar modal Indonesia, pasar properti Padang, sektor UMKM di Sumatera Barat) selama periode waktu tertentu (dibandingkan dengan periode waktu sebelumnya). Indeks ini mencerminkan meningkatnya partisipasi masyarakat atau entitas dalam kegiatan investasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Investor} = \frac{(\text{Jumlah Investor Akhir} - \text{Jumlah Investor Awal})}{\text{Jumlah Investor Awal}} \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah Investor Akhir : Ini adalah jumlah investor yang berinvestasi pada periode waktu setelah terjadi peningkatan. • Jumlah Investor Awal : Ini adalah jumlah investor yang berinvestasi pada periode waktu sebelumnya atau jumlah investor mula-mula. • (Jumlah Investor Akhir−Jumlah Investor Awal): Selisih ini menunjukkan besarnya peningkatan jumlah investor.

Interpretasi	**Persentase** positif menunjukkan peningkatan jumlah investor. Semakin tinggi nilai positif, semakin besar tingkat peningkatannya. Persentase negatif menunjukkan penurunan jumlah investor. Nilai indeks nol menunjukkan tidak ada perubahan.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

Program Pelayanan Penanaman Modal

Nama Indikator	Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan
Definisi	**Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah pelaku usaha (mencakup berbagai skala usaha, dari mikro hingga besar) yang telah memiliki izin usaha yang sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibandingkan dengan jumlah total pelaku usaha yang terdata atau teridentifikasi dalam suatu wilayah (misalnya, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional) pada periode waktu tertentu (biasanya akhir tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi perizinan dan efektivitas upaya pemerintah dalam mendorong formalisasi usaha.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pelaku Usaha Berizin} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Usaha dengan Izin Sesuai Ketentuan}}{\text{Total Jumlah Pelaku Usaha}} \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah Pelaku Usaha dengan Izin Sesuai Ketentuan: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak pelaku usaha yang telah mendapatkan izin operasional atau izin lain yang relevan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. • Total Jumlah Pelaku Usaha: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah pelaku usaha dalam populasi yang Anda teliti (misalnya, di suatu sektor industri, wilayah, atau negara).
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin besar proporsi pelaku usaha yang beroperasi secara legal dan sesuai dengan peraturan perizinan..
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

Nama Indikator	Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha
Definisi	**Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah permasalahan dan hambatan yang dilaporkan oleh calon pelaku usaha atau pelaku usaha baru terkait proses pembukaan usaha yang berhasil diselesaikan oleh pihak berwenang (pemerintah daerah, instansi terkait, atau tim fasilitasi) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan efektivitas mekanisme penyelesaian masalah dan dukungan pemerintah dalam mempermudah proses memulai usaha.

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penyelesaian} = \frac{\text{Jumlah Permasalahan/Hambatan yang Terselesaikan}}{\text{Total Jumlah Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi}} \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah Permasalahan/Hambatan yang Terselesaikan: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak permasalahan atau hambatan yang berhasil diatasi atau diselesaikan oleh pelaku usaha dalam proses membuka usaha. • Total Jumlah Permasalahan/Hambatan yang Dihadapi: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan jumlah permasalahan atau hambatan yang dialami oleh pelaku usaha dalam proses membuka usaha.
Interpretasi	Semakin tinggi **Persentase**, semakin efektif mekanisme penyelesaian masalah dan semakin baik dukungan pemerintah dalam mempermudah proses memulai usaha.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal

Nama Indikator	Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal
Definisi	**Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal** adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah pelaku kepentingan (investor, calon investor, pemerintah daerah, akademisi, masyarakat umum) yang mengakses dan menggunakan data serta informasi terkait penanaman modal (PMDN dan PMA) yang disediakan oleh pihak berwenang (Kementerian Investasi/BKPM, DPMPTSP Provinsi/Kabupaten/ Kota, atau lembaga terkait lainnya) dalam periode waktu tertentu (biasanya satu tahun). Indeks ini mencerminkan tingkat efektivitas penyebaran dan relevansi data serta informasi penanaman modal dalam mendukung pengambilan keputusan investasi dan pemahaman perkembangan investasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pemanfaatan} = \frac{\text{Jumlah Pengguna yang Memanfaatkan Data/Informasi}}{\text{Total Jumlah Target Pengguna Data/Informasi}} \times 100\%$ Keterangan : • Jumlah Pengguna yang Memanfaatkan Data/Informasi: Ini adalah angka yang menunjukkan berapa banyak pihak (misalnya, investor, pemerintah daerah, analis, pelaku usaha) yang secara aktif menggunakan data dan informasi penanaman modal yang tersedia. • Total Jumlah Target Pengguna Data/Informasi: Ini adalah angka yang menunjukkan keseluruhan potensi pengguna data dan informasi penanaman modal yang diharapkan (misalnya, seluruh investor terdaftar, seluruh dinas terkait, dll.).
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin besar proporsi pelaku kepentingan yang memanfaatkan data dan informasi penanaman modal yang disediakan.
Sumber Data	Dinas Penanaman Modal, PTSP & Tenaga Kerja
Frekuensi	Tahunan

URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
Definisi	Persentase peningkatan kapasitas daya saing kepemudaan adalah jumlah pemuda yang berdaya saing tahun N dikurangi jumlah jumlah pemuda yang berdaya saing tahun N-1 dibanding jumlah pemuda yang berdaya saing tahun N-1
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan} = \frac{\text{Jumlah Pemuda yang berdaya saing (tahun N) - Jumlah Pemuda yang berdaya saing (tahun N-1)}}{\text{Jumlah Pemuda yang berdaya saing (tahun N-1)}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Data tentang pemuda yang berdaya saing sangat berdampak terhadap perekonomian daerah ataupun nasional. Sikap positif dapat mendorong pemuda utk aktif dalam bersaing dan mengatasi segala hambatan yang ada
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan

Nama Indikator	Persentase Atlet yang Berdaya Saing
Definisi	Persentase Jumlah atlet yang berdaya saing tahun N dikurangi jumlah atlet yang berdaya saing N-1 dibandingkan dengan jumlah atlet yang berdaya saing tahun N-1
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Atlet yang Berdaya Saing} = \frac{\text{Jumlah Atlet yang Berdaya Saing (Tahun N) - Jumlah Atlet yang Berdaya Saing (Tahun N - 1)}}{\text{Jumlah Atlet yang Berdaya Saing (Tahun N - 1)}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Data tentang jumlah atlet yang berdaya saing sangat dibutuhkan agar terlihat peningkatan prestasi atlet yang ada di Kota Sawahlunto
Sumber Data	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Sawahlunto
Frekuensi	Tahunan

Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Kepramukaan
Definisi	Jumlah anggota pramuka yang ditingkatkan daya saingnya tahun N kurang Jumlah anggota pramuka yang ditingkatkan daya saingnya tahun N- dibandingkan Jumlah anggota pramuka yang ditingkatkan daya saingnya tahun N-

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Kapasitas Anggota Kepramukaan} = \frac{\text{Jumlah Anggota Pramuka yang ditingkatkan daya saingnya (Tahun N) - Jumlah Anggota Pramuka yang ditingkatkan daya saingnya (Tahun N - 1)}}{\text{Jumlah Anggota Pramuka yang ditingkatkan daya saingnya (Tahun N - 1)}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Data anggota pramuka yang ditingkatkan daya saingnya harus terdata sehingga setiap tahunnya organisasi kepramukaan bisa mengukur SDM anggota pramuka yang ada di Kota Sawahlunto
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

URUSAN STATISTIK

Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

Nama Indikator	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online
Definisi	Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online (%) adalah Ukuran atau indikator yang menunjukkan seberapa besar proporsi data dari suatu sektor tertentu yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan untuk dapat diakses dan di verifikasi secara online.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Data Sektoral Yang Memenuhi Standar Data dan Dapat Diakses Secara Online} = \frac{\text{Jumlah Data Sektoral yang memenuhi standar dan dapat diakses secara online}}{\text{Jumlah Total Data Sektoral}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Jumlah Data Sektoral = Jumlah Data yang dapat diakses pada Portal satu Data • Jumlah Total Data Sektoral = Jumlah seluruh OPD di portal data
Interpretasi	Tercapainya Kolaborasi, Integrasi, dan Standarisasi dalam Penyelenggaran Sistem Statistik Nasional (SSN). Sebagai indikator kinerja suatu sektor dalam hal pengolaan data, transparansi dan akuntabilitas. Semakin tinggi persentase menunjukkan bahwa semakin banyak data dari sektor tersebut yang berkualitas baik, terstruktur, dan mudah diakses oleh pubilk atau pihak yang berkepentingan. Semakin rendah persentasi menunjukkan bahwa masih banyak data dari sektor tersebut yang belum memenuhi standart kualitas dan belum dapat diakses secara online.
Sumber Data	Diskominfo
Frekuensi	Tahunan

URUSAN PERSANDIAN

Program Penyelenggaraan Persandian dan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah

Nama Indikator	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah
Definisi	**Indeks Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah** adalah ukuran yang menunjukkan sejauh mana instansi pemerintah daerah

	(provinsi/kabupaten/kota) telah membangun kapasitas, sistem, dan tata kelola untuk melindungi informasi digitalnya dari risiko keamanan siber. Indeks ini menilai aspek kebijakan, kelembagaan, infrastruktur, sumber daya manusia, serta pelaksanaan teknis dan audit pengamanan informasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi} = \frac{\sum(S_i \times B_i)}{\sum B_i}$ Keterangan : • S_i = Skor dari indikator ke-i (biasanya dalam skala 0–5) • B_i = Bobot dari indikator ke-i (persentase kontribusi indikator) • $\sum (S_i \times B_i)$ = Jumlah dari hasil perkalian skor dan bobot • $\sum B_i$ = Total bobot seluruh indikator (biasanya 100)
Interpretasi	Indeks ini penting sebagai Alat ukur kesiapan pemda menghadapi serangan siber. Bahan evaluasi pembangunan sistem elektronik daerah. Acuan prioritas penguatan keamanan digital daerah (terutama layanan publik dan data strategis)
Sumber Data	Diskominfo
Frekuensi	Tahunan

URUSAN KEBUDAYAAN

Program Pengembangan Kebudayaan

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan
Definisi	**Tingkat Partisipasi Masyarakat terhadap Pengembangan Kebudayaan** adalah indikator yang mengukur seberapa besar keterlibatan aktif masyarakat dalam upaya pelestarian, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Partisipasi ini mencakup kegiatan seni, tradisi lokal, pelestarian warisan budaya, keterlibatan dalam komunitas budaya, serta kontribusi terhadap kebijakan atau program kebudayaan di tingkat lokal dan nasional
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Partisipasi Masyarakat (\%)} = \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Diundang / Berpotensi}} \times 100$ Keterangan : • Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi = jumlah individu yang terlibat aktif dalam kegiatan (misalnya forum musrenbang, pelatihan, konsultasi publik, gotong royong, dll) • Jumlah Masyarakat yang Diundang / Berpotensi = populasi sasaran yang diundang atau berpeluang ikut berpartisipasi.
Interpretasi	Indeks ini berguna untuk Menilai efektivitas program pelestarian budaya. Meningkatkan pengarusutamaan kebudayaan dalam pembangunan. Merancang kebijakan berbasis masyarakat untuk revitalisasi budaya lokal
Sumber Data	Dinas Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

Program Pengembangan Kesenian Tradisional

Nama Indikator	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan
Definisi	**Indeks Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan** adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jenis kesenian tradisional daerah yang masih aktif dilestarikan dan/atau dikembangkan oleh masyarakat, institusi budaya, dan pemerintah daerah dibandingkan dengan total jenis kesenian tradisional yang teridentifikasi di wilayah tersebut dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \frac{\text{Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan}}{\text{Jumlah Total Kesenian Tradisional yang Terdata}} \times 100\%$ Keterangan : • **Jumlah Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan** = Kesenian yang masih aktif ditampilkan, diajarkan, atau difasilitasi oleh pemerintah/masyarakat. • **Jumlah Total Kesenian Tradisional yang Terdata** = Keseluruhan jenis kesenian tradisional yang tercatat di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif). • **Hasil** dalam bentuk **persentase (%)** menggambarkan tingkat pelestarian terhadap keseluruhan kesenian yang ada.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak jenis kesenian tradisional yang masih lestari dan berkembang.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

Program Pembinaan Sejarah

Nama Indikator	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal
Definisi	**Indeks Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal** adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengkajian, pelestarian, dan penyebaran informasi sejarah lokal, baik melalui kegiatan formal maupun non-formal.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal} = \frac{\text{Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tinjauan Sejarah Lokal}}{\text{Jumlah Masyarakat yang Diundang atau Diharapkan Terlibat}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Jumlah Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Tinjauan Sejarah Lokal = Jumlah individu yang terlibat aktif dalam kegiatan yang terkait dengan tinjauan sejarah lokal (misalnya: seminar, diskusi sejarah, pelatihan, penggalian cerita lokal, lomba penulisan sejarah lokal, dll). • Jumlah Masyarakat yang Diundang atau Diharapkan Terlibat = Jumlah masyarakat yang diharapkan untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut, misalnya

	berdasarkan undangan, sasaran kegiatan, atau populasi yang relevan
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indeks, semakin aktif masyarakat terlibat dalam memahami dan mengapresiasi sejarah lokal.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya

Nama Indikator	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan
Definisi	**Indeks Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan** adalah indikator kuantitatif yang mengukur proporsi elemen warisan budaya (baik benda maupun takbenda) yang telah dilakukan upaya pelestarian terhadap total keseluruhan warisan budaya yang telah teridentifikasi dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (\%)} = \frac{\text{Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan}}{\text{Jumlah Total Warisan Budaya yang Terdaftar}} \times 100$ Keterangan : • Jumlah Warisan Budaya yang Dilestarikan = Jumlah warisan budaya (baik benda maupun tak benda) yang masih dilestarikan, dijaga, dan dikembangkan melalui kegiatan budaya seperti pelatihan, pameran, festival, atau pengakuan resmi (seperti yang terdaftar sebagai warisan budaya tak benda atau benda oleh pemerintah). • Jumlah Total Warisan Budaya yang Terdaftar = Semua jenis warisan budaya (baik yang dilestarikan maupun yang tidak dilestarikan) yang terdaftar di suatu wilayah berdasarkan data resmi atau hasil inventarisasi warisan budaya.
Interpretasi	Menunjukkan tingkat komitmen dan efektivitas dalam pelestarian budaya. Semakin tinggi persentasenya, semakin banyak elemen budaya yang terjaga keberlanjutannya.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan Permuseuman

Nama Indikator	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum
Definisi	Indeks Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum adalah indikator yang mengukur proporsi jumlah kunjungan wisatawan ke museum dibandingkan dengan total jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.Indeks ini mencerminkan tingkat minat dan partisipasi wisatawan terhadap destinasi wisata edukatif dan budaya seperti museum.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kunjungan} = \frac{\text{Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Museum}}{\text{Total Potensi Wisatawan atau Target Kunjungan}} \times 100\%$ Keterangan : • Total Potensi Wisatawan: Ini adalah perkiraan total jumlah wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di mana museum tersebut berada

	dalam periode waktu yang sama. Ini memberikan gambaran pangsa pasar museum dalam industri pariwisata lokal. • Target Kunjungan: Ini adalah target jumlah kunjungan wisatawan yang telah ditetapkan oleh pihak museum atau pemerintah daerah untuk periode waktu tersebut. Ini mengukur tingkat pencapaian target kunjungan museum.
Interpretasi	Menunjukkan daya tarik dan kontribusi museum sebagai tujuan wisata. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar ketertarikan wisatawan terhadap nilai sejarah dan budaya melalui kunjungan ke museum.
Sumber Data	Dinas Kebudayaan
Frekuensi	Tahunan

URUSAN PERPUSTAKAAN

Program Pembinaan Perpustakaan

Nama Indikator	**Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat**
Definisi	Mengukur nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
Rumus Perhitungan	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian kegemaran membaca masyarakat
Satuan Hasil	61,57%
Definisi Operasional	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat yang diukur menggunakan survei/kajian adalah kegemaran membaca masyarakat disuatu pemerintah daerah dengan mengukur 3 dimensi: Pra Membaca, Saat Membaca, Pasca Membaca dengan sejumlah variabel seperti: Pra Membaca dengan variabel (Motivasi membaca, Model akses dan kebiasaan membaca, Pembelajaran sosial, Konsep budaya literasi). Saat Membaca dengan variabel (Perilaku membaca, Literasi sosial). Pasca Membaca dengan variabel (Dampak membaca, Nilai Harapan) untuk Penetapan sampel (minimal 400 responden dengan usia membaca penduduk berusia 15-69 tahun di Kabupaten/Kota).
Data Pendukung	Dibuktikan dengan dokumen pendukung yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah disertai dengan kop surat dan stempel resmi dengan melampirkan nilai tingkat kegemaran membaca yang bersumber dari buku indeks kegemaran membaca yang diterbitkan oleh Perpustakaan Nasional. Sumber Data: Perpustakaan Nasional RI
Regulasi	Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan Peraturan Perpustakaan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Akademi Literasi

Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno

Nama Indikator	Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan dan Didaftarkan
Definisi	Persentase Koleksi Nasional dan Naskah Kuno yang Dimiliki

	adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah koleksi nasional dan naskah kuno yang berhasil dihimpun, didaftarkan, dan dimiliki oleh pemerintah daerah (melalui museum, perpustakaan, lembaga adat, dll.), dibandingkan dengan total koleksi dan naskah kuno yang teridentifikasi atau diperkirakan ada di wilayah tersebut.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan dan Didaftarkan} = \frac{\text{Jumlah Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan dan Didaftarkan}}{\text{Jumlah Total Rencana Naskah Kuno Milik Daerah yang Dilestarikan dan Didaftarkan}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Koleksi/Naskah yang Dimiliki: Koleksi/naskah kuno yang telah didata, diamankan, dikelola, dan tercatat resmi oleh instansi pemerintah daerah. • Koleksi/Naskah Teridentifikasi: Semua koleksi/naskah kuno yang terdeteksi ada di wilayah, baik sudah dimiliki maupun belum (masih di masyarakat/lembaga adat/pribadi). • Output: Persentase kepemilikan formal terhadap potensi koleksi nasional di daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik upaya pelestarian koleksi Naskah Kuno Milik Daerah
Sumber Data	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan

URUSAN KEARSIPAN

Program Pengelolaan Arsip

Nama Indikator	Tingkat Ketersediaan Arsip
Definisi	Tingkat Ketersediaan Arsip adalah ukuran yang menunjukkan persentase arsip yang tersedia, teridentifikasi, dan dapat diakses kembali ketika dibutuhkan dari keseluruhan arsip yang seharusnya tersedia di suatu unit kerja atau instansi pemerintahan.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Ketersediaan Arsip} = \frac{\text{Jumlah Arsip yang Tersedia dan Siap Diakses}}{\text{Jumlah Total Arsip yang Seharusnya Tersedia}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Arsip yang Tersedia dan Siap Diakses = Arsip yang tersimpan secara baik, teridentifikasi, dan dapat ditemukan kembali dalam waktu cepat saat dibutuhkan, baik fisik maupun digital. • Total Arsip yang Seharusnya Tersedia = Seluruh arsip yang seharusnya diciptakan dan disimpan oleh unit kerja sesuai ketentuan retensi dan kewajiban fungsional.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin siap dan tertib pengelolaan arsip instansi tersebut
Sumber Data	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan

Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip

Nama Indikator	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
Definisi	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip adalah ukuran yang menunjukkan persentase jumlah arsip vital, arsip statis, dan arsip bernilai guna tinggi yang telah mendapat perlindungan dan penyelamatan secara fisik maupun digital oleh instansi pemerintah daerah terhadap total arsip yang seharusnya dilindungi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip} = \frac{\text{Jumlah Arsip yang Telah Dilindungi dan Diselamatkan}}{\text{Jumlah Total Arsip yang Wajib Dilindungi}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Arsip yang Telah Dilindungi dan Diselamatkan = Arsip yang telah: ➢ Disimpan di ruang arsip sesuai standar keamanan (suhu, kelembaban, keamanan fisik) ➢ Diduplikasi atau didigitalisasi ➢ Dilengkapi backup ➢ Termasuk dalam sistem mitigasi risiko (bencana, kebakaran, banjir, dll.) • Total Arsip yang Wajib Dilindungi = Arsip vital, arsip statis, atau arsip bernilai sejarah tinggi yang sudah teridentifikasi sebagai arsip penting.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik upaya pelestarian dan penyelamatan arsip strategis pemerintah daerah
Sumber Data	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Frekuensi	Tahunan

URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Nama Indikator	Produktivitas Perikanan Budidaya
Definisi	Produktivitas Perikanan Budidaya adalah ukuran efisiensi kegiatan budidaya perikanan dalam menghasilkan jumlah produksi komoditas perikanan dalam satuan waktu atau luasan lahan tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Produktivitas Perikanan Budidaya} = \frac{\text{Jumlah Total Produksi Perikanan Budidaya}}{\text{Luas Kolam Budidaya}}$ Keterangan: • Produktivitas Perikanan Budidaya (kg/ m^2) • Total Produksi Perikanan (Budidaya) dari seluruh kecamatan yang ada. • Luas kolam budidaya seluruh kecamatan
Interpretasi	Semakin meningkat jumlah produksi ikan budidaya, semakin tinggi produktivitas perikanan budidaya
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi	Tahunan

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Nama Indikator	Angka Konsumsi Ikan

Definisi	Angka konsumsi ikan (AKI) adalah ukuran yang menunjukkan rata-rata jumlah ikan yang di konsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah (perkapita pertahun).
Rumus Perhitungan	AKI = A + B + C Dimana : A = Konsumsi ikan di dalam rumah tangga (Data Susenas) B = Konsumsi ikan di luar rumah tangga (63,29% x A) C = Konsumsi ikan yang tidak tercatat Koef C : (3,70% x (A+B)) Angka C : Koef C/(A+B) x 100
Interpretasi	Semakin tinggi persentase Angka Konsumsi Ikan, semakin meningkat jumlah konsumsi ikan di masyarakat
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi	Tahunan

URUSAN PARIWISATA

Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Nama Indikator	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (Ribu orang)
Definisi	Jumlah tamu asing yang menginap di hotel berbintang di Kota Sawahlunto
Rumus Perhitungan	Data jumlah asing (di setiap Hotel berbintang daerah tertentu dalam periode 1 (satu) tahun
Interpretasi	Semakin banyak jumlah tamu asing yang menginap di hotel berbintang di Kota Sawahlunto maka akan semakin meningkatkan devisa dari sektor pariwisata.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik; Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

Program Pemasaran Pariwisata

Nama Indikator	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata
Definisi	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata adalah tingkat pertumbuhan jumlah media promosi dan pemasaran yang digunakan oleh pemerintah daerah dan/atau pelaku pariwisata untuk mempromosikan destinasi, event, dan potensi pariwisata daerah dalam periode waktu tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata} = \frac{\text{Jumlah Media Pemasaran Pariwisata (Tahun N) - Jumlah Media Pemasaran Pariwisata (Tahun N-1)}}{\text{Jumlah Media Pemasaran Pariwisata (Tahun N-1)}} \times 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, menunjukkan upaya promosi pariwisata yang semakin masif dan modern

Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

Program Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Nama Indikator	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual
Definisi	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual adalah proporsi pelaku usaha atau individu dalam sektor ekonomi kreatif yang telah memiliki perlindungan hukum melalui pendaftaran Kekayaan Intelektual (KI) seperti hak cipta, merek dagang, desain industri, paten, atau indikasi geografis terhadap total pelaku ekonomi kreatif dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Ekraf yang Memiliki KI}}{\text{Jumlah Total Pelaku Ekraf}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Jumlah Pelaku Ekraf yang Memiliki KI: Individu/badan usaha ekonomi kreatif yang memiliki sertifikat KI aktif • Total Pelaku Ekraf: Seluruh pelaku usaha ekonomi kreatif yang tercatat aktif di daerah • Jenis KI dapat berupa: hak cipta, merek, paten, desain industri, dll
Interpretasi	Nilai tinggi berarti tingkat legalitas dan perlindungan karya ekraf meningkat
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nama Indikator	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi
Definisi	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi adalah proporsi pelaku usaha di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang masih menjalankan aktivitas usaha dan telah terverifikasi atau tervalidasi melalui proses identifikasi oleh pemerintah daerah, asosiasi resmi, atau lembaga terkait, dibandingkan dengan total pelaku yang terdata.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi} = \frac{\text{Jumlah Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi}}{\text{Jumlah Total Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Pelaku Aktif dan Tervalidasi : Pelaku usaha yang masih menjalankan kegiatan usaha, memiliki identitas yang sah/diverifikasi (NPWP, NIB, izin usaha, atau diverifikasi oleh dinas/komunitas)

	• Total Pelaku Terdata : Semua pelaku parekraf yang tercatat dalam database daerah (baik yang aktif maupun tidak aktif)
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, berarti data semakin akurat dan usaha parekraf aktif lebih banyak
Sumber Data	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga
Frekuensi	Tahunan

URUSAN PERTANIAN

Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian

Nama Indikator	Persentase Sawah yang Diairi
Defenisi	Persentase Sawah yang terairi adalah ukuran yang menunjukkan peningkatan jumlah atau proporsi fasilitas dan infrastruktur pendukung kegiatan pertanian, dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Ini mengindikasikan pertumbuhan atau perbaikan dalam penyediaan fasilitas seperti irigasi, jalan usaha tani, gudang, dan alat pertanian lain yang penting untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi sektor pertanian
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Sawah yang Terairi} = \frac{\text{Jumlah Sawah yang Terairi (ha)}}{\text{Luas Baku Sawah (ha)}} \times 100\%$ Keterangan Rumus : - Sawah yang terairi merupakan upaya untuk membangun, meningkatkan atau memperluas sistem yang sudah ada atau penambahan luas area yang dilayani dalam penambahan sawah yang terairi - Luas baku sawah yaitu luas sawah di Kota Sawahlunto yaitu luas sawah tadah hujan dan irigasi
Interpretasi	Semakin baik dan lengkapnya prasarana pertanian akan berkorelasi positif terhadap peningkatan produksi, produktivitas dan kesejahteraan petani, karena tersedianya fasilitas utama untuk proses produksi.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi	Tahunan

Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Nama Indikator	Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular
Defenisi	Ukuran yang menunjukkan seberapa besar pengurangan jumlah kasus penyakit hewan menular pada periode tertentu dibandingkan periode sebelumnya yang diukur dalam satuan persentase
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penurunan Kejadian dan Jumlah Kasus Penyakit Hewan Menular} = \frac{\text{Jumlah kejadian (kasus) penyakit hewan menular tahun berjalan (t) - Jumlah kejadian (kasus) hewan menular tahun sebelumnya (t - 1)}}{\text{Jumlah kejadian (kasus) hewan menular tahun sebelumnya (t - 1)}} \times 100\ \%$ Keterangan Rumus : Jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun

	sebelumnya adalah Jumlah keseluruhan kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun pelaporan dikurangi jumlah keseluruhan kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus PHM, semakin rendah kejadian dan jumlah kasus PHM di tahun berjalan
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi	Tahunan

Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian

Nama Indikator	Persentase Penanganan Bencana Pertanian
Definisi	Persentase Penanganan Bencana Pertanian adalah indikator yang menggambarkan proporsi kejadian bencana di sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan) yang telah mendapatkan tindakan penanganan atau intervensi, baik berupa bantuan benih, pakan, vaksin, relokasi, rehabilitasi, maupun pemulihan lahan dan produksi. Bencana pertanian dapat meliputi bencana alam (banjir, kekeringan, longsor, gempa), bencana non-alam (serangan hama penyakit tanaman/hewan), serta bencana sosial yang berdampak pada produksi dan distribusi hasil pertanian.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penanganan Bencana Pertanian} = \left(\frac{\text{Jumlah Kejadian Bencana yang Tertangani}}{\text{Jumlah Total Kejadian Bencana Pertanian}}\right) \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi nilai indikator, semakin responsif dan efektif pemerintah dalam menangani bencana pertanian.
Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan
Frekuensi	Tahunan

Program Penyuluhan Pertanian

Nama Indikator	Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang Jabatan
Defenisi	Persentase penyuluh yang naik jenjang jabatan fungsional sangat ditentukan oleh kualitas SDM masing-masing penyuluh pertanian yang diuji oleh kementerian pertanian melalui uji kompetensi, kenaikan jabatan fungsional ditentukan oleh angka kredit yang dikumpulkan atas prestasi kerja penyuluh melalui kegiatan penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang berkembang baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang Jabatan} = \frac{\text{Jumlah Penyuluh yang Naik Jenjang Jabatan}}{\text{Jumlah Total Penyuluh}} \times 100\ \%$ Keterangan Rumus : - Jumlah Penyuluh Ahli Muda yang naik jenjang ke Madya - Total keseluruhan penyuluh kecuali Penyuluh Madya
Interpretasi	Semakin tingginya persentase penyuluh naik jenjang jabatan mencerminkan semakin tingginya sumberdaya manusia (SDM) penyuluh pertanian dalam mendampingi petani dalam proses budidaya yang semakin berkembang.

Sumber Data	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
Frekuensi	Tahunan

URUSAN PERDAGANGAN

Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan

Nama Indikator	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya
Definisi	Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya adalah proporsi sarana atau infrastruktur perdagangan (seperti pasar rakyat, toko kelontong, kios, los, atau fasilitas distribusi perdagangan lainnya) yang telah dilakukan peningkatan kualitas fisik dan/atau manajemen oleh pemerintah daerah dalam periode tertentu dibandingkan dengan total jumlah sarana perdagangan yang ada dan membutuhkan peningkatan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan}\ (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Sarana yang Ditingkatkan}}{\text{Total Sarana yang Direncanakan untuk Ditingkatkan}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Sarana yang Ditingkatkan: Jumlah unit sarana perdagangan yang telah ditingkatkan kualitasnya (secara fisik, fungsional, atau manajerial) dalam periode tertentu. • Total Sarana yang Direncanakan: Jumlah total sarana perdagangan yang telah diidentifikasi membutuhkan peningkatan kualitas berdasarkan hasil pendataan atau rencana kerja.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, menunjukkan meningkatnya kualitas sarana perdagangan
Sumber Data	Diskoperindag
Frekuensi	Tahunan

Program Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting

Nama Indikator	Persentase Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Definisi	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (Bapokting) adalah persentase jumlah komoditas kebutuhan pokok dan barang penting yang harganya tetap stabil atau terkendali sesuai dengan Harga Acuan Pemerintah (HAP), dibandingkan dengan total seluruh komoditas Bapokting yang dipantau dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Stabilisasi Harga}\ (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Komoditas yang Harganya Stabil}}{\text{Total Komoditas yang Dipantau}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Komoditas yang Harganya Stabil: Komoditas Bapokting yang tidak mengalami kenaikan/penurunan harga di luar batas wajar selama periode tertentu.

	• Total Komoditas yang Dipantau: Jumlah total komoditas Bapokting yang menjadi objek pemantauan harga.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin efektif pemerintah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok masyarakat
Sumber Data	Diskoperindag
Frekuensi	Mingguan, Bulanan, atau Tahunan

Program Pengembangan Ekspor

Nama Indikator	Nilai Ekspor Barang
Definisi	Nilai Ekspor Barang adalah total nilai ekonomi dari seluruh barang yang dikirim dari suatu wilayah (provinsi/kabupaten/kota/negara) ke luar negeri dalam periode tertentu, dinyatakan dalam satuan mata uang (biasanya USD atau Rupiah). Nilai ini dihitung berdasarkan Free on Board (FOB), yaitu nilai barang sampai di pelabuhan muat, tidak termasuk biaya pengiriman dan asuransi.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai Ekspor Barang (FOB)} = \sum(\text{Volume Ekspor} \times \text{Harga per Unit})$ Keterangan : • Volume Ekspor: Jumlah barang yang diekspor (dalam satuan kg, ton, liter, dsb.). • Harga per Unit: Nilai per satuan barang pada saat transaksi ekspor. • FOB (Free on Board): Nilai barang saat berada di pelabuhan ekspor tanpa ongkos kirim dan asuransi.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai Ekspor, semakin besar kontribusi daerah terhadap perekonomian dan pertumbuhan ekonomi
Sumber Data	Badan Pusat Statistik (BPS)
Frekuensi	Bulanan, Triwulanan, Tahunan

Program Standarisasi Dan Perlindungan Konsumen

Nama Indikator	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen
Definisi	Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen adalah persentase jumlah pengaduan dari konsumen yang berhasil ditindaklanjuti atau diselesaikan oleh instansi berwenang (misalnya Dinas Perdagangan atau Badan Perlindungan Konsumen) terhadap total pengaduan yang masuk dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penanganan Pengaduan Konsumen (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Pengaduan yang Ditangani}}{\text{Jumlah Pengaduan yang Masuk}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Pengaduan yang Ditangani: Pengaduan yang telah mendapatkan tindak lanjut atau penyelesaian. • Jumlah Pengaduan yang Masuk: Seluruh pengaduan konsumen yang diterima secara formal, baik melalui offline maupun online.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin tinggi kinerja pelayanan pengaduan yang baik dan perlindungan konsumen yang efektif
Sumber Data	Diskoperindag

Frekuensi	Bulanan, Triwulanan, Tahunan

Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri

Nama Indikator	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi (Dilaksanakan)
Definisi	Persentase Promosi Produk Lokal yang Difasilitasi/Dilaksanakan adalah perbandingan antara jumlah kegiatan promosi produk lokal yang difasilitasi atau dilaksanakan oleh pemerintah daerah (secara langsung atau tidak langsung), terhadap jumlah total kegiatan promosi yang direncanakan atau diajukan dalam satu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Promosi yang Difasilitasi}\ (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Kegiatan Promosi yang Difasilitasi}}{\text{Jumlah Total Kegiatan Promosi yang Direncanakan/Diajukan}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Kegiatan Promosi yang Difasilitasi: Kegiatan promosi produk lokal yang benar-benar dilaksanakan dengan dukungan pemerintah daerah. • Jumlah Total Kegiatan yang Direncanakan: Termasuk usulan promosi dari pelaku usaha, program kerja dinas, atau rencana tahunan promosi daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan dukungan aktif pemerintah terhadap pengembangan produk lokal
Sumber Data	Diskoperindag
Frekuensi	Tahunan

URUSAN PERINDUSTRIAN

Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri

Nama Indikator	Persentase Realisasi investasi sektor industri dan Kawasan industri
Definisi	Persentase Realisasi Investasi Sektor Industri dan Kawasan Industri adalah persentase dari jumlah realisasi investasi yang telah direalisasikan oleh pelaku usaha (dalam negeri maupun asing) di sektor industri dan kawasan industri terhadap total nilai target investasi yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah atau pusat dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Realisasi Investasi}\ (\%) = \left(\frac{\text{Nilai Realisasi Investasi}}{\text{Target Nilai Investasi}}\right) \times 100$ Keterangan : • Nilai Realisasi Investasi: Nilai aktual investasi yang telah masuk dan dilaporkan secara resmi. • Target Nilai Investasi: Nilai investasi yang ditetapkan sebagai target oleh pemerintah dalam satu tahun atau periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan semakin optimalnya pelaksanaan program promosi investasi dan minat investor terhadap sektor industri daerah
Sumber Data	Diskoperindag
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Proporsi Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Definisi	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah merupakan perbandingan jumlah unit industri kecil dan menengah terhadap seluruh unit industri pada tahun yang sama.
Rumus Perhitungan	$Proporsi\ IKM = \frac{Jumlah\ Unit\ Industri\ Kecil\ dan\ Menengah}{Total\ Jumlah\ Unit\ Industri} x100\%$
Interpretasi	Industri kecil dan menengah (UKM) merepresentasikan bagian dari industri mikro, kecil dan menengah yang cenderung sudah formal dan berorientasi untuk tumbuh. Meningkatnya proporsi IKM yang diiringi dengan menurunnya proporsi industri mikro dapat mengindikasikan adanya kenaikan skala usaha dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.
Sumber Data	Badan Pusat Statistik, Dinas Koperasi, Perindustrian, Perdagangan dan UKM
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Nama Indikator	Persentase Pertumbuhan Informasi Industri
Definisi	Pertumbuhan informasi industri diperoleh dengan membandingkan ketersediaan informasi industri tahun ini dengan ketersediaan informasi industri tahun lalu, dibagi dengan ketersediaan informasi industri tahun lalu
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pertumbuhan Informasi Industri} = \frac{\text{Jumlah Informasi Industri Tahun Ini - Jumlah Informasi Industri Tahun Lalu}}{\text{Jumlah Informasi Industri Tahun Lalu}} \text{ x } 100\ \%$
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin berkualitas informasi industri yang dapat diakses dan digunakan
Sumber Data	Diskoperindag
Frekuensi	Tahunan

UNSUR SEKRETARIAT DAERAH

Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat

Nama Indikator	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat
Definisi	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan hak dasar dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, perlindungan sosial, dan budaya.

Rumus Perhitungan	$\text{Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Kesra}\ (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Intervensi yang Efektif}}{\text{Jumlah Program/Intervensi yang Direncanakan}}\right) \times 100$ Keterangan: • Program/Intervensi yang Efektif: Kegiatan yang sesuai target output dan outcome-nya, tercapai tepat waktu, dan berdampak pada peningkatan kesejahteraan rakyat. • Program/Intervensi yang Direncanakan: Seluruh program yang termasuk dalam kebijakan kesejahteraan rakyat pada tahun berjalan.
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sosial telah berjalan optimal dan berdampak nyata
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan
Definisi	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan adalah ukuran keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), berdasarkan indikator dan kriteria yang ditetapkan dalam sistem evaluasi kinerja.
Rumus Perhitungan	$\text{Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pemerintahan} = \frac{\text{Jumlah Program/Intervensi yang Efektif}}{\text{Jumlah Program/Intervensi yang Direncanakan}} \times 1$ Keterangan: • Program/Intervensi yang Efektif: Kegiatan yang sesuai target output dan outcome-nya, tercapai tepat waktu, dan berdampak pada peningkatan kinerja pemerintahan. • Program/Intervensi yang Direncanakan: Seluruh program yang termasuk dalam kebijakan pemerintahan pada tahun berjalan.
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan pemerintahan telah berjalan optimal dan berdampak nyata
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Indeks Reformasi Hukum
Definisi	Indeks Reformasi Hukum (IRH) adalah instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi nasional. Reformasi Hukum adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan di bidang hukum dalam upaya penataan regulasi yang berkualitas bersih dan akuntabel pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

	Indeks Reformasi Hukum No / Kategori / Nilai/Angka / Prediket 1 AA > 90 - 100 Istimewa 2 A > 80 - 90 Sangat Baik 3 BB > 70 - 80 Baik 4 B > 60 - 70 Cukup Baik 5 CC > 50 - 60 Cukup 6 C > 30 - 50 Buruk 7 D 0 - 30 Sangat Buruk Pada penghitungan IRH, Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self-assesment*) yang menghasilkan Berita Acara Hasil Penilaian Mandiri. Kemudian, Kementerian Hukum dan HAM akan melakukan verifikasi terhadap *self-assesment* tersebut dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Penilaian.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai IRH, maka semakin berhasil pelaksanaan komponen-komponen reformasi hukum oleh lembaga yang bersangkutan.
Sumber Data	Kementerian Hukum dan HAM
Frekuensi	Tahunan

Program Perekonomian Dan Pembangunan

Nama Indikator	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan
Definisi	Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan adalah ukuran sejauh mana kebijakan pemerintah daerah dalam bidang ekonomi dan pembangunan dijalankan sesuai rencana, tepat sasaran, menghasilkan output dan outcome yang relevan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan, dan peningkatan kualitas infrastruktur serta layanan publik.
Rumus Perhitungan	$\text{Efektivitas}\,(\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan Ekonomi-Pembangunan yang Efektif}}{\text{Jumlah Program/Kegiatan yang Direncanakan}}\right) \times 100$ Keterangan : • Program/Kegiatan yang Efektif = Program/kegiatan yang mencapai target output & outcome, tepat waktu, tepat anggaran, dan berdampak positif pada sektor ekonomi/pembangunan. • Program/Kegiatan yang Direncanakan = Total program/kegiatan di bidang ekonomi dan pembangunan dalam RKPD atau Renstra OPD.

Interpretasi	Semakin tinggi nilai efektivitas, menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah dalam pengelolaan sektor ekonomi dan pembangunan
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Efektivitas kebijakan administrasi pembangunan
Definisi	Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan adalah ukuran sejauh mana kebijakan, regulasi, dan mekanisme administratif yang diterapkan oleh pemerintah daerah dalam rangka pelaksanaan pembangunan mampu mendukung kelancaran proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan secara efisien, tepat waktu, dan sesuai sasaran.
Rumus Perhitungan	$\text{Efektivitas Administrasi Pembangunan } (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah kebijakan administrasi pembangunan yang efektif}}{\text{Jumlah kebijakan administrasi pembangunan yang direncanakan}} \right) \times 100$ Keterangan : • Kebijakan yang efektif: Kebijakan administratif (dokumen, SOP, regulasi, prosedur) yang diterapkan secara tepat waktu, sesuai tujuan, dan menghasilkan dampak positif terhadap penyelenggaraan pembangunan. • Kebijakan yang direncanakan: Total kebijakan administratif pembangunan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan.
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan tata kelola pembangunan yang baik secara administratif dan fungsional
Sumber Data	Sekretariat Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Tingkat kematangan UKPBJ
Definisi	Tingkat Kematangan UKPBJ (Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa) adalah ukuran capaian tingkat pengembangan kelembagaan UKPBJ di suatu daerah berdasarkan indikator yang ditetapkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), mencakup aspek kelembagaan, SDM, proses bisnis, sistem informasi, dan peran strategis UKPBJ.
Rumus Perhitungan	$\text{Tingkat Kematangan UKPBJ } (\%) = \left(\frac{\text{Nilai Skor Kematangan Saat Ini}}{\text{Nilai Skor Maksimum}} \right) \times 100$ Keterangan : • Nilai Skor Kematangan Saat Ini: Total nilai penilaian dari LKPP berdasarkan indikator penilaian (biasanya menggunakan kuesioner atau instrumen penilaian mandiri/evaluasi eksternal). • Nilai Skor Maksimum: Nilai maksimal yang dapat dicapai sesuai indikator LKPP (biasanya 100 poin atau sesuai bobot terkini).
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin matang dan strategis peran UKPBJ dalam mendukung belanja daerah
Sumber Data	Sekretariat Daerah

Frekuensi	Tahunan

UNSUR PERENCANAAN

Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD
Definisi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD adalah ukuran persentase kesesuaian antara program dan kegiatan prioritas tahunan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan arah kebijakan, strategi, dan sasaran pembangunan jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Total Program/Kegiatan RKPD}}\right) \times 100$ Keterangan : • Program/Kegiatan RKPD yang Selaras: Program dan kegiatan dalam RKPD yang mendukung langsung pencapaian sasaran, indikator, atau arah kebijakan RPJMD. • Total Program/Kegiatan RKPD: Seluruh program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD tahun berjalan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin selaras perencanaan tahunan terhadap arah pembangunan jangka menengah
Sumber Data	Barenlitbangda
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD
Definisi	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra Perangkat Daerah (PD) adalah ukuran persentase kesesuaian antara tujuan, sasaran, indikator kinerja, dan program yang tercantum dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dengan arah kebijakan, sasaran, dan program prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Komponen Renstra PD yang Selaras dengan RPJMD}}{\text{Total Komponen yang Dinilai}}\right) \times 100$ Keterangan : • Komponen Renstra PD yang Selaras: Komponen dalam dokumen Renstra PD (tujuan, sasaran, indikator, dan program) yang sesuai atau mendukung RPJMD. • Total Komponen yang Dinilai: Total keseluruhan komponen strategis dalam seluruh Renstra PD yang relevan untuk dievaluasi keselarasan terhadap RPJMD.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, semakin tinggi keselarasan perencanaan strategis perangkat daerah terhadap RPJMD
Sumber Data	Barenlitbangda
Frekuensi	Tahunan

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia
Definisi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia adalah ukuran tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan umum dan pembangunan manusia (seperti pendidikan, kesehatan, sosial, dan administrasi pemerintahan).
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan dalam RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Jumlah Total Program/Kegiatan dalam Renja PD}}\right) \times 100$ Keterangan : • Program/Kegiatan yang Selaras: Program dan kegiatan dalam RKPD yang sesuai dengan atau diadopsi dari dokumen Renja perangkat daerah pada bidang pemerintahan dan pembangunan manusia. • Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD: Seluruh program/kegiatan tahunan yang diusulkan oleh perangkat daerah yang menangani urusan bidang tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin terintegrasi dan sinkron rencana kerja tahunan daerah dan perangkat daerah
Sumber Data	Barenlitbangda
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Definisi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah indikator yang mengukur sejauh mana program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah selaras atau konsisten dengan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah (PD) yang membidangi infrastruktur dan kewilayahan, seperti pekerjaan umum, perumahan, perhubungan, dan penataan ruang.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Total Program/Kegiatan Renja PD}}\right) \times 100$ Keterangan : • Program/Kegiatan Selaras: Kegiatan/program di RKPD yang sejalan atau sama dengan kegiatan/program di Renja PD bidang infrastruktur dan kewilayahan. • Total Program/Kegiatan Renja PD: Jumlah seluruh kegiatan atau program yang diusulkan oleh perangkat daerah teknis dalam Renja.
Interpretasi	Nilai lebih tinggi menandakan keselarasan dan konsistensi perencanaan yang baik
Sumber Data	Barenlitbangda
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA
Definisi	Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam adalah indikator yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah (PD) yang membidangi sektor ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Keselarasan}\ (\%) = \left(\frac{\text{Jumlah Program/Kegiatan RKPD yang Selaras dengan Renja PD}}{\text{Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD}}\right) \times 100$ Keterangan : • Program/Kegiatan Selaras: Program atau kegiatan yang direncanakan dalam RKPD dan juga terdapat (atau konsisten) dalam Renja PD bidang ekonomi dan SDA. • Jumlah Total Program/Kegiatan Renja PD: Seluruh program/kegiatan yang tercantum dalam Renja perangkat daerah ekonomi dan sumber daya alam.
Interpretasi	Nilai tinggi menunjukkan tingkat sinkronisasi yang baik antar dokumen
Sumber Data	Barenlitbangda
Frekuensi	Tahunan

UNSUR KEUANGAN

Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Nama Indikator	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik
Definisi	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik adalah indikator yang menunjukkan proporsi anggaran belanja daerah yang dialokasikan untuk pembangunan dan/atau peningkatan infrastruktur dasar guna mendukung pelayanan publik, dibandingkan dengan total belanja daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Alokasi Infrastruktur} = \left(\frac{\text{Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}}\right) \times 100$ Keterangan : • Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik: Pengeluaran yang dialokasikan untuk pembangunan atau pengembangan sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan publik. • Total Belanja Daerah: Seluruh belanja daerah baik belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga, dan transfer.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan prioritas pembangunan infrastruktur pelayanan publik
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD
Definisi	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD adalah indikator yang menunjukkan proporsi anggaran belanja pegawai

	(tidak termasuk tunjangan guru) yang didanai dari Transfer ke Daerah (TKD) terhadap total belanja pegawai secara keseluruhan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Belanja Pegawai Non-Guru dari TKD}}{\text{Total Belanja Pegawai}}\right) \times 100$ Keterangan : • Belanja Pegawai Non-Guru dari TKD: Total belanja pegawai yang tidak termasuk tunjangan guru yang berasal dari sumber pendanaan TKD (misalnya DAU, DAK non-fisik. • Total Belanja Pegawai: Seluruh belanja pegawai daerah, termasuk yang berasal dari PAD, DBH, maupun TKD.
Interpretasi	Nilai yang tinggi menunjukkan ketergantungan yang tinggi pada dana transfer pusat untuk belanja pegawai non-guru
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Definisi	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar adalah indikator yang menunjukkan tingkat serapan (realisasi) anggaran untuk program/kegiatan yang termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar, dibandingkan dengan total anggaran yang dialokasikan untuk urusan tersebut dalam satu tahun anggaran.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Realisasi}\ (\%) = \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar}}{\text{Total Anggaran Urusan Wajib Pelayanan Dasar}}\right) \times 100$ Keterangan : • Realisasi Anggaran: Jumlah anggaran yang benar-benar digunakan untuk pelaksanaan kegiatan urusan wajib pelayanan dasar sampai periode pelaporan (biasanya akhir tahun anggaran). • Total Anggaran: Total alokasi anggaran yang direncanakan dalam APBD untuk urusan wajib pelayanan dasar.
Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan efektivitas penyerapan anggaran pada layanan dasar masyarakat
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Penurunan SILPA
Definisi	Persentase Penurunan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) adalah indikator yang menggambarkan penurunan sisa anggaran yang tidak terserap pada akhir tahun anggaran, dibandingkan dengan SILPA pada tahun sebelumnya. SILPA yang semakin kecil menunjukkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan serta pelaksanaan anggaran.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penurunan SILPA} = \left(\frac{\text{SILPA Tahun Sebelumnya} - \text{SILPA Tahun Berjalan}}{\text{SILPA Tahun Sebelumnya}}\right) \times 100$ Keterangan : • SILPA Tahun Sebelumnya: Sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun anggaran sebelumnya.

	• SILPA Tahun Berjalan: Sisa lebih perhitungan anggaran dari tahun anggaran berjalan. • Jika hasil negatif, berarti terjadi peningkatan SILPA.
Interpretasi	Nilai positif: SILPA menurun (positif); Nilai negatif: SILPA meningkat
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu
Definisi	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu adalah indikator yang mengukur tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tepat Waktu} = \left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Tepat Waktu}}{\text{Total Perangkat Daerah}}\right) \times$ Keterangan : • Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Tepat Waktu: OPD yang mengirim laporan sebelum atau pada batas waktu. • Total Perangkat Daerah: Seluruh OPD yang wajib menyampaikan laporan keuangan.
Interpretasi	Semakin tinggi, semakin baik tata kelola pelaporan keuangan
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase laporan keuangan tepat waktu
Definisi	Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu adalah indikator yang mengukur tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tepat Waktu} = \left(\frac{\text{Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Tepat Waktu}}{\text{Total Perangkat Daerah}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Perangkat Daerah yang Menyampaikan Tepat Waktu: OPD yang mengirim laporan sebelum atau pada batas waktu. • Total Perangkat Daerah: Seluruh OPD yang wajib menyampaikan laporan keuangan.
Interpretasi	Semakin tinggi, semakin baik tata kelola pelaporan keuangan
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah

Nama Indikator	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap
Definisi	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap adalah indikator yang menunjukkan seberapa besar peningkatan nilai aset tetap (seperti tanah, bangunan, jalan, kendaraan, peralatan, dan mesin) milik pemerintah daerah dibandingkan dengan nilai aset tetap pada tahun sebelumnya. Peningkatan ini

	mencerminkan investasi pemerintah daerah dalam pengadaan, pembangunan, dan peningkatan sarana-prasarana publik.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap} = \left(\frac{\text{Nilai Aset Tetap Tahun Berjalan} - \text{Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya}}{\text{Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya}}\right) \times$ Keterangan : • Nilai Aset Tetap Tahun Sebelumnya: Total nilai aset tetap yang tercatat dalam neraca akhir tahun lalu. • Nilai Aset Tetap Tahun Berjalan: Total nilai aset tetap pada akhir tahun anggaran berjalan, setelah proses penambahan, penghapusan, dan revaluasi jika ada.
Interpretasi	Nilai positif: terjadi penambahan aset; Nilai negatif: terjadi penurunan aset
Sumber Data	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Frekuensi	Tahunan

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Nama Indikator	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah
Definisi	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah adalah indikator yang mengukur proporsi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan daerah dalam satu tahun anggaran. Indikator ini mencerminkan tingkat kemandirian fiskal daerah dan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan sendiri.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah} = \left(\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}\right) \times 100$ Keterangan : • PAD: Total Pendapatan Asli Daerah yang diterima dalam satu tahun anggaran. • Total Pendapatan Daerah: Jumlah keseluruhan penerimaan daerah, termasuk PAD, Dana Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin mandiri keuangan daerah tersebut
Sumber Data	Laporan Realisasi APBD
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

Nama Indikator	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital
Definisi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital adalah indikator yang menunjukkan proporsi unit kerja/OPD yang telah mengimplementasikan sistem informasi keuangan berbasis digital dibandingkan dengan total unit kerja/OPD yang seharusnya menerapkannya. Sistem informasi ini mencakup perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban keuangan secara elektronik dan terintegrasi.

Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Penerapan SI Keuangan Digital (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah OPD yang Menerapkan}}{\text{Jumlah Seluruh OPD}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah OPD yang Menerapkan: Unit kerja/OPD yang telah menggunakan sistem informasi keuangan berbasis digital dalam seluruh atau sebagian besar proses pengelolaan keuangan. • Jumlah Seluruh OPD: Total seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintahan yang seharusnya mengadopsi sistem tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi persentasenya, semakin tinggi tingkat digitalisasi pengelolaan keuangan daerah
Sumber Data	BPKAD / Bapenda
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan
Definisi	Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan adalah persentase jumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola pendapatan daerah yang telah dibina dan diawasi dalam satu tahun anggaran dibandingkan dengan total OPD yang memiliki kewenangan pengelolaan pendapatan.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah OPD yang Dibina dan Diawasi}}{\text{Jumlah OPD Pengelola Pendapatan}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah OPD yang Dibina dan Diawasi: OPD yang telah menerima kegiatan pembinaan dan/atau pengawasan, baik melalui sosialisasi, asistensi teknis, audit internal, monitoring atau evaluasi. • Jumlah OPD Pengelola Pendapatan: OPD yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah seperti pajak, retribusi, dan lain-lain PAD.
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan, menunjukkan pembinaan dan pengawasan berjalan optimal
Sumber Data	Laporan kegiatan pembinaan dan pengawasan
Frekuensi	Triwulanan dan Tahunan

UNSUR KEPEGAWAIAN

Program Kepegawaian Daerah

Nama Indikator	Persentase Perencanaan Kebutuhan yang sesuai dengan Formasi
Definisi	Persentase Perencanaan Kebutuhan ASN yang Sesuai dengan Formasi adalah ukuran yang menggambarkan sejauh mana rencana kebutuhan ASN (baik CPNS maupun PPPK) yang diajukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan formasi yang telah ditetapkan oleh

	pemerintah pusat, baik dari segi jumlah, jabatan, maupun kualifikasi.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kesesuaian Perencanaan ASN (\%)} = \left(\frac{\text{Jumlah Rencana Kebutuhan yang Disetujui Sesuai Formasi}}{\text{Jumlah Total Rencana Kebutuhan yang Diajukan}}\right) \times 100$ Keterangan: • Jumlah Rencana Kebutuhan yang Disetujui Sesuai Formasi: Rencana kebutuhan ASN yang sesuai dengan formasi jabatan, kualifikasi, serta jumlah yang disetujui oleh Kementerian PANRB dan BKN. • Jumlah Total Rencana Kebutuhan yang Diajukan: Semua usulan kebutuhan ASN dari pemerintah daerah.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin tepat perencanaan ASN oleh instansi
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)/BKPSDM
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya
Definisi	Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya adalah ukuran yang menunjukkan proporsi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah mengikuti program pengembangan kompetensi (seperti diklat, bimtek, workshop, pelatihan teknis, pelatihan manajerial, dan pelatihan fungsional) dalam periode tertentu dibandingkan dengan total ASN yang ada.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase ASN yang Ditingkatkan Kompetensinya} = \left(\frac{\text{Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan}}{\text{Total Jumlah ASN}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan: ASN yang terdaftar dan telah mengikuti pengembangan kompetensi selama periode tertentu, baik secara daring maupun luring. • Total Jumlah ASN: Seluruh ASN aktif dalam lingkup instansi pemerintah yang bersangkutan pada periode pelaporan.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, semakin baik pengelolaan pengembangan kompetensi ASN
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya
Definisi	Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai dengan Kompetensinya adalah ukuran yang menunjukkan proporsi ASN yang mendapatkan promosi atau mutasi jabatan yang sejalan dengan kompetensi, kualifikasi, dan pengembangan yang telah mereka ikuti, dibandingkan dengan total ASN yang mengalami pengembangan karir.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pengembangan Karir ASN Sesuai Kompetensi} = \left(\frac{\text{Jumlah ASN yang Dikembangkan Karirnya Sesuai Kompetensi}}{\text{Jumlah Total ASN yang Dikembangkan Karirnya}}\right) \times 100$ Keterangan :

	• ASN yang Dikembangkan Karirnya Sesuai Kompetensi: ASN yang dipromosikan, dimutasi, atau diberikan jabatan sesuai dengan hasil uji kompetensi, pelatihan, pengalaman, dan latar belakang pendidikannya. • Jumlah Total ASN yang Dikembangkan Karirnya: Seluruh ASN yang mengalami mobilitas jabatan (promosi/mutasi) dalam periode tertentu.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan manajemen karir ASN berbasis kompetensi
Sumber Data	BKD/BKPSDM
Frekuensi	Tahunan / Semesteran

Nama Indikator	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik
Definisi	Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik adalah ukuran yang menunjukkan proporsi pegawai ASN yang memperoleh nilai baik atau lebih tinggi dalam penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP), dibandingkan dengan total ASN yang dinilai dalam periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik} = \left(\frac{\text{Jumlah Pegawai dengan Nilai SKP} \geq 76}{\text{Jumlah Seluruh Pegawai yang Dinilai}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Pegawai dengan Nilai SKP ≥ 76: Pegawai ASN yang memperoleh nilai minimal 76 dalam evaluasi SKP tahun berjalan. • Jumlah Seluruh Pegawai yang Dinilai: Total ASN yang telah melalui proses penilaian SKP.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan tingkat pencapaian kinerja ASN yang baik
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM)
Frekuensi	Tahunan (akhir tahun setelah evaluasi SKP dilakukan)

UNSUR PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

Nama Indikator	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi
Definisi	Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi adalah perbandingan antara jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah memiliki sertifikasi kompetensi sesuai bidang tugas/jabatannya terhadap total ASN yang menjadi target sertifikasi dalam suatu periode tertentu, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase ASN Bersertifikasi} = \left(\frac{\text{Jumlah ASN Bersertifikat Kompetensi}}{\text{Jumlah ASN yang Menjadi Target Sertifikasi}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah ASN Bersertifikat Kompetensi: ASN yang telah memperoleh sertifikasi kompetensi dari lembaga resmi seperti BNSP atau lembaga sertifikasi profesi (LSP). • Jumlah ASN yang Menjadi Target Sertifikasi: ASN yang direncanakan untuk mengikuti dan memperoleh sertifikasi pada periode berjalan.

Interpretasi	Semakin tinggi nilainya, menunjukkan semakin banyak ASN yang diakui kompetensinya secara formal
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM)
Frekuensi	Tahunan

Nama Indikator	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis
Definisi	Persentase ASN yang Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Teknis adalah proporsi ASN yang mengikuti pelatihan, pendidikan, atau kegiatan peningkatan kompetensi teknis sesuai bidang tugasnya dalam satu periode tertentu terhadap total ASN yang wajib mendapatkan pengembangan kompetensi teknis, dinyatakan dalam bentuk persentase.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase ASN Pengembangan Kompetensi Teknis} = \left(\frac{\text{Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Teknis}}{\text{Jumlah ASN yang Menjadi Target}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah ASN yang Mengikuti Pelatihan Teknis: ASN yang telah mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi teknis, baik melalui pelatihan, workshop, bimbingan teknis, maupun pendidikan formal/informal lainnya yang relevan dengan tugas jabatannya. • Jumlah ASN yang Menjadi Target: ASN yang seharusnya mendapatkan pengembangan kompetensi teknis pada tahun berjalan (berdasarkan rencana pengembangan SDM/renstra instansi).
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase menunjukkan semakin banyak ASN yang kompeten secara teknis
Sumber Data	Badan Kepegawaian Daerah (BKD/BKPSDM)
Frekuensi	Tahunan

UNSUR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

Nama Indikator	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan
Definisi	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan adalah indikator yang mengukur sejauh mana rekomendasi hasil kajian, analisis kebijakan, dan evaluasi pembangunan digunakan secara nyata sebagai dasar atau acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan oleh pemerintah daerah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Rekomendasi yang Diimplementasikan}}{\text{Jumlah Total Rekomendasi yang Diterbitkan}}\right) \times 100$ Keterangan : • Jumlah Rekomendasi yang Diimplementasikan: Rekomendasi yang dibuktikan telah menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, atau kegiatan pembangunan. • Jumlah Total Rekomendasi yang Diterbitkan: Seluruh rekomendasi kebijakan pembangunan yang dikeluarkan oleh unit perencana atau litbang daerah (misalnya Bappeda, Balitbangda).

Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menunjukkan pemanfaatan hasil kajian dalam pembangunan semakin optimal
Sumber Data	Dokumen kajian atau analisis kebijakan pembangunan (Bappeda, Balitbangda)
Frekuensi	Tahunan (mengikuti siklus perencanaan dan evaluasi)

Program Riset dan Inovasi Daerah

Nama Indikator	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan
Definisi	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan adalah indikator yang mengukur sejauh mana hasil inovasi daerah—baik berupa produk, model, metode, atau sistem—yang telah dihasilkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan (litbang), digunakan atau diterapkan oleh pihak terkait seperti OPD, masyarakat, pelaku usaha, atau instansi lain.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah Produk Inovasi yang Dimanfaatkan}}{\text{Jumlah Total Produk Inovasi yang Dihasilkan}} \right) \times 100$ Keterangan : • Pembilang: Produk inovasi daerah yang telah diterapkan secara nyata oleh pengguna (misalnya: OPD, masyarakat, dunia usaha, akademisi). • Penyebut: Seluruh produk inovasi yang dihasilkan oleh perangkat daerah, lembaga litbang, atau kerja sama dengan pihak ketiga dalam periode waktu tertentu. • Dimanfaatkan dapat berupa penggunaan dalam pelayanan publik, adopsi kebijakan, pemanfaatan komersial, maupun penerapan oleh Masyarakat.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai, menandakan keberhasilan inovasi menjawab kebutuhan pengguna
Sumber Data	Laporan litbangda/Bappeda
Frekuensi	Tahunan (berdasarkan laporan tahunan inovasi/litbang daerah)

UNSUR PENGAWASAN

Program Penyelenggaraan Pengawasan

Nama Indikator	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1
Definisi	Tindak Lanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 adalah upaya yang dilakukan oleh entitas pemeriksaan (misalnya, pemerintah daerah) dalam menanggapi dan melaksanakan rekomendasi yang diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan laporan keuangan tahun anggaran sebelumnya (N-1). Indikator ini mengukur persentase rekomendasi BPK yang telah ditindaklanjuti secara tuntas dibandingkan dengan total rekomendasi yang diberikan untuk tahun tersebut.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi BPK yang sudah ditindaklanjuti dengan status "Sesuai".}}{\text{Jumlah Seluruh jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan BPK Tahun Anggaran N-1}} \text{ x } 100\ \%$

Interpretasi	Makin tinggi persentase, makin tinggi akuntabilitas dan penyelesaian temuan BPK.
Sumber Data	• Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) BPK • Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL BPK) • Laporan Inspektorat Daerah • Bukti tindak lanjut dari masing-masing OPD
Frekuensi	Tahunan (Idealnya setiap Triwulan II atau III untuk laporan tahun sebelumnya)

Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi

Nama Indikator	Maturitas Penyelenggaraan Sistes Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Definisi	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah tingkat kematangan (maturity level) penerapan sistem pengendalian intern pada instansi pemerintah, yang mencerminkan kemampuan entitas dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan meningkatkan pengendalian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi guna mencapai tujuan secara efektif, efisien, dan taat terhadap peraturan perundang-undangan.
Rumus Perhitungan	$\text{Nilai Rata-Rata Maturitas SPIP} = \frac{\sum \text{Skor Komponen SPIP}}{\text{5 Komponen}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Terdapat 5 Komponen SPIP: ➢ Lingkungan Pengendalian ➢ Penilaian Risiko ➢ Kegiatan Pengendalian ➢ Informasi dan Komunikasi ➢ Pemantauan • Setiap komponen dinilai dalam skala 1 sampai 5. • Hasil akhir adalah rata-rata dari skor kelima komponen. • Level akhir SPIP ditentukan dari rata-rata nilai kelima komponen tersebut.
Interpretasi	Makin tinggi level, makin matang dan terintegrasi penerapan pengendalian intern
Sumber Data	• Laporan Penilaian Maturitas SPIP oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) / Inspektorat • Hasil Evaluasi BPKP (melalui Sistem Aplikasi Penilaian Mandiri SPIP / PM SPIP) • Laporan Penilaian Mandiri Penyelenggaraan SPIP dari OPD
Frekuensi	Tahunan (Biasanya dilakukan pada triwulan III atau IV oleh APIP atau dengan asistensi BPKP)

UNSUR KEWILAYAHAN

Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Nama Indikator	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif
Definisi	Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Aktif adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah lembaga kemasyarakatan yang masih aktif

	melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART, memiliki kepengurusan aktif, serta memenuhi kewajiban administratif (seperti pelaporan tahunan), terhadap total jumlah lembaga kemasyarakatan yang terdaftar di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif} = \frac{\text{Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Yang Aktif}}{\text{Jumlah seluruh Lembaga Kemasyarakatan yang Terdaftar}} \times 100$ Keterangan : • Lembaga Kemasyarakatan Aktif adalah Lembaga Kemasyarakatan yang: ➢ Memiliki kepengurusan yang masih berjalan ➢ Melaporkan kegiatan minimal 1×/tahun ➢ Tidak dinyatakan tidak aktif/dibekukan • Total Lembaga Kemasyarakatan Terdaftar adalah seluruh Lembaga Kemasyarakatan yang masih terdata secara administratif di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif).
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin tinggi partisipasi aktif Lembaga Kemasyarakatan dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.
Sumber Data	Badan Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Nama Indikator	Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik
Definisi	Persentase Pemerintahan Desa yang terselenggara dengan baik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah Pemerintahan Desa yang terselenggara dengan baik dibandingkan jumlah desa yang ada di suatu kecamatan
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Terselenggaranya Pemerintahan Desa Dengan Baik} = \frac{\text{Jumlah Pemerintahan Desa yang Terselenggara dengan Baik}}{\text{Jumlah Desa yang Ada di Suatu Kecamatan}} \times 100$
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin banyak Pemerintahan Desa yang terselenggara dengan baik
Sumber Data	Kecamatan
Frekuensi	Tahunan

UNSUR PEMERINTAHAN UMUM

Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Nama Indikator	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
Definisi	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan adalah indikator yang menggambarkan persentase partisipasi penduduk atau kelompok sasaran (seperti pelajar, mahasiswa, ASN, tokoh masyarakat, organisasi, dan elemen lainnya) yang telah mengikuti kegiatan edukatif atau pembinaan terkait

	nilai-nilai Pancasila, wawasan kebangsaan, dan karakter kebangsaan dalam suatu periode tertentu.
Rumus Perhitungan	$\text{Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan} = \frac{\text{Jumlah individu yang telah mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan}}{\text{Jumlah target peserta yang seharusnya terlibat dalam kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Pembilang: Jumlah individu yang telah mengikuti kegiatan penguatan ideologi Pancasila dan karakter kebangsaan selama tahun berjalan. • Penyebut: Jumlah target peserta yang seharusnya terlibat dalam kegiatan tersebut (misal: seluruh siswa SMA di kabupaten, seluruh ASN, atau kelompok masyarakat tertentu).
Interpretasi	Semakin tinggi cakupan, semakin baik penetrasi nilai Pancasila dan karakter kebangsaan dalam masyarakat.
Sumber Data	Badan Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik

Nama Indikator	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik
Definisi	Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi kader partai politik yang telah mengikuti kegiatan pendidikan politik, baik yang dilaksanakan oleh partai, pemerintah, maupun lembaga terkait, dalam suatu periode tertentu terhadap jumlah kader yang menjadi target kegiatan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Pendidikan Politik pada Kader Partai Politik} = \frac{\text{Jumlah kader partai yang mengikuti pendidikan politik}}{\text{Jumlah Target Kader Partai Politik}} \times 100$ Keterangan : • Pembilang: Jumlah kader partai yang benar-benar hadir/mengikuti kegiatan pendidikan politik dalam satu tahun anggaran. • Penyebut: Jumlah kader yang menjadi sasaran/target pendidikan politik dalam kegiatan tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin banyak kader partai politik yang mendapatkan pendidikan politik
Sumber Data	Badan Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Nama Indikator	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif
Definisi	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan proporsi jumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) yang masih aktif melaksanakan kegiatan sesuai AD/ART, memiliki

	kepengurusan aktif, serta memenuhi kewajiban administratif (seperti pelaporan tahunan), terhadap total jumlah Ormas yang terdaftar di suatu wilayah.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif} = \frac{\text{Jumlah Ormas yang Aktif}}{\text{Jumlah Total Ormas yang Terdaftar}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Ormas Aktif adalah organisasi yang: ➢ Memiliki kepengurusan yang masih berjalan ➢ Melaporkan kegiatan minimal 1×/tahun ➢ Tidak dinyatakan tidak aktif/dibekukan • Total Ormas Terdaftar adalah seluruh ormas yang masih terdata secara administratif di wilayah tersebut (baik aktif maupun tidak aktif).
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin tinggi partisipasi aktif ormas dalam kehidupan sosial dan pembangunan daerah.
Sumber Data	Badan Kesbangpol
Frekuensi	Tahunan

Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya

Nama Indikator	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan
Definisi	Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, serta Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama, dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan adalah ukuran yang menunjukkan persentase realisasi pelaksanaan kebijakan atau program daerah yang mendukung penguatan ketahanan masyarakat di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan pencegahan narkotika, serta fasilitasi kerukunan dan perlindungan keberagaman spiritual kepercayaan, terhadap jumlah kebijakan yang direncanakan.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Kebijakan yang Dilaksanakan} = \frac{\text{Jumlah Kebijakan/Program yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah Kebijakan/Program yang Direncanakan}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Kebijakan/Program yang Dilaksanakan: program/kegiatan yang sudah terealisasi, minimal 80% output tercapai dan didukung bukti fisik (laporan, dokumentasi, berita acara). • Kebijakan/Program yang Direncanakan: seluruh program/kegiatan sesuai dokumen perencanaan tahunan (RKPD).
Interpretasi	Semakin tinggi persentase, semakin baik pelaksanaan kebijakan strategis daerah dalam memperkuat ketahanan masyarakat
Sumber Data	Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Frekuensi	Tahunan

Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

Nama Indikator	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan
Definisi	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan adalah ukuran yang menggambarkan proporsi jumlah kasus konflik sosial yang berhasil diselesaikan secara damai dan tuntas oleh pemerintah daerah (melalui mediasi, fasilitasi, atau penyelesaian hukum), dibandingkan dengan jumlah total konflik sosial yang terjadi dalam satu periode tertentu di wilayah tersebut.
Rumus Perhitungan	$\text{Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan} = \frac{\text{Jumlah Konflik Sosial yang Diselesaikan}}{\text{Jumlah Total Konflik Sosial yang Terjadi}} \times 100\ \%$ Keterangan : • Konflik Sosial yang Diselesaikan: Konflik yang telah melalui proses penyelesaian formal (mediasi, fasilitasi, penyelesaian hukum) dan berakhir damai atau tidak berlanjut. • Total Konflik Sosial yang Terjadi: Seluruh konflik sosial yang terdeteksi, dilaporkan, dan tercatat secara resmi pada periode tersebut.
Interpretasi	Semakin tinggi nilai persentase, semakin efektif upaya deteksi dan resolusi konflik oleh pemerintah
Sumber Data	Laporan Kepolisian atau Forkopimda
Frekuensi	Tahunan

LAMPIRAN II : MANAJEMEN RISIKO PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
Misi 1: Meningkatkan pertumbuhan sektor perekonomian yang berwawasan lingkungan								
Tujuan 1: Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berwawasan lingkungan	Eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan	Kurangnya regulasi dan pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya	Kerusakan lingkungan, hilangnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas hidup	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Sangat Tinggi	Meningkatkan regulasi, memperkuat pengawasan, dan mendorong ekonomi hijau	Sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha melalui media dan forum diskusi	Monitoring berkala setiap 6 bulan dengan laporan evaluasi
Sasaran 1.1. Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	Rendahnya akses UMKM terhadap pembiayaan	Persyaratan kredit perbankan yang ketat, kurangnya literasi keuangan	Pertumbuhan UMKM terhambat, sulit berkembang	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Fasilitasi kredit mikro- Pelatihan literasi keuangan- Kerja sama dengan lembaga keuangan	Laporan rutin ke dinas terkait dan pemangku kepentingan (bank, koperasi)	Monitoring tingkat penyaluran kredit & jumlah UMKM penerima
	Keterbatasan infrastruktur pendukung usaha	Infrastruktur logistik belum merata, biaya distribusi tinggi	Tingginya biaya operasional UMKM/industri, daya saing menurun	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Peningkatan infrastruktur jalan, pasar, gudang- Program subsidi transportasi/logistik	Koordinasi dengan dinas PU, perhubungan, dan asosiasi usaha	Pemantauan proyek infrastruktur & evaluasi biaya distribusi
	Persaingan produk impor yang lebih murah	Kurangnya proteksi pasar, rendahnya kualitas/standar produk lokal	UMKM kehilangan pangsa pasar	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 3)	Program sertifikasi & peningkatan kualitas- Promosi produk lokal- Kebijakan proteksi terbatas	Komunikasi publik lewat kampanye “Bangga Buatan Lokal”	Pemantauan volume impor & penjualan produk lokal
	Rendahnya kapasitas SDM UMKM dan industri	Keterbatasan pelatihan, lemahnya inovasi	Produksi tidak efisien, sulit bersaing	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Pelatihan manajemen usaha & digital marketing- Inkubasi bisnis	Komunikasi dengan UMKM melalui forum/pendampingan	Evaluasi jumlah peserta & keberhasilan usaha pascapelatihan
	Perubahan regulasi dan kebijakan perdagangan	Kebijakan pusat/daerah yang tidak konsisten	Ketidakpastian iklim usaha, investasi menurun	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 5)	- Harmonisasi regulasi- Dialog rutin pemerintah-pelaku usaha	Publikasi regulasi secara terbuka, forum konsultasi	Monitoring implementasi regulasi & keluhan usaha
	Risiko bencana alam yang mengganggu ekosistem usaha	Tanah longsor, gempa dll.	Kerugian aset usaha, supply chain terhenti	Probabilitas: Rendah, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 6)	- Program ketahanan bencana- Edukasi asuransi usaha	Sosialisasi dengan BPBD & asosiasi usaha	Pemantauan indeks kerentanan bencana & kesiapan UMKM
Sasaran 1.2. Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk	Kurangnya kepastian hukum dan regulasi investasi	Regulasi tumpang tindih, perubahan kebijakan mendadak	Investor enggan masuk, turunnya realisasi investasi	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Harmonisasi regulasi, kepastian hukum investasi, forum konsultasi	Publikasi regulasi jelas, konsultasi publik dengan investor	Monitoring realisasi investasi, kepuasan investor

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	Keterbatasan infrastruktur pendukung investasi	Kapasitas infrastruktur (jalan, listrik, internet) belum memadai	Biaya investasi meningkat, daya tarik investasi menurun	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Peningkatan infrastruktur jalan, listrik, telekomunikasi	Koordinasi lintas dinas, laporan ke stakeholder	Evaluasi pembangunan infrastruktur dan daya dukungnya
	Proses perizinan yang lambat dan berbelit	Birokrasi panjang, sistem digitalisasi belum optimal	Investasi tertunda, menurunnya minat investor baru	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 3)	Simplifikasi dan digitalisasi perizinan	Layanan OSS (Online Single Submission), sosialisasi	Pemantauan waktu proses perizinan dan jumlah izin terbit
	Kualitas tenaga kerja yang belum sesuai kebutuhan industri	Rendahnya keterampilan dan mismatch kompetensi	Produktivitas rendah, daya saing berkurang	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Program pelatihan vokasi dan peningkatan SDM	Kerja sama dengan dunia usaha dan lembaga pendidikan	Evaluasi tenaga kerja terserap dan produktivitasnya
	Tingkat keamanan dan stabilitas daerah yang rendah	Tingginya kriminalitas atau konflik sosial	Investor ragu, berkurangnya minat penanaman modal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Penguatan keamanan dan stabilitas sosial daerah	Sosialisasi keamanan dan keterlibatan masyarakat	Monitoring tingkat kriminalitas dan keamanan daerah
	Risiko bencana alam yang menghambat investasi	Banjir, gempa, dan bencana alam lainnya	Kerugian aset investasi, kegiatan usaha terhenti	Probabilitas: Rendah, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 6)	Program mitigasi bencana, edukasi asuransi investasi	Koordinasi dengan BPBD, komunikasi risiko ke investor	Pemantauan indeks kerentanan bencana dan dampaknya
Sasaran 1.3. Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	Rendahnya kapasitas aparatur desa dalam pengelolaan potensi lokal	Aparatur desa belum mendapat pelatihan manajemen dan teknis	Pengelolaan potensi desa tidak optimal, lambat berkembang	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Pelatihan manajemen dan pengelolaan potensi lokal untuk aparatur desa	Koordinasi dengan dinas pemberdayaan masyarakat dan lembaga pelatihan	Evaluasi kinerja aparatur desa dan peningkatan kapasitasnya
	Kurangnya akses modal bagi BUMDes dan usaha masyarakat desa	Akses ke lembaga keuangan terbatas, persyaratan sulit	BUMDes sulit berkembang, usaha masyarakat terhambat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Fasilitasi akses permodalan, kerja sama dengan bank dan koperasi	Komunikasi dengan lembaga keuangan dan stakeholder terkait	Pemantauan jumlah BUMDes/UMKM desa yang memperoleh akses modal
	Keterbatasan infrastruktur desa untuk mendukung kegiatan ekonomi	Jalan, pasar desa, listrik, dan internet belum memadai	Aktivitas ekonomi desa kurang produktif, biaya tinggi	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur desa (jalan, pasar, internet)	Koordinasi lintas sektor pembangunan desa	Monitoring progres pembangunan infrastruktur desa
	Kurangnya inovasi dan diversifikasi produk lokal	Kurangnya pelatihan, minimnya teknologi tepat guna	Produk desa kurang kompetitif, sulit menembus pasar	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Pelatihan inovasi produk, pengembangan teknologi tepat guna	Sosialisasi inovasi dan promosi produk lokal	Evaluasi jumlah produk inovatif desa dan daya saingnya

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Lemahnya partisipasi masyarakat dalam program desa	Kurang kesadaran masyarakat, minimnya pemberdayaan	Program desa tidak berjalan efektif, potensi lokal terabaikan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Program pemberdayaan dan sosialisasi partisipasi masyarakat	Dialog rutin desa, musyawarah desa	Pemantauan partisipasi masyarakat dalam program desa
	Risiko bencana alam yang menghambat pengelolaan potensi desa	Banjir, longsor, kekeringan di wilayah desa	Kerugian aset desa dan masyarakat, penurunan aktivitas ekonomi	Probabilitas: Rendah, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 6)	Program mitigasi bencana, edukasi asuransi usaha desa	Koordinasi dengan BPBD dan sosialisasi kesiapsiagaan	Monitoring indeks kerentanan desa terhadap bencana
Sasaaran 1.4. Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan	Penurunan produktivitas pertanian akibat perubahan iklim	Curah hujan tidak menentu, kekeringan, banjir	Penurunan hasil panen, berkurangnya ketersediaan pangan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Program adaptasi perubahan iklim, irigasi modern, varietas tahan iklim ekstrem	Sosialisasi adaptasi iklim kepada petani/nelayan	Monitoring produktivitas pertanian & perikanan tahunan
	Kerusakan ekosistem perikanan akibat penangkapan berlebihan	Overfishing, penggunaan alat tangkap tidak ramah lingkungan	Menurunnya stok ikan, krisis perikanan berkelanjutan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Pengelolaan perikanan berkelanjutan, pengawasan alat tangkap	Koordinasi dengan kelompok nelayan dan dinas kelautan	Pemantauan stok ikan dan keberlanjutan ekosistem
	Keterbatasan akses sarana produksi (pupuk, benih, pakan)	Distribusi sarana produksi terbatas, harga mahal	Produksi terhambat, biaya usaha meningkat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Subsidi pupuk/benih/pakan, penguatan distribusi sarana produksi	Komunikasi dengan distributor pupuk/benih/pakan	Evaluasi distribusi dan harga sarana produksi
	Serangan hama dan penyakit tanaman/ikan	Kurangnya sistem pengendalian hama terpadu	Gagal panen, kerugian besar bagi petani/nelayan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Pengendalian hama terpadu, penyediaan vaksin/obat ikan	Penyuluhan rutin oleh penyuluh pertanian/perikanan	Monitoring tingkat serangan hama & penyakit
	Kurangnya teknologi dan inovasi di sektor pertanian dan perikanan	Rendahnya penelitian dan penerapan teknologi tepat guna	Produktivitas rendah, sulit bersaing dengan produk impor	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Pelatihan teknologi pertanian & perikanan, riset dan inovasi	Kerjasama dengan perguruan tinggi dan lembaga riset	Evaluasi penerapan teknologi dan inovasi
	Keterbatasan akses pasar bagi hasil pertanian dan perikanan	Kurangnya infrastruktur distribusi dan informasi pasar	Pendapatan petani/nelayan menurun, distribusi pangan tidak merata	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Pengembangan infrastruktur distribusi dan digitalisasi pemasaran	Promosi digitalisasi pasar & pelibatan koperasi	Pemantauan distribusi produk dan harga di pasar
Misi 2: Mewujudkan Smart Governance berbasis IT								

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
Tujuan 2: Terwujudnya smart governance berbasis IT	Kegagalan sistem IT atau serangan siber	Keamanan siber yang lemah, kurangnya pemeliharaan sistem, SDM kurang terlatih	Kebocoran data, gangguan layanan publik, hilangnya kepercayaan masyarakat	Kemungkinan: Tinggi, Dampak: Tinggi	Sangat Tinggi	Meningkatkan keamanan siber, backup data rutin, pelatihan SDM, audit sistem berkala	Menyampaikan prosedur keamanan kepada pegawai dan masyarakat melalui pelatihan, portal resmi, dan media sosial	Pemantauan keamanan jaringan real-time, evaluasi setiap 3 bulan, audit tahunan
Sasaran 2.1: Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Keterbatasan infrastruktur TIK di daerah	Kurangnya jaringan internet, server, dan perangkat	Pemerintahan digital tidak berjalan optimal	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Peningkatan infrastruktur TIK (server, jaringan, perangkat)	Koordinasi dengan dinas komunikasi dan informatika	Monitoring kualitas jaringan dan server secara berkala
	Rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat	Minim pelatihan dan pendampingan transformasi digital	Sistem digital tidak termanfaatkan dengan baik	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Program literasi digital bagi ASN dan masyarakat	Sosialisasi manfaat layanan digital kepada ASN dan publik	Evaluasi tingkat adopsi digital ASN dan masyarakat
	Ancaman keamanan data dan kebocoran informasi	Sistem keamanan siber belum optimal	Kehilangan kepercayaan publik, kebocoran data sensitif	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Penerapan standar keamanan siber dan enkripsi data	Komunikasi dengan BSSN dan stakeholder keamanan data	Audit keamanan data secara rutin
	Kurangnya integrasi antar sistem pemerintahan	Silo data antar instansi, koordinasi minim	Layanan publik digital tidak terintegrasi	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 4)	Integrasi sistem informasi antar instansi	Forum koordinasi lintas instansi	Monitoring tingkat integrasi antar instansi
	Resistensi perubahan budaya kerja menuju digital	Aparatur terbiasa dengan cara kerja manual	Lambatnya adopsi digitalisasi dan pelayanan tidak efisien	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Sosialisasi dan perubahan budaya kerja digital	Sosialisasi perubahan pola kerja berbasis digital	Evaluasi kecepatan adopsi budaya digital
	Ketergantungan pada vendor teknologi tertentu	Kontrak jangka panjang dengan penyedia tunggal	Risiko biaya tinggi dan keterbatasan inovasi	Probabilitas: Rendah, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 6)	Diversifikasi penyedia teknologi dan kontrak fleksibel	Negosiasi dengan penyedia teknologi dan laporan transparansi	Monitoring ketergantungan teknologi dan biaya operasional
Sasaran 2.2: Terwujudnya pelayanan pubik yang efektif dan efisien	Lambannya respon dalam pelayanan publik	Sistem belum terotomatisasi sepenuhnya	Kepuasan masyarakat menurun	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Digitalisasi proses layanan dan monitoring kinerja	Survey kepuasan masyarakat secara rutin	Evaluasi waktu respon dan penyelesaian layanan
	Proses birokrasi masih berbelit	Regulasi dan SOP terlalu kompleks	Waktu layanan lama, menimbulkan ketidakpuasan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Simplifikasi regulasi dan SOP pelayanan	Sosialisasi SOP baru kepada aparatur dan masyarakat	Monitoring implementasi SOP yang disederhanakan

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Kurangnya kompetensi aparatur dalam pelayanan	Minimnya pelatihan kompetensi aparatur	Layanan publik tidak profesional	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Pelatihan kompetensi aparatur secara berkala	Komunikasi internal dan eksternal terkait standar pelayanan	Evaluasi kinerja aparatur dalam pelayanan publik
	Keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik	Fasilitas pelayanan publik tidak memadai	Akses layanan publik terbatas	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 4)	Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik	Publikasi pembangunan/perbaikan sarana pelayanan	Monitoring ketersediaan sarana dan prasarana layanan
	Rendahnya pemanfaatan teknologi dalam pelayanan	Kurangnya adopsi sistem digitalisasi	Pelayanan publik menjadi tidak efektif dan transparan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Penguatan adopsi teknologi pelayanan publik	Sosialisasi penggunaan teknologi layanan publik	Evaluasi tingkat pemanfaatan teknologi dalam pelayanan
	Kurangnya pengawasan dan evaluasi kinerja pelayanan	Belum optimalnya sistem monitoring dan evaluasi	Kinerja pelayanan publik tidak terukur dengan baik	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Penerapan sistem monitoring dan evaluasi kinerja ASN	Laporan evaluasi kinerja secara terbuka	Monitoring hasil evaluasi kinerja dan tindak lanjutnya
Misi 3 : Penguatan Infrastruktur Penunjang Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat								
Tujuan 3: Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan	Keterlambatan pembangunan infrastruktur	Keterbatasan anggaran, hambatan perizinan, cuaca ekstrem	Penurunan kualitas layanan publik, terganggunya mobilitas	Kemungkinan: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi	Optimalisasi perencanaan proyek, percepatan perizinan, penyediaan dana cadangan	Pelaporan rutin progres ke publik dan stakeholder terkait	Monitoring bulanan progres proyek dan penggunaan anggaran
Sasaaran 3.1: Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia	Penebangan liar, alih fungsi lahan, pencemaran industri	Kerusakan ekosistem, menurunnya kualitas hidup masyarakat	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Program rehabilitasi hutan, pengelolaan limbah, dan konservasi	Koordinasi lintas sektor dalam pengelolaan lingkungan	Monitoring kualitas udara, air, dan lahan secara berkala
	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan	Kurangnya edukasi dan partisipasi masyarakat	Meningkatnya pencemaran dan kerusakan lingkungan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Tinggi (Prioritas 2)	Kampanye kesadaran lingkungan dan pemberdayaan masyarakat	Sosialisasi pentingnya menjaga lingkungan melalui media dan komunitas	Evaluasi tingkat partisipasi masyarakat dalam program lingkungan
	Keterbatasan anggaran pengelolaan lingkungan	Prioritas anggaran lebih banyak untuk sektor lain	Program lingkungan tidak berjalan optimal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Optimalisasi alokasi anggaran lingkungan	Transparansi alokasi anggaran lingkungan	Audit penggunaan anggaran lingkungan
	Peningkatan frekuensi bencana alam (banjir, tanah longsor,	Perubahan iklim global dan degradasi lingkungan	Kerugian ekonomi, korban jiwa, kerusakan infrastruktur	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Penguatan infrastruktur mitigasi bencana dan sistem peringatan dini	Peringatan dini bencana melalui media massa dan aplikasi digital	Monitoring kejadian bencana dan efektivitas mitigasi

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	kekeringan)							
	Kurangnya kesiapsiagaan aparatur dan masyarakat dalam menghadapi bencana	Minimnya pelatihan mitigasi bencana dan sistem peringatan dini	Tingginya kerentanan masyarakat terhadap bencana	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 5)	Pelatihan kesiapsiagaan bencana bagi aparatur dan masyarakat	Sosialisasi mitigasi bencana di sekolah dan desa	Evaluasi efektivitas pelatihan kesiapsiagaan bencana
	Lemahnya penegakan hukum terkait lingkungan hidup	Pengawasan tidak optimal, sanksi tidak tegas	Menurunnya kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan lingkungan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Penegakan hukum lingkungan yang tegas dan konsisten	Publikasi sanksi dan penegakan hukum lingkungan secara terbuka	Monitoring tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap aturan lingkungan
Sasaran 2. Meningkatnya Aksesbilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas	Keterbatasan anggaran pembangunan infrastruktur	Pendapatan daerah terbatas, ketergantungan pada dana pusat	Pembangunan infrastruktur tidak optimal	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan alokasi anggaran infrastruktur dan mencari alternatif pendanaan	Transparansi penggunaan anggaran infrastruktur	Audit realisasi anggaran pembangunan infrastruktur
	Kualitas infrastruktur rendah akibat lemahnya pengawasan	Pengawasan lemah terhadap kontraktor dan pelaksana	Infrastruktur cepat rusak dan tidak berfungsi maksimal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Penguatan sistem pengawasan proyek dan standar kualitas	Publikasi hasil pengawasan kualitas proyek	Monitoring kualitas hasil pembangunan infrastruktur
	Ketimpangan akses infrastruktur antar wilayah	Fokus pembangunan hanya di wilayah perkotaan	Ketidakadilan dalam pembangunan, masyarakat desa tertinggal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah perkotaan dan pedesaan	Dialog pembangunan dengan masyarakat desa dan kota	Evaluasi pemerataan akses infrastruktur antar wilayah
	Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam	Lokasi infrastruktur berada di daerah rawan bencana	Kerugian ekonomi dan gangguan konektivitas masyarakat	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Pembangunan infrastruktur berbasis mitigasi bencana	Sosialisasi mitigasi bencana terkait infrastruktur	Monitoring dampak bencana terhadap infrastruktur
	Keterlambatan proyek pembangunan infrastruktur	Proses perencanaan dan pengadaan tidak efektif	Pelayanan publik dan konektivitas masyarakat terganggu	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Percepatan proses perencanaan dan pengadaan proyek	Koordinasi lintas instansi untuk percepatan proyek	Evaluasi keterlambatan proyek dan penyebabnya
	Kurangnya partisipasi masyarakat dalam menjaga infrastruktur	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemeliharaan	Infrastruktur cepat rusak dan biaya pemeliharaan meningkat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Program edukasi dan pemberdayaan masyarakat untuk pemeliharaan	Kampanye kesadaran masyarakat menjaga infrastruktur	Monitoring tingkat partisipasi masyarakat dalam pemeliharaan
Misi 4 : Peningkatan Nilai-Nilai Keagamaan Dan Pelestarian Budaya Melalui Pengembangan Komunitas Seni Demi Mendukung Terwujudnya Kota Wisata Yang Estetik Dan Memiliki Fungsi Ekonomi Dan Mensejahterakan								

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
Tujuan 4: Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis	Kerusakan infrastruktur akibat bencana alam	Gempa bumi, banjir, tanah longsor	Kerugian material besar, terganggunya aktivitas masyarakat	Kemungkinan: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi	Desain infrastruktur tahan bencana, peningkatan sistem peringatan dini	Sosialisasi mitigasi bencana kepada masyarakat	Evaluasi tahunan ketahanan infrastruktur
Sasaran 4.1: Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Meningkatnya potensi konflik antar umat beragama	Provokasi, diskriminasi, dan perbedaan kepentingan kelompok	Kerukunan masyarakat terganggu, potensi konflik horizontal meningkat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Membangun forum komunikasi lintas agama dan budaya	Dialog lintas agama secara rutin	Monitoring kejadian konflik sosial dan keagamaan
	Penyebaran paham radikal dan intoleransi	Penyalahgunaan media sosial dan kurangnya literasi digital	Munculnya kelompok intoleran yang merusak persatuan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Penguatan literasi digital untuk menangkal radikalisme	Kampanye anti-radikalisme di media sosial dan media massa	Evaluasi efektivitas kampanye anti-radikalisme
	Kurangnya pemahaman masyarakat tentang moderasi beragama	Minimnya sosialisasi tentang nilai toleransi dan moderasi	Menurunnya semangat kebhinekaan dan kebangsaan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 3)	Sosialisasi nilai toleransi dan moderasi melalui pendidikan	Integrasi materi toleransi dalam kurikulum pendidikan	Survey tingkat pemahaman masyarakat tentang moderasi
	Kesenjangan sosial-ekonomi memicu disharmoni sosial	Ketidakadilan distribusi sumber daya dan kesempatan ekonomi	Masyarakat terpecah dan ketidakstabilan sosial meningkat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Program pengentasan kemiskinan dan pemerataan ekonomi	Sosialisasi program bantuan sosial secara transparan	Monitoring kesenjangan sosial dan distribusi bantuan
	Kurangnya peran tokoh agama dalam menjaga kerukunan	Tokoh agama pasif atau kurang diberdayakan	Kurangnya teladan positif bagi masyarakat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Pemberdayaan tokoh agama sebagai agen perdamaian	Menghadirkan tokoh agama dalam diskusi publik	Evaluasi keterlibatan tokoh agama dalam program pemerintah
	Kurangnya koordinasi antar lembaga dalam menangani isu intoleransi	Belum ada mekanisme terpadu dalam pencegahan konflik sosial	Penanganan isu intoleransi lambat dan tidak efektif	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Membangun mekanisme koordinasi terpadu lintas lembaga	Rapat koordinasi antar lembaga pemerintah dan ormas	Monitoring sinergi program lintas lembaga
Sasaran 4.2: Meningkatnya komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan	Menurunnya minat generasi muda terhadap seni, budaya, dan adat istiadat	Pengaruh globalisasi dan budaya populer modern	Warisan budaya tergerus, identitas lokal melemah	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan program edukasi seni dan budaya di sekolah serta komunitas	Kampanye budaya di media massa dan media sosial	Monitoring partisipasi generasi muda dalam kegiatan budaya

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
adat istiadat	Kerusakan cagar budaya akibat kurangnya perawatan	Minimnya program pemeliharaan dan konservasi	Cagar budaya rusak dan hilang nilai sejarahnya	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Penguatan regulasi dan anggaran untuk konservasi cagar budaya	Publikasi program perawatan cagar budaya	Audit kondisi cagar budaya secara berkala
	Komersialisasi seni dan budaya yang mengurangi nilai autentik	Orientasi pada keuntungan ekonomi semata	Nilai budaya asli hilang, digantikan nilai komersial	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Mendorong keseimbangan antara komersialisasi dan pelestarian	Sosialisasi pentingnya menjaga nilai autentik budaya	Evaluasi keseimbangan aspek ekonomi dan nilai budaya
	Kurangnya dukungan anggaran untuk pelestarian seni dan budaya	Prioritas anggaran pemerintah lebih fokus pada sektor lain	Kegiatan pelestarian budaya terhambat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Menyediakan dana khusus untuk pelestarian seni dan adat istiadat	Transparansi penggunaan dana pelestarian budaya	Monitoring penggunaan anggaran untuk pelestarian budaya
	Hilangnya pengetahuan lokal akibat tidak adanya regenerasi pelaku seni	Kurangnya pelatihan dan kaderisasi pelaku seni	Tradisi dan kearifan lokal tidak berlanjut	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Pelatihan dan regenerasi pelaku seni dan budaya	Keterlibatan tokoh adat dan seniman dalam komunikasi publik	Evaluasi jumlah pelaku seni yang mengikuti program kaderisasi
	Kurangnya dokumentasi dan digitalisasi warisan budaya	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Dokumentasi budaya hilang, sulit dipelajari generasi mendatang	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Digitalisasi dan dokumentasi sistematis warisan budaya	Penyebarluasan arsip budaya melalui platform digital	Monitoring perkembangan dokumentasi digital warisan budaya
Misi 5 : Meningkatkan Fungsi Ekonomi Sektor Pariwisata Untuk Kesejahteraan Masyarakat Melalui Optimalisasi Potensi Kepariwisataan								
Tujuan 5: Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat	Penurunan jumlah wisatawan	Krisis ekonomi, isu keamanan, pandemi	Penurunan pendapatan daerah dan masyarakat	Kemungkinan: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang	Promosi intensif, diversifikasi destinasi wisata	Publikasi melalui media sosial, event promosi daerah	Monitoring data kunjungan wisatawan bulanan/ Triwulan/ Semester dan Tahunan
Sasaran 5.1: Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian	Penurunan jumlah wisatawan akibat faktor eksternal (bencana, pandemi, keamanan)	Terjadinya krisis global, bencana alam, atau isu keamanan	Pendapatan pariwisata menurun tajam	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Diversifikasi pasar wisata dan siapkan protokol krisis	Informasi terbuka terkait kondisi keamanan dan mitigasi krisis	Monitoring jumlah kunjungan wisatawan
	Kurangnya infrastruktur penunjang pariwisata	Belum memadai transportasi, akomodasi, fasilitas umum	Destinasi wisata tidak menarik bagi wisatawan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Pembangunan dan peningkatan infrastruktur pariwisata	Publikasi pembangunan infrastruktur wisata	Evaluasi perkembangan infrastruktur pariwisata

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Kerusakan lingkungan akibat aktivitas pariwisata yang tidak terkendali	Overkapasitas pengunjung tanpa regulasi jelas	Kerusakan alam menurunkan daya tarik wisata	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Penerapan regulasi ramah lingkungan di destinasi wisata	Kampanye pariwisata berkelanjutan	Audit dampak lingkungan dari aktivitas pariwisata
	Kurangnya promosi dan pemasaran destinasi wisata	Kurangnya anggaran promosi, strategi pemasaran lemah	Destinasi kurang dikenal di pasar nasional/internasional	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Penguatan promosi melalui media digital dan event pariwisata	Promosi destinasi melalui platform digital dan kerja sama internasional	Evaluasi efektivitas promosi dan pemasaran
	Rendahnya kualitas SDM pariwisata	Kurangnya pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja pariwisata	Pelayanan wisata tidak profesional, menurunkan kepuasan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Pelatihan dan sertifikasi bagi tenaga kerja pariwisata	Publikasi program peningkatan kualitas SDM	Monitoring kepuasan wisatawan dan kualitas layanan
	Ketergantungan pada wisata musiman	Tidak ada diversifikasi produk wisata	Fluktuasi pendapatan pariwisata sepanjang tahun	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Pengembangan produk wisata baru sepanjang tahun	Kampanye wisata sepanjang tahun dengan paket tematik	Monitoring fluktuasi kunjungan per musim
Sasaran 5.2: Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah	Kurangnya akses permodalan bagi pelaku ekonomi kreatif	Akses kredit terbatas, skema pembiayaan kurang mendukung	Pertumbuhan ekonomi kreatif terhambat	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan akses pembiayaan melalui kredit usaha kreatif	Publikasi program pembiayaan kreatif	Monitoring jumlah pelaku kreatif yang mendapat akses pembiayaan
	Rendahnya literasi digital dan teknologi pada pelaku ekonomi kreatif	Kurangnya pelatihan digital, keterbatasan akses teknologi	Produk kreatif kalah bersaing di pasar digital	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Tinggi (Prioritas 2)	Pelatihan literasi digital dan teknologi	Kampanye literasi digital untuk pelaku kreatif	Evaluasi efektivitas pelatihan digital
	Kurangnya infrastruktur pendukung industri kreatif	Minimnya pusat kreatif, ruang pamer, sarana produksi	Industri kreatif sulit berkembang secara optimal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Pengembangan infrastruktur pendukung industri kreatif	Publikasi pembangunan pusat-pusat kreatif	Monitoring ketersediaan infrastruktur industri kreatif
	Kurangnya promosi dan jejaring pasar produk kreatif	Promosi terbatas, minim dukungan pameran dan festival	Produk kreatif kurang dikenal luas	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Meningkatkan promosi melalui festival, pameran, dan media digital	Promosi kolaborasi dengan platform e-commerce	Evaluasi efektivitas promosi dan jejaring pasar
	Kurangnya perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI)	Kesadaran rendah terhadap pentingnya pendaftaran HKI	Banyak karya kreatif dijiplak tanpa perlindungan hukum	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 5)	Mendorong pendaftaran dan perlindungan HKI	Sosialisasi pentingnya perlindungan HKI	Monitoring jumlah pendaftaran HKI

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Ketergantungan pada tren pasar yang cepat berubah	Produk kreatif mudah ditinggalkan saat tren bergeser	Pendapatan pelaku ekonomi kreatif tidak stabil	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Diversifikasi produk kreatif agar tidak hanya bergantung pada tren	Kampanye produk kreatif berkelanjutan	Analisis tren pasar dan diversifikasi produk kreatif
Misi 6: Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat								
Tujuan 6: Terwujudnya SDM yang berdaya saing	Kesenjangan keterampilan tenaga kerja	Kurikulum pendidikan tidak sesuai kebutuhan industri	Pengangguran meningkat, daya saing menurun	Kemungkinan: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi	Pelatihan vokasi, kerja sama dengan industri	Publikasi program pelatihan dan peluang kerja	Evaluasi serapan tenaga kerja per tahun
Sasaran 6.1: Meningkatnya kualitas pendidikan	Rendahnya kompetensi guru dan tenaga pendidik	Kurangnya pelatihan dan pengembangan profesional	Mutu pendidikan menurun, hasil belajar siswa rendah	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Peningkatan kualitas guru melalui pelatihan dan sertifikasi	Publikasi program peningkatan kompetensi guru	Evaluasi kompetensi guru secara berkala
	Keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan	Minimnya anggaran pendidikan dan infrastruktur	Proses belajar terganggu, kualitas belajar tidak maksimal	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Peningkatan anggaran dan pembangunan infrastruktur pendidikan	Sosialisasi pembangunan sarana prasarana pendidikan	Monitoring kondisi sarana prasarana pendidikan
	Tingginya angka putus sekolah	Faktor ekonomi keluarga dan rendahnya motivasi belajar	Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi siswa miskin	Kampanye pentingnya pendidikan bagi keluarga miskin	Monitoring angka putus sekolah tiap tahun
	Kesenjangan akses pendidikan antar wilayah	Perbedaan pembangunan wilayah dan keterbatasan transportasi	Ketidakmerataan kualitas pendidikan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Pemerataan akses pendidikan melalui pembangunan sekolah di daerah terpencil	Laporan pemerataan akses pendidikan kepada publik	Evaluasi kesenjangan pendidikan antar wilayah
	Rendahnya literasi digital di kalangan siswa dan guru	Minimnya pelatihan digital dan fasilitas TIK	Siswa kurang siap menghadapi era digital	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Pelatihan literasi digital dan penyediaan fasilitas TIK	Kampanye literasi digital di sekolah	Monitoring pemanfaatan TIK dalam pembelajaran
	Kurikulum yang kurang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja	Kurangnya kolaborasi dengan dunia usaha dan industri	Lulusan tidak sesuai kebutuhan pasar kerja	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 6)	Pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan pasar kerja	Sosialisasi kurikulum berbasis industri kepada sekolah dan masyarakat	Evaluasi keterkaitan kurikulum dengan kebutuhan pasar kerja
Sasaran 6.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Kurangnya akses layanan kesehatan di daerah terpencil	Infrastruktur transportasi terbatas, distribusi fasilitas tidak merata	Masyarakat sulit mendapatkan layanan kesehatan dasar	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Pembangunan puskesmas dan posyandu di daerah terpencil	Publikasi program pemerataan layanan kesehatan	Monitoring akses layanan kesehatan di wilayah terpencil

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat	Kurangnya edukasi kesehatan dan sosialisasi pola hidup sehat	Tingginya angka penyakit akibat pola hidup tidak sehat	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Tinggi (Prioritas 2)	Kampanye pola hidup sehat berbasis masyarakat	Kampanye kesehatan melalui media cetak dan digital	Evaluasi tingkat kesadaran masyarakat terhadap pola hidup sehat
	Keterbatasan jumlah dan kompetensi tenaga medis	Distribusi tenaga medis tidak merata, pelatihan kurang optimal	Pelayanan kesehatan tidak optimal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 3)	Peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga medis	Sosialisasi program pelatihan tenaga medis	Monitoring distribusi tenaga medis dan kompetensinya
	Tingginya prevalensi penyakit menular dan tidak menular	Faktor lingkungan, pola makan, perilaku berisiko	Angka kesakitan dan kematian meningkat	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 4)	Program pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular	Publikasi program pengendalian penyakit	Monitoring prevalensi penyakit menular dan tidak menular
	Minimnya sarana prasarana kesehatan yang memadai	Kurangnya anggaran kesehatan dan pemeliharaan fasilitas	Mutu pelayanan kesehatan menurun	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 5)	Pengadaan sarana prasarana kesehatan yang memadai	Sosialisasi pembangunan dan perbaikan fasilitas kesehatan	Evaluasi kondisi sarana prasarana kesehatan
	Rendahnya cakupan imunisasi dan program kesehatan preventif	Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya imunisasi	Meningkatnya risiko wabah penyakit	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 6)	Peningkatan cakupan imunisasi dan program preventif	Kampanye pentingnya imunisasi bagi masyarakat	Monitoring cakupan imunisasi dan program preventif
Sasaran 6.3: Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesetaraan gender	Norma budaya dan tradisi yang masih bias gender	Terhambatnya pencapaian kesetaraan gender	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Kampanye kesetaraan gender melalui pendidikan dan media	Publikasi program kesetaraan gender di media massa	Evaluasi perubahan kesadaran gender di masyarakat
	Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan diskriminasi	Kurangnya penegakan hukum dan perlindungan korban	Meningkatnya kerentanan perempuan dan anak	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Peningkatan layanan perlindungan korban KDRT dan diskriminasi	Sosialisasi layanan pengaduan KDRT dan diskriminasi	Monitoring jumlah kasus KDRT dan diskriminasi
	Kurangnya akses perempuan dan kelompok rentan pada layanan publik	Keterbatasan fasilitas ramah gender dan inklusif	Perempuan dan kelompok rentan sulit mendapatkan hak dasar	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Tinggi (Prioritas 3)	Pengembangan fasilitas ramah gender dan inklusif	Kampanye akses layanan publik untuk kelompok rentan	Evaluasi akses layanan publik bagi kelompok rentan

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Minimnya partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan	Kurangnya kebijakan afirmatif dan dukungan struktural	Ketidakadilan gender dalam pengambilan keputusan	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 4)	Mendorong kebijakan afirmatif untuk partisipasi perempuan	Publikasi partisipasi perempuan dalam politik dan kepemimpinan	Monitoring keterwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan
	Rendahnya kualitas pengasuhan dalam keluarga	Kurangnya edukasi tentang parenting dan pola asuh	Anak tumbuh dengan kualitas pendidikan dan mental rendah	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Pelatihan parenting dan edukasi pola asuh keluarga	Sosialisasi program parenting di sekolah dan komunitas	Monitoring efektivitas program parenting
	Stigma sosial terhadap penyandang disabilitas dan kelompok minoritas	Kurangnya kampanye kesetaraan dan inklusivitas di masyarakat	Diskriminasi sosial yang menghambat partisipasi masyarakat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Kampanye inklusi sosial untuk disabilitas dan kelompok minoritas	Kampanye anti diskriminasi berbasis komunitas	Evaluasi partisipasi penyandang disabilitas dan kelompok minoritas
Sasaran 6.4: Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga	Rendahnya partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan	Kurangnya wadah dan program pemberdayaan pemuda	Pemuda kurang berkontribusi dalam pembangunan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan program pemberdayaan dan kepemudaan	Publikasi kegiatan pemuda di media sosial dan lokal	Monitoring jumlah dan partisipasi pemuda dalam kegiatan pembangunan
	Minimnya pembinaan dan pelatihan olahraga bagi pemuda	Terbatasnya program pelatihan dan pembinaan atlet	Prestasi olahraga daerah sulit berkembang	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Mengembangkan program pembinaan dan pelatihan olahraga	Sosialisasi program pelatihan atlet daerah	Evaluasi kualitas pembinaan olahraga
	Keterbatasan sarana dan prasarana olahraga	Fasilitas olahraga belum merata dan terawat dengan baik	Kesempatan latihan dan pembinaan berkurang	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Membangun dan merawat sarana olahraga secara merata	Kampanye pembangunan sarana olahraga	Monitoring ketersediaan dan kondisi sarana olahraga
	Kurangnya dukungan pendanaan untuk kegiatan kepemudaan dan olahraga	Keterbatasan anggaran daerah untuk pemuda dan olahraga	Kegiatan kepemudaan dan olahraga tidak optimal	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 4)	Mengalokasikan anggaran khusus untuk pemuda dan olahraga	Transparansi penggunaan anggaran kepemudaan dan olahraga	Evaluasi realisasi anggaran kegiatan kepemudaan dan olahraga
	Rendahnya motivasi dan kesadaran pemuda terhadap peran sosial	Kurangnya edukasi dan kampanye kesadaran peran pemuda	Pemuda kurang peduli terhadap pembangunan sosial	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Melaksanakan kampanye motivasi dan kesadaran sosial bagi pemuda	Sosialisasi pentingnya peran pemuda dalam pembangunan	Monitoring tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Kurangnya akses pemuda ke ajang kompetisi olahraga tingkat regional/nasional	Minimnya jejaring dan kesempatan mengikuti kompetisi	Berkurangnya peluang prestasi olahraga di tingkat tinggi	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Memfasilitasi akses pemuda ke kompetisi tingkat regional/nasional	Publikasi jadwal dan hasil kompetisi olahraga	Evaluasi prestasi olahraga pemuda di tingkat regional/nasional
Misi 7 : Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintah Daerah Yang Berdaya Saing Tinggi Atas Pengukuran Indeks Kinerja Yang Ditetapkan Oleh Kementerian Dan Lembaga Lainnya								
Tujuan 7: Terwujudnya Kinerja Pemerintah Daerah yang berdaya saing	Rendahnya kualitas pelayanan publik	Kurangnya kompetensi ASN, minimnya inovasi	Menurunnya kepercayaan masyarakat	Kemungkinan: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi	Pelatihan ASN, penerapan e-government	Laporan kinerja terbuka ke publik	Survey kepuasan masyarakat tahunan
Sasaran 7.1: Meningkatnya Kinerja Perencanaan, Akuntabilitas dan Pengawasan yang berkualitas	Kualitas dokumen perencanaan pembangunan rendah	Penyusunan perencanaan tidak berbasis data yang valid	Program pembangunan tidak tepat sasaran	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan evidence based	Publikasi hasil perencanaan pembangunan secara terbuka	Monitoring kualitas dokumen perencanaan pembangunan
	Akuntabilitas kinerja pemerintah daerah lemah	Kurangnya transparansi dalam pelaporan kinerja	Menurunnya kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja	Sosialisasi laporan kinerja secara transparan	Evaluasi rutin atas akuntabilitas kinerja perangkat daerah
	Sistem pengawasan internal tidak berjalan optimal	Keterbatasan fungsi dan kapasitas APIP	Potensi penyimpangan dan inefisiensi anggaran	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Tinggi (Prioritas 3)	Mengoptimalkan peran APIP dalam pengawasan internal	Laporan hasil audit internal disampaikan secara rutin	Audit internal berkala untuk memastikan fungsi pengawasan berjalan
	Data dan informasi pembangunan tidak akurat dan terintegrasi	Belum adanya sistem data pembangunan yang terintegrasi	Pengambilan keputusan yang salah atau lambat	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Sedang (Prioritas 4)	Membangun sistem data pembangunan yang terintegrasi	Sosialisasi pemanfaatan sistem data pembangunan	Monitoring kualitas dan integrasi data pembangunan
	Kurangnya kompetensi aparatur dalam perencanaan dan pengawasan	Minimnya pelatihan dan peningkatan kapasitas SDM	Kinerja perencanaan dan pengawasan tidak optimal	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Menyelenggarakan pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur	Penyebarluasan program peningkatan kapasitas aparatur	Evaluasi tingkat kompetensi aparatur pasca pelatihan
	Rendahnya partisipasi publik dalam proses perencanaan dan pengawasan	Kurangnya mekanisme pelibatan masyarakat secara aktif	Aspirasi masyarakat tidak terakomodasi	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Membuka ruang partisipasi publik dalam perencanaan dan pengawasan	Dialog publik dan forum konsultasi dengan masyarakat	Monitoring tingkat partisipasi masyarakat dalam musrenbang dan forum publik
Sasaran 7.2: Terwujudnya profesionalitas ASN	Rendahnya kompetensi ASN dalam melaksanakan	Kurangnya pelatihan dan pengembangan kapasitas ASN	Pelayanan publik tidak optimal	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan program pelatihan dan sertifikasi ASN	Sosialisasi program peningkatan kapasitas ASN	Monitoring hasil pelatihan ASN

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	tugas							
	Kurangnya integritas dan etika kerja ASN	Budaya kerja yang belum sepenuhnya menjunjung integritas	Turunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Memperkuat penerapan kode etik ASN	Kampanye integritas dan kode etik ASN	Evaluasi penerapan kode etik ASN secara berkala
	Minimnya inovasi dan kreativitas ASN dalam pelayanan publik	Lingkungan kerja tidak mendukung inovasi	Pelayanan publik menjadi stagnan dan tidak responsif	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Mendorong budaya kerja inovatif melalui kompetisi inovasi ASN	Publikasi hasil inovasi ASN secara luas	Monitoring jumlah inovasi ASN tiap tahun
	Tingkat kedisiplinan ASN yang rendah	Kurangnya pengawasan dan penerapan reward & punishment	Menurunnya produktivitas kerja ASN	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 3)	Penerapan reward and punishment secara konsisten	Sosialisasi peraturan disiplin ASN	Evaluasi tingkat kedisiplinan ASN
	Terbatasnya sistem merit dalam manajemen ASN	Proses rekrutmen, mutasi, dan promosi belum sepenuhnya berbasis merit	Kualitas manajemen ASN menurun dan tidak objektif	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 5)	Menerapkan sistem merit dalam manajemen ASN	Sosialisasi sistem merit dan rekrutmen berbasis kompetensi	Audit pelaksanaan sistem merit dalam manajemen ASN
	Rendahnya motivasi dan kepuasan kerja ASN	Kesejahteraan ASN belum optimal dan beban kerja tinggi	ASN cenderung bekerja tanpa semangat dan kurang produktif	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Meningkatkan kesejahteraan dan manajemen beban kerja ASN	Forum diskusi dan survei kepuasan ASN	Survey kepuasan dan motivasi ASN secara rutin
Sasaran 7.3: Meningkatnya tata kelola arsip dan literasi masyarakat	Pengelolaan arsip tidak tertata dengan baik	Belum optimalnya penerapan sistem kearsipan digital	Dokumen dan arsip sulit diakses saat dibutuhkan	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Mengimplementasikan sistem arsip digital terintegrasi	Sosialisasi sistem arsip digital ke OPD	Monitoring efektivitas sistem arsip digital
	Kehilangan arsip penting akibat bencana atau kelalaian	Tidak adanya backup data arsip yang memadai	Hilangnya data penting yang berdampak pada pelayanan publik	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Membuat backup arsip secara berkala (fisik dan digital)	Laporan berkala terkait keamanan arsip	Evaluasi backup arsip secara rutin
	Rendahnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya literasi	Kurangnya sosialisasi tentang literasi	Masyarakat kurang memahami informasi yang benar	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 3)	Sosialisasi pentingnya literasi melalui berbagai media	Kampanye literasi melalui media cetak, digital, dan event masyarakat	Evaluasi efektivitas kampanye literasi

MISI/ TUJUAN/ SASARAN	URAIAN RESIKO	SEBAB RESIKO	DAMPAK RESIKO	ANALISIS RESIKO	RESIKO PRIORITAS	RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)	RENCANA KOMUNIKASI RTP	RENCANA PEMANTAUAN RTP
(1)	*(2)*	*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*	*(8)*	*(9)*
	Kurangnya minat baca masyarakat	Pengaruh budaya digital hiburan yang lebih dominan	Rendahnya kualitas SDM masyarakat	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Program kampanye minat baca masyarakat	Penyelenggaraan lomba baca dan literasi	Monitoring program peningkatan minat baca
	Keterbatasan sarana dan prasarana literasi (perpustakaan, akses digital)	Fasilitas literasi belum merata dan kurang modern	Akses literasi masyarakat terbatas	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Peningkatan sarana prasarana literasi, perpustakaan, dan akses digital	Sosialisasi pembangunan sarana literasi kepada masyarakat	Evaluasi pemanfaatan sarana literasi
	Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan arsip dan literasi	Kurangnya pelatihan SDM di bidang arsip dan literasi	Pengelolaan arsip dan literasi menjadi tidak profesional	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Pelatihan SDM terkait arsip dan literasi	Publikasi kegiatan pelatihan SDM	Evaluasi kompetensi SDM pasca pelatihan
Sasaran 7.4: Meningkatnya kualitas Pengelolaan keuangan dan pendapatan daerah	Ketidaktepatan dalam perencanaan anggaran daerah	Kurangnya koordinasi antar perangkat daerah	Program pembangunan tidak berjalan optimal	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 1)	Meningkatkan kualitas perencanaan berbasis data dan kebutuhan	Sosialisasi standar perencanaan anggaran	Monitoring konsistensi perencanaan dengan realisasi
	Keterlambatan penyerapan anggaran	Proses administrasi yang berbelit dan lambat	Hambatan pada realisasi program prioritas	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 2)	Simplifikasi proses administrasi anggaran	Laporan realisasi anggaran secara berkala	Evaluasi rutin penyerapan anggaran per triwulan
	Kebocoran atau penyalahgunaan anggaran	Pengawasan internal yang lemah	Kerugian keuangan daerah dan hilangnya kepercayaan publik	Probabilitas: Sedang, Dampak: Tinggi	Tinggi (Prioritas 3)	Penguatan fungsi pengawasan internal	Transparansi hasil audit internal	Audit keuangan secara periodik
	Pendapatan daerah tidak mencapai target	Basis data potensi pendapatan daerah belum akurat	Defisit anggaran dan berkurangnya pelayanan publik	Probabilitas: Tinggi, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 4)	Optimalisasi basis data dan intensifikasi pajak/retribusi daerah	Publikasi target dan realisasi pendapatan daerah	Monitoring capaian pendapatan daerah setiap bulan
	Sistem pelaporan keuangan kurang transparan	Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi	Menurunnya akuntabilitas keuangan daerah	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 5)	Mengembangkan sistem pelaporan digital berbasis transparansi	Sosialisasi penggunaan aplikasi pelaporan digital	Evaluasi kualitas pelaporan keuangan
	Kurangnya kompetensi SDM dalam pengelolaan keuangan daerah	Minimnya pelatihan dan pengembangan SDM	Kualitas laporan keuangan menurun dan berisiko disclaimer	Probabilitas: Sedang, Dampak: Sedang	Sedang (Prioritas 6)	Pelatihan rutin pengelolaan keuangan bagi SDM terkait	Publikasi kegiatan pelatihan SDM	Uji kompetensi dan evaluasi pasca pelatihan

LAMPIRAN III : CASCADING
POHON KINERJA
MISI 1: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR PEREKONOMIAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

Tujuan 1.1: Terwujudnya pertumbuhan perekonomian yang berwawasan lingkungan

- Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)
- PDRB per kapita ADHB (Rp Juta)
- Tingkat Kemiskinan (%)
- Pembentukan modal tetap bruto (% PDRB) (%)
- Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
- Rasio Gini (indeks)
- Proporsi kontribusi PDRB Kota terhadap Provinsi (Angka)
- Indeks Ketahanan Pangan (Indeks)

Kinerja	**Sasaran 1.1.1 :** Terciptanya Ekosistem Usaha yang mendukung pertumbuhan UMKM, Industri dan perdagangan secara berkelanjutan	**Sasaran 1.1.2 :** Meningkatnya iklim investasi yang kondusif untuk mendorong pertumbuhan usaha dan peningkatan produktivitas tenaga kerja daerah	**Sasaran 1.1.3 :** Meningkatnya kemandirian desa dalam pengelolaan potensi lokal guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat desa	**Sasaran 1.1.4 :** Terwujudnya ketahanan pangan dengan meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan
Indikator	Rasio PDRB Industri Pengolahan (%)	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja (%)	Indeks Desa (rata-rata indeks desa)	Rasio PDRB Sektor Pertanian, kehutanan dan Perikanan(%)
	Rasio Volume Koperasi terhadap PDRB (%)	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal (%) (%)	2.13.02 PROGRAM PENATAAN DESA	Prevalansi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*) (%)
	Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	Persentase peningkatan Investasi (%) (Persentase)	Meningkatnya kualitas penataan desa	Tingkat produktifitas tenaga kerja pada lapangan usaha sektor pertanian, kehutanan dan perikanan (Juta/orang)
	2.17.03 - PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	2.07.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase fasilitasi penataan desa (%)	2.09.02 PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN

Outcome	Meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi	Terkelolanya informasi tenaga kerja		Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan
Indikator outcome	Persentase pengawasan dan pemeriksaan koperasi (persentase)	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja (%)	2.13.03 PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	Persentase Ketersedian cadangan pangan (%)
	2.17.04 PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	2.07.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya efektivitas kerja sama desa	2.09.03 PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT
	Meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi	Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa (Persentase)	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat
	Persentase koperasi aktif (persentase)	Persentase Lulusan Pelatihan Yang Bekerja (%)	2.13.04 PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)
	2.17.05 - PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	2.09.04 PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN
	Meningkatnya kualitas SDM perkoperasian	Meningkatnya penempatan tenaga kerja	Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)	Meningkatnya penanganan kerawanan pangan
	Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan (%)	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri (Persentase)	2.13.05 PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase Penduduk Rawan Pangan yang ditangani (%)
	2.17.06 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah Tinggi Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi (%) (%)	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat dalam pembangunan	2.09.05 PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN
	Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase disabilitas bekerja di sektor formal (%) (%)	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat (Persentase)	Meningkatnya pengawasan dan mutu dan kemanan pangan
			Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) (Persentase)	

Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas (%)

2.17.07 - PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO UMKM

Meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri

Pertumbuhan Wirausaha (%)

Proporsi jumlah UKM non pertanian (*)

2.17.08 - PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Meningkatnya daya saing UMKM

Proporsi UKM menjalin kemitraan dan ekspor (persentase)

Rasio kewirausahaan %)

3.30.03 - PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN

Meningkatnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi

2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL

Meningkatnya pekerja Indonesia yang terlindungi

Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) (%)

2.18.02 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL

Meningkatnya kemudahan berinvestasi

Realisasi Total terhadap Target Investasi (Persentase)

2.18.03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL

Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal

Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi (Persentase)

2.18.04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko

7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Talawi)

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)

Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Barangin)

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)

Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Lembah segar))

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)

Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Silungkang)

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)

Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Durian 1)

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)

Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Durian 2)

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)

Persentase Tingkat Keamanan Produk Pangan Segar yang Aman dari Cemaran Mikroba, Bahan Kimia/Berbahaya dan Residu Pestisida (%)

3.25.04 PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA

Meningkatnya produksi perikanan budidaya

Produktifitas perikanan budidaya (Kg)

3.25.06 PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Meningkatnya konsumsi ikan oleh masyarakat

Angka Konsumsi Ikan (Kg/KAP/TH)

3.27.02 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN

Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian

Jumlah Produksi Padi (Ton)

Jumlah Produksi Kopi Robusta (Ton)

Persentase Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya (persentase)

3.30.04 - PROGRAM STABILITASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING

Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting

Persentase Stabilitasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting (persentase)

3.30.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR

Meningkatnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor

Nilai Ekspor Barang (Nilai)

3.30.06 - PROGRAM STANDARISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN

Meningkatnya tata tertib niaga dan mutu produk

Persentase penanganan pengaduan konsumen

Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan (Persentase)

2.18.05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal

Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha (Persentase)

2.18.06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL

Meningkatnya pemanfaatan dan informasi penanaman modal

Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal (Persentase)

Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Lubang Panjang)

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)

Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Saringan)

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)

Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Air Dingin)

Persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (%)

Meningkatnya persentase lembaga kemasyarakatan yang aktif (Kelurahan Aur Mulyo)

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (Talawi)

Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)

Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (Barangin)

Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)

Jumlah Produksi Kakao (Ton)

Jumlah Produksi daging sapi (Ton)

3.27.03 PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN

Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian

Persentase Sawah yang Diairi (%)

3.27.04 PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner

Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular (%)

3.27.05 PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN

Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian

3.30.07 - PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI
Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri
Persentase promosi produk lokal yang difasilitasi / dilaksanakan (persentase)

3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
Meningkatnya realisasi pembangunan industri
Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri (persentase)
Proposi jumlah IKM (*)

3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri
Persentase pertumbuhan Informasi industri (%)

Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (Lembah Segar)
Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)
Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (Silungkang)
Persentase Terselenggaranya pemerintahan desa dengan baik (%)

Persentase Penanganan Bencana Pertanian (Persentase)

3.27.07 PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN
Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian
Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang Ditingkatkan (Persentase)
Persentase Penyuluh yang Naik Jenjang jabatan (%)

MISI 2 : MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE BERBASIS IT

Tujuan 2.1: Terwujudnya Smart Governance Berbasis IT

Indeks Masyarakat Digital Indonesia

	Sasaran 2.1.1:	Sasaran 1.1.2:
Kinerja	Terselenggaranya pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi	Terwujudnya pelayanan Publik yang efektif dan efisien
Indikator	Indeks Pemerintah digital (angka)	Indek Pelayanan Publik
	2.16.02 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	2.12.02 PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK
Outcome	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk
Indikator outcome	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses dan Kualitas Informasi Publik Pemerintah Daerah (survei) (%)	Persentase Terselenggaranya Pendaftaran Penduduk (%)
	2.16.03 PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.12.03 PROGRAM PENCATATAN SIPIL
	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil
	Nilai Aspek Teknologi Digital (Nilai) (Nilai)	Persentase Terselenggaranya Pencatatan Sipil (%)
	2.20.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	2.12.04 PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
	Tercapainya kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)	Meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan
	Persentase data sektoral yang memenuhi standar data dan dapat diakses secara online (%)	Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan (Persentase)
	2.21.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	2.12.05 PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN
	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	Meningkatnya kualitas profil kependudukan
	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (%)	Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan (Persentase)
		7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
		Meningkatnya pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik

(Talawi)
Pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)
Meningkatnya pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik(Barangin)
Pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)
Meningkatnya pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (Lembah segar))
Pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)
Meningkatnya pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (Silungkang)
Pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)
Meningkatnya pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (Kelurahan Durian 1)
Pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)
Meningkatnya pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik(Kelurahan Durian 2)
Pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)
Meningkatnya pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik(Kelurahan Lubang Panjang)
Pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)
Meningkatnya pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik(Kelurahan Saringan)
Pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)
Meningkatnya pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (Kelurahan Air Dingin)
Pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)
Meningkatnya pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (Kelurahan Aur Mulyo)
Pemerintahan dan pelayanan publik yang terlaksana dengan baik (%)

MISI 3 : PENGUATAN INFRASTUKTUR PENUNJANG TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Tujuan 3.1: Terwujudnya infrastruktur yang inklusif, tangguh bencana dan berkelanjutan

Indeks Kinerja Infrastruktur (Indeks)

Indeks Risiko Bencana (IRBI) (Angka)

	Sasaran 3.1.1:	Sasaran 3.1.2:
Kinerja	Meningkatnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana	Meningkatnya Aksesbilitas dan Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas
Indikator	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Indeks)	Indeks Layanan Infrastruktur Dasar (Indeks)
	Indeks Ketahanan Daerah (Angka)	Indek Konektivitas Darat (Indeks)
		Indeks Tertib Administrasi Pertanahan (Indeks)
	1.05.03 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.03.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)
Outcome	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Meningkatnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan meningkatnya akses masyarakat terhadap irigasi
Indikator outcome	Persentase cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan bencana (persentase)	Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir (Persentase)
	Meningkatnya penanganan bencana pada saat tanggap darurat	Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas (Persentase)
	Persentasepenanganan tanggap darutat bencana (persentase)	Kapasitas Air Baku (m3/detik) (m3/detik)
	Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	1.03.03 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM
	Persentase penanganan pasca bencana (persentase)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
	1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan (%) (%)
	Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana	1.03.05 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH
	Persentase korban bencana alam sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana (persentase)	Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
	Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatan kesiapsiagaannya(persentase)	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman ((%))
	Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial(persentase)	

2.11.02 - PROGRAM PENGAWASAN DANPROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRF
Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti (Persentase)

2.11.03 PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP
Menurunnya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
Persentase badan air yang memenuhi baku mutu (%)
Nilai Indeks Udara Model EU (Indeks)
Tutupan Lahan (Hektar)
Meningkatnya ketersediaan dan kualitas data hasil pemantauan lingkungan sebagai dasar pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
Persentase sampel uji kualitas lingkungan yang dianalisis tepat waktu (%)

2.11.04 - PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)
Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati
Persentase RTH (Persentase)

2.11.05 - PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)
Meningkatnya penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)
Persentase Limbah B3 yang Terkelola (Persentase)

2.11.06 -PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)
Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan
Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Kab/Kota (%)

2.11.07 - PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH

1.03.06 - PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE
Meningkatnya kualitas sistem drainase perkotaan
Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik (Persentase)

1.03.08 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG
Meningkatnya kualitas bangunan gedung
Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik (Persentase)

1.03.09 - PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA
Meningkatnya bangunan dan lingkungan yang tertata
Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan (Persentase)

1.03.10 - PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN
Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman
Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota (%)
Persentase jembatan dalam kondisi mantap (%)

1.03.11 -PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI
Meningkatnya kompetensi tenaga konstruksi
Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Terampil (%)

1.03.12 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penataan ruang
Persentase pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang (RTRW / RDTR) (%)

Meningkatnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
Persentase MHA yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Persentase)

2.11.08 - PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Meningkatnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup
Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)

2.11.09 - PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT
Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Persentase)

2.11.10 - PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP
Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup
Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup (Persentase)

2.11.11 - PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN
Meningkatnya tata kelola persampahan
Timbulan Sampah Terolah Di Fasilitas Pengolahan Sampah (%) (%)
Proporsi RT Dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (% RT) (%)

1.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN
Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni (%)
Meningkatkan akses hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) melalui penyediaan rumah susun sederhana sewa (Rusunawa)
Persentase hunian rusunawa yang dihuni MBR (%)

1.04.03 - PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN
Meningkatnya kualitas kawasan permukiman
Persentase kawasan kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota ditangani (%)

1.04.04 - PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH
Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman
Persentase luas kawasan permukiman rawan kumuh yang ditangani (%)

1.04.05 - PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)
Meningkatnya penyediaan PSU permukiman
Konsumsi Listrik per Kapita (Kwh/Kapita)
Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum) (Persentase)

2.10.04 - PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN
Meningkatnya penyelesaian sengketa tanah garapan
Persentase Terselesaikannya Kasus Tanah Garapan Belum Bersertipikat yang Dilakukan melalui Mediasi (Persentase)

2.10.05 - PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN
Meningkatnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan (Persentase)

2.10.06 - PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE
Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang Siap Diredistribusikan yang Berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee (Ha)

2.10.07 -PROGRAM PENETAPAN TANAH ULAYAT
Meningkatnya tata kelola tanah ulayat
Persentase Tanah Ulayat yang Ditetapkan (Persentase)

2.10.08 - PROGRAM PENGELOLAAN TANAH KOSONG
Meningkatnya pengelolaan tanah kosong
Persentase Tanah Kosong yang Dikelola (Persentase)

2.10.10 - PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH
Meningkatnya tata tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah
Persentase Bidang tanah yang sudah terdaftar / bersertifikat (Persentase)

2.15.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat
Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal (Persentase)

2.15.05 - PROGRAM PENGELOLAAN PERKERETAAPIAN
Meningkatnya Pengelolaan Perlintasan Kereta api
Cakupan perlintasan kereta api yang ditangani (persentase)

MISI 4 : PENINGKATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MELALUI PENGEMBANGAN KOMUNITAS SENI DEMI MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA WISATA YANG ESTETIK DAN MEMILIKI FUNGSI EKONOMI SERTA MENSEJAHTERAKAN

Tujuan 4.1: Terwujudnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis

Indeks Ketahanan Nasional (indeks)

Kinerja	**Sasaran 4.1.1:**	**Sasaran 4.1.2:**
	Meningkatnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama	Meningkatnya komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan adat istiadat
Indikator	Indeks Harmoni Indonesia (Indeks)	Persentase pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan (%)
	Angka Kriminalitas (*)	
	Indeks Ketahanan Nasional Gatra Pertahanan dan Keamanan (*)	
	1.05.02 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Outcome	Meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan
Indikator outcome	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan (%)	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)
	Meningkatnya penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
	Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas (Persentase)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional
	Meningkatnya perlindungan terhadap masyarakat	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)
	Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat (Persentase)	2.22.04 - PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH
	Meningkatnya kapasitas SDM PPNS	Meningkatnya akses masyarakat terhadap informasi sejarah
	Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya (Persentase)	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Tinjauan Sejarah Lokal (Persentase)
	1.05.04 - PROGRAM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA
	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan
		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)
		Persentase pelestarian cagar budaya (Persentase)

cakupan penyebaran informasi dan edukasi rawan kebakaran (persentase)

Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran (persentase)

7.01.04 - PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Talawi)
Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Barangin)
Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)
Meningkatnya Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (Lembah Segar)
Persentase wilayah dalam kondisi aman dan tertib (%)

2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
Meningkatnya tata kelola museum
Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)

MISI 5: Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan

	Tujuan 5.1: Peningkatan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat	
	Rasio PDRB Akomodasi Mamin (%)	
Kinerja	**Sasaran 5.1.1:**	**Sasaran 5.1.2:**
	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap perekonomian daerah	Memperkuat peran ekonomi kreatif dalam mendukung perekonomian daerah
Indikator	PAD sektor Pariwisata (Angka)	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDRB Ekonomi Kreatif provinsi (%)
	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	3.26.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL
Outcome	Meningkatnya daya tarik destinasi pariwisata	Meningkatnya kualitas ekosistem kreatif
Indikator outcome	Persentase Kunjungan Wisatawan (%)	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual (Persentase)
	Jumlah Tamu Asing Hotel Berbintang (ribu orang) (Orang)	
	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	3.26.05 -PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
	Meningkatnya jangkauan pemasaran pariwisata	Meningkatnya kapasitas SDM pariwisata dan ekonomi kreatif
	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)

MISI 6: Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat

Tujuan 6.1: Terwujudnya SDM yang berdaya saing

Indeks Pembangunan Manusia (Indeks)

	Sasaran 6.1.1:	Sasaran 6.1.2:	Sasaran 6.1.3:	Sasaran 6.1.4:
Kinerja	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terciptanya Keluarga Berkualitas, Kesetaraan Gender, dan Masyarakat Inklusif	Meningkatnya Peran Pemuda dalam Pembangunan dan Prestasi Olahraga
Indikator	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Literasi Membaca (Angka)	Usia Harapan Hidup (UHH) ((tahun))	Indeks Pembangunan Keluarga (*)	Persentase peningkatan partisipasi pemuda berwirausaha (%)
	Persentase satuan Pendidikan yang mencapai standar kompetensi minimum pada asesmen tingkat nasional untuk Numerasi (Angka)	Prevalansi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (%) (%)	Indeks Ketimpangan Gender (IKG) (Indeks)	Persentase peningkatan prestasi Olahraga (%)
	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun)	Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN) ((%))	Indeks Perlindungan Anak (IPA) (Indeks)	
	Harapan Lama Sekolah (Tahun)		Indeks Pembangunan Gender (IPG) (Indeks)	2.19.09 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN
	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi ((%))	1.02.02 - PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kesejahteraan Sosial (Indeks)	Meningkatnya daya saing kepemudaan
		Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan Masyarakat		Persentase Peningkatan kapasitas daya saing Kepemudaan (%)

	1.01.02 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.06.02 - PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		
Outcome	Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Meningkatnya pemberdayaan sosial	2.19.09 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
Indikator outcome	Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD RSUD)	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial yang melaksanakan pelayanan sosial di luar panti rehabilitasi sosial (%)	Meningkatnya pembudayaan dan prestasi olah raga	
	Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	persentase SDM kesejahteraan sosial yang meningkatkan kompetensinya dalam pelayanan sosial (%)	Persentase Atlet yang berdaya saing (%)	
	Rata-rata kemampuan Numerasi SMP berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	Angka keberhasilan pengobatan Tuberkulosis (treatment success rate) (%) (%)	persentase lembaga di bidang kesejahteraan sosial yang meningkatkan kualitasnya dalam pelayanan sosial (%)		
	Rata-rata kemampuan Literasi SMP berdasarkan asesmen nasional (Nilai)	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat (UPTD INSTALASI FARMASI KOTA)	Persentase Pekerja Sosial/Tenaga Kesejahteraan Sosial dan/atau Relawan Sosial yang Melaksanakan Penanganan Korban Bencana pada Masa Tanggap Darurat dan Pasca Bencana Sesuai Standar (%)	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
	Lulusan SD yang hafal alqur''an juz 30 (%)	Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate) ((%))	1.06.03 PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Meningkatnya kualitas kepramukaan	
	Anak putus sekolah yang melanjutkan pendidikan ke pendidikan non formal (%)	Angka Kematian Ibu (AKI) ((per 100.000 kelahiran hidup))	Meningkatnya layanan penanganan warga negara migran korban tindak kekerasan	Persentase peningkatan kapasitas anggota kepramukaan (%)	

1.01.03 - PROGRAM PENGELOLAAN KURIKULUM	1.02.03 - PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase warga negara migran korban tindak kekerasan yang tertangani (Persentase)
Meningkatnya kualitas kurikulum Pendidikan	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan	1.06.04 - PROGRAM REHABILITASI SOSIAL
Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal (Persentase)	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	Meningkatnya rehabilitasi sosial
1.01.04 - PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga kesehatan (UPTD RSUD)	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)
Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang Kesehatan (Persentase)	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)
Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik (Persentase)	1.02.04 - PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)
1.01.05 - PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman	persentase pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) lainnya di luar HIV/AIDS dan NAPZA yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (%)
Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan Minuman (Persentase)	1.06.05 - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL
Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui (Persentase)	1.02.05 - PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial
	Meningkatnya kualitas	Persentase (%) penyandang

1.01.06 - PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya (Persentase)
Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan (Persentase)	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi (Persentase)
Persentase Pengembangan Bahasa dan Sastra (Persentase)		persentase daerah yang melalsanakan pengelolaan dan pendataan data fakir miskin (%)
		persentase keluarga miskin dan rentan penerima perlindungan sosial yang tergraduasi dari kemiskinan (%)
		1.06.06 PROGRAM PENANGANAN BENCANA
		Meningkatnya perlindungan sosial korban bencana
		Persentase korban bencana alam sosial dan atau non alam yang terpenuhi kebutuhan dasar pada saat dan setelah tanggap darurat bencana(Persentase)
		Persentase masyarakat di daerah rawan bencana yang meningkatkan kesiapsiagaannya (Persentase)
		Persentase korban bencana yang mendapatkan layanan pemulihan sosial (Persentase)
		1.06.07 PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN
		Meningkatnya tata kelola taman

makam pahlawan
Persentase taman makam pahlawan nasional yang terkelola dengan baik (Persentase)
2.08.02 - PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan
Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) (Persentase)
2.08.03 - PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN
Menurunnya kekerasan terhadap perempuan
Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (%)
2.08.04 - PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA
Meningkatnya kualitas keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai (%)
2.08.06 - PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)
Terjaminnya pemenuhan hak semua anak secara komprehensif
persentase desa/kelurahan ramah anak (%)
2.08.07 - PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK
Meningkatnya pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak
Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif (Persentase)
2.14.02 - PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK
Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk
Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK) (Indeks)
Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri (Persentase)
2.14.03 - PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)

Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern (%)
Persentase Kehamilan Tidak Direncanakan (KTD) (Persentase)

2.14.04 - PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)
Meningkatnya pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)
Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja (Indeks)
Indeks Lansia Berdaya (Indeks)

MISI 7: Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya

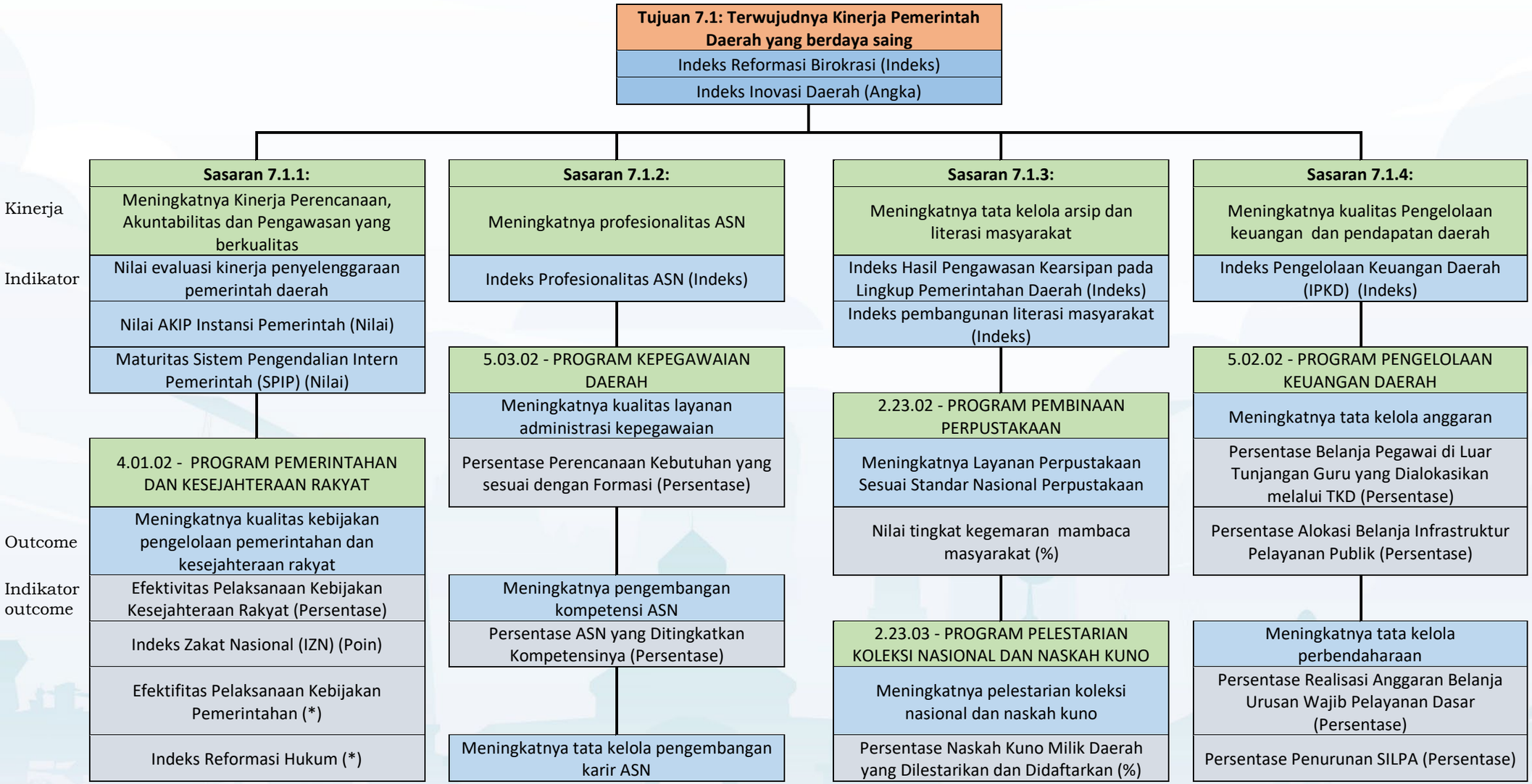

4.01.03 - PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Meningkatnya kualitas kebijakan pengelolaan perekonomian dan pembangunan
Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perekonomian dan Pembangunan (Persentase)
Efektivitas Kebijakan Administrasi Pembangunan (Persentase)
Indeks Akses Keuangan Daerah (Indeks)
Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP) (Indeks)

4.02.02 - PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Meningkatnya kualitas persidangan dan kajian peraturan perundang - undangan
Ketetapan penetapan perda APBD tahun N (persentase)
Ketetapan penetapan ranperda tahun N (persentase)

Meningkatnya kualitas penganggaran dan pengawasan
Persentase pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (persentase)

Persentase Pengembangan Karir ASN sesuai dengan Kompetensinya (Persentase)

Meningkatnya kualitas penilaian kinerja ASN
Persentase Pegawai dengan SKP Bernilai Baik (Persentase)

5.04.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
Meningkatnya layanan penjaminan mutu, pengelolaan tugas belajar serta sertifikasi kompetensi
Persentase ASN yang Memiliki Sertifikasi Kompetensi (Persentase)

Meningkatnya layanan pengembangan kompetensi teknis
Persentase ASN yang Mendapatakan Pengembangan Kompetensi Teknis (Persentase)

2.24.02- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP
Meningkatnya tata kelola arsip dinamis dan statis
Tingkat Ketersediaan Arsip (Persentase)

2.24.03- PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP
Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK
Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip (Persentase)

Meningkatnya tata kelola akuntansi dan pelaporan
Persentase laporan keuangan tepat waktu (Persentase)

5.02.03 - PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
Meningkatnya tata kelola aset daerah
Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap (Persentase)

5.02.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
Meningkatnya upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pendapatan
Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (%)

Meningkatnya penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital
Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital (%)

5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah
Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD (Persentase)
Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)

5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang infrastruktur dan kewilayahan
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)

Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang perekonomian dan SDA
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi

Meningkatnya Kualitas Pengawasan dan Pelaporan
Cakupan Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan (%)

Pembangunan (Persentase)
Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
Meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan
Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah
Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)
Meningkatnya fasilitasi pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah
Persentase Fasilitasi, Pembinaan,

Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah (Persentase)

5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH
Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan
Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan (Persentase)

6.01.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN
Menurunnya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran ataupun proses dan kewenangan
Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1 (Persentase)

6.01.03 - PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI
Meningkatnya Kualitas Pendampingan dan asistensi
Level Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (PK APIP) (Level)

POHON MASALAH
MISI 1: MENINGKATKAN PERTUMBUHAN SEKTOR PEREKONOMIAN YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

- Belum optimalnya kualitas sarana perdagangan dan distribusi barang yang efisien, merata dan terintegrasi
- Belum optimalnya distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting
- Masih rendahnya pelaku usaha yang berorientasi ekspor
- Belum optimalnya pengawasan barang yang beredar dan kepatuhan para pelaku usaha
- Belum optimalnya Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri
- Belum Optimalnya pertumbuhan realisasi pembangunan industri
- Belum optimalnya pemanfaatan informasi industri dalam perkembangan industri

- Pengelolaan perizinan berusaha yang berbasis risiko belum optimal
- Belum optimalnya pengendalian dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal
- Belum optimalnya pengelolaan data dan informasi penanaman modal

- Masih kurangnya sarana pertanian
- Masih kurangnya prasarana pertanian
- Belum optimalnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner
- Belum optimalnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
- Masih rendahnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian

MISI 2 : MEWUJUDKAN SMART GOVERNANCE BERBASIS IT

Belum Optimalnya Pengelolaan Tata Pemerintahan yang Berbasis IT

- Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan digital yang terintegrasi dan responsif dalam mendukung transparansi
- Jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah belum optimal
- Belum optimal nya pengelolaan aplikasi informatika
- Kolaborasi integrasi dan standarisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN) belum optimal
- Keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah belum optimal
- Belum optimalnya pelayanan Publik yang efektif dan efisien
- Belum optimal kualitas layanan pendaftaran penduduk
- Belum optimal kualitas layanan pencatatan sipil
- Belum optimalnya pemanfaatan informasi kependudukan
- Belum optimalnya kualitas profil kependudukan
- Belum optimalnya Pelaksanaan Pemerintahan dan Pelayanan Publik di masing-masing Kecamatan

MISI 3 : PENGUATAN INFRASTUKTUR PENUNJANG TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Belum Optimalnya Pengelolaan Infrastruktur Penunjang untuk kesekahteraan Masyarakat

- Belum optimalnya pembangunan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan tangguh bencana
- Belum Optimalnya kualitas layanan penaganan, pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- Belum Optimalnya pelayanan perlindungan sosial korban bencana
- efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRF Belum optimal
- Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
- Belum optimalnya pengelolaan keanekaragaman hayati
- Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yang belum optimalnya
- Masih kurangnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan
- Masih rendahnya kapasitas MHA dan kearifan lokal pengetahuan tradisional dan hak MHA yang terkait dengan PPLH
- Masih rendahnya kapasitas SDM bidang lingkungan hidup
- Belum Optimalnya Aksesbilitas/Konektivitas Masyarakat Terhadap Infrastruktur Berkualitas
- Belum Optimalnya perlindungan masyarakat terhadap banjir dan akses masyarakat terhadap irigasi
- Belum Optimalnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum
- Belum Optimalnya akses masyarakat terhadap sistem pengelolaan air limbah
- Belum Optimalnya kualitas sistem drainase perkotaan
- Belum Optimalnya kualitas bangunan gedung
- Belum Optimalnya bangunan dan lingkungan yang tertata
- Belum Optimalnya aksesibilitas masyarakat yang nyaman dan aman
- Masih rendahnya kompetensi tenaga konstruksi
- Belum optimalnya pengendalian penyelenggaraan penataan ruang

- Masih rendahnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- Belum optimalnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup
- Belum optimalnya tata kelola persampahan

- Belum terpenuhinya rumah layak huni bagi masyrakat korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah
- Belum optimalnya pengelolaan kualitas kawasan permukiman
- Masih kurangnya kualitas infrastruktur permukiman
- Masih kurangnya PSU permukiman
- Belum optimalnya penyelesaian sengketa tanah garapan
- Belum optimalnya penyelesaian ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan
- Masih kurangnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)
- Belum optimalnya pengelolaan tata kelola tanah ulayat
- Belum optimalnya pengelolaan tanah kosong
- Belum optimalnya tata tertib pertanahan dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah
- Belum optimalnya kualitas layanan transportasi darat
- Belum optimalnya Pengelolaan Perlintasan Kereta api

MISI 4 : PENINGKATAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN DAN PELESTARIAN BUDAYA MELALUI PENGEMBANGAN KOMUNITAS SENI DEMI MENDUKUNG TERWUJUDNYA KOTA WISATA YANG ESTETIK DAN MEMILIKI FUNGSI EKONOMI SERTA MENSEJAHTERAKAN

Belum optimalnya ketahanan sosial budaya dan agama untuk menciptakan masyarakat yang harmonis

- Belum optimalnya ketahanan Sosial kehidupan beragama yang menjunjung nilai toleransi, kerukunan dan moderasi beragama
- Masih kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada,
- Masih kurangnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan Perkada,
- Belum Optimalnya perlindungan terhadap masyarakat
- Masih kurangnya kapasitas SDM PPNS
- Belum Optimalnya layanan pencegahan kebakaran
- Belum Optimalnya penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- Belum optimalnya pengendalian wilayah dalam kondisi aman dan tertib

- Belum optimalnya pengelolaan komunitas seni dalam pelestarian cagar budaya dan adat istiadat
- Peran serta masyarakat dalam pengembangan kebudayaan belum optimal
- Peran serta masyarakat dalam pengembangan kesenian tradisional belum optimal
- Akses masyarakat terhadap informasi sejarah belum optimal
- Belum optimalnya pengelolaan warisan budaya yang dilestarikan
- Belum optimalnya pengelolaan tata kelola museum

MISI 5: Meningkatkan fungsi ekonomi sektor pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat melalui optimalisasi potensi kepariwisataan

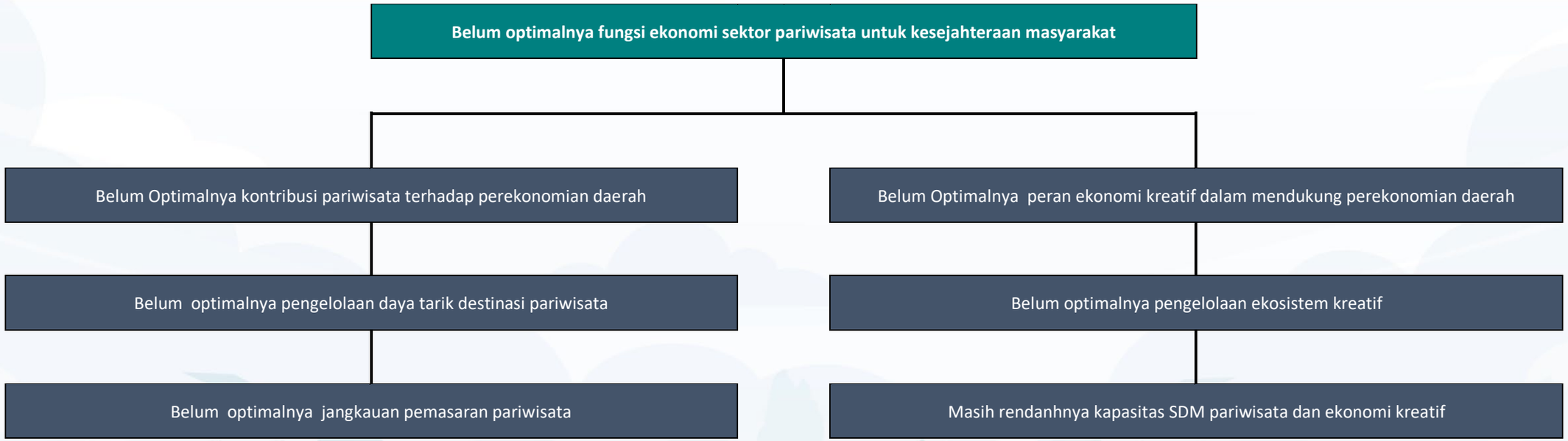

MISI 6: Kota Sawahlunto menuju kota sehat dan destinasi pendidikan utama yang berkarakter di Sumatera Barat

- Masih tingginya kekerasan terhadap perempuan
- Belum optimalnya pembinaan keluarga dalam mendukung kesejahteraan gender, Pemenuhan hak, serta perlindungan perempuan dan anak
- Pemenuhan hak semua anak secara komprehensif belum bejalan secara optimal
- Belum optimalnya pengendalian pencegahan dan penanganan tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran, perkawinan dan perlakuan salah lainnya terhadap anak
- Belum optimalnya pengendalian pertambahan jumlah penduduk
- Belum optimal pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembinaan Keluarga Berencana (KB)
- Belum optimal pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)

MISI 7: Pelaksanaan tata kelola Pemerintah Daerah yang berdaya saing tinggi atas pengukuran indeks kinerja yang ditetapkan oleh Kementerian dan lembaga lainnya

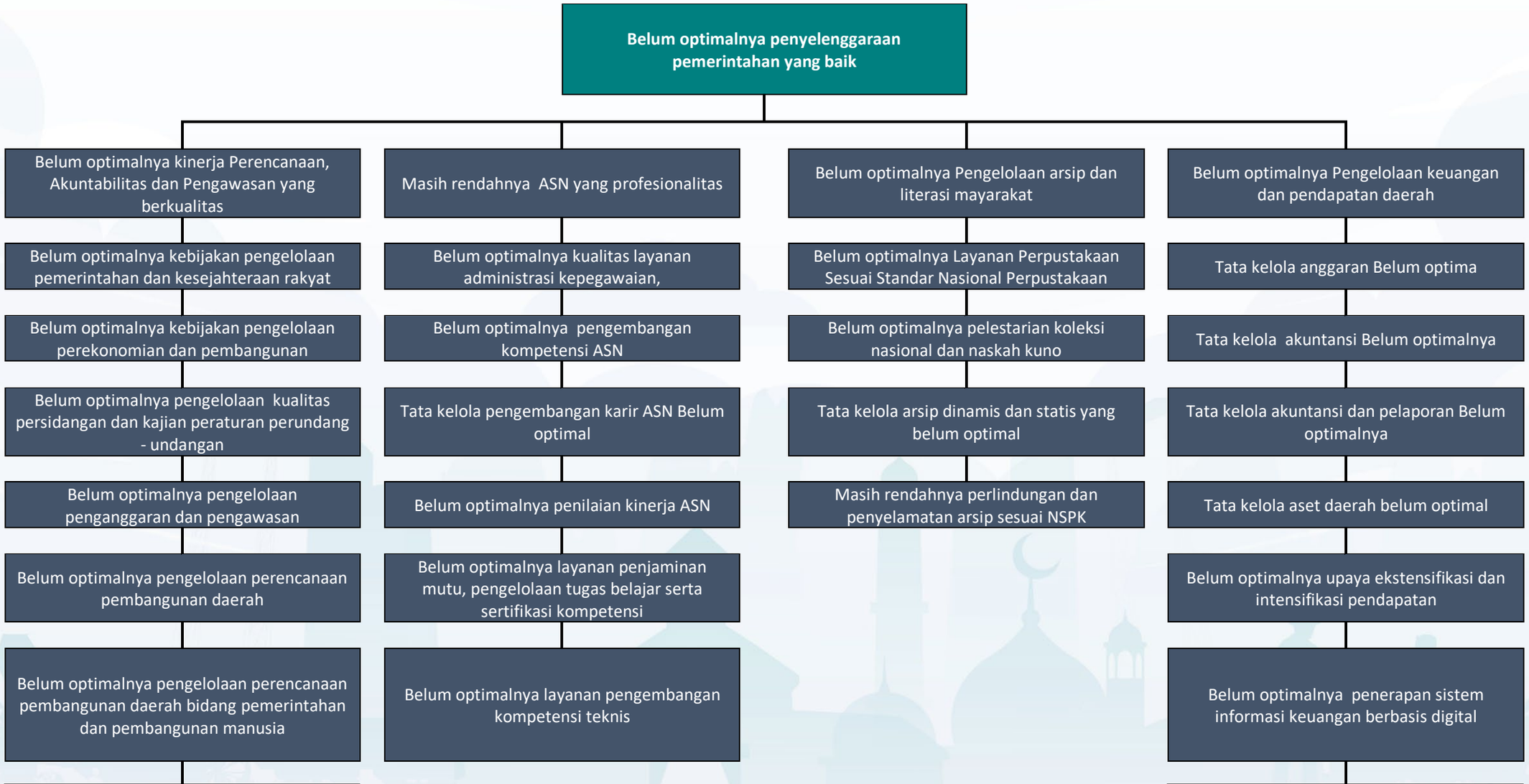

- Belum optimalnya pengelolaan perencanaan pembangunan daerah bidang bidang infrastruktur dan kewilayahan
- Belum optimalnya pengelolaan perencanaan pembangunan daerah bidang perekonomian dan SDA
- Belum optimalnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan
- Belum optimalnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan
- Belum optimalnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah
- Belum optimalnya pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah
- Belum optimalnya pemanfataan inovasi daerah dalam pembangunan
- Belum optimalnya peran pengawasan internal dan eksternal
- Belum optimalnya Pendampingan dan asistensi

- Belum optimalnya Pengawasan dan Pelaporan Pendapatan